

PERATURAN BUPATI AGAM

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026





**BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang dicapai untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Agam serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Agam; dan
- c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan

c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.

- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 17

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.10
1.5 Sistematika Penyusunan.....	I.11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II.1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024	II.64
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.69
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.9
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran pembangunan	IV.1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV.1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov, Sumatera Barat	IV.3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam	IV.5
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.14
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV.14
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi	IV.15
4.2.3 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Agam.....	IV.15
4.2.4 Arah Kebijakan Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).....	IV.22
4.2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam	IV.26
4.2.6 Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional Dan Provinsi	IV.65
4.2.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV.69
4.2.8 Arah Kebijakan Tematik.....	IV.71
4.2.8 Inovasi Daerah.....	IV.75
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD tahun 2026.....	V.1
BAB VI PENUTUP.....	
	VI.1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan pembangunan daerah selama periode 1 (satu) tahun. Ketentuan ini merupakan penguatan dari aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Aturan-aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara teknis, RKPD tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, melalui peningkatan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Lebih lanjut, pembangunan di tingkat daerah diselenggarakan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia

Penyusunan RKPD adalah upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif dan akuntabel. Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029. Secara umum, dokumen RKPD

mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rancangan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.
4. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran tahunan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat.
5. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2026.
6. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, pada prinsipnya prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bapak Benni Warlis dan Bapak Muhammad Iqbal, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2025-2045, serta diselaraskan dengan Prioritas Nasional, dengan titik berat pada penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas.

Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif dan *bottom up - top down*. Dari proses penyusunan tersebut, maka arah pembangunan Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak;
2. Percepatan pencapaian sasaran dan target Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
4. Peningkatan pelayanan pemerintahan, dan
5. Program unggulan yang secara spasial memiliki sebaran yang luas, memiliki daya ungkit yang tinggi untuk percepatan pencapaian sasaran daerah, inovatif, mendukung kebijakan strategis daerah serta berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai

berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD, meliputi:
 - a. Pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan rancangan awal RKPD, meliputi:
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Evaluasi kinerja Tahun 2023;
 - e. Penelaahan kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
 - f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Agam;
 - g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - j. Perumusan program prioritas;
 - k. Forum konsultasi publik; dan
 - l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah.
3. Penyusunan rancangan RKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD, verifikasi sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dimulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten, terlebih dahulu dilaksanakan Forum OPD. Proses dan tahapan pelaksanaan musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

 - a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi

dan nasional, serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;

- b. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten;
- c. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan;
- d. Sinergi antara RKPD Kabupaten Agam dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Nasional; dan
- e. Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD Kabupaten Agam.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

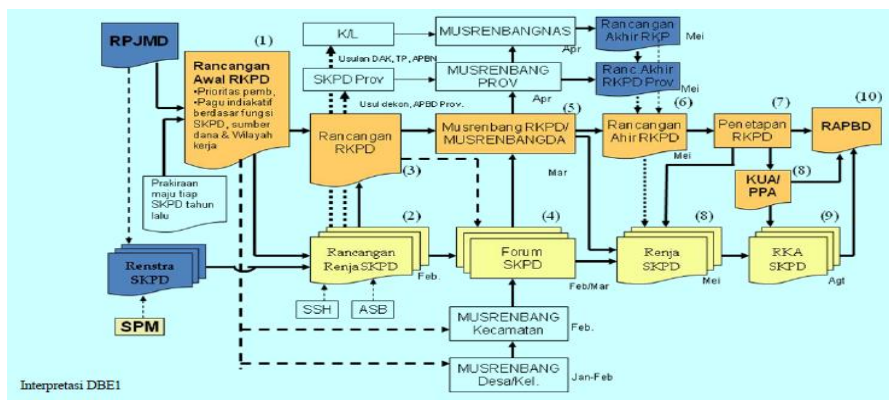
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD. Berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang dilakukan entri pra RKA guna menjamin rekening belanja yang digunakan benar-benar mendukung target capaian program dan kegiatan.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP Nasional dan RKPD Provinsi ditetapkan, dengan harapan terjadinya keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat, provinsi dengan daerah.

Proses penyusunan RKPD sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1
Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk lebih menjamin akuntabilitas, keselarasan dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, secara teknis penyusunan perencanaan Tahun 2026 telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Aplikasi ini telah

mengakomodir hasil musrenbang nagari, input renja OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dilakukan penyelarasan dan penajaman serta verifikasi secara bertahap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan melalui Musrenbang Kecamatan, Fõrum OPD dan Musrenbang Kabupaten.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

- Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30)
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang

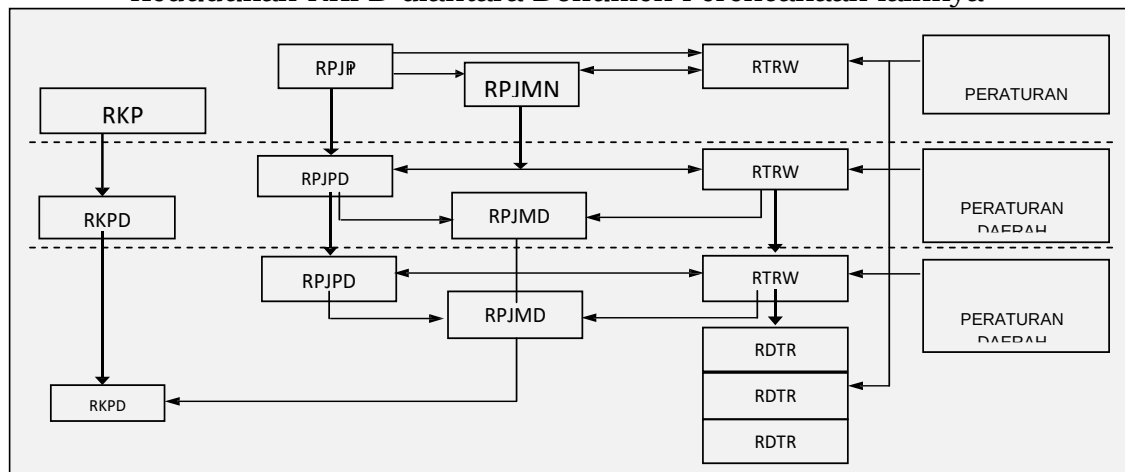
Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Agam Tahun 2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dan perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka penyelarasan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2026 dengan kebijakan pembangunan nasional, maka dilakukan telaahan terhadap arah pembangunan nasional tahun 2026. Di samping itu, telaahan juga dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan provinsi tahun 2026. Telaahan tersebut dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Gambar I.2
Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berpedoman pada RKP dan RKPD Propinsi Sumatera Barat. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun yang dilaksanakan berdasarkan RPJP. RPJP merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisi arah dan tujuan pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

RKPD adalah dokumen perencanaan operasional yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Dalam hubungannya, RKPD dihasilkan dari RPJMD dan menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun. Sedangkan RPJMD dihasilkan dari RPJP dan menjadi pedoman untuk menentukan prioritas pembangunan dalam jangka menengah, yang kemudian disusun dalam RKPD untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, RPJP, RPJMD, dan RKPD memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam upaya mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, menengah, dan operasional di suatu daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Agam Tahun 2026 juga memperhatikan keterkaitan dan konsistensi terhadap arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional, seperti penguatan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan pengembangan SDM unggul serta digitalisasi layanan pemerintahan, sinergi Program dan Kegiatan Strategis, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, reformasi birokrasi, peningkatan daya saing UMKM, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam dan budaya. Sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Agam juga disusun selaras dengan program prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam mempedomani arah kebijakan daerah dan target indikator makro yang sudah dimuat pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen RKPD ini memenuhi prinsip pendekatan perencanaan pembangunan daerah yakni:

1. Pendekatan holistik - tematik, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Agam mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Pendekatan integratif, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Agam dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial, yakni bahwa perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RKPD adalah sebagai acuan bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
- 2.4 Isu Strategis Daerah
 - 2.4.1 Bidang Tata Kelola Pemerintahan
 - 2.4.2 Bidang Ekonomi
 - 2.4.3 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
 - 2.4.4 Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
 - 2.4.5 Bidang Sumber Daya Manusia
 - 2.4.6 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.4.7 Bidang Penerapan Adat dan Pelestarian Budaya

BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1		Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1		Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional 2025
3.1.2		Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
3.1.3		Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Agam
3.2		Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1		Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2		Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.3		Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
4.1.		Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1		Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
4.1.2		Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
4.1.3		Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam
4.2.		Prioritas dan Sasaran Pembangunan
4.2.1		Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
4.2.2		Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
4.2.3		Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam
4.2.4		Sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dengan Prioritas Nasional dan Provinsi
4.2.5		Pokok-pokok Pikiran DPRD
4.2.6		Arah Kebijakan Tematik
4.2.7		Inovasi Pembangunan Daerah
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1		Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFIS

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Basung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, secara astronomis Kabupaten Agam terletak antara 00° 01' 34" - 00° 28' 43" Lintang Selatan dan 99° 46' 39" - 100°32' 50" Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.232,30 Km². Batas-batas wilayah Kabupaten Agam meliputi:

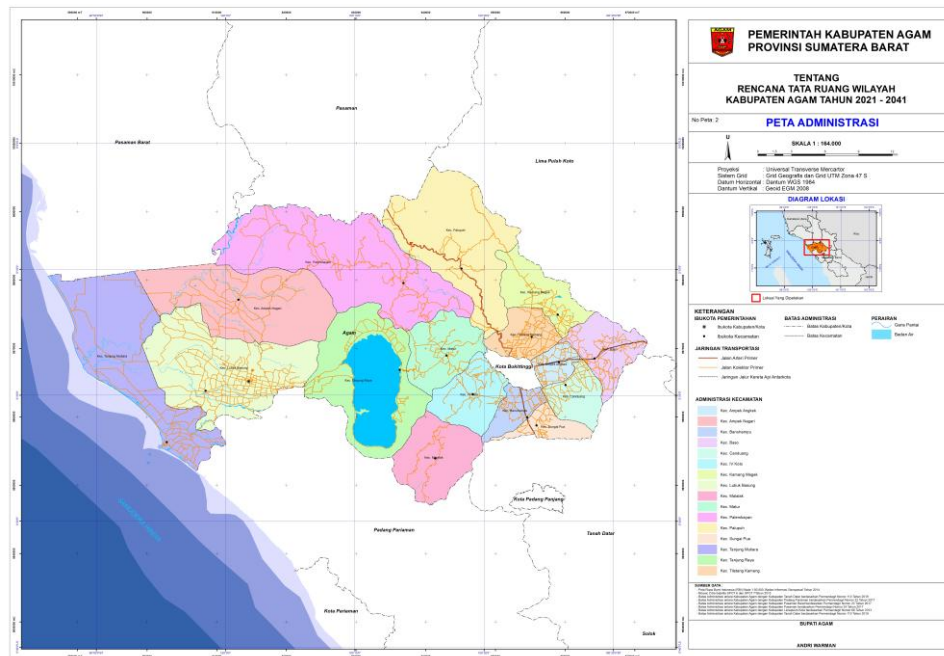
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
- e. bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bukittinggi.

Kabupaten Agam memiliki posisi strategis dan struktur yang unik, yakni terletak dipantai barat Sumatera yang dilalui jalur lintas tengah sumatera dan jalur lintas barat sumatera serta dilalui fider road yaitu jalur yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan lintas timur Sumatera. Kabupaten ini merupakan daerah yang kaya akan potensi wisata dan juga potensi alam seperti pantai laut barat sumatera dan danau maninjau yang mempunyai luas perairan ± 9.950 Ha dengan kedalaman 157 m dari permukaan air rata-rata.

Secara Geografis Kabupaten Agam memiliki tekstur alam yang cukup bervariasi, kawasan sebelah Barat kabupaten Agam merupakan daerah yang datar, landai dan pesisir dengan panjang garis pantai ± 43 km dan memiliki 2 (dua) buah pulau yaitu pulau Tengah dan Pulau Ujung dengan luas masing-masing pulau seluas ± 1 Km². Sedangkan wilayah Agam di bagian Timur merupakan daerah yang berombak terdiri dari pegunungan, perbukitan, lereng dan lembah. Kabupaten Agam memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung

Marapi dengan ketinggian 2.891 m dpl dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 m dpl. Selain itu juga terdapat 3 aliran sungai yang cukup besar, yaitu Batang Antokan, Batang Masang dan Batang Agam.

Gambar II.1
Peta Kabupaten Agam



Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

Secara administratif, Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dan 92 nagari. Kecamatan terluas di Kabupaten Agam adalah Kecamatan Palembayan, sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banuhampu. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam

NO.	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE (%)
1	Tanjung Mutiara	205,73	9,22
2	Lubuk Basung	278,40	12,47
3	Ampek Nagari	268,69	12,04
4	Tanjung Raya	244,03	10,93
5	Matur	93,69	4,20
6	IV Koto	68,72	3,08
7	Malalak	104,49	4,68
8	Banuhampu	28,45	1,27
9	Sungai Pua	44,29	1,98
10	Ampek Angkek	30,66	1,37
11	Canduang	52,29	2,34
12	Baso	70,30	3,15
13	Tilatang Kamang	56,07	2,51

NO.	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE (%)
14	Kamang Magek	99,60	4,46
15	Palembayan	349,81	15,67
16	Palupuh	237,08	10,62
	Jumlah	2.232,30	100

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

Potensi Kabupaten Agam sangat besar untuk mendukung proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya baik dari sisi ekonomi dan keuangan maupun sosial dan budaya. Dari sisi ekonomi, kabupaten Agam dikenal dengan lahannya yang subur, sumberdaya air yang melimpah, serta iklim dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun sehingga sangat cocok untuk pertanian. Berdasarkan potensi tersebut, masyarakat Agam memiliki pertanian khususnya sektor pangan sebagai *passion/brand* Kabupaten Agam. Daerah ini menjadi lumbung pangan, sentra kerajinan dan tujuan wisata. Sementara dari sisi sosial budaya, daerah ini memiliki kearifan lokal yang kuat karena pengaruh adat dan budaya yang masih terjaga dengan baik. Masyarakat Agam memiliki modal sosial-budaya (*socio-cultural capital*) yang jitu dan teruji yaitu kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan nagari beserta anak nagarinya. Kedua kekuatan ini sudah seharusnya dipadukan agar keberlanjutan pembangunan daerah yang berbasis kepada partisipasi masyarakat baik lokal maupun rantau dapat ditingkatkan.

Disamping potensi sosial ekonomi yang besar, Kabupaten Agam masih dihadapkan pada tantangan yang besar dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata, khususnya jika dikaitkan dengan letak dan kedudukan daerah. Wilayah Timur Kabupaten Agam yang memiliki perkembangan lebih cepat tentunya membutuhkan stimulus ekonomi yang besar agar dapat berkembang dengan pesat. Kemudian, wilayah Barat Kabupaten Agam membutuhkan stimulus teknis bagi percepatan pembangunan kawasan. Kondisi daerah yang bervariasi ini menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana yang relatif berbeda, sehingga kebijakan dan strategi pembangunan harus menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan karakteristik kawasan tersebut.

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam penduduk kabupaten Agam tahun 2024 mencapai 533.254 jiwa, yang tersebar

di 16 kecamatan. Jumlah penduduk per kecamatan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan, Kepadatan serta
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

WILAYAH	L	P	Jumlah	Sex Ratio	Kepadatan
Tanjung Mutiara	17.761	16.796	34.557	106	168
Lubuk Basung	42.717	42.376	85.093	101	306
Tanjung Raya	19.279	19.320	38.599	100	158
Matur	9.828	9.869	19.697	100	210
IV koto	13.257	13.450	26.707	99	389
Banuhampu	19.322	19.542	38.864	99	1.366
Ampek Angkek	22.758	22.850	45.608	100	1.488
Baso	18.750	19.083	37.833	98	538
Tilatang Kamang	18.656	19.001	37.657	98	672
Palupuh	7.842	7.580	15.422	103	65
Palembayan	18.011	17.358	35.369	104	101
Sungai Pua	14.189	13.797	27.986	103	632
Ampek Nagari	15.825	15.090	30.915	105	115
Candung	12.886	13.062	25.948	99	496
Kamang Magek	11.030	11.213	22.243	98	223
Malalak	5.339	5.417	10.756	99	103
Agam	267.450	265.804	533.254	101	239

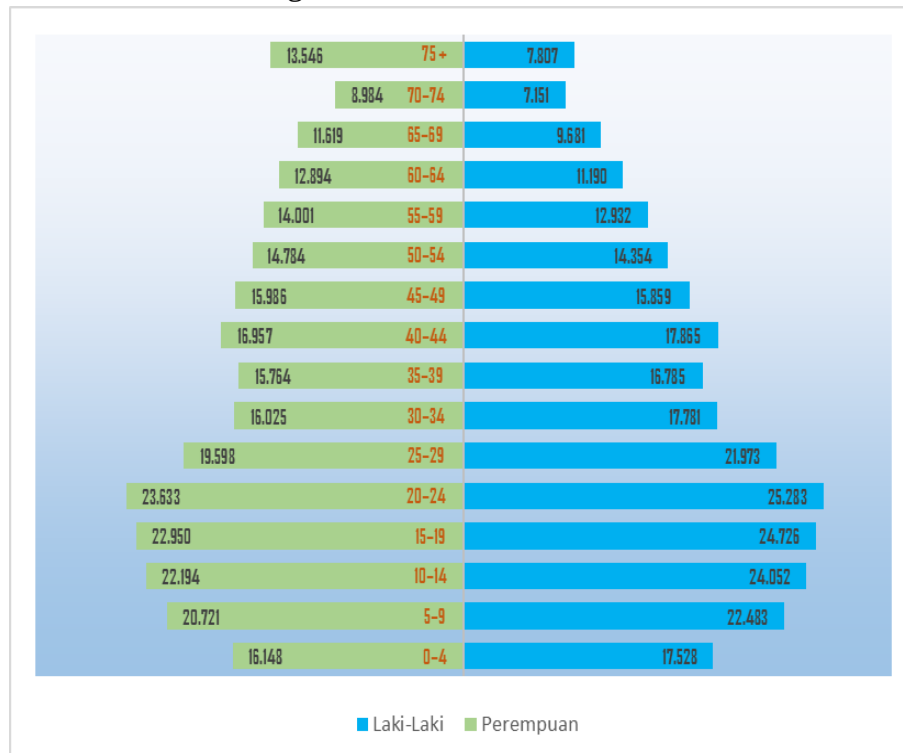
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Agam 2025

Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah penduduk tertinggi sebanyak 85.093 jiwa atau 15,96 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Agam. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Malalak yaitu sebanyak 10.756 jiwa atau 2,02 persen. Kepadatan penduduk antar kecamatan juga cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek dengan tingkat kepadatan sebesar 1.488 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Palupuh dengan tingkat kepadatan sebesar 65 jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh georafis daerah, dimana kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi ada disekitar Kota Bukittinggi yang merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sementara kecamatan dengan kepadatan rendah umumnya berada pada kecamatan yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan.

Penduduk Agam berdasarkan pengelompokan umur, didominasi oleh kelompok usia produktif. Kelompok dengan jumlah terbanyak berada pada kelompok umur 20 hingga 24 tahun dengan jumlah 48.916 jiwa. Sementara kelompok dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70 hingga 74 tahun dengan jumlah 16.135 jiwa. Jika digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, piramida Kabupaten Agam tahun 2024 termasuk tipe *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berusia muda. Dasar piramida yang lebar

menunjukkan jumlah penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang mengecil menunjukkan jumlah penduduk tua yang rendah.

Grafik II.1
Perbandingan Piramida Penduduk Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Agam 2025

Kondisi demografi yang didominasi usia muda ini merupakan tantangan dan sekaligus menjadi modal yang berharga untuk percepatan pembangunan. Kedepan generasi muda akan berperan aktif sebagai pelaku pembangunan, oleh karena itu apabila dipersiapkan secara matang dengan penyediaan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta penyediaan lapangan kerja maka akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas beberapa tahun kedepan (bonus demografi), dan sebaliknya apabila tidak dipersiapkan secara baik maka kedepannya mereka justru akan menjadi beban pembangunan.

2.1.1.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan deskripsi dan karakteristik wilayah, potensi pengembangan kawasan budidaya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pembangunan pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Agam, baik terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan pertanian terbesar adalah sawah dengan

luas lahan ± 26.330 Ha, yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Agam. Disamping itu juga terdapat potensi Lahan pertanian bukan sawah seluas 163.909 ha dengan berbagai komoditi baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Meskipun potensi lahan tersebut menyebar hampir diseluruh wilayah, namun beberapa komoditi diarahkan pengembangannya pada kawasan wilayah tertentu, yaitu :

- a. Sayuran di Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua
- b. Cabe di Kecamatan Matur dan Banuhampu, Sungai Pua
- c. Bawang Merah di Kecamatan Matur, Sungai Pua, Malalak, Banuhampu dan Tilatang Kamang
- d. Jagung di Kecamatan Ampek Nagari, Lubuk Basung, dan Palembayan
- e. Ubi Jalar di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Ampek Angkek dan baso
- f. Ubi kayu di Kecamatan Tilatang Kamang dan palupuh
- g. Kacang tanah di Kecamatan Matur dan tanjung Raya
- h. Jeruk di Kecamatan Palupuh, Baso, Kamang Magek, Matur, Tilatang Kamang dan Sungai Pua
- i. Pisang di Kecamatan IV Koto dan Baso
- j. Manggis di kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Malalak dan Kamang Magek
- k. Durian di Kecamatan Tanjung Raya, Ampek Nagari, Kamang Magek dan Malalak
- l. Alpokat di Kecamatan Matur dan Lubuk Basung
- m. Tanaman Hias di Kecamatan Matur, Candung, Tanjung Raya dan Banuhampu

2. Pengembangan Kawasan Peternakan

Potensi pengembangan kawasan peternakan meliputi :

- a. Pengembangan sentra ternak besar (sapi, kuda dan kerbau) :
 - Sapi Bali di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Palembayan
 - Sapi PO di Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan dan Tiku Selatan
 - Sapi Potong/Klaster Tri Arga di Kecamatan Baso, Ampek Angkek dan Banuhampu
 - Sapi perah di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Sungai Pua dan IV Koto
 - Kerbau di Kecamatan Tilatang Kamang, Palupuh, IV Koto, Tanjung Mutiara, IV Nagari, Matur dan Palembayan .

Sebagai sentra peternakan ternak besar, wilayah tersebut perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (pembibitan), penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH).

b. Pengembangan sentra ternak kecil berupa:

- Kambing potong dan kambing perah di Kecamatan Kamang Magek, Tilatang Kamang, Candung dan Pelupuh

Kawasan sentra peternakan ternak kecil memerlukan prasarana dan sarana pendukung agar dapat berfungsi dengan baik dan mengalami peningkatan populasi dan produksi.

c. Rencana pengembangan sentra peternakan unggas :

- Ayam Potong di Kecamatan IV Nagari, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek angkek dan Kamang Magek
- Ayam Petelur di Kecamatan Baso, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan
- Itik di Kecamatan Kamang Magek , Tilatang Kamang, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara
- Puyuh di Kecamatan Baso, Ampek Angkek, IV Koto dan Malalak

3. Pengembangan Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing. Pengembangan komoditi perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam dan *casiavera*. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Agam meliputi :

- a. Kelapa Sawit di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan, dan Lubuk Basung.
- b. Kelapa di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan dan Lubuk Basung.
- c. Kopi di Kecamatan IV Koto, Candung, Palupuh, dan Palembayan, Matur.
- d. Tembakau di Kecamatan Candung, Palembayan, Matur dan Baso
- e. Tebu di Kecamatan Candung, IV Koto, Banuhampu dan Matur
- f. Gambir di Kecamatan Palupuh.
- g. Karet tersebar di seluruh kecamatan Ampek Nagari dan Palupuh

- h. Aneka Rempah di Kawasan Lubuk Basung, Malalak, Tanjung Raya dan Matur

4. Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari dua kawasan yaitu kawasan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Potensi tersebut meliputi :

- a. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Tanjung Raya sebagai pusat kawasan, serta Lubuk Basung, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, dan Palembayan sebagai *hinterland* kawasan. Saat ini, perikanan budidaya di Kecamatan Tanjung Raya tidak lagi dipusatkan di danau (KJA), namun diarahkan ke perairan di luar danau seperti kolam rakyat, perairan umum lainnya dan mina padi.
- b. Budidaya mina padi di Kecamatan Tanjung Raya, Kamang Magek, dan Tilatang Kamang.
- c. Kawasan sentra budidaya lele di Kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, Lubuk Basung, Palembayan dan Ampek Nagari.
- d. Kawasan pengembangan Gurame di Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan dan Ampek Nagari.
- e. Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Tanjung Raya.
- f. Kawasan budidaya ikan gabus di Tanjung Raya, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara , IV Nagari dan Palembayan
- g. Kaawasan Budidaya ikan Nilem dan Ikan Mas di Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan Palupuh.

5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah karena mempunyai daya ungkit dan daya tarik terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti transportasi dan komunikasi, hotel dan restoran, ekonomi kreatif dan kuliner. Kabupaten Agam mempunyai potensi wisata yang sangat beragam yaitu wisata alam, budaya, minat khusus, wisata kuliner dan wisata bahari.

Kabupaten Agam dan Bukittinggi merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kawasan dan objek wisata yang menjadi fokus pengembangan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari serta didukung oleh Pemerintah Provinsi yaitu :

- a. Ambun Tanai, Puncak Lawang, Linggai, Muko-muko, Sungai Batang (Kawasan Matur - Tanjung Raya).
- b. Lereng Singgalang, Koto Gadang, Sianok (IV Koto dan Banuhampu).
- c. Geopark Ngarai Sianok – Maninjau (IV Koto dan Tanjung Raya).
- d. Agrowisata Koto Tinggi dan Sungai Janiah (Kecamatan Baso).
- e. Tarusan Kamang, Ngalau Kamang, Luak Gadang G. Rang Pisang, Banto Royo (Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek).
- f. Wisata bahari Pasia Tiku dan Bandar Mutiara (Kecamatan Tanjung Mutiara).

2.1.1.4 WILAYAH RAWAN BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Untuk wilayah Kabupaten Agam, potensi kerawanan bencana alam tersebut, meliputi :

a. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Agam, termasuk kedalam kawasan rawan bencana gerakan tanah, dengan kategori tingkat kerawanan rendah hingga tinggi. Secara keseluruhan, kawasan yang termasuk kerawanan gerakan tanah tinggi seluas 35.126,68 hektar atau sekitar 32,94% luas kawasan yang rawan. Kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gerakan tanah paling banyak adalah pada Kecamatan Malalak (6.964,49 hektar), Kecamatan Palembayan (6.574,61 hektar), dan Kecamatan Palupuh (5.666,01 hektar). Pada dasarnya, hampir semua kecamatan memiliki kawasan dengan tingkat kerawanan terhadap gerakan tanah yang tinggi, yakni

Kecamatan Ampek Nagari, Baso, Canduang, IV Koto, Lubuk Basung, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuh, Sungai Pua, dan Tanjung Raya. Seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.3
Resiko Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Resiko Bencana (Ha)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Ampek Nagari	440,33	5.805,57	3.622,47
2	Banuhampu	781,03	1.076,78	-
3	Baso	975,06	3.094,51	175,63
4	Canduang	1.620,69	-	1.659,20
5	IV Koto	836,24	3.088,13	2.394,13
6	Kamang Magek	3.027,57	1.409,45	-
7	Lubuk Basung	993,46	-	2.056,20
8	Malalak	1.854,63	837,87	6.964,49
9	Matur	81,24	4.689,09	2.847,77
10	Palembayan	2.427,02	10.663,77	6.574,61
11	Palupuh	0,41	12.787,04	5.666,01
12	Sungai Pua	816,48	295,55	821,16
13	Tanjung Mutiara	187,76	-	-
14	Tanjung Raya	3.509,38	4.927,98	2.345,03
15	Tilatang Kamang	-	951,00	-
	JUMLAH	21.868,66	49.627,21	35.126,68
	PERSEN	20,51	46,54	32,94

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan pada kawasan sekitar pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10-100 km yang diakibatkan oleh angin, dan gravitasi bulan atau matahari. Wilayah di Kabupaten Agam yang rawan terhadap gelombang pasang adalah kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Tanjung Mutiara.

c. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Agam umumnya terjadi sepanjang aliran sungai seperti Batang Tikau, Batang Sungai Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir dari Batang Simpang Jernih, Simpang Keruh dan Batang Layah. Banjir pada sungai – sungai tersebut di atas pada umumnya terbatas pada morfologi dataran banjir (flood plain). Selain dari lokasi – lokasi tersebut banjir juga terjadi pada daerah

rawa yang terdapat di sekitar dataran pantai yang juga berhubungan dengan aliran sungai di bagian hilir.

Tabel II.4
Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Luas(Ha)	Persen(%)
1	Ampek Nagari	1.656,27	18,25
2	Baso	51,12	0,56
3	Lubuk Basung	1.288,74	14,20
4	Palembayan	452,41	4,98
5	Palupuh	36,30	0,40
6	Tanjung Mutiara	5.539,37	61,03
7	Tilatang Kamang	52,53	0,58
	JUMLAH	9.076,74	100

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

Lokasi banjir di wilayah Kabupaten Agam antara lain:

1. Kecamatan Palembayan Nagari Salareh Aia.
2. Kecamatan Tanjung Raya: Nagari Koto Kaciak, Nagari Koto Gadang
3. Kecamatan Lubuk Basung: Nagari Garagahan, Nagari Manggopoh.
4. Kecamatan Ampek Nagari: Nagari Bawan, Nagari Batu Kambiang, Nagari Sitalang.
5. Kecamatan Tanjung Mutiara: Nagari Tiku V Jorong, Tiku Utara dan Tiku Selatan.
6. Kecamatan Tilatang Kamang: Nagari Koto Tengah.
7. Kecamatan Palupuh: Nagari Pasia Laweh.

d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di daerah administrasi Kabupaten Agam mempunyai dua gunung api aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikat. Kegiatan vulkanisme masa lampau yang ditunjukkan Gunung Marapi adalah keterdapatn produk hasil erupsi disekitarnya yang umumnya bersifat eksplosif, walaupun ada singkapan lava di sekitar puncak.

Berdasarkan keadaan morfologinya, setengah lingkaran bagian timur akan lebih kecil terhadap bahaya aliran yang berasal dari puncak, namun demikian masih akan terancam oleh bahaya tumpahan besar bom gunung api atau bahaya eflata lainnya yang terhempas dari udara (airborne). Daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian dari letusan gunung api di Kabupaten Agam antara lain:

- Letusan Gunung Marapi: Aliran Batang Sariak, Limo Kampung, Tabek, Kepalakoto, Lukok1, Surau baru, Padanglaweh, Lubuk dan Pulungan.
- Letusan Gunung Tandikat: tidak terlalu membahayakan kecuali sekitar Toboh.

Berdasarkan sebaran kawasan yang memiliki resiko kerawanan terhadap bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam, meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan Banuhampu, Baso, Canduang, Ampek Angkek dan Sungai Pua. Pada tanggal 3 Desember 2023, Gunung Marapi Meletus dan menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter (9.800 kaki) ke udaradan berdampak ke daerah sekitar seperti Bukittinggi, Tanah Datar dan Padang Panjang. Kejadian ini mengakibatkan dua puluh empat (24) pendaki tewas dan sebelas orang luka-luka. Per 9 Januari 2024 status Gunung Marapi naik dari level II (waspada) menjadi level III (siaga). Pemerintah mengimbau masyarakat tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi.

Tabel II.5
Kawasan Resiko Bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Luas (Ha)	Persen
1	Banuhampu	118,15	1,65
2	Baso	64,62	0,90
3	Canduang	4.034,76	56,47
4	Ampek Angkek	261,21	3,66
5	Sungai Pua	2.666,33	37,32
	Jumlah	7.145,07	100

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

e. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Bahaya seismisitas gempa merupakan bencana yang terjadi disebabkan oleh terlepasnya energi tektonik kerak bumi. Akibat terpaan dari gelombang seismisitas gempa. Semua kecamatan di Kabupaten Agam memiliki resiko terhadap bencana gempa bumi, berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat resiko kerawanan, yang terbagi atas resiko sedang, tinggi dan sangat tinggi, maka sebagian besar kawasan termasuk resiko sedang.

Kecamatan dengan resiko tinggi dari bencana gempa meliputi Kecamatan Banuhampu, Canduang, Ampek Angkek, IV Koto, Kamang Magek, Matur, Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya dan Tilatang Kamang.

f. Kawasan Rawan Tsunami

Daerah lepas pantai Kabupaten Agam merupakan tempat dimana subduksi tektonik terjadi. Distribusi pusat gempa dilepas pantai menunjukkan potensi gempa yang menyebabkan terjadi tsunami besar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah tidak adanya permodelan gelombang tsunami di pesisir pantainya. Dengan kondisi keterbatasan ini, maka dilakukan penarikan garis tsunami berdasarkan garis kontur elevasi 10 meter dimana kejadian gelombang tsunami terburuk mencapai elevasi ini. Untuk wilayah Kabupaten Agam yang termasuk dalam daerah yang potensial terhempas hantaman tsunami adalah disekitar Subang-subang, Labuhan, Muaraputut, Masang, Ampek Nagari dan Tiku di Kecamatan Tanjung Mutiara.

g. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi merupakan salah satu bagian dari proses perubahan muka air laut setempat yang dalam istilah ilmiah disebut relative sea level change (RSLC). Abrasi atau erosi garis pantai mengubah garis pantai berpindah ke arah daratan. Lawan dari abrasi adalah akresi atau sedimentasi yang menyebabkan garis pantai maju ke arah laut. Proses yang terlibat dalam perubahan garis pantai diakibatkan oleh banyak hal diantaranya kondisi geologi dan morfologi pantai, kondisi ekologi, klimatologi dan oseanologi. Dari semua faktor tersebut di atas pengaruh gelombang dan arus laut merupakan faktor dominan. Gelombang berfungsi menghancurkan sedimen yang menyusun garis pantai dan arus laut mengangkut hasil rombakan searah dengan arah arus laut.

Pada wilayah Kabupaten Agam, wilayah yang terkena abrasi yaitu :

1. Masang (800 meter).
2. Ujungmasang (1.100 meter).
3. Muaraputut (300 meter).
4. Ujung Labung (500 meter).
5. Pasir Panas (200 meter).
6. Pelabuhan Tiku (100 meter).

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN EKONOMI

a) Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa dari berbagai sektor lapangan usaha yang dihasilkan

suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Agam ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) tahun 2024 mencapai 27,97 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2023 sebesar 26,16 triliun rupiah. Sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Agam tahun 2024 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 7,90 triliun atau secara persentase mencapai 28,26 persen. Selanjutnya diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 5,52 triliun (19,76 persen), sektor Industri Pengolahan dengan nilai 2,89 triliun (10,33 persen) dan sektor Konstruksi dengan nilai 2,53 triliun (9,07 persen). Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.6 :
Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHB (miliar)

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2023	Nilai PDRB (Miliar)	2024	Pertumbuhan (%)
	Nilai PDRB (Miliar)		Distribusi (%)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.378,2	7.906,6	28,26	7,16
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.970,4	6.459,5	23,09	8,19
Kehutanan dan Penebangan Kayu	149,8	157,0	0,56	4,75
Perikanan	1.257,9	1.290,2	4,61	2,57
Pertambangan dan Penggalian	949,6	999,7	3,57	5,27
Industri Pengolahan	2.677,7	2.891,0	10,33	7,97
Pengadaan Listrik dan Gas	5,9	6,2	0,02	5,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,4	0,05	11,36
Konstruksi	2.439,3	2.537,6	9,07	4,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.146,1	5.528,5	19,76	7,43
Transportasi dan Pergudangan	1.745,7	1.858,8	6,64	6,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	237,4	248,2	0,89	4,53
Informasi dan Komunikasi	1.581,4	1.682,4	6,01	6,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	315,8	336,0	1,20	6,41
Real Estate	513,4	565,3	2,02	10,11
Jasa Perusahaan	9,4	9,9	0,04	5,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.174,1	1.279,5	4,57	8,98
Jasa Pendidikan	1.405,6	1.477,0	5,28	5,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	349,3	380,5	1,36	8,94
Jasa lainnya	221,7	254,9	0,91	15,01
Produk Domestik Regional Bruto	26.162	27.975	100,00	6,93

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 mencapai 27,97 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2023 sebesar 16,27 triliun rupiah. Sektor lapangan usaha yang bertumbuh cukup tinggi di tahun 2024 adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan mencapai 11,06 persen dibanding tahun sebelumnya, diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan 8,90 persen dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan

pertumbuhan 8,49 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar pembentuk nilai PDRB hanya tumbuh 1,79 persen di tahun 2024. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 4,12 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit perlambatan dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,52 persen. Hal ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor lapangan usaha yang berkontribusi dominan, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi. Lebih rinci perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disajikan pada tabel dibawah ini :

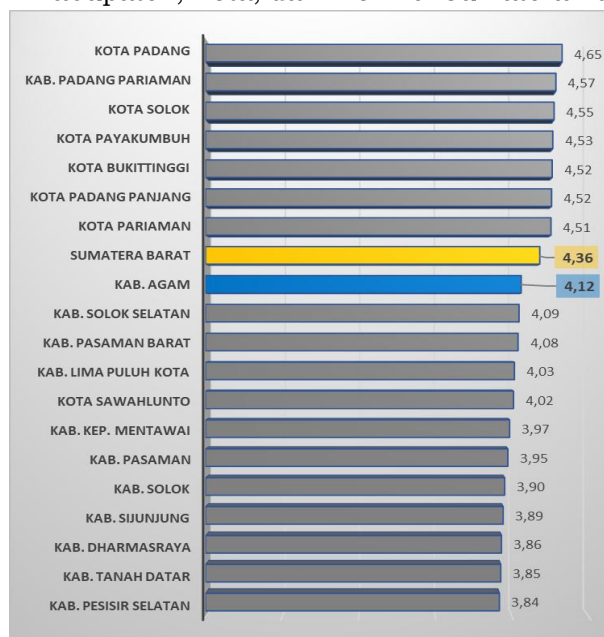
Tabel II.7 :
Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam ADHK (miliar)

SEKTOR LAPANGAN USAHA	2023		2024	
	Nilai PDRB (Miliar)	Nilai PDRB (Miliar)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.738,0	4.823,0	28,46	1,79
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.013,9	4.076,3	24,05	1,55
Kehutanan dan Penebangan Kayu	73,2	74,7	0,44	2,02
Perikanan	650,8	672,0	3,97	3,26
Pertambangan dan Penggalian	554,8	579,8	3,42	4,51
Industri Pengolahan	1.843,4	1.906,7	11,25	3,43
Pengadaan Listrik dan Gas	3,9	4,1	0,02	5,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,0	8,7	0,05	8,49
Konstruksi	1.218,4	1.256,0	7,41	3,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.189,2	3.350,4	19,77	5,05
Transportasi dan Pergudangan	1.079,1	1.161,2	6,85	7,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,1	124,9	0,74	4,82
Informasi dan Komunikasi	1.319,9	1.400,3	8,26	6,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	200,3	212,0	1,25	5,87
Real Estate	311,1	327,7	1,93	5,33
Jasa Perusahaan	6,3	6,5	0,04	3,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565,9	616,3	3,64	8,90
Jasa Pendidikan	778,5	802,5	4,74	3,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,9	221,0	1,30	5,81
Jasa lainnya	131,1	145,6	0,86	11,06
Produk Domestik Regional Bruto	16.276,0	16.946,6	100	4,12

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten se Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam di tahun 2024 menempati urutan ke-8 setelah kota Pariaman. Laju pertumbuhan ekonomi Agam juga berada dibawah rata-rata provinsi dimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 4,36 persen. Persandingan LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

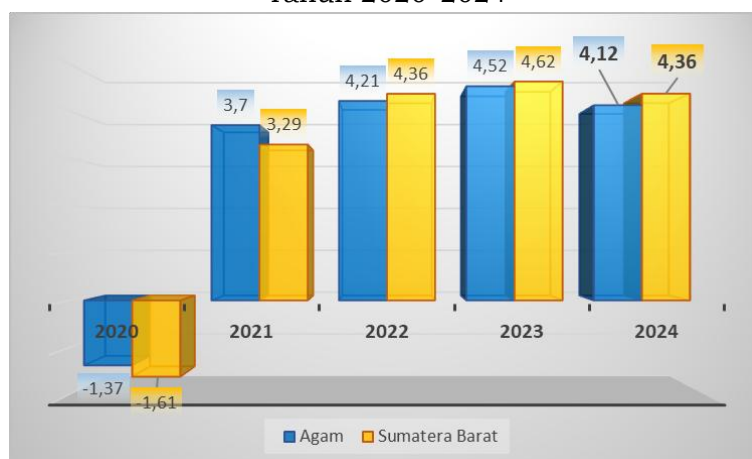
Grafik II.2 : LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Selanjutnya grafik dibawah memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2021-2024. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif sama dengan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Grafik II.3 : Persandingan LPE Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

b) PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di

pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2024 mencapai 50,02 juta rupiah meningkat dari 47,41 juta. Grafik II.4 dibawah ini menyajikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2021-2024.

Grafik II.4 : PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2020 - 2024 (ADHB)



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

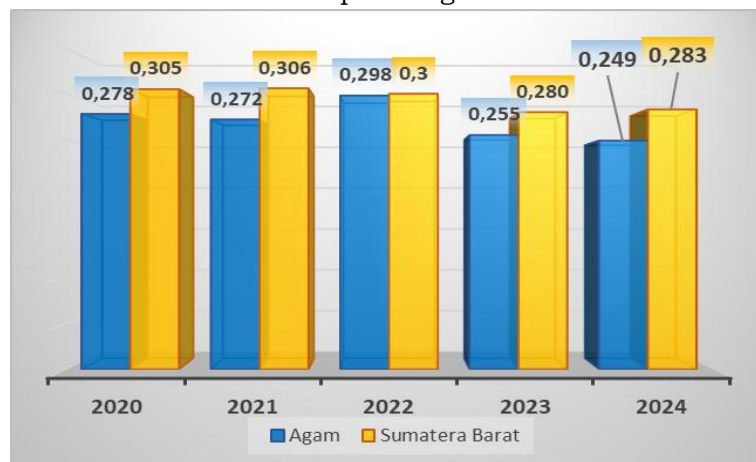
Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat, nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat. PDRB perkapita tahun 2024 PDRB perkapita Sumatera Barat mencapai 57,05 juta rupiah.

c) Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Gini Ratio* dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (*Gini Ratio* 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (*Gini Ratio* 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (*Gini Ratio* 0,20-0,35).

Pada tahun 2024 ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,255 ditahun 2023 menjadi 0,249 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami peningkatan dari 0,280 ditahun 2023 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Perkembangan Gini Rasio tahun 2021-2024 disajikan pada berikut.

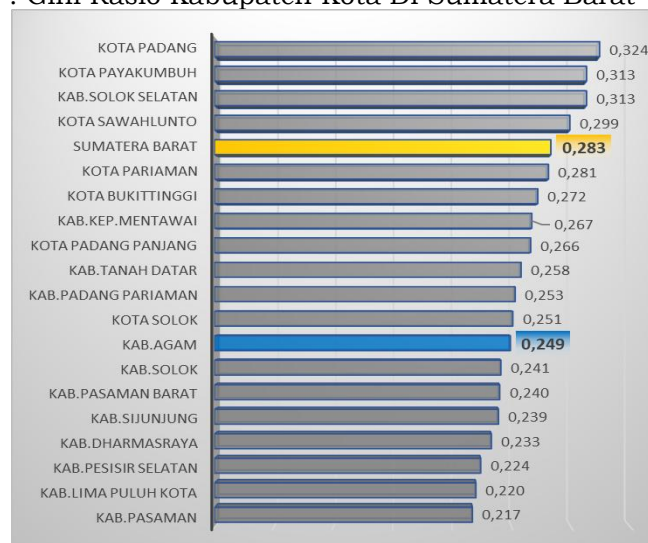
Grafik II.5. Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sumatera Barat, angka gini rasio kabupaten Agam relatif rendah, berada pada urutan ke 8 terendah, dan berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 0,283. Data Gini Ratio Kabupaten Agam dibanding kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam grafik berikut :

Grafik II.6 : Gini Rasio Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Tahun 2024

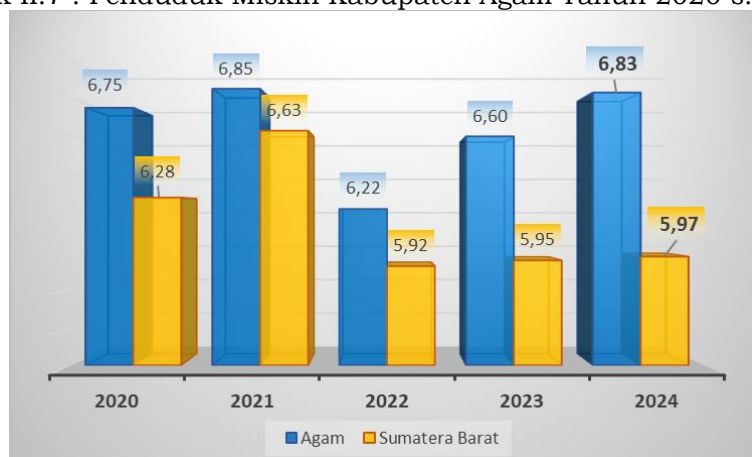


Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

d) Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2024, BPS menetapkan garis kemiskinan kabupaten Agam sebesar Rp. 558.963. Dengan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin kabupaten Agam 2024 tercatat sebanyak 34,82 ribu jiwa, meningkat dari tahun 2023 sebesar 33,41 ribu jiwa. Perkembangan penduduk miskin dikabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut.

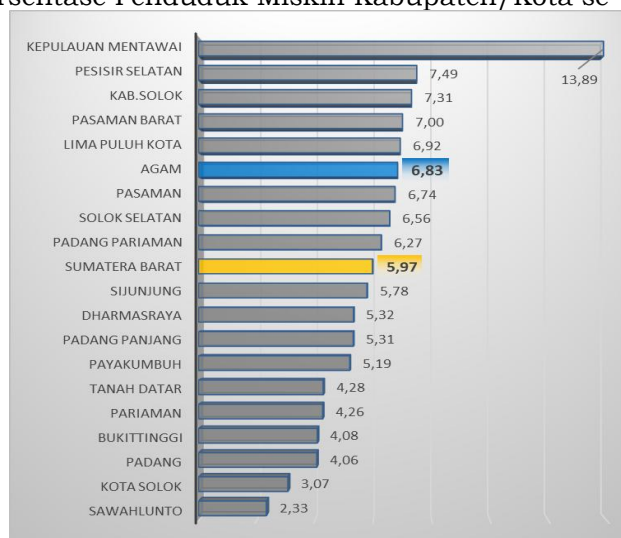
Grafik II.7 : Penduduk Miskin Kabupaten Agam Tahun 2020 s.d 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Secara persentase jumlah penduduk miskin mencapai 6,83 persen dari total penduduk Agam, meningkat dari tahun 2023 sebesar 6,60 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat angka kemiskinan Agam relatif tinggi. Secara rata-rata, angka kemiskinan Sumatera Barat tercatat sebesar 5,97 persen.

Grafik II.8 :Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Lebih lanjut, untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Agam pada tahun 2024 sebesar 0,50, turun dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,75. Pada tahun 2024 capaian indeks keparahan kemiskinan turun dibanding tahun sebelumnya dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 0,07 dan capaian 2023 sebesar 0,13. Artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil.

Grafik II.9 : Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Agam

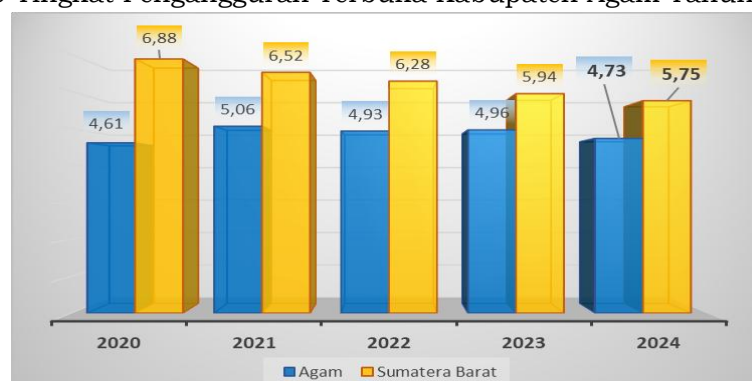


Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

e) Tingkat Pengangguran

Pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Agam pada tahun 2024 mencapai angka 4,73 persen. Artinya terdapat 4,73 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. TPT Agam tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,96 persen. Sementara di tingkat provinsi tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,94 persen menjadi 5,75 persen, seperti disajikan pada grafik berikut.

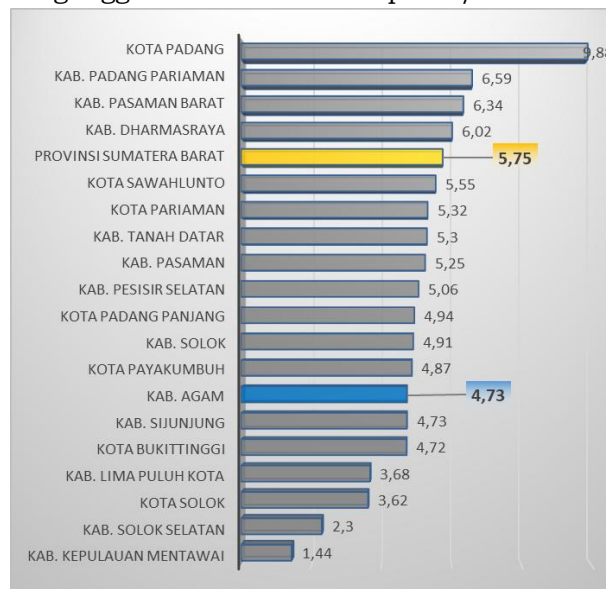
Grafik II.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tingkat pengangguran kabupaten Agam cukup rendah. Pengangguran paling rendah di Sumatera Barat terjadi di kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 1,44 persen. Grafik berikut menyajikan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik II.11
Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

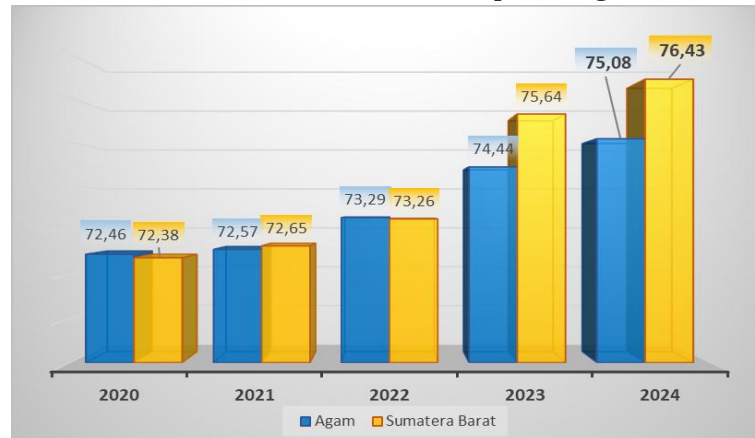
a) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 menggunakan metode baru dengan memakai variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita.

IPM Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2024 IPM Kabupaten Agam sebesar 75,08, meningkat dari angka 72,46 ditahun 2020. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang angka indeks 70 – 80. Semakin tingginya angka IPM menggambarkan kebijakan terkait

pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat, IPM Agam relatif rendah dimana IPM Sumatera Barat sebesar 76,43. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.12 : Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



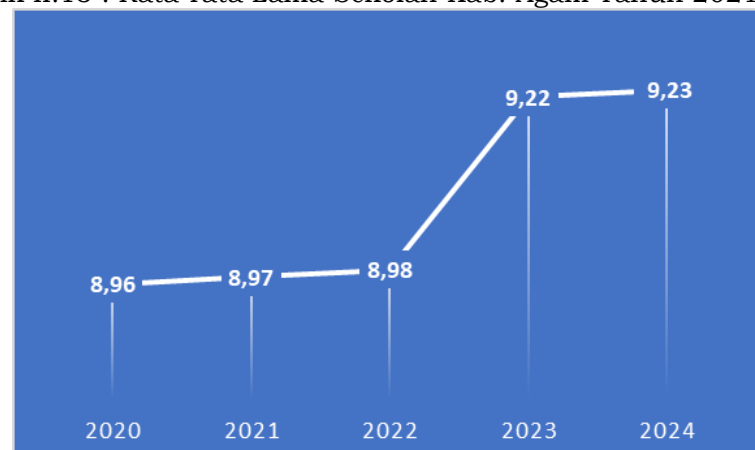
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Selanjutnya diuraikan capaian dan perkembangan indikator pembentuk IPM sebagai berikut :

1) Rata-rata lama sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah atau *years of schooling* digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Agam pada kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah kabupaten Agam mencapai 9,23 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Agam disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.13 : Rata-rata Lama Sekolah Kab. Agam Tahun 2021-2024

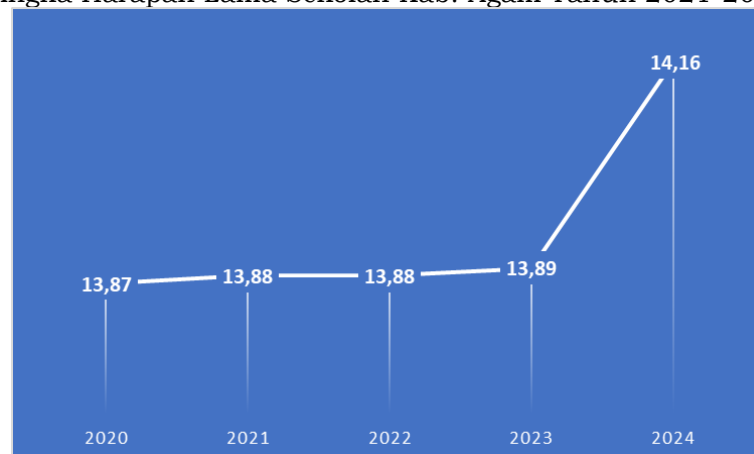


Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun keatas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Agam pada tahun 2024 adalah sebesar 14,16 tahun, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 13,89 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan diikuti oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,16 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Diploma III. Faktor-faktor yang mempengaruhi harapan lama sekolah meliputi berbagai sektor, baik kondisi ekonomi masyarakat, akses dan kualitas layanan pendidikan, maupun dukungan kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu upaya peningkatan harapan lama sekolah seiring sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan.

Grafik II.14.
Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Agam Tahun 2021-2024

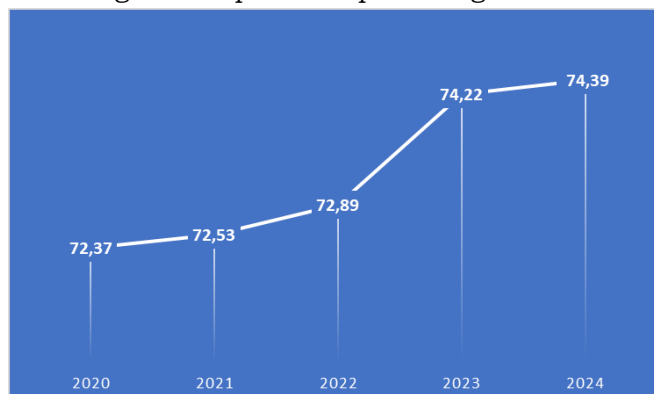


Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

3) Angka Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan usia yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, baik akses maupun kualitas pelayanan kesehatan. Sub Indikator penghitungan angka harapan hidup adalah menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode tertentu. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Grafik II.15 : Angka Harapan Hidup Kab. Agam Tahun 2021-2024



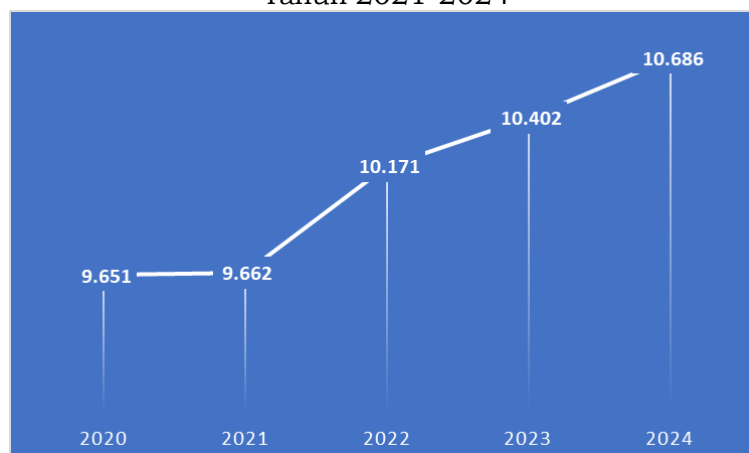
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Berdasarkan grafik diatas terlihat Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Agam meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 AHH mencapai 74,39 tahun, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 74,22 tahun. Peningkatan AHH ini mencerminkan adanya perbaikan kesehatan masyarakat, seperti akses layanan kesehatan yang lebih baik, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, berkurangnya penyakit menular dan tidak menular dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

4) Pengeluaran per Kapita

Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Grafik II.16
Pengeluaran Per Kapita pertahun Penduduk Kabupaten Agam
Tahun 2021-2024

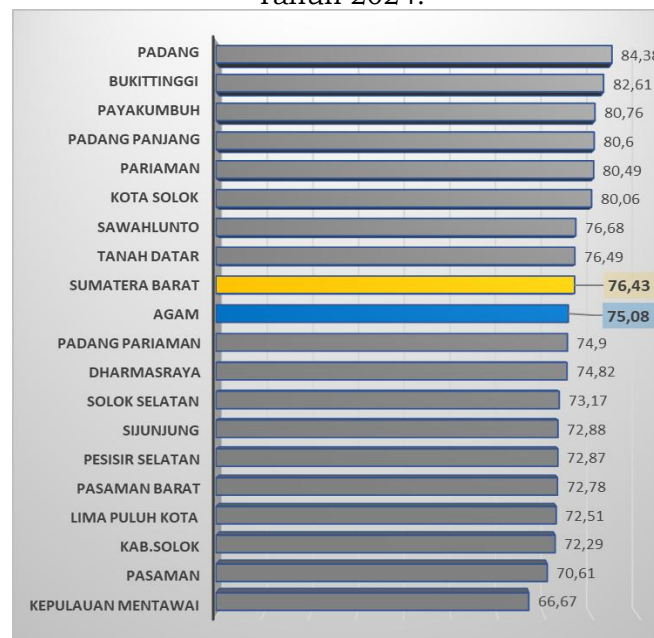


Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Pengeluaran perkapita masyarakat Agam mengalami lonjakan dari 9,65 juta pada tahun 2020 menjadi 10,68 juta rupiah ditahun 2024. Hal ini memberikan sinyal positif setelah terjadinya resesi ekonomi ditahun 2021.

Sebagai suatu indikator makro daerah, IPM digunakan untuk melihat keterbandingannya antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pencapaian IPM Kabupaten Agam tahun 2024 berada pada urutan ke-9 dibandingkan kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten saja, capaian IPM Agam merupakan ke-2 tertinggi di antara seluruh Kabupaten di Sumatera Barat.

Grafik II.17.
Perbandingan IPM Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024.



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Berikut disajikan capaian IPM dan indikator pembentuk IPM periode 2020 hingga 2024 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Tabel II.8
Perkembangan IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024
[Metode Baru : Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data SP2020)

Wilayah	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran (Ribu rupiah/orang/tahun)		IPM	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sumatera Barat	74,14	74,37	14,11	14,3	9,28	9,44	11.380	11.718	75,64	76,43
Kepulauan Mentawai	71,06	71,21	12,9	12,91	7,76	8,03	6.891	7.192	65,79	66,67
Pesisir Selatan	73,27	73,44	13,36	13,37	8,58	8,81	9.953	10.211	72,24	72,87
Kab.Solok	72,31	72,52	13,55	13,56	7,9	7,91	10.717	10.988	71,92	72,29
Sijunjung	72,59	72,89	12,72	12,76	8,57	8,62	11.018	11.395	72,3	72,88
Tanah Datar	74,19	74,26	14,78	15,05	9,02	9,29	10.905	11.223	75,57	76,49
Padang Pariaman	73,77	73,88	14,19	14,2	8,41	8,42	11.432	11.756	74,54	74,9
Agam	74,22	74,39	13,89	14,16	9,22	9,23	10.402	10.686	74,44	75,08
Lima Puluh Kota	73,25	73,42	13,41	13,42	8,12	8,13	10.285	10.648	72,05	72,51
Pasaman	72,04	72,36	13,25	13,52	8,13	8,14	8.908	9.194	69,85	70,61
Solok Selatan	72,22	72,5	12,8	13,07	8,69	8,85	10.884	11.240	72,24	73,17
Dharmasraya	74,04	74,25	12,68	12,89	8,71	8,98	11.901	12.254	73,87	74,82
Pasaman Barat	72,44	72,75	13,7	13,72	8,81	8,99	9.538	9.888	72,03	72,78
Padang	74,94	75,2	16,56	16,57	11,62	11,63	15.089	15.458	83,98	84,38
Kota Solok	74,56	74,85	14,36	14,37	11,36	11,37	12.709	12.995	79,66	80,06
Sawahlunto	73,79	74,12	13,69	13,86	10,44	10,53	10.829	11.187	75,91	76,68
Padang Panjang	74,24	74,48	15,29	15,47	11,94	12	11.310	11.840	79,76	80,6
Bukittinggi	75,33	75,62	15,01	15,28	11,64	11,65	13.859	14.297	81,88	82,61
Payakumbuh	74,77	75,08	14,3	14,57	10,88	10,89	13.978	14.260	80,14	80,76
Pariaman	74,2	74,37	14,79	14,8	10,79	11,06	13.355	13.784	79,76	80,49

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Berdasarkan tabel diatas, jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM, maka indikator ekonomi kabupaten Agam dirasa masih perlu perhatian khusus untuk lebih di tingkatkan, sedangkan capaian indikator kesehatan dan pendidikan telah cukup bagus jika dibandingkan Kabupaten di Sumatera Barat saat ini.

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

a) Seni Budaya

Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 92 Nagari, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menunjukkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus merupakan potensi yang dimiliki masyarakat. Capaian indikator sasaran terkait pembangunan adat, budaya, dan seni sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.9
Capaian Indikator Seni dan Budaya Kabupaten Agam

NO	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase nagari yang memiliki pedoman adat salingka nagari	72	72,15	75	100	100
3	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	50	72,15	75	100	94,55
4	Persentase Lembaga Adat (KAN, Bundo Kanduang) yang aktif	100	99	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam

Perkembangan kinerja urusan wajib kebudayaan menunjukan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini merupakan potensi yang besar untuk mendukung sektor seni dan kebudayaan. Hal yang menjadi perhatian terkait cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan adalah masih kurangnya tenaga ahli cagar budaya. Khusus untuk indikator persentase Lembaga Adat (KAN, Bundo Kanduang) yang aktif, dapat dijelaskan bahwa secara kelembagaan KAN dan bundo kanduang aktif seluruhnya, namun demikian ada beberapa KAN yang kepengurusannya belum memenuhi ketentuan yakni bahwa KAN harus di ketuai oleh penghulu (datuak) sehingga dianggap tidak aktif. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan di tengah masyarakat ini dilakukan dengan strategi unggulan gerakan nagari madani yang salah satu indikatornya adalah pengembangan adat dan budaya berbasis nagari.

b) Olahraga

Di bidang olahraga, pengembangan olahraga prestasi tetap giat dilaksanakan, meskipun terbatasnya penyelenggaraan event olahraga baik provinsi maupun nasional. Beberapa capaian indikator dibidang pemuda dan olahraga disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.10
Capaian Indikator Seni dan Budaya Kabupaten Agam

NO	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif.	40	40	91	91	92,79
2.	Jumlah Cabang olahraga berprestasi yang dibina.	38	38	38	46	47

Sumber : Dinas Parpora Agam 2024

2.1.3 ASPEK LAYANAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, urusan Kongkruen yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah meliputi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 (delapan belas) urusan, dan urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan sesuai masing-masing daerah meliputi 8 (delapan) urusan. Evaluasi pelaksanaan urusan Konkuren di Kabupaten Agam sebagaimana pembahasan berikut :

2.1.3.1 LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a) Urusan Pendidikan.

1) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah yang tepat waktu. APK dan APM pada jenjang pendidikan SLTP/MTSN dan pada jenjang SD/MI terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.11

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Agam

Tahun	PAUD	Tingkat SD		Tingkat SLTP	
	APK	APK	APM	APK	APM
2020	79,61	107,22	98,22	94,42	79,73
2021	62,34	108,99	98,22	95,6	79,70
2022	63,34	96,34	88,27	100,97	79,02
2023	65,25	97,30	88,56	102,09	83,17
2024	60,05	97,19	88,38	101,56	78,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 2024

Capaian APK di bawah 100 artinya masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum menempuh jenjang pendidikan yang sesuai. Angka Partisipasi Kasar pada pendidikan setingkat PAUD di kabupaten Agam masih sangat rendah, dimana pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 60,05 persen. Tercatat baru 10.873 anak yang telah mengikuti jenjang TK/PAUD sederajat. Rendahnya capaian ini disebabkan disebagian wilayah dikabupaten Agam masih terdapat rentang kendali akses sekolah yang terlalu jauh dikarenakan belum tersedianya lembaga satuan PAUD serta masih kurang pedulinya masyarakat terhadap arti penting pendidikan usia dini. APK setingkat SD/MI dan Paket A terealisasi 97,19 persen, sedikit turun dibanding capaian tahun 2023. Terdapat 52.607 anak usia SD yang bersekolah di kabupaten Agam, dan 1.462 anak usia SD yang bersekolah kabupaten atau kota tetangga. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka APK

mencapai 101,56 persen. Artinya terdapat siswa pada jenjang SMP/MTs sederajat dikabupaten Agam yang merupakan penduduk diluar Agam.

Sedangkan capaian APM berada di bawah 100, menggambarkan masih terdapat anak yang bersekolah pada jenjang tertentu yang tidak tepat usia seharusnya pada jenjang tersebut. Angka APM SD/MI terealisasi 88,38 persen. Hal ini menggambarkan masih banyaknya anak usia dibawah 7 tahun dan di atas 12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Sementara APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan Paket B tahun 2024 sebesar 78,52 persen yang juga menggambarkan masih banyaknya anak usia dibawah 13 tahun dan di atas 15 tahun yang duduk di bangku sekolah menengah pertama.

2) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok usia sekolah yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi APTS menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, sebaliknya jika APTS semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan APTS Kabupaten Agam pada tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.12 : Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Agam Tahun 2021-2024

No	Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI (%)	0,05	0,03	0,02	0,03	0,02
2	SMP/MTs (%)	0,017	0,02	0,03	0,03	0,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 2024

Meskipun secara ideal kondisi yang diinginkan adalah tidak adanya angka putus sekolah, namun berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan dinilai telah mampu menurunkan APTS. Angka Putus Sekolah tingkat pendidikan dasar pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,02 persen. Sementara APTS pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2023 sebesar 0,05 persen. Faktor penyebab terjadinya putus sekolah diantaranya adalah kurangnya motivasi dan kesadaran terhadap arti pentingnya pendidikan serta kondisi lingkungan sosial masyarakat.

3) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikator standar mutu pendidikan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60, Peraturan Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87, serta SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87/U/2002. Adapun penilaian akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) yang mencakup berbagai aspek seperti standar

kelayakan sarana prasarana, kualitas tenaga pengajar dan aspek kinerja lainnya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan kriteria tersebut berikut disajikan persentase akreditasi sekolah di Kabupaten Agam.

Tabel II.13 : Indikator Kinerja terkait Akreditasi Sekolah

Akreditasi	2021	2022	2023	2024
Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	n/a	81	90,5	77,23
Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	n/a	99	99,5	80
Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	88,15	87,52	87,42	87,3
Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	81,81	83,23	67	85,29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 2024
Keterangan : (n/a = Data atau nilai tidak tersedia)

Persentase Lembaga satuan PAUD yang terakreditasi mencapai 77,23 persen dan PKBM dan SKB yang terakreditasi mencapai 80 persen. Capaian tahun 2024 untuk kedua indikator tersebut turun dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada tingkat SD yang terakreditasi Minimal B mencapai 87,3 persen dan persentase SMP yang terakreditasi Minimal B ditahun 2024 menjadi 85,29 persen. Beberapa kendala terkait capaian akreditasi sekolah adalah terbatasnya kuota yang di keluarkan Badan Akreditasi Nasional, belum terpenuhinya syarat pengajuan perbaikan nilai akreditasi dan terdapatnya sekolah baru yang belum memenuhi syarat untuk pengajuan akreditasi. Akreditasi sekolah dijadikan sebagai dasar dalam penetapan penerima BOP sehingga aspek-aspek penilaian akreditasi perlu ditingkatkan.

4) **Persentase Anak Yang Telah Mendapatkan Layanan Sesuai SPM Pendidikan**

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, capaian persentase anak yang terlayani sesuai SPM pendidikan pada masing-masing tingkat sudah sangat baik, dimana tingkat capaiannya 100 persen. Tingginya capaian tersebut didukung oleh adanya Bantuan Operasional Sekolah yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan belajar siswa, disamping anggaran APBD.

Tabel II.14 :
Persentase Anak Yang Telah Mendapatkan Layanan Sesuai SPM Pendidikan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	97,72	100	100	99,60
Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100,00
Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	63,24	100	100	99,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 2024

b) **Urusan Kesehatan**

1) **Angka Kematian Ibu dan Anak**

Angka kematian ibu pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya dari 1,66 menjadi 1,66 per 1000 kelahiran hidup atau sebanyak 11 orang ibu

melahirkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kematian ibu adalah terdapatnya faktor resiko (penyakit penyerta) seperti komplikasi jantung, diabet dan ginjal, ibu dengan hipertiroid dengan hipertensi. Sementara untuk angka kematian bayi yang berumur dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran berkurang dari 13,48 menjadi 12,56. Kasus kematian bayi diantaranya disebabkan oleh terdapatnya bayi dengan kelainan kepala (ancepali) dan bayi dengan kelaianan jantung bawaan yang tidak terdeteksi dini. Data kematian ibu dan bayi dari tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.15
Angka Kematian Ibu dan Anak

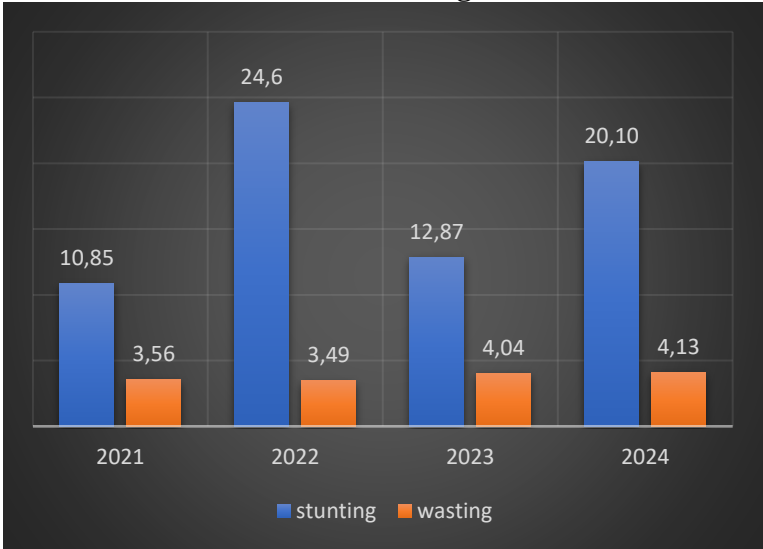
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	9439	8818	6667	6602	5811
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.	70	70	72	89	73
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,42	7,94	10,80	13,48	12,56
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	9	21	7	11	11
Angka Kematian Ibu per 1,000 kelahiran hidup	0,75	0,95	2,38	1,66	1,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Agam 2024

2) Status Gizi Masyarakat

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak tersebut disebut gizi baik. Apabila kondisinya berada sedikit di bawah standar maka disebut gizi kurang, sementara apabila jauh di bawah standar maka disebut gizi buruk. Kondisi kekurangan gizi pada balita tentunya akan berdampak pada menurunnya kemampuan intelegensia dan balita pendek (*stunting*). Persentase Balita Stunting Kabupaten Agam pada tahun 2024 meningkat dari 12,87 persen menjadi 20,10 persen. Secara jumlah meningkat dari 1.716 jiwa menjadi 2.238 jiwa. Masih tingginya angka stunting disebabkan belum optimalnya pemantauan pertumbuhan di Posyandu dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi masalah stunting. Sementara balita wasting atau kondisi anak yang total berat badannya jauh di bawah standar tercatat sebesar 4,04 persen atau sebanyak 1.317 jiwa. Perkembangan persentase balita stunting dan wasting di Kabupaten Agam periode tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut berikut.

Grafik II.18
Persentase Balita Stunting 2021 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2024

3) Akses Layanan Kesehatan yang bermutu

Ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan harus dipenuhi bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan dan miskin. Layanan kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, tercatat sebanyak 198 dokter yang memberikan layanannya di Agam. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit terdapat 2 unit, yakni RSUD Lubuk Basung dan RSIA yang dimiliki pihak swasta. Sementara jumlah puskesmas sebanyak 23 unit dan Pustu sebanyak 145 unit yang tersebar dikecamatan Agam. Berikut disajikan data terkait layanan kesehatan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II.16
Akses Layanan Kesehatan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per satuan balita	0,02	0,02	0,02	0,02
Jumlah posyandu	869	869	869	890
Rasio puskesmas dan pustu per 1000 penduduk	0,33	0,33	0,33	0,33
Jumlah puskesmas	23	23	23	23
Jumlah pustu	141	141	144	145
Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,40	0,40	0,40	0,40
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2
Rasio dokter per 1000 penduduk	0,279	0,190	0,375	0,375
Jumlah Dokter	140	96	198	198

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Agam 2024

Secara rasio layanan, rasio layanan rumah sakit per 100.000 orang sebesar 0.40. Sementara rasio layanan Puskesmas dan Pustu per 1000 penduduk mencapai angka 0,33. Dilihat dari rasio tersebut, fasilitas kesehatan di wilayah kabupaten Agam masih kurang, terutama keberadaan rumah sakit. Namun jika dilihat berdasarkan fakta yang terjadi, khususnya di wilayah Agam bagian timur, kebutuhan akan fasilitas rumah sakit terpenuhi dimana masyarakat memanfaatkan rumah sakit yang terletak diwilayah kota Bukittinggi. Sementara untuk rasio layanan puskesmas dan

pustu sudah cukup baik. Namun bagi daerah-daerah tertentu dengan keterbatasan akses transportasi umum dan kondisi geografis yang berat dinilai masih perlu dilakukan penambahan sarana kesehatan. Disamping itu meskipun seluruh Puskesmas di Kabupaten Agam telah terakreditasi namun peningkatan kondisi bangunan berupa pemeliharaan maupun rehap berat serta pemenuhan kelengkapan fasilitas layanan puskesmas masih perlu ditingkatkan. Capaian indikator kinerja terkait layanan kesehatan lainnya, disajikan sebagai berikut.

Tabel II.17
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100	100	88,09	93,56
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	100	98,3	96,15	98,59
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	100	100	90,37	93,67
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	93,8	84,7	73,79
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	100	80	90,1	97,83
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	100	81,9	98,2	89,43
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	100	100	72,3	73,71
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	100	90,6	77,79	90,9
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	100	91,3	89,7	90,86
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100	86,6	100	100
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100	100	100	83,73
Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	100	100	93,48	93
Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100	100	100
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	182	190	201	185

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Agam 2024

4) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Perkembangan Tuberkulosis saat ini telah menjadi isu global dan merupakan target sasaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana juga tercantum di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Penyakit ini menjadi salah satu program prioritas nasional pada program pengendalian penyakit karena dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta seringkali mengakibatkan kematian. Indikator yang digunakan dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut adalah cakupan penemuan penderita penyakit TBC/BTA (CNR) per 100.000. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita TBC/BTA tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.18
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC/BTA Tahun 2021-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan Kasus Baru TBC/BTA	30,30	55,91	46,8	65,40	83,50
Angka sukses pengobatan (success rate) (%)	91,99	91,05	90,75	86,40	92

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Agam 2024

Secara umum berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan penemuan kasus baru penderita penyakit TBC pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 83,50. Tercatat penderita TBC ditahun 2024 sebanyak 863 jiwa. Meningkatnya cakupan penemuan kasus baru tersebut menunjukkan semakin efektifnya penjarangan dan ivestigasi terduga tuberkulosis (TB). Sementara tingkat kesuksesan pengobatan terhadap TBC yang dilakukan mencapai 92 persen.

5) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional mengacu pada jumlah masyarakat yang memiliki akses ke program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Agam mencapai 51,08 persen. Kepesertaan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 cakupan kepesertaan mencapai 64,35 persen, menandakan adanya tren positif dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Grafik II.19 :
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



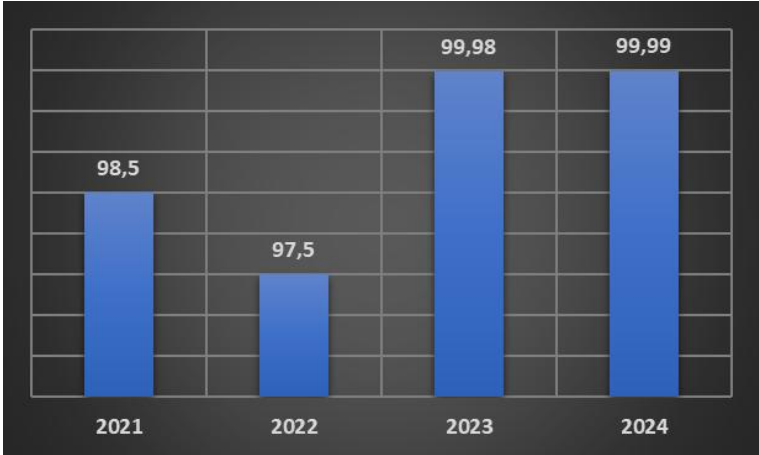
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

c) **Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1) **Ketaatan Terhadap Tata Ruang**

Ketaatan terhadap tata ruang diukur dari kepatuhan terhadap tata ruang yang sesuai dengan pola ruang. Berdasarkan data dinas PUTR tingkat ketaatan terhadap tata ruang ditahun 2024 mencapai 99,99 persen. Capaian ini ditopang oleh penggunaan SIMTARU sebagai aplikasi yang memberikanv informasi penataan ruang.

Grafik II.20
Cakupan Indeks Ketaatan Terhadap Tata Ruang Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas PUTR Kab. Agam 2023

2) Kondisi Jalan

Jumlah total panjang jalan keseluruhan Tahun 2024 adalah 1.694,3 Km. Ditinjau dari kondisinya, terdapat sepanjang 68,98%% atau sepanjang 1.169 km berada dalam kondisi mantap. Sementara sisanya sepanjang 525,75 km berada pada kondisi tidak mantap atau kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak sebanding dengan total panjang jalan dan kebutuhan membangun jalan. Disamping itu, hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi alam dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan jalan yang telah berada dalam kondisi baik dapat mengalami kerusakan dan menurunkan kualitas jalan, disamping itu secara volume panjang jalan yang mengalami kerusakan naik lebih besar daripada kemampuan untuk membangun atau meningkatkan jalan. Selengkapnya gambaran kondisi jalan di Kabupaten Agam tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.21 Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas PUTR Kab. Agam 2024

Meskipun dilihat dari kondisinya masih ada jalan dalam kondisi rusak, namun ditinjau dari tingkat konektivitas wilayah telah mencapai 100%, artinya jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk seluruhnya telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).

3) Irigasi

Luas areal air baku Agam ditahun 2024 mencapai 29.012 ha dimana areal yang terlayani irigasi mencapai 15.011,68 ha. Panjang saluran irigasi mencapai 346.812 meter. Sementara panjang saluran irigasi dengan kondisi baik mencapai 179.450,93 meter. Berikut disajikan data irigasi kabupaten Agam dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.19
Persentase dan Rasio Jaringan Irigasi

Indikator	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Yang Terlayani Irigasi	14,164.34	14,360.29	14.657,36	15.011,68
Luas Areal Air Baku	29.012	29.012	29.012	29.012
Panjang saluran irigasi	522.076	346.812	346.812	346.812
Panjang saluran irigasi dengan kondisi baik	254.890	174.774	175.215	179.450,93
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	48,82%	50,39%	50,52%	51,74%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Agam 2024

4) Sanitasi

Persentase rumah yang telah mempunyai sanitasi pada tahun 2024 mencapai 79,50 persen atau sebanyak 93.630 unit rumah. Persentase drainase dalam kondisi baik tercatat sebesar 40,60 persen dari total panjang seluruh drainase yang mencapai 602.128 kilometer. Sementara persentase penduduk berakses air minum mencapai sebesar 88,51 persen dan persentase Rumah tangga terhadap sumber air minum aman , meningkat dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel II.20 : Sanitasi

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tinggal bersanitasi	78,07	78,38	79,27	79,50%
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	91.464	92.704	92.839	93.630
Jumlah rumah tinggal	117.150	117.150	117.118	117,77
Persentase drainase dalam kondisi baik	39,87	40,39	40,60	40,60
Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	598.990	602.128	602.128	602.128
Persentase penduduk berakses air minum	84,94	85,03	86,96	88,51
Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	18,26	28,3	16,73	n.a

Sumber : Dinas PUTR Kab. Agam 2024

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Terdapat delapan indikator kinerja pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kedelapan indikator tersebut terbagi kedalam bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Capaian pada indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman disajikan sebagai berikut.

Tabel II.21
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	99,89	26,18
Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	3,79	4,37	2,73	1,34
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,262	0,260	0,77	3,63
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42	43	55,00	55,01

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Agam 2024

Pada tahun 2024 penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tercapai 26,18 persen. Sementara sisanya 73,82% akan ditangani pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena terjadi bencana longsor dan *galodo* yang mengakibatkan banyaknya rumah yang terdampak, sehingga belum bisa semuanya untuk ditangani ditahun 2024. Sementara persentase berkurangnya RTLH tercatat 1,34 persen. Indikator lain adalah persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan capaian hanya 3,63. Hal ini disebabkan terdapatnya pembangunan yang dilaksanakan diluar SK Kawasan Kumuh sehingga tidak dapat dihitung sebagai realisasi kinerja.

e) Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas : 1) sub urusan ketentraman dan ketertiban umum berupa penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah, penegakan peraturan daerah dan pembinaan PPNS; 2) sub urusan penanggulangan bencana dan 3) penanganan bencana berupa pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Indikator kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan tersebut antara lain :

1) Indeks Keamanan

Indikator indeks keamanan merupakan salah satu indikator utama pada aspek ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indeks ini diukur berdasarkan capaian dari beberapa indikator, meliputi angka kriminalitas per 10.000 penduduk, persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dan persentase capaian layanan waktu tanggap kebakaran. Indeks keamanan tahun 2024 mencapai angka 96,7. Capaian ini meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang sebesar 91,3. Tingginya capaian indeks tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya turunnya angka kriminalitas dan semakin baiknya kinerja pelayanan pemadam kebakaran.

Tabel II.22 : Indeks Keamanan Kabupaten Agam

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Keamanan	78,93	90,04	91,3	96,7
Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	4,21	3,83	3,19	2,74
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	63%	85%	85%	90

Sumber : Satpol PP Damkar, 2024

2) Penyelesaian Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah

Penyelesaian terhadap pelanggaran gangguan trantibum dikabupaten Agam pada tahun 2024 mencapai 100 persen, dimana pelanggaran yang terjadi sebanyak 79 kasus. Demikian juga dengan penegakkan peraturan daerah yang mencapai 100 persen. Pelanggaran perda yang terjadi diantaranya adalah pelanggaran terkait pasar, pelanggaran IMB, pekat, miras dan lain-lain. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terutama pelanggaran yang berdampak langsung pada retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD. Jumlah penegakan perda dalam periode lima tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23 : Penegakkan Peraturan Daerah

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%
Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	96%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Damkar, 2024

3) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen (WMK)

Merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibanding jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus. Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Jumlah kasus kebakaran selama 2024 tercatat sebanyak 111 kasus, dimana 100 kasusnya bisa ditangani dalam waktu maksimal 15 menit. Capaian waktu tanggap penanganan kebakaran mencerminkan kesiapan aparaturnya dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Disamping itu juga terjadinya sinergi yang baik dengan pemerintah kabupaten dan kota tetangga.

Tabel II.24

Waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	69 Kasus	93 Kasus	58 Kasus	100 kasus

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	110 Kasus	110 Kasus	68 Kasus	111 kasus

Sumber : Satpol PP Damkar, 2024

f) Urusan Sosial.

Indikator dan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait urusan sosial diantaranya adalah Jumlah PMKS yang memperoleh layanan/bantuan. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2024 mencapai 172.598 jiwa, meningkat dibanding tahun 2023 sebanyak 105.401 jiwa. Secara persentase, PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial mencapai 90,89 persen.

Tabel II.25 : Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	560	62.158	105.401	172.598
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	122.930	119.409	118.857	189.905

Sumber : Dinas Sosial Kab. Agam 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan penerima manfaat program-program bantuan sosial semakin meningkat. Namun yang tidak kalah penting adalah merumuskan strategi mewujudkan kemandirian PMKS melalui program pemberdayaan termasuk peningkatan peran aktif nagari untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan sosial pengentasan PMKS. Hingga saat ini, layanan urusan wajib pelayanan dasar sosial masih sangat tergantung dengan program dari pemerintah pusat.

Tabel II.26 : Indikator Kinerja Sosial

Indikator Kinerja Sosial	2021	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	8	10	10	10
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	n/a	n/a	2	1
Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	16.546	34.308	20.371	20.779

Sumber : Dinas Sosial Kab. Agam 2024

Keterangan : (n/a = Data atau nilai tidak tersedia)

Sementara untuk indikator kinerja kunci pada urusan sosial meliputi jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki, penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan dan keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (KK). Capaian pada indikator layanan data dan pengaduan sangat baik, dimana tingkat ketercapaian melebihi 100 persen. Pelayanan dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG dan pengaduan di lakukan melalui aplikasi Spanlapor & e-kadu. Untuk bantuan sosial bersyarat tahun 2024 tercatat sebanyak 20.779 keluarga yang mendapatkan bantuan bersyarat.

2.1.3.2 LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a) Urusan Kebudayaan

Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 92 Nagari, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menunjukkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus merupakan potensi yang dimiliki masyarakat. Capaian indikator sasaran terkait pembangunan adat, budaya, dan seni sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27 : Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Kebudayaan

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	72.15	75	100	100
Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	51	52	52	52
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukanseni.	6	8	9	10
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menontonsecara langsung pertunjukan seni.	55	80	85	90
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0.5	0.85	0,90	1,00
Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	23	60	70	80
Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	13.4	16.4	23,07	23,07
Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	17.51	12.67	39,20	3,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam 2024

Perkembangan kinerja urusan wajib kebudayaan menunjukan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini merupakan potensi yang besar untuk mendukung sektor pariwisata. Khusus untuk indikator persentase Lembaga Adat (KAN, Bundo Kanduang) yang aktif, dapat dijelaskan bahwa secara kelembagaan KAN dan bundo kanduang aktif seluruhnya, namun demikian ada beberapa KAN yang kepengurusannya belum memenuhi ketentuan yakni bahwa KAN harus di ketuai oleh penghulu (Datuk) sehingga dianggap tidak aktif. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat ini dilakukan dengan strategi unggulan gerakan nagari madani yang salah satu indikatornya adalah pengembangan adat dan budaya berbasis nagari.

b) Urusan Pertanian

Indikator persentase penyelesaian sengketa tanah tercapai 100 persen ditahun 2024, artinya dari kasus sengketa tanah yang terjadi dapat diselesaikan seluruhnya. Sementara indikator luas tanah pemerintah daerah yang bersertifikat mencapai 50 persen. Masih terdapat bidang tanah milik daerah yang belum atau sedang diurus sertifikatnya.

Tabel II.28 : Indikator Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100
Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	n/a	56,8	50	50

Sumber : Dinas Perkim Kab. Agam 2024

c) **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Total Fertility Rate (TFR) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh setiap wanita selama usia reproduktifnya, biasanya dari usia 15 hingga 49 tahun. TFR sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesuburan suatu populasi. TFR biasanya diukur dalam jumlah anak per wanita. Sebagai contoh, jika TFR suatu daerah adalah 2, itu berarti setiap wanita secara rata-rata akan memiliki dua anak selama usia reproduktifnya. Ditahun 2024 angka TFR Agam turun dari tahun sebelumnya menjadi 2,55. Turunnya angka TFR dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat sudah memahami pentingnya menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Hal ini sejalan dengan peningkatan peserta aktif KB ditahun 2024 menjadi 57,10 persen. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian terdapatnya pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, atau ingin anak ditunda tapi belum mengikuti Program KB. Sementara dari sisi pemerintah, terkendala dengan keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan.

Tabel II.29 : Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate	2,96	3	2,55	2,48
Rasio Peserta Aktif KB	65,98	57,76	54,92	57,10

Sumber : DPPKB dan PA Kabupaten Agam Tahun 2024

d) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dibidang perlindungan anak dan perempuan terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan padan anak dan perempuan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024 terjadi 37 kasus kekerasan pada anak dan 13 kasus kekerasan pada perempuan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan dalam keluarga adalah masih adanya kasus kekerasan yang belum terjangkau oleh lembaga layanan karena keengganan masyarakat untuk melaporkannya. Dan juga hambatan terkait regulasi dan kelembagaan perlindungan anak yang menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif. Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada grafik berikut :

Grafik II.22
Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan di Kabupaten Agam



Sumber : BPS Tahun 2024

e) Urusan Pangan

Indikator kinerja urusan wajib pangan diantaranya adalah indeks skor pola pangan harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Angka skor PPH pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 86,60 menjadi 81. Peningkatan tersebut didorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang semakin optimal dan dukungan pemerintah yang semakin baik terkait dengan pemenuhan pangan. Sebaliknya capaian persentase cadangan pangan masyarakat meningkat menjadi 18,58 persen.

Tabel II.30
Indikator Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,7	85,6	86,60	81
Persentase cadangan pangan masyarakat	9,97	12,24	0,16	18,58

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Agam 2024

f) Urusan Lingkungan Hidup

Indeks IKLH terdiri atas tiga komponen yang terdiri atas pengukuran kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan (tanah). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. Indeks ini dihitung dari nilai komposit berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. IKLH pada tahun 2024 turun menjadi 70,74 dari 72,61. Beberapa faktor penghambat diantaranya keterbatasan alat sampling, keterbatasan akses jalan dan mobilisasi alat pada beberapa lokasi sampling, pengaruh cuaca dan beberapa data yang dilaporkan tidak sesuai dengan

ketentuan sehingga mempengaruhi nilai IKLH. Berikut disajikan capaian IKLH Kab Agam.

Tabel II.31
IKLH Kabupaten Agam Tahun 2021 s.d 2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
IKLH	67,76	70,39	72,61	70,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam 2024

Kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan luasnya rentang kendali lingkungan hidup, yang melibatkan semua stakeholder, sehingga tidak semuanya dapat dikendalikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam. Kendala lainnya terkait urusan lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Timbulan sampah yang terolah difasilitas pengolahan sampah di Agam masih rendah. Pada tahun 2019 baru 4,30 persen timbulan sampah yang terolah. Ditahun 2021 capaiannya turun hingga 2,79 persen. Ditahun 2022 dan 2023 timbulan sampah terolah meningkat cukup signifikan menjadi 12,82 persen dan 14,71 persen.

Tabel II.32
IKLH Kabupaten Agam Tahun 2021 s.d 2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	4,30	2,79	12,82	14,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam 2024

g) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator aspek layanan umum urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada Tabel berikut :

Tabel II.33 :
Capaian Kinerja Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100
Jumlah akta kematian yang diterbitkan	878	3.794	4.769	3.939
Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan	878	3.794	4.769	3.939
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	48,22	55,84	61,85	65,53
Jumlah penduduk yang telah menikah dan memiliki buku nikah/akta perkawinan	107.910	125.171	139.509	148.241
Jumlah penduduk yang telah menikah	223.797	224.173	225.557	226.211
Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100,00	100,00	100,00	62,93
Jumlah akta cerai yang diterbitkan	4.683	969	5.280	7.370
Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan	4.683	969	5.280	11.712

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

Persentase cakupan kepemilikan akta kematian tahun 2024 telah mencapai 100 persen dimana jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun tersebut sebanyak 3.939 kejadian. Sementara untuk cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan mencapai 65,53 persen atau sebanyak 148.241 akta. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 139.509 akta. Untuk cakupan akte perceraian, capaian pada tahun 2024 mencapai 62,93 persen. Persentase dihitung dari aplikasi SIAK, berdasarkan data penduduk yang statusnya cerai tercatat dibagi dengan jumlah penduduk yang telah bercerai (status cerai tercatat ditambah cerai tidak tercatat).

h) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur kinerja pemberdayaan masyarakat nagari digunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), yang diukur oleh Kemeterian Desa setiap tahunnya. Merupakan salah satu indikator kinerja utama Pemerintah daerah. Indikator IDM dibentuk dari 1). Indek Ketahanan Sosial/modal sosial (yang meliputi kesejahteraan sosial, keamanan dan ketertiban, akses kesehatan, akses pendidikan dan akses permukiman seperti ketersediaan air bersih, sanitasi dan listrik), 2). Indek ketahanan Ekonomi (meliputi akses produksi, akses pemasaran, akses ke lembaga keuangan dan keterbukaan wilayah), serta 3). Indek Ketahanan Lingkungan/Ekologi Nagari (meliputi kualitas lingkungan dan ketahanan bencana). Pada tahun 2024 jumlah nagari dengan status IDM Mandiri mencapai 42 nagari, Maju 41 nagari, Berkembang 9 nagari dan tidak ada nagari dengan status Tertinggal. Pencapaian ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan status IDM Nagari di Kabupaten Agam dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel II.34
Jumlah Nagari menurut Status IDM Tahun 2021 – 2024

Kategori IDM	2021	2022	2023	2024
Mandiri	10	20	30	42
Maju	46	54	47	41
Berkembang	26	8	15	9
Tertinggal	0	0	0	0

Sumber: DPMN Kabupaten Agam Tahun 2024

Disamping Indikator Desa Membangun, evaluasi atau instrumen pengukuran perkembangan desa atau nagari dilakukan dengan menentukan tingkat perkembangan desa. Evaluasi ini meliputi evaluasi pada bidang pemerintahan, kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan. Bidang pemerintahan meliputi unsur pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi atau e-Government, dan pelestarian adat dan budaya. Pada bidang kewilayahan desa meliputi aspek: identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana, dan pengaturan investasi. Evaluasi bidang kemasyarakatan desa meliputi aspek: partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dari evaluasi tersebut nantinya diklasifikasikan poin Desa ke dalam kategori Kurang Berkembang ($1 \leq 300$), Berkembang (301 – 450) dan Cepat Berkembang (>451). Pada tahun 2024 tercatat persentase nagari dengan kategori cepat berkembang mencapai 69 persen. Sementara pada indeks pengelolaan pemerintahan nagari mencapai angka 454 atau berada pada kategori berkembang.

Tabel II.35 :
Jumlah Nagari menurut Status IDM Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Nagari dengan kategori cepat berkembang	25,6	48,7	48,9	69
Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	430	453	454	469

Sumber: DPMN Kabupaten Agam Tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan di tengah masyarakat ini dilakukan dengan strategi unggulan gerakan nagari madani yang salah satu indikatornya adalah pengembangan adat dan budaya berbasis nagari. Pada tahun 2023 terjadi penambahan jumlah nagari menjadi 92 nagari akibat pemekaran beberapa nagari induk. Dari hasil penilaian 2024 tercatat 13 nagari yang mencapai madani level 5. Sementara untuk level 4 sebanyak 64 nagari dan level 3 sebanyak 15 nagari. Ditahun 2024 tidak terdapat lagi nagari dengan kategori madani level 1 dan 2.

Tabel II.36 : Jumlah Nagari berdasarkan Level Madani Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Nagari Madani Level 5	0	9	10	13
Nagari Madani Level 4	20	57	49	64
Nagari Madani Level 3	36	15	28	15
Nagari Madani Level 2	17	1	4	0
Nagari Madani Level 1	9	0	1	0

Sumber: DPMN Kabupaten Agam Tahun 2024

i) **Urusan Perhubungan**

Capaian indikator urusan wajib perhubungan tahun 2021 sampai 2024 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel II.37
Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus penumpang angkutan umum	430.933	467.246	453.247	348.765
Jumlah uji KIR angkutan umum	1.443	6.896	4.824	4.570
Rasio Kejadian Kecelakaan	1,35	1,60	1,50	1,87

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Tahun 2024

Jumlah penumpang angkutan umum ditahun 2024 tercatat sebanyak 348.765 penumpang. Capaian turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 453.247 penumpang. Sementara jumlah pengujian KIR angkutan umum turun menjadi 4.570 unit. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini adalah semakin meningkatnya jumlah angkutan online, sehingga mengakibatkan jumlah angkutan umum konvensional seperti angkot, bus antar kota semakin berkurang, sementara selama ini uji KIR banyak diaplikasikan pada angkutan umum. Ditambah berkurangnya kesadaran pemilik kendaraan melakukan uji KIR tersebut. Sementara rasio kejadian kecelakaan meningkat dari tahun 2021 sebesar 1,35 hingga 2024 menjadi 1,87.

j) Urusan Komunikasi dan Informatika

Pengembangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Agam dikemas dalam rangka mendukung terwujudnya *Smart City* dan *Smart Regency*. Konsep “Kabupaten Cerdas” saat ini hanya bisa diwujudkan dengan teknologi. Sebenarnya ini merupakan ungkapan untuk sebuah kota yang dapat mengoptimalkan teknologi untuk sistem pemerintahan dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengetahui kebutuhan, keluh kesah, atau usulan-usulan aspirasi dari warga secara langsung, sehingga pelayanan pemerintahan ke masyarakat akan menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efisien, karena kebijakan pemerintah akan sesuai dengan keinginan warga. Laporan kejadian-kejadian di wilayah daerah juga langsung dapat dikirimkan oleh individu masyarakat langsung kepada Pemerintah Daerah. Beberapa indikator pembangunan di bidang urusan informasi dan komunikasi ini adalah :

Tabel II.38
Capaian Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	100%	100%	100%
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	n/a	10%	10%	10%
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	100%	100%	100%
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	n/a	100%	100%	100%

Sumber :Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2024
Keterangan : (n/a = Data atau nilai tidak tersedia)

Untuk ketersediaan akses internet dan intranet bagi OPD dikabupaten Agam sudah tercapai 100 persen. Sementara persentase UPT dan UMKM yang

difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital mencapai 10 persen. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Aplikasi teknologi digital yang telah dilaksanakan antara lain PPDB online di Dinas Pendidikan, internet untuk sekolah dan Puskesmas.

k) Urusan Statistik dan Persandian

Capaian indikator urusan Statistik dan Persandian disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.39 : Capaian Kinerja Urusan Statistik dan Persandian				
Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100%	100%	100%	100%
Indeks Keamanan Informasi	n/a	n/a	25,9	3,38*

Sumber :Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2024
*) Instrumen penghitungan indeks KAMI 2024 ditampilkan dalam bentuk angka indeks

Perangkat daerah yang telah menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Agam sudah mencapai 100 persen. sementara untuk indikator Indeks Keamanan Informasi capaian di tahun 2024 sebesar 338. Untuk tahun 2024 ada perbedaan perhitungan dengan tahun sebelumnya, dimana skala angka indeks keamanan informasi diukur melalui beberapa kategori meliputi sistem elektronik yang digunakan, tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi dan pengelolaan aset informasi. Berdasarkan capaian tahun 2024, indeks keamanan informasi berada pada level III : Terdefinisi dan Konsisten.

l) Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Capaian indikator urusan wajib Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.40 : Capaian Kinerja Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro				
Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	70,63	63,2	n/a	69,13
Pertumbuhan pelaku usaha mikro	2	2,35	2,5	1,85

Sumber : Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Agam Tahun 2024

Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas mencapai angka 69,13 persen. Hal ini menunjukkan tata kelola koperasi yang baik dan lebih cenderung berkembang serta berkualitas. Sementara pertumbuhan pelaku usaha mikro ditahun 2024 mencapai 1,85 persen.

m) Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan penanaman modal bertujuan bagaimana pihak investor dapat melakukan kegiatan penanaman modal dengan lancar, aman dan menguntungkan kepada pemilik modal, masyarakat dan daerah, sehingga meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kinerja penyelenggaraan penanaman modal diukur dengan

indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA), jumlah total realisasi investasi (PMDN dan PMA) dan persentase peningkatan nilai investasi. Capaian kinerja bidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.41 : Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	2,5	32,77	15,00	41,42

Sumber : DPMPSTP dan Tenaga Kerja 2024

Peningkatan realisasi investasi di tahun 2024 mencapai 41,42 persen. Total investasi meningkat dari 412, 30 miliar rupiah menjadi 724,68 miliar rupiah. Penyumbang investasi terbesar di tahun 2024 berasal dari sektor perkebunan dan perhotelan. Untuk lebih meningkatkan iklim investasi, kedepannya diperlukan upaya penyederhanaan prosedur perizinan investasi, menyusun beberapa peraturan yang mendukung pengembangan investasi, serta peningkatan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel melalui sistem elektronik agar memudahkan calon investor untuk membuka usaha di di Kabupaten Agam.

n) **Urusan Tenaga Kerja**

Kondisi ketenagakerjaan pada kurun waktu 2021–2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.42 : Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2021 -2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah angkatan kerja	242.926	269.801	295.554	300.912
Bekerja	230.639	256.507	280.902	286.682
Pengangguran Terbuka	12.287	13.294	14.652	14.230
TPT	5,06	4,93	4,96	4,73

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten Agam tahun 2024 mencapai 4,73 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat pengangguran turun sebesar 0,23 persen. Jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, pengangguran yang terjadi di dominasi tamatan SLTA/ SMK, diploma dan sarjana. Ditinjau dari jenis pekerjaan masyarakat Kabupaten Agam mayoritas bekerja di kelompok lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Jumlah Tenaga berdasarkan status pekerjaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.43 : Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Kerja Utama Tahun 2024

Jenis pekerjaan	Tahun	
	2023	2022
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	92.620	95.787
Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	47.260	47.459

Jenis pekerjaan	Tahun	
	2023	2022
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	141.022	143.436

Sumber : BPS 2025

o) **Urusan Perpustakaan**

Capaian indikator aspek layanan umum urusan wajib Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44 : Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	56,27	69,41	60,05	81,72
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9,3	65,04	68,66	72,92

Sumber : Dinas Arsip dan Pustaka Agam 2023

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kegemaran membaca dikabupaten Agam ditahun 2024 yang mencapai angka 81,72, meningkat signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya. peningkatan ini didorong oleh terlaksanannya sosialisasi terkait minat baca bagi masyarakat. Kemudian semakin mudahnya jangkauan akses internet sehingga informasi sangat mudah di akses melalui media daring, seperti sosial media ataupun website. Angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga mengalami peningkatan dari 68,06 menjadi 72,92 ditahun 2024.

p) **Urusan Kearsipan**

Capaian indikator kinerja layanan umum urusan wajib Kearsipan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.45 : Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Wajib Kearsipan

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	53,85 (Cukup)	36,66 (Cukup)	45/CC (Cukup)	51,01/CC (Cukup))

Sumber : Dinas Arsip dan Pustaka Agam 2023

Pengukuran untuk Nilai Pengelolaan Kearsipan Daerah mulai tahun 2023 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana hasil pengukuran berupa angka yang telah diklasifikasikan. Untuk tahun 2024 Kabupaten Agam mendapatkan predikat CC dengan nilai 51,01 yang diklasifikasikan pada tingkatan "Cukup". Artinya capaian tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

q) **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Dibidang kepemudaan, salah satu indikator kinerja pemerintah adalah tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, sosial dan kemasyarakatan. Tingkat partisipasi pemuda pada tahun 2024 mencapai 49,75 persen. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi meningkat ditahun 2024 menjadi 7,85 persen.

Tabel II.46

Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	45.83	48.72	47,01	49,75
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	36	35	6,71	7,85

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam 2024

Di bidang olahraga, pengembangan olahraga prestasi giat dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 perolehan medali di kabupaten Agam baik itu di event olahraga tingkat provinsi ataupun nasional mencapai 88 medali.

Tabel II.47

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Peningkatan prestasi olahraga(Jumlah perolehan medali)	44	56	177	88

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam 2024

2.1.3.3 LAYANAN URUSAN PILIHAN

a) Urusan Kelautan dan Perikanan

Kondisi geografis Kabupaten Agam yang memiliki pantai danau dan sungai sangat potensial untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan potensi kelautan dan perikanan tersebut terdiri dari sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan wisata bahari. Capaian indikator Layanan Umum Urusan Pilihan Kelautan Perikanan Tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut

Tabel II.48

Indikator Sasaran, dan Capaian Kinerja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024
Kontribusi lap. usaha perikanan terhadap PDRB.	3,32	2,21	3,1	4,61
Produksi perikanan				
- Perikanan budidaya (ton)	37.023,67	46.332,5	30.660,68	33.409
- Perikanan Tangkap (ton)	8.017	8118	8.120	8.140
Konsumsi ikan perkapita	41,83	42,58	42,63	43,43
Cakupan bina kelompok nelayan	100	100	100	37

Sumber : DPKP Kabupaten Agam 2024

Produksi perikanan kabupaten Agam pada tahun 2024 meliputi produksi perikanan budidaya sebanyak 33.409 ton dan perikanan tangkap sebanyak 8.140 ton. Dibanding tahun sebelumnya produksi perikanan tahun 2023 meningkat dengan selisih 2.768 ton. Sementara konsumsi ikan meningkat menjadi 43,43 kg per kapita pada tahun 2024.

b) Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Agam memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB. Pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan mencapai 19,76 persen dengan laju pertumbuhan mencapai 19,76. Kontribusi tersebut menempatkan sektor perdagangan sebagai tiga sektor teratas yang memberikan persentase terbesar terhadap PDRB Agam. Berikut disajikan perkembangan sektor perdagangan dalam PDRB Agam.

Tabel II.49
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Indikator Sasaran	2020	2022	2023	2024
Nilai PDRB pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHB)	4,05 triliun	4,72 triliun	5,14 triliun	5,52 triliun
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (ADHB)	18,93	19,74	19,67	19,76
Laju Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran (ADHB)	5,42	5,36	4,31	5,05

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

c) Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 10,33 persen dengan laju pertumbuhan 3,43 persen. Pertumbuhan industri di tahun 2024 menggambarkan kegiatan ekonomi di sektor industri cukup bergeliat dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan ekonomi. Capaian indikator Layanan Umum urusan pilihan Perindustrian tahun 2021-2024 dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.50
Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Pilihan Perindustrian

Indikator	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB pada sektor Industri (ADHB)	2,12 triliun	2,38 triliun	2,67 triliun	2,89 triliun
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	9,90	9,99	10,23	10,33
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan (ADHB).	2,81	5,39	6,60	3,43

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

d) Urusan Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten sangat besar baik wisata alam, sejarah maupun budaya. Terdapat banyak destinasi wisata baik itu yang dikelola pemerintah ataupun swadaya masyarakat. Capaian indikator layanan umum urusan pilihan pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.51
Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisata	734,566	761,422	878.674	913.330
Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari
Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	200,000	200,000	536.000	536.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2023

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan secara total meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 913.330 wisatawan melakukan kunjungan ke objek wisata yang terdapat di Agam. Sementara tingkat hunian akomodasi tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya dengan lama menginap mencapai 2 hari. Hal ini disebabkan banyaknya wisatawan yang memilih menginap di kota Bukittinggi yang masih merupakan magnet utama pariwisata Sumbar. Faktor lainnya adalah jumlah akomodasi yang terbatas dengan standar yang diminati wisatawan di Wilayah Kab. Agam. Sementara rata-rata pengeluaran wisatawan selama berkunjung meningkat dari Rp. 300.000 menjadi sebesar Rp. 536.000 ditahun 2024. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi dibidang pariwisata.

e) Urusan Pertanian

Kabupaten Agam merupakan daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pertanian merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, meskipun kontribusinya cenderung melambat tetapi masih sangat dominan. Sampai dengan tahun 2024 kontribusi lapangan pertanian terhadap PDRB mencapai 22,82. Oleh karena itu perkembangan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian menjadi salah satu indikator utama Pemerintah Daerah. Lapangan usaha pertanian juga teruji selama masa pandemi, dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang tetap positif mencapai 3,06 persen pada tahun 2021 dan hingga tahun 2024 tetap tumbuh 1,55 persen. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.52 : Capaian Kinerja Layanan Umum Urusan Pilihan Pertanian

No	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian (ADHK)	3,06	2,08	2,65	1,55
2.	Kontribusi lapangan usaha pertanian pangan terhadap PDRB	24,63	24,08	23,36	22,82

Sumber : BPS Sumatera Barat 2025.

Kabupaten Agam mempunyai komoditi pertanian yang sangat beragam baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Produksi disektor pertanian pada tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, seperti produksi padi, cabe dan manggis. Produksi padi ditahun 2024 mencapai 347 ribu ton, naik dari 341 ribu ton. Produksi jagung mencapai 100 ribu ton, cabe merah 35,9 ribu ton dan jeruk 7,4 ribu ton. Penurunan tingkat produksi tersebut dipengaruhi karena terjadinya serangan OPT pertanaman di kecamatan terutama hama tikus. Disamping itu faktor cuaca dan curah hujan yang tinggi serta harga dan kelangkaan pupuk di pasaran. Berikut disajikan produksi sektor pertanian.

Tabel II.53

Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian	2021	2022	2023	2024
- Padi	427.075	365.022	341.351	347.739
- Jagung	125.612	122.293	117.098	100.163
- Cabe merah	21.082	17.715	17.602	35.941
- Bawang merah	8.617	6.372	5.250	5.065
- Manggis	10.295	14.606	3.994	4.596
- Jeruk	47.140	36.394	11.697	7.404

Sumber : Dinas Pertanian Agam 2025

Pada sektor peternakan secara umum tingkat produksi juga mengalami penurunan. Produksi Sapi pada tahun 2024 mencapai 1.946 ton, kerbau mencapai 44,9 ton, kambing mencapai 53,3 dan unggas sebanyak 18,20 ribu ton.

Tabel II.54

Produksi Sektor Peternakan

Produksi sektor peternakan (Ton)	2021	2022	2023	2024
- Sapi	1.722,70	1.704,5	1.978,9	1.946
- Kerbau	20,56	22,4	43,9	3.308
- Kambing	41,28	46,7	53,3	66,12
- Unggas	15.481,51	14.140,75	18.207.830	19.436

Sumber : Dinas Pertanian Agam 2025

2.1.3.4 LAYANAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

a) Urusan Sekretariat Daerah

Capaian Indikator kinerja pada urusan Sekretariat Daerah periode tahun 2021 hingga 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.55 : Capaian Urusan Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah	2021	2022	2023	2024
Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	100
Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	100	100	100	100
Persentase OPD dengan nilai IRB baik	31.23 (86.67%)	31.23 (86.67%)	31.23 (86.67%)	31.23 (86.67%)

Capaian urusan Sekretariat Daerah cukup baik dalam 4 (empat) tahun terakhir. Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100 persen. Persentase OPD dengan nilai IRB baik sebesar 86,67 persen.

b) Urusan Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD diukur melalui indikator Persentase fasilitasi kegiatan DPRD. Dari tahun 2021 hingga 2024 capaian indikator ini mencapai 100 persen. Kinerja pada urusan Sekretariat DPRD periode tahun 2021 hingga 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.56 : Capaian Urusan Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100



2.1.3.5 LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

c) Urusan Keuangan

Capaian Indikator kinerja pada urusan keuangan periode tahun 2021 hingga 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.57 : Capaian Indikator Kinerja Keuangan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	n/a
Kesesuaian pengalokasian anggaran	80%	80%	90,00	90,00
Deviasi realisasi belanja terhadap total anggaran belanja	19,47	14,97	9,75	19,20
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,11	3,94	33,29	14,54
Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	9,15	11,28	10,61	10,78
Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,27	0,06	0,24	0,19

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam 2025

Pemerintah Kabupaten Agam berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK. Artinya dengan memperoleh opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja tahun 2024 tercatat sebesar 19,20 persen. Sementara deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD mencapai 14,54. Hal ini menggambarkan perbedaan realisasi penerimaan APBD 2024 terhadap target penerimaan.

d) Urusan Perencanaan

Capaian Indikator kinerja pada urusan keuangan periode tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.58 : Capaian Indikator Kinerja Perencanaan

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	90	96,43	100,00	87,59
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	70,4	64,52	72,58
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	83	100	100,00	88,89
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	98	87,87	100

Sumber : Bappeda Agam 2025

Angka Indeks Kualitas Perencanaan Daerah Agam tahun 2024 mencapai 87,59 persen. Sementara capaian Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 72,58 persen. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran tahun 2024, sehingga ada beberapa program/kegiatan yang di gabung, namun prioritas daerah tetap di dilaksanakan. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD mencapai 88,89 persen. Sementara untuk indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW mencapai 100 persen.

e) **Urusan Kepegawaian**

Capaian Indikator kinerja pada urusan kepegawaian periode tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.59 :Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian

Kepegawaian	2021	2022	2023	2024
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,06	33,76	34,00	25,5
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,45	32,79	72,00	27
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,97	22,34	3,50	40

Sumber : BKPSDM Agam 2024

Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar tahun 2024 mencapai 25,5 persen. Capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan peningkatan jumlah pegawai berpendidikan SLTA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) lebh banyak dibanding peningkatan jumlah pegawai berpendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Sementara rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) meningkat ditahun 2024 menjadi 27 persen. Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi ditahun 2024 tercatat sebanyak 40 persen.

f) **Urusan Pendidikan dan Kelitbangan**

Capaian Indikator kinerja pada urusan pendidikan dan kelitbangan periode tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.60 : Capaian Indikator Pendidikan dan Kelitbangan

Penelitian dan Pengembangan	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kelitbangan	66	23,5	79,61	95
Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	98	-	100,00	100
Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	32	47	59,21	89

Sumber : Bappeda Agam 2025

Capaian Indeks Kinerja Kelitbangan ditahun 2024 mencapai 95, meningkat dari 79,61 ditahun sebelumnya. Sementara persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan ditahun 2024 mencapai 100 persen. Persentase unit kerja yang memiliki inovasi ditahun 2024 sebanyak 89 persen.

2.1.3.6 **LAYANAN URUSAN PENGAWASAN**

Capaian Indikator kinerja pada urusan pendidikan dan kelitbangan periode tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.61 : Capaian Indikator Pendidikan dan Kelitbangan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3,06	Level 3 (3,144)	3,10	Level 3 (3,152)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	3	Level 3 (3,00)	3,00	Level 3 (3,00) (terdefinisi)

Sumber : Inspektorat Agam 2024

Capaian indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tahun 2024 mencapai angka 3,15 atau level 3. Peningkatan ini menggambarkan semakin terciptanya kolaboratif antar perangkat daerah. Indikator Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) mencapai angka indeks 3 atau level terdefinisi. Faktor penghambat salah satunya terkait dengan belum terepenuhinya pengembangan profesi berdasarkan 120 jam per APIP.

2.1.3.7 LAYANAN URUSAN KEWILAYAHAN

Urusan kewilayahan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antarwilayah di dalam kabupaten serta memastikan pembangunan kecamatan. Terdapat 16 (enam belas) kecamatan di kabupaten Agam, meliputi Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Tanjung Raya, Matur, IV Koto, Banuhampu, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Palupuh, Palembayan, Sungai Pua, Ampek Nagari, Candung, Kamang Magek dan Malalak. Dalam kerangka RKPD, layanan urusan kewilayahan diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang didapatkan dari kecamatan. Berikut disajikan capaian IKM.

Tabel II.62 : Capaian Indikator Urusan Kewilayahan

Urusan Kewilayahan	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan masyarakat (IKM)	84,31	84,39	85,31	86,71

Sumber : Hasil Evaluasi Kecamatan 2024

2.1.3.8 LAYANAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

Layanan unsur pemerintahan umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat non-urusan pemerintahan konkuren, namun memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan kohesivitas sosial di wilayah kabupaten. Dalam konteks RKPD, layanan unsur pemerintahan umum diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dasar pemerintahan yang seperti pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dan penanganan konflik sosial serta penguatan ketahanan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur layanan urusan pemerintah umum adalah Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi. Berdasarkan capaian dalam 4 tahun terakhir dapat digambarkan bahwa penyelesaian potensi ATHG

ataupun konflik sosial di Agam cukup baik, dimana pada tahun 2024 capaiannya 100 persen.

Tabel II.63 : Capaian Indikator Urusan Pemerintah Umum

Unsur Pemerintah Umum	2021	2022	2023	2024
Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.		92,00	81	100

Sumber : Badan Kesbangpol Agam 2024

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Penduduk Perkapita

Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita per bulan masyarakat Agam mengalami lonjakan dari 1,21 juta pada tahun 2023 menjadi 1,24 juta rupiah ditahun 2024. Pengeluaran tersebut bisa dibedakan berdasarkan pengeluaran untuk kelompok makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk kelompok makanan tercatat sebesar Rp. 694.440 dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp. 544.785. Meningkatnya pengeluaran perkapita masyarakat Agam ini sejalan dengan naiknya pendapatan PDRB perkapita. Sementara ditingkat provinsi Sumatera Barat terjadi kenaikan pengeluaran perkapita dari 1,41 juta menjadi 1,48 juta pertahunnya.

Perkembangan data nilai pengeluaran perkapita per bulan masyarakat di Kabupaten Agam pada kurun waktu 2020 – 2024 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

Grafik II.23 : Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Agam



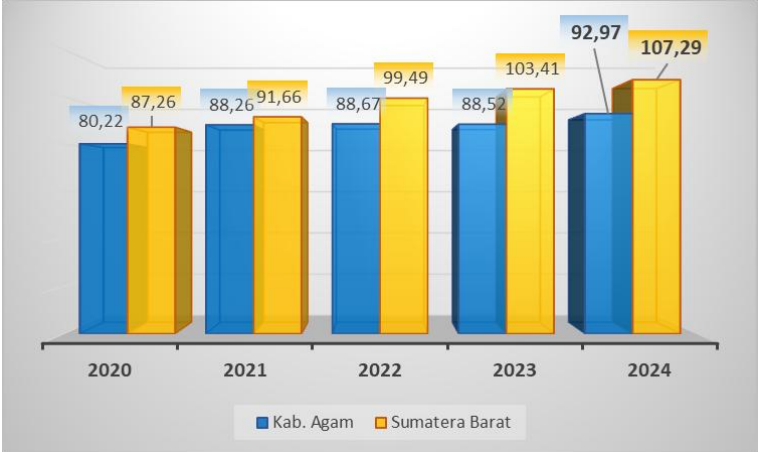
Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

b) Produktivitas Daerah

Produktivitas total daerah merupakan ukuran dari efisiensi penggunaan semua input produksi di suatu daerah atau wilayah geografis tertentu. Produktivitas daerah dihitung dengan membandingkan output (PDRB) terhadap

input (angkatan kerja). Peningkatan produktivitas daerah merupakan tujuan ekonomi yang penting karena menunjukkan bahwa lebih banyak output dihasilkan dari jumlah input yang sama.

Tabel II.64 : Tingkat Produktivitas Daerah Tahun 2021–2024



Sumber : BPS Sumatera Barat (2025)

Berdasarkan grafik diatas terlihat nilai produktivitas total daerah ditahun 2024 mencapai 92,97 juta rupiah. Nilai ini menggambarkan produktivitas setiap angkatan kerja terhadap nilai produktivitas ekonomi Agam. Jumlah angkatan kerja Agam ditahun 2024 sebanyak 300.912 jiwa dan nilai PDRB (ADHB) sebesar 27,91 triliun. Nilai produktivitas total daerah kabupaten Agam masih berada dibawah nilai rata-rata provinsi, dimana produktivitas total Sumatera Barat mencapai 107,29 juta

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur

a) Kondisi Jalan

Jumlah total panjang jalan keseluruhan Tahun 2024 adalah 1.694,3 Km. Ditinjau dari kondisinya, terdapat sepanjang 68,98% atau sepanjang 1.169 km berada dalam kondisi mantap. Sementara sisanya sepanjang 525,75 km berada pada kondisi tidak mantap atau kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak sebanding dengan total panjang jalan dan kebutuhan membangun jalan. Disamping itu, hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi alam dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan jalan yang telah berada dalam kondisi baik dapat mengalami kerusakan dan menurunkan kualitas jalan, disamping itu secara volume panjang jalan yang mengalami kerusakan naik lebih besar daripada kemampuan untuk membangun atau meningkatkan jalan. Selengkapnya gambaran kondisi jalan di Kabupaten Agam tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.24 : Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas PUTR Kab. Agam 2024

Meskipun dilihat dari kondisinya masih ada jalan dalam kondisi rusak, namun ditinjau dari tingkat konektivitas wilayah telah mencapai 100%, artinya jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk seluruhnya telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

a) Iklim Investasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Agam, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundangundangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Nilai Investasi di Kabupaten Agam Tahun 2024 mencapai Rp. 724,10 miliar, meningkat dibandingkan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp. 412,30 miliar. Peningkatan investasi berasal dari sektor perkebunan dan perhotelan.

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perizinan yang tepat waktu. Secara umum, Kabupaten Agam cukup kondusif hal ini terlihat dari rendahnya tindak kriminalitas dan jarang sekali kejadian demo. Hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan Kabupaten Agam, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Agam. Kondisi yang kondusif juga tergambar dalam indikator indeks keamanan. Indeks ini diukur berdasarkan capaian dari beberapa indikator, meliputi angka kriminalitas per 10.000 penduduk, persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dan persentase capaian layanan waktu tanggap kebakaran. Capaian indeks keamanan tahun 2024 mencapai angka 96,7, meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 91,3. Tingginya capaian indeks tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya kinerja kepolisian dalam mencegah dan menindak kasus kriminalitas di Kabupaten Agam.

Tabel II.65 : Indeks Keamanan Kabupaten Agam				
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
Indeks Keamanan	78,93	90,04	91,3	96,7
Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	4,21	3,83	3,19	2,74
Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	63	85	85	90

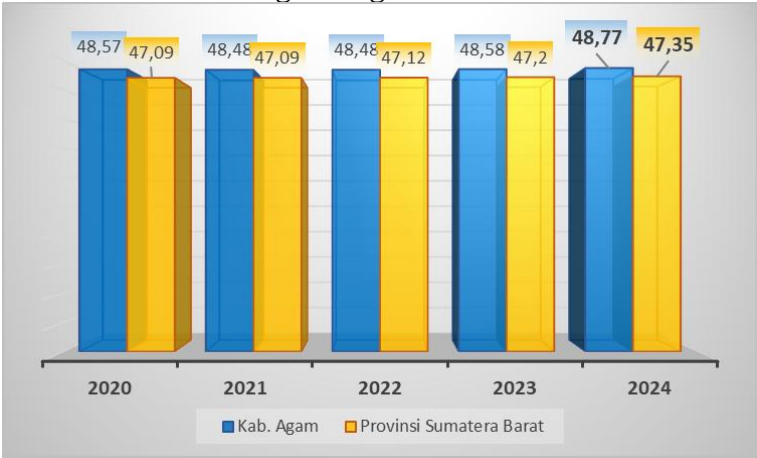
Sumber : Satpol PP Damkar, 2024

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

a) Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan menggambarkan jumlah penduduk belum produktif atau tidak produktif yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif. Penduduk usia belum produktif adalah penduduk usia kurang dari 15 tahun dan penduduk tidak produktif lagi adalah penduduk usia diatas 64 tahun. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan usia 15-64 tahun. Tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2024 sebesar 48,77. Artinya setiap seratus penduduk produktif menanggung 49 penduduk tidak produktif. Angka tersebut sedikit meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 48,58. Kondisi ini menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif semakin rendah sehingga penduduk Kabupaten Agam berpeluang besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi, angka ketergantungan Agam masih tinggi. Angka ketergantungan provinsi Sumatera Barat sebesar 47,35.

Grafik II.25 : Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2020–2023



Sumber : BPS Sumatera Barat 2025

Jumlah penduduk usia tidak produktif yang cukup besar menuntut perhatian pemerintah untuk terus melakukan peningkatan penyediaan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan, disamping penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif serta peningkatan upaya pengendalian penduduk. Kondisi demografi ini merupakan tantangan dan sekaligus menjadi modal yang berharga untuk mendukung percepatan pembangunan (bonus demografi) apabila dipersiapkan secara matang. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas beberapa tahun kedepan.

2.1.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas ; Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman,Kketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat dan Sosial. Berikut disajikan Capaian Standar Pelayanan Minimal kabupaten Agam tahun 2024.

Tabel II.66 : Capaian Standar Pelayanan Minimal kabupaten Agam

Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pendidikan			
Pendidikan Dasar	16.660	16.631	99,83
Pendidikan Kesetaraan	81.986	81.859	99.85
Pendidikan Anak Usia Dini	2.746	2.746	100
Bidang Kesehatan			
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.856	3.856	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.808	3.808	100
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	3.661	3.661	100
Pelayanan Kesehatan Balita	16.504	16.504	100
Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.241	38.241	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	158.035	158.035	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.918	30.918	100
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	7.905	7.905	100
Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	2.124	2.124	100
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	716	716	100
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis	2.864	2.864	100
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV	1.853	1.853	100
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	322	322	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	478	478	100
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	-	-	0
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	100
Bidang Sosial			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	80 Orang	80 Orang	100

Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	40	40	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Sosial	78	78	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	300	407	100
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat			
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana	100	100	100
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100	100	100
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	100	100	100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	150	150	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	284	284	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	341	341	100%

2.1.6 CAPAIAN SDGS

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Agam dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator dengan data TPB/SDGs Kabupaten Agam sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- a. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
- b. Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target (SB);
- c. Indikator yang tidak ada/belum ada data (NA)

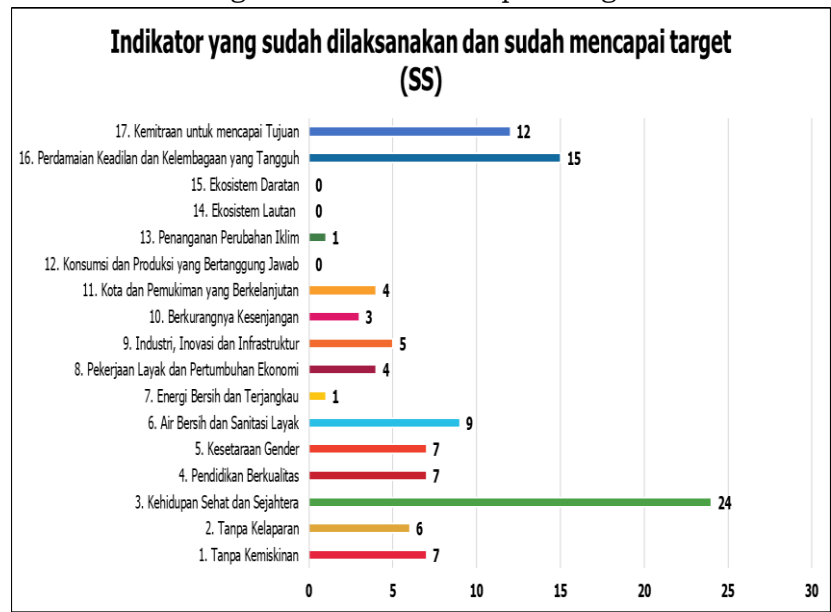
Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 16 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator.

1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indicator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Agam adalah sebanyak 105 indikator atau dengan persentase 47,73%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap

TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat grafik berikut.

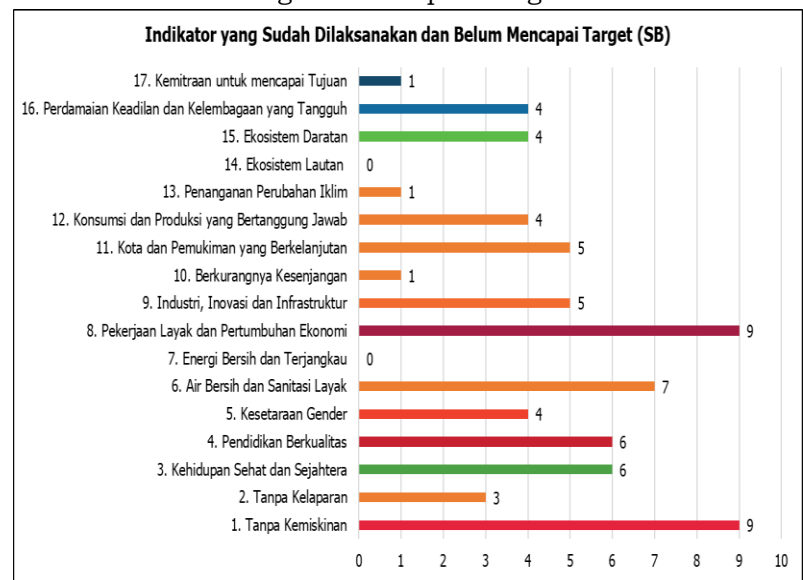
Grafik II.26 : Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Agam



2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Agam adalah sebanyak 69 indikator atau dengan persentase 31,36%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.27 : Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Agam

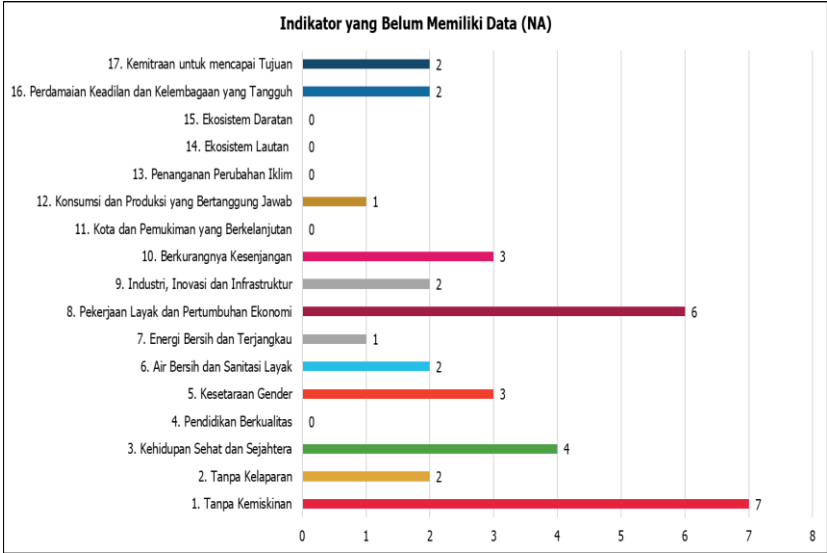


3. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 26 indikator atau 11,82%. Lebih

jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.28 : Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Agam



2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun 2024 dituangkan kedalam tabel e.60 (terlampir). Evaluasi tersebut meliputi evaluasi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Agam ditahun 2024. Pencapaian kinerja program kinerja program pembangunan diklasifikasikan sebagai berikut;

Tabel II.67
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Evaluasi RKPD tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi tabel E.60 yang meliputi urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Evaluasi capaian rencana kerja masing-masing OPD yang dituangkan dalam tabel E.60 tersebut dilaksanakan oleh tim evaluasi RKPD melalui desk evaluasi. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing OPD, pada tahun 2024 terdapat 245 program yang tersebar di seluruh OPD se-kabupaten Agam. Anggaran pelaksanaan program tersebut mencapai Rp. 1.681.571.356.812,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.534.537.670.842,00 atau 91,26 persen. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut disajikan pada tabel berikut.

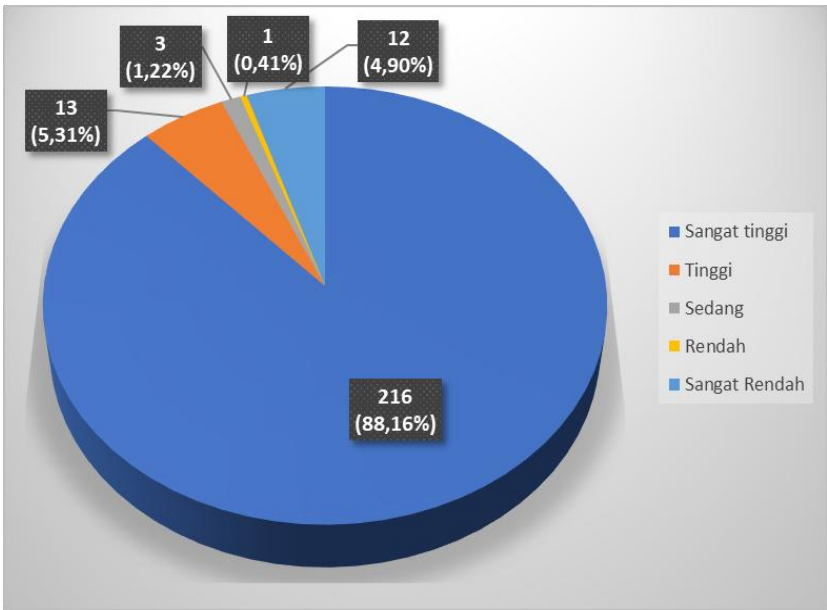
Tabel II.68 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2024

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Uraian / Kriteria	Jumlah	Persentase
91% ≤100%	Sangat tinggi	216	88,16
76% ≤ 90%	Tinggi	13	5,31
66% ≤ 75%	Sedang	3	1,22
51% ≤ 65%	Rendah	1	0,41
≤ 50%	Sangat Rendah	12	4,90
Jumlah Indikator		245	245

Sumber : hasil evaluasi RKPD 2024 (diolah)

Evaluasi terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa 216 program memiliki tingkat capaian kinerja “sangat tinggi” (88,16 persen). 13 program dengan tingkat capaian tinggi (5,31 persen), 3 program dengan tingkat capaian sedang (1,22 persen), 1 program dengan tingkat capaian rendah (0,41 persen) dan 12 program dengan tingkat capaian sangat rendah (4,90 persen). terdapatnya beberapa program dengan kinerja rendah dan sangat rendah disebabkan karena terjadinya efisiensi dan rasionalisasi pembiayaan untuk program tersebut sehingga output yang dihasilkan tidak optimal. Lebih lanjutnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.29 : Diagram Capaian Program RKPD Tahun 2024



Sumber : hasil evaluasi RKPD 2024 (diolah)

Keberhasilan pelaksanaan RKPD sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, koordinasi yang solid, serta evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus dilandasi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar pembangunan daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan untuk mewujudkan capaian RKPD meliputi :

- Perencanaan yang tepat dan terukur, melalui penyusunan program dan kegiatan berdasarkan data yang valid dan analisis kebutuhan riil dan penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program

dan kegiatan.

- Penguatan Koordinasi Antar-OPD dan Lintas Sektor agar pelaksanaan program berjalan terpadu.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaksana program dan perencanaan.
- Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
- Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian yang Konsisten

Disamping evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2024, evaluasi dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah yang terdapat dalam RPJMD. Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut;

Tabel II.69
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

	Uraian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian	Skala Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71)	75,84	106,82	Sangat Tinggi
2	Nilai Sakip	BB (75)	B (67.11)	89,47	Tinggi
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik (82)	Perlu Perbaikan (74,03)	90,28	Sangat Tinggi
4	Nilai EPPD	3,5	3,57	101	Sangat Tinggi
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	44 (Tinggi)	39,88	90,64	Sangat Tinggi
6	Indeks Profesionalitas ASN	tinggi (62)	78,81	127,11	Sangat Tinggi
7	Indeks SPBE	3,00 (Baik)	2,56	85,33	Tinggi
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86,3	101,53	Sangat Tinggi
9	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang	63 (58 Nagari)	69	109,52	Sangat Tinggi
10	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari	460	469	101,96	Sangat Tinggi
11	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,2	2,74	85,63	Tinggi
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,57	4,12	90,16	Sangat Tinggi
13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,8	1,55	55,47	Rendah
14	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,6	1,85	70,97	Sedang
15	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2	3,08	154,00	Sangat Tinggi
16	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	4,39	4,82	109,70	Sangat Tinggi
17	Jumlah Kunjungan Wisatawan	936.000	930.617	99,42	Sangat Tinggi
18	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,8	7,60	131,10	Sangat Tinggi
19	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	84	68,98	82,12	Tinggi
20	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	40	75,76	189	Sangat Tinggi

	Uraian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian	Skala Kinerja
21	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah	Tinggi	Rendah (0,33)	38,82	Sangat Rendah
22	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	83	86,91	104,71	Sangat Tinggi
23	Indeks kualitas lingkungan Hidup	74,5	70,74	94,95	Sangat Tinggi
24	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98	99,99	100,01	Sangat Tinggi
25	Indeks Pembangunan Manusia	75,04	75,08	100,05	Sangat Tinggi
26	Angka Harapan Lama Sekolah	14,76	14,16	95,93	Sangat Tinggi
27	Rata rata lama sekolah	9,43	9,23	97,88	Sangat Tinggi
28	Angka Harapan Hidup	74,52	74,39	99,83	Sangat Tinggi
29	Nilai Pertumbuhan Produktivitas Daerah (Juta/Kapita)	90,89	92,97	102,29	Sangat Tinggi
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,02	4,73	82,34	Tinggi
31	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	93	92,79	99,77	Sangat Tinggi
32	Jumlah cabang olahraga berprestasi	47	47	100,00	Sangat Tinggi
33	Indeks ketahanan pangan daerah	92	86,92	94,48	Sangat Tinggi
34	Indeks Kesejahteraan Rakyat	78,02	88,52	113,46	Sangat Tinggi
35	Status IDM	Mandiri : 42	Mandiri : 42	100,00	Sangat Tinggi
		Maju : 41	Maju : 41		
		Berkembang : 9	Berkembang : 9		
36	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,3	90,89	100,65	Sangat Tinggi
37	IPG	97,9	97,37	99,46	Sangat Tinggi
38	Indek perlindungan anak	71	63,04	88,79	Tinggi
39	Total Fertility Rate	2,35	2,48	94,47	Sangat Tinggi
40	Indeks Keamanan	91,5	96,7	105,68	Sangat Tinggi
41	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3	2,74	108,67	Sangat Tinggi
42	Persentase kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan yang ditangani	100	100	100,00	Sangat Tinggi
43	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	100	90	90,00	Tinggi
44	Persentase nagari madani Level V	15,21 (92 Nagari)	14,13	92,04	Sangat Tinggi
	Jumlah Nagari Madani Level				
	- V	14	13		
	- IV	46	64		
	- III	27	15		
	- II	5	0		
45	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	100	100,00	Sangat Tinggi

	Uraian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian	Skala Kinerja
46	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	94,55	94,55	Sangat Tinggi

Sumber : hasil evaluasi RKPD 2024 (diolah)
Keterangan : (n/ a = Data atau nilai tidak tersedia)

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berikut :

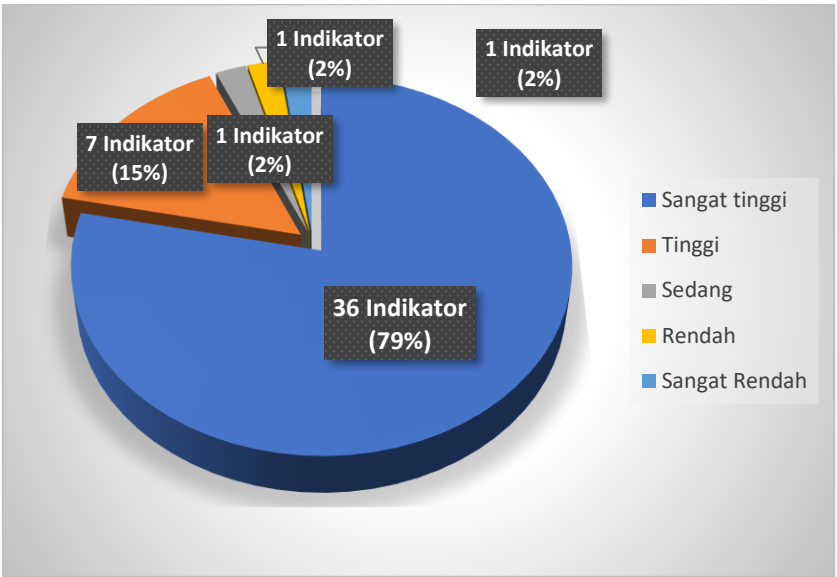
Tabel II.70 : Skala Kinerja Capaian IKU Tahun 2024

Uraian / Kriteria	Jumlah	Persentase
Sangat Tinggi	36	76,09
Tinggi	7	15,22
Sedang	1	2,17
Rendah	1	2,17
Sangat Rendah	1	2,17
Jumlah Indikator	46	

Sumber : hasil evaluasi RKPD 2024 (diolah)

Evaluasi terhadap capaian IKU menunjukkan bahwa 36 program memiliki tingkat capaian kinerja “sangat tinggi” dan 7 program dengan tingkat capaian “tinggi” dan masing-masing 1 program untuk skala sedang, rendah dan sangat rendah. Indikator kinerja dengan kinerja sangat rendah adalah Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah. Turunnya capaian indikator tersebut pada tahun 2024 disebabkan kejadian bencana alam yang terjadi berulang-ulang dan berdampak cukup masif terhadap infrastruktur, seperti rumah, jalan dan jembatan, terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Lebih lanjutnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.30 : Diagram Capaian IKU Tahun 2024



Sumber : hasil evaluasi RKPD 2024 (diolah)

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan evaluasi hasil capaian indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci Pemerintah Daerah yang terangkum dalam sasaran dan prioritas daerah dalam RKPD, serta kondisi eksisting yang terjadi di tengah masyarakat yang dijangkau melalui penyampaian aspirasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan mulai konsultasi publik, musrenbang kecamatan dan kabupaten disepakati permasalahan sebagai berikut :

2.3.1.1 Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari

Peningkatan dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan merupakan langkah kunci dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan publik. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

- a) Nilai Sakip Kabupaten Agam berada pada kategori B dengan nilai 67,11. capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tapi belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024 (BB;75).
- b) Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yang tinggi. Kapasitas fiskal kabupaten Agam berada pada kategori sangat rendah, dengan nilai rasio kapasitas fiskal sebesar 0,884.
- c) Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Agam sebesar 74,03 yang artinya masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Agam belum optimal, dimana pada tahun 2024 angka indeks SPBE berada pada level "cukup" dengan nilai 2,56. Angka tersebut belum mampu mencapai target untuk tahun 2024.
- e) Penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal.

2.3.1.2 Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian berkorelasi terhadap penguatan ketahanan pangan kabupaten Agam. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

- a) Turunnya pertumbuhan PDRB di sektor pertanian dari 2,65 persen ditahun 2023 menjadi 1,55 persen ditahun 2024.
- b) Belum optimalnya sinergi industri pengolahan dengan sektor pertanian dalam memberikan daya ungkit terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian.
- c) Nilai indeks ketahanan pangan daerah sudah cukup baik dengan capaian indeks 86,92, namun belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 92. sementara skor pola pangan harapan (PPH) turun dari 86,6 menjadi 81.
- d) Persentase peningkatan produktivitas peternakan tahun 2024 menurun dari 10,91 persen menjadi 8,72 persen disebabkan fase produksi ternak belum optimal.

2.3.1.3 Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro

Peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro guna mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam dan mengoptimalkan serapan angkatan kerja. Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut :

- a) Sektor perdagangan besar dan eceran masih belum maksimal dalam meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, terutama ketika produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk mentah
- b) Menurunnya pertumbuhan pelaku usaha mikro ditahun 2024.

2.3.1.4 Peningkatan Kepariwisata Melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas

- a) Kurangnya atraksi/event wisata, wisata kuliner dan berbagai fasilitas yang saling terkait sebagai faktor pendorong lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan
- b) Belum adanya objek wisata yang benar-benar representatif, dengan dukungan fasilitas lengkap, Pariwisata daerah lebih mengandalkan pemandangan alam semata dan belum didukung event-event yang dilaksanakan secara kontinu. Penggunaan teknologi informasi (IT) juga belum dimanfaatkan secara optimal.

2.3.1.5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana

- a) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya disebabkan masih rendahnya rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

- b) Pengelolaan dan layanan persampahan oleh intitusi terkait belum optimal dan di tingkat masyarakat juga masih rendah. Persentase pengelolaan persampahan tahun 2024 baru mencapai 46,29 persen.
- c) Timbunan sampah anorganik dan limbah B3 belum terkelola secara baik sesuai standar yang ditetapkan.
- d) Masih terdapatnya jalan kabupaten pendukung ekonomi dalam kondisi rusak sepanjang 436 kilometer atau 25,7 persen dari total panjang jalan.
- e) Pengendalian pemanfaatan ruang baru sebatas kepada yang mengurus izin, sementara penindakan kepada bangunan atau usaha yang menyalahi arahan tata ruang belum terlaksana dengan baik, sehingga berpotensi untuk menciptakan kawasan kumuh.
- f) Turunnya indeks kapasitas ketahanan daerah ditahun 2024. Hal ini disebabkan tingginya intensitas bencana alam yang terjadi dan berdampak cukup masif terhadap infrastruktur, ekonomi dan sosial masyarakat.

2.3.1.6 Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda

- a) IPM meningkat tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan kota sekitar Agam.
- b) Belum terpenuhinya standar kualitas pendidik dan standar sarana prasarana pendidikan
- c) Masih terdapatnya siswa putus sekolah, dimana angka putus sekolah SD sebesar 0,03 dan angka putus sekolah SMP sebesar 0,03.
- d) Masih kurangnya sarana prasarana seperti mobiler yang sudah tidak layak, sarana perpustakaan, laboratorium dan sarana sanitasi sekolah khususnya pada jenjang pendidikan SD.
- e) Masih tingginya kasus gizi buruk dan stunting. Pada tahun 2024 angka stunting sebesar 20,1 persen (Survei SKI).
- f) Meningkatnya angka kematian ibu dan masih adanya kasus kematian bayi.
- g) Akses air minum layak dan sanitasi layak 100% belum tercapai
- h) Belum seluruh masyarakat mempunyai jaminan pelayanan kesehatan,

2.3.1.7 Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau

- a) Belum optimalnya upaya mobilisasi potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Filantropi).
- b) Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan pengelolaan pemerintahan nagari
- c) Belum optimalnya sinkronisasi program nagari dengan sasaran daerah
- d) Masih lemahnya pengelolaan data nagari sebagai dasar perencanaan nagari.

2.3.2 PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

- a) Masih tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SD (0,02%) dan SMP (0,05%)
- b) Masih terdapatnya sekolah setingkat SD dan SLTP yang belum terakreditasi minimal B.
- c) Masih terdapatnya puskesmas yang belum memenuhi fasilitas dan tenaga kesehatan sesuai standar
- d) Masih tingginya angka stunting (20,1%)
- e) Belum optimalnya standar pelayanan kesehatan, seperti pada usia lanjut, penderita diabetes dan penderita hipertensi.
- f) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh
- g) Belum optimalnya Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya diperlukan kebijakan seperti :

- Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya di daerah terpencil dan rentan. Kebijakan dapat meliputi pemberian beasiswa, peningkatan mutu guru dan sarana pendidikan dan akreditasi sekolah untuk menjamin standar mutu lembaga pendidikan.
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar, seperti pemenuhan standar puskesmas, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan promotif dan preventif seperti penanggulangan stunting dan penyakit tidak menular.
- Penataan permukiman dan lingkungan sehat, melalui program perbaikan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan juga harus ditingkatkan.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

- a) Masih rendahnya rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

- b) Masih rendahnya Persentase persetujuan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
- c) Masih rendahnya Persentase pengelolaan persampahan.
- d) Masih rendahnya Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip
- e) Masih rendahnya Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- f) Masih rendahnya Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya diperlukan kebijakan seperti :

- Penguatan kapasitas kelembagaan dan jumlah aparatur yang kompeten di bidang teknis seperti pengawasan lingkungan hidup, kearsipan, dan kepemudaan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan penambahan formasi tenaga teknis yang dibutuhkan.
- Proses perizinan teknis seperti pengelolaan limbah B3 dan pengawasan lingkungan perlu disederhanakan dan didigitalisasi agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga mendukung efisiensi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.
- Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi pemuda, melalui pembinaan, pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan antara lain :

- a) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya.
- b) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
- c) Masih rendahnya produksi beberapa produk pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, cabe merah, bawang merah, manggis dan jeruk
- d) Belum optimalnya pertumbuhan industri

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya diperlukan kebijakan seperti :

- Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan melalui penggunaan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan pelaku usaha lokal dan kemitraan dengan swasta.
- penguatan akses pasar dan nilai tambah produk dari hasil produksi dari sektor perikanan, pertanian, dan industri. Pemerintah daerah memfasilitasi

promosi produk unggulan dan membangun rantai nilai yang menguntungkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dilakukan melalui pengembangan destinasi yang menarik dan layak jual, peningkatan fasilitas pendukung, serta promosi yang konsisten. Peran serta masyarakat sebagai pelaku ekonomi kreatif lokal harus diperkuat.

2.3.2.4 Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintah Umum

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut antara lain :

- a) Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap total belanja
- b) Masih tingginya deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
- c) Masih rendahnya rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya diperlukan kebijakan seperti :

- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas cakupan pemungutan pajak dan retribusi.
- Penguatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, seperti mendorong peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional dan sertifikasi kompetensi.

Tabel II.71
Form E.60 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	3,141,891,480,000	100	1,260,659,994,674	100	538,238,399,612					113,711,522,086	100	154,769,647,733	100	100	100	493,050,003,598	100	1,753,709,998,272	100	55.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji Dan Tunjangan ASN			100	1,254,714,774,296	100	534,848,820,799	83,881,969,402	139,102,251,970	113,025,116,123	100	153,830,156,737	100	100	100	489,839,494,232							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					4529 Orang/bulan	534,734,250,799	4529 Orang/bulan	83,870,589,402	4529 Orang/bulan	139,079,491,970	4529 Orang/bulan	112,990,976,123	4529 Orang/bulan	153,784,636,737	4529 Orang/bulan	100	489,725,694,232					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10 Dokumen	114,570,000	10 Dokumen	11,380,000	10 Dokumen	22,760,000	10 Dokumen	34,140,000	10 Dokumen	45,520,000	10 Dokumen	100	113,800,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor				1,864,786,001	100	635,837,701	38,914,300	322,202,013	99,390,640	129,593,291	100	100	590,100,244									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					25 Paket	11,993,550	-	8 Paket	5,600,450	8 Paket	3,979,206	9 Paket	2,409,155	25 Paket	100	11,988,811						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	194,740,851	-	1 Paket	142,495,898	4,280,884	1 Paket	25,461,758	2 Paket	172,238,540								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	60,005,300	1 Paket	25,402,380	1 Paket	6,826,500	1 Paket	27,417,228	1 Paket	59,646,108								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	369,098,000	3 Laporan	38914300	3 Laporan	148,703,285	3 Laporan	84,304,050	3 Laporan	74,305,150	12 Laporan	100	346,226,785					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				3,768,854,218	100	2,616,059,912	371,249,854	804,995,100	567,178,223	100	747,869,105	100	100	2,491,292,282								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	213,295,912	18 Laporan	35,289,174	18 Laporan	48,875,650	18 Laporan	131,185,397	18 Laporan	51,098,365	36 Laporan	100	182,283,762					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	38,770,000	-	4 Laporan	9,276,000	4 Laporan	16,290,000	4 Laporan	13,045,100	12 Laporan	100	38,611,100						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	2,363,994,000	12 Laporan	335,960,680	12 Laporan	746,843,450	12 Laporan	503,867,650	12 Laporan	683,725,640	12 Laporan	100	2,270,397,420					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				311,580,159	100	137,681,200	10,073,000	37,178,140	19,837,100	100	62,028,600	100	100	129,116,840								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	27,175,000	1 Unit	3,371,750	1 Unit	3,047,350	1 Unit	11,056,650	1 Unit	5,342,500	1 Unit	100	22,818,250					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					35 Unit	79,930,200	2 Unit	6,701,250	2 Unit	10,306,890	15 Unit	6,127,450	16 Unit	52,593,100	35 Unit	100	75,728,690					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	30,576,000	-	1 Unit	23,823,900	1 Unit	2,653,000	1 Unit	4,093,000	1 Unit	100	30,569,900						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	95	705,685,850,000	99	297,676,298,054	85	100,488,247,299					16,182,748,780	46,685,920,788	99.74	117.34	94,692,003,326	392,368,301,380	0	55.60				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar				201,794,046,756	100	61,938,574,141	23,774,535	21,040,782,540	11,130,041,354	100	26,678,978,739	100	100	58,873,577,168								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					5 Ruang	981,590,400	0	0	5 Ruang	245,128,000	5 Ruang	735,384,000	5 Ruang	980,512,000								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					48 Unit	2,619,624,961	48 Unit	0	48 Unit	13,205,300	48 Unit	1,010,883,250	15 Unit	1,575,800,517	15 Unit	31.25	2,599,889,067					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					13 Paket	2,129,959,471	0	0	13 Paket	1,009,767,400	9 Paket	1,050,126,900	9 Paket	69.23	2,059,894,300							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					500 Peserta Didik	328,445,692	0	500 Peserta Didik	88,838,400	500 Peserta Didik	138,192,122	500 Peserta Didik	73,056,842	500 Peserta Didik	100	300,087,364						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					1123 Orang	1,351,500,000	1123 Orang	0	1123 Orang	326,250,000	1123 Orang	1,017,879,000	1123 Orang	1,344,129,000								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					3180 Orang	350,999,950	2200 Orang	1,343,100	2200 Orang	4,995,000	2200 Orang	65,075,033	3670 Orang	233,738,223	3670 Orang	115.408805	305,151,356					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					438 Satuan Pendidikan	109,365,000	438 Satuan Pendidikan	25,739,440	438 Satuan Pendidikan	22,615,980	438 Satuan Pendidikan	46,501,890	441 Satuan Pendidikan	100.6849315	94,857,310							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					438 Satuan Pendidikan	50,480,533,885	438 Satuan Pendidikan	19,663,453,289	438 Satuan Pendidikan	7,036,371,959	438 Satuan Pendidikan	20,922,226,714	441 Satuan Pendidikan	100.6849315	47,622,051,962							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					40.000 Paket	0	40.000 Paket	0	40.000 Paket	0	40.000 Paket	0	40.000 Paket	100	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1 Ruang	2,777,841,882	1 Ruang	0	1 Ruang	639,483,461	1 Ruang	1,221,034,830	1 Ruang	903,394,026	10 Ruang	1000	2,763,912,317					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	50.000,000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	39.884,300	1 Unit	9.567,170	1 Unit	100	49.451,470					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar					438 Satuan Pendidikan	50.000,000	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	8.204,250	438 Satuan Pendidikan	14.838,480	438 Satuan Pendidikan	25.532,500	441 Satuan Pendidikan	100,68	48.575,230					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	708.712,900	1 Ruang	22.431,435	1 Ruang	596.863,400	1 Ruang	0	1 Ruang	85.770,957	9 Ruang	900	705.065,792					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		63,529,773,867			100	24,035,549,792		7,475,000		6,802,901,982		4,129,531,025	100	11,489,684,406	100	100	22,429,592,413					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					6 Unit	4.178,078,386	6 Unit	3.440,000	6 Unit	3.936,500	6 Unit	854.866,700	6 Unit	3,267,179,395	15 Unit	250	4,129,422,595					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Unit	131.250,000			2 Unit	2.422,094	2 Unit	124.844,900	2 Unit	3.635,800	1 Unit	50	130.902,794					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					2 Paket	484,477,260				0		0		0	0 Paket	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					10 Paket	348,777,650				0	10 Paket	103,852,000	10 Paket	240,289,250	10 Paket	100	344,141,250					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					500 Peserta Didik	433.000,000	500 Peserta Didik	4.035,000	500 Peserta Didik	155.874,720	500 Peserta Didik	91,117,050	500 Peserta Didik	107.385,080	500 Peserta Didik	100	358.411,850					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					163 Orang	421.700,000				1.200,600	136 Orang	143.700,600	156 Orang	248.163,300	156 Orang	95,71	393.064,500					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					1600 Orang	110,323,260				0	1600 Orang	25,578,788	1600 Orang	60,237,309	813 Orang	50,81	85,816,097					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					68 Satuan Pendidikan	350.000,000			68 Satuan Pendidikan	22.839,495	68 Satuan Pendidikan	64.057,561	68 Satuan Pendidikan	217,102,554	68 Satuan Pendidikan	100	303.999,610					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					67 Satuan Pendidikan	17.572,943,236			67 Satuan Pendidikan	6.616,628,573	68 Satuan Pendidikan	2,721,513,426	68 Satuan Pendidikan	7,342,701,718	68 Satuan Pendidikan	101,49	16.680,843,717					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					20 Unit Ruang	0				0		0		0	0 Unit Ruang	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					4800 Paket	5.000,000				0		0		2.990,000	0 Paket	0	2.990,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini		23,785,094,583			100	8,660,292,880		10,082,700		2,691,851,182		562,719,555	100	5,275,560,381	100	100	8,540,213,818					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					3 Unit	437,280,958	3 Unit	3,780,000	3 Unit	0	3 Unit	11,621,440	3 Unit	410,887,419	3 Unit	100	426,288,859					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					5 Unit	639,071,000			5 Unit	5,267,000	5 Unit	327,724,747	5 Unit	295,422,721	5 Unit	100	628,414,468					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					14 Paket	30.000,000				0		0	14 Paket	21,855,700	14 Paket	100	21,855,700					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					8 Paket	549,228,750			8 Paket	249,900,000	8 Paket	2,641,500	8 Paket	281,817,300	8 Paket	100	534,358,800					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					200 Orang	57,999,400	200 Orang		200 Orang	4,147,000	200 Orang	0	200 Orang	21,605,000	392 Orang	196	25,752,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					357 Satuan Pendidikan	79,999,090	357 Satuan Pendidikan	2,572,700	357 Satuan Pendidikan	6,518,000	357 Satuan Pendidikan	8,810,850	357 Satuan Pendidikan	47,379,100	357 Satuan Pendidikan	100	65,280,650					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelola Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					357 Satuan Pendidikan	5,902,200,000			357 Satuan Pendidikan	2,422,109,182		0	357 Satuan Pendidikan	3,464,789,190	357 Satuan Pendidikan	100	5,886,898,372					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					4 Ruang	934,513,682	4 Ruang	1,790,000		0	4 Ruang	199,670,118	4 Ruang	714,776,191	4 Ruang	100	916,236,309					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					300 Paket	50.000,000		1,940,000		3,910,000	150 Paket	12,250,900	150 Paket	17,027,760	300 Paket	100	35,128,660					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesetaraan		8,567,382,848			100	5,833,830,486		43,629,840		1,202,835,979		360,456,846	100	3,241,697,262	100	100	4,848,619,927					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					3 Unit	1,110,368,443		660,000		0	3 Unit	208,521,446	3 Unit	888,817,737	3 Unit	100	1,097,999,183					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/kesetaraan yang tersedia					15 Paket	41,149,700		0		0	15 Paket	37,591,400		0	15 Paket	100	37,591,400					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					14 Satuan Pendidikan	1,336,599,544			14 Satuan Pendidikan	124,118,200	14 Satuan Pendidikan	111,624,000	14 Satuan Pendidikan	133,132,500	14 Satuan Pendidikan	100	368,874,700					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					14 Satuan Pendidikan	3,251,900,000			14 Satuan Pendidikan	1,064,418,283	0		14 Satuan Pendidikan	2,187,481,717	14 Satuan Pendidikan	100	3,251,900,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					100 Paket	8,850,000			0	100 Paket	2,720,000			5,940,000	100 Paket	100	8,660,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	25,000,000			0		0	1 Unit		23,750,308	1 Unit	100	23,750,308					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar					182 Peserta Didik	44,958,799	182 Peserta Didik	42,969,840	182 Peserta Didik	1,900,000	0		0	182 Peserta Didik		100	44,869,840					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					1 Unit	15,004,000			1 Unit	12,399,496	0	1 Unit		2,575,000	1 Unit	100	14,974,496					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Tahapan Silabus Muatan Lokal	100	1,367,790,000	100	631,775,311	100	260,000,000					1,666,200	100	255,858,539	100	100	258,890,939	100	890,666,250	100	65.12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Layanan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal				631,775,311	100	260,000,000	0		1,366,200		1,666,200	100	255,858,539	100	100	258,890,939						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia				506 Buku	260,000,000				1,366,200		1,666,200	6498 Buku	255,858,539	6498 Buku	1284,189723	258,890,939						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Sekolah yang telah memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	502	945,910,000	100	68,024,450	452	13,254,300	0		0		6,520,000	452	1,505,000		452	100	8,025,000		76,049,450		8.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan					100	13,254,300					6,520,000	100	1,505,000		100	100	8,025,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				68,024,450	12 Dokumen	13,254,300	0		0	6 Dokumen	6,520,000	6 Dokumen	1,505,000	12 Dokumen	100	8,025,000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga Adat Yang menerapkan Tradisi Adat	81.82	3,980,000,000		1,665,243,471	79.29	525,518,419					54,234,460	79.29	312,456,536		100	126.12	411,534,056	100	2,076,777,527		52.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Lembaga Adat Di Kabupaten Agam				1,665,243,471	79.29	525,518,419	0		44,843,060		54,234,460	79.29	312,456,536		100	126.12	411,534,056					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				250 Orang	350,000,000			250 Orang	44,843,060	250 Orang	49,854,400	250 Orang	221,778,650	250 Orang	100	316,476,110						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	175,518,419		0		0	2 Unit	4,380,060	2 Unit	90,677,886	2 Unit	100	95,057,946						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni Yang Aktif	272	3,450,000,000		3,821,534,190	256 Unit	1,522,999,997					22,059,000	256 Unit	1,378,693,930	256 Unit	100	1,404,292,930		5,225,827,120		151.47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sanggar/Group/Kesenian Tradisi Di Kabupaten Agam				3,821,534,190	246 Sanggar	1,522,999,997	0		3,540,000		22,059,000	246 Sanggar	1,378,693,930	246 Sanggar	100	1,404,292,930						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					15 Lembaga	1,522,999,997			15 Lembaga	3,540,000	15 Lembaga	22,059,000	15 Lembaga	1,378,693,930	15 Lembaga	100	1,404,292,930					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	75	755,000,000	100	389,425,771	65 Unit	169,280,000					77,520,000	52 Unit	55,320,000	52 Unit	80	163,253,000		552,678,771		73.20		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam				389,425,771	65 CB	169,280,000		6,250,000		24,163,000		77,520,000	52 CB	55,320,000	52 CB	80	163,253,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				48 Objek	169,280,000		6 Objek	6,250,000	8 Objek	24,163,000	20 Objek	77,520,000	14 Objek	55,320,000	48 Objek	100	163,253,000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum	23,000	4,700,000,000	27,355	2,029,318,163	20,500 Orang	700,000,000					98,452,300	20,500 Orang	420,027,205	26,500 Orang	129.27	677,445,255		2,706,763,418		57.59		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum di Kabupaten Agam			100	2,029,318,163	100	700,000,000	0		158,965,750		98,452,300	100	420,027,205	100	100	677,445,255						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					73 Unit	210,000,000			73 Unit	24,904,250	0	73 Unit	178,418,565	73 Unit	100	203,322,815						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya					480 Orang	350,000,000			480 Orang	134,061,500	480 Orang	98,452,300	480 Orang	102,246,100	480 orang	100	334,759,900					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit	140,000,000	1 Unit		1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	139,362,540	1 Unit	100	139,362,540					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							Dinas Kesehatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100%	166,968,970,000	100 %	78,022,783,822	100%	121,726,989,958	100%	20,576,559,999	100%	25,136,327,177	100.00%	39,501,161,579	100%	31,671,777,973	100%	100%	116,940,202,728	100%	194,962,986,550	100	100.00		Dinas Kesehatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, gaji tenaga kontrak dan asuransinya serta honorarium penanggungja			12 bulan	68,211,307,557	12	113,224,882,302	3	19,403,225,018	3	23,155,833,303	3	37,725,604,153	3	27,836,368,080	12	100	108,175,406,554					Dinas Kesehatan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			947 Orang/bulan	68,140,707,557	1135 orang/bulan	113,116,362,302	1031	19,403,225,018	1,031	23,108,160,303	1,471	37,721,993,153	1,471	27,836,368,080	1,471	130	108,069,746,554					Dinas Kesehatan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			18 Laporan	70,600,000	12 laporan	108,520,000	3	0	3	47,673,000	3	3,611,000	3	54,376,000	12	100	105,660,000					Dinas Kesehatan	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya biaya cetak dan pengadaan, tersedianya makan minum tamu dan rapat, serta makan minum pasien, terlaksananya bimtek dan pembinaan puskesmas serta jaringannya dan terlaksananya rapat-rapat ke propinsi dan luar propinsi			12 bulan	1,019,069,237	3	664,295,611	3	75,835,739	3	124,572,347	3	132,569,200	3	303,665,996	12	400	636,643,282					Dinas Kesehatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	16,599,000	4 Paket	16,585,200	1	2,695,000	3 Paket	13,664,402	0	0		0	4	100	16,359,402					Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	309,400,097	3 paket	199,609,771	0	0	0	0	2	33,238,550	1	151,062,850	3	100	184,301,400					Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			4 Paket	91,188,000	3 paket	45,010,000	3 paket	7,819,950	3 paket	10,440,450	3 paket	6,993,000	3 paket	17,083,600	3	100	42,337,000					Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	526,632,140	12 Laporan	403,090,640	3	65,320,789	3	100,467,495	3	92,337,650	3	135,519,546	12	100	393,645,480					Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100 %	71,263,334		57,900,000	25	17,582,400	25	16,080,450	25	15,030,050	25	9,015,000	100	100	57,707,900					Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	71,263,334	4 unit	57,900,000	1	17,582,400	1	16,080,450	0	15,030,050	1	9,015,000	4	100	57,707,900					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya rekening listrik, telpon dan air kantor dinkes			12 Bulan	8,005,439,444		7,349,741,045	3	1,055,813,562	3	1,774,727,027	3	1,492,867,176	3	3,367,429,647	12	100	7,690,837,412					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	486,500,000	12 Laporan	334,700,669	3	75,373,096	3	70,590,997	3	76,538,073	3	79,199,616	12	100	301,701,782					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	7,518,939,444	12 laporan	7,015,040,376	3	980,440,466	3	1,704,136,030	3	1,416,329,103	3	3,288,230,031	12	100	6,068,062,630					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional puskesmas dan dinas, terpeliharanya gedung kantor dinkes			12 Bulan	715,704,250	12 Bulan	430,171,000	3	24,103,280	3	65,114,050	3	135,091,000	3	155,299,250	12	100	379,607,580					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	22,115,000	1 unit	22,115,000	1	1,450,000	1	1,515,000	1	3,996,200	1	6,865,000	1	100	13,826,200					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			97 Unit	593,589,250	308 unit	373,275,000	18	22,653,280	20	30,922,600	12	131,094,800	47	146,364,250	97	31	331,034,930					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	100,000,000	1 unit	34,781,000	0	0	1 unit	32,676,450	0	0	1 unit	2,070,000	1	100	34,746,450					Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah puskesmas dengan grade utama	12 unit utama	903,704,650,000	5 unit utama	64,423,938,508	7 unit	46,604,533,747	25	8,534,806,500	25	4,461,887,990	25	9,653,160,287	25	21,680,887,382	25	357	44,373,210,159	357	108,797,148,667	357	12,03901614	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan puskesmas,ustu, rumah dinas dan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya			100 %	22,357,956,789	100	13,155,554,090	0	0	100	1,299,275,332	100	4,012,721,487	100	7,225,671,426	100	100	12,538,378,245					Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			2 Unit	66,853	2 unit	4,041,244,750	0	0	0	0	1 unit	844,495,051	1 unit	3,025,213,857	2 unit	100	3,869,708,908					Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			2 Unit	1,720,627,500	3 unit	1,360,950,000	0		3 unit	65,663,500	3 unit	188,069,120	3 unit	1,060,257,712	3 unit	100	1,313,990,332					Dinas Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar					1 Unit	160,110,077	0	0	0	0	1 Unit	64,370,000	1 Unit	64,370,000	1 unit	100	129,450,000					Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			4 Unit	950,000,000	4 Unit	55,800,000	0	0	0	0	0	0	1 unit	55,224,700	1 unit	25	55,224,700					Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			350 Unit	5,542,166,759	26 Unit	1,016,355,000	0	0	0	0	3 unit	52,552,499	23 unit	952,847,501	26 unit	100	1,005,400,000					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					60 unit	66,605,000	0	0	0	0	0	0	0	60 unit	50,170,500	60 unit	100	50,170,500				Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			8	6,454,489,263	0	0	0	0	2	1,233,611,832	4	2,863,234,817	2	2,017,587,156	8	100	6,114,433,805					Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	37,161,652,790	100	33,448,979,657	100	8,534,806,500	100	3,162,612,658	100	5,640,438,800	100	14,455,215,956	100	100	31,834,831,914					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			8000 Orang	140,741,450	7516 orang	13,645,000	3440	1,120,000	3,371	12,448,000	0	0	0	0	6,811	90.6	13,568,000					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2707 Orang	99,993,200	3623 orang	128,363,000	0	0	0	0	0	0	3,849	128,348,600	3,849	106.24	128,348,600					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1709 Orang	100,000,000	4092	288,141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	290,615,000	2 Dokumen	114,000,000	2 Dokumen	12,105,000	0	0	2 Dokumen	37,787,000	2 Dokumen	56,962,000	2 Dokumen	100	106,854,000					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6 Dokumen	229,979,287	2 dokumen	178,003,400	0	0	1 dokumen	49,272,069	0	0	1 dokumen	112,596,956	2 dokumen	100	161,869,025					Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2 Dokumen	639,556,325	1 dokumen	50,840,000	1 dokumen	3,340,000	1 dokumen	37,413,549	0	0	0	0	1 dokumen	100	40,753,549					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2 Dokumen	265,068,400	2 dokumen	396,171,289	2 dokumen	12,738,500	2 dokumen	103,435,440	2 dokumen	3,350,000	2 dokumen	36,363,600	2 dokumen	100	155,887,540					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	763,880,000	12 dokumen	95,845,000	0	0	3	29,020,000	3	11,748,000	6	37,268,000	12	100	78,036,000					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan kesehatan					25000 orang	51,059,000	0	0	13,000	40,752,000			15,522	4,050,000	28,522	114	44,802,000					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (tercapainya investigasi penemuan kasus ATM / AIDS, TBC, Malaria)			9 Dokumen	482,225,702	3 dokumen	1,166,979,040	3 dokumen	18,225,000	3 dokumen	27,020,000	3 dokumen	159,751,000	3 dokumen	216,148,500	3 dokumen	100	421,144,500					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	33,769,622,000	1 dokumen	30,667,604,019	1 dokumen	8,471,904,000	1 dokumen	2,845,211,600	1 dokumen	5,427,802,800	1 dokumen	13,790,467,600	1 dokumen	100	30,535,386,000					Dinas Kesehatan
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			1150 Orang	255,581,426	1300 orang	195,220,409	500	15,374,000	280	18,040,000			520	49,534,700	1,300	100	82,948,700					Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya					1	17,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			10 Orang	124,390,000	1570	24,491,000	0	0	0	0	0	0	0	23,476,000	0	0	23,476,000					Dinas Kesehatan
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 dokumen	61,180,000	0	0	0	0	1 dokumen	8,684,000	1 dokumen	33,074,000	1 dokumen	100	41,758,000					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%(23 unit)	20,480,650,000	100	3,375,946,750	100	1,480,225,157	0	0	100	3,547,000	100	211,438,000	100	947,954,805	100	100	1,162,939,805					Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			23 Puskesmas			191,375,000	-	0	23 Pusk	3,547,000	0	0	23 Pusk	138,511,500	23 Pusk	100	142,058,500					Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan					1 dokumen	191,375,000	-	0 dokumen		3,547,000	0	0	0 dokumen	138,511,500	1 dokumen	100	142,058,500					Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber daya Manusia			100 %	132,762,959	100	1,288,850,157	0	0	0	0	100	211,438,000	100	809,443,305	100	100	1,020,881,305					Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			50 Orang	132,762,959	358	1,288,850,157		0		0		211,438,000		809,443,305	298	83	1,020,881,305					Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,loko obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	97.14	3,635,530,000	92.86	284,144,000	94.29	503,831,000	94.29	9,795,000	94	83,067,000	94.29	188,632,600	94.29	193,666,550	90.80	90.80	475,161,150	85.62	759,305,150	88.14	20.88567967	Dinas Kesehatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100 %	84,395,000	100	63,730,000	100	4,350,000	100	25,519,000	100	10,182,000	100	15,275,000	400	400	55,326,000					Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT					3 dokumen	63,730,000	3 dokumen	4,350,000	3 dokumen	25,519,000	3 dokumen	10,182,000	3 dokumen	15,275,000	3 dokumen	100	55,326,000					Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			100 %	230,178,500	100	255,887,000	100	1,510,000	100	50,185,000	100	101,728,000	100	89,262,050	100	100	242,685,050					Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1 Dokumen	230,178,500	1 Dokumen	255,887,000	1 Dokumen	1,510,000	1 Dokumen	50,185,000	1 Dokumen	101,728,000	1 Dokumen	89,262,050	1 Dokumen	100	242,685,050					Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi/ dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			100 sarana	146,828,500		184,214,000	10	3,935,000	15	7,363,000	10	76,722,600	10	89,129,500	45	90.0	177,150,100					Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			140 Unit	146,828,500	150 unit	184,214,000	35	3,935,000	28	7,363,000	25	76,722,600	21	89,129,500	109	73	177,150,100					Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berawasan kesehatan	6 bh	2,150,000,000	3 buah	386,062,000	5 buah	356,482,493	0	0	5 buah	225,000,000	0	0	5 buah	116,100,000	5 buah	100	341,100,000	100	727,162,000	100	33.82148837	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan fasilitasi PMI			100 %	386,062,000	100 %	315,867,493	0	0	100	225,000,000	0	0	100	80,367,000	100	100	305,367,000					Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			2 Dokumen	386,062,000	2 Dokumen	315,867,493	0	0	1 dokumen	225,000,000	0	0	1 dokumen	80,367,000	2 dokumen	100	305,367,000					Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					100 %	40,615,000	0	0	0	0	0	0	100	35,733,000	100	100	35,733,000					Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	40,615,000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	35,733,000	1 dokumen	100	35,733,000					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100%	414,813,000,000	100%	215,581,520,994	100 Persen	72,159,787,656	25 Persen	6,943,146,151	25 Persen	15,907,506,105	25 Persen	18,867,724,377	25 Persen	16,644,558,542	100 Persen	100%	58,362,935,175	100.00	273,944,456,169	100.00	66.04	RSUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, serta honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.	100%	156,450,000,000	100%	66,968,399,044	100 %	1,334,131,955	Persen	1,284,683,955	Persen	24,724,000	25 Persen	18,419,000	Persen	6,057,000	100 Persen	100%	1,333,883,955					RSUD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.					350 Orang/ bulan	1,272,321,955	323 Orang/ bulan	1,272,321,955	323 Orang/ bulan	0	350 Orang/ bulan	-	350 Orang/ bulan	-	350 Orang/ bulan	100%	1,272,321,955					RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.					12 Laporan	61,810,000	3 Laporan	12,362,000	3 Laporan	24,724,000	3 Laporan	18,419,000	3 Laporan	6,057,000	12 Laporan	100%	61,562,000					RSUD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum.				2,034,418,000	100 %	1,325,834,000	25 Persen	197,950,000	25 Persen	479,625,000	25 Persen	278,842,000	25 Persen	364,656,000	100 Persen	100%	1,321,073,000					RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.					12 Laporan	1,325,834,000	3 Laporan	197,950,000	3 Laporan	479,625,000	3 Laporan	278,842,000	3 Laporan	364,656,000	12 Laporan	100%	1,321,073,000					RSUD
Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananannya kegiatan pelayanan di RSUD dan Puskesmas.	100%	258,363,000,000	100%	146,578,703,950	100 %	69,499,821,701	25 Persen	5,460,512,196	25 Persen	15,403,157,105	25 Persen	18,570,463,377	15 Persen	16,273,845,542	90 Persen	90%	55,707,978,220					RSUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.					1 Unit Kerja	69,499,821,701	1 Unit Kerja	5,460,512,196	1 Unit Kerja	15,403,157,105	1 Unit Kerja	18,570,463,377	1 Unit Kerja	16,273,845,542	1 Unit Kerja	90%	55,707,978,220					RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan grade akreditasi rumah sakit.	100%	185,400,000,000		18,276,045,033	1 unit kerja	11,820,214,323	1 unit kerja	0	1 unit kerja	0	1 unit kerja	0	1 unit kerja	9,981,823,747	1 unit kerja	100%	11,225,641,559	100.00	29,501,686,592	100.00	15.91	RSUD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.					100 %	11,820,214,323	0	0	0	0	55%	1,243,817,812	45%	9,981,823,747	100%	100%	11,225,641,559					RSUD
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan.					55 Unit	8,583,754,323	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	52,551,499	4 Unit	8,097,440,385	55 Unit	100%	8,149,991,884					RSUD
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000.					1 Unit	3,236,460,000	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	1,191,266,313	1 Unit	1,884,383,362	1 Unit	100%	3,075,649,675					RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																							PUTR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib administrasi keuangan	100.00	60,376,100,000	90.00	9,164,630,000	100	9,504,083,274	25.00	1,768,343,171	25.00	4,432,622,734	25.00	5,378,436,745	25.00	8,825,453,851	100.00	100.00	8,825,453,851.00	190	17,990,083,851	190	29.80	PUTR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			100	5,868,204,553	100	7,015,541,876	100	1,448,217,460	100	3,436,808,815	100	4,049,289,238	100	2,531,003,490	100.00	100	6,580,292,728.00					PUTR
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					83	6,715,401,876	83	1,393,579,460	83	3,265,222,815	83	3,861,412,238	83	2,438,490,490	83	100.00	6,299,902,728.00					PUTR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12	300,140,000	3	54,638,000	3	171,586,000	3	187,877,000	3	92,513,000	12	100.00	280,390,000.00					PUTR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan ATK Kantor			12	498,308,970.00	100	864,650,262	25	79,436,727	25	265,639,595	25	271,163,595	25	508,736,746	100	100.00	779,900,251.00					PUTR
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					77	131,131,440	0	0	1	73,822,008	0	79,146,008	26	40,807,122	77	100.00	119,953,130.00					PUTR
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	45,688,622	0	0	1 Paket	24,345,520	1 Paket	24,345,520	1 Paket	10,123,500	1 Paket	100.00	34,469,020.00					PUTR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	687,830,000	10	79,436,727	30	167,671,977	30	167,671,977	30	167,671,977	30	457,806,124	100	100.00	625,478,101.00					PUTR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan operasional dan dinas			12 Bulan	240,227,965.00	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0			-					PUTR
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					PUTR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran			12	240,227,965.00	100	1,183,495,247	100	182,038,448	100	570,548,747	100	778,989,105	100	338,349,737	100	100.00	1,117,338,842.00					PUTR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	210,255,247	9 Laporan	44,909,960	9 Laporan	79,683,283	9 Laporan	79,683,283	9 Laporan	107,659,379	36 Laporan	100.00	187,342,662.00					PUTR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					14 Laporan	973,240,000	3 Laporan	137,128,488	4 Laporan	490,865,464	3 Laporan	699,305,822	4 Laporan	230,690,358	14 Laporan	85.71	929,996,180.00					PUTR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran			12	308,221,679.00	100	440,395,889	100	58,650,536	100	159,425,667	100	278,994,897	100	69,327,133	100	100.00	348,322,030.00					PUTR

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					23	30,560,000	0	0	0	3,960,204	0	3,960,204	13	5,750,906	13.0	56.52	9,711,110.00					PUTR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 unit	70,475,889	0	0	0	0	5 unit	56,415,750	0	0	1 unit	20.00	56,415,750.00					PUTR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					19 Unit	339,360,000	0 unit	58,650,536	2 unit	155,465,463	3 unit	218,618,943	6 unit	63,576,227	11 unit	57.89	282,195,170.00					PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	52.92	72,000,000,000	46.1	12,000,000	51.20	11,652,261,350	51.20	0	51.20	0	51.20	6,839,883,367	51.74	4,029,530,120	51.74	101.05	10,869,413,487	51.74	10,915,935,487			PUTR
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	0.65	5,347,800,000	0.13	1,000,000	10.85	46,522,000	10.85	0	10.85	0	10.85	0	10.85	46,522,000	10.850	100.00	46,522,000.00	10.85		1,669.23		PUTR
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Terpelihara				333,092,898.00	400 M	46,522,000	0.00	0.00		0.00		0.00		40 M	46,522,000	40 M	10.00	46,522,000.00				PUTR
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					0.3 Km	46,522,000	0	0	0	0	0	0	0.04 Km	46,522,000	0.04 Km	13.33	46,522,000.00					PUTR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal sawah terairi			11.532	10,845,241,200.00	250 Ha	11,652,261,350	0.00	0	0.00	0	0.00	6,839,883,367	250 Ha	4,029,530,120	250 Ha	100.00	10,869,413,487					PUTR
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					1.5 Km	8,308,529,900	0.00	0	0.00	0	0.00	4,960,911,900	4.22 Km	3,026,056,100	4.22 Km	281.33	7,986,968,000.00					PUTR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					1,7 Km	3,343,731,450	0	0	0	0	0	1,878,971,467	1.14 Km	1,003,474,020	1.14 Km	67.06	2,882,445,487.00					PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	94.00	72,583,246,521	86.00	12,079,070,000	92.00	1,179,710,585	0.00	0	0.00	12,876,200	0.00	225,061,800	88.51	917,148,294	86.00	93.48	1,142,210,585.00	86.00	13,221,280,585	91.49	18.22	PUTR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum			11.438	5,426,113,400	107251	1,179,710,585	1E+05	0	1E+05	12,876,200	107251	225,061,800	1E+05	917,148,294	107251	100.00	1,142,210,585.00					PUTR
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					0 Liter/ Detik	1,179,710,585	0.00	0	0.00	12,876,200	0.00	225,061,800	0.00	917,148,294	0.00	100.00	1,142,210,585.00					PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	87.00	10,806,062,847	79.00	1,668,100,000	85.00	1,490,729,430	0.00	0	85.00	13,939,700	0.00	575,053,000	79.50	736,456,326	85.00	100.00	1,311,509,326.00	79.50	2,979,609,326	91.38	27.57	PUTR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang telah terlayani dengan IPAL			12	491,059,550.00	99477	1,490,729,430	99477	0	99477	13,939,700	0	575,053,000	125	736,456,326	125	0.13	1,311,509,326.00					PUTR
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan					10 M3/hari	210,729,430			2.5	13,939,700	2.5	46,401,400	5	87,094,430	10	100.00	133,495,830.00					PUTR
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Perkotaan.	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan					0 M3/hari	1,280,000,000	0	0	0	0	0	528,651,600	0	649,361,896	0	100.00	1,178,013,496.00					PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik	40.21	14,202,393,953	40.60	2,192,400,000	39.21	1,458,790,362	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	926,530,238	9.30	23.72	926,530,238.00	9.30	3,118,930,238	23.1	21.96	PUTR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang terbangun					621.89 Km	1,458,790,362							606.38 Km	926,530,238	606.38 Km	97.51	926,530,238.00					PUTR
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					3708.8 M		0	0	0	0	0	0	60 m		60 m	1.62	926,530,238.00					PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	100	42,327,114,000	75.00	15,442,861,164.00	95.00	4,250,811,058	0.00	0	0.00	0	0.00	388,646,727	79.55	3,135,688,826	100.00	105.26	3,524,335,553.00	100.00	18,967,196,717	100.00	44.81	PUTR
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Pemerintah					44	4,250,811,058	0	0	0	0	0	388,646,727	35	3,135,688,826	35	79.55	3,524,335,553.00					PUTR
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1	368,307,900	0	0	0	0	0	97,380,000	3 Paket	260,972,900	3 Paket	100.00	358,352,900.00					PUTR
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					365,160,000		0	0	0	0	0	155,962,250				100.00	155,962,250.00					PUTR
Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang diestarkan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota (PMK)	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Diestarkan untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan					3,517,343,158		0	0	0	0	0	291,266,727	7 Paket	2,718,753,676	17 paket	100.00	3,010,020,403.00					PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata	100%	6,325,440,000	67.00	432,655,900.00	94.44	50,450,000							94.44	49,964,417	94.44	71.07	49,964,417.00	127.44	50,264,417	12,744.00	0.79	PUTR

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupa pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					0	50,450,000							1	49,964,417	1	100.00	49,964,417.00					PUTR	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					1	50,450,000	0	0	0	0	0	0	1	49,964,417	1	100.00	49,964,417.00					PUTR	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi Mantap jalan kabupaten.	88.00	379,997,300,000	82.00	60,354,000,000	86.00	81,413,927,724							68.98	70,276,869,540	68.98	80.21	70,276,869,540.00	150.98	130,630,869,540	171.57	34.38	PUTR	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun/ Diganti Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terpelihara Panjang Jalan Kabupaten yang Ditingkatkan Struktur dan Kondisinya Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara					2 Unit 3 Unit 40,3 Km 3 Km	81,413,927,724							5 unit 3 unit 10 km 3 km	35,234,892,034	5 unit 3 unit 10 km 3 km	100% 100% 24,81% 100%	70,276,869,540.00					PUTR	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi					35 Km	60,872,933,085	0		7,065,135,389	1.5	28,786,012,692	1.5	24,415,059,513	10 km	28.57	53,201,072,205.00					PUTR		
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi					5 Km	2,588,386,821	-	-	256,203,471	-	945,409,710	3 km	1,191,317,461	3 km	60.00	2,136,727,171.00					PUTR		
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun					30 Jembatan	17,852,607,818			6,548,100		5,287,801,724	5 unit	9,551,516,823	5 unit	16.67	14,839,318,547.00					PUTR		
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehabilitasi					40 Jembatan	100,000,000					22,753,380	3 jembatan	76,998,237	3 jembatan	7.50	99,751,617.00					PUTR		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.20	1,000,000,000	0.04	100,000,000	0.04	83,095,000	0	0	0	0	0	0.00	2,507,100	0.04	100	8,088,900.00	0.080	108,088,900	40.00	10.81	PUTR		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang terlatih					100 orang	83,095,000							2,507,100	0	-	8,088,900.00					PUTR		
Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi					60 orang	83,095,000	0	0	0	0	5,581,800	0	2,507,100	0	-	8,088,900.00					PUTR		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	98.7	2,000,000,000	97.50	30,758,300.00	98.65	1,130,327,146							98.65	225,545,918	98.65	100.00	962,166,852.00	196.15	992,925,152	198.73	49.65	PUTR	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang dilaksanakan			2	30,758,300.00	1 dok	1,049,945,946	0	0	0	0	0	1 dok	225,545,918	1 dok	100.00	913,693,252.00					PUTR		
Penyusunan RDTR Kabupaten Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota					1 dok	1,049,945,946	0	0	0	0	688,147,334	1 dok	225,545,918	1 dok	100.00	913,693,252.00					PUTR		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan					40 layanan	80,381,200	0	0	0	0	0	124	0	124	100.00	48,473,600.00					PUTR		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KPZR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku					40 layanan	80,381,200	0	0	0	0	48,473,600	124	0	124	100.00	48,473,600.00					PUTR		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							PUTR	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																							PUTR	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jalan lingkungan permukiman kondisi baik	61	35,728,950,000.00	53.3	6,162,262,884	58.00	7,191,280,348							144,596,267	58.00	5,395,843,722	58.00	100.00	5,540,439,989.00	58.00	11,702,702,873	95.08	32.75	PUTR
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					-	7,191,280,348						144,596,267	30 Dokumentasi	5,395,843,722	30 Dokumen	100.00	5,540,439,989.00					PUTR	
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					97 Dokumen	7,191,280,348	0	0	0	0	144,596,267	30 Dokumentasi	5,395,843,722	30 Dokumen	30.93	5,540,439,989.00					PUTR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							Perkim	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	22,985,620,000	100	2,877,777,241	100	3,205,260,621.00	21.16	678,377,011.00	26.53	819,820,732.00	24.346905	752,363,967.00	27.17	839,621,451.00	98	98	3,090,183,161.00			100%		Perkim	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa ASN			100	2,420,584,156	100	2,809,717,488.00	22.15	603,988,717.00	27.45	748,462,167.00	24.45	666,614,708.00	25.95	707,381,438.00	100		2,726,447,030.00					Perkim	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2,205,771,900	40	2,558,099,488.00	23	551,422,849.00	23	679,205,299.00	23	679,205,299.00	23	604,382,840.00	23	631,018,552.00	23		2,466,029,540.00					Perkim	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			750	214,812,256	750	251,618,000.00	750	52,565,868.00	750	69,256,868.00	750	62,231,868.00	750	76,362,886.00	750		260,417,490.00					Perkim	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Kantor			100	306,808,260	100	248,767,008.00	25.45	58,219,810.00	17.71	40,508,559.00	17.63	40,341,180.00	39.22	89,727,180.00	100		228,796,729.00					Perkim	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	58,909,660	3	57,042,608.00	3	20,347,385.00	3	312,000.00	3	8,747,230.00	3	23,442,330.00	3		3		52,848,945.00					Perkim	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	3	18,271,745	3	19,622,400.00	3	2,016,100.00	3	1,670,000.00	3	2,000,000.00	3	9,025,700.00	3		3		14,711,800.00					Perkim	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	750	229,626,855	750	172,102,000.00	250	35,856,325.00	200	38,526,559.00	150	29,866,950.00	100	57,259,150.00	750		750		161,508,984.00					Perkim	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan pelayanan perkantoran	100	79,911,794	100	86,316,125.00	100	16,168,484.00	100	20,015,006.00	100	22,050,529.00	100	24,437,264.00	1		1		82,671,283.00					Perkim	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4	36,711,794	4	42,006,125.00	4	9,028,484.00	4	8,585,006.00	4	11,270,529.00	4	10,087,264.00	4		38,971,283.00					Perkim	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5	43,200.000	5	44,310,000.00	5	7,140,000.00	5	11,430,000.00	5	10,780,000.00	5	14,350,000.00	5		43,700,000.00					Perkim	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan pelayanan perkantoran			100	70,473,031	100	60,460,000.00	100	-	100	10,835,000.00	100	23,357,550.00	100	18,075,569.00	100		52,268,119.00					Perkim	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya			2	48,197,581	2	44,750,000.00	0	-	2	5,470,000.00	2	21,004,350.00	2	11,792,069.00	2		38,266,419.00					Perkim	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26	12,502,700	35	15,710,000.00	7	-	5	5,365,000.00	9	2,353,200.00	5	6,283,500.00	26		14,001,700.00					Perkim	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase penyediaanrumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100	1,250,000,000	100.00	380,821,748	0.02 100 100	279,546,800.00	11.54	27,537,056.00	29.48	45,038,056.00	24.22	37,005,606.00	28.27	43,184,456.00	100.00	100	152,765,174.00		0.00%			Perkim	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Korban Bencana						2500	85,905,000.00	0	2,989,500.00	0	2,566,500.00	0	346,500.00	0	-	0	5,902,500.00					Perkim	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus						50	85,905,000.00	0	2,989,500.00	0	2,566,500.00	0	346,500.00	0	-	0	5,902,500.00					Perkim	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100	40,948,800.00	0	-	0	6,666,500.00	0	1,010,000.00	0	15,237,450.00	100	22,913,950.00					Perkim	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						12	40,948,800.00	0	-		6,666,500.00	0	1,010,000.00	0	15,237,450.00	12	22,913,950.00					Perkim	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pemeliharaan Bangunan Rusunawa						1	152,648,000.00	0	24,547,556.00	0	35,805,056.00	0	35,649,106.00	1	27,947,006.00	1	123,948,724.00					Perkim	
Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaann Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun						1	152,648,000.00	0	24,547,556.00	0	35,805,056.00	0	35,649,106.00	1	27,947,006.00	1	123,948,724.00					Perkim	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							-	45,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					Perkim	
Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						1	45,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					Perkim	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.01	24,373,600,000		2.78	837,076,700	1.67 3.65	134,029,000.00	0	1,625,000.00	0	54,000,000.00	1.34	56,058,100.00	0	16,153,100.00	0.55	32.93	127,836,200.00		1%			Perkim
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Singkronisasi kegiatan KOTAKU dan PISEW						100	6,000.00		-	0	-	0	-	0	-	1	-					Perkim	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi						1	6,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-					Perkim	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah usulan RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang di Perbaiki						10	134,023,000.00	0	1,625,000.00	0	54,000,000.00	0	56,058,100.00	0	16,153,100.00	10	127,836,200.00					Perkim	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						12	134,023,000.00	0	1,625,000.00	0	54,000,000.00	0	56,058,100.00	12	16,153,100.00	12	127,836,200.00					Perkim	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah usulan RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang di Perbaiki	131	2,113,390,500				100	2,000,060,000.00	0	22,312,000.00	0	#####	99	512,400,000.00	0	43,820,600.00	99	99	1,972,932,600.00		99%			Perkim
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni						100	2,000,060,000.00	0	22,312,000.00	0	#####	99	512,400,000.00	0	43,820,600.00	99		1,972,932,600.00					Perkim
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						7	2,000,060,000.00	0	22,312,000.00	0	#####	99	512,400,000.00	0	43,820,600.00	99		1,972,932,600.00					Perkim
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70	11,780,900,000		55	1,316,707,749	50 65 65	3,943,883,000.00	0	8,051,800.00	0	4,170,000.00	0	5,763,100.00	0.01	1,081,383,696.00	50	100	1,099,368,596.00		100%			Perkim
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang Jalan/Drainase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dibangun						2500	3,943,883,000.00	0	8,051,800.00	0	4,170,000.00	0	5,763,100.00	900	1,081,383,696.00	900		1,099,368,596.00					Perkim
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						3	3,943,883,000.00	0	8,051,800.00	0	4,170,000.00	0	5,763,100.00	3	1,081,383,696.00	3		1,099,368,596.00					Perkim
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								Perkim

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				100	506,246,108	100	344,706,000	0	38,300,300	24,25	40,645,872	19,91	33,375,500	33	55,323,300	100		167,644,972					Perkim
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100	485,000,000	100	260,104,153	100	208,021,000,00	0	15,534,300,00	0	39,255,872,00	0	16,855,000,00	100	21,358,000,00	100	100	93,003,172,00			100%		Perkim
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah GArapan					100	208,021,000,00	0	15,534,300,00	0	39,255,872,00	0	16,855,000,00	100	21,358,000,00		1	93,003,172,00					Perkim
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	208,021,000,00	0	15,534,300,00	0	39,255,872,00	0	16,855,000,00	7	21,358,000,00		7	93,003,172,00					Perkim
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanahPersentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100	1,474,270,000	100	84,937,130	100	53,080,000,00	0	7,486,000,00	0	1,390,000,00	0	3,900,000,00	100	4,692,500,00	100	100	17,468,500,00			100%		Perkim
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah KepadaMasyarakat					100	53,080,000,00	0	7,486,000,00	0	1,390,000,00	0	3,900,000,00	100	4,692,500,00		1	17,468,500,00					Perkim
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1	53,080,000,00	0	7,486,000,00	0	1,390,000,00	0	3,900,000,00	1	4,692,500,00		1	17,468,500,00					Perkim
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peraturan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	1,689,000,000	100	161,204,825	100	83,605,000,00	0	15,280,000,00	0	-	0	12,620,500,00	100	29,272,800,00		100	57,173,300,00			100%		Perkim
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usulan Sertifikat					100	83,605,000,00	0	15,280,000,00	0	-	0	12,620,500,00	100	29,272,800,00		1	57,173,300,00					Perkim
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					40	83,605,000,00	0	15,280,000,00	0	-	0	12,620,500,00	50	29,272,800,00		50	57,173,300,00					Perkim
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	-	100%	3,261,877,925	100%	4,298,963,163	100%	438,718,474	100%	1,562,981,179	100%	880,993,245	100%	949,229,092	100%	100%	3,831,921,990	-	-	-	100%	BPBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100%		100%	2,796,762,288	100%	3,119,402,509	100	333,004,597	100%	1,228,287,268	100%	656,685,368	100%	689,674,376	100%	100	2,907,651,609					BPBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33	2,758,312,288	32 Org/bln	3,074,196,509	32 Org/bln	333,004,597	32 Org/bln	1,209,283,268	32 Org/bln	639,937,368	32 Org/bln	681,300,376		32	2,863,525,609					BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			74	40,450,000	10 Lap.	45,206,000	1 Lap	-	3 Lap	19,004,000	3 Lap.	16,748,000	3 Lap.	8,374,000		10	44,126,000					BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%		100	299,144,197	100%	350,940,054	25%	5,781,050	25%	113,539,933	25%	70,366,293	25%	66,068,191	100%	100	255,746,467					BPBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1	1,672,400	1 Paket	3,158,000	-	-	1 Paket	1,980,000	-	-	-	-		1	1,980,000					BPBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4	50,672,787	2 Paket	56,580,854	-	-	1 Paket	9,305,823	-	-	1 Paket	3,206,250		2	100	12,511,873				BPBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			3	14,996,760	3 Paket	33,840,000	-	-	1 Paket	2,232,700	1 Paket	500,000	1 Paket	1,212,500		3	100	3,945,200				BPBD
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			100	231,802,250	12 Lap.	257,361,200	3 Lap	5,781,050	3 Lap	100,012,610	3 Lap.	69,866,293	3 Lap.	61,649,441		12	100	237,309,394				BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%		12	74,836,000	90%	72,000,000	0,00	-	-	-	0%	-	0%	-		-	-					BPBD
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	74,836,000	1 Unit	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100%		12	526,682,440	100%	606,025,600	0,00	85,724,207	0,00	192,932,628	100%	132,631,334	100%	159,563,600	100%	100	570,851,769					BPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	31,210,440	12 Lap.	38,387,600	3 Lap.	6,750,207	3 Lap.	6,924,628	3 Lap.	9,160,334	3 Lap.	9,242,600		12	100	32,077,769				BPBD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	17,300,000	12 Lap.	28,350,000	3 Lap.	-	3 Lap.	5,420,000	3 Lap.	-	3 Lap.	320,000		12	100	5,740,000				BPBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			48	478,172,000	12 Lap.	539,288,000	3 Lap.	78,974,000	3 Lap.	180,588,000	3 Lap.	123,471,000	3 Lap.	150,001,000		12	100	533,034,000				BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berondisi baik	100%		12	139,175,000	100%	150,595,000	100%	14,208,620	100%	28,230,350	100%	21,310,250	100%	33,922,925	100%	100	97,672,145					BPBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			2	57,925,000	1 unit	44,615,000	1 unit	14,208,620	1 unit	11,695,950	1 unit	11,041,100	1 unit	3,051,600		1	100	39,997,270				BPBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11	81,250,000	Roda 2=7, Roda 4=7 Unit	74,980,000	Roda 2=7, Roda 4=7 unit	-	Roda 2=7, Roda 4=7 unit	16,534,400	Roda 2=7, Roda 4=7 Unit	10,269,150	Roda 2=7, Roda 4=7 Unit	30,871,325		100	57,674,875					BPBD
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi			2		2 Unit	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					BPBD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	91%	15,120,320,000	79%	1,462,330,050	83%	4,184,875,622	0.00%	-	83%	167,958,300	83%	132,182,400	83%	241,964,852	83%	100%	542,105,552	83%	2,004,435,602	91	13.26	BPBD
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	100%		76.16%	98,231,300	78.56%	32,150,000	0.00	-	###	-	78.56%	-	###	4,475,050	0%	-	4,475,050					BPBD
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya			100	98,231,300	100 Org	32,150,000	-	-	-	-	-	-	-	4,475,050	-	-	4,475,050					BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		100%	624,911,250	100%	215,253,422	0.00	-	0.00	14,316,600	100%	39,815,500	100%	49,646,790	100%	100	103,778,890					BPBD
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			100		100 Orang	101,866,708	-	-	-	-	-	-	-	35,141,843	-	-	35,141,843					BPBD
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			3		3 unit	39,766,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					BPBD
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warganegara dan aparatr yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			225	624,911,250	225 Kawasan	146,244,422	5 kwsn	-	5 kwsn	14,316,600	225 Kawasan	39,815,500	225 Kawasan	45,750,590	225	-	99,882,690					BPBD
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dengan Maklumat Pelayanan Yang Sah dan Legal Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			1		1 Lap.	69,009,000	1 lap	-	1 lap	-	1 Lap.	-	1 Lap.	3,896,200	1	-	3,896,200					BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		100%	739,187,500	100%	3,937,472,200	0.00	67,206,500	100%	153,641,700	100%	92,366,900	100%	187,843,012	100%	100	501,058,112					BPBD
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			47 Dok.	27,309,200	47 Dok.	3,000,000	11 dok	-	11 dok	3,000,000	11 Dok.	-	11 Dok.	-	44	93	3,000,000					BPBD
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis bencana			903	590,443,400	903 Org	591,053,300	52 org	67,206,500	52 org	150,641,700	752 org	92,366,900	752 org	153,643,300	752	100	463,858,400					BPBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			903	63,610,000	903 Org	71,270,300	752 org	-	752 org	-	752 org	-	752 org	34,199,712	752	100	34,199,712					BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Tim Kajian Kebutuhan pasca bencana yang dilatih	100%		100%	57,824,900	120 org	1,636,074,300	-	-	-	808,400	-	-	-	91,639,790	0%	-	92,448,190					BPBD
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana Di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsi Yang Dilegalakan			1		1 Kegiatan	1,636,074,300	1 keg	-	1 keg	808,400	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	91,639,790	1	100	92,448,190					BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						15,530,950,032		3,049,061,016		3,439,612,569		3,516,392,059		3,946,674,510				13,967,532,954					Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Unit kerja SKPD	100 Persen	85,671,360,000	100 Persen	27,827,345,135	100 Persen	10,368,643,432	25 Persen	2,107,482,340	25 Persen	2,360,944,654	25 Persen	2,744,449,441	25 Persen	2,555,474,944	100 Persen	100	9,768,351,388	100 Persen	37,595,696,523	100 Persen	43.88	Satpol PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji, tunjangan dan penerimaan sah ASN terbayar			100 Persen	24,029,888,857	100 Persen	8,924,031,316	25 Persen	1,836,597,763	25 Persen	1,862,802,763	25 Persen	2,489,806,064	25 Persen	2,220,871,582	100 Persen	100	8,410,078,172					Satpol PP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					93 Orang	8,870,411,316	81 Orang	1,836,597,763	81 Orang	1,836,597,763	93 Orang	2,483,365,064	93 Orang	2,201,107,582	93 Orang	100	8,357,668,172					Satpol PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	53,620,000	3 Laporan	-	3 Laporan	26,205,000	3 Laporan	6,441,000	3 Laporan	19,764,000	12 Laporan	100	52,410,000					Satpol PP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran			100 Persen	878,247,117	100 Persen	293,297,516	25 Persen	37,708,952	25 Persen	94,880,400	25 Persen	97,641,887	25 Persen	46,248,409	100 Persen	100	276,479,648					Satpol PP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan					1 Paket	13,752,610	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	13,723,000		-	1 Paket	100	13,723,000					Satpol PP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					3 Paket	67,799,606	0 Paket	-	0 Paket	-	2 Paket	63,585,687	1 Paket	2,612,000	3 Paket	100	66,197,687					Satpol PP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20,048,300	0 Paket	-	1 Paket	7,143,750	0 Paket	-	0 Paket	11,722,500	1 Paket	100	18,866,250					Satpol PP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	191,697,000	3 Laporan	37,708,952	3 Laporan	87,736,650	3 Laporan	20,333,200	3 Laporan	31,913,909	12 Laporan	100	177,692,711					Satpol PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan			100 Persen	82,897,290	100 Persen																	Satpol PP
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					4 unit																	Satpol PP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	2,566,858,221	100 Persen	1,027,927,600	25 Persen	227,230,634	25 Persen	342,181,441	25 Persen	143,042,290	25 Persen	265,247,753	100 Persen	100	977,702,118					Satpol PP

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	96.633,900	3 Laporan	27.890,159	3 Laporan	18,157,414	3 Laporan	20,092,136	3 Laporan	19,347,445	12 Laporan	100	85,487,154					Satpol PP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	931.293,700	3 Laporan	199,340,475	3 Laporan	324,024,027	3 Laporan	122,950,154	3 Laporan	245,900,306	12 Laporan	100	892,214,964					Satpol PP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100 Persen	269,453,650	100 Persen	123,387,000	25 Persen	5,945,000	25 Persen	61,080,050	25 Persen	13,959,200	25 Persen	23,107,200	100 Persen	100	104,091,450					Satpol PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	27,115,000	1 Unit	5,945,000	1 Unit	994,500	1 Unit	8,100,000	1 Unit	4,895,600	1 Unit	100	19,935,100					Satpol PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya					21 Unit	27,000,000	0 Unit	-	7 Unit	4,855,550	8 Unit	5,859,200	6 Unit	7,101,600	21 Unit	100	17,816,350					Satpol PP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	14,820,000	0 Unit	-	5 Unit	4,150,000	0 Unit	-	17 Unit	10,650,000	22 Unit	100	14,800,000					Satpol PP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 unit	54,452,000	0 unit	-	6 Unit	51,080,000	0 unit	-	0 unit	460,000	6 unit	100	51,540,000					Satpol PP
PROGRAM PENINGKATAN KETETERAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	14,533,560,000	100 Persen	6,906,195,129	100 Persen	3,121,032,000	25 Persen	700,325,360	25 Persen	671,440,210	25 Persen	470,744,449	25 Persen	733,658,814	100 Persen	100	2,591,961,633	100 Persen	9,498,156,762	100 Persen	65.35	Satpol PP
Penanganan Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan gangguan keteteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti			100 Persen	6,354,249,279	100 Persen	2,996,562,000	25 Persen	700,325,360	25 Persen	663,830,210	25 Persen	467,764,449	25 Persen	713,429,614	100 Persen	100	2,545,349,633					Satpol PP
Koordinasi Penyelenggaraan Keteteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keteteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					12 Dokumen	47,631,800	3 Dokumen	47,404,200	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	12 Dokumen	100	47,404,200					Satpol PP
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Keteteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Keteteraman dan Ketertiban Umum					12 Dokumen	395,778,800	3 Dokumen	386,199,500	3 Dokumen	6,234,400	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	12 Dokumen	100	392,433,900					Satpol PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					0 Orang																	Satpol PP
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					0 Dokumen																	Satpol PP
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Keteteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Keteteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan					0 Dokumen																	Satpol PP
Pencegahan Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini, Pencegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					475 Laporan	2,290,236,400	157 Laporan	266,721,660	154 Laporan	551,933,010	152 Laporan	421,968,649	131 Laporan	674,746,214	594 Laporan	125.05	1,915,369,533					Satpol PP
Penindakan atas Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keteteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan					150 Laporan	183,415,000	34 Laporan	-	26 Laporan	86,264,800	13 Laporan	22,233,800	6 Laporan	31,853,400	79 Laporan	52.67	140,352,000					Satpol PP
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Perda dan Perkada yang Terlayani					0 Laporan																	Satpol PP
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keteteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Keteteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia					4 Unit	79,500,000	4 Unit	-	4 Unit	19,398,000	4 Unit	23,562,000	4 Unit	6,830,000	4 Unit	100	49,790,000					Satpol PP
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti			100 Persen	551,945,850	100 Persen	124,470,000	100 Persen	-	100 Persen	7,610,000	100 Persen	2,980,000	100 Persen	20,229,200	100 Persen	100	46,612,000					Satpol PP
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					12 Laporan	82,430,000	3 Laporan	-	3 Laporan	8,706,800	3 Laporan	7,086,000	3 Laporan	15,369,200	12 Laporan	100	31,162,000					Satpol PP
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	42,040,000	3 Laporan	-	3 Laporan	7,610,000	3 Laporan	2,980,000	3 Laporan	4,860,000	12 Laporan	100	15,450,000					Satpol PP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Satpol PP yang berkualifikasi PPNS			17 Persen	0	17 Persen																	Satpol PP

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda					0 Laporan																	Satpol PP
PROGRAM PencegAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar	100 Persen	18,396,310,000	100 Persen	6,691,471,465	100 Persen	2,041,274,600	100 Persen	241,253,307	100 Persen	407,227,705	100 Persen	301,198,169	100 Persen	657,540,752	100 Persen	100	1,607,219,933	100 Persen	8,298,691,398	100 Persen	45.11	Satpol PP
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan kebakaran yang ditindaklanjuti			100 Persen	6,047,368,965	100 Persen	1,743,465,000	100 Persen	241,253,307	100 Persen	388,705,305	100 Persen	285,970,169	100 Persen	575,066,152	100 Persen	100	1,490,994,933					Satpol PP
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					0 Dokumen																	Satpol PP
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan	1,421,099,700	3 Laporan	193,551,307	3 Laporan	338,329,305	3 Laporan	253,433,669	3 Laporan	413,602,652	12 Laporan	100	1,198,916,933					Satpol PP
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					0 Dokumen																	Satpol PP
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota					0 Dokumen																	Satpol PP
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal					12 Dokumen	148,000,000	3 Dokumen	35,877,000	3 Dokumen	49,446,000	3 Dokumen	27,149,500	3 Dokumen	35,503,500	12 Dokumen	100	147,976,000					Satpol PP
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran					0 Orang																	Satpol PP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					40 Unit	147,830,300	1 Unit	8,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	11 Unit	124,505,000	12 Unit	30.00	132,505,000					Satpol PP
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemirraan dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					12 Dokumen	26,535,000	3 Dokumen	3,825,000	3 Dokumen	930,000	3 Dokumen	5,387,000	3 Dokumen	1,455,000	12 Dokumen	100	11,597,000					Satpol PP
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga					0 Keluarga																	Satpol PP
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pemeriksaan bangunan yang dipersyaratkan memiliki sisten proteksi kebakaran			100 Persen	30,075,300	100 Persen	15,000,000	25 Persen	0	25 Persen	0	25 Persen	0	25 Persen	4,190,000	100 Persen	100	4,190,000					Satpol PP
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran					0 Dokumen																	Satpol PP
Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					1 Dokumen	15,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4,190,000	1 Dokumen	100	4,190,000					Satpol PP
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase penyebab kebakaran terselidiki			100 Persen	0	100 Persen																	Satpol PP
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian					0 Dokumen																	Satpol PP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Satisfakar yang terbentuk			36 Kelompok	32,052,100	42 Kelompok	128,239,600	0		0			0	76 Kelompok	61,122,600	76 Kelompok	180.95	61,122,600					Satpol PP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					560 Orang	128,239,600	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	160 Orang	61,122,600	160 Orang	28.57	61,122,600					Satpol PP
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Ringkup Sistem Ketahanan Kebakaran pada Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran pada Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					0 desa/kelurahan																	Satpol PP

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia					0 Dokum																	Satpol PP
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti			100 Persen	581,975,100	100 Persen	154,570,000	100 Persen	0	100 Persen	18,522,400	100 Persen	15,228,000	100 Persen	17,162,000	100 Persen	100	50,912,400					Satpol PP
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia					12 Laporan	154,570,000	3 Laporan		3 Laporan	18,522,400	3 Laporan	15,228,000	3 Laporan	17,162,000	12 Laporan	100	50,912,400					Satpol PP
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar					0 Dokumen																	Satpol PP
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal					0 Laporan																	Satpol PP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Tekni					0 Laporan																	Satpol PP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																							Dinas Sosial
PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	22,569,160,000	85%	3,795,674,160	90%	3,509,745,375	22.5	698,955,094	22.5	930,595,505	22.5	770,900,722	22.5	875,289,177	90	100	3,275,740,498	87.50	7,071,414,658	87.50	31.33	Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100%	2,072,645,152	100%	2,443,901,470	25	592,108,419	25	612,338,347	25	585,098,020	25	571,748,139	100	100	2,361,292,925					Dinas Sosial
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19 orang/bulan	2,031,595,152	20 Orang/ bulan	2,390,161,470	20	581,726,419	20	596,525,347	20	569,165,020	20	561,446,139	20	100	2,308,862,925					Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2	41,050,000	10 Laporan	53,740,000	2	10,382,000	3	15,813,000	3	15,933,000	2	10,302,000	10	100	52,430,000					Dinas Sosial
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100%	379,467,885	100%	329,386,905	25	30,459,120	25	81,048,993	25	44,277,370	25	123,619,898	100	100	279,405,381					Dinas Sosial
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	-	1 Paket	5,549,250	1	1,038,000	1	1,115,000	1	1,607,000	1	1,666,800	1	100	5,426,800					Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8	118,732,037	5 Paket	102,355,055	1	3,000,000	1	38,231,250	1	3,129,000	2	54,851,500	5	100	99,211,750					Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			0	-	2 Paket	32,645,600	2	2,971,800	2	2,770,000	2	4,892,020	2	10,028,300	2	100	20,662,120					Dinas Sosial
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4	260,735,848	12 Laporan	188,837,000	3	23,449,320	3	38,932,743	3	34,649,350	3	57,073,298	12	100	154,104,711					Dinas Sosial
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan			100%	685,117,250	100%	17,698,700	-	-	100	15,550,000	-	150,000	-	-	100	100	15,700,000					Dinas Sosial
Pengandaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Sosial
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16	176,117,250	1 Unit	17,698,700	-	-	1	15,550,000	-	150,000	-	-	1	100	15,700,000					Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	532,235,512	100%	614,863,300	25	55,817,805	25	208,092,895	25	126,439,662	25	166,027,740	100	100	556,378,102					Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	55,668,512	12 Laporan	55,371,300	3	8,627,805	3	14,712,277	3	11,591,662	3	11,955,740	12	100	46,887,484					Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			7	476,567,000	12 Laporan	559,492,000	3	47,190,000	3	193,380,618	3	114,848,000	3	154,072,000	12	100	509,490,618					Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik			100%	126,208,361	100%	103,895,000	25	20,569,750	25	13,565,270	25	14,935,670	25	13,893,400	100	100	62,964,090					Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0	-	29 Unit	72,115,000	8	13,667,250	7	6,993,200	9	14,935,670	5	7,768,400	29	100	45,364,520					Dinas Sosial
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			32	20,147,600	46 Unit	31,780,000	17	6,902,500	13	4,572,070	-	-	16	6,125,000	46	100	17,599,570					Dinas Sosial
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	3,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Super Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	80	12,517,970,000	60	629,876,476	60%	402,958,168	15	17,985,100	15	40,007,000	15	131,927,100	15	131,792,250	60	10000	321,711,450	60	951,587,926	75	7.60	Dinas Sosial
Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Potensi Sumber Daerah			395	629,876,476	100%	402,958,168	25	17,985,100	25	40,007,000	25	131,927,100	25	131,792,250	100	100	321,711,450					Dinas Sosial

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			50	108,409,000	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-					Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			16	102,441,500	16 Orang	96,975,000	0	-	16	22,500,000	16	24,000,000	16	48,000,000	16	100	94,500,000					Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			150	52,568,500	30 Keluarga	47,236,600	0	-		1,100,000	30	11,898,400	30	16,015,250	30	100	29,013,650					Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			4	366,457,476	4 Lembaga	258,746,568	4	17,985,100	4	16,407,000	4	96,028,700	4	67,777,000	4	100	198,197,800					Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-					Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, Lansia terlarang,Disabilitas terlarang, Gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	80	8,034,060,000	50	494,286,735	60%	304,083,900	15	35,432,800	15	23,918,690	15	67,455,700	15	60,933,400	60	100	187,740,590	55	682,027,325	68.75	8.49	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar			3868	462,424,735	100%	275,488,900	25	33,992,800	25	22,318,690	25	60,537,700	24	59,768,400	100	100	176,617,590					Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			801	198,943,220	119 Orang	55,423,500	0	-	-	-	-	-	5	1,714,000	5	4.20	1,714,000					Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			375	71,152,980	12 Orang	3,600,000	0	-	-	-	-	-	4	892,000	4	33.33333333	892,000					Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			10	14,686,625	3 Orang	758,200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			5	2,525,800	15 Orang	1,814,800	3	-	3	753,000	2	-	8	-	16	107	753,000					Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			200	12,109,000	198 Orang	33,923,100	30	6,845,000	31	6,672,500	53	6,388,500	84	9,894,000	198	100	29,800,000					Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			200	18,207,500	215 Orang	72,800,000	34	5,295,000	32	2,330,000	100	40,934,200	49	20,087,200	215	100	68,646,400					Dinas Sosial
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			5	-	5 Orang	803,900	1	-	2	-	1	-	1	-	5	100	-					Dinas Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			4	7,757,000	5 Orang	3,476,200	2	1,898,000	5	462,000	-	110,000	3	442,000	10	200	2,912,000					Dinas Sosial
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			2000	17,710,000	2000 Orang	16,870,000	493	1,820,000	579	2,670,000	521	4,480,000	430	5,950,000	2023	101	14,920,000					Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			3	3,380,000	70 Orang	28,309,900	27	4,512,000	21	4,079,000	13	6,375,000	12	2,792,000	73	96	17,758,000					Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			10	9,182,000	15 Orang	1,004,300	4	-	3	-	4	-	7	350,000	18	120	350,000					Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			15	106,770,610	15 Orang	56,705,000	12	13,622,800	5	5,352,190	6	2,250,000	3	17,647,200	26	173.3333333	38,872,190					Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIWAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang terlantani			7	31,862,000	100%	28,595,000	25	1,440,000	25	1,600,000	25	6,918,000	25	1,165,000	100	100	11,123,000					Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			2	2,620,000	7 Orang	15,450,000	1	-	-	1,600,000	2	1,000,000	4	-	7	100	2,600,000					Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	29,242,000	10 Orang	13,145,000	2	1,440,000	-	-	3	5,918,000	5	1,165,000	10	100	8,523,000					Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	83	4,202,730,000	75	1,282,569,278	78%	734,056,100	19.5	22,739,000	19.5	102,761,000	19.5	215,682,900	19.5	366,341,700	78	100	707,524,600	76.5	1,990,093,878	92	47	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			1015	1,282,569,278	100%	734,056,100	25	22,739,000	25	102,761,000	25	215,682,900	25	366,341,700	100	100	707,524,600					Dinas Sosial
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			200,000	311,419,100	135,420 Orang	304,056,100	####	15,544,000	####	6,161,000	135,420	111,497,500	####	155,978,700	200,000	147.69	289,181,200					Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			65	29,042,100	0 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-					Dinas Sosial

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			710	822,724,178	161 Keluarga	430,000,000	161	7,195,000	161	96,600,000	161	104,185,400	161	210,363,000	161	100	418,343,400					Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			40	119,383,900	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-					Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100	3,055,370,000	100	295,207,500	100%	269,968,500	25	25,820,250	25	65,607,500	25	57,378,750	25	81,378,425	100	100	230,184,925	100	525,392,425	100	17.20	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial			1877	178,099,500	100%	178,303,500	25	19,604,250	25	44,532,500	25	37,877,750	25	49,949,525	100	100	151,964,025					Dinas Sosial
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			115	96,557,000	300 Orang	82,960,000	115	9,198,000	194	22,169,000	31	15,792,750	23	25,596,075	363	121	72,755,825					Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			317	41,963,500	300 Orang	59,820,000	115	6,410,250	194	10,232,000	31	18,856,000	23	15,211,000	363	100	50,709,250					Dinas Sosial
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			91	13,350,000	42 Unit	17,640,000	23	3,996,000	45	3,919,500	31	1,225,000	23	8,430,450	122	290	17,570,950					Dinas Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			5	1,125,000	5 Orang	1,557,800		-		-	3	500,000		-	3	60	500,000					Dinas Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			300	25,104,000	300 Orang	16,325,700	115	-	194	8,212,000	31	1,504,000	23	712,000	363	121	10,428,000					Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat di daerah rawan dan lokasi bencana			18	117,108,000	100%	91,665,000	25	6,216,000	25	21,075,000	25	19,501,000	25	31,428,900	100	100	78,220,900					Dinas Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			18	117,108,000	18 Orang	91,665,000	18	6,216,000	18	21,075,000	18	19,501,000	18	31,428,900	18	100	78,220,900					Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	90	390,000,000	75	19,373,700	80%	9,097,800	20	300,000	20	300,000	20	2,471,000	20	450,000	80	100	3,521,000	77.5	22,894,700	86.11	5.87	Dinas Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah tugu/Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dikelola			17	19,373,700	100%	9,097,800	25	300,000	25	300,000	25	2,471,000	25	450,000	100	100	3,521,000					Dinas Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			17	19,373,700	17 Makam	9,097,800	17	300,000	17	300,000	17	2,471,000	17	450,000	17	100	3,521,000					Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17,845,789,786		6,078,560,747		1,271,039,496		1,454,591,153		1,353,632,207		1,567,721,417			5,646,984,273					DPKB3A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABI/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	45,223,470,000	85.00	13,714,519,316	88%	4,811,575,147	61.4	1,216,479,019		1,252,474,030		1,038,817,181		981,435,839	88	100%	4,489,206,069	86.50	18,203,725,385	86.50	40.25	DPKB3A
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			200	11,723,607,533	100 persen	3,982,688,193	62.5	970,829,703	73.00	1,043,376,212	75	849,087,929	100%	844,203,062	100%	100%	3,707,496,906					DPKB3A
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			71.00	11,162,202,533	33 Orang	3,919,070,193	Orang	960,020,703	Orang	1,027,090,212	33 Orang	825,530,929	Orang	831,237,062	33 Orang	100%	3,643,878,906					DPKB3A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			25 Laporan	561,405,000	12 Laporan	63,618,000	3 Laporan	10,809,000	3 laporan	16,286,000	3 Laporan	23,557,000	3 Laporan	12,966,000	12 Laporan	100%	63,618,000					DPKB3A
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum			200 Persen	1,029,018,524	100 persen	264,070,554	75%	110,053,896	87.5 %	72,097,456	81%	66,927,485	100%	14,178,716	100%	100%	263,257,553					DPKB3A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 paket	24,383,000	1 paket	6,989,100	1 Paket	1,042,000	1 Paket	1,970,000	1 Paket	3,200,000	1 Paket	700,000	1 Paket	100%	6,912,000					DPKB3A
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	219,721,112	3 paket	51,751,007	3 Paket	41,568,700	3Paket	1,061,000	3 paket	7,757,780	3 Paket	970,000	3 Paket	100%	51,357,480					DPKB3A
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	34,118,200	3 paket	14,432,800	3 paket	7,670,300	3 paket	2,526,200	3 Paket	4,233,500	0	-	3 paket	100%	14,430,000					DPKB3A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	720,289,962	12 Laporan	190,897,647	3 Laporan	59,772,896	3 Laporan	66,540,256	3 Laporan	51,736,205	3 Laporan	12,508,716	12 Laporan	100%	190,558,073					DPKB3A
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksanannya Pengadaan barang milik daerah			0	0	100%	36,106,400	100%	34,496,300	100%	-		-	100%	-	100%	100%	34,496,300					DPKB3A
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	50 Unit	27,225,000	50 Unit	27,006,300		-		-		-	50 Unit	100%	27,006,300					DPKB3A
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	0	1 unit	8,881,400	2 unit	7,490,000		-		-		-	2 unit	100%	7,490,000					DPKB3A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			200	611,904,361	100%	357,815,000	25%	61,401,020	25%	101,688,492	75%	89,993,367	100%	98,838,861	100%	100%	351,921,740					DPKB3A

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	304,668,362	12 Laporan	119,719,000	3 Laporan	25,795,020	3 Laporan	27,574,492	3 Laporan	35,539,367	3 Laporan	29,526,861	12 Laporan	100%	118,435,740					DPKB3A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	307,235,999	12 Laporan	238,096,000	3 Laporan	35,606,000	3 Laporan	74,114,000	3 Laporan	54,454,000	3 Laporan	69,312,000	12 Laporan	100%	233,486,000					DPKB3A
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah			195.1	349,988,898	100%	170,895,000	44.5	39,698,100	72.43	35,311,870	76.25	32,808,400	100%	24,215,200	100%	100%	132,033,570					DPKB3A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0	0	1 unit	22,115,000	1 unit	12,783,300	1 Unit	6,444,520	1 Unit	1,230,000	1 unit	1,500,000	1 unit	100%	20,457,820					DPKB3A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			123	282,355,143	64 unit	90,500,000	2 unit	22,854,800	2 Unit	15,141,750	25 Unit	28,238,400	88 unit	13,714,200	73 unit	114.06	79,949,150					DPKB3A
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			29 Unit	33,035,750	24 unit	16,400,000	4 unit	3,790,000	10 Unit	4,146,000	5 Unit	2,940,000	21 Unit	5,473,000	40 unit	166.67	16,349,000					DPKB3A
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	34,598,005	1 unit	41,880,000	1 unit	270,000	1 Unit	9,579,600	1 Unit	400,000	2 Unit	3,528,000	2 Unit	200	13,777,600					DPKB3A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16.02	5,080,000,000	30.30	1,244,009,658	30 persen	499,253,600		6,105,000		49,701,750		90,746,206		274,968,700	31	103.33	421,521,656	75.62	1,665,531,314	278.527	32.79	DPKB3A
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS			52 PD	234,508,456	55 OPD	49,253,600		5,165,000	5 OPD	7,485,000		-		32,280,000	55 OPD	100%	44,930,000					DPKB3A
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			52 PD	112,089,156	55 PD	49,253,600	55 OPD	5,165,000	5 OPD	7,485,000		-		32,280,000	55 OPD	100%	44,930,000					DPKB3A
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi			400 orang	190,046,000	50 Orang	100,000,000	-	0	0	5,300,000		-	50 Orang	89,841,360	50 Orang	100%	95,141,360					DPKB3A
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Organisasi	25,598,000	2 Organisasi	100,000,000	-	-	5,300,000	-	-	2 Organisasi	89,841,360	2 Organisasi	100%	95,141,360						DPKB3A
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina			19 organisasi	819,455,202	19 organisasi	350,000,000	-	940,000	19 Organisasi	36,916,750	19 Organisasi	90,746,206	19 organisasi	152,847,340	19 organisasi	100%	281,450,296					DPKB3A
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			210 Orang	819,455,202	105 orang	350,000,000	105 orang	940,000	105 orang	36,916,750	105 orang	90,746,206	105 orang	152,847,340	105 orang	100%	281,450,296					DPKB3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	3,880,000,000	100	27,228,000	100 Persen	75,795,000	7.15	930,000	21.42	18,705,000	60%	10,721,960	100%	40,255,640	100%	100%	70,612,600	100	97,840,600	100	2.52	DPKB3A
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan			36 Kasus	176,042,500	100%	50,000,000				17,190,000		9,474,960		18,467,000	100%	100%	45,131,960					DPKB3A
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	27,228,000	1 Dokumen	50,000,000				17,190,000		9,474,960	1 Dokumen	18,467,000	1 Dokumen	100%	45,131,960					DPKB3A
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan			3 Layanan	35,181,223	3 Layanan	25,795,000		930,000	3 layanan	1,515,000	3 layanan	1,247,000	3 layanan	21,788,640	3 layanan	100%	25,480,640					DPKB3A
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			14 Layanan	35,181,223	5 Layanan	25,795,000		930,000	5 layanan	1,515,000	5 layanan	1,247,000	4 Layanan	21,788,640	5 layanan	100%	25,480,640					DPKB3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan indikator kualitas keluarga	83.3	950,000,000	66.66 Persen	1,160,482,698	60 Persen	116,487,000		0		1,970,000		16,867,860		85,193,000	66.66	111.1	104,030,860	66.66	1,264,513,558	80.02	133.11	DPKB3A

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dilatih dalam peningkatan kualitas keluarga sesuai target			15 Organisasi	297,851,098.00	100 persen	116,487,000		0	1,970,000	16,867,860	100%	85,193,000	100%	100%	104,030,860							DPKB3A
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	2 PD	116,487,000	-	-	1,970,000	2 PD	16,867,860	2 PD	85,193,000	2 PD	100%	104,030,860						DPKB3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM GENDER DAN ANAK	Persentase penyajian data gender dan anak	100	1,020,000,000	100 persen	103770750	100 persen	24,175,000		-	-	35 persen	100 Persen	20,764,800	100 Persen	100 Persen	20,764,800	100	124,535,550	100	12.21		DPKB3A	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku data gender dan anak yang dicetak					26 buku	24,175,000						26 buku	20,764,800	26 buku	100%	20,764,800					DPKB3A	
Penyediaan data gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia					1 Dokumen	24,175,000					-	1 Dokumen	20,764,800	1 Dokumen	100%	20,764,800					DPKB3A	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80	2,865,000,000	70	479,194,901	62 Persen	216,140,000		13,451,477	49,684,653	96,040,700	63.04	55,499,700	63.04	101.68	214,676,530	66.52	693,871,431	83.15	24.22		DPKB3A	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak,Jumlah Nagari Layak Anak dan Peserta Bimtek			1 lembaga	124,769,721	30 Forum anak, 5 Nagari Layak Anak, 200 peserta bimtek	75,000,000			59,766,200	32 Forum anak, 0 Nagari Layak Anak, 160 peserta bimtek	14,980,500	32 Forum anak, 0 Nagari Layak Anak, 160 peserta bimtek	62.22	74,746,700							DPKB3A	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha			0%		10 Organisasi	75,000,000			10 Organisasi	59,766,200	10 Organisasi	14,980,500	10 Organisasi	100%	74,746,700						DPKB3A	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah APSAI			1 Lembaga	124,769,721	1 Lembaga	141,140,000		13,451,477	49,684,653	36,274,500	1 lembaga	40,519,200	1 lembaga	100	139,929,830						DPKB3A	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	3 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	10,581,477	2 Dokumen	34,395,953	1 dokumen	31,304,500	1 Dokumen	22,629,000	5 Dokumen	166.67	98,910,930				DPKB3A	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	124,769,721	1 Dokumen	41,140,000		2,870,000	15,288,700	4,970,000	1 dokumen	17,890,200	1 dokumen	100	41,018,900						DPKB3A	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	3,400,000,000	100 persen	1,220,355,213	100 persen	335,135,000	0	34,074,000	70	82,055,720	78%	100,438,300	100%	109,603,738	100%	100%	326,171,758	100.00	1,546,526,971	100	45.49	DPKB3A
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi			17	197,501,450	200 orang	51,500,000		0	70 Orang	13,642,000	36 Orang	6,900,000	160 Orang	30,756,450	266	133.00	51,298,450				DPKB3A	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					200 Orang	51,500,000		0	70 orang	13,642,000	36 Orang	6,900,000	160 Orang	30,756,450	266	133.00	51,298,450				DPKB3A	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan			152	800,503,082	50 Orang	214,615,000	11 Orang	34,074,000	22 Orang	68,413,720		25,985,500	71 Orang	78,727,288	104 Orang	208.0	207,200,508				DPKB3A	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	15 Orang	4,930,000	11 Orang		22 Orang		0	71	4,930,000	104 Orang	693.3	4,930,000				DPKB3A		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			0	0	50 Orang	209,685,000	11 Orang	34,074,000	22orang	68,413,720	39 orang	25,985,500	32 Orang	73,797,288	104 Orang	208.0	202,270,508				DPKB3A	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD PPA			1 Lembaga	152,505,931	1 lembaga	69,020,000	1 lembaga			1 lembaga	67,552,800	1 lembaga	120,000	1 lembaga		67,672,800				DPKB3A		
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP			0	0	40 Orang	69,020,000		0		40 Orang	67,552,800	-	120,000	40 Orang	100	67,672,800				DPKB3A		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6,711,602,200		207,648,360		1,528,455,594		1,219,138,850		3,204,395,000		6,159,637,804					DPKB3A	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	69.63	5,150,000,000	51,23 Persen	379,585,295	68.5%	262,000,000	####	16,542,910		64,418,116	51.82 %	54,893,810	57,10	124,303,900	57,10	83.36	260,158,736	54.17	639,744,031	77.77	12.42	DPKB3A
Pemetaan Perkiraan Penduduk Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan			125	379,585,295	50000 kk	262,000,000		16,542,910		64,418,116	20259 kk	54,893,810		124,303,900	20259 kk	40.52	260,158,736					DPKB3A
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			0	0	16 Laporan	90,000,000	16 Laporan	0	16 Laporan	8,300,000	16 Laporan	32,200,000	16 Laporan	49,500,000	16 Laporan	100	90,000,000					DPKB3A
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			16 Dokumen	282,786,545	2 Dokumen	192,000,000	2 Dokumen	16,542,910	2 Dokumen	56,118,116	2 Dokumen	22,693,810	2 Dokumen	74,803,900	2 Dokumen	100	170,158,736					DPKB3A
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.5	5,200,000,000	25.1	10,651,619,751	12.73 persen	3,749,802,200	19.67	191,105,450	18.21	775,877,478	16.86	854,492,100	15.56	1,417,334,600	15.56	81.71	3,238,809,628	56.02	13,890,429,379	448.16	267.12	DPKB3A
Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru			14,834	2,181,844,320	8200 ORANG	1,576,736,200	624 Orang	90,685,450	215 Orang	339,911,400	2468 Orang	220,084,500	4165 Orang	723,576,050	7,472	91.12	1,374,257,400					DPKB3A
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			2 Laporan	177,622,800	2 Laporan	193,136,200	2 Laporan	13,740,000	2 Laporan	42,092,500	2 Laporan	27,042,500	2 Laporan	104,264,900	2 Laporan	100	187,139,900					DPKB3A
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			32 laporan	1,100,111,050	16 Laporan	793,600,000	16 Laporan	68,442,950	16 Laporan	154,684,150	16 Laporan	145,632,000	16 Laporan	355,592,500	16 Laporan	100	724,351,600					DPKB3A
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok			32 Laporan	378,575,000	10 Laporan	240,000,000	1 Laporan	2,945,000	3 Laporan	68,625,000	3 Laporan	23,925,000	3 Laporan	101,730,000	10 Laporan	100	197,225,000					DPKB3A
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			6 Dok	256,503,070	2 Dokumen	150,000,000		-	2 Dokumen	30,135,000	2 Dokumen	19,125,000	2 Dokumen	76,891,650	2 Dokumen	100	126,151,650					DPKB3A
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					35 Organisasi	200,000,000	35 Organisasi	5,557,500	35 Organisasi	44,374,750		4,360,000	35 Organisasi	85,097,000	35 Organisasi	100	139,389,250					DPKB3A
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumah PKB yang Dibina			38 Orang	402,813,000	26 Orang	294,000,000	20 Or ang	21,900,000	20 Orang	97,600,000	26 Orang	32,400,000	26 Or ang	142,100,000	26 Orang	100	294,000,000					DPKB3A
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			2502 Orang	1,369,243,144	1251 Orang	294,000,000	438 orang	21,900,000	314 orang	97,600,000	920 Orang	32,400,000	1251 Orang	142,100,000	1251 Orang	100	294,000,000					DPKB3A
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asektor yang dilayani			27.175 Orang	5,703,004,639	3000 Orang 16,478 orang	1,427,316,000	3194 Orang	76,645,000	917 Orang	271,741,078	6635 Orang	543,472,600	####	344,758,550	22,831	138.55	1,236,617,228					DPKB3A
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			48 Laporan	675,334,916	24 Laporan	23,400,000	24 Laporan	6,905,000	24 Laporan	5,921,350	24 Laporan	4,020,000	24 Laporan	6,328,650	24 Laporan	100	23,175,000					DPKB3A
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			4192	1,288,100,274	2000 Orang	813,313,000	155	57,640,000	806	247,997,400	556	41,070,000	###	316,150,300	2,615	130.75	662,857,700					DPKB3A
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			80 Unit	3,425,772,539	1 Unit	544,253,000	-	-		10,972,328	1 Unit	488,672,600	-	8,155,400	1 Unit	100	507,800,328					DPKB3A
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			107 Laporan	68,884,050	25 laporan	46,350,000	6 lapora n	12,100,000	6 lapora n	6,850,000	6 laporan	9,710,000	7 lapora n	14,124,200	25 laporan	100	42,784,200					DPKB3A
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB			50 Dokumen	701,240,980	28 Dok	451,750,000	0	1,875,000	17 Doku men	66,625,000	28 Dokumen	58,535,000	28 Doku men	206,900,000	28 Dokumen	100	333,935,000					DPKB3A
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikut Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			50 Kampung KB	701,240,980	28 Kampung	451,750,000	17 Kampu ng	1,875,000	17 Kampu ng	66,625,000	28 kampung	58,535,000	28 kampung	206,900,000	28 kampung	100	333,935,000					DPKB3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (Bangga) (%)	52	4,480,000,000	54,18 persen	3,861,197,900	50.9 persen	2,679,800,000	54.18	-	56.2	688,160,000	59.44	309,752,940	59.44	1,662,756,500	59.44	#VALUE!	2,660,669,440	54.18	6,521,867,340	104.19	145.58	DPKB3A
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS			132 Kelompok	3,687,677,250	50 Klp	300,000,000	0	-		-		-	50 klp	291,276,000	50 klp	100	291,276,000					DPKB3A

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)			30 Unit	352,440,000	31 Unit	300,000,000							31 Unit	291,276,000	31 Unit	100	291,276,000					DPKG3A
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina			0		50 Klp	2,379,800,000			50 kelompok	688,160,000	50 kelompok	309,752,940	334	1,371,480,500	334 kelompok		2,369,393,440					DPKG3A
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			0	0	12 Laporan	1,113,000,000	3 Laporan		3 Laporan	328,600,000	3 Laporan	136,000,000	3 Laporan	647,500,000	12 Laporan	100	1,112,100,000					DPKG3A
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			0	0	19,475 laporan	1,266,800,000	3585 laporan		4479 laporan	359,560,000	5375 Laporan	173,752,940	4,480	723,980,500	17,917 Laporan	92	1,257,293,440					DPKG3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																							DLH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100.00	31,382,630,000	93.13	11,855,970,652	100 persen	5,098,558,116	25%	#REF!	25%	1,288,634,079	25%	1,031,659,555	25%	1,160,274,101	100.0%	100%	4,580,407,495	100	16,436,378,147	100.00	52.37	DLH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji PNS, PTT/kontrak dan THL					100 persen	3,719,675,411	25%	876,969,055	25%	939,947,494	25%	760,145,100	25%	824,121,643	100.0%	100.0%	3,401,183,292					DLH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31 Orang/bulan	3,647,235,411	31 Orang/bulan	876,969,055	31 Orang/bulan	910,971,454	31 Orang/bulan	738,413,100	31 Orang/bulan	802,389,643	31 Orang/bulan	100.0%	3,328,743,292					DLH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					13 Laporan	72,440,000	3 laporan		3 laporan	28,976,000	3 laporan	21,732,000	4 laporan	21,732,000	13 laporan	100.0%	72,440,000					DLH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan peralatan Rumah tangga Kantor					100 persen	380,244,229	16%	53,466,490	33%	110,595,743	21%	71,760,639	30%	103,252,167	100.0%	100.0%	339,075,039					DLH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	10,000,000	0.5 paket	1,650,000	0.5 paket	707,500	-	-	50%	-	1 paket	100.0%	2,357,500					DLH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					3 paket	68,513,089	0.75 paket	2,650,000	0.75 paket	45,196,500	0.75 paket	7,774,000	0.75 paket	1,138,500	3 paket	100.0%	56,759,000					DLH
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan					2 paket	25,688,040	0.5 paket	11,271,550	0.5 paket	2,201,000	0.5 paket	4,303,305	0.5 paket	3,085,037	2 paket	100.0%	20,860,892					DLH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 laporan	276,043,100	3 laporan	37,894,940	3 laporan	62,490,743	3 laporan	59,683,334	3 laporan	99,028,630	12 laporan	100.0%	259,097,647					DLH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah					100 persen	890,316,476	25%	141,535,146		236,709,392		165,072,377		226,940,091	66.0%	66.0%	790,257,006					DLH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 laporan	259,796,476	3 laporan	55,213,146	3 laporan	50,566,392	3 laporan	54,999,377	3 laporan	54,136,091	12 laporan	100.00	214,915,006					DLH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 laporan	630,522,000	3 laporan	86,322,000	3 laporan	186,143,000	3 laporan	130,073,000	3 laporan	172,804,000	12 laporan	100.0%	575,342,000					DLH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara					100 persen	108,320,000	0	#REF!		11,381,450		14,681,439		5,960,200	11 unit	100.0%	49,892,158					DLH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					11 unit	71,500,000	3 unit	17,869,069	5 unit	7,276,450	2 unit	10,074,089	1 unit	1,840,200	11 unit	100.0%	37,059,808					DLH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					58 unit	36,820,000	0	-	19 unit	4,105,000	19 unit	4,607,350	20 unit	4,120,000	58 unit	100.00	12,832,350					DLH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100	1,647,000,000	100	618,274,820	100.00	393,668,300	100	5,385,800		9,648,400		79,863,160		245,648,300	100.00	100	340,545,660	100.00	958,820,480	100	58.22	DLH
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen RPPLH yang diac oleh dokumen perencanaan pembangunan lainnya					2 dokumen	156,220,800	0.20	2,775,800	0.80	8,318,500	1.00	65,961,500	-	67,003,200	2 dokumen	100.00	144,059,000					DLH
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Propinsi					2 dokumen	156,220,800	0.20	2,775,800	0.8	8,318,500	1	65,961,500	0	67,003,200	2 dokumen	100.00	144,059,000					DLH
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun					1 dokumen	237,447,500	0.20	2,610,000	0.20	1,329,900	0.30	13,901,660	0.30	178,645,100	1 dokumen	100.00	196,486,660					DLH
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 dokumen	237,447,500	0.20	2,610,000	0.20	1,329,900	0.30	13,901,660	0.30	178,645,100	1 dokumen	100.00	196,486,660					DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau	50	9,867,000,000	36.00	2,935,971,074	35 persen	2,289,176,843		109,575,547					35.00		35.00	100.0%	2,058,669,557	35.00	4,994,640,131	70.00	50.62	DLH
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Identifikasi potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan upaya mitigasi yang dilakukan					3 paket kegiatan	2,208,317,383	0.75 kegiatan	101,531,547	0.75 kegiatan	136,248,500	0.75 kegiatan	163,722,600	0.75 kegiatan	1,623,944,160	3 kegiatan	100.0%	2,025,446,807					DLH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi hasil invenirisasi GRK dari sektor LH yang dilaksanakan					3 dokumen	16,430,000	0	3,558,500	-	-	-	600,000	kumen	7,040,000	100.0%	100.0%	11,198,500					DLH

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut					45 lokasi	1,250,909,800	44 lokasi	8,846,500	0	2,940,500	44 lokasi	12,639,000	lokasi	1,163,279,800	45 lokasi	100.0%	1,187,705,800					DLH
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					801 dokumen	940,977,583	167	89,126,547	180	133,308,000	163	150,483,600	197	453,624,360	707 dokumen	88.26%	826,542,507					DLH
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemulihan media lingkungan yang dilaksanakan					5 Paket	80,859,460	0	8,044,000	0	7,120,000	0	7,798,250	0	10,260,000	0	0.00	33,222,250					DLH
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar						-		-									-					DLH
Pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					2000 M2	80,859,460	0	8,044,000	0	7,120,000	0	7,798,250	-	10,260,000	0	0%	33,222,250					DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	100.00	5,399,000,000	14 persen	2,491,868,790	14 persen	1,284,575,075	3.5	188,418,900	3.5	341,112,240	3.5	307,313,560	3.5		14 persen	100.0%	1,209,495,250	14 persen	3,701,364,040	14	68.56	DLH
Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Keekaragaman hayati yang dikelola					14 persen	1,284,575,075	3.5	188,418,900	3.5	341,112,240	3.5	307,313,560	3.5	372,650,550	14 persen	100.0%	1,209,495,250					DLH
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					29.6 Ha	1,284,575,075	26.9 Ha	188,418,900	26.9 Ha	341,112,240	26.9 Ha	307,313,560	26.9 Ha	372,650,550	26.9 Ha	100.0%	1,209,495,250					DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	100.00	329,000,000	66.67	1,426,776,354	98 persen	23,722,500	100 persen	2,095,000	100 persen	520,000	100 persen	495,000	100 persen	470,000	100 persen	100.00	3,580,000	100.00	1,430,356,354	100	100	DLH
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Rekomendasi Standar Teknis/Rncian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan					100 persen	23,442,500	100 persen	1,815,000	0	520,000	100 persen	495,000	100 persen	470,000	100 persen	100.00	3,300,000					DLH
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					6 laporan	23,442,500	1 laporan	1,815,000	1 laporan	520,000	-	495,000	-	470,000	2 laporan	33.3	3,300,000					DLH
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Persetujuan Teknis dan SLO Pengumpulan Limbah B3					100 persen	280,000	0	280,000	0		0		1 dokumen		1 dokumen	100	280,000					DLH
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya					1 Dokumen	280,000	0	280,000	0		0		0 dokumen		1 dokumen	100	280,000					DLH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	37	1,300,000,000	27	411,352,100	33 persen	117,947,500	0	19,808,000	0	23,800,000	0	20,965,000	14.74	14,678,200	14.74	44.67	79,251,200	14.74	490,603,300	39.84	37.74	DLH
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan					33 persen	117,947,500	0	19,808,000	0	23,800,000	0	20,965,000	14.74	14,678,200	14.74	44.67	79,251,200					DLH
Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					4 dokumen	63,650,000	1 dokumen	9,682,500	1 dokumen	10,460,000	1 dokumen	10,495,000	2 dokumen	11,410,000	5 dokumen	125.0	42,047,500					DLH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					10 badan usaha	54,297,500	4 badan usaha	10,125,500	2 badan usaha	13,340,000	1 badan usaha	10,470,000	1 badan usaha	3,268,200	8 badan usaha	80	37,203,700					DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan					2 Dokumen	3,630,669,643	0		0	675,373,200	0	1,352,403,730	2 dokumen		2 dokumen	100.00	3,548,059,220					DLH
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan						3,630,669,643	0		0	675,373,200	0	1,352,403,730	2 dokumen		2 dokumen	100.00	3,548,059,220					DLH
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan					2 Dokumen	3,630,669,643	0		0	675,373,200	0	1,352,403,730	2 dokumen	1,520,282,290	2 dokumen	100	3,548,059,220					DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan lingkungan yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah	4	569,000,000	4 Penghargaan	72,089,750	4 Penghargaan	111,314,050	-	16,596,700	-	2,055,000	-	4,240,000	3 penghargaan		3 penghargaan	75.00	24,350,000	3 penghargaan	96,439,750	75	16.95	DLH
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penilaian keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan perlindungan LH					100 persen	111,314,050	33.33	16,596,700	33.33	2,055,000	33.33	4,240,000	-		100.0%	100%	24,350,000					DLH
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					3 entitas	111,314,050	1 entitas (adipura)	16,596,700	1 entitas (kalpataru)	2,055,000	1 entitas (adhiwiyata)	4,240,000	-	1,458,300	3 entitas	100%	24,350,000					DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00	428,000,000	100	47,841,500	100 persen	13,899,700	0	297,000	0	-	100.00	2,900,000	####	3,810,000	100	100	7,007,000			-	0.00	DLH

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan					100 persen	13.899,700	0%	297,000	-		2,900,000	3,810,000	6 pengaduan	200.00	7,007,000							DLH
Pengelolaan Pengaduan Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang diadakan/judititangani	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang diadakan/judititangani					3 pengaduan	13,899,700	0%	297,000	-		2,900,000	3,810,000	6 pengaduan	200.00	7,007,000							DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan Sampah Kabupaten	70.00	18,146,150,000	43.29	15,329,885,264	46 persen	3,262,294,655	0	902,291,920	0		0		46.29		46.29	100.63	4,418,199,087	46.29	19,748,084,351	66.13	108.83	DLH
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten					46 persen	3,262,294,655		902,291,920								19%	4,418,199,087					DLH
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					31.000 ton	1,330,216,555	7070	869,023,420	9,440	345,801,200	4,990	11,710,611	###	51,951,230.00	36,135	116.56	1,278,486,461					DLH
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat					15 kelompok	18,187,100	0.00%	3,063,200	-	1,060,000	3 kelompok	865,000	4 kelompok	302,700	4 kelompok	27 %	5,290,900					DLH
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					30 unit	261,000,000		30,205,300	15 unit	69,073,080	-	67,771,050	15 unit	90,885,835	15 unit	50	257,935,265					DLH
Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan					450 Ton	1,652,891,000					100%	1,598,000,000	24,633.85 ton	-	100.00%	100%	1,598,000,000					DLH
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					31000 Ton	1,330,216,555	7,070 ton	869,023,420	9,440,10 ton	345,801,200	4,990 ton	11,710,611		51,951,230	21,500	69%	1,278,486,461					DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		95	36,603,370,000	100	7,182,969,138	88	4,186,383,311	22	793,398,153	22	1,079,542,369	22	817,338,223	22	982,223,417	88	100	3,672,502,162	95	10,855,471,300	100	29.66	Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS	100		100	4,816,726,828	100	2,907,127,427	100	655,133,477	100	814,698,760	100	575,392,480	100	721,709,419	100	100	2,715,784,136					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	87.10	4,789,218,828	28 Orang	2,855,977,427	28 Orang	650,018,477	28 Orang	799,353,760	28 Orang	570,277,480	28 Orang	696,134,419	28 Orang	100	2,715,784,136					Dinas Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				27,508,000	12 Laporan	51,150,000	3 laporan	5,115,000	3 laporan	15,345,000	3 laporan	5,115,000	3 laporan	25,575,000	12 laporan	100	51,150,000					Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100		100	59,074,200	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100	-	-					Dinas Pencatatan Sipil
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	100	59,074,200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum dan operasional kantor	100		100	1,183,081,085	100%	353,823,776	100	37,654,771	100	88,295,485	100	110,673,071	100	95,223,693	100	100	331,847,020					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	100	10,875,170	1 paket	7,085,173	-	-	-	-	-	1,970,250	1 paket	5,106,000	1 paket	100	7,076,250					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	100	492,027,765	2 paket	75,078,303	0	-	-	2,633,830	1 paket	39,349,122	1 paket	30,793,350	2 paket	100	72,776,302					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	100	43,823,259	7 paket	18,028,900	1 paket	2,570,205	2 paket	10,596,916	2 paket	3,266,500	2 paket	1,554,000	7 paket	100	17,987,621					Dinas Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-		636,354,891	12 laporan	253,631,400	3 laporan	35,084,566	3 Laporan	75,064,739	3 Laporan	66,087,199	3 Laporan	57,770,343	12 laporan	100	234,006,847					Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah	100	-	100	221,184,450	100	92,437,000	25	-	25	-	25	-	25	4,870,000	100	100	4,870,000					Dinas Pencatatan Sipil
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		50,227,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Pencatatan Sipil
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100	170,956,950	16 unit	92,437,000	-	-	-	-	-	-	2 unit	4,870,000	2 unit	33.33	4,870,000					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	717,375,900	25	543,532,108	25	83,755,605	25	160,089,237	25	118,848,472	25	141,998,055	100	100	504,691,369					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	100	148,193,900	12 laporan	99,708,400	3 laporan	24,447,605	3 laporan	24,412,237	3 laporan	24,721,472	3 laporan	16,374,355	12 laporan	100	89,955,669					Dinas Pencatatan Sipil

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	85.71	569,182,000	12 laporan	443,823,708	3 laporan	59,308,000	3 laporan	135,677,000	3 laporan	94,127,000	3 laporan	125,623,700	12 laporan	100	414,735,700					Dinas Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100		100	185,526,675	100	289,463,000	25	16,854,300	25	16,458,887	25	12,424,200	25	18,422,250	100	100	41,775,537					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakjannya		-	100	147,283,745	1 Unit	27,107,000	1 Unit	12,545,500	1 Unit	7,056,437	1 Unit	1,632,000	1 Unit	4,943,500	1 unit	100	26,177,437					Dinas Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	100	-	11 unit	39,500,000	11 unit	1,800,000	11 unit	8,702,450	11 unit	1,133,500	11 unit	10,748,150	11 unit	100	22,384,100					Dinas Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	100	38,242,930	24 unit	23,020,000	24 unit	2,508,800	24 unit	700,000	24 unit	9,658,700	24 unit	2,730,600	24 unit	100	15,598,100					Dinas Pencatatan Sipil
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	199,836,000		-		-		-		-			-					Dinas Pencatatan Sipil
Program : Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)	99	1,041,000,000	94.49	1,882,145,015	99	1,148,695,900	24	42,723,750	25	54,072,550	25	623,693,410	25	275,940,660	99	100	996,430,370	99	2,878,575,385	100	276.52	Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Administrasi oleh Unit Pelayanan				1,882,145,015	99	1,148,695,900	24	42,723,750	25	54,072,550	25	623,693,410	25	275,940,660	99	100	996,430,370					Dinas Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.	Jumlah dok.kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.		-		1,882,145,015	12 dokumen	1,148,695,900	3 dokumen	42,723,750	3 dokumen	54,072,550	3 dokumen	623,693,410	3 Dokumen	275,940,660	12 dokumen	100	996,430,370					Dinas Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 Tahun	99	471,970,000	92	74,193,800	99	123,613,400	24	4,795,000	25	4,915,000	25	14,133,000	25	6,247,800	99	100	30,090,800		104,284,600			Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)				74,193,800	99%	123,613,400	24	4,795,000	25	4,915,000	25	14,133,000	25	6,247,800	99.00	100	30,090,800					Dinas Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		-		74,193,800	12 dokumen	123,613,400	3 dokumen	4,795,000	3 dokumen	4,915,000	3 dokumen	14,133,000	3 dokumen	6,247,800	12 dokumen	100	30,090,800					Dinas Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (%)		878,710,000	66	262,849,919	100	144,877,200	25	19,172,850	25	18,610,350	25	50,204,650	100	35,637,630	100	100	123,625,480	-	386,475,399			Dinas Pencatatan Sipil
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang terkelola (jml data kependudukan yg terkelola/jml total data kependudukan x 100%)				262,849,919	100%	144,877,200	25%	19,172,850	25%	18,610,350	25%	50,204,650	25%	35,637,630	100	100	123,625,480					Dinas Pencatatan Sipil
fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan		-		262,849,919	12 laporan	144,877,200	3 Laporan	19,172,850	3 Laporan	18,610,350	3 Laporan	50,204,650	3 Laporan	35,637,630	12 laporan	100	123,625,480					Dinas Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	3,950,950,000	67.13	5,996,341,797	100 persen	4,585,061,755	25 Persen	643,089,088	25 Persen	1,257,780,643	25 Persen	1,379,109,999	25 Persen	1,060,234,060	100.2	100	3,279,979,730	100	9,276,321,527	100	2	DPMN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non PNS			96.75	5,435,505,959	100 persen	2,099,700,184	25 Persen	515,162,772	25 Persen	520,491,697	25 persen	446,918,465	25 Persen	464,805,130	100		1,482,572,934					DPMN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		2,700,000,000	97.5	4,035,141,228	18 orang	2,057,550,184	18 orango	515,162,772	18 orango	520,491,697	18 orang	422,843,465	18 orango	446,730,130	18	100	1,905,228,064					DPMN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		180,000,000	96	1,400,364,731	12 Laporan	42,150,000	3 laporan	0	3 laporan	0	3 laporan	24,075,000	3 laporan	18,075,000	12		42,150,000					DPMN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di OPD			71.4		100 Persen	356,673,635	15 Persen	50,563,490	26 Persen	89,614,706	46 Persen	160,895,194	14 Persen	48,613,470	101.00		301,073,390					DPMN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5,500,000	91	8,438,000	1 Paket	3,290,120	1Paket	360,000	0 paket	0	1Paket	2,057,000	1Paket	260,000	1		2,677,000					DPMN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		80,000,000	80	255,968,960	3Paket	58,519,715	3Paket	11,567,945	3Paket	8,723,440	3Paket	28,171,725	3Paket	8,208,620	3		56,671,730					DPMN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		17,500,000	91	33,238,318	2 Paket	17,821,200	2 Paket	1,203,600	2 Paket	2,338,400	2 Paket	4,916,000	2 Paket	7,826,750	2		16,284,750					DPMN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	95	663,695,346	12 Laporan	277,042,600	3 Laporan	37,431,945	3 Laporan	78,552,866	3 Laporan	125,750,469	3 Laporan	32,318,100	12		274,053,380					DPMN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16,678,000	100 Persen	-	0	-	0	-	0	0	100 Persen	16,678,000	100		0					DPMN
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				53 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					DPMN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				3 Unit	16,678,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Unit	16,678,000	1		16,678,000				DPMN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di OPD			96	443,151,788	100 persen	2,028,514,936	25 persen	66,870,288	25 persen	626,239,990	25 persen	750,890,051	25 persen	508,706,610	100		1,444,000,329					DPMN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		90,000,000	96	165,523,788	12 Laporan	178,913,104	3 Laporan	41,570,288	3 Laporan	38,286,416	3 Laporan	43,769,059	3 Laporan	43,031,482	12		166,657,245					DPMN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		150,000,000	96	277,628,000	12 Laporan	1,849,601,832	3 laporan	25,300,000	3 laporan	587,953,574	3 laporan	707,120,992	3 laporan	465,675,128	12		1,786,049,694					DPMN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di OPD			71.5	117,684,050	100 persen	83,495,000	25 persen	10,492,538	25 persen	21,434,250	25 persen	20,406,289	25 persen	21,430,850	100		52,333,077					DPMN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25,000,000	100	26,906,675	1 unit	28,615,000	1 unit	6,337,938	1 unit	8,456,250	1 unit	9,084,739	1 unit	1,851,600	1	100	25,730,527					DPMN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15,000,000	96	56,898,875	7 unit	22,500,000	7 Unit	2,129,600	7 Unit	900,000	7 Unit	3,916,550	7 Unit	11,941,250	7		18,887,400					DPMN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16,000,000	45	17,702,000	55 unit	25,780,000	6 unit	1,575,000	18 unit	8,048,000	10 unit	5,980,000	21 Unit	7,338,000	55	100	22,941,000					DPMN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Atau Direhabilitasi		20,000,000	45	16,176,500	1 unit	6,600,000	1 unit	450,000	1 unit	4,030,000	1 unit	1,425,000	1 unit	300,000	1	100	6,205,000					DPMN
PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	105	700,000,000	56 Nagari	246,015,250	82	100,502,000	69	19,049,100	69	23,625,000	69	26,253,000	69	29,995,200	69.00	84.15	68,927,100	84.15	314,942,350	80	0.45	DPMN
Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Nagari			97.5		100 Persen	100,502,000	19 Persen	19,049,100	24 Persen	23,625,000	27 Persen	26,253,000	30 Persen	29,995,200	13	84.15	68,927,100					DPMN
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		700,000,000			13 nagari	100,502,000	13 nagari	19,049,100	13 nagari	23,625,000	13 nagari	26,253,000	13 nagari	29,995,200	13	84.15	98,922,300					DPMN
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Jenis Kerja Sama Antar Nagari	7	3,000,000,000	3 jenis	134,988,839	(5 jenis)	133,637,800	25 Persen	15,255,500	25 Persen	30,619,700	25 Persen	30,475,000	25 Persen	40,838,000	4	80	76,350,200	7	211,339,039	100	7	DPMN
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerja sama antar Nagari					(2 dokumen)	133,637,800	25 Persen	15,255,500	25 Persen	30,619,700	25 Persen	30,475,000	25 Persen	40,838,000	2		76,350,200					DPMN
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota					1 dokumen	106,503,200	0	13,920,000	0	20,147,500	1 dokumen	23,968,000	1	37,977,250	2	200	96,012,750					DPMN
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan					1 dokumen	27,134,600	0	1,335,500	0	10,472,200	0 dokumen	6,507,000	1	2,860,750	2	200	21,175,450					DPMN
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari yang terbina	18	3,500,000,000	17 kegiatan	1,114,979,791	18 kegiatan	348,366,700	6	35,189,900	6	70,622,400	9	112,682,639	6	84,852,659	27	150.00	218,494,939	123.33	1,333,474,730	128	0.38	DPMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya evaluasi tingkat Perkembangan Nagari dan evaluasi LPPN Nagari			96.65	1,114,979,791	100 Persen	348,366,700	25 Persen	35,189,900	25 Persen	70,622,400	25 Persen	112,682,639	25 Persen	84,852,659	100	100	218,494,939					DPMN
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		300,000,000	239	202,897,210	35 dokumen	34,549,600	10	4,716,400	5	9,020,000	10 dokumen	6,142,500	10	9,922,800	35		29,801,700					DPMN
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		600,000,000	97.5	245,937,610	3 dokumen	80,815,000	1	4,948,000	0	26,112,300	2 Dokumen	20,773,900	0	19,282,300	3	100	71,116,500					DPMN
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		250,000,000	97.5	160,563,843	12 dokumen	47,150,000	3	6,799,500	3	13,006,100	3 Dokumen	14,778,000	3	7,794,600	12	100	42,378,200					DPMN
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		500,000,000	90	285,936,138	92 orang	78,102,000	0 orang	8,091,000	0 orang	5,520,000	92 orang	39,253,439	0 orang	21,668,950	92	100	74,533,389					DPMN
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		400,000,000	100	128,320,690	1 dokumen	32,820,000	0	4,595,000	0	3,805,500	0 dokumen	5,325,000	1	8,225,059	1	100	21,950,559					DPMN
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		250,000,000	100	91,324,300	92 dokumen	30,000,100	50	3,170,000	20	8,528,500	22 Dokumen	8,470,000	0	6,454,200	92	100	26,622,700					DPMN
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		250,000,000			1 dokumen	44,930,000	0	2,870,000	0	4,630,000	2 dokumen	17,939,800	0	11,504,750	2	200	36,944,550					DPMN
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	100	1,700,000,000	99	3,718,560,747	100 persen	544,421,000	25 Persen	6,868,400	25 Persen	7,956,170,919	25 Persen	514,694,875	25 Persen	543,633,447	100	100	8,477,734,194	199	12,196,294,941	199	717	DPMN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Nagari			40	3,718,560,747	100 Persen	544,421,000	25 Persen	6,868,400	25 Persen	7,956,170,919	25 Persen	514,694,875	25 Persen	543,633,447	100	100	8,477,734,194					DPMN
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguasaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Penguasaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		900,000,000	100	54,521,250	2 Dokumen	4,517,400	0	2,306,900	0	1,904,700	1 Dokumen	0	1	300	2	100	4,211,900					DPMN

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Kenyamanan Pengguna Jasa Angkutan					76 Persen	81,905,000	62.18	50,930,000	8.49	6,950,900	3.85	3,154,500	15.83	12,311,876								Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					20 unit	81,905,000	2 unit	50,930,000	0.00	6,950,900	0.00	3,154,500	1 unit	12,311,876	3 unit	15.00	73,347,276					Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					74 Persen	294,169,900	17.89	52,631,375	7.41	21,796,000	1.83	5,393,000	19.46	57,236,040								Dinas Perhubungan
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji / KIR					3540 Unit	294,169,900	17.89	52,631,375	7.41	21,796,000	1.83	5,393,000	19.46	57,236,040								Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					60 Persen	173,916,265	26.48	46,057,900	12.17	21,157,000	5.78	10,048,500	11.75	20,433,050								Dinas Perhubungan
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					80 unit	173,916,265	50 unit	46,057,900	12 unit	21,157,000	8 unit	10,048,500	10 unit	20,433,050	80 unit	300	97,696,450					Dinas Perhubungan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					60 Persen	61,966,400	21.97	13,615,000	24.77	15,350,050	22.70	14,068,600	21.35	13,232,600								Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	61,966,400	0.00	13,615,000	0.00	15,350,050	0.00	14,068,600	0.00	13,232,600	0	0	56,266,250					Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	648,247,850	25.00	92,932,250	25.00	242,158,700	25.00	71,475,450	25.00	130,789,700	100	100	537,356,100					Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Laporan	648,247,850	3 laporan	92,932,250	3 laporan	242,158,700	3 laporan	71,475,450	3 laporan	130,789,700	12 Laporan	100	537,356,100					Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan prasarana dan fasilitas ASDP	66	816,000,000	64.67	216,659,700	60 Persen	100,000,000	16.50	20,680,000	16.50	35,477,100	16.50	15,074,100	16.50	13,995,000	66	110	85,226,200	66	301,885,900	100	37.00	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terwujudnya Transportasi ASDP					60 Persen	100,000,000	25.00	20,680,000	25.00	35,477,100	25.00	15,074,100	25.00	13,995,000	100	100	85,226,200					Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					4 Unit	100,000,000	1 unit	20,680,000	1 unit	35,477,100	1 unit	15,074,100	1 unit	13,995,000	4 Unit	100	85,226,200					Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	23,394,120,000	91.5	8,179,217,696	100	4,025,522,544	18.92	761,478,175	27.57	1,109,812,511	25	856,849,805	26.79	1,078,594,050	292,460,558.00	104.44	3,814,726,541	97.97	11,993,944,237	97.97	51	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah			100	6,023,823,204	100 persen	3,087,218,253	25	637,347,187	25	869,386,516	25	705,625,115	25	770,710,835	100.00	100.00	2,983,069,653					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 orang	3,087,218,253	14 orang	637,347,187	14 orang	869,386,516	14 orang	705,625,115	14 orang	770,710,835	14 orang	100.00	2,983,069,653					Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	50,710,000	3 laporan		3 laporan	20,284,000	3 laporan		3 laporan	30,245,250	12 laporan	100.00	50,529,250					Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100.0	1,116,607,971	100 persen	414,517,323	25	49,194,298	25	108,734,791	25	65,247,030	25	151,366,645	100.00	100.00	374,542,764					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8,496,075	1 paket	285,000	1 paket	1,050,000	-	-	1 paket	6,553,500	1 paket	100.00	7,888,500					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	49,806,648	2 paket	1,100,000	2 paket	4,929,600	-	-	2 paket	43,199,851	2 paket	100.00	49,229,451					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	25,000,600	2 paket	-	2 paket	5,301,360	-	-	3 paket	19,663,095	3 paket	100.00	24,964,455					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 laporan	331,214,000	3 laporan	47,809,298	3 laporan	97,453,831	3 laporan	65,247,030	3 laporan	81,950,199	12 laporan	100.00	292,460,358					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			91.7	89,090,000	100 persen	77,071,940	35	7,992,000	35	8,662,500	-	-	52.22	39,355,000	122.22	122.22	56,009,500					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Mebel						3 Unit	28,297,650	0	-	1	8,662,500	-	-	4	8,880,000	5.00	166.67	17,542,500					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	40,774,390	0	-	-	-	-	-	3 unit	30,475,000	3 Unit	100.00	30,475,000					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	8,000,000	1 unit	7,992,000	-	-	-	-	-	-	1 unit	100.00	7,992,000					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional			100.0	721,290,876	100 Persen	334,920,028	25	53,222,640	25	95,163,584	25	72,238,660	25	98,429,895	100.00	100.00	319,054,779					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 laporan	69,816,028	9 laporan	9,252,640	9 laporan	18,477,584	9 laporan	14,584,660	9 laporan	13,385,895	3 laporan	100.00	55,700,779					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	265,104,000	2 Laporan	43,970,000	2 Laporan	76,686,000	2 Laporan	57,654,000	2 Laporan	85,044,000	12 Laporan	100.00	263,354,000					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100.0	210,620,015	100 Persen	111,795,000	25	21,714,050	25	27,865,120	25	13,739,000	25	18,731,675	100.00	100.00	82,049,845					Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					5 Unit	67,935,000	5 unit	11,454,450	5 unit	24,090,120	5 unit	11,939,000	5 unit	8,184,800	5 unit	100.00	55,668,370					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					44 Unit	31,460,000	15 unit	5,420,000	3 unit	3,775,000	6 unit	1,800,000	5 unit	5,775,000	29 unit	100.00	16,770,000					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	12,400,000	1 Unit	4,839,600	-	-	-	-	1 Unit	4,771,875	1 unit	100.00	9,611,475					Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	45.00	12,612,000,000	30.000	4,530,566,211	30 persen	1,314,844,338.0	0.780	35,346,200	22.55	296,489,412			0	-	33.34	111.13	901,486,624	70.57	5,432,052,835	156.81	43	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Kab/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			100.0	5,296,268,164	100 persen	1,314,844,338	11.11	35,346,200	11.11	296,489,412	-	-	11.12	-	33.34	33.34	901,486,624					Dinas Komunikasi dan Informatika
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					1 Dokumen	5,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					1 Dokumen	9,432,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					40 Dokumen	1,299,741,633	35 Dokumen	35,346,200	35 Dokumen	296,489,412	35 Dokumen	276,639,725	35 Dokumen	293,011,287	35 Dokumen	87.50	901,486,624					Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	50.00	12,815,000,000	100 persen	5,103,945,907	35 persen	1,555,433,456	2.376	121,265,770.0	21.41	332,942,110.0			481.7	584,120,300.0	100 persen	102.63	1,292,928,480	101.32	6,396,874,387	202.63	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nama domain dan sub domain yang dikelola dengan baik			100 persen	1,669,792,017	100 persen	605,000,000	25	6,819,600.0	25	148,710,100.0	25	148,097,900.0	25	301,207,000.0	100.00	100.00	604,834,600					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					1 unit	605,000,000	1 unit	6,819,600.0	1 unit	148,710,100.0	1 unit	148,097,900.0	1 unit	301,207,000.0	1 unit	100.00	604,834,600					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE			125	3,434,153,890	90 persen	950,433,456	25	114,446,170	25	184,232,010	25	156,392,400	25	282,913,300	100.00	105.26	688,093,880					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				3,434,153,890	1 Pusat Data	130,150,000	1 Pusat Data	-	1 Pusat Data	34,988,310	1 Pusat Data	7,229,500	1 Pusat Data	8,410,500	1 Pusat Data	100.00	50,628,310					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					4 unit	456,575,000	4 unit	74,482,600	4 unit	107,265,700	4 unit	99,272,900	4 unit	168,653,400	4 unit	100.00	449,674,600					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					1 Dokumen	363,708,456	1 Dokumen	39,963,570	1 Dokumen	41,978,000	1 Dokumen	49,890,000	1 Dokumen	105,849,400	1 Dokumen	100.00	187,790,970					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai Dengan Master Plan smart City																						Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																							Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun dan Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	840,000,000	100.0	267,864,125	43 OPD (100 Persen)	136,998,820	43 OPD	11,561,200.0	43 OPD	10,025,000.0	43 OPD	12,018,450.0	100	28,702,870.0	100.00	100.00	50,289,070	100.00	318,153,195	100.00	38	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah			100.0	267,864,125	100 persen	136,998,820	25	11,561,200	25	10,025,000	25	12,018,450	25	28,702,870	100.00	100.00	50,289,070					Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					3 Dokumen	136,998,820	1 dokumen (50%)	11,561,200	1 dokumen (50%)	10,025,000	1 dokumen	12,018,450	1 dokumen	28,702,870	3 Dokumen	100.00	50,289,070					Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																							Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. Indeks Keamanan Informasi 2. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	35.00	81,000,000	25	87,658,786	65 persen	25,500,000	10	-	0	-	10	0	12,133,700	100	153.85	12,133,700	89.42	99,792,486	255.49451	0.1498	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi			100	87,658,786	100 persen	25,500,000	-	-	-	-	-	-	12,133,700	100 persen	100 persen	12,133,700					Dinas Komunikasi dan Informatika	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan			31,741,000	1 Laporan	25,500,000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	12,133,700	1 Laporan	100 persen	12,133,700					Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																							Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 persen	25,143,110,000	100	4,354,714,630	100 persen	1,538,551,131	25%	349,871,521	25%	431,563,864	25%	349,592,542	25%	395,499,205	100%	100%	1,526,527,132	100%	5,881,241,762	100	23.39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah					100 persen	1,165,684,916	25%	Rp 275,736,921	25%	Rp 308,752,606	25%	Rp 259,915,342	25%	Rp 295,011,905	100%	100%	Rp 1,139,416,774					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9 orang	1,127,064,916	8 orang	Rp 275,736,921	8 orang	Rp 295,092,606	8 orang	Rp 249,034,342	8 orang	Rp 283,755,905	8 orang	100%	Rp 1,103,619,774					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					10 Laporan	38,620,000	3 laporan	Rp -	3 laporan	Rp 13,660,000	3 laporan	Rp 10,881,000	1 laporan	Rp 11,256,000	10 laporan	100%	Rp 35,797,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD					100 persen	242,844,440	21%	Rp 50,890,500	25%	Rp 59,979,038	20%	Rp 48,124,100	131%	Rp 66,653,100	100%	100%	Rp 225,646,738.00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					2 Paket	4,062,750	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	2 paket	Rp 3,420,300.00	2 paket	100%	Rp 3,420,300					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	42,362,490	0	Rp -	1 paket	Rp 10,346,800	1 paket	Rp 2,432,000	1 paket	Rp 26,384,800	5 paket	100%	Rp 39,163,600					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	27,008,500	2 Paket	Rp 5,630,000.00	1 Paket	Rp 1,890,000.00	1 Paket	Rp 2,510,000.00	1 Paket	Rp11,718,000.00	5 Paket	100%	Rp 21,748,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	169,410,700	3 laporan	Rp 45,260,500	3 laporan	Rp 47,742,238	3 laporan	Rp 43,182,100	3 laporan	Rp 25,130,000	12 laporan	100%	Rp 161,314,838					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan					100%	34,993,200	-	Rp -	100%	#####	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	100%	Rp 29,600,000.00					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 unit	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	34,993,200	-	Rp -	2 unit	#####					2 unit	100%	Rp 29,600,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 persen	94,501,775	25%	Rp 17,199,100	25%	Rp 25,479,100	25%	Rp 24,333,100	25%	Rp 32,094,200	100%	100%	Rp 99,105,500					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	4,800,000	3 laporan	Rp 1,089,100	3 laporan	Rp 1,089,100	3 laporan	Rp 1,073,100	3 laporan	Rp 1,084,200	12 laporan	100%	Rp 4,335,500					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	114,560,000	3 laporan	Rp 16,110,000	3 laporan	Rp 24,390,000	3 laporan	Rp 23,260,000	3 laporan	Rp 31,010,000	12 laporan	100%	Rp 94,770,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik					100 persen	35,520,000	25%	Rp 6,045,000.00	25%	Rp 7,753,120.00	25%	#####	25%	Rp 1,740,000.00	100%	100%	Rp 32,758,120					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	29,000,000	1 unit	Rp 3,420,000	1 unit	Rp 7,283,120	1 unit	Rp 15,240,000	1 unit	Rp 860,000	1 unit	100.00	Rp 26,803,120					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 unit	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	6,520,000	3 unit	Rp 2,625,000	5 unit	Rp 470,000	2 unit	Rp 1,980,000	2 unit	Rp 880,000	12 unit	100%	Rp 5,955,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi					1 unit	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	71	Rp 1,055,500,000	68.46%	494,357,320	67.50%	90,000,000	####	Rp 15,230,000	####	Rp 19,545,000	5.37%	Rp 20,190,000	5.37%	Rp 25,766,800	69.13%	69.13%	Rp 80,731,800	69.13%	Rp 575,089,120	97%	54.48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Memenuhi Standar					40%	90,000,000	3.36%	Rp 15,230,000	0.00%	Rp 19,545,000	2.68%	Rp 20,190,000	4.03%	Rp 25,766,800	10.07	25.17	Rp 80,731,800					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Plaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					70 Unit Usaha	90,000,000	5 unit usaha	Rp 15,230,000	0 unit usaha	Rp 19,545,000	4 unit usaha	Rp 20,190,000	6 unit usaha	Rp 25,766,800	15 unit	21%	Rp 80,731,800					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi sehat	89%	Rp 390,304,000	69.42%	716,296,565	67.50%	222,370,000	0%	Rp -	50%	Rp 33,760,000	0%	Rp 61,110,000	50%	Rp 86,954,000	100%	100%	Rp 181,824,000	100%	Rp 898,120,565	112.36	230.11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan koperasi					40.0%	222,370,000	0%	Rp -	50%	Rp 33,760,000	0%	Rp 61,110,000	50%	Rp 86,954,000	100%	100%	Rp 181,824,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					60 orang	222,370,000	-	Rp -	40 orang	Rp 33,760,000		Rp 61,110,000	40 orang	Rp 86,954,000	80 orang	133%	Rp 181,824,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Terfasilitasi Bermitra dengan Lembaga Keuangan dan Mitra Usaha (unit)	13.00%	860,000,000	-	-	2.20%	459,559,965	0,17%	19,760,000	0,28%	55,070,000	0,06%	99,844,000	0,73%	222,499,500	1.2%	54.6%	397,173,500	57.4%	Rp 397,173,500	441.86	46.18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentas meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro					2.20%	459,559,965	0,17%	19,760,000	0,28%	55,070,000	0,06%	99,844,000	0,73%	222,499,500	1,24%	54,55%	397,173,500					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					100 unit usaha	62,314,965	30 unit usaha	8,160,000	10 unit usaha	8,640,000	10 unit usaha	15,620,000	50 unit usaha	13,070,000	100 unit usaha	100%	Rp 45,490,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan					100 orang	397,245,000	0	11,600,000	40 orang	46,430,000	0	84,224,000	80 orang	209,429,500	120 orang	100%	Rp 351,683,500					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha kecil	0.60%	2,328,410,000	0.30%	707,339,490	0.40%	369,648,000	0%	1,000,000	0%	-	0%	-	0%	3,310,000	1.17%	1.17%	4,310,000	1.17%	Rp 711,649,490	1.94	30.56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Skala Usaha Kecil					0.40%	369,648,000	0%	1,000,000	0%	-	0%	-	0%	3,310,000	1.17%	1.17%	4,310,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					100 Unit Usaha	369,648,000	0	1,000,000	0		0		0	3,310,000	0.00%	0.00%	Rp 4,310,000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	25,143,112,204	100.00	6,113,896,618	88	3,712,811,949	25	830,626,825	25	913,279,703	25	823,373,876	25	945,625,737	100	113.64	3,512,906,141	100	9,626,802,759	100	38.29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS					100%	3,033,563,154	100%	721,989,045	100%	759,921,508	100%	631,750,201	100%	773,069,680	100%	100	2,886,730,434					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					26 orang/bulan	2,964,333,154	26 orang	721,989,045	24 orang	739,152,508	25 orang	617,904,201	27 orang	738,614,680	27 orang	103.85	2,817,660,434					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD					10 Laporan	69,230,000	3 laporan	0	3 laporan	20,769,000	3 laporan	13,846,000	3 laporan	34,455,000	12 laporan	120	69,070,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD					92	286,312,535	25	53,597,057	25	72,425,428	25	90,557,107	25	54,152,985	100	109	270,732,577					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,222,800	1 paket	1,162,000	0	0	1 paket	1,908,000	0	1,892,000	1 paket	100	4,962,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	3,920,400	2 paket	3,920,298	0	0	0	0	0	0	2 paket	100	3,920,298					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	33,778,235	1 paket	1,000,000	2 paket	2,500,000	3 paket	27,458,100	3 paket	1,204,000	3 paket	100	32,162,100					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	14,731,300	0 paket	0	3 paket	7,729,000	3 paket	4,796,145	3 paket	2,120,000	5 paket	100	14,645,145					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 Laporan	228,659,800	4 laporan	47,514,759	5 laporan	62,196,428	5 laporan	56,394,862	5 laporan	48,936,985	4 laporan	100	215,043,034					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD					100	323,136,260	77.78	53,305,723	77.78	73,359,329	77.78	76,529,118	100	93,572,822	100	100	296,766,992					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	118,934,260	2 Laporan	23,593,723	2 Laporan	23,106,329	2 Laporan	23,996,118	4 Laporan	28,338,822	4 laporan	100	99,034,992					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan	204,202,000	5 laporan	29,712,000	5 laporan	50,253,000	5 laporan	52,533,000	5 laporan	65,234,000	5 laporan	100	197,732,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD					86	69,800,000	15.38	1,735,000	23.08	7,573,438	25.64	24,537,450	33.33	24,830,250	97.44	113.30	58,676,138					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	44,500,000	0	0	1 unit	3,983,438	2 unit	20,352,450	0	14,081,250	2 unit	66.67	38,417,138					Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					35 Unit	20,300,000	6 unit	1,735,000	8 unit	3,590,000	8 unit	4,185,000	13 unit	10,749,000	35 unit	100.00	20,259,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80	1,000,000,000.00	0	0	60	1,512,800	-	1,485,000	25	-	25	-	25	-	75	125	1,485,000	75	1,485,000	93.75	0.16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kegiatan yang mengacu ke RTK					70	1,512,800	0	1,485,000	25	0	25	0	25	0	75	107.14	1,485,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					1 dokumen	1,512,800	1 dokumen	1,485,000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	100	1,485,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktifitas	33	1,410,000,000	9.97	2,384,767,871	7 %	284,751,187	0	5,810,000	1.5	12,780,000	1.5	18,685,000	3.26	245,870,109	6.00	85.71	283,145,109	15.97	2,667,912,980	48.39	189.21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi					8 paket	264,001,562	0	5,810,000		12,410,000	2 paket	17,240,000	2 paket	228,310,509	4 paket	50.0	263,770,509					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					140 Orang	264,001,562	0	5,810,000		12,410,000	32 orang	17,240,000	32 orang	228,310,509	64 orang	45.71	263,770,509					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pertemuan/sosialisasi					1 paket	20,749,625	0	0	0	370,000	0	1445000	1 paket	17,559,600	1 paket	100	19,374,600					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					15 Lembaga	20,749,625	2 lembaga	0	3	370,000	5 lembaga	1445000	6 lembaga	17,559,600	16 lembaga	106.67	19,374,600					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	75	1,067,360,000	90.21	751,226,011	65 %	68,961,200	11.5	8,310,000	28.25	0	30.25	0	15.17	22,434,900	85.17	141.94	64,206,400	87.69	815,432,411	117	76.40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang dilayani					100	68,961,200	11.5	8,310,000	28.25	0	30.25	0	15.17	22,434,900	85.17	85.17	64,206,400					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah admin/operator IPK Online																						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					1200 orang	68,961,200	138 orang	8,310,000	339 orang	13,211,500	363 orang	20,250,000	182 orang	22,434,900	1022 orang	85.17	64,206,400					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi CPMI																						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial	85	518,030,000	47.32	66,882,610	75 %	1,031,305,025	12	2,940,000	12	38,426,500	25	167,067,300	26	239,862,300	75	100.00	448,296,100	75	515,178,710	88.24	99.45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sarana HI					75	999,999,775	12	0	12	28,621,500	25	159,967,300	26	232,058,000	75	100	420,646,800					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPIPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					40 laporan	999,999,775	6 laporan	0	6	28,621,500	14 laporan	159,967,300	15 laporan	232,058,000	41 laporan	102.5	420,646,800					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI yang terfasilitasi					100	31,305,250	30	2,940,000	37.5	9,805,000	25	7,100,000	12.5	7,804,300	105	105.00	27,649,300					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan					40 perkara	23,964,000	12 perkara	2,940,000	15	6,245,000	10 perkara	5,630,000	5	6,631,800	42 perkara	105	21,446,800					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1 lembaga	7,341,250	0	0	1	3,560,000	1 lembaga	1,470,000	0	1,172,500	1 lembaga	100	6,202,500					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	50.40	340,240,000	5.01	105,425,209	8.40	10,021,000	25 persen	1,200,000	25	2,460,000	25 persen	1,225,000	25	1,310,000	6.18	73.58	6,195,000	11.19	111,620,209	22.20	32.81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi penerbitan SIUP, TDG bagi pelaku usaha					100 persen	10,021,000	25 persen	1,200,000	25	2,460,000	25 persen	1,225,000	25	1,310,000	100 persen	100	6,195,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda daftar gudang					80 Dokumen	10,021,000	8 dokumen	1,200,000	8	2,460,000	8 dokumen	1,225,000	7	1,310,000	31 dokumen	38.75	6,195,000					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Pasar Tradisional yang Memenuhi Standar	71.04	4,900,000,000	63.16	1,642,056,426	2.63%	736,967,592	0	2,155,000	0	15,169,000	0	3,915,000	0	179,996,850	0.00	0.00	201,235,850	63.16	1,843,292,276	88.91	37.62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang dibangun/rehab					2 unit	713,357,592	0	2,005,000	0	5,160,000	0	3,200,000	0	171,806,450	0	0	182,171,450					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					3 unit	713,357,592	0	2,005,000	0	5,160,000	0	3,200,000	3 unit	171,806,450	3 unit	100	182,171,450					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang pengelolanya dibina					20 unit	23,610,000	5 unit	150,000	5 unit	10,009,000	5 unit	715,000	5 unit	8,190,400	20 unit	100	19,064,400					Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					10 Dokumen	23.610,000	1 dokumen	150,000	3 dokumen	10,009,000	3 dokumen	715,000	3 dokumen	8,190,400	10 dokumen	100	19,064,400					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dalam setahun	33	1,430,000,000	0	0	33%	35,906,000		3,940,000		8,565,000		12,715,900		7,995,000	27.41	100	33,215,900		33,215,900		2.32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bazar murah dan operasi pasar				0	2 kali	35,906,000	-	3,940,000	-	8,565,000	-	12,715,900	-	7,995,000	-	-	33,215,900					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0	12 Laporan	35,906,000	3 laporan	3,940,000	3 laporan	8565000	3 laporan	12715900	3 laporan	7,995,000	12 laporan	100	33,215,900					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda terasah	30	673,030,000	28.20	138,755,600	20 persen	61,016,260	4.86	7,971,200	13.09	22,572,700	15.84	11,421,500	4.75	18,435,900	38.54	192.70	60,401,300	110.45	199,156,900	368.17	29.59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP yang ditera tera ulang					27 persen	61,016,260	4.86	7,971,200	13.09	22,572,700	15.84	11,421,500	4.75	18,435,900	38.54	142.74	60,401,300					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					400 Unit	61,016,260	113 unit	7,971,200	353 unit	22,572,700	427 unit	11,421,500	128 unit	18,435,900	1039 unit	206.25	60,401,300					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Laju Jumlah IKM dan Nilai Produksi	9.20	6,030,000,000	5.54	1,783,284,251	1,75%	606,076,200	0.5	67,305,700	1	100,908,122	0.1	18,238,900	0.14	25,307,550	1.74	99.43	213,646,672	7.28	1,996,930,923.00	79.13	33.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan IKM dan produksi					1.50%	606,076,200	0.5	67,305,700	1	100,908,122	0.1	18,238,900	0.14	25,307,550	1.74	116	213,646,672					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri					2 Dokumen	5,087,000	1 dokumen	1,619,000		0		0	1 dokumen	1,886,400	1 dokumen	50	3,505,400					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					5 Dokumen	400,797,100	1 dokumen	8,022,700	1 dokumen	13,227,700	1 dokumen	7,511,800		9,860,750	1 dokumen	20	38,622,950					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					2 Dokumen	200,192,100	2 dokumen	57,664,000	2 dokumen	87,680,422	2 dokumen	10,727,100	2 dokumen	15,446,800	2 Dokumen	100	171,518,322					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	65	380,000,000	2.01	55,932,150	50%	17,617,780	-	-	25	-	-	-	-	-	0.32	0.64	-	2.33	55,932,150	3.58	14.72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi SINAS Terhadap Pelaku IKM				0	25 IKM	17,617,780	0	0	25	0		0		-	25	100	-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas				0	40 Dokumen	17,617,780	0	0	1 Dokumen	0		0		-	0		-					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3,791,168,094											3,066,774,380					DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran	100.00	35,239,430,000	100.00	11,196,227,166	90.00	2,865,287,504	22.50	659,621,096	22.50	714,741,162	22.50	606,162,113	22.50	606,484,809	90.00	100.00	2,587,009,180	90.00	13,783,236,346	90.00	39.11	DPMPTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN			12	8,660,449,471	12	1,966,480,814	3	502,493,493	3	507,055,635	3	403,779,070	3	408,629,487	12	100.00	1,821,957,685					DPMPTSP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	8,028,749,951	12	1,936,230,814	3	493,421,493	3	501,147,635	3	391,543,070	3	405,605,487	12	100.00	1,791,717,685					DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	631,699,520	12	30,250,000	3	9,072,000	3	5,908,000	3	12,236,000	3	3,024,000	12	100.00	30,240,000					DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN			100.00	907,997,828	100.00	334,750,880	25.00	61,607,291	25.00	75,622,421	25.00	90,711,852	25.00	79,918,304	100.00	100.00	307,859,868					DPMPTSP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12	27,217,290	12	7,502,380	3	1,982,000	3	1,992,000	0	-	6	3,126,000	12	100.00	7,100,000					DPMPTSP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	183,327,714	12	56,280,600	3	9,493,539	3	17,262,240	3	10,015,670	3	9,521,335	12	100.00	46,292,784					DPMPTSP
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			12	86,866,087	12	25,013,100	3	3,494,400	3	2,876,000	3	4,084,500	3	3,251,200	12	100.00	13,706,100					DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	610,586,737	12	245,954,800	3	46,637,352	3	53,492,181	3	76,611,682	3	64,019,769	12	100.00	240,760,984					DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100.00	161,530,250	100.00	150,000	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	150,000	25.00	-	100.00	100.00	150,000					DPMPTSP
Pengadaan Mebel	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	10	28,420,250	0	75,000	0	-	0	-	0	-	0	75,000	0	-	0	0	75,000					DPMPTSP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	17	133,110,000	0	75,000	0	-	0	-	0	-	0	75,000	0	-	0	0	75,000					DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN			100.00	825,973,547	100.00	446,401,132	25.00	75,076,857	25.00	123,966,156	25.00	102,057,791	25.00	111,990,618	100.00	100.00	413,001,422					DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	329,340,547	12	86,285,132	3	16,437,857	3	16,207,156	3	18,178,791	3	16,841,618	12	100.00	67,665,422					DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	496,633,000	12	360,116,000	3	58,639,000	3	107,759,000	3	83,879,000	3	95,059,000	12	100.00	345,336,000					DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN			100.00	640,276,070	100.00	117,504,678	25.00	20,443,455	25.00	8,096,950	25.00	9,463,400	25.00	6,036,400	100.00	100.00	44,040,205					DPMPTSP

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya			10	83.296,470	13	40.000,000	4	20.243,455	2	6.386,950	4	7.358,400	3	121,400	13	100.00	34,110,205					DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6	89.308,400	10	27.180,000	1	200,000	2	1,710,000	2	2.105,000	5	5.915,000	10	100.00	9.930,000					DPMPTSP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi			2	467.671,200	1	50.324,678	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	-					DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertambahan jumlah investor	20.00	1,054,290,000	50.00	126,870,650	20.00	129,215,790	0.00	1,180,000	0.00	1,050,000	0.00	760,000	0.00	10,522,000	0.00	0.00	13,512,000	50.00	140,382,650	250.00	13.32	DPMPTSP
Penetapan pemberian fasilitas/insentif/ bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi penanaman modal			20.00	126,870,650	20.00	129,215,790	0.00	1,180,000	0.00	1,050,000	0.00	760,000	0.00	10,522,000	0.00	0.00	13,512,000					DPMPTSP
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			2	11,071,800	2	2,410,000	0	1,180,000	0	450,000	0	-	0	-	0	0.00	1,630,000					DPMPTSP
Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2	115,798,850	1	126,805,790	0	-	0	600,000	0	760,000	0	10,522,000	0	0.00	11,882,000					DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	37.00	1,050,000,000	100.00	61,706,850	8.00	6,693,800	2.00	-	2.00	1,560,000	2.00	-	2.00	2,157,550	8.00	100.00	3,717,550	108.00	65,424,400	291.89	6.23	DPMPTSP
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM			2	61,706,850	2	6,693,800	0	-	1	1,560,000	0	-	1	2,157,550	2	100.00	3,717,550					DPMPTSP
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2	61,706,850	2	6,693,800	0	-	1	1,560,000	0	-	1	2,157,550	2	100.00	3,717,550					DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat	89.00	1,956,570,000	89.52	503,104,519	87.00	165,646,000	21.75	17,101,200	21.75	24,126,600	21.75	41,704,350	21.75	51,184,700	87.00	100.00	134,116,850	87.00	637,221,369	0.98	0.33	DPMPTSP
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu			86.00	503,104,519	87.00	165,646,000	21.75	17,101,200	21.75	24,126,600	21.75	41,704,350	21.75	51,184,700	87.00	100.00	134,116,850					DPMPTSP
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku Usaha yang mendapatkan layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			5350	394,662,652	5350	90,216,000	1988	10,951,200	1988	14,190,000	1988	29,709,350	1989	21,401,900	7,953	148.65	76,252,450					DPMPTSP
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik			20	29,479,450	100	12,760,000	0	-	0	-	1	440,000	2	5,907,400	3	3.00	6,347,400					DPMPTSP
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			20	78,962,417	20	62,670,000	6	6,150,000	6	9,936,600	6	11,555,000	2	23,875,400	20	100.00	51,517,000					DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN/PMA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal	100.00	2,200,000,000	40.00	703,996,740	60.00	624,325,000	15.00	7,800,000	15.00	17,395,600	15.00	285,913,900	15.00	17,309,300	60.00	100.00	328,418,800	60.00	1,032,415,540	0.60	46.93	DPMPTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanaman modal			50.00	703,996,740	60.00	624,325,000	15.00	7,800,000	15.00	17,395,600	15.00	285,913,900	15.00	17,309,300	60.00	100.00	328,418,800					DPMPTSP
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.			12		12	93,648,000	0	-	2	2,156,400	0	-	1	870,000	3	25.00	3,026,400					DPMPTSP
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			240	642,675,710	240	343,380,000	0	7,800,000	0	11,246,000	353	262,166,100	0	8,319,300	353	147.08	289,531,400					DPMPTSP
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			100	61,321,030	100	187,297,000	25	-	25	3,993,200	25	23,747,800	25	8,120,000	100	100.00	35,861,000					DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	29,111,580,000	94.30%	10,171,891,352	95.6%	4,027,445,213	25%	940,793,097	25%	1,043,822,752	25%	805,611,652	27%	888,916,811	107%	107%	3,679,144,312	100%	13,851,035,664	100%	47.58%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	5,584,555,030	100%	3,287,945,633	25%	812,328,178	25%	913,660,011	25%	669,610,251	25%	703,233,145	100%	100%	3,098,831,585					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/Bulan	3,248,895,633	30 Orang/ Bulan	801,567,178	30 Orang/ Bulan	901,687,011	29 Orang/ Bulan	657,872,251	27 Orang/ Bulan	698,655,145	27 Orang / Bulan	100%	3,059,781,585					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	39,050,000	3 Laporan	10,761,000	3 Laporan	11,973,000	3 Laporan	11,738,000	3 Laporan	4,578,000	100%	100%	39,050,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100.00%	2,801,012,898	100%	218,090,268	25%	46,548,764	25%	37,237,771	25%	35,090,800	25%	67,571,280	100%	100%	186,448,615					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadatkan					1 paket	2,951,310	0	-	-	-	1 paket	1,500,000	-	-	1 paket	100%	1,500,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	37,896,958	5 Paket	330,000	5 Paket	110,000	5 Paket	2,145,000	5 Paket	31,655,825	5 Paket	100%	34,240,825					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	19,980,000	0	-	-	-	1 Paket	5,895,000	1 Paket	3,233,400	1 Paket	100%	9,128,400					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	157,262,000	3 Laporan	46,218,764	3 Laporan	37,127,771	3 Laporan	25,550,800	3 Laporan	32,682,055	12 Laporan	100%	141,579,390					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan			100.00%	130,389,759	100%	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																						Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	1,492,101,686	100%	454,319,312	25%	73,480,305	25%	88,996,770	25%	83,696,131	25%	107,976,486	100%	100%	354,149,692					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	163,387,312	9 Laporan	32,440,305	9 Laporan	24,966,770	9 Laporan	29,046,131	9 Laporan	30,384,486	36 Laporan	100%	116,817,692					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	290,932,000	3 Laporan	41,040,000	3 Laporan	64,030,000	3 Laporan	54,650,000	3 Laporan	77,612,000	12 Laporan	100%	237,332,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik			71.27%	163,831,979	78%	67,090,000	25%	8,435,850	25%	3,928,200	25%	17,214,470	25%	10,135,900	100%	128%	39,714,420					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya					7 Unit	59,500,000	2 Unit	8,435,850	1 Unit	3,928,200	3 Unit	13,619,470	1 Unit	8,485,900	7	100%	34,469,420					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					11 Unit	7,590,000	-	-	-	-	9 Unit	3,595,000	6 Unit	1,650,000	15	100%	5,245,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	75	2,279,200,000	88.35%	434,837,650	50%	951,355,200	-	17,272,000	-	-	-	774,366,785	-	55,150,250	50%	100 persen	865,716,535	94.175	1,300,554,185	126%	57.06%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat			5000.14%	105,187,250	0.4%	857,890,200	-	7,238,500	-	-	-	766,358,235	-	24,004,500	0.79%	197.50%	800,791,235					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM, Information Technology Service Management)					1 Layanan	300,000,000	-	-	-	-	1 Layanan	277,368,235	-	-	1 Layanan	100 persen	277,368,235					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya					1 Perpustakaan	500,000,000	-	-	-	-	1 Perpustakaan	486,580,000	-	-	1 Perpustakaan	100 persen	486,580,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					8 Perpustakaan	57,890,200	2 Perpustakaan	7,238,500	3 Perpustakaan	3,190,000	-	2,410,000	3 Perpustakaan	24,004,500	8 Perpustakaan	100 persen	36,843,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan Keberanekaragaman Koleksi Perpustakaan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			6473.00%	329,650,400	63	93,465,000	-	10,033,500	-	15,737,500	-	8,008,550	-	31,145,750	81.72	81.72	64,925,300					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					16 Lokus	63,465,000	3 Lokus	9,183,500	5 Lokus	15,737,500	1 Lokus	7,413,800	10 Lokus	27,427,500	19 Lokus	100 persen	59,762,300					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan					10 Perpustakaan	30,000,000	1 Perpustakaan	850,000	-	-	3 Perpustakaan	594,750	4 Perpustakaan	3,718,250	8 Perpustakaan	80	5,163,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah																						Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa (150 orang)	550	3,420,000,000	20	230,135,150	150 Orang	65,525,838	15 Orang	4,866,000	20 orang	7,130,000	20 orang	12,433,800	20 orang	7,784,200	75 Orang	50	32,214,000	95	262,349,150	0.17	7.67%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dibuatkan Daftar Arsipnya			23.3 %	230,135,150	15%	34,953,474	0%	920,000	5%	2,810,000	0.00%	12,433,800	10%	3,355,000	15%	100%	19,518,800					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					2000 Berkas	14,953,474	-	920,000	750 Berkas	-	-	380,000	1250 Berkas	750,000	2000 Berkas	100%	2,050,000					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					45 Laporan	20,000,000	-	0 laporan	2,810,000	27 Laporan	12,053,800	1 Laporan	2,605,000	45 Laporan	100%		17,468,800					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik					100%	30,572,364	5%	3,946,000	75%	4,320,000	0%	-	20%	4,429,200	100%	100%	12,695,200					Dinas Arsip dan Perpustakaan
Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					20 Arsip	30,572,364	1 Arsip	3,946,000	5 Arsip	4,320,000	0	-	4 Arsip	4,429,200	20 Arsip	100%	12,695,200					Dinas Arsip dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4,626,866,810		4,483,568,835		930,111,834		1,059,977,148		860,962,151		1,225,388,531			4,076,439,664					DKPP

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN	100	21,789,430,000	83	3,355,482,085	88%	3,875,550,703	25%	873,796,434	25%	1,028,712,648	25%	827,291,151	25%	920,103,255	100%	114%	3,649,903,488	7,005,385,573		1,167,564,262	DKPP	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					10 Laporan	2,838,792,555	3	701,083,364	2	757,951,395	3	580,716,335	2	637,911,842	10	100%	2,677,662,936				DKPP	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan					22 orang/ Bulan	2,771,167,555	24	687,597,364	22	737,722,395	22	560,487,335	22	624,425,842	22	100%	2,610,232,936				DKPP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	67,625,000	3	13,486,000	3	20,229,000	3	20,229,000	3	13,486,000	12	100%	67,430,000				DKPP	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN					88%	304,862,308	25%	64,304,171	20%	66,399,210	25%	74,683,351	18%	93,490,951	88%	100%	298,877,683				DKPP	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4,474,800	0	900,000	0	400,000	0	0	1	3,141,300	1	100%	4,441,300				DKPP	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1 Paket	61,552,208	1	7,084,500	0	3,696,800	0	0	0	49,216,150	1	100%	59,997,450				DKPP	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan					1 Paket	13,835,300	0	2,720,000	0	0	0	350,000	1	10,696,400	1	100%	13,766,400				DKPP	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	225,000,000	1	53,599,671	0	62,302,410	0	74,333,351	0	30,437,101	1	100%	220,672,533				DKPP	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah yang Tersedia					1 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				DKPP	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				DKPP	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan					12 Laporan	571,219,040	4	95,281,749	2	155,346,043	3	135,166,784	3	173,618,512	12	100%	559,413,088				DKPP	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12 laporan	81,003,040	4	18,885,749	2	17,322,043	3	18,752,784	3	18,786,512	12	100%	73,747,088				DKPP	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantoryang Disediakan					12 laporan	490,216,000	3	76,396,000	3	138,024,000	3	116,414,000	3	154,832,000	12	100%	485,666,000				DKPP	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 4 yang diservice					3 unit	160,676,800	1	13,127,150	1	49,016,000	1	36,724,681	0	15,081,950	3	100%	113,949,781				DKPP	
	pemeliharaan service AC					6 Unit		2		1		0		3		6	100%					DKPP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					5 Unit	152,636,800	0	11,442,150	4	47,911,000	1	35,499,681	0	11,131,950	5	100%	105,984,781				DKPP	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin lainnya yang diperlha					1 unit	8,040,000	1	1,685,000	0	1,105,000	1	1,225,000	0	3,950,000	2	200%	7,965,000				DKPP	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUЛАTAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	peningkatan nagari mandiri pangan	9	6,500,000,000	3	41,852,900	1 nagari	2,400,000	1	2,309,000	0	0	0	0	0	0	1	100%	2,309,000	4	44,161,900	44.44	0.68	DKPP
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					1 laporan	2,400,000	1	2,309,000	0	0	0	0	0	0	1	100%	2,309,000				DKPP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					1 laporan	2,400,000	1	2,309,000	0	0	0	0	0	0	1	100%	2,309,000				DKPP	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penurunan jumlah konsumsi beras (Kg perkapita/ tahun)	108	7,506,562,000	101	1,057,128,779	111	365,368,751	0	30,038,600	0	19,510,000	0	27,451,500	89.7	227,524,776	89.7	119.19%	304,524,876	89.7	1,361,653,655	119.18919	18.14	DKPP
Peyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					40 Keluarga	229,180,802	0	26,242,400	0	15,713,800	22	21,976,500	31	131,244,776	53	133%	195,177,476				DKPP	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					12 Laporan	76,860,000	3	20,140,400	3	9,171,300	1	11,563,500	2	17,686,600	9	75%	58,561,800				DKPP	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					40 Keluarga	149,490,802	0	6,102,000	0	3,857,500	34	10,413,000	31	113,558,176	65	163%	133,930,676				DKPP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis					1 Laporan	2,830,000	0	0	1	2,685,000	0	0	0	0	1	100%	2,685,000				DKPP	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah					5 Ton	76,126,012	0	0	0	0	0	2,824,000	5.45	69,996,600	5.45	109%	72,820,600				DKPP	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota					5 Ton	76,126,012	0	0	0	0	0	2,824,000	5.45	69,996,600	5.45	109%	72,820,600				DKPP	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi					2100 kkal/ kapita/ hari	60,061,937	0	3,796,200	0	3,796,200	0	2,651,000	1885	26,283,400	1,885	90%	36,526,800				DKPP	
Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Laporan	60,061,937	0	3,796,200	0	3,796,200	1	2,651,000	0	26,283,400	1	100%	36,526,800				DKPP	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Penurunan Nagari Rawan Pangan	21.9	1,200,000,000	16.67	101,540,600	16.9%	197,816,156	0	12,523,900	0	8,141,500	0	5,497,000	90%	68,972,000	90%	532.54%	95,134,400	90.00	196,675,000	410.96	16.39	DKPP
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan					1 dokumen	11,051,400	0	0	0	1,065,000	0	0	1	990,000	1	100%	2,055,000				DKPP	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis dan Kerentanan Pangan yang di Mutakhirkan					1 dokumen	11,051,400	0	0	0	1,065,000	0	0	1	990,000	1	100%	2,055,000				DKPP	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang Mencakup dalam 1 Daerah Kab/ Kota					1 dokumen	186,764,756	0	12,523,900	0	7,076,500	0	5,497,000	1	67,982,000	1	100%	93,079,400					DKPP
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1 Dokumen	98,209,746	0.00	5,377,600	0.00	2,457,200	-	2,601,500	1	8,510,500	1	100%	18,946,800					DKPP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota kab/ kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kab/ kota					1 Laporan	88,555,010	0.00	7,146,300	0.00	4,619,300	0	2,895,500	1	59,471,500	1	100%	74,132,600					DKPP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	50	2,342,500,000	75	70,862,446	40%	42,433,225	100	11,443,900	100	3,613,000	100	722,500	100	8,788,500	100	250%	24,567,900	100	95,430,346	200	4.07	DKPP
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota					1 dokumen	42,433,225	9	11,443,900	0	3,613,000	2	722,500	0	8,788,500	11	1100%	24,567,900					DKPP
Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan					1 dokumen	42,433,225	9	11,443,900	0	3,613,000	2	722,500	0	8,788,500	11	1100%	24,567,900					DKPP
URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			15,825,340,000	39,140	7,295,053,738		6,042,001,752		59,247,110		26,016,200		1,572,813,621		4,052,160,666			5,710,237,599					DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi ikan Tangkap	8180	4,741,050,000	8,120	2,112,962,109	8160 ton	2,437,144,768	####	1,950,000	####	6,355,000	2,073.52	1,338,328,846	2,148	1,001,630,500	8139.98	99.75%	2,348,264,346	8139.98	4,461,226,455	99.510758	94.10	DKPP
Pemberdayaan Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang terfasilitasi sarana kelayanannya					75 Orang	2,437,144,768	0	1,950,000	0	6,355,000	70	1,338,328,846	5	1,001,630,500	75	100%	2,348,264,346					DKPP
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat Kapasitasnya					66 Orang	2,437,144,768	0	1,950,000	0	6,355,000	53	1,338,328,846	7	1,001,630,500	60	100%	2,348,264,346					DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	31000	7,758,850,000	30,660	3,534,475,478	30500 Ton	2,837,942,432	7865	7,795,000	####	4,855,000	8,472	67,492,040	8,659	2,588,370,678	33409.39	109.54%	2,668,512,718	####	6,202,988,196	107.77223	79.95	DKPP
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Produktivitas rata-rata Pembudidayaan Ikan					3,18 Ton/ Orang/ Tahun	250,594,200	0	4,608,500	0	3,445,000	0	14,166,000	3.18	210,269,788	3	100%	232,489,288					DKPP
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas					3 Kelompok	250,594,200	0	4,608,500	0	3,445,000	5	14,166,000	0	210,269,788	5	100%	232,489,288					DKPP
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					4 Unit	2,587,348,232	0	3,186,500	0	1,410,000	0	53,326,040	4	2,378,100,890	4	100%	2,436,023,430					DKPP
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					6 unit	1,937,569,800	0	0	0	300,000	0	51,651,040	6	1,796,248,640	6	100%	1,848,199,680					DKPP
Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					8 unit	649,778,432	0	3,186,500	0	1,110,000	2	1,675,000	8	581,852,250	10	125%	587,823,750					DKPP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	100	530,000,000	31	35,357,550	100%	20,364,100		1,465,910	0	0	0	565,800	0	1,065,000	0.00	0%	3,096,710	31.00	38,454,260	31	7.26	DKPP
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang telah Memiliki Izin Usaha Terhadap Peraturan					100%	20,364,100	0	1,465,910	0	0	0	565,800	0	1,065,000	0.00	0%	3,096,710					DKPP
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa , Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada kab. agam					1 dokumen	20,364,100	0	1,465,910	0	0	0	565,800	1	1,065,000	1	100%	3,096,710					DKPP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	348	2,795,440,000	329	1,612,256,601	328 Orang	746,550,452	328	48,036,200	328	14,806,200	328	166,426,935	328	461,094,490	328	100%	690,363,825	328	2,302,622,426	94.25	82.37	DKPP
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota					5 pelaku usaha	746,550,452	1	48,036,200	1	14,806,200	1	166,426,935	0	461,094,490	3	60%	690,363,825					DKPP
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					28140 Ton	154,950,690	10228	46,880,700	10497	10,606,200	7425	29,205,000	3,745	42,973,660	31895	113%	129,665,560					DKPP
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi					20 pelaku usaha	591,599,762	0	1,155,500	0	4,200,000	0	137,221,935	23	418,120,830	23	115%	560,698,265					DKPP
URUSAN PEMERINTAHAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH																						Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			110	2,931,888,109	14	3,530,580,855	14	1,091,768,205	12	694,592,010	14	756,500,329	34	753,895,771	34	100	2,931,888,063					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35	3,530,580,855	34	1,091,768,205	34	694,592,010	34	756,500,329	34	753,895,771	34	100	3,296,756,315					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	100	13,381,038,408	66.67	754,401,935	90	56,509,220		7,399,000	6	7,435,000	32	11,146,000	34	28,174,900	72	80	54,154,900	80.00	808,556,835	80	6.04	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader			7	684,060,535	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saing			-	-	80	0			-							-	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					50	0			-													Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina			16,6	70.341,400	16,66	56.509,220		7.399,000	12	7.435,000	-	11,146,000	1	28.174,900	13	78	54.154,900					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					2	56.509,220		7.399,000	-	7.435,000	-	11,146,000	1	28.174,900	1	50	54.154,900					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	15	16,799,000,000	22	9.965,232,329	15	4,768,201,617		29,727,500	-	288,813,543	20	1,304,365,730	10	2,526,173,704	30	200	4,149,080,477	52	14,114,312,806	347	84,02	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan			33	6,476,782,667	11	3,723,472,017		16,380,000	-	88,813,543	1	738,204,830	7	2,488,492,804	8	73	3,331,891,177					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan			7	3,723,472,017				16,380,000	3	88,813,543	2	738,204,830	2	2,488,492,804	7	100	3,331,891,177					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			18	812,831,076	8	267,729,600	1	8,720,000	2	-	-	14,060,900	3	26,115,900	6	75	48,896,800					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/kota			4	231,277,200				3,290,000	-	6,380,000	2	8,000,000	-	11,435,900	2	50	29,105,900					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan			60	36,452,400				5,430,000	10	5,330,000	38	6,060,900	40	14,680,000	88	147	31,500,900					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga			1	192,000,000	5	-					1				1	20	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan											1				1	#DIV/0!	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			102	2,086,103,631	2	750,000,000		-	-	200,000,000	1	550,000,000	1	-	2	100	750,000,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota (KONI,KORMI)			1	750,000,000	1			-	-	200,000,000	1	550,000,000	-	-	1	100	750,000,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			8	397,514,955	3	27,000,000	1	4,627,500	-	-	1	2,100,000	1	11,565,000	3	100	18,292,500					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					1	27,000,000	1	4,627,500	-	-	1	2,100,000	1	11,565,000	1	100	18,292,500					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	85	2,600,000,000	85	899,511,300	85	250,000,000	-	50	150,000,000	10	100,000,000	25	-	-	85	100	250,000,000	85	1,149,511,300	100	44,21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan			34	899,511,300	17	250,000,000		-	17	150,000,000	17	100,000,000	17	-	17	100	250,000,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1	250,000,000				-	1	150,000,000	1	100,000,000	1	-	1	100	250,000,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	13,360,730,000	80	4,549,936,451	90	1,543,011,083	90	263,565,874	90	386,757,315	90	328,144,447	90	444,506,249	90	100	1,422,973,885	90	5,972,910,336	90	0,46	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			46	56,610,000	35	61,450,000	34	14,010,000	34	23,307,000	34	23,307,000	34	800,000	46	131	61,424,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10	61,450,000	2	14,010,000	3	23,307,000	3	23,307,000	2	800,000	10	100	61,424,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			17	1,159,871,739	12	304,951,487	3	52,906,105	3	29,068,558	3	58,986,440	3	123,107,100	12	100	264,068,203					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10	7,702,768	5	1,350,000	4	-	-	-	-	1,167,000	10	100	2,517,000							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	51,042,879	2	2,000,000	-	-	-	-	2	7,000,000	2	38,000,000	2	100	47,000,000					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	28,421,440	2	4,000,000	2	1,200,000	2	3,500,000	2	9,100,000	2	100	17,800,000							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6	217,784,400	6	45,556,105	6	27,868,558	6	48,486,440	6	74,840,100	6	100	196,751,203							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35	206,782,633	60	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	2,880,909,388	12	1,054,769,596	3	175,311,719	3	316,552,207	3	239,200,657	3	301,858,513	12	100	1,032,923,096							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	271,503,596	3	61,171,161	3	59,062,383	3	66,867,777	3	69,818,572	3	100	256,919,893							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	783,266,000	6	114,140,558	6	257,489,824	6	172,332,880	6	232,039,941	6	100	776,003,203							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	245,762,691	10	121,840,000	4	21,338,050	3	17,829,550	2	6,650,350	1	18,740,636	10	100	64,558,586							Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	29,000,000	1	6,580,000	-	-	1	3,236,000	1	4,342,316		1	100	14,158,316				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7	47,800,000	5	6,382,050	3	6,484,000	2	2,169,350	7	2,033,800		5	71	17,069,200				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					45	22,290,000	10	2,315,000	12	5,790,000	8	800,000	15	3,735,000		45	100	12,640,000				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	22,750,000	1	6,061,000	1	5,555,550	1	445,000	1	8,629,520		1	100	20,691,070				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang dikelola	47	97,219,620,000	85	7,495,532,157	44	3,947,166,424	4	559,000	4	1,636,500	30	240,434,900	6	1,982,488,283	44	100	2,225,118,683	44	9,720,650,840	94	10.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata			13	4,561,674,512	5	2,790,000,224	4	559,000	4	1,636,500	4	240,434,900	4	1,303,249,243		4	80	1,545,879,643				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								-	-	-	-	-	-	-	-		1		-				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1	500,000,000			-	1	-	-	1	420,878,700		1	100	420,878,700				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					5	2,290,000,224	4	559,000	4	1,636,500	4	240,434,900	4	882,370,543		4	80	1,125,000,943				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata			9	2,933,857,645	5	1,157,166,200	1	30,529,500	1	59,623,975	1	52,388,200	2	679,239,040		5	100	821,780,715				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara					4	83,717,000	4	30,529,500	4	43,673,500	-	3,956,700	4	1,216,475		4	100	79,376,175				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1	1,073,449,200				1	15,950,475	1	48,431,500	1	678,022,565		1	100	742,404,540				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota								-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata	12	13,500,000,000	17	2,100,135,693	5	694,283,000	2	8,130,000	3	57,693,000	4	38,797,000	3	139,100,700	10	200	243,720,700	15	2,343,856,393	121	17.36	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata Daerah			23	2,100,135,693	5	694,283,000		8,130,000	1	57,693,000	5	38,797,000	1	139,100,700		7	140	243,720,700				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					5	694,283,000		8,130,000	3	57,693,000	1	38,797,000	1	139,100,700		5	100	243,720,700				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	56	8,660,580,000	55	2,999,042,990	50.00	1,180,000,000		9,825,000	20	280,918,000	10	195,780,500	20	648,166,400		50	100	1,129,309,900	50	4,128,352,890	89	48	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan daerah			138	2,999,042,990	16.66	1,180,000,000		9,825,000	10	280,918,000	5	195,780,500	1	642,786,400		16	96	1,129,309,900				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif								-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					40	195,794,750		9,825,000	-	128,639,250	-	32,555,000	40	18,822,300		40	100	189,841,550				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKONI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKONI					120	491,655,000			40	152,278,750	40	163,225,500	40	151,469,900		120	100	466,974,150				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					120	492,550,250			-	-	-	-	0	120	472,494,200		120	100	472,494,200				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	#####	100	111,556,470,000	88.00	15,880,550,899	18.00	3,774,471,219	20	4,031,394,650	25	3,963,525,020	22	3,735,930,170		85.00	97%	15,532,644,059	85.00	45,789,288,301	85%	41.05%	Dinas Pertanian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN					100	13,727,921,140	13	3,356,500,615	20	3,423,544,319	15	3,521,836,624	42	3,173,969,216		90	90%	13,503,173,774				Dinas Pertanian	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2,142	13,634,781,140	536	3,347,558,615	536	3,395,430,319	535	3,493,078,624	535	3,173,969,216		2,142	100%	13,410,036,774				Dinas Pertanian	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan					130	93,140,000	33	8,942,000	33	28,114,000	32	28,758,000	32	27,323,000		130	100%	93,137,000				Dinas Pertanian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas ADM umum					95	571,049,492	10	94,746,439	20	160,250,865	25	48,143,273	25	168,639,935		80	84%	471,780,512				Dinas Pertanian	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang disediakan					9	129,613,492	1	35,520,000	2	48,994,440	3	0.00	3	44,287,470		9	100%	128,801,910				Dinas Pertanian	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen					16,100	19,313,000	2,500	0.00	5,000	4,052,650	4,500	0.00	4100	15,256,750	16,100	100%	19,309,400					Dinas Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis Pelayanan Dinas yang dilakukan					11,971	422,123,000	3,210	59,226,439	3,600	107,203,775	3,000	48,143,273	2,161	109,095,715	11,971	100%	323,669,202					Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah					95	1,415,770,000	15	282,189,196	20	390,971,164	25	374,664,223	30	354,271,319	90	95%	1,402,095,902					Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan					12	157,014,000	3	38,142,196	3	38,783,164	3	39,521,223	3	32,579,319	12	100%	149,025,902					Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	1,258,756,000	3	244,047,000	3	352,188,000	3	335,143,000	3	321,692,000	12	100%	1,253,070,000					Dinas Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah					95	165,810,267	10	41,034,969	20	56,628,302	20	18,880,900	3	39,049,700	53	56%	155,593,871					Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak Jabatan					5	68,000,000	0.00	27,035,159	2	6,535,650	2	15,623,050	2	13,554,700	6	120%	62,748,559					Dinas Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara					45	56,070,000	2	265,000	8	24,102,150	2	3,257,850	3	23,925,000	15	33%	51,550,000					Dinas Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi					3	41,740,267	0	13,734,810	1.00	25,990,502	1	0.00	0.00	1,570,000	2	67%	41,295,312					Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi pertanian (Ton)	661.372	19,527,760,000			648.054	3,423,481,929	0	70,431,400	150	272,531,500	200	223,000,950	270	2,632,724,500	620	95.67%	3,198,688,350	645.951	5,597,025,047	97.67%	28.66%	Dinas Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian					0.25	2,941,656,305	0	22,427,900	0.05	187,911,500	0.05	134,235,950	0.07	2,419,570,500	0.17	68%	2,764,145,850					Dinas Pertanian
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian					2.00	204,356,500	0.00	5,976,600	0.00	181,534,500	0.00	6,158,500	0.00	9,269,800	0.00	0%	202,939,400					Dinas Pertanian
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG					5	48,654,395	0.00	14,931,300	0	5,777,000	6	6,487,500	0.00	18,613,450	5	100%	45,809,250					Dinas Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokal (DAK)	Pembangunan Screenhouse Modern dan sarana prasarana produksi					5	2,479,425,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390,000	5	2,379,862,250	5	100%	2,398,252,250					Dinas Pertanian
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					3	209,220,410	0.00	1,520,000	0.00	600,000	2	103,199,950	1	11,825,000	3	100%	117,144,950					Dinas Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak					1	47,687,364	0.25	9,550,000	0.25	15,695,000	0.25	12,740,000	0.25	4,200,000	1	100%	42,185,000					Dinas Pertanian
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil					12	47,687,364	3	9,550,000	3	15,695,000	3	12,740,000	3	4,200,000	12	100%	42,185,000					Dinas Pertanian
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan					11.15	290,548,260	0	37,818,500	0	68,925,000	0	73,160,000	8.72	80,570,000	8.72	78.21	260,473,500					Dinas Pertanian
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar					5000	290,548,260	1,347	37,818,500	838	68,925,000	1,309	73,160,000	1,506	80,570,000	5,000	100%	260,473,500					Dinas Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Populasi Ternak					1	143,590,000	0	635,000	1	0.00	1	2,865,000.00	2.00	128,384,000	4	400.00%	131,884,000					Dinas Pertanian
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					250	143,590,000	0.00	635,000	0.00	0.00	1,320	2,865,000	0	128,384,000	1,320	528%	131,884,000					Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	13.335	168,667,330,000			1200	13,766,283,342	0	25,575,000.00	0.00	#####	0.00	#####	1,200	4,681,844,479.00	1,200	100%	7,550,597,462	1,200	18,272,872,168.00	9.00%	10.83%	Dinas Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Area Pertanian yang terfasilitasi penyediaan sarana pertanian					600	2,326,836,677	0	5,175,000	0.00	4,910,000	0.00	1,116,320,000	600	984,863,179	600	100%	1,554,993,179					Dinas Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola					1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00					Dinas Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					12		3	5,175,000.00	3	4,910,000.00	3	556,275,000.00	3	854,352,974.00	12	100	1420712974.00					Dinas Pertanian
	Jumlah pengadaan Hand Traktor Quick Traktor Tangan					4	1,608,774,880	0.00	5,175,000	0.00	4,910,000	4	556,275,000	0.00	854,352,974	4	100%	1,420,712,974					Dinas Pertanian
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan					1000	718,061,797		0.00		0.00		3,770,000	750	130,510,205	750	75%	134,280,205					Dinas Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Area PertanianYang Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pertanian					1500	11,439,446,665	0	20,400,000.00	0.00	1,169,179,815.00	0.00	1,109,043,168.00	600	3,696,981,300.00	600	40%	5,995,604,283					Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Bandar Baru Jorong Koto Kaciak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek					83.33	1,369,114,500	0.00	3,940,000	0.00	233,723,750	0.00	38,320,000	0	161,461,043	0	0%	437,444,793					Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dam Jalan Dusun Masang Anak Ai Kumayan Nagari Kampuang Tengah					63	6,760,491,101	0.00	12,850,000	0.00	929,126,065	0.00	266,638,503	63	1,837,079,496	63	100%	3,045,694,064					Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM banda irigasi jorong pakan sinayan kamang tengah					79	1,257,656,500	0.00	0.00	0.00	2,490,000	0.00	336,880,000	0.00	313,396,285	0.00	0%	652,766,285					Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan Dipelihara					3	223,799,050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	186,220,000	3	18,485,000	3	100%	204,705,000					Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					21	821,402,000	0.00	3,610,000	0.00	3,840,000	2	27,567,163	10	630,263,427	12	57%	665,280,590					Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					1	1,006,983,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,417,502	1	736,296,049	1	100%	989,713,551					Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	25.33	9,080,730,000			21.29	834,586,910	0	55,496,578	0.00	164,268,910	0.00	317,238,394	43.77	248,512,215	43.77	205.59%	785,516,097	57.93	1,326,293,732	228.70%	14.61%	Dinas Pertanian
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan					20	78,240,800	0	2,825,000	0	15,383,100	0	10,290,300	9	21,115,800	9	45%	49,614,200					Dinas Pertanian
Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					5	78,240,800	5	2,825,000	5	15,383,100	5	10,290,300	5	21,115,800	5	100%	49,614,200					Dinas Pertanian
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasional Jasa Medik Veteriner Terpenuhi					35.00	661,447,890	5	52,671,578	15.1	114,146,010	7	271,401,529	8	206,429,415	35	100%	644,648,532					Dinas Pertanian
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium					1	108,024,527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	107,736,500	1	0.00	1.0	100%	107,736,500					Dinas Pertanian
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner					12	553,423,363	3	52,671,578	3	114,146,010	3	163,665,029	3	206,429,415	12	100%	536,912,032					Dinas Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat					45	94,898,220	0	-	15.1	34,739,800	10	35,546,565	10	20,967,000	35	78%	91,253,365					Dinas Pertanian
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan hewan dan produk hewan					12	94,898,220	3	0.00	3	34,739,800	3	35,546,565	3	20,967,000	12	100%	91,253,365					Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana pengendalian OPT	100	788,620,000			90.00	26,086,000	15	8,905,000	-	0.00	20	7,001,500	50	8,041,000	85	94.44%	23,947,500	85.00	74,703,650	85%	9%	Dinas Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang ditangani					10	26,086,000	3	8,905,000	-	0.00	3	7,001,500	3	8,041,000	9	90%	23,947,500					Dinas Pertanian
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					700	26,086,000	40	8,905,000	41.00	0.00	50	7,001,500	50	8,041,000	181	26%	23,947,500					Dinas Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM penyuluhi	76.00	4,467,700,000			58	958,695,411	5	159,019,084	0.00	180,161,934	25	256,583,390	28	260,276,300	58	100%	856,040,708.00	58.00	2,441,961,368.00	76.32%	54.66%	Dinas Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Penyuluhi					58	958,695,411	5	159,019,084	0.00	180,161,934	25	256,583,390	28	260,276,300	58	100%	856,040,708.00					Dinas Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi					16	958,695,411	0.00	159,019,084	6	180,161,934	0	256,583,390	10	260,276,300	16	100%	856,040,708					Dinas Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional Kantor dan ASN	100	230,600,220,000	68.44	10,894,006,551	100	12,052,448,819	25	2,077,194,423	25	3,081,309,881	25	3,081,483,446	25	2,558,850,796	100	100.00	10,798,838,546	84.22	21,692,845,097	84.2	0.09	Bagian Umum
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			77.16	552,996,200	100	35,400,000	25	-	25	12,000,000	25	6,000,000	25	12,000,000	100	100	30,000,000					Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Umum
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	10	24,000,000	24 Laporan	35,400,000	6 laporan	-	6 laporan	12,000,000	6 laporan	6,000,000	6 laporan	12,000,000	24 laporan	100	30,000,000							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bln	528,996,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Umum
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	57.37	15,065,809,017	100	4,571,410,745	25	960,281,692	25	1,382,377,815	25	1,513,000,480	25	615,367,509	100	100	4,471,027,496							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	411,588,050	1 Paket	134,231,752	1 Paket	32,395,350	1 Paket	27,398,685	1 Paket	33,614,390	1 Paket	40,752,540	1 Paket	134,160,965	100							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bln	1,808,295,016	5 Paket	327,685,073	5 Paket	41,657,975	5 Paket	56,517,330	5 Paket	167,634,515	5 Paket	25,545,680	5 Paket	291,355,500	100							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Bln	585,898,630	3 paket	430,234,420	3 paket	6,025,000	3 paket	345,645,135	3 paket	14,465,123	3 paket	22,048,567	3 paket	388,183,825	100							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Disediakan	12 Bln	12,260,027,321	12 laporan	3,679,259,500	3 laporan	880,203,367	3 laporan	952,816,665	3 laporan	1,297,286,452	3 laporan	527,020,722	12 laporan	3,657,327,206	100							Bagian Umum
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	93.06	7,734,072,713	100	419,545,638	25	19,980,000	-	-	25	24,804,450	50	103,640,000	100	100	148,424,450							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	3 Unit	6,406,011,643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Umum
Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan			324,539,850	2 Paket	60,000,000	-	-	-	0	-	2 Paket	59,950,000	2 Paket	100	59,950,000							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket alat kantor Yang Disediakan			310,150,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-		594,576,272	11 unit	283,545,638	-	-	-	-	3 unit	24,804,450	8 unit	43,690,000	11 unit	100	68,494,450					Bagian Umum	
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			19,980,000	2 Unit	32,000,000	1 unit	19,980,000	-	-	-	-	-	1 Unit	100%	19,980,000							Bagian Umum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unut Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				78,814,819	2 Unit	44,000,000	-	-			-	-	-	-	-	-	-					Bagian Umum
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	80.82	9,254,440,446	100	3,509,367,076	25	582,388,251	25	880,337,610	25	879,256,383	25	924,078,386	100	100	3,266,060,630							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	12	3,631,422,203	36	1,408,267,076	9 laporan	341,868,401	9 laporan	319,997,460	9 laporan	348,005,483	9 laporan	336,684,236	36 Laporan	100	1,346,555,580							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	68.17	1,607,137,367	4 laporan	444,000,000	4 laporan	66,559,850	4 laporan	97,970,150	4 laporan	149,890,900	4 laporan	125,819,150	4 laporan	100	440,240,050							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70.45	4,015,880,876	4 Laporan	1,657,100,000	4 Laporan	173,960,000	4 Laporan	462,370,000	4 Laporan	381,360,000	4 Laporan	461,575,000	4 Laporan	100	1,479,265,000							Bagian Umum
Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	87.95	4,564,259,746	100	1,540,793,920	25%	236,299,565	25 %	316,125,614	25	259,320,741	25	446,714,901	100 %	100	1,258,460,821							Bagian Umum
Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	79.55	2,261,795,998	Mobil 23 Motor 29 Unit	863,225,920	19 Unit mobil dan 4 unit Kendaraan roda 2	169,679,350	20Unit mobil dan 0 unit Kendaraan roda 2	180,394,824	22 Unit mobil dan 2 unit Kendaraan roda 2	117,842,717	21 Unit mobil dan 4 unit Kendaraan roda 2	294,999,701	22 Unit mobil dan 11 unit Kendaraan roda 2	100	762,916,592							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	86.88	360,825,480	193 unit	198,340,000	25 unit	18,691,900	69 unit	31,380,000	43 unit	33,804,010	56 unit	60,087,530	193 unit	100	143,963,440							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	58.57	1,941,638,268	12 U nit	479,228,000	5 ungu	47,928,315	6 unit	104,350,790	7 Unit	107,674,014	8 unit	91,627,670	11 Unit	100	351,580,789							Bagian Umum
Kegiatan : Administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	51.28	5,718,151,154	100	1,660,930,500	25.00	278,244,915	25.00	432,255,832	25 %	353,856,202	25 %	345,586,227	100	100	1,409,943,176							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	79.34	405,707,800	5 Paket	109,739,000	-	-	2 Paket	28,292,100	2 Paket	26,875,250	1 paket	20,688,900	5 Paket	100.00	75,856,250							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100,000,000	2 orang	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional KDH dan WKDH	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48.06	5,212,443,354	1 orang	1,539,191,500	1 orang	278,244,915	1 orang	403,963,732	1 orang	326,980,952	1 orang	324,897,327	1 orang	100	1,334,086,926							Bagian Umum
Kegiatan : Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat Daerah	69.92	2,590,523,626	100	315,000,940	25 %	-	25 %	58,213,010	25.00	45,245,190	25.00	111,463,773	100.00	100.00	214,921,973							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	57.73	1,389,035,015	12 Paket	280,162,890	-	-	12 paket	52,374,410	12 paket	45,245,190	12 paket	108,910,773	12 unit	100	206,530,373							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	59.73	699,539,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian Umum
Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan	39.47	501,949,376	5 paket	34,838,050	5 paket	-	5 paket	5,838,600	5 paket	-	5 paket	2,553,000	5 paket	100	8,391,600							Bagian Umum
SEKRETARIAT DAERAH																							Bagian Hukum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	4,368,830,000	94	974,635,386	100 Persen	282,551,266	25 persen	33,024,630	25 persen	51,460,150	25 persen	66,679,649	25 persen	92,719,250	100 persen	100 persen	243,883,679	97	1,218,519,065	97	27.89	Bagian Hukum
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan keuangan Perangkatata Daerah			100	21,800,000	100 Persen	16,100,000	0 laporan	-	100 Persen	4,767,000	100 Persen	1,589,000	100 Persen	8,790,000	100 persen	100 persen	15,146,000					Bagian Hukum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD					1 Dokumen	16,100,000	1 Dokumen	-	1Dokumen	4,767,000	1 Dokumen	1,589,000	1 Dokumen	8,790,000	1 Dokumen	100 persen	15,146,000					Bagian Hukum
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan		3 laporan	-	3 laporan	-	3	-	3	-	12 Laporan	100 persen						Bagian Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit kerja SKPD			92	729,254,826	100 Persen	205,516,266	25 persen	24,778,480	25 persen	28,111,900	25 persen	55,984,499	25 persen	66,639,000	100 Persen	100 persen	175,513,879					Bagian Hukum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	13,781,766	3 Paket	160,000	3 Paket	380,000	3 Paket	7,324,752	3 Paket	6,093,300	3 Paket	100 persen	13,958,052					Bagian Hukum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	4,605,300	1 Paket (50%)	0	1 Paket (50%)	0	1 Paket (50%)	3,144,542	1 Paket (50%)	1,458,000	2 Paket	100 persen	4,602,542					Bagian Hukum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 laporan	187,129,200	3 laporan	24,618,480	3 Laporan	27,731,900	3 Laporan	45,515,205	3 Laporan	59,087,700	12 laporan	100 persen	156,953,285					Bagian Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	147,792,250	100 Persen	46,300,000	25 persen	7,744,150	25 persen	14,267,900	25 persen	8,350,150	25 persen	16,693,800	100 Persen	100 persen	47,056,000					Bagian Hukum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6,900,000	3 laporan	1,744,150	3 Laporan	1,717,900	3 Laporan	1,744,150	3 Laporan	1,693,800	12 Laporan	100 persen	6,900,000					Bagian Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					24 Laporan	39,400,000	6 laporan	6,000,000	6 laporan	12,550,000	6 laporan	5,850,000	6 laporan	15,000,000	24 Laporan	100 persen	39,400,000					Bagian Hukum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori Baik			90	38,488,310	100 Persen	14,635,000	25 persen	502,000	25 persen	4,313,350	25 persen	756,000	25 persen	596,450	100 Persen	100 persen	6,167,800					Bagian Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	9,885,000	1 Unit	247,000	1 Unit	3,033,350	1 Unit	756,000	1 Unit	596,450	4 Unit	100 persen	4,632,800					Bagian Hukum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 Unit	4,750,000	1 Unit	255,000	3 Unit	1,280,000	1 Unit	175,000	0	0	7 Unit	100 persen	1,710,000					Bagian Hukum
PROGRAM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum	100	56,553,540,000	96	607,470,050	100 Persen	118,830,000	25 persen	36,000,000	25 persen	0	25 persen		14,01 persen	72,000,000	100 Persen	100 persen	108,000,000	98	226,830,000.00	98	0.40	Bagian Hukum
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Tertib administrasi Hukum yang terlaksana dengan baik			98	607,470,050	100 Persen	118,830,000	35 persen	36,000,000	25 persen	0	25 persen		14,01 persen	72,000,000	100 Persen	100 persen	108,000,000					Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					660 Dokumen	10,830,000	146 Dokumen	0	111 Dokumen	0	13 Dokumen	0	69 Dokumen	0	449 Dokumen	100 persen	10,830,000					Bagian Hukum
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersebarluaskan melalui JDHI					2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	100 persen						Bagian Hukum
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					3 Kasus	108,000,000	1 Kasus	36,000,000	0 kasus	0	0 kasus	0	2 Kasus	72,000,000	3 Kasus	100 persen	108,000,000					Bagian Hukum
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	230,600,220,000	100%	1,697,130,933	100%	391,089,545	35%	42,314,350	70%	64,988,648	80%	75,664,300	100%	83,309,043	100%	100%	266,276,341	100%	1,963,407,274	100.00%	1%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Persentase Kebijakan dibidang pelayanan publik dan tatalaksana yang terlaksana	100%		100%		100%		30%		65%		80%		100%		100%	100%						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100%		100%		100%		25%		50%		75%		100%		100%	100%						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah			100%	21,240,000	100%	20,930,000	25%	3,178,000	25%	4,767,000	25%	4,767,000	25%	3,178,000	100%	100%	15,890,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	20,930,000	3 Laporan	3,178,000	3 Laporan	4,767,000	3 Laporan	4,767,000	3 Laporan	3,178,000	12 Laporan	100%	15,890,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD			100%	202,183,305	100%	279,609,545	20%	24,821,600	30%	40,221,968	30%	52,152,550	20%	55,806,293	100%	100%	173,002,411					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	17,696,645	1 paket	500,000	1 paket	5,054,450	1 paket	1,767,000	1 paket	7,677,400	4 Paket	100%	14,998,850					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 paket	12,051,900	-	-	1 paket (50 %)	1,995,000	1 paket (50%)	2,838,419	1 paket (100%)	6,834,405	2 Paket	100%	11,667,824					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	249,861,000	3 Laporan	24,321,600	3 Laporan	33,172,518	3 Laporan	47,547,131	3 Laporan	41,294,488	12 Laporan	100%	146,335,737					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			-	-	100%	19,903,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					1 unit	19,903,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	58,837,750	100%	62,610,000	25%	10,289,750	25%	15,239,750	25%	14,799,750	25%	20,219,750	100%	100%	60,549,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	4,800,000	3 Laporan	1,119,750	3 Laporan	1,089,750	3 Laporan	1,089,750	3 Laporan	1,089,750	12 Laporan	100%	4,389,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 Laporan	57,810,000	3 Laporan	9,170,000	3 Laporan	14,150,000	3 Laporan	13,710,000	3 Laporan	19,130,000	12 Laporan	100%	56,160,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100%	13,808,600	100%	27,865,000	20%	4,025,000	10%	4759930	10%	3,945,000	44%	4105000	88%	88%	16,834,930					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1 Unit	21,615,000	1 unit	3,215,000	1 unit	4,759,930	1 unit	3,945,000	1 unit	3,475,000	1 unit	100%	15,394,930					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					9 Unit	6,250,000	2 Unit	810,000	-	-	-	-	4 unit	630,000	6 unit	75%	1,440,000					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	4,368,830,000	100 persen	369,831,533	100 Persen	450,122,984	25	62,232,200	25	69,259,101	25	100,828,151	25	87,491,350	100	100	420,629,923	100	790,461,456	100	18%	Bagian Tata Pemerintahan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100 persen	19,800,000	100 Persen	18,140,000	25	5,442,000	25	3,628,000	25	5,442,000	25	3,628,000	100	100	18,140,000					Bagian Tata Pemerintahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					10 Laporan	18,140,000	3 Laporan	5,442,000	2 Laporan	3,628,000	3 Laporan	5,442,000	2 Laporan	3,628,000	10 Laporan	100	18,140,000					Bagian Tata Pemerintahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD			100 persen	223,827,108	100 Persen	305,367,984	25	32,207,400	25	40,759,300	25	84,824,601	25	43,072,800	100	100	200,864,101					Bagian Tata Pemerintahan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	18,746,084	1 Paket	500,000	1 Paket	7,829,500	1 Paket	3,090,000	-	-	1 Paket	100	11,419,500					Bagian Tata Pemerintahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	34,030,900	0	-	-	-	1 Paket	20,869,600	1 Paket	7,134,900	2 Paket	100	28,004,500					Bagian Tata Pemerintahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	252,591,000	3 Laporan	31,707,400	3 Laporan	32,929,800	3 Laporan	60,865,001	3 Laporan	35,937,900	12 Laporan	100	161,440,101					Bagian Tata Pemerintahan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100 persen	20,155,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Tata Pemerintahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Bagian Tata Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 persen	82,938,100	100 Persen	101,365,000	25	15,661,550	25	23,346,551	25	9,246,550	25	39,135,550	100	100	87,390,201					Bagian Tata Pemerintahan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	9,600,000	3 Laporan	2,011,550	3 Laporan	2,011,551	3 Laporan	2,011,550	3 Laporan	1,955,550	12 Laporan	100	7,990,201					Bagian Tata Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan	91,765,000	5 Laporan	13,650,000	5 Laporan	21,335,000	5 Laporan	7,235,000	5 Laporan	37,180,000	5 Laporan	100	79,400,000					Bagian Tata Pemerintahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			100 persen	23,111,325	100 Persen	25,250,000	25	8,921,250	25	1,525,250	25	1,315,000	25	1,655,000	100	100	13,416,500					Bagian Tata Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 unit	25,250,000	2 unit	8,921,250	2 unit	1,525,250	2 unit	1,315,000	2 unit	1,655,000	2 unit	100	13,416,500					Bagian Tata Pemerintahan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14	1,763,000	14 unit	0	0	-	-	-	-	-	-	-	14	100	-					Bagian Tata Pemerintahan
PROGRAM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Otonomi serta Kerjasama Daerah yang terlaksana	100	9,425,590,000	100 persen	311,188,733	100 Persen	141,990,000	25	19,975,600	25	26,162,402	25	6,300,000	25	48,381,119	100	100	100,819,121	100	412,007,854	100%	4%	Bagian Tata Pemerintahan
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tertib Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaksana			100 Persen	275,648,583	100 Persen	127,990,000	25	19,975,600	25	18,803,218	25	6,300,000	25	42,428,293	100	100	87,507,111					Bagian Tata Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					2 Dokumen	56,840,000	1 dokumen	16,825,600	1 dokumen	4,480,000	1 Kali	6,300,000	1 Kegiatan	16,128,253	2 dokumen	100	43,733,853					Bagian Tata Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					3 Dokumen	27,100,000	1 dokumen	1,875,000	1 dokumen	10,423,218	-	-	1 dokumen	1,800,000	3 dokumen	100	14,098,218					Bagian Tata Pemerintahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					2 dokumen	44,250,000	1 dokumen	1,275,000	1 dokumen	3,900,000	-	-	-	24,500,040	2 dokumen	100	29,675,040					Bagian Tata Pemerintahan
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terlaksana			100 persen	35,540,150	100 Persen	14,000,000	25	-	25	7,359,184	25	-	25	5,952,826	100	100	13,312,010					Bagian Tata Pemerintahan
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					1 Dokumen	14,000,000	0	-	1 (50%) dokumen	7,359,184	-	-	1 (50%) dokumen	5,952,826	1 dokumen	100	13,312,010					Bagian Tata Pemerintahan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	6,657,000,000	100	3,858,069,749	460 org	6,074,323,169	325 org	979,810,423	341 org	846,580,665	356 org	1,496,000,000	421 org	1,927,036,219	100	100	5,446,384,907	100.00	9,304,454,656	100	140	Bagian Kesra
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			6,657,000,000	356	3,858,069,749	460 org	6,074,323,169	325 org	979,810,423	341 org	846,580,665	356 org	1,496,000,000	421 org	1,927,036,219	421 org		5,446,384,907					Bagian Kesra
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		6,657,000,000	356	2,528,341,796	460 org	4,910,000,000	325 org	836,250,000	341 org	597,750,000	356 org	1,496,000,000	421 org	1,466,000,000	421 org	91.52	4,396,000,000					Bagian Kesra
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	2,532,600,000	10	267,766,176	100 Persen	426,988,965	100	53,889,182	100	57,340,566	100	121,274,280	100	113,141,183	100	100	357,689,080	55.00	611,758,581	55	24	Bagian Kesra
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD		552,000,000	10	26,800,000	100 Persen	45,420,000	100	9,082,000	100	13,623,000	100	13,623,000	100	9,082,000	100		45,410,000					Bagian Kesra
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		552,000,000	10	26,800,000	10 Laporan	45,420,000	3 Laporan	9,082,000	3 laporan	13,623,000	3 laporan	13,623,000	3 laporan	9,082,000	10 laporan	100	45,410,000					Bagian Kesra
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran Bagian Kesra		1,423,500,000	100	82,997,126	100 Persen	143,868,965	25	21,448,382	25	14,364,924	25	35,242,480	25	45,144,833	100		116,200,619					Bagian Kesra
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9,000,000	100	1,662,545	1 dokumen	1,662,430	0	0	0	0	1 dokumen	1,662,430	0	0	1 dokumen	100	1,662,430					Bagian Kesra
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		468,000,000	100	27,447,681	4 dokumen	34,208,535	1 dokumen	8,557,182	1 dokumen	331,624	1 dokumen	17,331,700	1 dokumen	6,811,204	4 dokumen	100	33,031,710					Bagian Kesra
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		46,500,000	100	4,349,400	4 dokumen	17,328,000	1 dokumen	1,648,700	1 dokumen	2,489,000	1 dokumen	520,000	1 dokumen	5,804,700	4 dokumen	100	10,462,400					Bagian Kesra
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		900,000,000	100	49,537,500	12 laporan	90,670,000	3 laporan	11,242,500	3 laporan	11,544,300	3 laporan	15,728,350	3 laporan	32,528,929	12 laporan	100	71,044,079					Bagian Kesra
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah		461,000,000	100	130,575,700	100 Persen	193,270,000	100	23,358,800	100	13,448,800	100	70,418,800	100	58,514,350	100		165,740,750					Bagian Kesra
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		67,500,000	100	8,185,700	12 Laporan	9,600,000	3 laporan	2,038,800	3 laporan	2,038,800	3 laporan	2,038,800	3 laporan	2,044,350	12 laporan	100	8,160,750					Bagian Kesra
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		461,000,000	100	122,390,000	12 Laporan	183,670,000	3 laporan	21,320,000	3 laporan	11,410,000	3 laporan	68,380,000	3 laporan	56,470,000	12 laporan	100	157,580,000					Bagian Kesra
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		96,100,000	100	27,393,350	100 Persen	44,430,000	100	0	100	15,903,842	100	1,990,000	100	400,000	0		30,337,711					Bagian Kesra
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional		71,100,000	100	25,805,350	4 Dokumen	35,500,000	1 dokumen	3,486,200	1 dokumen	15,903,842	1 dokumen	4,229,090	1 dokumen	4,328,579	4 dokumen	100	27,947,711					Bagian Kesra
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan peralatan mesin yang dipelihara		25,000,000	100	1,588,000	4 dokumen	8,930,000	0	0	0	0	2 dokumen	1,990,000	2 dokumen	400,000	4 dokumen	100	2,390,000					Bagian Kesra
PROGRAM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100	64,825,000,000	100	17,465,436,822	18 dokumen	11,628,960,861	25	855,068,276	25	1,102,281,026	25	6,712,568,818	11	1,205,758,333	86	86	9,875,676,453	93.00	27,341,113,275	93	42	Bagian Kesra

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan		64,825,000,000	100	17,465,436,822	18 dokumen	11,628,960,861	25	855,068,276	25	1,102,281,026	25	6,712,568,818	11	1,205,758,333	86	86	9,875,676,453					Bagian Kesra	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		58,050,000,000	100	16,731,988,822	15 Dokumen	11,428,976,538	3 dokumen	847,723,276	4 dokumen	1,093,924,926	5 dokumen	6,678,891,618	1 dokumen	1,105,237,140	13 dokumen	86.7	9,725,776,960					Bagian Kesra	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB)		3,950,000,000	100	608,790,000	4 Dokumen	75,326,323	1 dokumen	2,610,000	1 dokumen	2,397,500	1 dokumen	28,045,200	1 dokumen	25,906,250	4 dokumen	100	58,958,950					Bagian Kesra	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (1 dokumen meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas, dan koordinasi rantau)		2,825,000,000	100	124,658,000	1 Dokumen	124,658,000	1 dokumen	4,735,000	1 dokumen	5,958,600	1 dokumen	5,632,000	1 dokumen	74,614,943	1 dokumen	100	90,940,543					Bagian Kesra	
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah	100	230,600,220,000	85.46%	502,293,024	100	231,531,570	####	49,213,905	20%	38,944,400	35%	46,443,650	35%	67,850,015	100	100%	156,008,320	#DIV/0!	658,301,344	#DIV/0!	0.29%	Bagian Perekonomian	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100		100%	95,173,000	100	17,250,000	####	3,986,000	23%	5,979,000	25%	5,979,000	27%	1,209,000	100.00%	100.00%	17,153,000					Bagian Perekonomian	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12	17,250,000	3	3,986,000	3	5,979,000	3	5,979,000	3	1,209,000			17,153,000					Bagian Perekonomian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD	100		100%	360,945,774	100	139,941,570	####	36,123,055	24%	18,593,050	26%	24,310,800	21%	47,596,265	100.00%	100.00%	126,623,170					Bagian Perekonomian	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	17,530,030	1	5,959,455	1	5,400,750	-	-	1	4,083,090			15,443,295					Bagian Perekonomian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					Bagian Perekonomian	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	11,246,540	1	2,400,000	1	3,805,300	-	-	1	2,448,000			8,653,300					Bagian Perekonomian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	111,165,000	3	27,763,600	2	9,387,000	4	24,310,800	2	41,065,175			102,526,575					Bagian Perekonomian	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		100%	46,174,250	100	45,300,000	####	6,739,850	####	10,439,350	23.57%	10,389,850	####	13,580,950	100.00%	100.00%	41,150,000					Bagian Perekonomian	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	4,800,000	3	989,850	2	1,019,350	3	989,850	4	1,000,950			4,000,000					Bagian Perekonomian	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	40,500,000	2	5,750,000	-	9,420,000	-	9,400,000	-	12,580,000			37,150,000					Bagian Perekonomian	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					Bagian Perekonomian	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100		100%	25,564,750	100	29,040,000	#DIV/0!	2,365,000	37.6%	3,933,000	32.4%	5,764,000	21.9%	5,463,800	#DIV/0!	#DIV/0!	17,525,800	#DIV/0!	43,090,550				Bagian Perekonomian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	22,750,000	1	2,365,000	1	3,933,000	-	3,919,000	2	2,813,800			13,030,800					Bagian Perekonomian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	6,290,000	-	5	-	6	1,845,000	4	2,650,000			4,495,000						Bagian Perekonomian	
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100		0%		100	-	0.00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0.00%	0%	-	0%	-			Bagian Perekonomian	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	-	-	-	-	-	-	-	-			-					Bagian Perekonomian	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD dan Perekonomian yang terlaksana	100	7,715,830,000	96.23%	413,006,832	100	87,339,000	####	2,780,900	40%	1,554,800	26%	10,934,700	24%	8,714,100	100	100	23,984,500	98%	436,991,332	98%	5.66%	Bagian Perekonomian	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dirumuskan	100		96.23%	413,006,832	100	87,339,000	####	2,780,900	40%	1,554,800	26%	10,934,700	24%	8,714,100	100.00%	100%	23,984,500					Bagian Perekonomian	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					3 Dokumen	21,500,000.00	-	-	1	290,400	1	4,101,400	1	3,807,100			8,198,900					Bagian Perekonomian	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4 Laporan	33,954,000.00	1	2,220,900	2	554,400	1	6,833,300	1	2,277,000			11,885,600					Bagian Perekonomian	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1 Dokumen	31,885,000.00	-	560,000	1	710,000	-	-	-	2,630,000			3,900,000					Bagian Perekonomian	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					Bagian Perekonomian	
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	230,600,220,000	100	660,183,196	100	216,085,627	25	33,264,800	25	31,803,350	25	55,894,030	25	36,881,510	100	100	157,843,690					Bagian AP	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			100	105,718,000	100	26,220,000	25.0	7,191,000	25	7,191,000	25.0	7,191,000	25.0	2,397,000	100	100	23,970,000					Bagian AP	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan Jumlah penyediaan operasional administrasi keuangan			100	105,718,000	12 Laporan	26,220,000	3 Laporan	7,191,000	3 Laporan	7,191,000	3 Laporan	7,191,000	3 Laporan	2,397,000	12 Laporan	100	23,970,000					Bagian AP
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase peningkatan kualitas ADM Umum			100	424,489,089	85	122,825,627	25.0	20,946,000	25	14,967,550	25.0	39,020,400	25	23,014,300	100	100	97,948,250					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			100	21,314,000	4 paket	16,924,427	1 paket	500,000	1 paket	7,465,050	1 paket	4,870,300	1 paket	4,002,900	4 paket	100	16,838,250					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			100	#REF!	1 paket	6,403,800	0.25	0	0.25	1,590,000	0.25	1,980,000	0.25	2,830,500	1 paket	100	6,400,500					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			100	301,541,520	12 Laporan	99,497,400	3 laporan	20,446,000	3 laporan	5,912,500	3 laporan	32,170,100	3 laporan	16,180,900	12 Laporan	100	74,709,500					Bagian AP
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN			100	76,532,448	100	29,640,000	25.0	4,677,800	25.0	6,797,050	25.0	7,462,630	25	7,560,310	100	100	26,497,790					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			100	0	12 Laporan	6,600,000	3 laporan	1,540,000.00	3 laporan	1,540,000.00	3 laporan	1,540,000.00	3 laporan	1,537,790	12 Laporan	100	6,157,790					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			100	65,378,200	12 Laporan	23,040,000	3 laporan	3,137,800	3 laporan	5,257,050	3 laporan	5,922,630	3 laporan	6,022,520	12 Laporan	100	20,340,000					Bagian AP
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN			100	53,443,659	100	37,400,000	25.0	450,000	25	2,847,750	25.0	2,220,000	25	3,909,900	100	100	9,427,650					Bagian AP
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			100	37,198,592	3 unit 2 unit 1 unit 0 unit	17,000,000	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	450,000	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	2,847,750	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	2,220,000	3 unit 1 unit 1 unit 1 unit	2,884,900	3 unit 2 unit 1 unit 1 unit	100	8,402,650					Bagian AP
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah pemeliharaan AC 2. Jumlah pemeliharaan komputer dan laptop 3. Jumlah pemeliharaan printer			100	16,244,707	3 unit 0 unit 1 unit	5,400,000	0 unit 0 unit 0 unit	0	0 unit 0 unit 0 unit	0	0 unit 0 unit 0 unit	0	0 unit 2 unit 1 unit	1,025,000	0 unit 2 unit 1 unit	100	1,025,000					Bagian AP
Sub kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan						2 unit	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Bagian AP
Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah	Sub Total			0																			Bagian AP
Org. : Bag. Adm. Pemb.		100	7,715,830,000	100	996,208,550																		Bagian AP
Program : Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	100	7,715,830,000	100	996,208,550	100	193,489,000	25	5,303,000	25	39,620,500	25	28,257,950	25	24,508,850	100	100	97,690,300	100	1,093,898,850	100	14.18	Bagian AP
Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku			100	996,208,550	100	193,489,000	25.0	5,303,000	25.0	39,620,500	25.0	28,257,950	25.0	24,508,850	100	100	97,690,300					Bagian AP
Sub Kegiatan : Pengelolaan evaluasi dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan			100	965,537,550	12 Laporan	193,489,000	3 laporan	5,303,000	3 laporan	39,620,500	3 laporan	28,257,950	3 laporan	24,508,850	12 laporan	100	97,690,300					Bagian AP
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Dibidang SDA yang terlaksana	100%	230,600,220,000	100%	563,524,622	100	169,760,566	25%	26,554,750	25%	41,995,930	25%	43,990,450	25%	43,677,554	100%	100%	156,218,684	100%	719,743,306	100	0.31	BAGIAN SDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah			100%	53,800,000	100	60,470,000	25%	8,958,000	25%	14,007,000	25%	13,707,000	25%	14,798,000	100%	100%	51,470,000					BAGIAN SDA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100%	35,630,000	12 Dokumen	39,970,000	3 dokumen	6,020,000	3 dokumen	9,400,000	3 dokumen	9,100,000	3 dokumen	11,760,000	12 dokumen	100%	36,280,000					BAGIAN SDA
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD			100%	18,170,000	12 laporan	20,500,000	3 laporan	2,938,000	3 laporan	4,607,000	3 laporan	4,607,000	3 laporan	3,038,000	12 laporan	100%	15,190,000					BAGIAN SDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD			100%	116,518,493	100%	55,585,566	0.25	12,052,000	0.25	13,628,910	0.25	20,865,700	0.25	20,829,804	1.00	100%	67,376,414					BAGIAN SDA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100%	25,412,388	5 Paket	10,536,766	0	-	2 Paket	4,242,410	2 Paket	2,636,000	1 Paket	3,153,954	5 Paket	100%	10,032,364					BAGIAN SDA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100%	5,487,000	1 Paket	3,893,800	0	-	0.5 Paket	1,848,000	0 Paket	1,710,000	0.5 Paket	297,000	1 Paket	100%	3,855,000					BAGIAN SDA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	85,619,105	12 Laporan	41,155,000	3 laporan	12,052,000	3 laporan	7,538,500	3 laporan	16,519,700	3 laporan	17,378,850	12 laporan	100%	53,489,050					BAGIAN SDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				24,333,331	100%	28,640,000	0.25	4,609,750	0.25	6,629,750	0.25	6,369,750	0.25	7,969,750	1.00	100%	25,579,000					BAGIAN SDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100%	3,053,331	12 Laporan	4,800,000	3 laporan	1,089,750	3 laporan	1,089,750	3 laporan	1,089,750	3 laporan	1,089,750	12 laporan	100%	4,359,000					BAGIAN SDA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			100%	21,280,000	12 laporan	23,840,000	3 laporan	3,520,000	3 laporan	5,540,000	3 laporan	5,280,000	3 laporan	6,880,000	12 laporan	100%	21,220,000					BAGIAN SDA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			100%	19,205,250	100%	25,065,000	0.25	935,000	0.25	7,730,270	0.25	3,048,000	0.25	80,000	1.00	100%	11,793,270					BAGIAN SDA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100%	16,275,250	1 Unit	21,615,000	0.25 Unit	935,000	0.25 Unit	7,530,270	0.25 Unit	1,048,000	0.25 Unit	80,000	1 Unit	100%	9,593,270					BAGIAN SDA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100%	2,930,000	8 Unit	3,450,000	0	-	2 Unit	200,000	4 Unit	2,000,000	0	-	6 Unit	75%	2,200,000					BAGIAN SDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan SDA yang terlaksana	100%	7,715,830,000	100%	46,060,600	100%	31,230,000	25%	4,748,500	25%	6,996,000	25%	5,936,000	25%	6,557,500	100%	100%	24,238,000	100.0%	70,298,600	100	0.91	BAGIAN SDA
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan Pemantauan SDA yang dirumuskan			100%	46,060,600	100%	31,230,000	25%	4,748,500	25%	6,996,000	25%	5,936,000	25%	6,557,500	100%	100%	24,238,000					BAGIAN SDA
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			100%	17,432,500	1 Dokumen	10,440,000	0.25 Dokumen	3,068,500	0.25 Dokumen	1,685,000	0.25 Dokumen	1,700,000	0.25 Dokumen	2,520,000	1 Dokumen	100%	8,973,500					BAGIAN SDA
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			100%	14,217,100	1 Dokumen	11,250,000	0.25 Dokumen	300,000	0.25 Dokumen	3,661,000	0.25 Dokumen	572,500	0.25 Dokumen	3,262,500	1 Dokumen	100%	7,796,000					BAGIAN SDA
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemurnahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			100%	14,411,000	1 Laporan	9,540,000	0.25 Laporan	1,380,000	0.25 Laporan	1,650,000	0.25 Laporan	3,663,500	0.25 Laporan	775,000	1 Laporan	100%	7,468,500					BAGIAN SDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN , Persentase kebijakan protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	100	230,600,220,000	100%	1,329,727,953	100 persen	1,164,323,169	25%	143,560,423	25%	248,830,665	25%	194,119,600	25%	461,036,219.00	100	100	1,050,384,907	100	2,380,112,860	100	0.01	Bagian Prokapim
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah			100	30,700,000	100 persen	25,650,000	25%	2,782,000	25%	11,128,000	25%	8,346,000	25%	2,782,000.00	100	100	25,038,000					Bagian Prokapim
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD					14 Laporan	25,650,000	3Laporan	2,782,000	5Laporan	11,128,000	3Laporan	8,346,000	3 Laporan	2,782,000.00	14 Laporan	100	25,038,000					Bagian Prokapim
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah			12 Bulan	688,105,553	100 persen	482,860,669	25	77,927,923	25	119,468,700	25	108,154,900	25	126,070,821.00	100	100	431,622,344					Bagian Prokapim
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	41,493,069	1 paket	6,374,063	1 paket	15,500,000	1 paket	12,074,100	1 paket	1,094,040.00	4 paket	100	35,042,203					Bagian Prokapim
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	441,367,600	3 Laporan	71,553,860	3 Laporan	103,968,700	3 Laporan	96,080,800	3 Laporan	124,976,781.00	12 Laporan	100	396,580,141					Bagian Prokapim
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100	98,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					Bagian Prokapim
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					Bagian Prokapim
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah	100	65,735,000	100 persen	12,350,000	25	2,880,500	25	3,234,590	25	2,838,000	25	2,843,550.00	25	2,843,550.00	100	100	11,796,640					Bagian Prokapim
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					13 Laporan	12,350,000	3 laporan	2,880,500	3 laporan	3,234,590	3 laporan	2,838,000	4laporan	2,843,550.00	13 Laporan	100	11,796,640					Bagian Prokapim
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0					Bagian Prokapim
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah	100	67,600,000	100 persen	68,320,000	25	1,560,000	25	5,314,375	25	7,134,950	25	18,161,890.00	25	18,161,890.00	25	100	32,171,215					Bagian Prokapim
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Unit	49,500,000	3 Unit	1,560,000	3 Unit	3,614,375	3 Unit	6,334,950	3 Unit	17,561,890	3 Unit	100	29,071,215					Bagian Prokapim
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					26 unit/tah unit	18,820,000	0	0	3 Unit	1,700,000	3 Unit	800,000	3 Unit	600,000.0	9 Unit	100	3,100,000					Bagian Prokapim
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kebijakan protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	100	378,842,400	100 persen	575,142,500	25	58,410,000	25	109,685,000	25	70,483,750	25	311,177,958.00	25	311,177,958.00	25	100	549,756,708					Bagian Prokapim
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					900 Laporan	379,913,700	100 Laporan	53,610,000	300 Laporan	91,760,000	300 Laporan	67,983,750	200 Laporan	158,695,000.00	900 Laporan	100	372,048,750					Bagian Prokapim
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					900 Laporan	69,718,800	200 Laporan	4,800,000	300 Laporan	9,600,000	3 Laporan	-	400 Laporan	46,247,078.00	900 Laporan	100	60,647,078					Bagian Prokapim
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					33 Laporan	125,510,000	-	-	10 Laporan	8,325,000	5Laporan	2,500,000	18 Laporan	106,235,880.00	33 laporan	100	117,060,880					Bagian Prokapim

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	#####	100	465,291,858	100 persen	500,419,473	30.97	65,091,125	22.44	37,529,450	20.17	46,400,900	26.42	83,014,058	100.00	100.00	232,035,533	100.00	697,327,391	100.00	0.30	Bagian PBJ
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			187,301,680	100 Persen	22,980,000	25.00	6,894,000	25.00	4,596,000	25.00	6,894,000	25.00	4,596,000	100.00	100		22,980,000					Bagian PBJ
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24,200,000	12 Laporan	22,980,000	3 Laporan	6,894,000	3 Laporan	4,596,000	3 Laporan	6,894,000	3 Laporan	4,596,000	12 Laporan	100		22,980,000						Bagian PBJ
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD		345,323,793	100 Persen	206,549,783	37.50	39,043,675	12.50	8,016,000	12.50	18,656,900	37.50	54,080,658	100.00	100		119,797,233						Bagian PBJ
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10,723,630	2 Paket	44,721,783	1 Paket	15,139,305	-	-	1 Paket	25,869,150	2 Paket	100	41,008,455			Bagian PBJ						
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan		1,100,000	1 Paket	5,105,000	0.5 Paket	1,244,000	-	-	0.5 Paket	3,861,000	1 Paket	100	5,105,000			Bagian PBJ						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		143,925,178	12 Laporan	156,723,000	3 Laporan	22,660,370	3 Laporan	8,016,000	3 Laporan	18,656,900	3 Laporan	24,350,508	12 Laporan	100		73,683,778						Bagian PBJ
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional SKPD		496,825,530	100 Persen	144,559,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian PBJ
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan		185,540,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian PBJ
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan		80,850,000	4 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian PBJ
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan		230,435,000	4 unit	144,559,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Bagian PBJ
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Usuran Penunjang Pemerintah Daerah		70,990,000	100 Persen	81,600,000	25.00	11,750,000	25.00	18,900,000	25.00	18,430,000	25.00	23,570,000	100.00	100.00		72,650,000						Bagian PBJ
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		70,990,000	12 Laporan	81,600,000	3 Laporan	11,750,000	3 Laporan	18,900,000	3 Laporan	18,430,000	3 Laporan	23,570,000	12 Laporan	100.00		72,650,000						Bagian PBJ
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah		43,612,050	100 Persen	44,730,000	36.36	7,403,450	27.27	6,017,450	18.18	2,420,000	18.18	767,400	100.00	100.00		16,608,300						Bagian PBJ
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	22,250,000	1 Unit	4,713,450	-	4,467,450	-	1,110,000	1 Unit	382,400	2 Unit	100.00		10,673,300						Bagian PBJ
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			32 unit	22,480,000	3 unit	2,690,000	3 unit	1,550,000	2 Unit	1,310,000	1 Unit	385,000	9 unit	100.00		5,935,000						Bagian PBJ
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terlaksana	100	7,715,830,000.00	100	1,119,022,411	100 persen	212,359,000	####	5,578,327	-	25,506,589	-	10,400,860	-	101,183,104	100.00	100.00	142,668,880	100.00	1,261,691,291	100.00	16.35	Bagian PBJ
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan		1,119,022,411	100 Persen	212,359,000	####	5,578,327	-	25,506,589	-	10,400,860	-	101,183,104	100.00	100.00		142,668,880						Bagian PBJ
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			12 Dokumen	116,119,000	3 Dokumen	3,702,500	3 Dokumen	23,610,605	3 Dokumen	7,915,000	3 Dokumen	22,106,632	12 Dokumen	100		57,334,737						Bagian PBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 Dokumen	96,240,000	-	1,875,827	-	1,895,984	-	2,485,860	-	79,076,472	1 Dokumen	100		85,334,143						Bagian PBJ
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	230,600,220.000	100 Persen	14,409,587,262	100 persen	14,689,666,550	25 persen	3,262,604,056	25 persen	3,795,617,052	25 persen	3,146,139,809	20.61 persen	3,629,468,515	95.61 persen	94.61	13,833,829,432	97.31	28,243,416,694	0.97	12	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	13,113,223,961	100 Persen	12,326,103,797	25 Persen	2,930,587,778	25 Persen	3,148,882,880	25 Persen	2,680,498,195	25 Persen	2,992,586,643	100 persen	100	11,752,555,496					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			157 PNS	12,282,323,797	107 PNS	2,920,360,778	107 PNS	3,138,655,880	3 Laporan	2,670,271,195	3 Laporan	2,983,097,643	3 Laporan	100		11,712,385,496						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10 Laporan	43,780,000	3 Laporan	10,227,000	3 Laporan	10,227,000	3 Laporan	10,227,000	3 Laporan	9,489,000	3 Laporan	100		40,170,000						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD		224,339,015	100 persen	232,995,141	25 Persen	46,024,199	25 Persen	29,617,040	25 Persen	51,847,750	25 Persen	76,844,407	100 Persen	100		204,333,396						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	28,731,141	1 paket	8,673,505	1 paket	2,932,040	1 paket	14,410,900	1 paket	1,140,000	1 paket	100		27,156,445						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			2 paket	27,299,400	2 paket	4,168,494	2 paket	2,997,000	2 paket	6,476,850	2 paket	13,654,332	2 paket	100		27,296,676						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	176,964,600	3 Laporan	33,182,200	3 Laporan	23,688,000	3 Laporan	30,960,000	3 Laporan	62,050,075	3 Laporan	100		149,880,275						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah sesuai dengan yang direncanakan		-	-	45,054,580	-	-	-	-	-	-	66.67	24,300,000	66.67	66.67		24,300,000						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	3 unit	45,054,580	-	-	-	-	-	2	24,300,000	2	66.67		24,300,000						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		169,275,930	100 persen	1,115,689,946	25 Persen	160,592,944	25 Persen	380,610,318	25 Persen	233,168,662	25 Persen	314,216,136	100 persen	100		1,088,588,060						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6,900,000	1 laporan	1,299,540	1 laporan	1,299,540	1 laporan	1,299,540	1 laporan	1,310,640	1 laporan	100		5,209,260						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	1,108,789,946	3 laporan	159,293,404	3 laporan	379,310,778	3 laporan	231,869,122	3 laporan	312,905,496	3 laporan	100		1,083,378,800						Bagian Perencanaan dan Keuangan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi Baik			100 Persen	22,111,375	100 persen	22,020,000	25 Perse n	2,355,000	25 Perse n	2,690,000	25 Persen	5,416,500	25 Perse n	7,157,350	100 persen	100	17,618,850					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara					1 Unit	16,500,000	1 unit	2,355,000	1 unit	705,000	1 unit	5,166,500	1 unit	4,832,350	1 unit	100	13,058,850					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	5,520,000	3 unit	-	3 unit	1,985,000	3 unit	250,000	1 unit	2,325,000	1 unit	100	4,560,000					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan			100 Persen	880,636,981	100 persen	947,803,086	25 Perse n	123,044,135	25 Perse n	233,816,814	25 Persen	175,208,702	25 Perse n	214,363,979	100 persen	100	746,433,630					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	97,561,881	2 orang/ bulan	26,756,965	2 orang/ bulan	26,773,451	2 orang/ bulan	20,259,948	2 orang/ bulan	20,327,256	2 orang/ bulan	100	94,117,630					Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	850,241,205	2 orang/ bulan	96,287,170	2 orang/ bulan	207,043,353	2 orang/ bulan	154,948,754	2 orang/ bulan	194,036,723	2 orang/ bulan	100	652,316,000					Bagian Perencanaan dan Keuangan
SEKRETARIAT DPRD																							Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD	100%	33,439.78	100%	24,465,829,948.00	100 Persen	24,703,550,578	25%	587,155,551	25%	718,656,907	25%	646,955,789	25%	653,200,977	100%	100%	23,157,910,871	100%	47,623,740,819.00	100%	#####	Sekretariat DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100%	2,274,550,301	100 persen	2,768,240,556	25	587,155,551	25	718,656,907	25	646,955,789	25	653,200,977	100	100	2,605,969,224					Sekretariat DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2,192,725,701	23 Orang/ bulan	2,659,131,656	23 Ora ng/ bul an	583,171,551	23 Ora ng/ bul an	690,478,407	23 Orang/ bulan	614,829,411	23 Ora ng/ bul an	619,142,155	23 Orang/ bulan	100%	2,507,621,524					Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Peyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			81,824,600	12 Laporan	109,108,900	3 Lapora n	3,984,000	3 Lapora n	28,178,500	3 Laporan	32,126,378	3 Lapora n	34,058,822	12 Laporan	100%	98,347,700						Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100%	2,098,725,149	100 persen	763,949,802	25	174,214,567.00	25	143,828.332	25	141,229,020.00	25	238,298.000	100%	100%	697,569.919					Sekretariat DPRD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			11,747,760	1 Paket	17,493,700	-	-	1 paket	370,000	1 paket	9,544,335.00	1 Paket	7,574,085	1 Paket	100%	17,488,420						Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			307,053,660.00	4 Paket	206,766,652	1 Paket	3,400,000	1 Paket	47,594,000	1 Paket	36,099,825	1 Paket	108,143,688	4 Paket	100%	195,237,513						Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			50,804,579	1 Paket	54,533,950	0 Paket	-	1 Paket (33,33 %)	7,327,110	1 paket (33,33%)	34,370,151	1 Paket (33,34 %)	12,836,484	1 Paket	100%	54,533,745						Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,729,119,150	12 Lap	485,155,500	3 Lap	170,814,567	3 Lap	88,537,222	3 Lap	61,214,709	3 Lap	109,743,743	12 Laporan	100%	430,310,241						Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	96,740,000	100 persen	26,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25,768,650	100%	100%	25,768,650					Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			96,740,000	1 Unit	26,955,000	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	25,768,650	2 unit	100%	25,768,650					Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,305,974,332	100 persen	1,420,177,392	25%	201,810,825	25%	388,066,170	25%	400,654,993	25%	339,343,013	100%	100	1,329,875,001							Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			268,424,556	12 Lap	296,753,392	3 Lap	59,470,993	3 Lap	64,912,992	3 Laporan	80,622,187	3 Lapora n	73,066,605	12 Laporan	100%	278,072,777						Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1,037,549,776	35 Lap	1,123,424,000	10 Lap	142,339,832	10 Lap	323,153,178	5 Laporan	320,032,806	10 Lapora n	266,276,408	35 Laporan	100%	1,051,802,224						Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100%	420,126,744	100 persen	282,808,000	25%	2,338,500	25%	16,560,265	25%	37,902,818	25%	124,707,267	100%	100%	181,508,850					Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			65,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit (15%)	2,148,500	1 Unit (25%)	6,194,749	1 Unit (10%)	1,779,720	1 Unit (50%)	18,122,204	1 unit (100%)	100%	28,245,173						Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			191,635,181	12 Unit	181,670,000	1 Unit	190,000	2 unit	4,384,516	4 unit	27,689,998	6 unit	105,655,063	12 Unit	100%	137,919,577						Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			40,400,133	30 Unit	45,760,000	0 Unit	-	15 Unit	5,981,000	15 Unit	5,539,100	-	-	30 unit	100%	11,520,100						Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			123,091,430	1 Unit	14,378,000	0 Unit	-	0	-	1 unit (75%)	2,894,000	1 unit (25%)	930,000	1 unit	100%	3,824,000						Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100%	17,823,425,422	100 persen	18,992,486,828	25%	4,368,229,901	25%	4,189,652,631	25%	4,433,075,584	25%	4,927,419,116	100%	100%	17,918,377,232							Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			17,183,624,922	45 Orang/ Bulan	17,853,986,828	45 Ora ng/ Bulan	4,364,353,401	45 Orang/ Bulan	4,189,652,631	45 Orang/ Bulan	4,429,745,584	45 Orang/ Bulan	4,298,769,116	45 Orang/ Bulan	100%	17,282,520,732						Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			639,800,500	4 Paket	1,138,500,000	1 Paketi	3,876,500	-	-	1 Paket	3,330,000	2 Paket	628,650,000	4 Paket	100%	635,856,500						Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi			100%	446,288,000	100 persen	448,932,900	25%	63,716,200	25%	66,374,150	25%	161,435,100	25%	107,316,545	100%	100%	398,841,995					Sekretariat DPRD
Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			204,790,400	30 Lap	208,932,900	2 Lap	23,716,700	3 Lap	26,378,150	15 Lporan	101,579,100	10 Lapora n	47,917,550	30 Laporan	100%	199,591,500						Sekretariat DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			241,497,600	4 paket	240,000,000	1 paket	39,999,500	1 Paket	39,996,000	1 Paket	59,856,000	1Paket	59,398,995	4 Paket	100%	199,250,495						Sekretariat DPRD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	18.020,86	100%	26.013,069,373	100 persen	26.791,970,225	25	#####	25	7.990,132,396	21	4.573,309,194	21.1	6.719,926,841	93.1	93.1	25,430,905,081	96%	52,222,875,306	96%	8,703,812,551	Sekretariat DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan ranperda dan peraturan DPRD yang difasilitasi			100%	2,398,186,795	100 persen	3,439,779,400	10	1,800,000,00	10	806,345,750	15	831,519,740	15	1,556,356,658	100%	50%	3,196,022,148					Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2,373,186,795	2 Dok	3,387,779,400	1 Dok	1,800,000	1 Dok	806,345,750	2 Dokumen	831,519,740	2 Dokumen	1,538,756,658	2 Dokumen	100%	3,178,422,148					Sekretariat DPRD
Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				25,000,000	2 Dok	52,000,000	0 Dok	-	0	-	0	-	0	17,600,000	0	0%	17,600,000					Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi			100%	303,656,521	100 persen	801,955,000	-	0	-	-	0	50%	434,315,325	50%	265,524,190	100	100	699,839,515				Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				303,656,521	7 Dok	801,955,000	-	-	-	-	5 Dokumen	434,315,325	5 Dokumen	265,524,190	7 Dokumen	100%	699,839,515					Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi			100%	1,313,662,599	100 persen	1,129,960,800	-	0	33,33 %	1,033,579,453	33,33%	29,843,800	####	22,293,544	100	100%	1,085,716,797					Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1,313,662,599	1 Dok	1,129,960,800	-	1 Dok (33,33 %)	1,033,579,453	1 Dok (33,33%)	29,843,800	1 Dok (33,34 %)	22,293,544	1 Dokumen	100%	1,085,716,797					Sekretariat DPRD	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas			100%	3,172,739,637	100 Persen	3,781,593,025	25%	854,331,600	25%	934,507,954	25%	612,326,793	25%	1,384,851,302	108.33	108.33	3,413,025,561					Sekretariat DPRD
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				-	1 Dokumen	450,079,560	0	-	-	0	1 Dokumen (50%)	372,992,088	1 Dokumen (50%)	405,451,713	1 Dokumen	100%	405,451,713					Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2,252,378,968	3 Dok	2,348,689,300	1 Dok	769,499,800	1 Dok	702,061,330	1 Dokumen	8,281,755	1 Dokumen	665,076,227	4 Dokumen	133.33	2,144,919,112					Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				294,000,000	7 Orang	294,000,000	7 Orang	35,000,000	7 orang	77,000,000	7 Orang	70,000,000	7 Orang	98,000,000	7 Orang	100%	280,000,000					Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				626,360,669	12 Dok	688,824,165	3 Dok	49,831,800	3 Dok	155,446,624	3 Dok	161,052,950	3 Dok	216,323,362	12 Dokumen	100%	582,654,736					Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi			100%	2,979,575,368	100 persen	3,373,233,500	25%	1,103,768,987	25%	835,050,524	25%	576,093,453	25%	455,517,600	100%	100%	2,970,430,564					Sekretariat DPRD
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2,188,539,068	6 Lap	2,323,051,400	2 Lap	1,036,758,987	2 Lap	686,275,524	1 Laporan	459,746,453	1 Laporan	33,069,000	6 Laporan	100%	2,215,849,964					Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				791,036,300	2 Dok	1,050,182,100	1 Dok (50%)	67,010,000	1 Dok (50%)	148,775,000	1 Dok (50%)	116,347,000	1 Dok (50%)	422,448,600	2 Dokumen	100%	754,580,600					Sekretariat DPRD
Facilitasi Tugas DPRD	Jumlah tugas DPRD yang difasilitasi	100%	15,845,248,453	5 kali	14,265,448,500	2 Kali	4,560,628,151	2 Kali	4,560,628,151	1 kali	4,380,648,715	1 kali	2,089,210,083	1 kali	3,035,383,547	5 kali	100%	14,065,870,496					Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15,845,248,453	5 kali	14,265,448,500	2 Kali	4,560,628,151	1 kali	4,380,648,715	1 kali	2,089,210,083	1 kali	3,035,383,547	5 kali	100%	14,065,870,496					Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100%	216,622,829,990	100%	28,357,177,148	97%	5,130,497,263	25%	1,146,509,564	25%	1,244,544,146	25%	1,146,778,474	25%	1,296,057,887	100%	100	4,918,219,871	100%	33,275,396,219	100%	15,36%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			100%	26,913,722,264	100%	3,235,252,751	25%	810,582,569	25%	850,310,938	25%	702,614,247	25%	786,834,892	100%	100	3,150,342,646					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					24 orang/ bulan	3,136,827,751	24	781,050,569	24	820,778,938	24	673,082,247	24	777,005,892	24	100	3,051,917,646					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	98,425,000	3	29,532,000	3	29,532,000	3	29,532,000	3	9,829,000	12	100	98,425,000					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	894,603,818	100%	1,115,558,100	25%	242,617,660	25%	242,617,660	25%	191,475,580	25%	325,692,733	25%	324,713,041	100%	100	1,084,499,014					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	5,436,900	1	1,900,000	1	1,390,000	1	360,000	1	1,705,000	1	100	5,355,000					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 paket	197,051,100	2	91,643,600	2	4,840,936	2	6,270,000	2	82,641,600	2	100	185,396,136					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					2 paket	35,883,900	2	5,049,391	2	7,318,938	2	6,141,825	2	13,288,704	2	100	31,798,858					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 laporan	877,186,200	3	144,024,669	3	177,925,706	3	312,920,908	3	227,077,737	12	100	861,949,020					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	99,404,000	-	50%	26,400,000	-	50%	26,400,000	25%	23,750,000	25%	34,179,000	25%	34,179,000	100%	100	84,329,000					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 unit	99,404,000	-	2	26,400,000	1	23,750,000	2	34,179,000	5	100	84,329,000					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	411,183,324	100%	436,574,412	100%	67,601,285	25%	127,546,618	25%	96,863,644	25%	124,047,342	25%	101.39	101.39	182,987,522					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 laporan	13,637,696	4	2,584,874	4	2,546,374	4	2,061,400	4	2,074,350	4	100	9,266,998					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 laporan	422,936,716	3	65,016,411	3	125,002,244	3	94,802,244	3	121,972,992	12	100	406,793,891					Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berondisi baik			100%	137,667,742	100%	243,708,000	####	25,708,050	####	75,209,010	25.00%	21,607,850	####	60,462,612	101.39%	101.39	182,987,522					Badan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					24 unit	196.460,000	3	16.699,300	5	68.203,020	2	16.832,850	15	48.692,932	25	104.17	150.428,102					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					107 unit	44.700,000	6	8.848,750	6	6.785,990	5	4.775,000	6	11.769,680	23	100	32.179,420					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharai/Dirahabilitasi					1 unit	2.548,000	1	160,000	1	220,000	-	-	-	-	1	100	380,000					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	873,672,317,493	WTP	174,544,237,508	WTP	193,108,938,387	WTP	16,061,337,278	WTP	24,910,007,985	WTP	29,490,755,300	WTP	#VALUE!	WTP	100	#VALUE!	100%	#VALUE!	100%	#VALUE!	#VALUE!	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah			6	1,258,989,327	6 dokumen	1,449,352,400	6 (25%)	321,454,973	(25%)	345,995,100	6 (25%)	384,813,157	(25%)	380,664,345	6	100	1,432,927,575					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					6 dokumen	1,449,352,400	5 (50%)	321,454,973	(50%)	345,995,100	1 (50%)	384,813,157	(50%)	380,664,345	6	100	1,432,927,575					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase proses pengelolaan belanja daerah			100%	398,555,937	100%	388,824,800	####	67,967,300	25%	83,570,100	25%	91,392,500	25%	126,725,090	114%	114	369,654,990					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					75 dokumen	106.566,400	3	12.156,100	17	11.278,700	11	12.215,400	44	54.054,690	75	100	89.704,890					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					2804 dokumen	282.258,400	503	55.811,200	967	72.291,400	849	79.177,100	1246	72.670,400	3565	127.14	279.950,100					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun			3	327,831,801	3 jenis	414,335,700	3 (25%)	133,997,250	3 (25%)	80,919,808	3 (25%)	91,088,908	3 (25%)	#VALUE!	3	100	#VALUE!					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					18 laporan	48,125,800	4	22,098,750	5	6,729,200	5	10,182,700	4	4,842,450	18	100	43,853,100					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					326 laporan	198,723,100	80	111,898,500	86	19,107,700	80	20,789,500	80	37,324,150	326	100	189,119,850					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 dokumen	133,660,300	-	-	2 (50%)	55,082,908	2 (25%)	60,116,708	2 (25%)	8,307,100	2	100	123,506,716					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					1 dokumen	33,826,500	-	-	-	-	1 (75%)	#####	1 (25%)	#VALUE!	1	100	#VALUE!					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari			1	172,306,667,443	1 paket	190,263,247,187	1	15,439,930,355	1	24,361,788,977	1	28,877,725,835	1	116,380,455,489	1	67	185,059,900,656					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					24 laporan	181,824,106,600	6	15,347,487,035	6	23,605,895,467	6	27,842,165,697	6	115,028,558,401	24	100	181,824,106,600					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12 laporan	3,534,074,866	3	92,443,320	3	755,893,510	3	1,035,560,138	3	1,351,897,088	12	100	3,235,794,056					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					24 laporan	4,905,065,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	1	252,193,000	1 paket	593,178,300	1	97,987,400	1	37,734,000	1	45,734,900	1	45,734,900	1	72,408,100	1	100	253,864,400					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1070 dokumen	245,541,000	267	27,834,400	269	30,948,100	267	45,642,500	267	65,333,500	1070	100	169,758,500					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					44 orang	347,637,300	44	70,153,000	44	6,785,900	44	92,400	44	7,074,600	44	100	84,105,900					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	87%	6,164,000,000	80%	845,505,240	82%	904,408,100	25%	153,219,170	25%	127,032,578	25%	141,518,486	25%	243,138,284	100%	121.95	664,908,518	90%	1,510,413,758	103%	24.50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah untuk seluruh OPD			100%	845,505,240	44 OPD	904,408,100	44 OPD	153,219,170	44 OPD	127,032,578	44 OPD	141,518,486	44 OPD	243,138,284	44	100	664,908,518					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					2 dokumen	70,560,000	1 (50%)	1,303,250	(50%)	19,854,700	1 (50%)	14,914,586	(50%)	18,465,584	2	100	54,538,120					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					4 dokumen	27,870,000	2 (50%)	9,069,400	(50%)	3,452,500	2 (50%)	1,741,500	(50%)	2,676,250	4	100	16,939,650					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					1056 Laporan	358,802,000	264	40,935,000	264	21,986,038	264	44,100,900	264	71,462,400	1056	100	178,484,338					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					20 dokumen	187,911,100	35	31,289,220	6	28,102,340	30	31,624,500	30	72,910,750	101	505	163,926,810					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					2 laporan	259,265,000	1 laproa n (50%)	70,622,300	1 laproa n (50%)	53,637,000	1 laproa n (50%)	49,137,000	1 laproa n (50%)	77,623,300	2	100	251,019,600					Badan Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	26,872,110,000	100	3,812,223,799	95 %	4,215,246,670	25	868,907,823	25	1,190,881,863	25	810,684,001	24	1,045,969,141	99	104	3,916,442,828	102	11,744,117,171	102.10526		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	6,486,396,803	97 %	3,596,559,201	25	813,476,419	25	1,002,901,213	25	732,168,663	25	809,799,359	100	100	3,358,345,654					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34 orang	3,544,609,201	34 orang	808,281,419	34 orang	987,316,213	34 orang	706,193,663	34 orang	804,764,359	34 orang	100	3,306,555,654					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 lap	51,950,000	3 Lap	5,195,000	3 Lap	15,585,000	3 Lap	25,975,000	3 Lap	5,035,000	12 Lap	100	51,790,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	1,005,966,484	97%	393,627,669	25	31,687,916	25	119,472,362	25	45,808,057	25	161,480,087	100	100	358,448,422					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	4,008,210	-	-	1 paket (50%)	2,639,580	1 paket (50%)	1,162,000	-	-	1 paket	100	3,801,580					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	83,081,459	(1,9%)	1,450,000	2 paket (47,21 %)	35,200,747	1 paket (5,9%)	4,423,795	2 paket (44,99 %)	33,482,555	5 paket	100	74,557,097					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				41.98	2 Paket	57,914,000	(9,92 %)	5,430,000	1 Paket (23,89 %)	13,063,050	(24,21%)	13,239,095	1 Paket (41,98 %)	22,954,863	2 Paket	100	54,687,008					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Lap	248,624,000	3 Lap	24,807,916	3 Lap	68,568,985	3 Lap	26,983,167	3 Lap	105,042,669	9 Lap	100	225,402,737					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100	89,915,800	95 %	29,600,000	-	-	50%	18,870,000	-	-	50%	9,400,000	100	105	28,270,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 unit	9,600,000	-	-	-	-	-	-	2 unit	9,400,000	2 unit	100	9,400,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	20,000,000	-	-	1 Unit	18,870,000	-	-	-	-	1 Unit	100	18,870,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	161,172,041	100 %	139,475,000	25	20,701,963	25	35,236,518	25	20,023,681	25	52,299,145	100	100	128,261,307					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Lap	13,875,000	3 Lap	3,281,963	3 Lap	3,156,518	3 Lap	2,118,681	3 Lap	4,194,145	12 Lap	100	12,751,307					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Lap	125,600,000	3 Lap	17,420,000	3 Lap	32,080,000	3 Lap	17,905,000	3 Lap	48,105,000	12 Lap	100	115,510,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100	84,223,215	97%	55,984,800	25	3,041,525	25	14,401,770	25	12,683,600	22	12,990,550	97	100	43,117,445					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					2 Unit	40,615,000	2 unit	3,041,525	2 unit	9,706,270	2 unit	5,506,350	2 unit	12,990,550	2 unit	100	31,244,695					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	12,470,000	-	-	4 unit	4,695,500	15 unit	6,460,250	-	-	19 u19n4	100	11,155,750					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	2,899,800	-	-	-	-	1 unit	717,000	-	-	1 unit	100	717,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	53.96	11,316,910,000	51.8	1,843,011,047	58	962,835,600	-	73,405,100	-	142,535,050	-	154,479,018	-	298,652,719	78.81	135.88	641,538,437	65.305	4,015,678,772	121.02	35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kegiatan pengadaan pemberhentian dan Informasi kepegawaian yang terlaksana sesuai dengan ketentuan			90	527,998,187	95 %	145,554,000	-	30	18,195,900	35	16,670,205	35	83,322,057	100	100	118,188,162					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					12 Dok	120,577,000	-	4 dok	13,032,400	3 dok	16,440,205	5 dok	77,152,057	12 dok	100	106,624,662					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					300 Dok	11,800,000	-	304 Dok	5,163,500	304 Dok	230,000	304 Dok	3,190,000	304 dok	101	8,583,500					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Lap	13,177,000	-	-	-	-	-	12 Lap	2,980,000	12 Lap	100	2,980,000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana sesuai dengan ketentuan			96.34	908,257,248	95 %	289,553,600	38	73,405,100	25	47,808,950	25	26,364,213	25	25,720,650	107.5	113	173,298,913					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					100 Dok	50,167,800	-	-	-	-	119 Dokumen	14,466,713	119 Dokumen	1,500,000	119	119	15,966,713					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1000 Dok	91,643,000	52	3,710,000	479	23,290,850	173	8,859,200	497	6,216,250	1201	120	42,076,300					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					3 Dok	147,742,800	3 Dok	69,695,100	3 Dok	24,518,100	3 Dok	3,038,300	3 Dok	18,004,400	3 Dok	100	115,255,900					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi			99	1,937,884,900	45 persen	527,728,000	-	-	25	70,002,200	45	104,980,000	60	189,346,012	130	130	350,051,362					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					111 orang	482,025,000	-	-	1 orang	28,615,000	49 orang	103,545,000	61	173,966,077	111	100	306,126,077					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					2 Dok	45.703.000	-		1 Dok (100%)	37.522.200	1 Dok (50%)	510.000	1 Dok (50%)	5.893.085	2 dok	100	43.925.285					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina					150 orang	30.710.700	-	-	150	3.865.000	200 orang	925.000	85 orang	9.486.850	285	190	14.276.850					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Penyelesaian Kasus - Kasus					75%	30.957.800	-	-	25	6.528.000	50	6.464.600	45	264.000	120	120	13.256.600					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					4 Laporan	18.694.800	-		4 Laporan	875.000	-	-	4 Laporan	264.000	4 Laporan	100	1.139.000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					50 Orang	12.263.000	-	-	50 orang	5.653.000	70 orang	6.464.600	-	-	70 orang	140	Rp 12.117.600					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	31.436.060,000	100	8.222.501,007	90	4.874.365,609	25	850.330,952	25	1.121.089,959	25	1.200.121,999	25	1.196.662,319	100,00	100,00	4.409.805,229	100	12.632.306,236	100	40,18	Bappeda
Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda			100	6.074.409,765	90	3.256.299,407	25	701.432,439	25	882.965,859	25	645.063,135	25	733.926,303	100,00	100	3.004.987,736					Bappeda
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				5.817.635,785	30	3.203.309,407	30	691.032,439	30	882.965,859	30	645.063,135	30	733.926,303	30	100	2.952.987,736					Bappeda
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium pengelola keuangan				213.874,000													-					Bappeda
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				42.900,000	14	52.990,000	3	10.400,000	4	15.600,000	3	15.600,000	4	10.400,000	14	100	52.000,000					Bappeda
Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda			100	910.620,995	90	869.838,502	25	59.900,021	25	96.815,298	25	258.564,042	25	308.118,810	100	100	723.398,171					Bappeda
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				21.976.680	1	12.226,460	1	1.170.000	1	740,000	1	4.275,000	1	3.262,000	1	100	9.447,000					Bappeda
Sub Kegiatn bahan logistik kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor			100	84.007,925													-					Bappeda
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				82.919,485	1	92.019,042	1	3.602,825	1	5.567,070	1	47.917,020	1	32.875,600	1	100	89.962,515					Bappeda
Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan				48.950,521	2	27.728,000	2	1.972,248	2	4.446,953	2	7.880,637	2	11.389,330	2	100	25.689,168					Bappeda
Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				672.766,384	12	737.865,000	3	53.154,948	3	86.061,275	3	198.491,385	3	260.591,880	12	100	598.299,488					Bappeda
Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda			100	376.782,500	90	199.908,100	#REF!	-	33.33	3.330,000	33.34	180.513,000	33.33	7.770,000	#REF!	100	191.613,000					Bappeda
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan				112.720,000	2	10.075,000	-		2	3.330,000	2	75,000			2	100	3.405,000					Bappeda
Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan				248.522,500	14	181.833,100	-	-	-		14	180.438,000			14	100	180.438,000					Bappeda
Sub Kegiatn Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15.540,000	1	8.000,000							1	7.770,000	1	100	7.770,000					Bappeda
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda			100	757.715,612	85	418.719,600	25	72.390,592	25	112.557,212	25	89.916,572	25	113.566,806	100	100	388.431,182					Bappeda
Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan				261.326,612	38	52.965,600	9	7.039,592	9	8.236,212	9	9.715,572	9	8.100,806	38	100	33.092,182					Bappeda
Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				496.389,000	12	365.754,000	3	65.351,000	3	104.321,000	3	80.201,000	3	105.466,000	12	100	355.339,000					Bappeda
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda			100	102.972,135	85	129.600,000	13.5	16.607,900	20.50	25.421,590	30.0	26.065,250	36.0	33.280,400	100,00	100	101.375,140					Bappeda
Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				76.950,635	9	103.480,000	2	16.407,900	2	24.271,590	2	16.832,250	3	24.010,400	9	100	81.522,140					Bappeda
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara				20.056,000	21	26.120,000	1	200,000	2	1.150,000	9	9.233,000	9	9.270,000	21	100	19.853,000					Bappeda
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				5.965,500													-					Bappeda
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	6.130.000,000	100	330.214,986	100	381.842,500	25	103.437,150	50	78.656,150	25	1.200,000	-	-	100	100	213.688,641	100	543.583,627	100	8.87	Bappeda
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah			100	317.697,500	100	317.697,500	25	102.692,550	50	78.656,150	25	1.200,000		-	100	100	182.548,700					Bappeda
Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang di tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				317.697,500	7	317.697,500	7	102.692,550	7	78.656,150	7	1.200,000		-	7	100	182.548,700					Bappeda

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, Indeks makro daerah)			100	5,458,500	-																	Bappeda
Sub Kegiatan Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah				5,458,500													-					Bappeda
Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah			100	7,058,986	100	64,145,000	25	744,600	25	6,473,150	25	16,452,491	25	7,149,700	100	100	30,819,941					Bappeda
Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah				7,058,986	8	64,145,000	8	744,600	8	6,473,150	8	16,452,491	8	7,149,700	8	100	30,819,941					Bappeda
Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja	100	3,300,000,000	100	511,343,527	100	322,021,000	25	34,734,150	25	59,121,637	25	88,399,224	25	92,082,426	110	110	274,337,437	105	785,680,964	105	24	Bappeda
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah			100	247,593,665	100	194,742,000	25	11,318,000	25	36,599,987	25	45,310,550	25	59,015,000	12	120	152,243,537					Bappeda
Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			100	247,593,665	10	194,742,000	10	11,318,000	10	36,599,987	10	45,310,550	10	59,015,000	12	120	152,243,537					Bappeda
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah			100	263,749,862	100	127,279,000	25	23,416,150	25	22,521,650	25	43,088,674	25	33,067,426	100	100	122,093,900					Bappeda
Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				263,749,862	4	127,279,000	4	23,416,150	4	22,521,650	4	43,088,674	4	33,067,426	4 dokumen	100	122,093,900					Bappeda
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100	3,055,000,000	83.33	503,698,770	100	360,725,300	20	12,722,000	20	63,759,105	31.67	18,930,600	20	201,440,100	91.67	91.67	1,256,875,552	87	1,760,574,322	87	57.63	Bappeda
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			100	503,698,770	3	358,615,600	3	12,722,000	3	63,759,105	3	18,930,600	3	201,440,100	100	100	1,197,105,102					Bappeda
Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum				503,698,770	3	358,615,600	3	12,722,000	3	63,759,105	3	18,930,600	3	201,440,100	3	100	296,851,805					Bappeda
Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yng di terbitkan					7	1,208,555,900			7	98,313,592	7	340,029,511	7	461,910,194	7	21	900,253,297					Bappeda
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terfasilitasinya pengembangan inovasi OPD			66.67	14,065,400	100	2,109,700	11.1	247,500	11.1	4,855,700	50	9,983,100	11.1	44,684,150	83.33	83.33	59,770,450					Bappeda
Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang tehnologi dan inovasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif					3	101,538,800			1	2,997,500	1	9,983,100	1	44,684,150	2	66.67	57,664,750					Bappeda
Sub Kegiatan Disminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif				14,065,400	3	2,109,700	3	247,500	3	1,858,200					3	100	2,105,700					Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor ASN	93	43,962,090,000	92.44	51,700,417,910	100	9,290,706,226	25	2,579,388,704	25	1,501,748,435	25	2,086,030,804	25	2,078,338,255	100.00	108.18	8,277,206,198	100	52,239,296,198	108	1.19	Inspektorat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengkloasian keuangan perangkat daerah			100	6,347,878,099	100	7,621,276,464	25	2,267,035,151	25	1,237,515,168	25	1,719,698,823	25	1,775,380,671	100	100.00	6,999,629,813					Inspektorat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN					57	7,558,266,464	57	2,250,580,151	57	1,226,545,168	57	1,701,815,823	57	1,758,179,771	57	100.00	6,937,120,913					Inspektorat
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan / triwulan / semesteran SKPD					36	63,010,000	6	16,455,000	6	10,970,000	6	17,883,000	6	17,200,900		36	62,508,900					Inspektorat
Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	presentase APJP yang mengikuti diklat sesuai standar (120 jam tahun)			86.825	309,123,917	100	396,595,600	25	90,787,100	25	125,190,439	25	72,126,000	25	48,035,365	100	100.00	336,138,904					Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					60	396,595,600	10	90,787,100	20	125,190,439	20	72,126,000	10	48,035,365	60	100.00	336,138,904					Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN			100	329,074,474	100	432,687,578	25	62,875,944	25	39,574,671	25	94,483,991	100	95,547,892	100	100.00	292,482,498					Inspektorat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah kebutuhan biaya alat listrik dan elektronik					1	14,446,080	1	1,610,000	1	1,610,000	1	3,751,000	1	514,000	1	100.00	7,485,000					Inspektorat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan					8	116,758,598	2	837,500	2	1,700,500	2	41,077,935	2	51,257,625	8	100.00	94,873,560					Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang dibayarkan makan minum lembur															0		-					Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan					1	35,352,900	1	1,100,000	1	5,639,500	1	11,397,015	1	10,072,200	1	100.00	28,208,715					Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			48	266,130,000	9	59,328,444	9	59,328,444	9	30,624,671	5	38,258,041	13	33,704,067	48	100.00	161,915,223					Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	144,353,350	100	167,553,580	-	-	-	-	50	67,875,000	50	-	100	100.00	99,575,000					Inspektorat

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan					4	94.813,500	-	-	-	-	1	31,700,000.00	-	-	1	25.00	31,700,000					Inspektorat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					8	72,740,080	-	-	-	-	8	67,875,000.00	-	-	8	100.00	67,875,000					Inspektorat
Pengadaan Mebel	Jumlah kursi eselon II/fungsional							-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-					Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	508,812,851	100	511,813,004	25	146,005,089	25	83,225,077	25	121,588,692	25	140,576,381	100	100.00	491,395,239					Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	234,795,804	3	75,677,089	3	35,363,077	3	56,180,692	3	54,552,381	12	100.00	221,773,239					Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	277,017,200	3	70,328,000	3	47,862,000	3	65,408,000	3	86,024,000	12	100.00	269,622,000					Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			98	99,085,219	100	160,780,000	25	12,685,420	25	16,243,080	25	10,258,298	25	18,797,946	100	100.00	57,984,744					Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					12	58,000,000	3	2,563,620	3	6,741,380	3	5,419,098	3	13,751,946	12	100.00	28,476,044					Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					4	37,780,000	1	830,000	1	209,900	2	1,315,000	4	4,685,000	8	100	7,039,900					Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi					2	65,000,000	2	9,291,800	2	9,291,800	2	3,524,200	2	361,000	2	100.00	22,468,800					Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti / total temuan)	90	10,786,000,000	92.42	11,827,613,487	84	1,215,192,701	27	266,267,950	27	98,930,400	27	249,896,000	27.39	408,492,879	108.39	114.07	995,028,429	100.41	11,781,028,429	55.78	1.00	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP			101.5	916,108,487	86	1,054,477,701	37	258,952,950	37	95,615,400	37	180,317,300	37	328,284,179	116.79	116.79	863,169,829					Inspektorat
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					135	263,209,000	86	70,120,000	4	17,505,000	24	65,390,000	24	76,049,229	138	102.22	229,064,229					Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					72	300,715,000	34	126,263,200	18	51,745,000	6	31,019,000	6	78,781,000	74	102.78	287,808,200					Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					89	30,066,000	89	12,165,000	-	-	-	-	-	-	89	100.00	12,165,000					Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					9	33,505,000	6	17,985,000	-	-	-	-	3	7,856,000	9	100.00	25,841,000					Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			48	236,556,000	6	390,000	6	16,589,000	6	77,014,300	36	105,585,000	42	87,50		87.50	199,578,300					Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					1	86,661,701	-	-	1	5,222,400	1	2,970,000	1	24,864,000	1	100.00	33,056,400					Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP					4	103,765,000	2	32,029,750	1	4,554,000	3	3,924,000	3	35,148,950	9	225.00	75,656,700					Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diselesaikan			98.5	125,505,000	100	160,715,000	25	7,315,000	25	3,315,000	25	69,578,700	25	80,208,700	100	111.36	131,858,600					Inspektorat
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					6	16,635,000	-	-	-	-	0	-	4	4,590,000	10	100.00	4,590,000					Inspektorat
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					22	144,080,000	8	7,315,000	9	3,315,000	5	69,578,700	4	47,059,900	27	122.73	127,268,600					Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	93	3,038,000,000	91.125	3,121,688,920	89	275,928,500	25	30,385,200	25	12,823,400	25	24,104,100	25	17,412,900	98	98.00	123,335,934	95	3,161,335,934	102	1.04	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebutuhan Kebijakan Teknis yang Terpenuhi			95.79166667	1,665,000	100	94,235,000	25	30,075,200	25	7,765,000	25	8,610,000	25	4,640,000	96	96.00	51,090,200					Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun			25	94,235,000	12	30,075,200	8	7,765,000	2	8,610,000	2	4,640,000			24	96.00	51,090,200					Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi	Cakupan OPD/Unit Kerja/ASN yang diberikan pendampingan dan asistensi			100	82,023,920	100	181,693,500	25	310,000	25	5,058,400	25	15,494,100	25	12,772,900	25	100.00	72,245,734					Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, urusan pemerintah daerah					44	51,666,100	-	-	44	5,058,400	44	14,404,100	44	6,317,900	44	100.00	25,780,400					Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi					23	32,796,400	21	310,000	-	-	21	1,090,000	21	6,455,000	21	100.00	7,855,000					Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			8	49,706,000			-	-	3	14,110,449	2	4,626,630	3		8	100.00	18,737,079					Inspektorat
Pendampingan Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			2	47,525,000	-		3	206,250	-		2	19,667,005	2	100.00		100.00	19,873,255					Inspektorat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	19,297,840,000.00	100	7,377,795,119.00	97%	2,771,223,831.00	20%	700,622,914.00	25%	723,307,053.00	25%	457,335,903.00	25%	660,155,533.00	100	100	2,541,421,403.00	100	9,919,216,522.00	100	51.40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan golongan keuangan perangkat daerah	-	-	100	6,036,141,421.00	100 persen	2,178,191,099.00	25%	608,517,227.00	25%	589,470,502.00	25%	353,597,267.00	25%	526,714,920.00	100	100	2,078,299,916.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-			20 Orang	2,115,591,099.00	20 orang	595,997,227.00	20 orang	564,430,502.00	19 orang	353,597,267.00	19 orang	501,674,920.00	20 orang	100	2,015,699,916.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-			12 Laporan	62,600,000.00	3 laporan	12,520,000.00	3 Laporan	25,040,000.00	3 laporan	-	3 laporan	25,040,000.00	12 orang	100	62,600,000.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	846,298,073.00	100 persen	319,860,656.00	25%	56,296,985.00	25%	69,280,811.00	25%	48,054,019.00	25%	67,173,646.00	100	100	240,805,461.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7,998,480.00	-	-	1 paket (50%)	5,007,954.00	0	-	1 paket (50%)	2,911,497.00	1 paket	100	7,919,451.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25,362,976.00	-	-	1 paket	15,932,057.00	-	-	1 paket	8,707,294.00	2 paket	200	24,639,351.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	18,383,200.00	1 Paket (25%)	2,500,000.00	1 Paket (25%)	1,975,500.00	1 Paket (25%)	5,827,500.00	1 Paket (25%)	6,170,550.00	1 paket	100	16,473,550.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 Laporan	268,116,000.00	3 laporan	53,796,985.00	3 laporan	46,365,300.00	3 laporan	42,226,519.00	3 laporan	49,384,305.00	12 laporan	100	191,773,109.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerahsesuai perencanaan			100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	100	-					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	253,128,442.00	100 Person	217,602,076.00	25%	35,808,702.00	25%	64,555,740.00	25%	51,766,317.00	25	62,321,267.00	100 person	100	214,452,026.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	35,288,076.00	9 laporan	9,214,702.00	9 laporan	8,321,740.00	9 laporan	9,608,317.00	9 laporan	6,853,267.00	36 laporan	100	33,998,026.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	182,314,000.00	3 Laporan	26,594,000.00	3 Laporan	56,234,000.00	3 Laporan	42,158,000.00	3 Laporan	55,468,000.00	12 laporan	100	180,454,000.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik			100	96,425,253.00	100 persen	55,570,000.00	25%	-	25%	-	25%	3,918,300.00	25%	3,945,700.00	100	100	7,864,000.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 unit	42,000,000.00	3 unit	3,309,350.00	3 unit	3,964,400.00	3 unit	13,198,280.00	3 unit	7,814,800.00	3 unit	100	28,286,830.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					18 unit	13,570,000.00	0	-	0	-	6 unit	3,918,300.00	6 unit	3,945,700.00	12 unit	100	7,864,000.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	50	371,000,000.00			30 persen	1,434,163,200.00	25	6,001,000.00	25	42,655,700.00	25	670,628,900.00	25	381,742,210.00	100	100	1,101,027,810.00	100	1,101,027,810.00	200	296.77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi terkait pendidikan wawasan kebangsaan					1 kali	1,434,163,200.00	1 kali	6,001,000.00	1 kali	42,655,700.00	1 kali	670,628,900.00	1 kali	381,742,210.00	1 kali	100	1,101,027,810.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					250 orang	1,434,163,200.00	250 orang	6,001,000.00	250 orang	42,655,700.00	250 orang	670,628,900.00	250 orang	381,742,210.00	250	100	1,101,027,810.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	13,571,000,000.00	100	5,206,739,347.00	100 Person	50,368,956,363.00	25%	*****	25%	*****	25%	*****	25%	376,860,304.00	100	100	50,328,407,063.00	100	55,535,146,410.00	100	409.22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah parpol ya diberi bantuan, verifikasi dan bantuan evaluasi 2. Jumlah Kebijakan teknis yang dirumuskan 3. persentase peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik di masyarakat			100	2,336,574,918.00	10 parpol, 12 dokumen, 100 persen	50,368,956,363.00	25	*****	25	*****	25	*****	25	376,860,304.00	10, 100	100	50,328,407,063.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kordinasi di bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1,444,028,619.00	50 orang	50,368,956,363.00	11 orang	*****	11 orang	*****	22 orang	*****	11 orang	376,860,304.00	110	100	40,549,300.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah pembinaan & pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	5 kebijakan	1,173,000,000.00	100	138,459,500.00	5 kebijakan	78,985,025.00	0%	572,000.00	0%	5,747,650.00	0%	5,474,367.00	0	10,980,000.00	0	0	22,774,017.00	5	161,233,517.00	5 kebijakan	13.76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disusun			100	138,459,500.00	5 kebijakan	78,985,025.00	0	572,000.00	0	5,747,650.00	0	5,474,367.00	0	10,980,000.00	0	0	22,774,017.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				43,148,400.00	325 Orang	78,985,025.00	0	572,000.00	0	5,747,650.00	0	5,474,367.00	0	10,980,000.00	0	0	22,774,017.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINOKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase cakupan pencegahan /tangkal dini konflik	80 Persen	2,952,000,000	60	1,857,284,962.00	75 persen	1,164,558,000.00	25	47,887,500.00	25	123,109,000.00	25	117,768,750.00	25	375,150,174.00	25	100	663,915,424.00	80	2,521,200,386.00	100	85.41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis penanganan konflik sosial/laporan yang disusun wawasan kebangsaan , jumlah rapat koordinasi pantau ATHG, pengawasa, orang asing & tenaga kerja asing & rapat koordinasi penanganan konflik sosial			100	1,857,284,962.00	12 kali	1,164,558,000.00	3 kali	47,887,500.00	3 kali	123,109,000.00	3 kali	117,768,750.00	3 kali	375,150,174.00	12 kali	100	663,915,424.00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				386.378.500,00	216 orang	475.186.000,00	-	1.087.500,00	30 orang FKDM	101.509.000,00	27 orang FKDM	54.978.000,00	292 Pamtu p + 29 Orang FKDM	171.722.100,00	149.0740741	100	329.296.600,00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				538.319.912,00	12 Dokumen	689.372.000,00	3 dokumen	46.800.000,00	3 dokumen	21.600.000,00	3 dokumen	62.790.750,00	3 dokumen	203.428.074,00	12 dokumen	100	334.618.824,00					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	1.613.006,000	93	5.425.717,076	97	1.780.822,702	94,00	366.030,333	74,00	484.176,865	74,00	334.215,306	74,00	361.844,198	94	96,9	1.659.489,702	95	7.085.206,778	94.953608	4,39	Kecamatan Baso
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			98	3.969.166,175	100	1.286.432,050	100	264.690,495	100	355.436,851	100	268.864,057	100	283.898,520	100	100,0	1.188.259,923					Kecamatan Baso
Penyediaan dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12	1.255.692,050	11	255.468,495	12	349.288,851	11	268.864,057	11	283.898,520	11	91,7	1.157.519,923					Kecamatan Baso
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					12	30.740,000	3	9.222,000	3	6.148,000	3	6.148,000	3	9.222,000	12	100,0	30.740,000					Kecamatan Baso
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			99	901.769,898	100	241.141,394	100	33.142,150	100	66.717,000	100	55.364,550	100	68.727,450	100,00	100,0	223.951,150					Kecamatan Baso
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					2	1.853,280	2	1.850,000	0	-	0	-			2	100	1.850,000					Kecamatan Baso
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					3	17.554,114	1	500,000	1	10.078,000	2	2.350,000	2	4.163,000	3	100	17.091,000					Kecamatan Baso
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengabdian	Jumlah paket barang cetakan dan pengabdian yang disediakan					2	15.545,000	1	-	2	8.450,000	1	2.170,000	2	3.752,500	2	100	14.372,500					Kecamatan Baso
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	206.189,000	3	30.792,150	3	48.189,000	3	50.844,550	3	60.811,950	12	100	190.637,650					Kecamatan Baso
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	79	159.061,231	97	20.000,000	100,00	19.980,000	0	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,0	19.980,000					Kecamatan Baso
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	-					Kecamatan Baso
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					50	0	-	-	-	-	-	-			0	0	-					Kecamatan Baso
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						-	-	-	-	-	-	-			0	0	-					Kecamatan Baso
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1	20.000,000	1	19.980,000	-	-	0	-	-	-			1	100,0	19.980,000					Kecamatan Baso
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan					0	0	-	-	-	-	-	-			0	0,0	-					Kecamatan Baso
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	99	280.903,847	100	211.289,258	100	45.497,688	100	54.383,214	100	5.797,899	100	5.797,899	100	5.703,628	100	100,0	209.235,429					Kecamatan Baso
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	26.881,258	3	7.940,688	3	5.945,214	3	5.797,899	3	5.703,628	12	100,0	25.387,429					Kecamatan Baso
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12	184.408,000	3	37.557,000	3	48.438,000	3	41.967,000	3	55.886,000	12	100,0	183.848,000					Kecamatan Baso
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	90	112.920,925	100	21.960,000	70	2.720,000	70	7.639,800	70	4.188,800	70	4.188,800	70	3.514,600	70	70,0	18.063,200					Kecamatan Baso
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					3	20.500,000	1	2.720,000	1	6.374,800	2	4.188,800	2	3.514,600	3	100,0	16.798,200					Kecamatan Baso
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					2	1.460,000	-	-	2	1.265,000	0	-	0	-	2	100,0	1.265,000					Kecamatan Baso
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	0	-	-	-	-	-	-			0	0,0	-					Kecamatan Baso
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	27.500,000	94	148.768,800	89	108.969,000	89,6	13.957,500	89,6	9.626,700	89,6	79.833,200	89,6	-	89,6	100,89	103.417,400	97,2	252.186,200	109,16	9,17	Kecamatan Baso
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan			100	144.808,800	48	108.969,000	8	13.957,500	16	9.626,700	16	79.833,200	8	-	48	100,0	103.417,400					Kecamatan Baso
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12	108.969,000	3	13.957,500	3	9.626,700	3	79.833,200	3	-	12	100,0	103.417,400					Kecamatan Baso
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan keter tiban umum yang difasilitasi.	100	54.100,000	100	82.637,500	100	3.300,000	####	-	100	-	100	-	100	1.089,000	100	100,0	1.089,000	100	83.726,500	100,00	1,55	Kecamatan Baso
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keter tiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tran tibun yang dikordinasikan			100	82.637,500	48	3.300,000	8	-	8	-	16	-	16	1.089,000	48	100,0	1.089,000					Kecamatan Baso
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1	3.300,000	-	-	0	-	0	-	1	1.089,000	1	100,0	1.089,000					Kecamatan Baso
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	39.400,000	100	50.432,350	100	1.250,000	100	-	100	-	100	-	100	1.237,500	100	100,0	1.237,500	100	51.669,850	100	1,31	Kecamatan Baso
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	50.432,350	24	1.250,000	8	-	8	-	8	-	8	1.237,500	24	100,0	1.237,500					Kecamatan Baso
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1	1.250,000	1		1		1		1	1.237,500	1	100,0	1.237,500					Kecamatan Baso

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	52,500,000.00	100	76,896,200	100	7,885,000	100	6,323,750	100	-	100	-	100	1,496,000	100	100.0	7,819,750	100	84,715,950	100	1.61	Kecamatan Baso
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	76,896,200	24	7,885,000	8	6,323,750	8	-	8	-	8	1,496,000	24	100	7,819,750					Kecamatan Baso
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8	1,500,000	8	-	8	-	8	-	8	1,496,000	8	100	1,496,000					Kecamatan Baso
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1	6,385,000	1	6,323,750	-	-					1	100	6,323,750					Kecamatan Baso
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16,634,820,000	100	6,383,212,718	97	2,131,765,680	100	448,765,834	100	608,542,419	100	445,039,562	85	505,256,156	95	97.94	2,007,603,971	98	8,390,816,689	97.5	50.44	Kec. Ampek Angkek
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Perangkat Daerah			100	4,941,152,745	100	1,698,449,310	100	375,132,061	100	489,047,792	100	383,202,947	75	403,722,629	85	85	1,651,105,429					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					18	1,667,709,310	18	365,910,061	18	479,825,792	19	380,128,947	18	394,500,629	18	100	1,620,365,429					Kec. Ampek Angkek
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					10	30,740,000	3	9,222,000	3	9,222,000	1	3,074,000	3	9,222,000	10	100	30,740,000					Kec. Ampek Angkek
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	895,740,676	100	244,835,050	100	41,024,350	100	68,168,144	100	22,687,100	100	44,479,976	100	100	177,359,578					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					1	2,677,290	0	0	1	1,091,668	0	0	1	640,976	1	100	1,732,644					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					2	16,540,221	2	3,756,650	2	4,302,700	0	0	2	3,184,350	2	100	11,243,700					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					3	18,390,000	3	3,190,200	3	2,792,700	3	802,000	3	3,489,100	3	100	10,274,000					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2	3,000,000	2	750,000	2	750,000	2	500,000	2	1,000,000	2	100	3,000,000					Kec. Ampek Angkek
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	204,227,539	3	33,327,500	3	60,231,076	3	21,385,100	3	36,165,550	12	100	151,109,226					Kec. Ampek Angkek
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100	39,623,057	100		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					Kec. Ampek Angkek
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	333,172,315	100	157,521,320	100	27,932,423	100	39,668,243	100	39,668,243	100	37,544,465	100	47,997,751	100	100	153,142,882					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	22,631,320	3	6,162,423	3	5,018,243	3	4,854,465	3	3,547,751	3	100	19,582,882					Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					7	134,890,000	7	21,770,000	7	34,650,000	7	32,690,000	7	44,450,000	7	100	133,560,000					Kec. Ampek Angkek
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100	173,523,925	100	30,960,000		4,677,000		10,658,240		1,605,050		9,055,800	95	95	25,996,090							Kec. Ampek Angkek
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / dan dibayarkan pajak dan perizinannya					4	23,530,000	1	4,272,000	2	10,132,200	1	1,605,050	1	6,830,800	4	100	22,840,050					Kec. Ampek Angkek
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					8	4,700,000	2	265,000	2	526,040	0	0	1	2,225,000	3	37.5	3,036,040					Kec. Ampek Angkek
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	2,730,000	1	120,000	0	0		0		0	1	100	120,000					Kec. Ampek Angkek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	350,000,000	86.6	205,483,150	87	94,327,500	87	9,574,800	87	12,701,100	87	48,839,820	87	4,918,800	89.6	102.99	76,034,520	88.1	281,517,670	99	80.43	Kec. Ampek Angkek
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			100	203,706,150	7	94,327,500	7	9,574,800	7	12,701,100	7	48,839,820	7	4,918,800	7	100	76,034,520					Kec. Ampek Angkek
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi/Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3	94,327,500	3	9,574,800	3	12,701,100	3	48,839,820	3	4,918,800	3	100	76,034,520					Kec. Ampek Angkek
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	628,000,000	100	51,850,800	100	11,700,000	100	4,705,100	100	4,136,000	100	643,500	100	450,000	100	100	9,934,600	100	61,785,400	100	9.84	Kec. Ampek Angkek
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan				51,850,800	3	11,700,000	3	4,705,100	3	4,136,000	3	643,500	3	450,000	3	100	9,934,600					Kec. Ampek Angkek
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					3	11,700,000	3	4,705,100	3	4,136,000	3	643,500	3	450,000	3	100	9,934,600					Kec. Ampek Angkek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	300,000,000	100	43,452,000	100	600,000	3	0	3	0	3	0	3	0	100	100	100	100	43,452,100	100	14.48	Kec. Ampek Angkek
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan				43,452,000	12	600,000	3	0	3	0	3	0	3	0	100	100	100					Kec. Ampek Angkek
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					12	600,000	3	0	3	0	3	0	3	0	100	100	100					Kec. Ampek Angkek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	438,000,000	100	86,040,500	100	9,310,000	100	6,138,000	100	450,000	100	0	100	560,000	100	100	7,148,000	100	93,188,500	100	21.28	Kec. Ampek Angkek

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi				86,040,500	7	9,310,000	7	6,138,000	7	450,000	7	0	7	560,000	7	100	7,148,000					Kec. Ampek Angkek
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					14	4,865,000	14	1,705,000	14	450,000	14	0	14	560,000	14	100	2,715,000					Kec. Ampek Angkek
Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1	4,445,000	1	4,433,000	0	0	0	0	0	0	1	100	4,433,000					Kec. Ampek Angkek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	15,231,660,000	100	5,464,786,770	95 persen	1,795,289,770	22	332,270,633	30	495,111,597	20	366,922,252	10	425,264,569	80	84	1,619,569,051	100 persen	7,084,355,821	100	47	Kec Canduang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100	4,423,982,353	100 persen	1,423,394,839	100	276,264,110	100	376,406,326	100	309,737,436	75	338,959,870	93.75	93.75	1,301,367,742					Kec Canduang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					13 Orang	1,392,904,839	11 Orang	276,264,110	12 Orang	367,289,326	13 Orang	303,659,436	12 Orang	323,764,870	12 Orang	92	1,270,977,742					Kec Canduang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	30,490,000	3 Laporan	0	3	9,117,000	3 Laporan	6,078,000	3 Laporan	15,195,000	12 Laporan	100 persen	30,390,000					Kec Canduang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja Kecamatan			100	592,283,024	100 persen	155,538,431	100	18,544,500	100	47,001,049	100	12,483,000	100	43,799,336	100	100 persen	121,827,885					Kec Canduang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3,187,600	1 Paket	175,000	1 paket	245,000	1 Paket	893,500	1 Paket	400,000	1 Paket	100persen	1,713,500					Kec Canduang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	17,802,631	1 Paket	600,000	2 paket	9,427,949	2 Paket	1,415,000	2 Paket	2,891,836	3 Paket	100 persen	14,334,785					Kec Canduang
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					3 Paket	13,159,000	1 Paket	1,000,000	2 paket	2,990,000	2 Paket	1,490,000	1 Paket	1,580,000	3 Paket	100 persen	7,060,000					Kec Canduang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	121,389,200	3 Laporan	16,769,500	3 laporan	34,338,100	3 Laporan	8,684,500	3 Laporan	38,927,500	12 Laporan	100 persen	98,719,600					Kec Canduang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan			100	140,948,900	100 persen	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 unit	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	232,468,309	100 persen	177,026,500	100	36,032,023	100	58,501,972	25 persen	37,125,716	15 persen	41,422,713	100 persen	100 persen	173,082,424					Kec Canduang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	15,597,500	3 Laporan	2,564,343	3 laporan	4,014,252	3 laporan	4,180,596	3 Laporan	2,387,593	12 Laporan	100 persen	13,146,824					Kec Canduang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	161,429,000	6 laporan	33,467,680	6 laporan	54,487,680	6 laporan	32,945,120	6 laporan	39,035,120	6 Laporan	100 persen	159,935,600					Kec Canduang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			100	72,059,175	100 persen	29,330,000	25 Persen	1,430,000	25	13,202,250	25	7,576,100	15	1,082,650	100	100	23,291,000					Kec Canduang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan dan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 unit	25,800,000	1 unit	1,430,000	4 unit	13,202,250	1 unit	6,005,000	2 Unit	1,082,650	6 unit	100 persen	21,719,900					Kec Canduang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 unit	3,530,000	0	0	0	0	3 unit	1,571,100	0	0	3 unit	100	1,571,100					Kec Canduang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kec Canduang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	100	322,000,000	83.67	100,436,400	87	109,819,250		12,558,000		18,628,900		60,196,500		11,540,200	88.03	100 persen	102,923,600	97	203,360,000	100	63	Kec Canduang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan			100	80,466,400	6 dokumen	109,819,250	2 Dokumen	12,558,000	3 Dokumen	18,628,900	3 Dokumen	60,196,500	2 Dokumen	11,540,200	6 dokumen	100 persen	102,923,600					Kec Canduang
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					6 Laporan	109,819,250	2 Laporan	12,558,000	3 Laporan	18,628,900	3 Laporan	60,196,500	2 Laporan	11,540,200	6 Laporan	100 persen	102,923,600					Kec Canduang
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	417,000,000	100	174,557,875	100 persen	16,980,000	100	1,590,000	100	3,514,000	100	3,361,500	100	4,094,000	100 persen	100 persen	12,559,500	100 persen	187,117,375	100	45	Kec Canduang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tranitibum yang dikordinasikan			100	174,557,875	8 dokumen	16,980,000	3	1,590,000	3	3,514,000	3	3,361,500	3	4,094,000	3	38	12,559,500					Kec Canduang
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 laporan	16,980,000	3 laporan	1,590,000	3 Laporan	3,514,000	3 Laporan	3,361,500	3 Laporan	4,094,000	3 laporan	100 persen	12,559,500					Kec Canduang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	432,000,000	100	122,425,072	100 persen	19,880,000	100 persen	1,485,000	100 persen	2,565,000	100 persen	7,000,000	100 persen	4,522,250	100	100 persen	15,572,250	100 persen	137,997,322	100	32	Kec Canduang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	122,425,072	24 urusan	19,880,000	6 Urusan	1,485,000	6 Urusan	2,565,000	6 Urusan	7,000,000	6	4,522,250	6 Urusan	100 persen	15,572,250					Kec Canduang

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	19.880,000	3 Dokumen	1.485,000	3 Dokumen	2.565,000	3 Dokumen	7.000,000	3 Dokumen	4.522,250	12 Dokumen	100 persen	15.572,250					Kec Canduang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	364,000,000	100	60,473,800	100 persen	17,163,000	100	5,980,500	100	1,310,000	100	0	100	956,400	100	100 persen	8,246,900	100 persen	68,720,700	100	19	Kec Canduang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	60,473,800	3 dokumen	17,163,000	3 Dokumen	5,980,500	3 Dokumen	1,310,000	3 Dokumen	0		956,400	3 Dokumen	100 persen	8,246,900					Kec Canduang
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Dokumen	11,130,000	6 Dokumen	175,000	6 Dokumen	1,310,000	6 Dokumen	0	6 Dokumen	956,400	6 dokumen	100 persen	2,441,400					Kec Canduang
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	6,033,000	1 Dokumen	5,805,500		0		0		0	1 Dokumen	100 persen	5,805,500					Kec Canduang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	18,403,260,000	105	6,795,832,720	97	2,015,391,879	100	427,707,069	100	541,507,324	100	398,094,005	75	454,415,617	94	97	1,821,724,015	97	8,617,556,735	97	46.83	Kec. Tilikam
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	5,525,508,988	100	1,500,602,084	100	340,820,964	100	412,113,598	100	305,060,714	100	326,008,340	100	100	1,384,003,616					Kec. Tilikam
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14	1,473,612,084	14	335,662,964	13	406,955,598	12	299,902,714	12	315,012,340		86	1,357,533,616					Kec. Tilikam
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					12	26,990,000	3	5,158,000	3	5,158,000	3	5,158,000	3	10,996,000	12	100	26,470,000					Kec. Tilikam
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			100	759,721,203	100	242,666,195	100	36,527,620	100	56,987,490	100	38,872,000	100	50,168,836	100	100	182,555,946					Kec. Tilikam
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					5	2,903,000	5	2,899,320	-	-	-	-	-	-	5	100	2,899,320					Kec. Tilikam
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					3	17,980,733	3	3,490,000	3	2,966,400	3	4,047,000	3	5,268,000	3	100	15,791,400					Kec. Tilikam
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan					6	12,770,000	6	1,960,000	6	4,757,250	6	1,581,000	6	1,754,000	6	100	10,052,250					Kec. Tilikam
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan yang disediakan					2	1,505,000	2	600,000	2	900,000	-	-	-	-	2	100	1,500,000					Kec. Tilikam
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	207,507,462	3	27,578,300	3	48,343,840	3	33,244,000	3	43,146,836	12	100	152,312,976					Kec. Tilikam
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100	117,569,531	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-					Kec. Tilikam
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-					Kec. Tilikam
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	278,338,888	100	236,813,600	100	36,627,960	100	70,747,736	100	51,039,291	100	67,891,291	100	100	226,306,278					Kec. Tilikam
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	23,105,600	3	5,909,960	3	5,245,736	3	5,241,291	3	5,241,291	12	100	21,638,278					Kec. Tilikam
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	213,708,000	3	30,718,000	3	65,502,000	3	45,798,000	3	62,650,000	12	100	204,668,000					Kec. Tilikam
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100	93,145,110	100	35,310,000	85	13,730,525	85	1,658,500	85	3,122,000	85	10,347,150	85	85	85	28,858,175						Kec. Tilikam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknva					6	25,250,000	1	8,303,025	2	1,658,500	1	2,172,000	2	9,387,150	6	100	21,520,675					Kec. Tilikam
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					16	10,060,000	3	5,427,500	-	-	1	950,000	1	960,000	5	31	7,337,500					Kec. Tilikam
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	267,000,000	93.9	132,250,900	87.0	227,514,625		4,556,750		43,049,750		133,716,500	88.56	3,030,000	88.56	102	184,353,000	91.2	316,603,900	102.5	118.56	Kec. Tilikam
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan			100	109,480,900	4	227,514,625	1	4,556,750	3	43,049,750	1	133,716,500	1	3,030,000	4	100	184,353,000					Kec. Tilikam
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					12	227,514,625	3	4,556,750	3	43,049,750	3	133,716,500	3	3,030,000	12	100	184,353,000					Kec. Tilikam
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100.00	60,000,000	100	42,704,200	100	3,600,000	100	1,350,000	100	300,000	100	1,010,000	100	300,000	100	100.00	2,960,000	100	45,664,200	100.00	76.11	Kec. Tilikam
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tatibum yang dikoordinasikan			100	42,704,200	3	3,600,000	1	1,350,000	1	300,000	1	1,010,000	1	300,000	3	100	2,960,000					Kec. Tilikam
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					12	3,600,000	3	1,350,000	3	300,000	3	1,010,000	3	300,000	12	100	2,960,000					Kec. Tilikam
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100.00	290,000,000	100	16,416,500	100	2,750,000	100	330,000	100	-	100	-	100	420,750	100	100	750,750	100	17,167,250	100	5.92	Kec. Tilikam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	16,416,500	3	2,750,000	3	330,000	3	-	3	-	3	420,750	3	100	750,750					Kec. Tilikam
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					12	2,750,000	3	330,000	3	-	3	-	3	420,750	12	100	750,750					Kec. Tilikam
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100.00	294,000,000	100	73,090,100	100	12,360,000	100	7,066,000	100	1,910,000	100	-	100	623,700	100	100	9,599,700	100	82,689,800	100	28.13	Kec. Tilikam

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	73,090,100	5	12,360,000	5	7,066,000	5	1,910,000	4	-	4	623,700	5	100	9,599,700					Kec. Tilam
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					9	5,250,000	9	1,310,000	9	600,000	9	-	9	623,700	9	100	2,533,700					Kec. Tilam
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa					1	7,110,000	1	5,756,000	1	1,310,000	-	-	-	-	1	100	7,066,000					Kec. Tilam
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16,301,060,000	93	1,877,458,038	95 Persen	1,809,874,970	25	385,267,535							89	92.32	1,670,831,835	182	3,548,289,873	182	21.77	Kecamatan Kamang Magek
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah					100 Persen	1,401,814,886	100	316,822,582	100	413,123,602	100	299,216,482	75	337,213,632	85	85.00	1,366,376,298					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	1,371,324,886	13	311,508,582	13	407,809,602	12	293,128,482	12	325,057,632	12	97.53	1,337,504,298					Kecamatan Kamang Magek
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	30,490,000	2	5,314,000	2	5,314,000	3	6,088,000	3	12,156,000	10	94.69	28,872,000					Kecamatan Kamang Magek
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD					100 Persen	200,836,684	80	31,368,000	80	25,022,180	80	33,455,750	80	59,468,510	80	80.00	149,314,440					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	2,886,000	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					3 Paket	24,447,684	3	1,000,000	3	4,704,180	3	592,000	3	14,469,960	3	100.00	20,766,140					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					3 Paket	11,372,600	3	1,459,000	2	1,680,000	0	0	0	0	3	100.00	3,139,000					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen atau bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan					3 Dokumen	3,600,000	3	900,000	3	0	3	1,500,000	3	1,200,000	2	100.00	3,600,000					Kecamatan Kamang Magek
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang disediakan					12 Laporan	158,530,400	3	28,009,000	3	18,638,000	3	31,363,750	3	43,798,550	12	76.84	121,809,300					Kecamatan Kamang Magek
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan					95 Persen	10,000,000	0	0	100	9,990,000	100	-	100	-	100	100.00	9,990,000					Kecamatan Kamang Magek
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10,000,000	-	0	1	9,990,000	0	0	0	0	1	100.00	9,990,000					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah					100 Persen	167,711,400	100	27,233,153	100	34,359,876	100	35,035,774	100	35,748,794	100	95.00	132,377,597					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	26,481,400	3	6,753,153	3	5,199,876	3	7,375,774	3	6,908,794	3	100.00	26,237,597					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					2 Paket	8,000,000	1	3,200,000	1	1,600,000	1	1,600,000	-	0	2	100.00	6,400,000					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	133,230,000	6	17,280,000	6	27,560,000	6	26,060,000	5	28,840,000	5	95.00	99,740,000					Kecamatan Kamang Magek
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik					100 persen	29,512,000	80	9,843,800	80	1,925,000	80	106,000	80	898,700	80	80.00	12,773,500					Kecamatan Kamang Magek
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 Unit	24,750,000	2	9,843,800	1	1,275,000	1	106,000	3	898,700	7	100.00	12,123,500					Kecamatan Kamang Magek
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 Unit	730,000		-	1	650,000		-		-	1.00	14.29	650,000					Kecamatan Kamang Magek
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	4,032,000		-	-	-		-		-	0	0	0					Kecamatan Kamang Magek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan					86 Persen	137,595,000		2,634,000		5,638,500		109,973,000	84.92	12,135,400	84.92	98.74	127,640,900					Kecamatan Kamang Magek
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikordinasikan					3 kegiatan	134,595,000	1	2,634,000	3	4,858,500	1	109,193,000	1	10,955,400	3	100.00	127,640,900					Kecamatan Kamang Magek
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	134,595,000	1	2,634,000	3	4,858,500	1	109,193,000	1	10,955,400	3	100.00	127,640,900					Kecamatan Kamang Magek
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan					5 laporan	3,000,000	5	260,000	5	780,000	5	780,000	5	1,180,000	3	100.00	3,000,000					Kecamatan Kamang Magek
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi					5 laporan	3,000,000	5	260,000	5	780,000	5	780,000	5	1,180,000	5	100.00	3,000,000					Kecamatan Kamang Magek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi					100 Persen	7,750,000	100	1,200,000	100	1,470,000	100	4,586,000	98	350,000	100	100.00	7,606,000					Kecamatan Kamang Magek
Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan					3 kegiatan	7,750,000	3	1,200,000	3	1,470,000	3	4,586,000	3	350,000	3	100.00	7,606,000					Kecamatan Kamang Magek
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	7,750,000	3	1,200,000	3	1,470,000	3	4,586,000	2	350,000	3	100.00	7,606,000					Kecamatan Kamang Magek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yang difasilitasi					100 Persen	3,000,000	100	-	100	-	100	1,730,000	100	1,050,000	100	100.00	2,780,000					Kecamatan Kamang Magek
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diaksanakan	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diaksanakan					1 Urusan	3,000,000	1	-	1	-	1	1,730,000	1	1,050,000	1	100.00	2,780,000					Kecamatan Kamang Magek

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	3,000,000	3	0	3	0	3	1,730,000	3	1,050,000	3	100.00	2,780,000					Kecamatan Kamang Magek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi					100 Persen	6,860,000	100	3,190,000	100	560,000	100	760,000	100	1,420,000	100	100.00	5,930,000					Kecamatan Kamang Magek
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi					61 Kegiatan	6,860,000	16	3,190,000	15	560,000	15	760,000	15	1,420,000	61	100.00	5,930,000					Kecamatan Kamang Magek
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10 Dokumen	2,500,000	10	0	10	0	10	760,000	10	1,120,000	10	100.00	1,880,000					Kecamatan Kamang Magek
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	4,360,000	1	3,190,000	1	560,000	1	0	1	300,000	1	100.00	4,050,000					Kecamatan Kamang Magek
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	14,022,080,000	25.50	3,574,944,492	95 persen	1,696,589,519	22 Persen	288,368,409	23	389,529,896		335,382,829		673,241,508		94	1,589,990,093	72.35	5,164,934,585	36.83		Kecamatan Palupuh
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah					95 persen	1,267,762,960	19	243,885,939	31	389,529,896		263,461,059		290,390,894	85	85	1,187,267,788					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					11 Orang/bulan	1,236,022,960		240,711,939		380,007,896		253,939,059		280,868,894	11	100	1,155,527,788					Kecamatan Palupuh
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD					12 Laporan	31,740,000		3,174,000		9,522,000		9,522,000		9,522,000	12	100	31,740,000					Kecamatan Palupuh
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja					95 persen	186,553,159	2	2,858,200	45	83,094,250		29,441,550		314,144,044	90	90	170,513,950					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	5,848,370		-		1,968,000		861,000		3,005,300	4	100	5,834,300					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	22,888,080		-		-		-		280,868,894	3	100	21,844,800					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	13,779,710		2,858,200		4,029,400		-		2,866,600	1	100	9,754,200					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Bahan bacaan PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0	-		-		-		-		-	0	0	-					Kecamatan Palupuh
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	144,036,999				77,096,850		28,580,550		27,403,250	4	100	133,080,650					Kecamatan Palupuh
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan					100 persen	-	-	-		-		-		-	0	0	-					Kecamatan Palupuh
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	-				-		-		-	0	0						Kecamatan Palupuh
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	-				-		-		-	0	0						Kecamatan Palupuh
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	-				-		-		-	0	0						Kecamatan Palupuh
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 persen	212,653,400	15	32,823,720	33	70,980,470		40,684,220		62,858,220	98	98	207,346,630					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	24,269,400		5,203,720		5,248,470		5,554,220		5,454,220	24	100	21,460,630					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	188,384,000		27,620,000		65,732,000		35,130,000		57,404,000	6	100	185,886,000					Kecamatan Palupuh
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dimiliki daerah yang ber kondisi baik					100 persen	29,620,000	30	8,800,550	28	8,416,825		1,796,000		5,848,350	84	84	24,861,725					Kecamatan Palupuh
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	26,780,000		8,800,550		8,416,825		1,796,000		4,866,550	4	100	23,879,925					Kecamatan Palupuh
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					26 Unit	2,840,000						-		981,800	20	77	981,800					Kecamatan Palupuh
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	-						-		-	9	0	-					Kecamatan Palupuh
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	335,000,000	63	212,471,050	86 persen	121,104,000	7	8,175,950	9	11,115,150		53,441,600		37,932,800	88	100	106,905,050	76	319,376,100	95.34		Kecamatan Palupuh
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan					64 kegiatan	121,104,000	7	8,175,950	9	11,115,150		53,441,600		37,932,800	64	100	106,905,050					Kecamatan Palupuh
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	121,104,000		4,415,500		11,115,150		53,441,600		37,932,800	3	100	106,905,050					Kecamatan Palupuh
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	510,000,000	4	20,237,400	100 persen	4,200,000	0	-		-		-		-	80	80	-	2	20,237,400	3.97		Kecamatan Palupuh
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tranribum yang dikordinasikan					36 kegiatan	4,200,000	0	-		-		-		-	30	83	-					Kecamatan Palupuh
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 laporan	4,200,000	0					-		-	3	100	-					Kecamatan Palupuh
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	195,000,000	8	16,222,550	100 persen	3,500,000	0	-		-		-		-	100	100	-	4	16,222,550	8.32		Kecamatan Palupuh

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan					12 kegiatan	3,500,000				-		-		-	12	12					Kecamatan Palupuh	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12	3,500,000						-		-	12	12	-				Kecamatan Palupuh	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	510,000,000	13	68,642,733	100 persen	31,218,536	25	7,885,800	7	2,073,700		1,225,000		13,680,000	100	100	24,864,500	47	93,507,233	18.33		Kecamatan Palupuh
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi					97 kegiatan	31,218,536	25	7,885,800	7	2,073,700		1,225,000		13,680,000	97	100	24,864,500					Kecamatan Palupuh
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (pengelolaan keuangan dan aset nagari)					8 dokumen	23,073,536		1,316,700		2,073,700		1,225,000		13,680,000	8	100	18,295,400					Kecamatan Palupuh
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (kegiatan Musrenbang)					1 dokumen	8,145,000		6,569,100		-		-		-	1	100	6,569,100					Kecamatan Palupuh
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16,699,360,000	100	1,987,722,328	95 persen		25	422,786,180	25	502,947,414	25		25		92.5	98.40	1,715,162,959	94	3,702,885,287	94	22.17	Kecamatan Banuhampu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100		100	1,284,430,983	100	1,528,365,948	100	342,527,666	100	422,688,900	100	1,050,456,385	75	284,198,997	85.52	85.52	1,307,133,382					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,284,430,983	130orang-bulan	1,496,625,948	13	336,179,666	12	413,166,900	12	257,717,819	11	277,850,997	11	85	1,284,915,382					Kecamatan Banuhampu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				31,000,000	10 Laporan	31,740,000	2	6,348,000	3	9,522,000	3	9,522,000	2	6,348,000	10	100	22,218,000					Kecamatan Banuhampu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	250,754,489	100 persen	225,531,675	25	480,000	25		25	-	25	81,672,440	100	100	198,850,814					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4,168,000	1 Paket	1,826,620	0		0	-	0	-	1	1,500,000	1	100	1,500,000					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33,388,200	3 Paket	20,824,422	0		3	7,633,375	3	1,962,000	3	4,132,000	3	100	13,727,375					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				12,339,900	2 Paket	12,621,833	2	480,000	2	2,995,800	2	1,961,200	2	2,917,800	2	100	8,354,800					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3,980,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-	2	100	-					Kecamatan Banuhampu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				196,898,389	12 Laporan	190,258,800	3	21,443,500	3	51,595,749	3	29,106,750	3	73,122,640	12	100	175,268,639					Kecamatan Banuhampu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100	226,425,000	100 persen	-	0	-	0	-	30	-	0	-	15	-	45	45	-					Kecamatan Banuhampu
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10,125,000	10 Unit	-	-	-	-	-	-	2	-	20	20	-	-					Kecamatan Banuhampu
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45,752,500	9 Unit	-	-	6						67	67	-	-					Kecamatan Banuhampu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				99,760,000	1 Unit	-	-	-						0	0	-	-					Kecamatan Banuhampu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	-	-	-						0	0	0	-					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	208,380,106	100 persen	203,660,000	100	22,521,178	100	78,942,514	100	43,943,685	100	52,473,611	100	100	100	197,880,988					Kecamatan Banuhampu	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19,836,106	3 Laporan	18,246,000	3	3,799,178	3	4,642,514	3	4,717,685	3	3,317,611	3	100	16,476,988					Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				188,544,000	6 Laporan	185,414,000	6	18,722,000	6	74,300,000	6	39,226,000	1	49,156,000	16.7	16.7	181,404,000					Kecamatan Banuhampu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100	17,731,750	100 persen	34,070,000	15	433,200	20	1,316,000	30	3,440,000	30	6,108,575	95	95	11,297,775							Kecamatan Banuhampu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13,315,250	9 Unit	26,000,000	1	433,200	1	1,316,000	3	3,070,000	4	5,562,875	9	100	10,382,075					Kecamatan Banuhampu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4,416,500	10 Unit	8,070,000	0		0	-	3	370,000	2	545,700	10	100	915,700					Kecamatan Banuhampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	89	498,000,000	81.38	44,459,000	86 persen	110,129,000	20	2,994,500	22	12,020,350	22.5	80,695,450	20	8,152,050	84.5	98.26	103,862,350	82.94	148,321,350	93	29.78	Kecamatan Banuhampu
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan				44,459,000	4 laporan	110,129,000	4	2,994,500	4	12,020,350	4	80,695,450	4	8,152,050	4	100	103,862,350					Kecamatan Banuhampu
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				44,459,000	4 Laporan	110,129,000	4	2,994,500	4	12,020,350	4	80,695,450	4	8,152,050	4	100	103,862,350					Kecamatan Banuhampu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	1,050,000,000	100	11,527,000	100 persen	19,769,375	25	-	25	9,722,250	25		25	2,930,000	100	100	12,652,250	100	24,179,250	100	2	Kecamatan Banuhampu
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tranitumb yang dikordinasikan				11,527,000	3 Laporan	19,769,375	3		3	9,722,250	3	16,666,714	3	2,930,000	3	100	12,652,250					Kecamatan Banuhampu

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Peleaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11,527,000	3 Laporan	19,769,375	3		3	9,722,250	3	-	3	2,930,000	3	100	12,652,250					Kecamatan Banuhampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	368,000,000	100	9,860,000	100 persen	8,320,000	25	-	25	5,544,000	25	-	25	500,000	100	100	6,044,000	100	15,904,000	100	4,32	Kecamatan Banuhampu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan				9,860,000	12 dokumen	8,320,000	3		3	5,544,000	3		3	500,000	12	100	6,044,000					Kecamatan Banuhampu
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				9,860,000	12 Dokumen	8,320,000	3		3	556,400	3		3	500,000	12	100	6,044,000					Kecamatan Banuhampu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	89	540,000,000	100	18,309,200	100 persen	16,700,000	25	6,550,000	25	1,000,000	25	2,753,143	25	9,802,750	100	100	9,802,750	100	28,111,950	112	5,21	Kecamatan Banuhampu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	18,309,200	3 Dokumen	16,700,000	3	6,550,000	3	1,000,000	3	2,252,750	3	-	3	100	9,802,750					Kecamatan Banuhampu
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10,549,200	14 Dokumen	10,500,000	14	6,550,000	14	-	14	2,252,250	14	-	14	100	8,802,750					Kecamatan Banuhampu
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7,760,000	1 Dokumen	6,200,000	1	-	1	1,000,000		-		-	1	100	1,000,000					Kecamatan Banuhampu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN (persen)	100	15,171,730,000	100	1,889,980,091	97	1,870,254,296	24,25	363,125,505	24,25	496,543,595	24,25	368,376,699	24,25	438,837,217	97	100	1,666,883,016	100	2,723,421,599	100	18	Kecamatan Sungai Pua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD (persen)			12	1,537,662,351	100	1,410,181,925	25	300,235,626	25	387,834,739	25	288,171,858	25	320,632,530	100	100	1,296,874,744					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (uang)					13	1,379,441,925	13	294,087,626	13	378,612,730	12	282,023,858	12	311,410,530	13	100	1,266,134,744					Kecamatan Sungai Pua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)					12	30,740,000	3	6,148,000	3	9,222,000	3	6,148,000	3	9,222,000	12	100	30,740,000					Kecamatan Sungai Pua
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD (persen)			12	220,295,201	100	237,319,693	25	35,642,668	25	53,126,574	25	33,987,050	25	57,330,480	100	100	180,086,772					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)					2	2,681,250	0	0	1	1,064,400	0	0	1	1,114,440	2	100	2,178,840					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					4	29,094,767	4	648,000	4	9,578,660	4	260,000	4	6,825,440	4	100	17,312,100					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)					4	9,751,318	4	47,000	4	906,400	4	1,905,250	4	3,856,400	4	100	6,715,050					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)					1	3,840,000	1	600,000	1	930,000	1	990,000	1	1,320,000	1	100	3,840,000					Kecamatan Sungai Pua
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)					12	191,952,358	3	34,347,668	3	40,647,114	3	30,831,800	3	44,214,200	12	100	150,040,782					Kecamatan Sungai Pua
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan (persen)			12	33,025,500	100	4,999,998	0	0	34	0	33	0	33	0	100	100	0					Kecamatan Sungai Pua
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Sungai Pua
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)					1	4,999,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Sungai Pua
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	12	78,212,714	100	179,922,680	25	27,247,211	25	49,531,391	25	40,152,391	25	52,133,607	25	52,133,607	100	100	169,064,600					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)					4	30,002,680	4	4,897,211	4	3,481,391	4	5,402,391	4	7,223,607	4	100	21,004,600					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					12	149,920,000	3	22,350,000	3	46,050,000	3	34,750,000	3	44,910,000	12	100	148,060,000					Kecamatan Sungai Pua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik (persen)	12	20,794,325	100	37,830,000	25	0	25	6,050,900	25	6,065,400	25	8,740,600	25	8,740,600	100	100	20,856,900					Kecamatan Sungai Pua
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)					5	18,550,000	0	0	1	4,407,900	2	5,165,400	2	8,740,600	5	100	18,313,900					Kecamatan Sungai Pua
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)					15	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Sungai Pua
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)					19	8,080,000	0	0	3	1,643,000	2	900,000	0	0	5	26	2,543,000					Kecamatan Sungai Pua
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Sungai Pua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (persen)	89	415,000,000	85.5	123,159,110	89	97,616,350	22,3	11,822,000	22,3	27,481,000	22,3	46,781,550	22,3	2,959,000	89	100	89,043,550	92.75	167,680,885	104.21	40	Kecamatan Sungai Pua
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)			12	123,159,110	3	97,616,350	3	11,822,000	3	27,481,000	3	46,781,550	3	2,959,000	3	100	89,043,550					Kecamatan Sungai Pua

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)					12	97,616,350	3	11,822,000	3	27,481,000	3	46,781,550	3	2,959,000		12	100	89,043,550				Kecamatan Sungai Pua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (persen)	100	298,000,000	100	16,737,800	100	7,040,000	25	0	25	2,790,000	25	3,218,200	25	0	100	100	6,008,200	100	19,741,900	100	7	Kecamatan Sungai Pua
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan (kegiatan)			100	16,737,800	2	7,040,000	0	0	1	2,790,000	2	3,218,200	0	0	2	100	6,008,200					Kecamatan Sungai Pua
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)					12	7,040,000	3	0	3	2,790,000	3	3,218,200	3	0	12	100	6,008,200					Kecamatan Sungai Pua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang difasilitasi (persen)	100	200,000,000	100	11,172,000	100	2,500,000	25	0	25	306,900	25	0	25	590,700	100	100	897,600	100	11,620,800	100	6	Kecamatan Sungai Pua
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (urusan)			100	11,172,000	1	2,500,000	0	0	1	306,900	0	0	1	590,700	1	100	897,600					Kecamatan Sungai Pua
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)					12	2,500,000	2	0	2	306,900	2	0	2	590,700	8	67	897,600					Kecamatan Sungai Pua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi (persen)	100	417,000,000	100	24,007,000	100	25,625,000	25	6,567,500	25	4,050,000	25	1,800,000	25	5,305,000	100	100	17,722,500	100	32,868,250	100	8	Kecamatan Sungai Pua
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi (kegiatan)			100	24,007,000	5	25,625,000	5	6,567,500	5	4,050,000	5	1,800,000	5	5,305,000	5	100	17,722,500					Kecamatan Sungai Pua
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)					10	16,830,000	10	600,000	10	2,550,000	10	1,800,000	10	5,305,000	10	100	10,255,000					Kecamatan Sungai Pua
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)					1	8,795,000	1	5,967,500	1	1,500,000	0	0	0	0	1	100	7,467,500					Kecamatan Sungai Pua
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	899,743,900	100 Persen	1,057,850,606	####	233,167,131	####	298,749,720	100.00%	238,329,984	####	262,955,674		97.67%	97.67%	1,033,202,509				Kecamatan IV Koto
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				871,043,900	9 Orang/bulan	1,030,560,606	9 Orang/bulan	224,980,131	9 Orang/bulan	290,562,720	9 Orang/bulan	232,871,984	9 Orang/bulan	257,497,674	9 Orang/bulan	100.00%	1,005,912,509					Kecamatan IV Koto
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				28,700,000	12 Laporan	27,290,000	3 Laporan	8,187,000	3 Laporan	8,187,000	3 Laporan	5,458,000	3 Laporan	5,458,000	12 Laporan	100.00%	27,290,000					Kecamatan IV Koto
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			100 Persen	275,467,348	100 Persen	239,387,008	####	25,191,000	####	41,652,000	75.00%	50,669,150	####	70,413,000	100.00%	100.00%	187,925,150					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,707,777	4 Paket	3,877,720	4 Paket	962,000		0		-	-	-	4 Paket	100.00%	962,000					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45,793,538	6 Paket	32,703,368	2 Paket	2,635,000	1 Paket	905,000	2 Paket	22,660,800	1 Paket	1,200,000	6 Paket	100.00%	27,400,800					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6,903,000	5 Paket	9,906,400	5 Paket	1,830,000	5 Paket	1,775,000	5 Paket	970,000	5 Paket	626,000	5 Paket	100.00%	5,201,000					Kecamatan IV Koto
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220,063,033	12 Laporan	192,899,520	3 Laporan	19,764,000	3 Laporan	38,972,000	3 Laporan	27,038,350	3 Laporan	68,587,000	12 Laporan	100.00%	154,361,350					Kecamatan IV Koto
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100 Persen	31,821,670	0 Persen	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-					Kecamatan IV Koto
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30,121,670	0 Unit	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-					Kecamatan IV Koto
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1,700,000	0 Unit	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	193,537,262	100 Persen	186,553,176	####	41,179,613	####	64,241,380	100.00%	30,336,070	####	49,927,820	100.00%	100.00%	185,684,883					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				22,171,262	2 Laporan	17,982,176	2 Laporan	4,005,613	2 Laporan	4,187,380	2 Laporan	4,292,070	2 Laporan	5,189,820	2 Laporan	100.00%	17,674,883					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				171,366,000	6 Laporan	168,571,000	6 Laporan	37,174,000	6 Laporan	60,054,000	6 Laporan	26,044,000	6 Laporan	44,738,000	6 Laporan	100.00%	168,010,000					Kecamatan IV Koto
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100 Persen	22,861,750	75 Persen	38,411,900	####	1,315,000	####	3,904,350	75.00%	220,000	75%	19,392,224	75.00%	75.00%	24,831,574					Kecamatan IV Koto
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18,576,250	6 Unit	34,111,900	6 Unit	500,000	6 Unit	3,224,350	6 Unit	220,000	6 Unit	19,342,224	6 Unit	100.00%	23,286,574					Kecamatan IV Koto
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1,400,000	20 Unit	4,300,000	12 Unit	815,000	7 Unit	680,000	0	-	1 Unit	50,000	20 Unit	100.00%	1,545,000					Kecamatan IV Koto
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,885,500	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-					Kecamatan IV Koto
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	435,000,000	86 Persen	49,459,650	89 Persen	86,574,000	####	18,215,200	####	20,664,000	45.31%	39,227,250		-	80.33%	90.26%	78,106,450	80.33%	127,566,100	90.26%	29.33%	Kecamatan IV Koto
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan			3 Kegiatan	49,459,650	2 Kegiatan	86,574,000	2 Kegiatan	18,215,200	2 Kegiatan	20,664,000	100.00%	39,227,250		-	2 Kegiatan	100.00%	78,106,450					Kecamatan IV Koto
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				49,459,650	4 Laporan	86,574,000	1 Laporan	18,215,200	1 Laporan	20,664,000	2 Laporan	39,227,250	-	-	4 Laporan	100.00%	78,106,450					Kecamatan IV Koto

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	324,000,000	100 Persen	8,202,300	100 Persen	8,400,000	100%	2,425,500,00	0	-	0	-	-	-	100.00%	100.00%	2,425,500.00	100%	10,627,800	1.00%	3.28%	Kecamatan IV Koto
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikordinasikan			4 Kegiatan	8,202,300	4 Kegiatan	8,400,000	4 Kegiatan	2,425,500,00	0	-	0	-	-	-	4 Kegiatan	100.00%	2,425,500.00					Kecamatan IV Koto
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4 Laporan	8,202,300	4 Laporan	8,400,000	4 Laporan	2,425,500.00	0	-	0	-	0	-	4 Laporan	100.00%	2,425,500					Kecamatan IV Koto
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	221,000,000	100 Persen	- 0 Persen	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-					Kecamatan IV Koto
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			4 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-					Kecamatan IV Koto
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8 Dokumen	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-					Kecamatan IV Koto
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	366,000,000	100 Persen	21,634,800	100 Persen	15,050,000	####	7,969,500	####	1,683,000	100.00%	-	####	-	100.00%	100.00%	9,652,500	####	31,287,300	1.00%	8.55%	Kecamatan IV Koto
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			7 Nagari	21,634,800	7 Nagari	15,050,000	7 Nagari	7,969,500	7 Nagari	1,683,000	7 Nagari	-	7 Nagari	-	100.00%	100.00%	9,652,500					Kecamatan IV Koto
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			14 Dokumen	12,174,800	14 Dokumen	9,800,000	14 Dokumen	2,737,350.00	14 Dokumen	1,683,000.00	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	100.00%	4,420,350					Kecamatan IV Koto
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	13,094,360,000	100	1,625,031,213	95	1,527,439,658	100	316,153,481	100	408,052,795	100	334,453,724	100	401,377,247	93	98%	1,460,037,247	96.50	3,085,068,460	96.50	23.56	Kecamatan Matur
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100		100	1,249,262,955	100	1,116,102,370	100	246,424,636	100	309,828,013	100	256,637,805	75	295,362,765	85	85%	1,108,253,219					Kecamatan Matur
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			11	1,084,362,370	11	1,084,362,370	11 Orang/bulan	240,076,636	11 Orang/bulan	300,306,013	10 Orang/bulan	250,289,805	10 Orang/bulan	285,840,765	10 Orang/bulan	100%	1,076,513,219					Kecamatan Matur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10	31,740,000	1 Laporan	6,348,000	1 Laporan	9,522,000	1 Laporan	6,348,000	1 Laporan	9,522,000	1 laporan	70%	31,740,000							Kecamatan Matur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	234,414,784	100	220,971,288	100	35,646,500	100	52,458,005	100	37,552,800	100	54,242,525	100	100%	179,899,830					Kecamatan Matur
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	3,083,200	1 Paket	1,100,000	1 Paket	1,100,000	1 Paket	0	1 paket	880,000	4	100%	3,080,000							Kecamatan Matur
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	21,553,228	1 Paket	7,778,000	1 Paket	5,682,000	1 Paket	1,610,000	1 paket	6,245,125	3	100%	21,315,125							Kecamatan Matur
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3	14,425,000	1 Paket	1,732,500	1 Paket	4,889,200	1 Paket	2,343,000	1 paket	2,331,000	3	100%	11,295,700							Kecamatan Matur
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	181,909,860	3 Laporan	25,036,000	3 Laporan	40,786,805	3 Laporan	33,599,800	3 laporan	44,786,400	12	100%	144,209,005							Kecamatan Matur
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	35,867,500	100	- 0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-					Kecamatan Matur
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Matur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	4	100%	0	0					Kecamatan Matur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah			100	77,554,099	100	168,336,000	100	31,492,345	100	43,735,327	100	38,313,119	100	49,006,657	100	72%	162,547,448					Kecamatan Matur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	21,084,000	3 Laporan	5,360,345	3 Laporan	5,007,327	3 Laporan	4,705,119	3 laporan	4,660,657	12	100%	19,733,448							Kecamatan Matur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	147,252,000	3 Laporan	26,132,000	3 Laporan	38,728,000	3 Laporan	33,608,000	3 laporan	44,346,000	12	100%	142,814,000							Kecamatan Matur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik			100	27,931,875	100	22,030,000	95	2590000	95	2031450	95	1,950,000	95	2,765,360	95	95%	9,336,750					Kecamatan Matur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6	18,500,000	1	2,190,000	1	1,956,450	1	1,950,000	1	1620300	4	67%	7,716,750							Kecamatan Matur
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2	3,530,000	1	400,000	1	75,000	1	-	1	1145000	2	100%	1,620,000							Kecamatan Matur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89	558,000,000	85.5	87,289,750	85.5	66,945,000	0	2,462,500	0	3,654,500		56,160,100		1,090,000	82.03	96%	63,367,100	83.77	150,656,850	94.12	27.00	Kecamatan Matur
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikordinasikan			100	81,789,750	3	66,945,000	2 Kegiatan	2,462,500	2 Kegiatan	3,654,500	2 kegiatan	56,160,100	2 kegiatan	1,090,000	3	100%	63,367,100					Kecamatan Matur
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3	66,945,000	1 Laporan	2,462,500	1 Laporan	3,654,500	1 Laporan	56,160,100	1 Laporan	1,090,000	1 Laporan	100%	63,367,100							Kecamatan Matur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	348,000,000	100	4,928,500	100	0	100	0	100	0	100	-	100	-	100	100%	-					Kecamatan Matur
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tranribum yang dikordinasikan			100	4,928,500	3	0	1	0	1	0	-	1	-	3	100%	-	-					Kecamatan Matur

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3	0	1	0	1	0	0	-	1	-	3	100%	0					Kecamatan Matur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	243,000,000	100	6,000,000	100	0	100		100	0	100	0	100	-	100	100	-					Kecamatan Matur
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	6,000,000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-	1	100%	-					Kecamatan Matur
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12	0	3	0	3	-	3.00	-	3.00	0	12	100%	0					Kecamatan Matur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	389,000,000	100	15,981,000	100	4,181,600	100	2,381,500	100	1,800,000	100	-	100	-	100	100%	4,181,500	100.00	20,162,500		5.18	Kecamatan Matur
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	15,981,000	6	4,181,600	6	2,381,500	6	1,800,000	6	6 Kegiatan	6	Kegiatan	6	100%	4,181,500					Kecamatan Matur
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					18	1,800,000	12 Dok	umen	12 Dok	umen	12 Dokume	n	12 Do	kumen	18	100%	1,800,000					Kecamatan Matur
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1	2,381,600	1	2,381,600	1	2,381,500	-	-	0	0	0	0	1	100%	2,381,500					Kecamatan Matur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	1	14,772,730,000	1	1,682,480,531	0.95	1,609,651,145	1	329,256,508	1	429,801,193	1	326,076,382	0.75	403,836,516	85	8500%	1,488,970,599	1.00	3,171,451,130	1	21.47	Kecamatan Palembang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah			100	1,266,174,361	95 %	1,126,530,034	100%	248,567,776	100%	330,768,708	100%	258,538,676	75%	281,373,071	85%	85%	1,119,248,231					Kecamatan Palembang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan					12 orang	1,095,990,034	12	242,459,776	12	324,660,708	12	246,322,676	12	275,265,071	10	83%	1,088,708,231					Kecamatan Palembang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ semester SKPD					12 Laporan	30,540,000	3	6,108,000	3	6,108,000	3	12,216,000	3	6,108,000	12	100%	30,540,000					Kecamatan Palembang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100	258,940,269	95 %	256,846,619	100%	51,670,600	100%	44,086,500	100%	26,231,608	100%	63,178,500	100%	107%	185,167,208					Kecamatan Palembang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,811,710	0	0	0	0	1	1,070,000	1	1,625,000	1	100%	2,695,000					Kecamatan Palembang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan					2 Paket	24,893,909	2	5,597,000	2	9,396,500	2	4,714,608	2	3,305,000	2	100%	23,013,108					Kecamatan Palembang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					1 Paket	5,400,000	1	1,671,600	1	1,716,000	1	600,000	1	3,478,500	1	100%	7,466,100					Kecamatan Palembang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	223,741,000	3	44,402,000	3	32,974,000	3	19,847,000	3	54,770,000	12	100%	151,993,000					Kecamatan Palembang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	146,004,989	95 %	179,813,992	100%	26,393,132	100%	50,948,605	100%	36,111,348	100%	50,595,412	100%	107%	164,048,497							Kecamatan Palembang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					3 Laporan	24,679,992	3	3,379,132	3	3,944,605	3	3,593,348	3	3,687,412	3	100%	14,604,497					Kecamatan Palembang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					3 Laporan	155,134,000	3	23,014,000	3	47,004,000	3	32,518,000	3	46,908,000	3	100%	149,444,000					Kecamatan Palembang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100	11,360,912	95 %	46,460,500	95 %	2,625,000	95 %	3,997,380	95 %	5,194,750	95 %	8,689,533	95%	100	20,506,663							Kecamatan Palembang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	32,147,500	1	1,700,000	2	3,997,380	2	4,264,750	3	6,839,533	1	100%	16,801,663					Kecamatan Palembang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	14,313,000	2	825,000	0	0	2	930,000	3	1,850,000	5	100%	3,705,000					Kecamatan Palembang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Palembang
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan	100	0	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Palembang
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Palembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	8900%	385,000,000	82.17	41,923,000	0.86	45,000,000	0		36,645,000		2,450,000	84.45	1,015,000	85	9884%	40,110,000	92.75	82,033,000	113.11	21		Kecamatan Palembang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang di Koordinasikan	100	41,923,000	12	45,000,000	0	0	8	36,645,000	2	2,450,000	2	1,015,000	100	100%	40,110,000							Kecamatan Palembang
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3	45,000,000	3	-	3	36,645,000	2	2,450,000	3	1,015,000	3	100%	40,110,000							Kecamatan Palembang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi	100%	770,000,000	100	11,810,000	100 %	43,360,000	100%	4,667,000	100%	4,600,000	100%	1,790,000	100%	0	100	100%	11,057,000	100%	22,867,000	100%	3	Kecamatan Palembang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Trantibun yang di Koordinasikan	100	11,810,000	100 %	43,360,000	100%	4,667,000	25%	4,600,000	25%	1,790,000	25%	0	100	100%	11,057,000							Kecamatan Palembang
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					6 Laporan	43,360,000	6	4,667,000	6	4,600,000	6	1,790,000	6	0	6	100%	11,057,000					Kecamatan Palembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang di Fasilitasi	100%	500,000,000	100	1,780,000	100 %	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100	100%	0					Kecamatan Palembang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			100	1,780,000	12 Urusan	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	100%	0					Kecamatan Palembang

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1,780,000	12 Dokumen	-	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0%	0					Kecamatan Palembang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitas	100%	345,000,000	100	45,291,500	100 %	28,700,000	100%	10,920,000	100%	2,055,000	100%	1,400,000	100%	1,065,000	100	100%	15,440,000	100%	60,731,500	100%	17.60	Kecamatan Palembang
s	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitas				45,291,500	6 kegiatan	28,700,000	6	10,920,000	6	2,055,000	6	1,400,000	6	1,065,000	6	100%	15,440,000					Kecamatan Palembang
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	13,700,000	3	3,840,000	3	1,695,000	3	1,040,000	3	1,065,000	12	100%	7,640,000					Kecamatan Palembang
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	15,000,000	1	7,080,000	0	360,000	0	360,000	0	0	1	100%	7,800,000					Kecamatan Palembang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16,906,150,000	100 Persen	2,107,069,778	100 Persen	2,104,386,227	100	455,118,284	100.00	491,467,906	100.00	413,563,956	75	500,866,606	96.10	96.10	1,861,016,752	#####	3,968,086,530	9610%	23.47	Kecamatan Tanjung Raya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	1,440,800,781	100 Persen	1,529,137,606	100	351,625,907	100	360,086,589	100.00	324,572,441	75	365,369,462	91.66%	91.66%	1,401,654,399					Kecamatan Tanjung Raya
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				1,410,800,781	15 Orang	1,495,137,606	13	344,827,907	13	349,889,589	15	321,173,441	15	352,423,462	15	100.00	1,368,314,399					Kecamatan Tanjung Raya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ trimester/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester				30,000,000	12 laporan	34,000,000	3	6,798,000	3	10,197,000	3	3,399,000	3	12,946,000	12	100.00	33,340,000					Kecamatan Tanjung Raya
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			100	287,862,265	97 Persen	301,258,405	18	55,194,049	18.70	56,346,837	9.42	28,370,600	22	66,901,870	95.00%	100%	206,813,356					Kecamatan Tanjung Raya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	2 Paket	4,587,540	0	0	1	976,000	0	-	1	3,609,820	2	100.00	4,585,820					Kecamatan Tanjung Raya	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			54,512,179	3 Paket	24,996,951	1	1,400,000	3	15,252,755	2	4,747,650	2	3,572,000	3	100.00	24,972,405					Kecamatan Tanjung Raya	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10,477,150	5 Paket	16,577,100	1 Paket	1,195,000	1	932,000	1	497,650	2	3,592,150	5	100.00	6,216,800					Kecamatan Tanjung Raya	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			222,872,936	12 Laporan	255,096,814	3	52,599,049	3	39,186,082	3	23,125,300	3	56,127,900	12	100.00	171,038,331					Kecamatan Tanjung Raya	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100	100,212,314	97 Persen	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-					Kecamatan Tanjung Raya
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				18,187,500	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-					Kecamatan Tanjung Raya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			82,024,814	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-					Kecamatan Tanjung Raya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	259,484,918	95 Persen	241,670,216	17%	40,227,528	24	69,157,480	25.00	54,744,815	25	66,139,624	95.00%	100.00%	230,269,447					Kecamatan Tanjung Raya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			34,760,918	60 laporan	39,416,216	15	9,918,488	15	7,524,480	15	8,691,815	15	8,000,144	60	100.00	34,134,927					Kecamatan Tanjung Raya	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			224,724,000	9 Laporan	202,254,000	9	30,309,040	9	61,633,000	9	46,053,000	9	58,139,480	9	100.00	196,134,520					Kecamatan Tanjung Raya	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			100	18,709,500	97 Persen	32,320,000	25%	8,070,800	3	5,877,000	18.18	5,876,100		2,455,650	90.00%	92.78%	22,279,550					Kecamatan Tanjung Raya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16,074,500	7 Unit	25,500,000	1 Unit (27%)	7,020,800	3	5,877,000	2	4,191,100	1	820,650	7	100.00	17,909,550					Kecamatan Tanjung Raya	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			2,635,000	10 Unit	6,820,000	3	1,050,000	3	1,685,000	2	1,635,000	8	80.00	4,370,000								Kecamatan Tanjung Raya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	1,300,000,000	97	88,431,500	89 persen	331,387,750		30,778,750		72,619,500		83,729,700	87	60,280,900	86.91%	100.47%	247,408,850	86.91%	335,840,350	98%	25.83	Kecamatan Tanjung Raya
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			88,431,500	4 Kegiatan	331,387,750	1	30,778,750	1	72,619,500	2.00	83,729,700	1	60,280,900	4.00%	100.00%	247,408,850					Kecamatan Tanjung Raya	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			88,431,500	4 Laporan	331,387,750	1	30,778,750	1	72,619,500	2	83,729,700	1	60,280,900	4	100.00	247,408,850					Kecamatan Tanjung Raya	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	100	211,000,000	100	6,818,900	100 Persen	7,000,000	-	-	0	-	1.00	1,782,000.00	1.00	2,744,500.00	100.00	100.00	4,526,500.00	100.00	11,345,400	100	5.38	Kecamatan Tanjung Raya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan			6,818,900	3 Kegiatan	7,000,000	-	-	-	1.00	1,782,000.00	1.00	2,744,500.00		64.66	64.66	4,526,500.00					Kecamatan Tanjung Raya	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			6,818,900	2 Laporan	7,000,000	-	-	-	1.00	1,782,000.00	1.00	2,744,500.00	2	100.00		4,526,500					Kecamatan Tanjung Raya	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	298,000,000	100	2,114,200	100 Persen	5,250,000	-	-	0	-	100.00	4,181,100.00	####	59,400.00	100.00	100.00	4,240,500.00	100.00	6,354,700	100.00	2.13	Kecamatan Tanjung Raya
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			2,114,200	1 Kegiatan	5,250,000	-	-	0	-	1.00	4,181,100.00	1.00	59,400.00	1.00	100.00	4,240,500.00					Kecamatan Tanjung Raya	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2,114,200	2 Dokumen	5,250,000	-	-	-	2	4,181,100.00	2.00	59,400.00	2	100.00		4,240,500					Kecamatan Tanjung Raya	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	294,000,000	100	11,802,450	100 Persen	13,300,000	43%	5,742,000	2	-	-	-	-	2.00%	100.00%	5,742,000	2.00%	17,544,450	2%	5.97	Kecamatan Tanjung Raya	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi				11,802,450	2 Kegiatan	13,300,000	2%	5,742,000	2	-	2.00	-	2		2.00%	100.00%	5,742,000					Kecamatan Tanjung Raya
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6,346,450	12 Dokumen	7,000,000	12.00	-	12	-	12.00		12.00	-	12.00	100.00	-					Kecamatan Tanjung Raya
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah				5,456,000	1 Dokumen	6,300,000	1 (100%)	5,742,000		-				-	1	100	5,742,000					Kecamatan Tanjung Raya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	14,211,370,000	93	2,087,795,305	100 Persen	2,140,742,089	25%	499,636,588	25%	591,911,631	25%	455,958,479	25%	478,482,819	100	100	2,025,989,517	96.5	4,113,784,822	96.5	28.9	Kecamatan Lubuk Basung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100	1,465,287,902	100 Persen	1,591,917,132	100%	385,523,582	100%	458,460,747	100%	322,346,578	100%	356,895,098	100	100	1,523,226,005					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang /Bulan	1,561,177,132	16 Orang	379,375,582	14 Orang	446,164,747	14 Orang	319,272,578	14 Orang	347,673,098	14 Orang	95	1,492,486,005					Kecamatan Lubuk Basung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kecamatan Lubuk Basung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	30,740,000	2 Laporan	6,148,000	4 Laporan	12,296,000	1 Laporan	3,074,000	3 Laporan	9,222,000	10 Laporan	100	30,740,000					Kecamatan Lubuk Basung
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	246,185,525	100 Persen	196,032,477	100%	28,569,300	100%	41,649,429	100%	62,883,000	100%	28,987,350	100	100	162,089,079					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan					1 Paket	3,872,000			1 Paket	2,925,000			0		1 Paket	100	2,925,000					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan					3 Paket	33,747,677	3 Paket	8,637,500	3 Paket	500,000	3 Paket	10,000,000	3 Paket	0	12 Paket	100	19,137,500					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					1 Paket	16,711,200	1 Paket	4,825,000	0	0	1 Paket	2,950,000	0	0	2 Paket	100	7,775,000					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					3 Dokumen	3,010,000	3 Dokumen	810,000	3 Dokumen	810,000	3 Dokumen	810,000	0	0	9 Dokumen	100	2,430,000					Kecamatan Lubuk Basung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 Laporan	138,691,600	2 Laporan	14,296,800	2 Laporan	37,414,429	2 Laporan	49,123,000	2 Laporan	28,987,350	12 Laporan	100	129,821,579					Kecamatan Lubuk Basung
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100	47,640,000	100 Persen	20,000,000	100%	19,965,000							100	100	19,965,000					Kecamatan Lubuk Basung
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sewa Rumah Dinas Camat)	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Sewa Rumah Dinas)					1 Unit	20,000,000	1 Unit	19,965,000							1 Unit	100	19,965,000					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	289,556,098	100 Persen	301,067,280	25%	61,678,706	25%	85,553,755	25%	58,753,901	25%	85,175,658	100	100	291,162,020							Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3 Laporan	41,243,280	3 Laporan	13,727,706	3 Laporan	7,222,755	3 Laporan	7,419,901	3 Laporan	5,407,658	12 Laporan	100	33,778,020					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 Laporan	259,824,000	3 Laporan	47,951,000	3 Laporan	78,331,000	3 Laporan	51,334,000	3 Laporan	79,768,000	12 Laporan	100	257,384,000					Kecamatan Lubuk Basung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik			100	39,125,780	100 Persen	31,725,200	25%	3,900,000	25%	6,247,700	25%	11,975,000	25%	7,424,713	100	100	29,547,413					Kecamatan Lubuk Basung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					5 Unit	20,845,200	0	-	1 Unit	3,847,700	1 Unit	7,825,000	1 Unit	7,424,713	3 Unit	100	19,097,413					Kecamatan Lubuk Basung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (6 komputer, 3 laptop, 7 printer, 8 AC)					26 Unit	10,880,000	3 Unit	3,900,000	3 Unit	2,400,000	3 Unit	4,150,000		0	9 Unit	100	10,450,000					Kecamatan Lubuk Basung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2 Unit										0	0						Kecamatan Lubuk Basung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	89	1,160,000,000	100	35,083,500	86 Persen	92,755,200	4,224,000		20,718,750		8,976,000		28,020,000	79.52	92	61,938,750	90	97,022,250	100.9	8.4		Kecamatan Lubuk Basung
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang dikordinasikan			100	35,083,500	3 Kegiatan	92,755,200	3 Kegiatan	4,224,000	3 Kegiatan	20,718,750	3 Kegiatan	8,976,000	3 Kegiatan	28,020,000	3 Kegiatan	100	61,938,750					Kecamatan Lubuk Basung
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					12 Laporan	92,755,200	3 Laporan	4,224,000	3 Laporan	20,718,750	3 Laporan	8,976,000	3 Laporan	28,020,000	12 Laporan	100	61,938,750					Kecamatan Lubuk Basung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi.	100	365,000,000	100	4,186,600	100 Persen	2,350,000	100%	0	100%	0	100%	600,000	100%	0	100	100	600,000	100	4,786,600	100	1.3	Kecamatan Lubuk Basung
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan				4,186,600	4 Kegiatan	2,350,000	1 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	3 Kegiatan	600,000	1 Kegiatan	0	7 Kegiatan	100	600,000					Kecamatan Lubuk Basung
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					4 Laporan	2,350,000	1 Laporan		2 Laporan		3 Laporan	600,000	1 Laporan		7 Laporan	100	600,000					Kecamatan Lubuk Basung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	240,000,000	100	792,000	100 Persen	1,800,000	100%	0	100%	0	100%	520,000	100%	0	100	100	520,000	100	1,312,000	100	0.5	Kecamatan Lubuk Basung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan				792,000	2 Kegiatan	1,800,000	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	520,000	1 kegiatan	0	4 Kegiatan	100	520,000					Kecamatan Lubuk Basung
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Laporan	1,800,000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	520,000	3 Laporan	-	12 Laporan	100	520,000					Kecamatan Lubuk Basung

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	370,000,000	100	5,440,000	100 Persen	6,449,900	100%	3,649,500	100%	0	100%	792,000	100%	0	100	100	4,441,500	100	9,881,500	100	2.7	Kecamatan Lubuk Basung
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi				5,440,000	75 Kegiatan	6,449,900	75 Kegiatan	3,649,500	75 Kegiatan	0	75 Kegiatan	792,000	75 Kegiatan	0	300 Kegiatan	100	4,441,500					Kecamatan Lubuk Basung
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					10 Dokumen	2,450,000	10 Dokumen	0	10 Dokumen	0	10 Dokumen	792,000	10 Dokumen	0	40 Dokumen	100	792,000					Kecamatan Lubuk Basung
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa					1 Dokumen	3,999,900	1 Dokumen	3,649,500						0	1 Dokumen	100	3,649,500					Kecamatan Lubuk Basung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	11,578,560,000	100	3,089,605,950	95 persen	2,014,370,024	25	473,073,200	25	512,659,596	25	347,959,646	20	425,422,172	100	100	1,758,495,014	100	4,848,100,964	100	41.87	Kecamatan Ampek Nagari
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			100	2,334,871,432	97 persen	1,533,761,684	100	383,249,078,000	100	378,344,318,000	75	285,128,125	75	318,205,656	87.5	100	1,364,927,177					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					13 Orang/bulan	1,533,761,684	15	383,249,078	15	378,344,318	13	285,128,125	13	318,205,656	13	100	1,364,927,177					Kecamatan Ampek Nagari
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	415,428,971	97 persen	201,386,340	25	32,192,000,000	100	68,142,037,000	100	18,394,100,000	100	27,444,150,000	81.25	83.8	146,172,287,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7,406,850	0	0	1	1,690,150	0	0	0	0	2	100	1,690,150,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	33,774,690	0	0	1	6,106,887	1	6,472,000	0	10,374,000	4	100	22,952,887,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					3 Paket	22,416,800	0	0	3	2,690,000	0	0	0	0	4	100	2,690,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	137,788,000	3	32,192,000	3	57,655,000	3	11,922,100	3	17,070,150	12	100	118,839,250,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	17,990,000	97 persen	10,000,000	0	0	100		0	0	0	0	100	100	9,990,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					6 Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					Kecamatan Ampek Nagari
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					Kecamatan Ampek Nagari
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10,000,000	0	0	1	9,990,000	0	0	0	0	1	100	9,990,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	270,438,816	97 persen	222,952,000	100	45,677,022	100	64,273,841,000	100	42,310,171,000	100	62,233,766,000	100	100	214,494,800,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	32,626,000	2	9,620,022	2	6,377,841	2	8,373,171	2	5,737,766	2	100	30,108,800,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	190,426,000	3	36,057,000	3	57,896,000	3	33,937,000	3	56,496,000	6	100	184,386,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			100	50,876,731	97 persen	46,270,000	100	11,955,100	100	1,899,400	100	2,127,250	100	17,538,600	100	100	22,910,750,000					Kecamatan Ampek Nagari
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	23,750,000	1	8,425,300	5	1,899,400	1	2,127,250	2	10,458,800	6	100	22,910,750,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					12Unit	22,520,000	3	3,529,800	3		3		3	7,079,800	12	100	10,609,600,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-											-					Kecamatan Ampek Nagari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	89	345,000,000	85.83	15,128,000	85.5 persen	86,268,800	0	0	100	3,930,000	100	44,939,300	100	27,045,950	100	100.00	75,915,250,000	92.915	91,043,250	104.40	26.39	Kecamatan Ampek Nagari
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikordinasikan			100	42,564,000	3 kali	86,268,800	0	0	0	3,930,000	2	44,939,300	1	27,045,950	3	100	75,915,250,000					Kecamatan Ampek Nagari
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 kegiatan	86,268,800	0	0	0	3,930,000	2	44,939,300	1	27,045,950	3	100	75,915,250,000					Kecamatan Ampek Nagari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan kelteriban umum yang difasilitasi.	100	465,000,000	100	32,990,000	100 persen	27,150,000	25		25	3,450,000	25	17,780,000	25	5,340,000	100	100	26,570,000,000	100	59,560,000	100	12.81	Kecamatan Ampek Nagari
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan tranribum yang dikordinasikan			100	32,990,000	3 kegiatan	27,150,000			3	3,450,000	3	17,780,000	3	5,340,000	100	100	26,570,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	27,150,000	3	0	3	3,450,000	3	17,780,000	3	5,340,000	3	100	26,570,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	465,000,000	100	24,805,000	100 persen	3,500,000	100		100		100	1,350,000	100		100	100	1,350,000,000	100	26,155,000	100	5.62	Kecamatan Ampek Nagari
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengusan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai pengusan kepala daerah yang dilaksanakan			100	24,805,000	1 kegiatan	3,500,000	3		3		3	1,350,000	3		100	100	1,350,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	3,500,000	3	0	3	0	3	1,350,000	3	0	12	100	1,350,000,000					Kecamatan Ampek Nagari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	535,000,000	100	43,854,900	100 persen	14,940,000	25	5,400,000	25	0	25	0	25	5,960,000	100	100	11,360,000,000	100	55,214,900	100	10.32	Kecamatan Ampek Nagari

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari yang difasilitasi			100	43,854,900	9 kali	14,940,000	4	5,400,000	0	0	8	0	8	5,960,000	100	100	11,360,000.00					Kecamatan Ampek Nagari
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	9,540,000	3	0	3	0	3	0	3	5,960,000	12	100	5,960,000.00					Kecamatan Ampek Nagari
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	5,400,000	1	5,400,000	0						1	100	5,400,000.00					Kecamatan Ampek Nagari
PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	12,045,640,000.00	100 Persen	1,576,994,660.00	100 persen	1,944,772,742.00	100	387,734,291	25	466,045,206	25	403,110,974	25	473,969,746	100 persen	95.00	1,730,860,217	100.00	3,307,854,877	1.00	0.27	Kecamatan Tanjung Mutiara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	1,116,673,144.00	100 persen	1,384,924,310.00	100	313,355,110	100	352,109,706	100	312,021,223	100	351,800,085	100 persen	100 Persen	1,329,286,124					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					13 Orang/ bulan	1,355,384,310	13	304,493,110	13	346,201,706	14	306,113,223	14	342,938,085	13 Orang/ bulan	107.69	1,299,746,124					Kecamatan Tanjung Mutiara
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	29,540,000	3	8,862,000	3	5,908,000	3	5,908,000	3	8,862,000	12 Laporan	100.00	29,540,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100 Persen	183,805,168.00	93 Persen	171,756,708.00	25	12,984,541	25	34,863,354	25	27,155,505	7	39,294,314	93 Persen	93.00	114,297,714					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3,923,800	0		1	1,755,050	0	-	1	1,572,500	1 Paket	100.00	3,327,550.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	31,818,108	2	1,135,996	2	7,376,004	2	7,214,005	2	14,091,514	2 Paket	100.00	29,817,519.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	13,920,800	1	2,075,200	1	1,329,300	1	2,480,000	1	3,985,400	1 Paket	100.00	9,869,900.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	122,094,000	3	9,773,345	3	24,403,000	3	17,461,500	3	19,644,900	12 Laporan	100.00	71,282,745.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	100 Persen	8,000,000.00	94 Persen	10,000,000.00	100	10,000,000	100		-	100	-	-	-	-	100	100.00	10,000,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0 Unit	0	-					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0 Unit	0	-					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10,000,000	1	10,000,000	0	-	0	-	-	-	1 Unit	100 Persen	10,000,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	250,350,248.00	94 Persen	266,795,724.00	100	51,394,640	100	74,560,596	100	63,124,246	100	70,930,447	94 Persen	100 Persen	260,009,929					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	50,940,724	3	13,414,640	3	10,551,100	3	11,654,616	3	12,650,645	12 Laporan	100 Persen	48,271,001					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	215,855,000	2	37,980,000	3	64,009,496	3	51,469,630	4	58,279,802	12 Laporan	100 Persen	211,738,928					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			100 Persen	18,166,100.00	94 Persen	111,296,000.00	-	-		4,511,550		810,000		11,944,900	94 Persen	100.00	17,266,450					Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	19,750,000	0	-	2	2,605,550	1	810,000	5	3,559,900	5 Unit	100 Persen	6,975,450					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14 Unit	4,550,000	-	7	1,906,000	0	-	2	2,500,000	14 Unit	100.00	4,406,000					Kecamatan Tanjung Mutiara	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	86,996,000	0	-	0	-	0	-	1	5,885,000	1	100.00	5,885,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (%)	89 persen	306,000,000.00	98.97	24,625,000.00	100 persen	47,800,000.00	-		15,925,000	5	21,685,000	2	2,495,000	100 persen	100.00		40,105,000	102.60	64,730,000	1.15	0.21	Kecamatan Tanjung Mutiara
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikordinasikan			100 Persen	24,625,000.00	12 Kegiatan	47,800,000	1	-	4	15,925,000	5	21,685,000	2	2,495,000	12	100.00	40,105,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24,625,000.00	12 Laporan	47,800,000	3	-	3	15,925,000	3	21,685,000	3	2,495,000	12 Laporan	100.00	40,105,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang difasilitasi	100 persen	302,000,000.00	97.74	12,350,000.00	100 persen	4,825,000.00	100	-	100	1,300,000	100	-	100	2,425,000	100 persen	100.00	3,725,000	100.00	16,075,000	1.00	0.05	Kecamatan Tanjung Mutiara
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Tranitbum yang Dikoordinasikan			100 Persen	12,350,000.00	12 Kegiatan	4,825,000.00	3	-	3	1,300,000	3	-	3	2,425,000	12 Kegiatan	100.00	3,725,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12,350,000.00	12 Laporan	4,825,000	3	-	3	1,300,000	3	-	3	2,425,000	12 Laporan	100.00	3,725,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100 persen	290,000,000.00	100 Persen	6,335,000.00	100 Persen	6,942,000.00	100		100		100	3,975,000	100	2,945,000	100 Persen	100.00	6,920,000	100.00	13,255,000	1.00	0.05	Kecamatan Tanjung Mutiara
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			100 Persen	6,335,000.00	12 Kegiatan	6,942,000.00	3.00	-	3.00	-	3.00	3,975,000	3.00	2,945,000.00	12 Kegiatan	100.00	6,920,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6,335,000.00	12 Laporan	6,942,000	3	-	3	-	3	3,975,000	3	2,945,000	12 Laporan	100.00	6,920,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari yang difasilitasi	100 persen	295,000,000.00	100 Persen	13,115,000.00	100 Persen	10,500,000.00	100	3,500,000	100	-	100	-	100	6,650,000	100 Persen	100.00	10,150,000	100.00	23,265,000	1.00	0.08	Kecamatan Tanjung Mutiara
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100 Persen	13,115,000.00	9 kegiatan	10,500,000.00	8	3,500,000	8	-	8	-	9	6,650,000	9 kegiatan	100.00	10,150,000					Kecamatan Tanjung Mutiara

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran APBD-P Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Kinerja (persentase)	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Facilitasi/ Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9,615,000.00	9 Dokumen	7,000,000	8		8	-	8	-	9	6,650,000	9 Dokumen	100 Persen	6,650,000.00					Kecamatan Tanjung Mutiara
Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah				3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000	1	3,500,000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	100 Persen	3,500,000					Kecamatan Tanjung Mutiara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100 Persen	10,382,100,000	95 Persen	1,484,575,851	95 Persen	1,502,576,928		282,093,168		434,581,842		300,535,365		412,411,473	95 Persen	91.75	1,502,576,928	95 Persen	2,987,152,779	95%	29%	Kecamatan Malalak
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	920,585,638	100 Persen	995,078,428	100	187,525,872	100	289,176,469	100	219,492,283	75	272,954,067	85	85	969,148,691					Kecamatan Malalak
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9 Orang/bulan	949,618,428	9 Orang/bulan	181,377,872	9 Orang/bulan	279,654,469	9 Orang/bulan	219,492,283	9 Orang/bulan	246,458,067	9 Orang/bulan	100	926,982,691					Kecamatan Malalak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	45,460,000	3 Laporan	6,148,000	3 Laporan	9,522,000	3	0	3	26,496,000	12 Laporan	100	42,166,000					Kecamatan Malalak
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD			100 persen	249,569,548	100 persen	280,222,020	100	46,239,250	100	67,912,500	100	48,750,000	100	81,235,050	100 persen	100	244,136,800					Kecamatan Malalak
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6,114,560	1 Paket	1,500,000	1 Paket	2,100,000	1 Paket	2,000,000	-	0	1 Paket	100	5,600,000					Kecamatan Malalak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	23,340,860	4 Paket	9,100,000	4 Paket	3,100,000	4 Paket	2,500,000	4 Paket	2,074,000	4 Paket	100	16,774,000					Kecamatan Malalak
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan					3 Paket	15,621,800	3 Paket	2,900,000	3 Paket	6,080,000	3 Paket	1,100,000	3 Paket	3,000,000	3 Paket	100	13,080,000					Kecamatan Malalak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	235,144,800	3 Laporan	32,739,250	3 Laporan	56,632,500	3 Laporan	43,150,000	3 Laporan	76,161,050	12 Laporan	100	208,682,800					Kecamatan Malalak
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	193,651,040	100 persen	194,621,480	100	41,678,846	100	65,954,753	100	31,039,882	100	52,139,356	100 persen	100	190,812,837					Kecamatan Malalak
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	9,841,480	2 Laporan	968,846	2 Laporan	1,444,751	2 Laporan	1,758,882	2 Laporan	1,979,356	2 Laporan	100	6,152,835					Kecamatan Malalak
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	184,780,000	6 Laporan	40,710,000	6 Laporan	64,510,002	6 Laporan	29,280,000	6 Laporan	50,160,000	6 Laporan	100	184,660,002					Kecamatan Malalak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Publik	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			100 Persen	24,718,000	100 Persen	32,655,000		6,649,200		11,538,120		1,253,200	82 Persen	6,083,000	82	82	25,523,520					Kecamatan Malalak
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 unit	23,115,000	1 Kendaraan	5,269,200	2 Kendaraan	9,838,120	1 Kendaraan	303,200	1 Kendaraan	6,083,000	5 unit	100	21,493,520					Kecamatan Malalak
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14 Unit	9,540,000	2 Unit	1,380,000	2 Unit	1,700,000	2 Unit	950,000	-		6 unit	42.86	4,030,000					Kecamatan Malalak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	89 Persen	291,000,000	85,03 Persen	14,585,302	86 Persen	154,434,200		13,995,000		63,290,500		50,930,000	81	4,433,450	81	94.19	132,648,950	####	147,234,252			Kecamatan Malalak
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan				14,585,302	4 Kegiatan	154,434,200	3 Kegiatan	13,995,000	4 Kegiatan	63,290,500	3 Kegiatan	50,930,000	3 Kegiatan	4,433,450	4 Kegiatan	100	132,648,950					Kecamatan Malalak
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	154,434,200	3 Laporan	13,995,000	4 Laporan	63,290,500	3 Laporan	50,930,000	3 Laporan	4,433,450	4 Laporan	100	132,648,950					Kecamatan Malalak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100 Persen	942,000,000	100 Persen	12,410,000	100 persen	8,214,000	100	-	100	900,000	100	0	100	-	100 persen	100	900,000		13,310,000			Kecamatan Malalak
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trabtibun yang dikoordinasikan				12,410,000	12 bulan	8,214,000	3	-	3	900,000	3	0	3	0	12 bulan	100	900,000					Kecamatan Malalak
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 dokumen	8,214,000	3 dokumen		3 dokumen	900,000	3 dokumen	0	3 dokumen	0	3 dokumen	100	900,000					Kecamatan Malalak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	100 Persen	410,000,000	100 Persen	8,920,000	100 Persen	8,909,800	100	6,011,750	100		100		100	599,050	100 Persen	100	6,610,800		15,530,800			Kecamatan Malalak
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				8,920,000	24 urusan	8,909,800	2 urusan	6,011,750	2 urusan		-	2 urusan	-	599,050	24 urusan	2 urusan	6,610,800					Kecamatan Malalak
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					10 Dokumen	8,909,800	3 Dokumen	6,011,750	3 Dokumen		-	3 Dokumen	-	599,050	10 Dokumen	100	6,610,800					Kecamatan Malalak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100 Persen	298,000,000	100 Persen	11,300,000	100 persen	12,728,000	100		100		100		100	273,500	100 persen	100	3,680,000		14,980,000			Kecamatan Malalak
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan/pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					4 nagari	12,728,000	4 nagari	3,406,500	4 nagari		-	4 nagari	-	273,500	4 nagari	100	3,680,000					Kecamatan Malalak
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8 dokumen	12,728,000	8 dokumen	3,406,500	8 dokumen		-	8 dokumen	-	273,500	8 dokumen	100	3,680,000					Kecamatan Malalak

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkiraan besaran sumber pendapatan lapangan usaha-lapangan usaha potensial, kondisi perekonomian global dan regional serta memperhatikan arahan kebijakan ekonomi nasional yang tercantum dalam RKP Nasional dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 serta Rancangan RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2026 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Agam.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Lebih lanjut arah kebijakan nasional dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera berada pada kisaran 4,2–4,7 persen.

3. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan.

4. Rasio Gini

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang

diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

5. Indeks Modal Manusia

Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari.

3.1.2 Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh Lapangan Usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tecermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,61% menjadi 70,28% serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT dari 5,94%. menjadi 5,75%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap

terjaga. Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) – 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian, dan peningkatan event pariwisata. Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Namun demikian, inflasi diproyeksikan tetap terjaga berada pada rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi diproyeksikan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat.

Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, serta perdagangan. Arah kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan pada tahun 2026 untuk memaksimalkan potensi tersebut meliputi:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan

Dengan mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital (smart farming) diharapkan mampu untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, dan gambir dengan sistem hilirisasi. Selain itu peningkatan akses pasar melalui kerja sama dengan industri pangan dan ekspor dan optimalisasi lahan pertanian dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sangat diharapkan bisa dicapai di tahun 2026..

2. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Pengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner, seperti wisata halal dan ekowisata di Danau Maninjau, Harau, dan Mentawai sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata (bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi) serta dapat memperkuat promosi wisata dengan digital marketing serta kolaborasi dengan influencer dan travel blogger. Dengan mengembangkan desa wisata dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata disinyalir akan mampu mendorong perekonomian di Sumatera Barat.

3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM

Sejalan dengan peningkatan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM diharapkan mampu tumbuh berdampingan dan saling menguatkan perekonomian Sumatera Barat

4. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Regional

Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta pelabuhan dan juga melakukan optimalisasi jalur perdagangan antarprovinsi dan internasional melalui penguatan sektor maritim.

5. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha

Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor yang menanamkan modal di Sumbar. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk sektor industri dan perdagangan. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti PLTA dan energi geothermal.

6. Penguatan Sektor Perikanan dan Kelautan

Pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut secara berkelanjutan. dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan alat tangkap modern dan akses permodalan. Ekspansi ekspor hasil laut, seperti tuna dan ikan kerapu, ke pasar internasional.

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Agam

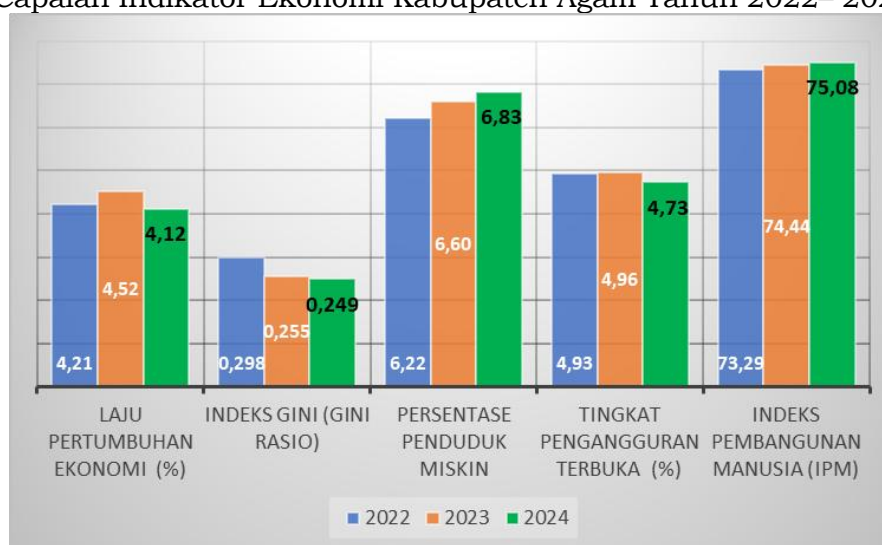
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja perekonomian Agam ditahun 2024 dibandingkan dengan Sumatera Barat dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2
Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2024

Indikator		Indonesia	Sumatera Barat	Agam
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,36	4,12
3	TPT (%)	4,91	5,75	4,73
4	IPM	74,20	76,43	75,08
5	Persentase Kemiskinan (%)	8,57	5,97	6,83
6	Gini Rasio	0,381	0,283	0,249

Capaian indikator makro kabupaten Agam tahun 2024 secara umum berada dibawah rata-rata Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,52 persen. Angka ini berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan nasional yang masing-masing mencapai 4,36 persen dan 5,03 persen. Angka IPM Agam mencapai 75,08, namun masih berada dibawah capaian provinsi (76,43) dan sedikit lebih baik dibanding nasional (74,20). Angka kemiskinan Agam mencapai 6,83 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi (5,97 persen), namun berada dibawah angka nasional (8,57 persen). Indikator yang capaiannya sedikit lebih baik dibandingkan capaian provinsi Sumatera Barat adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka gini rasio. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam diuraikan secara rinci pada Bab II RKPD, secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik III.1
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2022– 2024



Sumber : BPS 2025

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam di tahun 2024 sebesar 4,12 persen, sedikit turun dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 4,52 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi. Perlambatan tersebut terjadi pada beberapa sektor-sektor lapangan usaha utama, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB dengan nilai mencapai 7,9 triliun rupiah atau secara persentase sebesar 28,26 persen. Pertumbuhan sektor ini turun ditahun 2024 menjadi 1,79 persen, dari sebelumnya sebesar 3,10 persen ditahun 2023. Perlambatan ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan

mengingat sektor ini merupakan sektor yang sangat dominan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan lahan dan infrastruktur jalan sehingga terganggunya rantai pasok dan logistik produk pertanian. Selanjutnya sektor dominan yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan turun dari 6,6 persen ditahun 2023 menjadi 3,43 persen ditahun 2024. Sektor Konstruksi turun dari 6,02 persen ditahun 2023 menjadi 3,09 persen ditahun 2024.

Tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dimana angka gini rasio semakin turun. Angka gini rasio tahun 2024 tercatat sebesar 0,249, turun dari tahun 2023 sebesar 0,255 dan tahun 2022 sebesar 0,298. Tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten Agam berada pada skala rendah. Berbeda dengan gini rasio, persentase penduduk miskin Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari 6,60 persen di tahun 2023 menjadi 6,83 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin meningkat dari 33,41 ribu menjadi 34,82 ribu jiwa.

Tingkat pengangguran kabupaten Agam turun dari 4,96 persen di tahun 2023 menjadi 4,73 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbuka di dominasi tamatan pendidikan tinggi dan SLTA sederajat. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidaksesuaian antara keterampilan atau pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok. Sementara angka IPM kabupaten Agam mengalami peningkatan dari 74,44 ditahun 2023 menjadi 75,08 pada tahun 2024. Meningkatnya angka IPM Agam sejalan dengan peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan. Angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,89 tahun menjadi 4,16 tahun , angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,22 tahun menjadi 9,23 tahun dan angka harapan hidup meningkat dari 74,22 tahun menjadi 74,39 tahun.

Tabel III.3
Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Agam

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Proyeksi	
		2023	2024	2025 (Berdasarkan RKPD 2025)	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,12	4,89	4,70
2	TPT (%)	4,96	4,73	4,88	4,69
3	IPM	74,44	75,08	75,75	76,01

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Proyeksi	
		2023	2024	2025 (Berdasarkan RKPD 2025)	2026
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,39	74,51	74,65
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	14,16	14,39	14,48
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,22	9,23	9,75	9,88
4	Persentase Kemiskinan (%)	6,60	6,83	6,15	6,19
5	Gini Rasio	0,255	0,249	0,253	0,248

Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2025

Perkembangan indikator makro kabupaten Agam beberapa tahun kebelakang cukup berfluktuatif. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, IPM dan gini rasio mengalami perkembangan yang cukup positif, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan dalam periodisasi RKPD. Sementara indikator kemiskinan menunjukkan perkembangan yang negatif, dimana angka kemiskinan semakin tinggi ditahun 2024. Untuk itu diperlukan arah dan kebijakan untuk lebih meningkatkan capaian makro ekonomi ditahun berikutnya. Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Agam ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis dalam memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan nilai IPM, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta turunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah.
2. Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, distribusi, stabilitas harga, pengendalian dan pengawasan mutu bahan pangan masyarakat.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan jejaring kerja sama kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha, Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital dan mendorong terciptanya konsorsium UMKM
4. Meningkatkan daya saing industri pengolahan dan nilai tambah produk melalui fasilitasi industri pengolahan komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif, peningkatan standarisasi, branding dan packaging, pengembangan agroindustri dan agro bisnis.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang dimuat dalam RPJMD 2021 - 2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam .

Pendapatan daerah dibentuk oleh tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni bersumber dari kemampuan dan potensi daerah sesuai ketentuan perundang undangan, sehingga besaran proporsi penerimaan PAD dapat mencerminkan kualitas kemandirian daerah. Komponen PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk digunakan mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai kewenangan Daerah, serta membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Hibah dari lembaga/badan/organisasi swasta, bagi Hasil Provinsi, Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam tiga tahun terakhir memperlihatkan tren meningkat. Realisasi pendapatan daerah ditahun 2022 dengan sebesar Rp. 1.387.989.964.289,09. Ditahun 2023 realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.406.808.890.968,76 dan kembali meningkat menjadi Rp. 1.526.670.873.804,71. Secara persentase capaian realisasi tahun 2024 naik sebesar 8,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat dari sumber pendapatan, kabupaten Agam masih sangat tergantung kepada pendapatan transfer. Pada tahun 2024, proporsi dari pendapatan transfer mencapai 89,16 persen dari total pendapatan daerah. Artinya dari total realisasi pendapatan sebesar 1,52 triliun rupiah, pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer

mencapai Rp. 1.361.215.315.925,00. Rinciannya meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.281.140.966.857,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 80.074.349.068,00. Sementara pendapatan daerah yang berasal dari PAD mencapai Rp. 164.717.557.879,71 atau 10,79 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp. 738.000.000,00 yang berasal dari pendapatan hibah. Berikut disajikan perkembangan realisasi pendapatan berdasarkan kelompok pendapatan pada grafik.

Grafik III.2 : Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Kelompok Pendapatan Kabupaten Agam (milyar)



Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kab. Agam 2025

Pendapatan daerah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 119.861.982.835,95. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PAD 16.389.285.881,95 sebesar dan pendapatan transfer sebesar Rp. 106.388.696.954,00. Peningkatan PAD ditopang oleh peningkatan retibusi daerah dan pajak daerah. Peningkatan pendapatan transfer disebabkan karena penambahan alokasi dana DAK fisik pada bidang kesehatan dan kb-reguler-penguatan sistem kesehatan, dana desa dan insentif fiskal serta pendapatan bagi hasil pajak.

Anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2025 telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Agam tahun 2025. Target pendapatan untuk tahun 2025 mencapai Rp. 1.573.318.043.171,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 207.819.815.431,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.365.498.227.740,00. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah nihil ditahun 2025. Sementara untuk tahun 2026 pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp. 1.543.112.145.711,09. Jika dibandingkan tahun 2025, proyeksi

pendapatan di tahun 2026 berkurang sebesar Rp. 30.205.897.459,91. Penurunan target pendapatan daerah disebabkan adanya penyesuaian target Pendapatan Transfer. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan Rp. 215.093.508.971,09. Sementara pendapatan transfer menjadi Rp.1.328.018.636.740,00. Proyeksi pendapatan transfer didasarkan pada besaran alokasi tahun 2025. Gambaran perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2023-2027 disajikan pada tabel berikut .

Tabel III.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
PENDAPATAN	1.406.808.890.968,8	1.526.670.873.804,7	1.573.318.043.171,0	1.543.112.145.711,09	1.593.838.105.029,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.328.271.997,8	164.717.557.879,7	207.819.815.431,0	215.093.508.971,09	222.621.781.785,07
Pajak Daerah	44.851.102.783,6	46.865.864.045,0	91.558.350.536,0	93.000.000.000,00	95.000.000.000,00
Retribusi Daerah	2.693.330.605,0	93.939.107.790,0	94.860.860.488,0	100.300.000.000,00	105.500.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.443.140.815,0	13.723.582.467,0	14.000.000.000,0	14.200.000.000,00	14.500.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	88.340.697.794,2	10.189.003.577,7	7.400.604.407,0	7.593.508.971,09	7.621.781.785,07
PENDAPATAN TRANSFER	1.254.826.618.971,0	1.361.215.315.925,0	1.365.498.227.740,0	1.328.018.636.740,00	1.371.216.323.244,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.186.032.204.769,0	1.281.140.966.857,0	1.303.017.608.000,0	1.265.538.017.000,00	1.307.486.091.109,20
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.794.414.202,0	80.074.349.068,0	62.480.619.740,0	62.480.619.740,00	63.730.232.134,80
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.654.000.000,0	738.000.000,0	-	-	-
Pendapatan Hibah	3.654.000.000,0	738.000.000,0	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi acuan bagi hubungan keuangan pusat-daerah. Selanjutnya, pemerintah telah merancang arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal Tahun 2026 yang dirumuskan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.

Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi atau penyelarasan fiskal tersebut dilakukan antara lain melalui penyelarasan tahap perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD terus ditingkatkan melalui kebijakan Tranfes Ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan prudent (Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026).

Mengacu pada ketentuan di atas dan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah. Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2026 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam melalui pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi data base pajak dan retribusi secara bertahap.
 - c. Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola.
 - d. Mengkaji dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatkan edukasi kesadaran wajib Pajak dan Retribusi dengan pendekatan persuasif melalui penyuluhan/sosialisasi pajak

menggunakan media baliho maupun media elektronik serta jika diperlukan untuk melakukan tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur dalam regulasi.

- f. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
 - g. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - h. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
 - i. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - j. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
 - k. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
 1. Menerapkan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer meliputi :
- a. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
 - b. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readiness criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan

- mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat
- c. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
 - d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi belanja daerah kabupaten Agam pada tahun 2022 mencapai Rp. 1.368.645.115.804,95 dan meningkat menjadi Rp. 1.437.208.850.221,44 di tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023 realisasi belanja daerah kabupaten Agam meningkat menjadi Rp. 1.534.849.060.997. Secara persentase peningkatan realisasi belanja daerah pada tahun 2024 sebesar 7,82 persen.

Grafik III.3 :
Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Kabupaten Agam



Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kab. Agam 2025

Jika dilihat berdasarkan kelompok belanja, proporsi terbesar dari realisasi belanja berada pada kelompok belanja operasi. Porsi belanja daerah dari kelompok belanja operasi yang mencapai Rp. 1.210.859.160.870 atau 78,89 persen dari total belanja daerah. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 139.007.975.111 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 3.157.818.416. Sementara realisasi belanja transfer sebesar Rp. 181.824.106.600.

Anggaran belanja daerah pada APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.630.294.453.379 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.331.857.645.463, Belanja Modal sebesar Rp. 91.618.407.935, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.400.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 198.418.399.981.

Belanja daerah tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp. 1.743.718.892.970,25, naik dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.13.424.439.591 atau 6,95 persen. Peningkatan tersebut disebabkan kebutuhan OPD yang meningkat dan dengan mempertimbangkan tren belanja dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan berada pada kelompok belanja Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada belanja operasi kenaikan terjadi dari Rp. 1.331.857.645.463 menjadi Rp. 1.382.093.465.777,73 ditahun 2026. Sementara pada belanja modal kenaikan terjadi dari Rp. 91.618.407.935 menjadi Rp. 154.787.027.211,52. Perkembangan realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 s/d 2027 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
BELANJA	1.423.593.832.548	1.534.849.060.997	1.630.294.453.379	1.743.718.892.970,25	1.778.593.270.829,66
Belanja Operasi	1.094.309.908.640	1.210.859.160.870	1.331.857.645.463	1.382.093.465.777,73	1.409.735.335.093,28
Belanja Pegawai	658.623.944.707,0	750.224.137.285,0	871.809.842.034,0	887.952.043.403,64	905.711.084.271,71
Belanja Barang dan Jasa	408.308.346.658,0	388.176.440.957,0	434.606.305.616,0	458.834.934.562,09	468.011.633.253,33
Belanja Hibah	22.589.467.275,0	66.843.582.628,0	18.010.497.812,0	25.335.487.812,00	25.842.197.568,24
Belanja Bantuan Sosial	4.788.150.000,0	5.615.000.000,0	7.431.000.000,0	9.971.000.000,00	10.170.420.000,00
Belanja Modal	155.560.100.788,0	139.007.975.111,0	91.618.407.935,0	154.787.027.211,52	157.882.767.755,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.094.397.013,0	29.175.409.504,0	27.995.338.637,0	27.043.212.559,00	27.584.076.810,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.344.516.876,0	24.250.418.079,0	8.532.774.646,0	29.564.922.255,52	30.156.220.700,63
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.837.983.105,0	79.222.627.499,0	49.385.900.139,0	92.646.056.384,00	94.498.977.511,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.283.203.794,0	5.488.641.329,0	5.479.394.513,0	5.532.836.013,00	5.643.492.733,26
Belanja Modal Aset Lainnya	-	870.878.700,0	225.000.000,0	-	-
Belanja Tidak Terduga	6.304.959.225,0	3.157.818.416,0	8.400.000.000,0	8.420.000.000,00	8.588.400.000,00
Belanja Tidak Terduga	6.304.959.225,0	3.157.818.416,0	8.400.000.000,0	8.420.000.000,00	8.588.400.000,00
Belanja Transfer	167.418.863.895,0	181.824.106.600,0	198.418.399.981,0	198.418.399.981,00	202.386.767.980,62
Belanja Bagi Hasil	-	-	6.443.749.581,0	6.443.749.581,00	6.572.624.572,62
Belanja Bantuan Keuangan	167.418.863.895,0	181.824.106.600,0	191.974.650.400,0	191.974.650.400,00	195.814.143.408,00

Mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, belanja daerah diarahkan pada peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah diarahkan melakukan beberapa strategi, antara lain :

1. Memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan;
2. Menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur;
3. Memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan,
4. Merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah diantaranya : ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana.

Merujuk pada ketentuan di atas dan dalam rangka mengoptimalisasi belanja daerah, maka dirumuskan kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2026 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk

meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD Belanja transfer terdiri atas : Belanja Bagi Hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari dengan ketentuan;
 - a. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;

2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Untuk tahun 2023, realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yakni tahun 2024 sebesar Rp.48.620.328.848,02. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditahun 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00, sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar Rp. 47.620.328.848,02. Pada tahun 2025 Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp. 56.976.410.207,69 dengan rincian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 57.976.410.207,69 dan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000. Sementara pada tahun 2026 diproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar 5.000.000.000,- Realisasi dan proyeksi pembiayaan sampai dengan tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut;

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan tahun 2023 sampai tahun 2027

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
Penerimaan Pembiayaan	65.301.635.421	48.620.328.848	57.976.410.207	6.000.000.000	6.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.301.635.421	48.620.328.848	57.976.410.207	6.000.000.000	6.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000,0	1.000.000.000,0	1.000.000.000,0	1.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000,0	1.000.000.000,0	1.000.000.000,0	1.000.000.000
Pembiayaan Netto	65.301.635.421	47.620.328.848	56.976.410.207	5.000.000.000	5.000.000.000

Arah kebijakan pembiayaan dalam pengelolaan belanja tahun 2026:

1. Optimalisasi terhadap beberapa pungutan yang menjadi hak pemerintah pada periode sebelumnya yang telah menjadi piutang daerah.
2. Melakukan analisis terhadap beberapa perusahaan daerah yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD maupun dalam proses pembangunan di Kabupaten Agam dikaitkan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi Rencana kerja dan pendanaan kegiatan dan program yang merupakan implementasi/penjabaran dari prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi capaian RKPD sampai dengan tahun 2024, dan proyeksi capaian tahun 2025. Disamping itu juga memperhatikan target kinerja makro daerah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan target awal RPJPD Tahun 2025-2045.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Bab 5 RKPD ini selanjutnya di implementasikan dalam program kegiatan prioritas.

Penyusunan pagu indikatif Program/kegiatan didasarkan pada pertimbangan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Tahun 2026 serta pengawalan terhadap kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 antara lain prioritas hasil musrenbang kecamatan, arahan pokok pokok pikiran DPRD dan kegiatan strategis yang mendukung langsung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Daerah.

Pagu indikatif tahun 2026 berpedoman kepada arah kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab III dokumen RKPD ini, serta mempertimbangkan anggaran tahun berjalan. Khusus alokasi dana untuk program kegiatan yang direncanakan didanai dengan Dana Alokasi Khusus, maka besarnya mempedomani anggaran tahun 2024. Sementara untuk rincian usulannya disesuaikan dengan lokasi prioritas yang diusulkan dalam Aplikasi KRISNA.

Rekapitulasi dan rumusan rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 menurut OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Agam secara lengkap disajikan dalam matrik terlampir.

Tabel V.1

REKAPITULASI BELANJA PADA RKPD KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

Diharapkan dengan mempedomani rancangan program kegiatan dan pagu indikatif ini dapat menjawab permasalahan dan isu yang terjadi dalam penyusunan KUA dan PPAS nantinya. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan

yang solusinya tidak dalam bentuk struktur program kegiatan dengan anggaran yang jelas, namun lebih kepada kebijakan daerah ataupun membutuhkan *supporting* dari Pemerintah Pusat ataupun provinsi, seperti : permasalahan kekurangan guru dan tenaga medis, maka diperlukan analisa dan pertimbangan mendalam terhadap kebutuhan tenaga guru dan tenaga medis ini untuk pengajuan formasi pengangkatan pegawai baru dan tergantung kepada kemampuan keuangan pusat untuk penambahan pegawai, dalam hal ini daerah tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai. Demikian juga dengan kekurangan tenaga penyuluh dan tenaga teknis lainnya.

Selengkapnya matrik Program dan Kegiatan pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel V.2

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	663.514.407.228,90
2	Dinas Kesehatan	189.173.199.646,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah	68.709.974.000,00
4	Puskesmas Tiku	1.981.944.802,00
5	Puskesmas Muaro Putuih	998.052.873,00
6	Puskesmas Manggopoh	3.128.967.000,00
7	Puskesmas Lubuk Basung	3.832.018.922,00
8	Puskesmas Bawan	2.253.036.394,00
9	Puskesmas Batu Kambing	1.526.733.867,00
10	Puskesmas Pasar Ahad	1.747.838.397,00
11	Puskesmas Maninjau	2.644.032.000,00
12	Puskesmas Koto Alam	2.639.220.000,00
13	Puskesmas Palembayan	1.788.080.229,00
14	Puskesmas Matur	2.521.931.881,00
15	Puskesmas IV Koto	2.638.993.029,00
16	Puskesmas Malalak	1.285.620.200,00
17	Puskesmas Padang Luar	2.539.828.950,00

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
18	Puskesmas Sungai Pua	2.558.983.244,00
19	Puskesmas Lasi	2.402.710.230,00
20	Puskesmas biaro	3.439.426.889,00
21	Puskesmas Baso	3.162.720.000,00
22	Puskesmas Padang Tarok	1.456.080.000,00
23	Puskesmas Magek	2.076.859.000,00
24	Puskesmas Pakan Kamis	2.782.299.809,00
25	Puskesmas Kapau	1.201.081.987,00
26	Puskesmas Palupuh	1.937.575.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	152.168.523.909,32
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.576.533.673,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.895.437.609,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.694.671.818,80
31	Dinas Sosial	5.772.557.959,00
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.500.501.213,00
33	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.395.262.807,75
34	Dinas Lingkungan Hidup	21.526.878.082,27
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.305.287.545,60
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	8.383.374.760,50
37	Dinas Perhubungan	27.001.533.373,50
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.066.432.850,24
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.215.226.797,60
40	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.219.000.666,59
41	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.981.887.252,30
42	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	19.788.729.382,50
43	Dinas Pertanian	36.755.817.524,10

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
44	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	11.941.742.093,30
45	Bagian Hukum	271.065.750,00
46	Bagian Organisasi	564.325.685,00
47	Bagian Perekonomian	372.904.736,00
48	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	927.888.852,00
49	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	495.602.599,00
50	Bagian Sumber Daya Alam	216.685.135,30
51	Bagian Umum	14.175.151.187,00
52	Bagian Tata Pemerintahan	522.214.019,00
53	Bagian Kesejahteraan Rakyat	26.969.079.091,00
54	Bagian Perencanaan dan Keuangan	16.444.680.139,18
55	Bagian Administrasi Pembangunan	331.852.275,00
56	Sekretariat DPRD	44.441.223.972,00
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.648.168.540,00
58	Badan Pendapatan Daerah	10.833.437.919,00
59	Badan Keuangan dan Aset Daerah	214.101.569.628,00
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.377.912.806,00
61	Inspektorat Daerah	10.742.693.869,00
62	Kecamatan Baso	1.823.821.238,80
63	Kecamatan Ampek Angkek	2.408.838.873,00
64	Kecamatan Candung	1.922.004.208,00
65	Kecamatan Tilatang Kamang	2.144.360.153,70
66	Kecamatan Kamang Magek	1.987.756.659,20
67	Kecamatan Palupuh	1.810.118.355,90
68	Kecamatan Banuhampu	2.470.445.030,90
69	Kecamatan Sungai Pua	1.826.127.840,70
70	Kecamatan IV Koto	1.972.508.718,00

NO	NAMA SUB UNIT	PAGU
71	Kecamatan Matur	2.045.465.908,00
72	Kecamatan Palembayan	1.909.315.817,00
73	Kecamatan Tanjung Raya	2.278.900.721,40
74	Kecamatan Lubuk Basung	2.085.792.635,70
75	Kecamatan Ampek Nagari	2.124.073.039,00
76	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.077.980.092,50
77	Kecamatan Malalak	1.996.049.912,00
78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.267.862.667,30
	TOTAL	1.743.718.892.970,25

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. AGAM
TAHUN 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					663.514.407.228,90								6.968.952.000.000,00					
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					659.948.479.358,90								6.965.892.000.000,00					
1	1	01	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-		-	659.948.479.358,90								6.965.892.000.000,00					
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	563.842.976.126,00							-	575.287.000.000,00					
1	01	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	0,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		300.000.000,00					
1	01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	01	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	01	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	01	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS	-			100 %	560.115.702.440,00	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		570.130.000.000,00					
1	01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																570.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5128 Orang/bulan	560.001.102.440,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		570.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	01	01	01	2.02	0007	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	114.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	01	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	-			100 %	676.868.741,00	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		810.000.000,00					
1	01	01	01	2.06	0001	Penvediaan Komoponen Instalasi																	

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	14.021.780,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	138.999.361,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.395.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	474.452.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.158.745,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	925.000.000,00	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.058.745,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	2.810.952.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	2.930.000.000,00	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	244.998.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	29.350.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.536.604.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	139.294.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			192.000.000,00	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	71.250.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	44.044.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	95.855.503.232,90							-		6.390.380.000.000,00	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah Dasar	-			100 % 100 %	61.009.898.330,90				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			556.700.000.000,00	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	274.794.368,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0				16 0	2.077.020.198,70	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	214.614.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				33 Paket	2.405.694.500,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	250.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1165 Orang	1.200.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				441 Orang	199.999.960,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				441 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				441 Satuan Pendidikan	46.504.350.000,00	-		DAK NON FISIK-BOS REGULER	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			48.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5000 Paket	2.211.552.094,10	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	2.177.002.210,10	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				441 Satuan Pendidikan	326.671.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				32 Ruang	1.649.150.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-					3500 Peserta Didik	1.515.050.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peningkatan Pelayanan Pada Sekolah Menengah Pertama Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama	-					100 % 100 %	21.297.966.001,00	-			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		24.750.000.000,00			
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								1 Unit	799.999.740,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun																			
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								1 Ruang	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun																			
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								5 Ruang	1.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun																			
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium								1 Ruang	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun																			
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								5 Unit	1.329.793.231,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun																			
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								3 Unit	253.971.660,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																			
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah								1 Paket	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia																			
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																				
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia							2 Paket	164.501.500,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																				

							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					1667 Peserta Didik	1.000.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					250 Peserta Didik	150.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					150 Orang	400.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					136 Orang	137.499.870,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					68 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					69 Satuan Pendidikan	16.773.200.000,00	-		DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			17.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					68 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					5 Ruang	2.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					3000 Paket	150.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	Persentase Peningkatan Layanan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini					100 % 100 %	10.178.244.181,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			5.804.200.000.000,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					1 Unit	624.999.780,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																	
						Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					30 Paket Paket	1.701.045.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					534 Orang	339.999.750,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					383 Satuan Pendidikan	49.999.950,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					383 Satuan Pendidikan	5.662.200.000,00	-		DAK NON FISIK-BOP PAUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			5.800.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1 Ruang	899.999.701,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					500 Paket	100.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	800.000.000,00	-		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Yang Terbina Persentase peningkatan layanan pendidikan kesetaraan	-				100 % 100 %	3.369.394.720,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-			4.730.000.000,00	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					16 Satuan Pendidikan	3.099.400.000,00	-		DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	

[illegible]

						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				800 Orang	1.185.700.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
						0				0 0	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	1.100.000.000,00					-		100.000.000,00	
	2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sanggar/Group Kesenian Tradisi di Kabupaten Agam	-			256 sanggar	1.100.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-	100.000.000,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	1.100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	215.454.930,00					-		250.000.000,00	
	2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam	-			70 CB	215.454.930,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-	250.000.000,00	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya														
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				52 Objek	215.454.930,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	1.014.772.240,00					-		2.210.000.000,00	
	2	22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum di Kabupaten Agam	-			100 %	1.014.772.240,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-	2.210.000.000,00	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				5 Unit	304.429.800,00	-	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.085.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			14.394.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	142.384.535,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			189.065.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	66.306.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			94.782.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	222.448.386,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			355.480.378,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	157.625.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			52.592.000,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	27.905.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			28.109.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	129.720.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			24.483.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	-			100 %	7.406.445.689,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			7.601.302.868,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	442.601.689,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			486.861.858,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.963.844.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			7.114.441.010,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan					1 Unit	500.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1 Unit	150.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					9 Paket	8.552.179.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			11.645.379.400,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-			29 layanan	39.266.637.320,00	-			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		39.317.490.100,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					9528 Orang	28.596.290,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					9095 Orang	29.196.150,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					8662 Orang	28.591.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					33979 Orang	29.792.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					38241 Orang	27.967.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					219800 Orang	29.578.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		55.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					73430 Orang	60.554.000,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			91.890.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12680 Orang	28.284.440,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3623 Orang	28.257.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					1302 Orang	28.422.960,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					11800 Orang	207.191.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					11734 Orang	29.303.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	10.454.360,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Laporan Dokumen	41.968.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	75.175.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			90.430.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	436.712.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

[illegible]

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				161 Orang	48.466.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen Dokumen	933.485.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		943.485.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji															
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	15.263.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin praktek mandiri klinik dan rumah sakit yang diusulkan dan sesuai ketentuan	-				100 %	34.998.600,00	-		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	235.000.000,00	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinnnya				20 tempat praktek Unit	21.001.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				15 Puskesmas Unit	13.997.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	-				100 %	1.183.390.000,00					-		1.045.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pembinaan pemanfaatan Aplikasi SDM Kesehatan	-				79,69 %	24.500.000,00	-		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	45.000.000,00	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	24.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang	-				7 pelatihan	1.158.890.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	1.000.000.000,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				183 Orang	1.158.890.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan dan pemenuhan standar perizinan toko obat dan apotek	-				82 %	641.268.000,00						-		660.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang diawasi sesuai	-				45 sarana	86.020.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		90.000.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				1 Dokumen	86.020.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimtek keamanan pangan	-				120 pelaku usaha	274.949.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		280.000.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				1 Dokumen	274.949.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Post Market pada Industri Rumah Tangga pada produk Makanan dan Minuman Rumah Tangga yang beredar	-				12 %	280.299.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		290.000.000,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-				70 Unit	280.299.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-				1 Buah	234.963.800,00						-		0,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-				100 %	234.963.800,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		0,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-				2 Dokumen Dokumen	234.963.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah							68.709.974.000,00								96.340.858.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							68.709.974.000,00								96.340.858.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							68.709.974.000,00								96.340.858.000,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				100 Persen	66.340.258.000,00						-		76.340.858.000,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan RSUD Lubuk Basung	-				100 Persen	75.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Penanggungjawab Pengelola Keuangan di RSUD Lubuk Basung	-		76.490.000,00	

1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			12 Laporan	75.890.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Penanggungjawab Pengelola Keuangan di RSUD Lubuk Basung	-	76.490.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pelayanan RSUD Lubuk Basung.	-			100 Persen	1.264.368.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Pegawai yang mengikuti Seleksi ASN dari PTT dan Tenaga Kontrak, serta Tenaga Alih Daya / Outsourcing dari PTT dan Tenaga Kontrak.	-	1.264.368.000,00			
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	1.264.368.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Pegawai yang mengikuti Seleksi ASN dari PTT dan Tenaga Kontrak, serta Tenaga Alih Daya / Outsourcing dari PTT dan Tenaga Kontrak.	-	1.264.368.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan di RSUD	-			100 Persen	65.000.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Pegawai RSUD Lubuk Basung dan Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RSUD Lubuk Basung.	-	75.000.000.000,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	65.000.000.000,00	-		PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan derajat Kesehatan masyarakat	Pegawai RSUD Lubuk Basung dan Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RSUD Lubuk Basung.	-	75.000.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
15	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit	-			1 Unit	2.369.716.000,00							-	20.000.000.000,00			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di RSUD	-			100 Persen	2.369.716.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	RSUD Lubuk Basung	-	20.000.000.000,00			
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-			0 Unit	0,00	-		DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	RSUD Lubuk Basung	-	15.000.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-			1 Unit	2.369.716.000,00	-		DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	RSUD Lubuk Basung	-	5.000.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
						Puskesmas Tikau	-				1.981.944.802,00	-							-	1.924.633.282,00		

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	21.450.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			24.000.000,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	22.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			25.000.000,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					5 Orang	2.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.300.000,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	88.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	128.040.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					6 Orang	1.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	2.250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	1.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
1		02		02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	7.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS TIKU	
18	1		02		05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen kemitraan dan pemberdayaan masyarakat undefined	-				1 Dokumen undefined undefined	2.960.000,00							-			0,00		

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-				100 %	2.960.000,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-				12 Dokumen	2.960.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS TIKU		
					Puskesmas Muaro Putuih							998.052.873,00										532.052.873,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							998.052.873,00										532.052.873,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							998.052.873,00											532.052.873,00	
19	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-				100 %	532.052.873,00							-			532.052.873,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan RSUD dan Puskesmas	-				100 %	532.052.873,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			532.052.873,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-				1 Unit Kerja	532.052.873,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			532.052.873,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		
20	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASTARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	-				18 Unit Paripurna	466.000.000,00							-			0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				15 Layanan	466.000.000,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-				120 Orang	11.550.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-				1353 Orang	7.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-				21 Orang	8.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-				250 Orang	18.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-				250 Orang	18.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS MUARO PUTUIH		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	193.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	8.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	6.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	7.460.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					3748 Orang	5.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	80.440.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	104.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					12 Orang	700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	4.150.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	2.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MUARO PUTUIH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																				

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	9.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			10.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	12.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			13.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	22.450.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			23.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					5000 Orang	12.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			13.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	132.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			133.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	158.880.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			159.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3 Dokumen	3.969.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					5 Orang	250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			300.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	2.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.200.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	9.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			10.000.000,00	PUSKESMAS MANGGOPOH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

[illegible]

						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					301 Orang	5.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			5.940.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	269.414.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			296.355.400,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	2.250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.475.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	16.350.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			17.985.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	29.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			32.230.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1200 Orang	6.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			6.600.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	127.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			140.745.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	158.720.400,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			174.592.440,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12 Dokumen	3.969.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.365.900,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	6.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			7.645.000,00	PUSKESMAS LUBUK BASUNG
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	73.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	115.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					5 Orang	200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	6.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	1.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	8.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
29	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-					1 Dokumen	1.200.000,00						-	0,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-					100 Persen	1.200.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam	-	0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12 Dokumen	1.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kab. Agam		0,00	PUSKESMAS BAWAN
					Puskesmas Batu Kambang								1.526.733.867,00							1.000.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.526.733.867,00							1.000.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	29.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	8.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					92 Orang	8.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	91.650.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	127.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang	100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	14.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	10.350.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBING	
32	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-					100 %	4.000.000,00							-			0,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-					100 %	4.000.000,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		-	0,00		

1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	4.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS BATU KAMBIING
					Puskesmas Pasar Ahad							1.747.838.397,00										0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	0,00	
33	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-				100 %	1.212.984.397,00								-		0,00	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan RSUD dan Puskesmas	-				100 %	1.212.984.397,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		-	0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 DOKUMENT Unit Kerja	1.212.984.397,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
34	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	-				18 Unit paripurna	528.483.500,00								-		0,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-				15 Ilayanan	528.483.500,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		-	0,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						289 Orang	38.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						3500 Orang	19.150.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						88 Orang	3.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						77 Orang	6.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	159.820.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0016	Penzelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahyraea																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	3.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	10.550.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	12.102.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					10 Orang	2.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	104.786.500,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	125.525.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					5 Orang	2.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	8.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	1.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	31.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PASAR AHAD

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	161.720.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	3.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	8.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	15.150.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1000 Orang	6.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	91.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	114.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang	200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	1.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MANINJAU
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																				

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	3.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	18.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	21.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					4229 Orang	3.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	71.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	109.440.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	3.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	6.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS KOTO ALAM
40	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-					1 Dokumen	4.860.000,00									-	0,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-					100 %	4.860.000,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		-	0,00		

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	2.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.400.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	13.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			13.300.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	16.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			16.100.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1684 Orang	5.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			5.800.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	105.050.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			105.050.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	126.120.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			26.120.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					712 Orang	1.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.800.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	13.350.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			13.350.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	2.620.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.620.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan					12 Dokumen	37.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			37.000.000,00	PUSKESMAS PALEMBAYAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	134.565.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	3.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	15.950.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	10.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					27 Orang	2.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	95.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	141.484.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	3.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	1.555.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
46	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		1 Dokumen	13.921.000,00							-		0,00		
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.921.000,00		-				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		0,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	13.921.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MATUR
							Puskesmas IV Koto					2.638.993.029,00									2.903.502.332,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.638.993.029,00									2.903.502.332,00		
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.638.993.029,00									2.903.502.332,00		
47	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-		100 %	1.990.093.029,00							-		2.189.102.332,00		
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan RSUD dan Puskesmas	-		100 %	1.990.093.029,00		-			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		2.189.102.332,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.990.093.029,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.189.102.332,00		PUSKESMAS IV KOTO
48	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan grade akreditasi puskesmas	-		18 Unit Paripurna	646.200.000,00							-		711.400.000,00		
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-		14 Layanan	646.200.000,00		-			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		711.400.000,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				349 Orang	16.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			18.500.000,00		PUSKESMAS IV KOTO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4069 Orang	29.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			32.200.000,00		PUSKESMAS IV KOTO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				69 Orang	1.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.100.000,00		PUSKESMAS IV KOTO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					278 Orang	10.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			11.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	283.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			312.500.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						12 Dokumen	1.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	16.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			18.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	16.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			18.500.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						4483 Orang	1.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.100.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	117.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			129.700.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	144.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			159.100.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi						12 Dokumen	2.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			3.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						12 Dokumen	900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000,00	PUSKESMAS IV KOTO
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

[illegible]

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					95 Orang	7.000.000,00			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	173.082.500,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	2.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	5.650.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	16.970.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
							Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					34 Orang	6.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	71.275.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	91.002.200,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	3.540.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	4.049.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																					
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan					12 Dokumen	2.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK		
52	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-				1 Dokumen	1.891.500,00								-		0,00				
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-				100 %	1.891.500,00		-				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		0,00				
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																					
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	1.891.500,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS MALALAK			
					Puskemas Padang Luar												2.539.828.950,00							2.666.819.898,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												2.539.828.950,00							2.666.819.898,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2.539.828.950,00							2.666.819.898,00		
53	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-				100 %	1.886.988.950,00								-		1.981.338.398,00				
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Puskemas	-				100 %	1.886.988.950,00		-				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		1.981.338.398,00				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																					
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.886.988.950,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.981.338.398,00		PUSKESMAS PADANG LUAR		
54	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskemas	-				18 Unit Paripurna	628.430.000,00								-		659.851.500,00				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-				15 Layanan	628.430.000,00		-				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		659.851.500,00				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																					
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					477 Orang	33.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			35.280.000,00		PUSKESMAS PADANG LUAR		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																					
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					8938 Orang	38.050.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			39.952.500,00		PUSKESMAS PADANG LUAR		
1	02	02	2.02	0007	Penzeelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																					

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					9042 Orang	10.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			11.340.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					62 Orang	15.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			15.750.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					986 Orang	27.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			28.770.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	151.590.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			159.169.500,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 dokumen Dokumen	1.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.575.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	28.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			29.400.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	12.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			13.440.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					8500 Orang	21.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			22.470.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	74.220.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			77.931.000,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	140.270.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			147.283.500,00	PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			

						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	1.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			1.050.000,00		PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	1.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.785.000,00		PUSKESMAS PADANG LUAR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	71.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			74.655.000,00		PUSKESMAS PADANG LUAR
55	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-			1 Dokumen	24.410.000,00								-	25.630.000,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			100 %	24.410.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		25.630.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	24.410.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			25.630.000,00		PUSKESMAS PADANG LUAR
					Puskesmas Sungai Pua																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
56	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-			100 Persen	1.870.823.244,00								-	0,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan RSUD dan Puskesmas	-			100 Persen	1.870.823.244,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		0,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.870.823.244,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS SUNGAI PUA
57	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	-			18 unit Paripurna	683.720.000,00								-	0,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-			15 layanan	683.720.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					370 Orang	33.150.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00		PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3606 Orang	27.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					34 Orang	800.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					603 Orang	10.750.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	275.610.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	400.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	23.500.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	28.900.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
					Jumlah Orang dengan Masalah kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					110 Orang	2.000.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	115.350.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	158.960.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			0,00	PUSKESMAS SUNGAI PUA
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																

[illegible]

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					351 Orang	40.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			44.000.000,00	PUSKESMAS LASI
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						3565 Orang	45.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			50.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						52 Orang	12.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			14.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						204 Orang	20.350.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			22.500.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	269.040.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			300.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						12 Dokumen	3.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			4.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	8.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			9.500.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	7.100.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			8.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						1500 Orang	21.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			23.800.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	142.550.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			158.000.000,00	PUSKESMAS LASI	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	159.850.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			176.000.000,00	PUSKESMAS LASI		
1	02	02	2.02	0042			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			650.000,00	PUSKESMAS LASI		
1	02	02	2.02	0044			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	2.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.500.000,00	PUSKESMAS LASI		
1	02	02	2.02	0046			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.000.000,00	PUSKESMAS LASI		
1	02	02	2.02	0047			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	3.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.000.000,00	PUSKESMAS LASI		
61	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah dokumen kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-			1 Dokumen	3.450.000,00							-			4.000.000,00		
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			100 %	3.450.000,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.000.000,00			
1	02	05	2.03	0001			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	3.450.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.000.000,00	PUSKESMAS LASI		
							Puskesmas biaro						3.439.426.889,00										3.014.579.577,00		
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.439.426.889,00										3.014.579.577,00		
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.439.426.889,00										3.014.579.577,00		
62	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-			100 %	2.740.526.889,00								-			3.014.579.577,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan RSUD dan Puskesmas	-			100 %	2.740.526.889,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-				3.014.579.577,00		
1	02	01	2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.740.526.889,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-				3.014.579.577,00	PUSKESMAS BIARO	
63	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	-			18 Unit Paripurna	693.200.000,00								-		0,00		

[illegible]

[illegible]

						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100% Unit Kerja	2.462.900.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		2.462.900.000,00	PUSKESMAS BASO
66	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	-		18 Unit Paripurna	694.100.000,00					-		694.100.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-		15 Layanan	694.100.000,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	694.100.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				319 Orang	42.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		42.600.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1902 Orang	53.350.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		53.350.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	9.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		9.000.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				138 Orang	20.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		20.800.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	179.920.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		179.920.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	9.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		9.400.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	8.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		8.600.000,00	PUSKESMAS BASO
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	29.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			29.300.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	7.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			7.200.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	118.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			118.300.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	160.980.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			160.980.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	2.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.000.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	10.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			10.300.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				12 Dokumen	2.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.750.000,00	PUSKESMAS BASO	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				12 Dokumen	39.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			39.600.000,00	PUSKESMAS BASO	
67	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah dokumen kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-				1 Dokumen	5.720.000,00							-			5.720.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-				100 %	5.720.000,00					Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			5.720.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	5.720.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			5.720.000,00	PUSKESMAS BASO	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	10.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			12.500.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	22.650.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			22.650.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					2200 Orang	5.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			5.800.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	89.450.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			89.450.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							0					0 0	128.975.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			128.975.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	12.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			12.700.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	13.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	7.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			8.300.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	
70	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	-					6 buah	2.655.000,00							-			2.655.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-					100 %	2.655.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		-		2.655.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12 Dokumen	2.655.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			2.655.000,00	PUSKESMAS PADANG TAROK	

	1					Puskesmas Magek						2.076.859.000,00							2.284.544.900,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.076.859.000,00							2.284.544.900,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.076.859.000,00							2.284.544.900,00			
71	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-			100 %	1.483.779.000,00						-	1.632.156.900,00			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan	-			100 %	1.483.779.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	1.632.156.900,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.483.779.000,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		1.632.156.900,00	PUSKESMAS MAGEK	
72	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan grade akreditasi puskesmas Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas Indeks Kualitas Layanan Kesehatan	-			12 unit utama 18 Unit Paripurna Akreditasi Utama 13	589.125.000,00						-	648.037.500,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah	-			14 Layanan	589.125.000,00			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	648.037.500,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	47.260.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		51.986.000,00	PUSKESMAS MAGEK	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3306 Orang	28.400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		31.240.000,00	PUSKESMAS MAGEK	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				99 Orang	7.700.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		8.470.000,00	PUSKESMAS MAGEK	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				88 Orang	8.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		9.130.000,00	PUSKESMAS MAGEK	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	145.380.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		159.918.000,00	PUSKESMAS MAGEK	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		825.000,00	PUSKESMAS MAGEK	

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	6.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	28.800.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	20.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					67 Orang	13.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	110.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	158.720.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	400.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
						0					0 0	2.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	1.900.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	6.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			0,00	PUSKESMAS PAKAN KAMIS

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	119.695.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			131.664.500,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	8.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			9.460.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	19.300.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			21.230.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	11.600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			12.700.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					60 Orang	4.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			4.400.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	58.150.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			63.965.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	133.280.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			146.608.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang	200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			300.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	7.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			7.700.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	600.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			660.000,00	PUSKESMAS KAPAU
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			

[illegible]

						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					340 Orang	5.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat			5.500.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	117.700.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		135.400.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	4.100.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		4.500.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	15.000.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		16.500.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	8.700.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		9.500.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					2413 Orang	7.000.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		7.700.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	120.008.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		13.200.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	151.869.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		167.000.000,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					25 Orang	192.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		211.200,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	6.036.000,00	-			DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		6.639.600,00	PUSKESMAS PALUPUH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

[illegible]

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	68.670.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	348.096.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan daerah	-				100 %	144.567.920,00	-			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00		
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					9 Unit	144.567.920,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	940.366.500,00	-			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00		
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	254.816.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	685.550.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran	-				100 %	736.850.000,00	-			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00		
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					25 Unit	605.710.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					19 Unit	49.240.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

[illegible]

							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					2 Liter/Detik	4.605.845.971,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
86	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-		7.404.598.000,00						-			0,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		7.404.598.000,00			-		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																	
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan					10 M³/Hari	244.975.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun					2 M³/Hari	7.159.623.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
87	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-		13.542.310.888,00						-			0,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		13.542.310.888,00			-		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					2000 M	13.042.310.888,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara					100 Meter	500.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
88	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-		8.292.186.400,12						-			0,00	

[illegible]

						Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	63.249.271.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun				20 Meter	4.998.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
91	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	131.395.000,00					-		200.000.000,00	
	1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	131.395.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	200.000.000,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				80 Orang	131.395.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
92	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	248.665.000,00					-		1.400.000.000,00	
	1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	1.150.000.000,00	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDRTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	98.665.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	250.000.000,00	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				40 Layanan	98.665.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						20.238.475.000,00							0,00	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						20.238.475.000,00							0,00	

93	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-		-				-		20.238.475.000,00						-		0,00		
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-				-		20.238.475.000,00					Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		0,00		
																				Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelesrtarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-				
5	05	02	2.03	0011		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					20 Dokumen				20.238.475.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
																				Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelesrtarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-				
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									14.576.533.673,00								0,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									14.386.533.673,00								0,00		
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									14.386.533.673,00								0,00		
94	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-				3.571.645.967,00							-	0,00		
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-				3.100.001.935,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan				2.835.734.935,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan				264.267.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-				305.393.486,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket				67.381.386,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket				34.538.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				
1	04	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan				223.474.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
																				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				

	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		92.974.546,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan		48.664.546,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12 Laporan		44.310.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		73.276.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							12 Unit		40.250.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							20 Unit		22.610.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit		30.416.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
95	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-					-		405.005.206,00										-	0,00		
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-					-		205.005.200,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																						
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah							1 Dokumen		30.000.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																						
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen		175.005.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00		
	1	04	02	2.03	0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			0 Unit Rumah	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			0 Unit Rumah	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0007 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah			0 Rumah Tangga	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00		
	1	04	02	2.04	0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	-	200.000.006,00	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00		
	1	04	02	2.05	0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1 Dokumen	200.000.006,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	0,00	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00		
	1	04	02	2.06	0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara			1 Sistem Informasi	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
96	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	710.000.000,00	-		-	-	0,00		

1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	0,00			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			-	710.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-	-	0,00	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			32 Unit Rumah	540.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1 Unit	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			1 Ha	120.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
97	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-		-	6.300.000.000,00					-	-	0,00	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	6.300.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-	-	0,00	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			309 Unit Rumah	6.300.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
98	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-		-	3.399.882.500,00					-	-	0,00	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-		-	3.399.882.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			0 Dokumen	204.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]

102	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Operasional Unit kerja SKPD	-					100 Persen	4.955.230.132,00							-				4.910.000.000,00		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa ASN dan tersedianya operasional administrasi perkantoran	-					100 Persen	3.456.514.502,00							-				3.050.000.000,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							37 Orang/bulan	3.418.814.502,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					3.000.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							12 Laporan	37.700.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					50.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	37.700.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					50.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya operasional administrasi perkantoran	-					100 Persen	237.366.430,00					-	-					430.000.000,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							1 Paket	5.999.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					20.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	5.999.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					20.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							3 Paket	43.049.130,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					70.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	43.049.130,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					70.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							2 Paket	11.674.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					40.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	11.674.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					40.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan	176.643.700,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					300.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	176.643.700,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					300.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	-					100 Persen	70.000.000,00					-	-					80.000.000,00		
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	70.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					80.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					100 Persen	972.569.200,00					-	-					1.050.000.000,00		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12 Laporan	44.643.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					50.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	44.643.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					50.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							12 Laporan	927.926.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.000.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	927.926.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-							1.000.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-					100 Persen	218.780.000,00					-	-					300.000.000,00		
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							1 Unit	36.615.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					40.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1 Unit	36.615.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					40.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Roda2 : 7 ; Roda4 :7 Unit	149.345.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					200.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Roda2 : 7 ; Roda4 :7 Unit	149.345.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					200.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							12 Unit	12.980.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					30.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Unit	12.980.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					30.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							2 Unit	19.840.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					30.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	19.840.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					30.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
103	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	-					91 persen	940.207.477,00											1.530.000.000,00		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	-					79,77 persen	31.859.900,00					-	-					40.000.000,00		
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																					

							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-				100 Orang	31.859.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 persen	642.322.277,00			-	-	-	-			1.030.000.000,00			
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota																			
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-				15 Unit	302.309.723,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota																			
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-				100 Orang	64.051.150,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-				1 Dokumen	150.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-				1 laporan	21.919.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-				5 Kawasan	104.041.504,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			100 persen	218.148.500,00			-	-	-	-			370.000.000,00			
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-				47 Dokumen	50.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-				800 Orang	128.148.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				800 Orang	40.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen JIUPASNA yang disusun berdasarkan kerusakan akibat bencana	-			100 Persen	47.876.800,00			-	-	-	-			90.000.000,00			
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalakan	-				1 Kegiatan	47.876.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran											17.694.671.818,80							19.867.747.066,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAKIL YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											17.694.671.818,80							19.867.747.066,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											17.694.671.818,80							19.867.747.066,00	
104	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-			100 persen	12.655.209.593,80						-			12.711.354.846,00			
	1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-			100 %	10.554.947.224,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar	-			9.671.792.021,00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						104 Orang/bulan	10.502.537.224,80	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		9.619.382.021,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	52.410.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		52.410.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-						100 %	200.550.175,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar	-	366.665.025,00		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	13.830.510,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		15.755.510,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							3 Paket	43.559.305,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		67.799.315,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							2 Paket	13.604.360,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		25.048.200,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan	129.556.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		258.062.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan daerah	-						100 %	17.261.990,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar	-	80.982.000,00		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							3 Unit	17.261.990,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar		80.982.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-						100 %	1.733.234.204,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar	-	2.389.404.800,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	107.410.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			127.410.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.625.824.204,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			2.261.994.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang kondisioni baik	-				100 %	149.216.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar	-		202.511.000,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	27.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			27.115.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					24 Unit	81.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			81.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	9.120.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			18.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	31.096.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	ASN Satpol PP Damkar			75.876.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
105	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-			-	-	1.277.659.200,00							-		2.593.378.600,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-				100 %	1.204.136.400,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-		2.362.159.000,00	
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPhngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja					12 Orang	150.014.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					450 laporan	804.260.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			1.248.064.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Keterteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Keterteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	150 Laporan	153.361.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	259.445.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	12 Laporan	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	-	4 Unit	76.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	629.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	-	100 %	73.522.800,00	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	231.219.600,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	12 Laporan	34.050.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	156.219.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	12 Laporan	39.472.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
106	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar (%) Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar	-	100 % 100 persen	3.761.803.025,00	-				-	4.563.013.620,00		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti	-	100 %	3.101.601.000,00	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	3.445.438.620,00	
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-	12 Dokumen	148.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	15 Unit	2.163.001.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-	1.945.438.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0021	Penvelenzearaan Keria Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penangngulangan, Penvelamatan Kebakaran dan Penvelamatan Non Kebakaran		-			-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-		

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokumen	36.575.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan	754.025.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			1.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase objek retribusi apar terlayani	-					100 %	10.868.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-		17.500.000,00	
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					1 Dokumen	10.868.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			17.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Sattakar yang terbentuk	-					46 kelompok	441.058.825,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-		700.075.000,00	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					300 Orang	57.612.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04	0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana																		
							Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran					1 Unit	234.408.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			550.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04	0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran					92 Desa/Kelurahan	149.038.325,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti	-					100 %	208.275.200,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam	-		400.000.000,00	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia					180 Laporan	131.540.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masrakat Kabupaten Agam			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal					2 Laporan	19.216.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masarakat Kabupaten Agam			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																				
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis						21 Unit	57.519.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Masarakat Kabupaten Agam			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
					Dinas Sosial												5.772.557.959.00							6.553.554.545.00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												5.772.557.959.00							6.553.554.545.00	
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												5.772.557.959.00							6.553.554.545.00	
107	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-					100 persen	4.053.825.327,00						-			4.550.217.002,00			
	1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-					100 %	3.005.602.849,00					-	-	-		3.171.251.137,00			
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						29 Orang/bulan	2.953.292.849,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		3.113.710.137,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan																				
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	52.310.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		57.541.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	-					100 %	224.911.458,00						Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-	-	404.166.336,00			
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	4.220.050,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		7.475.926,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	56.407.708,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		103.257.820,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						3 Paket	21.562.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		28.532.790,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	142.721.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	-		264.899.800,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan Daerah	-					100 %	44.899.100,00					-	-	-		64.146.500,00			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						7 Unit	44.899.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		64.146.500,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					100 %	674.071.920,00					-	-	-		789.566.030,00			
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	49.258.920,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		54.308.430,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	624.813.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-				735.257.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik	-			100 %	104.340.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-			121.086.999,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	22.730.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-			24.326.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30 Unit	54.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-			49.900.972,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					33 Unit	11.490.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-			19.359.527,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	16.120.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
108	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	-				71 persen 71 Persen	885.955.640,00	-			-			-			970.497.560,00	
							Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan	-									-			-				
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) kabupaten/kota	-				71 %	885.955.640,00	-			-		Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	-			970.497.560,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					7 Lembaga	300.477.430,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota				330.525.580,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0011	Pengenalannya, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalannya, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial					30 Orang	49.371.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota				48.016.380,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya					16 Orang	156.107.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota				173.955.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi																		
							Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi					130 Orang	379.999.810,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota				418.000.000,00	DINAS SOSIAL
109	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-				85 persen	278.171.450,00				-			-			336.883.273,00	
							Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	-									-			-				
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	-				70 %	255.364.250,00				-			-			323.055.673,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					144 Orang	57.821.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-			77.073.370,00	DINAS SOSIAL

1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					144 Orang	41.100.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			35.640.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Orang	27.893.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			33.311.795,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	4.140.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			6.303.600,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					60 Orang	11.505.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			18.960.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					180 Orang	42.710.250,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			51.252.600,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	2.029.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			3.494.400,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Orang	210.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					60 Orang	39.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			46.800.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	2.978.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Orang	25.215.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			43.046.628,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0014	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Orang	760.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			1.193.280,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	-				100 %	22.807.200,00			-	-	-	-			13.827.600,00	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Orang	16.770.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			3.600.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	6.037.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			10.227.600,00	DINAS SOSIAL
110	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang dilakukan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-				100 persen	236.739.770,00							-		343.417.440,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-				100 %	236.739.770,00				-	-	-	-		343.417.440,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					7965 Orang	236.739.770,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			343.417.440,00	DINAS SOSIAL
111	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban Bencana Alam dan Bencana sosial yang terpenuhi kebutuhannya	-				100 persen	308.771.672,00							-		341.621.910,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	-				100 %	188.350.881,00				-	-	-	-		245.356.830,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					800 Orang	99.831.856,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			132.306.990,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					800 Orang	99.831.856,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			132.306.990,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	207.232.599,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			234.426.588,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-				100 Persen	58.115.081,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		69.894.102,00	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					24 Unit	29.806.251,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			29.869.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	28.308.830,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 Persen	393.935.000,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		368.735.000,00	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	144.919.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			119.719.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	249.016.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			249.016.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	-				100 Persen	150.654.000,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		150.325.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	22.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			22.115.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					63 Unit	94.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			94.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit	14.210.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			14.210.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	19.944.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
114	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-				16,02 persen	586.726.000,00								640.000.000,00	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	-				55 OPD	63.524.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		90.000.000,00	
2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)					55 Lembaga	63.524.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	-				60 orang	223.202.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		250.000.000,00	

2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-					1 Lembaga	23.202.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	-					60 Orang	200.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	-					19 Organisasi	300.000.000,00	-			Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga pemedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	-					2 Lembaga	300.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
115	2	08	03		PROGRAM PERLUNDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan Komperhensif	-					100 persen	110.911.451,00							-		126.401.451,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang ditangani	-					10 kasus	50.000.000,00	-			Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-			50.000.000,00	
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	-					20 Lembaga	50.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLUNDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	-					3 layanan	26.401.451,00	-			Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-			26.401.451,00	
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-					10 orang	26.401.451,00	-		DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLUNDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			26.401.451,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIP	-					50 orang	34.510.000,00	-			Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-			50.000.000,00	
2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	-					40 orang	34.510.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLUNDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
116	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga	-					83,3 persen	277.000.000,00							-		220.000.000,00	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok LPLPKK yang mendapatkan pembinaan	-					20 kelompok	277.000.000,00	-			Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-			220.000.000,00	
2	08	04	2.02	0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Lembaga	70.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Lembaga	70.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK

						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota					1 Lembaga	207.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
117	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	-				100 persen	32.002.000,00						-			40.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	-				15 buku	32.002.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		40.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-				1 Dokumen	32.002.000,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
118	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-				80 persen	172.442.000,00						-			258.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-				10 Organisasi	82.546.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		158.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				10 Lembaga	82.546.000,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah APSAI	-				1 Lembaga	89.896.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		100.000.000,00	
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	-				1 Lembaga	89.896.000,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	-				100 persen	330.192.457,00						-			372.483.549,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Bimtek	-				200 Orang	51.500.000,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		51.500.000,00	
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTA Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KTA Kewenangan Kab/Kota	-				200 Orang	51.500.000,00			DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			51.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan	-				50 Orang	244.182.457,00			-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		251.963.549,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-				50 Orang	40.443.908,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			48.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Anak Korban yang mendapat Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-				50 Orang	90.000.000,00			DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota					50 Orang	16.475.000,00			DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			16.475.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					50 Orang	97.263.549,00	-		DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			97.263.549,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD PPA	-				1 Lembaga	34.510.000,00				-		Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		69.020.000,00			
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek					55 Orang	34.510.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-		Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			69.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												8.094.363.029,00							8.146.300.000,00	
120	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	-				69,65 persen	288.484.117,00								-		314.600.000,00			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	-				27 OPD	46.684.117,00				-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		71.000.000,00			
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																				
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					16 Satuan Pendidikan	46.684.117,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			71.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	-				50000 KK	241.800.000,00				-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		243.600.000,00			
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																				
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					16 Laporan	88.200.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																				
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					12 Dokumen	153.600.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			153.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
121	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	-				12,5 persen	5.173.073.912,00								-		5.198.695.000,00			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	-				7000 Orang	1.339.497.912,00				-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		1.365.119.000,00			
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KB/BPK																				
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KB/BPK					12 Laporan	94.378.912,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																				
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					12 Laporan	722.720.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			722.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																				
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					160 Laporan	319.950.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-		Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			319.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

2		14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-		1 Dokumen	67.750.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		67.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		35 Organisasi	134.699.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		134.699.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumah PKB yang Dibina	-		25 Orang	582.000.000,00	-		-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	582.000.000,00	
2		14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		11640 Orang	582.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		582.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontracepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Akseptor yang dilayani	-		8000 Orang	2.848.016.000,00	-		-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	2.848.016.000,00	
2		14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontracepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontracepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		2 Laporan	23.277.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		23.277.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontracepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontracepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		2000 Orang	899.989.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		899.989.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-		104 Unit	1.900.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		1.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.03	0008	Pembiinan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		3 Laporan	24.750.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		24.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	-		76 Dokumen	403.560.000,00	-		-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	403.560.000,00	
2		14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		76 Kampung	403.560.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		403.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	-		56,12 Persen	2.632.805.000,00	-		-		-		2.633.005.000,00	
2		14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembiinan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK-R dan UPPKS yg dibina	-		51 kelompok	184.205.000,00	-		-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-	184.405.000,00	
2		14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-		1 Laporan / Dokumen	19.205.000,00	-	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-		19.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		-				-		-		-			

							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	60.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			60.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	105.000.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina				371 kelompok	2.448.600.000,00	-		-	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		2.448.600.000,00	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	1.113.000.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.113.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Jumlah keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	1.335.600.000,00	-		DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			1.335.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
123	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN				90 %	3.897.323.669,75	-			-			-		6.620.000.000,00	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/ Bulan	3.002.878.225,19	-		-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		3.070.000.000,00	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.935.253.225,19	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	67.625.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				1 Paket 1 Laporan 1 Paket	180.790.395,57	-		-	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		290.000.000,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.474.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.922.475,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.619.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	121.773.920,57	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	-			2 Unit	7.903.730,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		-	20.000.000,00	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.903.730,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan 12 Laporan	580.841.724,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		-	700.000.000,00	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	86.375.724,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	494.466.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana, prasarana dan peralatan operasional yang mendapat pemeliharaan (kendaraan roda 4, alat berat, AC, printer, komputer dan gedung kantor)	-			6 Paket	124.909.594,99				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		-	240.000.000,00	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	115.679.594,99	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.680.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.550.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
124	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penurunan Jumlah Konsumsi Beras	-			108 kg/kapita/tahun	716.744.357,00							-		1.300.000.000,00	

	2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah masyarakat penerima subsidi Jumlah pelaksanaan percontohan sistem terpadu sayur dan ikan Jumlah pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan pangan pokok strategis Jumlah pengadaan bantuan KRPL stunting Jumlah pengadaan bantuan ternak ayam Jumlah pengadaan tanaman cabe merah dan cabe rawit untuk gerakan tanam dan pengendalian infiasi	-				2500 penerima 1 Kegiatan 12 kali 1 Paket 2 Paket 10000 batang	363.889.760,00			-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			700.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1 Laporan	98.244.940,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					130 Keluarga	249.307.320,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis					1 Laporan	16.337.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan (beras) Jumlah pengadaan cadangan pangan (gula pasir) Jumlah pengadaan cadangan pangan (minyak goreng)	-				10 ton 2 ton 1,5 ton	240.950.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		350.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					13,5 Ton	240.950.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal Jumlah pengadaan bantuan pembentukan Nagari B2SA Jumlah sosialisasi, promosi & edukasi B2SA	-				1 kali 1 paket 1 kali	111.904.597,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		250.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Laporan	111.904.597,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
125	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Nagari Rawan Pangan	-				21,90 %	277.950.019,00						-			800.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan nagari	-				1 Peta	17.264.876,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		100.000.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan					1 Dokumen	17.264.876,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					668 Unit	2.274.509.039,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
128	3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			31000 ton	758.720.214,00						-			750.000.000,00	
	3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	-			100 orang	543.842.214,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-	-		350.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		-			13 Kelompok	543.842.214,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produktifitas usaha pembudidaya ikan	-			2,66 ton/unit/tahun	214.878.000,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-	-		400.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			1 Unit	100.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			2 Unit	214.778.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
129	3	25	05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Dasar	-			4 %	72.710.316,00						-			200.000.000,00	
	3	25	05	2.01			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah inspeksi lapang yang dilakukan Jumlah kelompok penerima restocking Jumlah plank himbauan	-			5 Kali 1 kelompok 1 Unit	72.710.316,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-	-		200.000.000,00	
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota		-			30 Pelaku Usaha	72.710.316,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
130	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	-			348 Orang	300.316.341,00						-			400.000.000,00	
	3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Verifikasi tanda daftar usaha pemasaran hasil perikanan	-			8 kali	5.677.000,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-	-		50.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		-			1 Dokumen	5.677.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Saku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bimbingan sertifikasi GMP Jumlah KK penerima paket olahan ikan untuk keluarga beresiko stunting Jumlah rakor forikan Jumlah sarana yang tersalurkan Sosialisasi gemarikan yang diselenggarakan	-			2 kali 200 KK 1 kegiatan 11 unit 5 kali	294.639.341,00				-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-	-		350.000.000,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			29140 Ton	84.614.702,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	26.040.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							0						0 0	259.448.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN DLH			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	-						100 persen	88.044.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH	-		0,00		
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							50 Unit	50.215.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							10 Unit	37.829.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						100 persen	940.222.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH	-		0,00		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							3 Laporan	346.800.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	ASN DLH			0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				

[illegible]

							Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					1 dokumen Dokumen	187.126.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
133	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Air	-				50 persen 55,79 point	1.233.439.986,27					-			0,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	-				3 kegiatan	1.132.614.931,27			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam	-		0,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							3 kelompok Dokumen	52.142.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan															
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							40 Lokasi	99.706.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)															
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							700 SHU Dokumen	980.766.331,27	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan															
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan	-				1 kegiatan	100.825.055,00		-		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-		0,00	
2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota							4 kali goro M2	100.825.055,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota															
134	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	-				29 persen	1.547.983.061,00						-		0,00	

[illegible]

							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					3 Rekomendasi Dokumen	69.999.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kelompok Usaha dan /atau Kegiatan di Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							10 0	100.109.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kelompok Usaha dan /atau Kegiatan di Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
137	2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	-					undefined undefined	0,00						-		0,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	0,00		-		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-		0,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							2 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						1 Lembaga	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
138	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	-					100 persen	44.999.875,00						-		0,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh	-					4 Entitas	44.999.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam	-		0,00	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						4 Entitas	44.999.875,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
139	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian sengketa/kasus Tindak pidana Lingkungan Hidup	-					100 persen	30.082.000,00						-		0,00	

2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat terkait PPLH yang ditindaklanjuti	-				6 kasus	30.082.000,00				-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam	-		0,00		
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola						100% Pengaduan	30.082.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
140	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	-				65 persen	12.363.656.724,00							-		0,00		
	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	-				65 persen	12.363.656.724,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam	-		0,00			
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat						16 Kelompok	64.460.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						2 Unit	4.910.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan						3 Dokumen	200.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLT5a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLT5a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						100 Ton	7.189.196.724,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Agam			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							5.305.287.545,60									3.778.800.000,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.305.287.545,60										3.778.800.000,00	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.305.287.545,60										3.778.800.000,00	
141	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	3.740.013.645,60							-		3.638.800.000,00		

2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.929.935.043,60					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	2.955.000.000,00	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.880.025.043,60	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	2.900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	49.910.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	191.432.634,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	210.000.000,00	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.564.636,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	51.512.998,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	64.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	116.355.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							549.895.968,00						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		439.000.000,00	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-				12 Laporan		102.716.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		76.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-				12 Laporan		447.179.968,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		363.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Baranga Milik Daerah yang Terpelihara	-	-				100 %		68.750.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		34.800.000,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-				1 Unit		27.730.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		10.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-				12 Unit		23.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-				54 Unit		18.020.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-				1 Unit		0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
142	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-				-		1.413.612.400,00								-	-		0,00	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-				-		1.413.612.400,00					-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-				12 Dokumen		1.413.612.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
143	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-				-		23.110.000,00								-	-		50.000.000,00	

	2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	23.110.000,00	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	12 Dokumen	23.110.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
144	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	128.551.500,00					-	90.000.000,00	
	2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	128.551.500,00		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	90.000.000,00	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1 Laporan	128.551.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari					8.383.374.760,50						1.105.586.751.508,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.383.374.760,50						1.105.586.751.508,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.383.374.760,50						1.105.586.751.508,00	
145	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	5.027.580.555,00					-	3.196.751.508,00	
	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non PNS	-	-	100 %	2.258.369.684,00		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	2.140.751.508,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	19 Orang/bulan	2.206.059.684,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	2.094.661.508,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	10 Laporan	52.310.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	46.090.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum di OPD	-	-	100 %	331.385.355,00		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	376.000.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	5.105.980,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	80.097.695,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	29.489.480,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	216.692.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	155.546.380,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		110.000.000,00	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					40 Unit	24.996.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					14 Unit	130.549.980,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	2.111.781.136,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		410.000.000,00	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	210.311.136,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.901.470.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-				100 %	170.498.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		160.000.000,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.615.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	47.115.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	23.060.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	71.708.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
146	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-	-	-	128.440.000,00	-		-		-	-	150.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksanaannya Penyelenggaraan Penataan Nagari	-	-	-	105 Nagari	128.440.000,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa															
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				13 Desa	128.440.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
147	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	-	-	-	100.010.000,00	-		-		-	-	390.000.000,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama antar Nagari	-	-	-	7 Nagari	100.010.000,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	390.000.000,00	
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	100.010.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
148	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	773.684.300,00	-		-		-	-	1.220.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	28.488.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	184.006.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			255.000.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	-					100 Persen	59.103.660,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		120.000.000,00	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	59.103.660,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					95 Persen	1.428.302.103,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		2.351.681.896,00	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	108.574.444,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			95.967.896,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.319.727.659,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.255.714.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Pemenuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Perkantoran	-					95 Persen 90 Persen 100 Persen	215.643.050,00				-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		238.793.050,00	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					19 Unit	137.953.050,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			105.233.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							0					0 0	27.690.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		43.560.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	50.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
151	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	-					75 persen	19.483.163.580,50								-		21.900.281.690,00	

[illegible]

							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					12 Laporan	49.425.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																				
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					1 Dokumen	441.057.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Jaringan Trayek Presentase Penetapan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Presentase Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	-				80 Persen 70 persen 70 persen	36.070.000,00	-			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	78.000.000,00				
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	36.070.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			78.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Performa Lalu Lintas	-				66 Persen	435.020.000,00	-			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	420.000.000,00				
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Laporan	435.020.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
152	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Terwujudnya Transportasi ASDP	-				70 Persen	50.000.000,00	-						-			100.000.000,00			
	2	15	03	2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terwujudnya Transportasi ASDP	-				66 Persen	50.000.000,00	-			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	100.000.000,00				
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																				
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					12 Laporan	50.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
					Dinas Komunikasi dan Informatika								9.066.432.850,24											4.561.242.018,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.066.432.850,24											4.561.242.018,00	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								8.936.038.850,24											4.561.242.018,00	
153	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				95 persen	4.684.313.729,84	-						-			3.561.242.018,00			
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-				100 persen	3.778.465.995,84	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	3.561.242.018,00				
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						33 Orang/bulan	3.725.355.995,84	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				3.561.242.018,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	53.110.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-					100 persen	357.869.717,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-		0,00	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	4.993.675,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	29.144.882,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	20.000.260,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	303.730.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-					100 persen	118.940.935,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-		0,00	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						12 Unit	11.261.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						8 Unit	91.679.835,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				

[illegible]

							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					17 Komunitas	77.827.514,40	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																			
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					3 Permohonan	20.156.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis					35 Media	1.430.508.675,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
155	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-				50 persen	2.723.232.931,00							-			1.000.000.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE	-				95 persen	2.723.232.931,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-		1.000.000.000,00	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota																			
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					44 OPD Perangkat Daerah	248.901.797,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																			
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE					4 Aplikasi	654.305.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintahan Daerah																			
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali					1 Laporan	1.094.911.534,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet																			
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas					20 Perangkat Daerah	685.113.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																			
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas					1 Dokumen	40.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
156	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	-				43 OPD	123.463.000,00							-			0,00	

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	27.608.060,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		42.289.710,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	16.388.250,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		23.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	164.242.812,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		216.681.843,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan Daerah	-				100 Persen	155.649.663,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam	-	264.054.200,00		
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					36 Unit	72.523.450,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		184.054.200,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					9 Unit	83.126.213,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		80.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	259.660.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam	-	257.664.000,00		
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	45.600.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		50.160.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	214.060.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam		207.504.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-				100 Persen	158.730.250,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam	-	291.368.000,00		
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	29.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam			31.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	26.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam			29.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	13.380.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam			14.718.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	89.850.250,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam			215.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
159	2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	-			71 Persen	5.000.000,00							-		104.500.000,00	
2	17	03	2.01				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan memenuhi standar	-			60 Persen	5.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Koperasi di Kabupaten Agam	-		104.500.000,00	
2	17	03	2.01	0004			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				3 Unit Usaha	5.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Koperasi di Kabupaten Agam			104.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
160	2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar	-			89 Persen	113.809.000,00							-		228.800.000,00	
2	17	05	2.01				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan koperasi	-			89 Persen	113.809.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Koperasi di Kabupaten Agam	-		228.800.000,00	
2	17	05	2.01	0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				65 Orang	113.809.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Koperasi di Kabupaten Agam			228.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
161	2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan Dilindungi	-			60 Persen	775.639.005,70							-		937.200.000,00	

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	58.675.264,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.112.270,36	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.718.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	105.606.298,00	-		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	110.000.000,00		
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	38.212.063,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	67.394.235,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kebutuhan air, listrik, telepon, internet kantor, tenaga administrasi, tenaga K3, tenaga keamanan, tenaga operator komputer, tenaga informasi dan teknologi dan tenaga supir	-		100 %	489.569.404,02	-		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	500.000.000,00		
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.543.404,02	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	399.026.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-		100 %	248.960.000,00	-		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	260.000.000,00		
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya				2 Unit	38.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40 Unit	44.860.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	165.600.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
165	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya persentase realisasi investasi	-				10 %	130.665.000,00							-		230.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan pemberian dan evaluasi insentif/kemudahan penanaman modal	-				2 Badan Usaha	70.545.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan	-		80.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					1 Dokumen	40.545.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah					30 Dokumen	30.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen studi kelayakan	-				1 Dokumen	60.120.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		150.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1 Dokumen	60.120.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
166	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya persentase realisasi investasi	-				10 %	60.440.000,00							-		60.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kemitraan UMK dengan Usaha Besar	-				2 Kemitraan	60.440.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		60.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					2 Dokumen	60.440.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
167	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Meningkat	-				86 %	197.105.000,00							-		210.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Terbit Tepat Waktu	-				86 %	197.105.000,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		210.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					8000 Pelaku Usaha	94.200.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	

							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					200 Pelaku Usaha	40.010.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																															
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					25 Kegiatan Usaha	62.895.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
					Dinas Arsip dan Perpustakaan												3.981.887.252,30											4.562.335.595,00								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			3.981.887.252,30											4.562.335.595,00	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																			110.581.790,00											275.000.000,00	
168	2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	-				75 persen	99.920.990,00							-			240.000.000,00												
	2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-				0,79 persen	30.852.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-			50.000.000,00													
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																															
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		-				8 Perpustakaan	30.852.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			50.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN												
	2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	-				82 -	69.068.490,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kabupaten Agam	-			190.000.000,00													
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																															
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		-				10 Perpustakaan	7.084.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kabupaten Agam			40.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN												
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		-				6 Orang	26.593.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kabupaten Agam			50.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN												
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																															
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		-				23 Lokus	35.390.790,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Kabupaten Agam			100.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN												
169	2	23	03				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-				1 buah	10.660.800,00							-			35.000.000,00												
	2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	-				1 Naskah	10.660.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-			35.000.000,00													

2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan					1 Eksemplar	10.660.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			35.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
170	2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-			100 Persen	3.692.418.733,30							-		3.907.335.595,00	
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	3.039.547.004,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		3.042.412.595,00	
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25 Orang/bulan	3.002.507.004,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.002.412.595,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	37.040.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	-			100 persen	145.123.777,30				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		208.500.000,00	
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.950.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.500.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	22.482.360,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	7.138.617,30	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	112.552.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			145.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan Daerah	-					100 persen	24.502.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				80.000.000,00	
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-					4 Unit	4.915.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				30.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-					10 Unit	19.587.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				50.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					100 persen	411.590.952,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				421.423.000,00	
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-					36 Laporan	120.473.952,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				130.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-					10 Laporan	291.117.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				291.423.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	-					100 persen	71.655.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				155.000.000,00	
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-					7 Unit	38.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				45.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-					10 Unit	6.580.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				10.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-					2 Unit	27.075.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				100.000.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
171	2	24	02			PRDGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	-					550 orang	178.886.729,00						-				380.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	333.466.440,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pegawai Dispora			350.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	782.496.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pegawai Dispora			782.496.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				4 Kegiatan	346.167.600,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	BMD	-		435.000.000,00		
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	24.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	BMD			40.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	35.450.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	BMD			65.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					46 Unit	27.930.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	BMD			30.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	258.787.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	BMD			300.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
173	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirusaha muda	-				90 persen	1.909.191.182,00								-		1.000.000.000,00		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase pembinaan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	-				17.5 persen	1.309.939.982,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemuda dan Kepemudaan	-		500.000.000,00			
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																				
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					1 Kegiatan	150.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemuda dan Kepemudaan			350.000.000,00		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																				

							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda								80 Orang	114.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemuda dan Kepemudaan			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																					
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia								2 Unit	1.045.439.982,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemuda dan Kepemudaan			0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	-							16.66 persen	599.251.200,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Wirasaha muda	-		500.000.000,00		
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																					
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								150 Orang	599.251.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Wirasaha muda			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
174	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Event diselenggarakan dan diikuti	-							15 Event	7.461.453.348,50							-		3.950.000.000,00		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada jenjang Pendidikan	-							11 kegiatan	3.699.743.199,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat dan Pemda	-		1.000.000.000,00		
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																					
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia								8 Unit	3.699.743.199,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Masyarakat dan Pemda			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/kota	-							8 Kejuaraan	660.202.949,50				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	cabang olahraga dan atlet prestasi	-		750.000.000,00		
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								2 Kegiatan	159.236.920,50	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	cabang olahraga dan atlet prestasi			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																					

							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	500.966.029,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	cabang olahraga dan atlet prestasi		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga	-			5 kegiatan	1.684.010.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Atlet Berprestasi	-	800.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	256.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Atlet Berprestasi		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahraga Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				488 Orang	1.427.110.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Atlet Berprestasi		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	-			2 Pembinaan	850.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Organisasi Olahraga	-	800.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota				1 Dokumen	850.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Organisasi Olahraga		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	-			3 Pembinaan	567.497.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	kelompok olahraga Masyarakat	-	600.000.000,00	
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	567.497.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	kelompok olahraga Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
175	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	-			85 persen	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat	-			17 Organisasi	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Organisasi Pramuka	-	300.000.000,00	

2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	200.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Organisasi Pramuka		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.509.396.800,00								7.050.000.000,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.509.396.800,00								7.050.000.000,00	
176	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang dikelola	-		47 wisata	3.789.894.100,00							-	5.350.000.000,00	
	3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategi pariwisata	-		2 Kegiatan	600.000.000,00				-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-	-	600.000.000,00	
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata	-		3 kegiatan	3.189.894.100,00				-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Objek wisata dan pokdarwis	-	4.750.000.000,00	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	100.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Objek wisata dan pokdarwis		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				6 Unit	2.658.098.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Objek wisata dan pokdarwis		3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	431.795.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Objek wisata dan pokdarwis		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
177	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	-		12 persen	517.857.400,00							-	1.350.000.000,00	
	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata daerah	-		10 Event	517.857.400,00				-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	wisatawan, pelaku usaha pariwisata	-	1.350.000.000,00	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	51.867.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	wisatawan, pelaku usaha pariwisata		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	384.240.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	wisatawan, pelaku usaha pariwisata		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	81.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	wisatawan, pelaku usaha pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA
178	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	-		25 persen	201.645.300,00							-	350.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian					1 Varietas Unggul Baru (VUB)	150.397.625,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-				453.218.220,00	-			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		700.000.000,00	
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak		Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak					3 Dokumen	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak									-			-						
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar					12 Laporan	453.218.220,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-				1.209.118.900,00	-			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		500.000.000,00	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					20 Ekor	1.209.118.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
181	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	-				16.208.391.865,00							-		1.700.000.000,00	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-				3.908.851.900,00	-			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		950.000.000,00	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					12 Laporan	3.540.734.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan					500 Ha	340.000.000,00	-		DBH SAWIT	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota									-			-						
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola					2 Dokumen	28.117.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-				12.299.539.965,00	-			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		750.000.000,00	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									-			-						

							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani															
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	8.870.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit															
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	350.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya															
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani															
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	3.018.759.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan															
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	60.780.965,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
182	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	650.020.296,00					-		0,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-	0,00	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				5 wilayah Laporan	72.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	427.363.541,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-	0,00	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium															
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				5 wilayah Laporan	89.999.872,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	337.363.669,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-		0,00	DINAS PERTANIAN

	3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-					-	150.656.755,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		0,00	
	3	27	04	2.04	0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	87.567.055,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0005 Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dbina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi				4 Unit Usaha	63.089.700,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
183	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	100.552.300,00				-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		250.000.000,00	
	3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	100.552.300,00				-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		250.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	100.552.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
184	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	1.068.058.291,00				-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		1.000.000.000,00	
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.068.058.291,00				-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		1.000.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	1.068.058.291,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
					Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan						11.941.742.093,30										7.482.997.260,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.868.188.176,00										4.940.800.000,00	
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4.868.188.176,00										4.940.800.000,00	
185	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-			90 persen	4.066.868.096,00								-		3.990.800.000,00	
	2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	-			100 persen	3.346.344.260,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-	-		3.063.000.000,00	
	2	07	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.286.168.260,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-	-		3.020.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	60.176.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-	-		43.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	-			92 persen	263.556.501,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			355.300.000,00	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.243.040,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			5.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	34.322.461,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.827.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	214.164.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			285.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	-		100 persen	32.574.945,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			75.000.000,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	32.574.945,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	-		100 persen	321.742.390,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			380.000.000,00	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.732.390,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	201.010.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

[illegible]

							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					1200 Orang	49.384.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Pencari Kerja			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
188	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	-				30 Perkara	361.468.100,00							-		0,00			
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur dan skala upah, Serikat Pekerja/Buruh dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	-				40 laporan	6.783.600,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-		0,00			
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-				40 Laporan	6.783.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah dan diselesaikan	-				30 Perkara	354.684.500,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-		0,00			
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan	-				30 Perkara	26.755.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-				1 Lembaga	3.483.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																			
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-				4133 Orang	324.445.600,00	-		DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Perusahaan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.073.553.917,30										2.542.197.260,00		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.258.270.699,30											1.347.197.260,00	
189	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	-				8,40 persen	13.881.600,00							-		23.000.000,00			

	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitas penerbitan SIUP, TDG bagi pelaku usaha	-				100 persen	13.881.600,00				-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			23.000.000,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-				80 Dokumen	13.881.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
190	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana perdagangan yang memenuhi standar	-				2,63 persen	2.002.606.000,00							-			1.109.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan yang direnovasi	-				100 persen	1.997.238.000,00				-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			1.100.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-				1 Unit	1.997.238.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase terbina nya pengelola sarana distribusi perdagangan	-				100 persen	5.368.000,00				-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			9.000.000,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-				10 Dokumen	5.368.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
191	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakvtat	-				5 pasar	186.717.499,30							-			133.500.000,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah fasilitas bazar murah dan operasi pasar	-				2 kali	186.717.499,30				-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			133.500.000,00	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-				12 Laporan	186.717.499,30	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			133.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
192	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang bertanda Tera Sah	-				24 Persen	55.065.600,00							-			81.697.260,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang yang telah di Tera / Tera Ulang	-				500 Unit	55.065.600,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pedagang Pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-			81.697.260,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-				500 Unit	55.065.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pedagang Pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya			81.697.260,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
193	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Laju Jumlah IKM dan Nilai Produksi	-				2 Persen	4.815.283.218,00							-			1.195.000.000,00	
													4.787.569.736,00										1.125.000.000,00	

3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM	-				2 Person	4.787.569.736,00				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			1.125.000.000,00			
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-				2 Dokumen	88.296.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-				2 Dokumen	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-				4 Dokumen	4.339.085.636,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-				5 Dokumen	360.187.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	-			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
194	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	-			60 Person	27.713.482,00									70.000.000,00			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Yang Terdapat Dalam SIINas	-			40 Orang	27.713.482,00				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-	-		70.000.000,00			
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-				2 Dokumen	27.713.482,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	-			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
					Bagian Hukum										271.065.750,00						143.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										271.065.750,00						143.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										271.065.750,00						143.000.000,00		
195	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-			100 persen	148.949.850,00							-		15.000.000,00			
4	01	01	2.02		persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	-				100 Person	15.890.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	-		15.000.000,00			
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-				12 Laporan	15.890.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan			15.000.000,00	BAGIAN HUKUM		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD	-			100 Person	81.599.850,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	-		0,00			
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.435.549,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.110.301,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.054.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	30.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	-	0,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.700.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	-			100 Persen	20.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	-	0,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	14.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.210.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		0,00	BAGIAN HUKUM
196	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	-			100 Persen	122.115.900,00						-	128.000.000,00	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terbib administrasi hukum yang terlaksana dengan baik	-			100 Persen	122.115.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	-	128.000.000,00	

[illegible]

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					8 Unit	10.760.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	17.724.945,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	52.190.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		48.800.000,00		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	4.800.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			4.800.000,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	47.390.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			44.000.000,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-				100 Persen	19.720.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		25.000.000,00		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya					1 Unit	16.230.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	3.490.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan tata kelola baik	-				90 Persen	314.790.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		390.000.000,00		
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					3 Dokumen	71.076.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			120.000.000,00		BAGIAN ORGANISASI
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					13 Laporan	12.350.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			12.350.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	4	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	-			100 persen	62.170.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	-		75.000.000,00				
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					3 Unit	49.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			50.000.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	12.670.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			25.000.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana dengan baik	-			100 Persen	556.242.100,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	-		580.000.000,00				
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					12 Laporan	470.835.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			470.000.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12 Laporan	70.007.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			75.000.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																				
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					33 Laporan	15.400.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kab.Agam,SemuaKecamatan,SemuaKelurahan			35.000.000,00		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
						Bagian Pengadaa Barang dan Jasa												495.602.599,00						687.740.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												495.602.599,00						687.740.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH												495.602.599,00						687.740.000,00		
201	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah	-			100 %	350.861.437,00								-		476.340.000,00			
	4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	22.180.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	25.000.000,00				
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																				

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	22.180.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	-			100 %	160.124.237,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			201.000.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	24.579.037,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			35.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.275.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	134.269.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			160.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	-			100 %	65.057.200,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			130.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	46.907.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			50.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	18.150.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			80.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	78.590.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			78.590.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	78.590.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			78.590.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	-				100 %	24.910.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			41.750.000,00	
	4		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				1 Unit	16.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			16.750.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				3 Unit	8.160.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
202	4		01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana	-				100 %	144.741.162,00				-			-		211.400.000,00	
	4		01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	-				100 %	144.741.162,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			211.400.000,00	
	4		01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				1 Dokumen	104.505.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			200.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4		01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				1 Dokumen	40.235.262,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			11.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
							Bagian Sumber Daya Alam							216.685.135,30									275.754.051,00	
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							216.685.135,30									275.754.051,00	
	4		01				SEKRETARIAT DAERAH							216.685.135,30									275.754.051,00	
203	4		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-				100 Persen	190.640.635,30							-		239.004.099,00	
	4		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	14.250.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			15.250.000,00	
	4		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-				12 Laporan	14.250.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			15.250.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	80.100.635,30				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	129.504.099,00	
4	01	01	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket		10.246.527,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	15.499.199,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket		2.769.561,90	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	6.214.500,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan		67.084.546,40	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	107.790.400,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	76.110.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	70.610.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan		4.800.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	5.800.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		71.310.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-	-	64.810.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						20.180.000,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-				23.640.000,00			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				1 Unit	16.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			17.000.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				9 Unit	4.180.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			6.640.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
204	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana	-				100 Persen	26.044.500,00								-		36.749.952,00			
	4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pemantauan SDA yang dirumuskan	-				100 Persen	26.044.500,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-		-		36.749.952,00			
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-				1 Dokumen	8.681.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			12.249.984,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-				1 Dokumen	8.681.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			12.249.984,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-				1 Dokumen	8.681.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	-			12.249.984,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
					Bagian Umum							14.175.151.187,00												18.109.650.347,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							14.175.151.187,00												18.109.650.347,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							14.175.151.187,00												18.109.650.347,00	

205	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-				100 Persen	14.175.151.187,00					-		18.109.650.347,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	50.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	62.290.000,00	
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	50.290.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		62.290.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	-				100 Persen	2.977.656.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	4.726.099.105,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	149.704.365,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		170.644.055,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	494.610.635,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		385.414.480,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	209.761.050,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		470.040.570,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	2.123.580.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		3.700.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Daerah	-				100 Persen	1.586.308.695,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	2.787.615.205,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					4 Unit	951.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		1.600.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					70 Unit	248.463.752,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		750.699.205,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	607.800.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			864.622.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	-		100 Persen	2.162.329.300,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	2.675.984.430,00		
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	389.121.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			500.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.723.208.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.115.984.430,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat Daerah	-		100 Persen	1.135.090.610,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	1.353.552.379,00		
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	599.269.850,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			588.483.615,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	431.635.880,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			434.924.784,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	104.184.880,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			330.143.980,00	BAGIAN UMUM	
						Bagian Tata Pemerintahan						522.214.019,00										761.854.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						522.214.019,00										761.854.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						522.214.019,00										761.854.000,00	
206	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-			100 Persen	408.253.019,00							-		446.354.000,00		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	102.185.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			92.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-		100 Persen	16.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			18.400.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				2 Unit	13.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			17.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			1.400.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
207	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah, serta Kerjasama Daerah yang terlaksana	-		100 Persen	113.961.000,00							-		315.500.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase tertib administrasi tata pemerintahan yang terlaksana	-		100 Persen	78.961.000,00			-	-	-	-	-		255.500.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	10.950.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		155.500.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	43.911.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			50.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	24.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			50.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terlaksana	-		100 Persen	35.000.000,00			-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			60.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				3 Dokumen	35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-			60.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
						Bagian Kesejahteraan Rakyat						26.969.079.091,00								26.501.478.103,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.969.079.091,00								26.501.478.103,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						26.969.079.091,00								26.501.478.103,00	
208	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-		100 Persen	781.344.263,20							-		686.600.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	46.650.000,00			-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			47.000.000,00	
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	46.650.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			47.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	62.900.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			63.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					13 Unit	8.930.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
209	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	-				100 Persen	26.187.734.827,80								-	25.814.878.103,00		
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dirumuskan	-				100 Persen	26.187.734.827,80			-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		25.814.878.103,00		
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					5 Dokumen	22.413.350.027,80	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					1 Dokumen	3.728.040.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			5.664.878.103,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas					1 Dokumen	46.344.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			150.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							Bagian Perencanaan dan Keuangan						16.444.680.139,18										15.005.350.000,00	
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						16.444.680.139,18										15.005.350.000,00	
210	4	01	01			SEKRETARIAT DAERAH							16.444.680.139,18										15.005.350.000,00	
	4	01	01	2.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-				100 Persen	16.444.680.139,18							-			15.005.350.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-				100 Persen	14.140.804.149,18				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah Pegawai ASN Sekretariat Daerah	-		12.543.850.000,00		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					100 Orang/bulan	14.100.314.149,18	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah Pegawai ASN Sekretariat Daerah			12.500.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	40.490.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah Pegawai ASN Sekretariat Daerah			43.850.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD	-				100 Persen	160.793.551,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Persentase kebutuhan operasional Sekretariat Daerah	-		212.000.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	16.250.551,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Persentase kebutuhan operasional Sekretariat Daerah			25.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	18.095.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Persentase kebutuhan operasional Sekretariat Daerah			26.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	126.448.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Persentase kebutuhan operasional Sekretariat Daerah			161.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 Persen	36.043.020,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada bagian perencanaan dan keuangan	-		37.300.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	11.050.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada bagian perencanaan dan keuangan			12.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	24.993.020,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada bagian perencanaan dan keuangan			25.100.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.165.548.908,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemenuhan kebutuhan Operasional unit kerja SKPD	-		1.257.300.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	7.200.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemenuhan kebutuhan Operasional unit kerja SKPD			7.300.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					30 Laporan	1.158.348.908,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Pemenuhan kebutuhan Operasional unit kerja SKPD			1.250.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	4.292.375,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	107.044.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			160.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00					-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.100.000,00					-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		33.000.000,00	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6.600.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			8.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	24.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.935.000,00					-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		28.000.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					3 Unit	13.615.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			22.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	8.320.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
212	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	129.197.200,00					-			-		170.000.000,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	129.197.200,00					-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		170.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	

										Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan	129.197.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			170.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
										Sekretariat DPRD						44.441.223.972,00									56.065.120.327,00	
4										UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44.441.223.972,00									56.065.120.327,00	
4	02									SEKRETARIAT DPRD						44.441.223.972,00									56.065.120.327,00	
213	4	02	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD	-			100 Persen	25.819.923.072,00								-	27.950.620.327,00	
	4	02	01	2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	3.318.695.141,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	3.326.982.684,00	
4	02	01	2.02	0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan	3.233.462.141,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.233.224.184,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0007						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	85.233.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			93.758.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-			100 Persen	485.067.022,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	715.000.000,00	
4	02	01	2.06	0001						Penyediaan Komponen Instalasi																
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.999.865,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	150.329.357,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			198.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	35.122.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	284.615.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-			100 Persen	33.586.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	120.000.000,00	

4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-				5 Unit	33.586.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	1.627.991.068,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		1.600.000.000,00		
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-				36 Laporan	279.999.068,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-				39 Laporan	1.347.992.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-				100 Persen	294.768.000,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		307.000.000,00		
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-				2 Unit	64.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				11 Unit	165.420.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				29 Unit	14.980.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				2 Unit	49.868.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	jumlah kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	-				3 kegiatan	19.569.815.841,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		21.356.637.643,00		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		-												-				

					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	18.793.936.841,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.416.637.643,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			3 Paket	526.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			680.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			45 Orang	249.379.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi	-			100 Persen	490.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		525.000.000,00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			20 Laporan	250.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			12 Paket	240.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
214	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi (%)	-		100 persen	18.621.300.900,00					-			28.114.500.000,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda yang difasilitasi	-		10 Ranperda	2.500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		3.630.000.000,00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			10 Dokumen	2.400.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			2 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat pembahasan anggaran yang diadakan	-		2 kali	594.431.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		770.000.000,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD										-				

						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				7 Dokumen	594.431.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	-			100 Persen	896.214.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	1.210.000.000,00	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	896.214.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		1.210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-			45 orang	3.020.091.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	3.799.000.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2.150.091.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		2.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	280.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		290.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	590.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		649.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	cakupan anggota DPRD yang difasilitasi dalam menghimpun aspirasi masyarakat	-			45 orang	2.570.036.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	3.305.500.000,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				7 Laporan	1.815.036.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		2.475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	755.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		830.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	-				100 Persen	9.040.528.000,00		-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		15.400.000.000,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-				10 Dokumen	9.040.528.000,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		15.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						5.648.168.540,00											6.145.948.968,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	5	01				PERENCANAAN						5.295.614.840,00											5.795.948.968,00	
215	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				100 persen	4.461.646.840,00							-	-		4.805.948.968,00	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-				100 %	3.503.480.430,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		3.597.968.968,00		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					30 Orang/bulan	3.449.530.430,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		3.542.968.968,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-					12 Laporan	53.950.000,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-				100 %	416.488.510,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		627.500.000,00		
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	9.545.610,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-					4 Paket	66.051.400,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-					2 Paket	21.580.000,00		-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

[illegible]

[illegible]

218	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	-				100 persen	352.553.700,00							-		350.000.000,00			
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-				1 Kajian	224.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		350.000.000,00			
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-				3 Laporan	224.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	-				100 %	128.553.700,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00			
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-				2 Dokumen	128.553.700,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
						Badan Pendapatan Daerah							10.833.437.919,00										6.534.500.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.833.437.919,00											6.534.500.000,00	
	5	02				KEUANGAN							10.833.437.919,00											6.534.500.000,00	
219	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-				100 %	6.672.039.894,00							-	-	1.381.000.000,00			
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	-				100 %	5.651.215.204,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				22 Orang/bulan	5.585.365.204,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-				12 Laporan	65.850.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD	-				100 %	303.509.011,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		425.000.000,00			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-				1 Paket	9.321.450,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	101.550.361,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan					2 Paket	15.975.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	176.661.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Daerah	-				100 %	24.124.849,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		80.000.000,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	24.124.849,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	531.558.830,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		590.000.000,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					25 Laporan	107.999.860,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					15 Laporan	423.558.970,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-				100 %	161.632.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		286.000.000,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					23 Unit	117.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					100 Unit	1.600.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					49 Unit	24.810.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			46.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	17.472.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
220	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	-				13.71 %	4.161.398.025,00						-			5.153.500.000,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan realisasi PAD (Berdasarkan realisasi tahun dasar 2020)	-				84.60 %	4.161.398.025,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		5.153.500.000,00		
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					2 Dokumen	18.181.100,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					1 Dokumen	126.040.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			235.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					12 Laporan	492.738.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			631.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					12 Laporan	1.970.428.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.050.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	80.097.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		

[illegible]

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.443.470,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			5.443.470,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	114.986.423,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			150.999.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	23.604.008,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			28.602.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	322.857.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			431.745.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan Daerah	-					100 Persen	17.475.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		25.276.900,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	17.475.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			25.276.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-					100 Persen	513.624.016,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		507.024.016,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	21.747.300,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			15.147.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					22 Laporan	491.876.716,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			491.876.716,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisidi baik	-					100 Persen	186.374.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		186.374.000,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					25 Unit	151.460.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			151.460.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
S	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					62 Unit	30.000.000,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			30.000.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
S	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	4.914.000,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			4.914.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Z22	S	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	-			WTP	208.752.363.481,00								-		199.254.438.381,00			
	S	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan regulasi daerah	-			6 Dokumen	1.123.100.000,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		1.450.000.000,00			
	S	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					6 Dokumen	1.123.100.000,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			1.450.000.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	S	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase proses pengelolaan belanja daerah	-			100 Persen	277.362.600,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		319.363.800,00			
	S	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					59 Dokumen	75.999.900,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			90.000.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	S	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					2804 Dokumen	201.362.700,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			229.363.800,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	S	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun	-			3 Jenis	320.239.900,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-		371.325.000,00			
	S	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					546 Laporan	31.049.900,00	-			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam			44.000.000,00		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	S	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					578 Laporan	185.817.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	83.373.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		117.325.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah															
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					1 Dokumen	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah fasilitas periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari	-				1 Paket	206.818.399.981,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-	196.843.749.581,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					12 Laporan	191.974.650.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		182.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12 Laporan	8.400.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		8.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					12 Laporan	6.443.749.581,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		6.443.749.581,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	-				1 Paket	213.261.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam	-	270.000.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1070 Dokumen	129.567.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					44 Orang	83.694.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Kabupaten Agam		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
223	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	-				87 Persen	556.691.200,00						-	624.525.000,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	54.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			45.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-					99 %	269.938.177,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		320.475.010,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							1 Paket	4.964.445,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			4.964.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						5 Paket	81.732.732,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			92.635.665,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2 Paket	33.410.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			47.867.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							12 Laporan	149.831.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			175.007.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						99 %	153.651.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		159.228.000,00	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Daerah	-					7 Unit	21.583.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							7 Unit	21.583.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							12 Laporan	54.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			45.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

	5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-											0,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		155.925.200,00			
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-					1 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					155.925.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
						Inspektorat Daerah								10.742.693.869,00													11.925.000.000,00		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								10.742.693.869,00													11.925.000.000,00		
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH								10.742.693.869,00													11.925.000.000,00		
227	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	-					100 %	9.691.215.969,00										-			10.258.000.000,00		
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-					100 %	8.014.489.653,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				7.930.000.000,00					
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					57 orang Orang/bulan	7.963.869.653,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				7.865.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH				
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-					12 Laporan	50.620.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH				
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-					100 %	272.396.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				328.000.000,00					
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Pelatihan	-					30 Orang	272.396.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				328.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH				
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD	-					100 %	322.564.246,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				552.000.000,00					
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					2 Paket	18.668.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-				15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH				
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-												-									

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	81.022.446,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		117.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.224.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	205.649.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		380.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan daerah	-				100 %	411.233.134,00			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-	620.000.000,00	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	328.227.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	34.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	48.506.134,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100% %	497.542.936,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah	-	535.000.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	249.476.936,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	248.066.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Perangkat Daerah		285.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					18 Dokumen	50.905.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan	-			100 %	191.552.400,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	300.000.000,00	
6	01	02	2.02	0001			Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				18 Laporan	24.035.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0002			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				18 Laporan	167.517.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		235.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
229	6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-			100% %	179.713.000,00							-	249.000.000,00	
6	01	03	2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase pemenuhan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	-			100 %	35.129.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	95.000.000,00	
6	01	03	2.01	0001			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	35.129.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02				Pendampingan dan Asistensi	cakupan opd pendampingan dan asistensi	-			43 Unit	144.584.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	154.000.000,00	
6	01	03	2.02	0001			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah	47.230.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		52.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	49.937.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				23 perangkat daerah	47.417.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		51.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Kecamatan Baso						1.823.821.238,80								2.086.096.000,00	

[illegible]

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.681.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	20.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			22.000.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	-					100 %	227.403.960,00	-			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			250.800.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	34.865.960,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			39.000.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	192.538.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			211.800.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisioni baik	-					100 %	31.289.000,00	-			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			45.040.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Unit	24.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			26.900.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	1.420.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.640.000,00	KECAMATAN BASO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	5.369.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			15.500.000,00	KECAMATAN BASO
231	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	-					100 persen	58.479.000,00	-				-					81.000.000,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	-				6 kegiatan	58.479.000,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			81.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-				6 Laporan	58.479.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			81.000.000,00	KECAMATAN BASO
232	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	-				100 %	5.150.000,00						-			7.425.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	-				3 kegiatan	5.150.000,00	-				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.425.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-				3 Laporan	5.150.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.425.000,00	KECAMATAN BASO
233	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	-				100 persen	2.450.000,00						-			3.850.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-				2 kegiatan	2.450.000,00	-				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.850.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				1 Dokumen	2.450.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.850.000,00	KECAMATAN BASO
234	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				100 persen	10.435.000,00						-			12.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				9 kegiatan	10.435.000,00	-				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			12.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-				8 Dokumen	3.175.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			4.600.000,00	KECAMATAN BASO
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-				1 Dokumen	7.260.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.900.000,00	KECAMATAN BASO
						Kecamatan Ampek Angkek							2.408.838.873,00									2.755.605.645,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.408.838.873,00									2.755.605.645,00	
	7	01				KECAMATAN							2.408.838.873,00									2.755.605.645,00	

235	7		01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-					100 persen	2.332.514.373,00							-		2.657.788.695,00	
	7		01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	-					100 %	1.931.468.850,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	2.124.615.737,00	
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						17 Orang/bulan	1.901.478.850,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.091.626.737,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	29.990.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			32.989.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-					100 %	179.025.283,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	269.370.021,00	
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	2.511.850,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.763.035,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	18.987.109,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.102.508,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	15.300.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			19.794.830,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	142.226.324,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			219.709.648,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7		01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-					0 %	0,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	0,00	
	7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	172.600.240,00			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			189.860.937,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	28.890.240,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			31.779.937,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7 Laporan	143.710.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			158.081.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondorsid baik	-				100 %	49.420.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		73.942.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	24.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.225.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	2.470.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.717.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	22.200.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			44.000.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
236	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	-				95 persen	53.180.000,00							-			64.900.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikordinasikan	-				7 Kegiatan	53.180.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		64.900.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	53.180.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			64.900.000,00	KECAMATAN AMPEK ANGKEK
237	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	-				100 persen	9.699.500,00							-			11.824.450,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	30.490.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.390.000,00	KECAMATAN CANDUNG	
7		01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja Kecamatan	-			100 persen	163.966.024,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			223.755.450,00		
7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.187.600,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.200.000,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	14.406.424,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			23.049.000,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	9.215.000,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			13.827.450,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	137.157.000,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			183.679.000,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan Daerah	-			100 persen	10.000.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00		
7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10.000.000,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	KECAMATAN CANDUNG
7		01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	133.518.840,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			171.200.000,00		
7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

[illegible]

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	2.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			12.610.000,00	KECAMATAN CANDUNG	
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	-				100 persen	3.790.000,00						-			13.300.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-				12	3.790.000,00		-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		13.300.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	3.790.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			13.300.000,00	KECAMATAN CANDUNG	
244	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				100 persen	5.950.000,00						-			24.280.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				7 Kegiatan	5.950.000,00		-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		24.280.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Dokumen	1.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.600.000,00	KECAMATAN CANDUNG	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	4.200.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.680.000,00	KECAMATAN CANDUNG	
						Kecamatan Tilatang Kamang																	2.478.475.162,00	
	7					UNSUR KEMILAYAHAN																	2.478.475.162,00	
	7	01				KECAMATAN																	2.478.475.162,00	
245	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	-				97 persen	1.978.590.153,70						-			2.335.180.537,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	-				100 persen	1.564.839.732,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		1.735.963.071,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	1.536.449.732,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.708.813.071,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	28.390.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			27.150.000,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG	

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-				100 persen	213.140.421,70				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			226.525.466,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.568.270,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.674.270,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.674.865,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.946.396,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.896.400,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.904.800,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	191.000.886,70	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			200.000.000,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-			100 persen	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			65.108.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			45.108.000,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000,00	KECAMATAN TILATANG KAMANG

	7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-					100 persen	172.700.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				241.524.000,00		
	7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	27.216.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				27.216.000,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	145.484.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				214.308.000,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
	7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisioni baik	-					100 persen	27.910.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				66.060.000,00		
	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						7 Unit	21.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				25.500.000,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
	7		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						16 Unit	6.410.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				11.440.000,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
	7		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				29.120.000,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
246	7		01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	-					88,56 persen	112.690.000,00						-				84.099.625,00		
	7		01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	-					3 kegiatan	112.690.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				84.099.625,00		
	7		01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						12 Laporan	112.690.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-				84.099.625,00		KECAMATAN TILATANG KAMANG
247	7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	-					100 persen	15.300.000,00						-				16.000.000,00		

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	30.740.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			35.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-		100 Persen	184.585.528,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		75.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.666.630,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			2.500.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	26.250.198,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			35.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.337.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			15.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	144.330.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			22.500.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan daerah	-		99 Persen	10.000.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		20.000.000,00	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			20.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 Persen	161.746.600,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		183.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	35.336.600,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

[illegible]

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	7.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			12.500.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
253	7	01	05				PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	5.100.000,00					-			15.000.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-			1	5.100.000,00		-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		15.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	5.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			15.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
254	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	11.500.000,00					-			20.000.000,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-			37	11.500.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		20.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	5.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
	7	01	06	2.01	0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	6.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	KECAMATAN KAMANG MAGEK
							Kecamatan Palupuh						1.810.118.355,90								629.787.320,27	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.810.118.355,90								629.787.320,27	
	7	01					KECAMATAN						1.810.118.355,90								629.787.320,27	
255	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.671.803.635,90					-			490.287.320,27	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.265.409.270,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		31.287.320,27	
	7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.236.219.270,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.287.320,27	KECAMATAN PALUPOH
	7	01	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	29.190.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	141.969.065,90				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	221.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.469.960,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	18.176.917,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.523.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		22.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	109.798.388,90	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		190.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.000.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	120.000.000,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		120.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	226.314.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	48.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.350.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		26.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	207.964.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		22.000.000,00	KECAMATAN PALUPOH

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	36.111.300,00	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	70.000.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-		-	-		-	-			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	-	-	-	-	4 Unit	27.088.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	26.000.000,00	KECAMATAN PALUPUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-		-	-		-	-			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	18 Unit	8.970.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN PALUPUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-		-	-		-	-			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1 Unit	52.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN PALUPUH
256	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	102.984.720,00	-		-		-	62.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	102.984.720,00	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	62.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	-		-	-		-	-			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	4 Laporan	102.984.720,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	62.000.000,00	KECAMATAN PALUPUH
257	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	5.725.000,00	-		-		-	17.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	5.725.000,00	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	17.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-		-	-		-	-			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	3 Laporan	5.725.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	17.000.000,00	KECAMATAN PALUPUH
258	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	5.925.000,00	-		-		-	9.500.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	5.925.000,00	-	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	9.500.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-		-	-		-	-			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BANUHAMPU
261	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	246.083.500,00					-		122.204.980,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	246.083.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	122.204.980,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-		4 Laporan	246.083.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		122.204.980,00	KECAMATAN BANUHAMPU
262	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	18.470.000,00					-		21.240.500,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	18.470.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	21.240.500,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-		5 Laporan	18.470.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		21.240.500,00	KECAMATAN BANUHAMPU
263	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	13.250.000,00					-		15.237.500,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	13.250.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	15.237.500,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-		14 Dokumen	13.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		15.237.500,00	KECAMATAN BANUHAMPU
264	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	37.492.000,00					-		43.115.800,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	37.492.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	43.115.800,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-		12 Dokumen	26.802.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		30.822.300,00	KECAMATAN BANUHAMPU
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-		1 Dokumen	10.690.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		12.293.500,00	KECAMATAN BANUHAMPU
							Kecamatan Sungai Pua					1.826.127.840,70							2.074.179.422,00	
7							UNSUR KEWILAYAHAN					1.826.127.840,70							2.074.179.422,00	
7	01						KECAMATAN					1.826.127.840,70							2.074.179.422,00	

265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				97 persen 99 persen	1.731.411.090,70							-		1.912.748.072,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	-				100 %	1.350.715.723,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	1.410.181.925,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					11 Orang/bulan	1.321.525.723,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.379.441.925,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	29.190.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.740.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-				100 %	186.109.687,70					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	257.397.815,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.679.160,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	23.525.431,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			31.420.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	6.747.125,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.977.815,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	3.900.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			4.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	149.257.971,70	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA

7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-			100 %	20.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		6.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		6.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	141.224.680,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		192.728.332,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	29.404.680,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		37.128.332,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	111.820.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		155.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-		100 %	33.361.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		46.440.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	24.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	5.537.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		11.440.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.574.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUA

266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	-				85 persen 89 persen	67.732.250,00								-				97.616.350,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikeskamen yang dikoorinasikan Jumlah kegiatan pemerintahan dikeskamen yang dikoorinasikan	-				3 kegiatan 89 %	67.732.250,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-		97.616.350,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinas/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5 Laporan	67.732.250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					97.616.350,00	KECAMATAN SUNGAI PUJA		
267	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitas kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	-				100 persen 100 persen	5.270.000,00								-			8.315.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoorinasikan	-				2 Kegiatan	5.270.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-		8.315.000,00		
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	5.270.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					8.315.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUJA		
268	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitas penyelesaian konflik di kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	-				100 persen 100 persen	1.750.000,00								-			12.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-				1 Urusan	1.750.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-		12.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					3 Dokumen	1.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUJA		
269	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	19.964.500,00								-			43.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-				-	19.964.500,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			-		43.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	13.332.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					25.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUJA		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	13.332.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-					25.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PUJA		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	203.186.360,96	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		219.931.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-			100 persentase	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	15.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		15.000.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	-			100 persentase	139.642.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	153.132.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.622.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		27.622.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	114.020.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		125.510.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-			100 persentase	34.390.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	38.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	21.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		22.500.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.840.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN MATUR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.300.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		12.500.000,00	KECAMATAN MATUR

276	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	-				85 persen 89 persen	41.532.504,64						-		45.685.755,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	-				7 kegiatan	41.532.504,64			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	45.685.755,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-				7 Laporan	41.532.504,64	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		45.685.755,00	KECAMATAN MATUR
277	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi. Persentase Fasilitasi Ketentram dan ketertiban yang di fasilitasi	-				100 persen 100 persen 98 persentase	2.550.000,00						-		3.000.000,00	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	-				7 kegiatan	2.550.000,00			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	3.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-				1 Laporan	2.550.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		3.000.000,00	KECAMATAN MATUR
278	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik di kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi. Persentase Fasilitasi Forkopimcam	-				100 persen 100 persen 90 persentase	2.500.000,00						-		3.500.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-				100 persentase	2.500.000,00			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	3.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				1 Dokumen	2.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN MATUR
279	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				-	12.400.000,00						-		19.500.000,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				100 persentase	12.400.000,00			-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	19.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-				1 Dokumen	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN MATUR

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.064.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		220.000.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan Daerah	-			99 %	12.075.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	12.800.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	75.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		5.300.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		7.500.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			99 %	189.347.860,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	196.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	24.679.860,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		26.000.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	164.668.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		170.000.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-			99 %	39.200.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	44.200.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		28.000.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	14.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		16.200.000,00	KECAMATAN PALEMBAYAN

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	144.800.829,40	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			205.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			99 Persen	292.370.736,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	285.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	39.313.736,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					9 Laporan	253.057.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			245.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisioni baik	-			99 Persen	42.210.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	49.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					7 Unit	25.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			26.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	6.700.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	01	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	10.010.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			16.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
286	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	192.700.000,00									-	250.000.000,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	-			4 kegiatan	192.700.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	250.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	192.700.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			250.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA

287	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	-				100 persen 100 Persen	5.250.000,00					-	5.500.000,00	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	-				3 kegiatan	5.250.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	5.500.000,00
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	5.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
288	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	-				100 persen 100 Persen	5.250.000,00					-	5.500.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	-				1 kegiatan	9.250.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	5.500.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	5.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
289	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari dengan pengelolaan keuangan yang baik Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Nagari yang Difasilitasi	-				100 persen 100 Persen	11.550.000,00					-	12.000.000,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				2 kegiatan	11.550.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	12.000.000,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					1 Dokumen	5.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	6.300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	6.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
					Kecamatan Lubuk Basung							2.085.792.635,70						2.907.000.000,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.085.792.635,70						2.907.000.000,00	
	7	01			KECAMATAN							2.085.792.635,70						2.907.000.000,00	
290	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan Operasional kantor dan ASN	-				99 %	2.001.432.635,70					-	2.742.000.000,00	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan Pengelolaan keuangan PD	-				100 %	1.530.063.105,70				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	1.990.000.000,00

7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					16 Orang/bulan	1.499.273.105,70	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.950.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	-					11 0	30.790.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar Operasional unit kerja SKPD	-					100 %	143.650.946,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		267.000.000,00	
7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	5.178.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-					3 Paket	25.679.086,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			40.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-					2 Paket	14.270.060,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			35.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-					3 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			4.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-					12 Laporan	98.523.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			180.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik Daerah sesuai dengan Perencanaan Daerah	-					75 %	20.000.000,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		110.000.000,00	
7		01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-					2 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-							-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-				

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	20.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-					100 %	262.882.584,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		310.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	36.168.584,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			60.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	226.714.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			250.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-					100 %	44.836.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		65.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	23.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			25.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					26 Unit	16.240.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			28.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	5.096.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			12.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG
291	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-				-	73.940.000,00								-			135.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	-					3 Kegiatan	73.940.000,00				-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		135.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	73.940.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			135.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG	
292	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi Trantibum dan Pemerintahan umum yang difasilitasi. Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama	-				100 % 100 persen	1.750.000,00						-		9.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-				-	1.750.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		9.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	1.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			9.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG	
293	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi. Persentase terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik di kecamatan	-				100 % 100 persen	3.900.000,00						-		10.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	-				3 Kegiatan	3.900.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		10.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					2 Dokumen	3.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG	
294	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi Persentase nagari dengan pengelolaan keuangan yang baik	-				100 % 100 persen	4.770.000,00						-		11.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi	-				75 Kegiatan	4.770.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-		11.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	1.050.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	3.720.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			6.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BASUNG	
						Kecamatan Ampek Nagari																2.124.073.039,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																2.124.073.039,00	
	7	01				KECAMATAN																2.124.073.039,00	
295	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				99 persen	1.948.523.039,00						-		2.060.699.468,00		

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	-				100 Persen	1.464.104.344,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.511.620.974,00																		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			14 Orang/bulan	1.434.514.344,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.511.620.974,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			12 Laporan	29.590.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			0,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	-				100 persen	166.314.695,00						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	244.878.494,00																	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	9.429.650,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			9.702.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	23.184.045,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			17.510.494,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	8.546.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			15.168.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	125.155.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			202.498.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	-				100 persen	10.000.000,00						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		-	20.000.000,00																	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	0,00	-	-	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			10.000.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		-					-	-	-									

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 persen	270.648.000,00	-		-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	231.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	76.920.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		72.000.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	193.728.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		159.000.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-				100 persen	37.456.000,00	-		-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	53.200.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0					0 0	24.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		26.250.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	8.360.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		8.750.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	5.096.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		18.200.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI
296	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%) Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	-				85 persen 89 % 89 persen	87.250.000,00						-	50.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	-				3	87.250.000,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	87.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		50.000.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI

297	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi. Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama	-				100 % 100 persen	45.200.000,00						-		12.400.000,00	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	-				3	45.200.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		12.400.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-				3 Laporan	45.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		12.400.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI	
298	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerinyahan umum yang difasilitasi Persentase terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik di kecamatan	-				100 % 100 persen	7.000.000,00						-		8.750.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	-				1	7.000.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		8.750.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				2 Dokumen	7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		8.750.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI	
299	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari dengan pengelolaan keuangan yang baik Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				100 persen 100 persen	36.100.000,00						-		26.720.000,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari yang difasilitasi	-				9	36.100.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		26.720.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-				12 Dokumen	25.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		17.970.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-				1 Dokumen	10.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		8.750.000,00	KECAMATAN AMPEK NAGARI	
						Kecamatan Tanjung Mutiara						2.077.980.092,50								2.354.057.733,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.077.980.092,50								2.354.057.733,00	
	7	01			KECAMATAN							2.077.980.092,50								2.354.057.733,00	
300	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				99 persen	2.028.130.092,50						-		2.286.791.633,00	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	1.565.415.066,50				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-		1.715.166.520,00	

7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	14 Orang/bulan	1.535.825.066,50	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	1.685.626.520,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	12 Laporan	29.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	29.540.000,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	-	-	-	96 Persen	149.459.306,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	212.103.622,00	
7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	3.422.437,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	6.899.763,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	26.225.169,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	37.124.959,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	8.375.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	9.821.900,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Laporan	111.436.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	158.257.000,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan Daerah	-	-	-	97 persen	20.000.000,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	22.000.000,00	
7		01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	97 persen	268.311.720,00	-		-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-	-	296.011.891,00	
7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-			-		-		-	-		

[illegible]

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2 Laporan	6.625.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			13.612.500,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
303	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	-				100 persen	4.750.000,00						-			7.693.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	-				12 Kegiatan	4.750.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.693.400,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					2 Dokumen	4.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			7.693.400,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
304	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	-				100 Persen	5.250.000,00						-			9.440.200,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi	-				1 Kali	5.250.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			9.440.200,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					96 Dokumen	1.750.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			5.590.200,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	3.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			3.850.000,00	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
						Kecamatan Malalak																2.064.235.101,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																2.064.235.101,00	
	7	01				KECAMATAN																2.064.235.101,00	
305	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	-				97 persen	1.733.229.412,00						-			1.771.502.101,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	1.345.131.576,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.387.795.887,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					10 Orang/bulan	1.314.341.576,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			1.357.005.887,00	KECAMATAN MALALAK
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	30.790.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	-			30.790.000,00	KECAMATAN MALALAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	12.293.270,98	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat				26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	137.629.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan Daerah	-					100 Persen	17.475.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		50.000.000,00	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 Unit	17.475.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-					100 Persen	225.125.460,40				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		47.000.000,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 Laporan	40.026.083,99	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			47.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	185.099.376,41	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	-					100 Persen	42.600.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-	-		54.000.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranean Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	38.500.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-				39.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	4.100.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-				15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
311	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan (%)	-				50 persen	1.312.193.534,00							-				1.545.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi terkait pendidikan wawasan kebangsaan	-				1 Kali	1.312.193.534,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		1.545.000.000,00		
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					70 Orang	26.994.644,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-				45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																			
							Jumlah Paskibraka					90 Orang	1.285.198.890,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-				1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
312	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	-				100 persen	949.975.512,00							-				980.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah parpol yang diberi bantuan, verifikasi dan sosialisasi, 2 Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan, 3 Persentase peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik masyarakat	-				10,12,100 parpol/dok/%	949.975.512,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-		-		980.000.000,00		
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					50 Orang	949.975.512,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-				980.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
313	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang aktif	-				35 persen	14.999.900,00							-				23.000.000,00	

	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan teknis pemberdayaan dan pengawasan ormas yang dirumuskan	-				2 Dokumen	14.999.900,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			23.000.000,00		
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-				100 Orang	14.999.900,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
314	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	-				5 kegiatan	77.222.200,00							-			88.500.000,00	
	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disusun	-				5 keg	77.222.200,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			88.500.000,00		
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-				325 Orang	77.222.200,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			88.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
315	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik (%)	-				80 persen	1.121.701.500,00							-			0,00	
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis penanganan konflik sosial/laporan yang disusun/wawasan kebangsaan, jumlah rapat koordinasi pantau ATHG, pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing dan rapat koordinasi penanganan konflik sosial	-				12 Kali	1.121.701.500,00				-		Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			0,00	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-				75 Orang	652.012.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-				12 Dokumen	469.689.500,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H												1.743.718.892.970,25									11.469.234.648.899,27	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas dan program unggulan kepala daerah yang disusun berdasarkan analisis terhadap evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Dokumen ini juga merujuk kepada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta identifikasi isu-isu strategis baik di tingkat daerah maupun nasional serta rancangan ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam juga memperhatikan usulan Perangkat Daerah dengan memperhatikan beberapa kriteria:

1. Relevansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026
2. Relevansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
3. Relevansi terhadap pencapaian Visi dan Misi dan program unggulan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
4. Relevansi terhadap hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024, Capaian SPM, Indikator Kinerja Daerah dan capaian terhadap Program Prioritas Kepala Daerah.
5. Relevansi terhadap isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan awal dari agenda perencanaan dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Tema RKP Tahun 2026:

“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”

Memperhatikan Rancangan Awal RPJMN sebagai tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan Perkuatan

Fondasi Transformasi, sasaran utama pembangunan Nasional pada RPJMN 2025-2029 ditargetkan:

1. Pendapatan Per Kapita setara negara Maju, yang diwakili oleh
 - Pertumbuhan ekonomi menuju 8% tahun 2029.
 - GNI Perkapita sebesar 7.400-8,240 USD.
 - Kontribusi PDB Maritim sebesar 9,1 %
 - Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 21,9%
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan masing-masing target:
 - Tingkat kemiskinan mencapai 4,5 – 5.0% (dengan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada dua tahun pertama pemerintahan.
 - Rasio gini sebesar 0,372-0,375
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan target Global Power Index pada tahun 2029 berada di ranking 29.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan target indeks modal manusia pada tahun mencapai 0,59.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero* yang tergambarkan melalui penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 77,20 pada tahun 2029.

Dalam mendukung pencapaian target dimaksud untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), yaitu:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029 yaitu:

“ Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan”

Selanjutnya Visi dijabarkan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2029 Tujuan dan sasaran pada setiap misi, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

VISI: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi I Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi II Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi III Nigari/ Desa sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal



VISI: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
	mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi IV Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi V Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
Misi VI Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi VII Tingkatkan daya Saing Pariwisata dan Akselesari Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi VIII Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif.	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah

Sumber : RKPD Prov Sumatera Barat 2026

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.



Tabel IV.2 Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Target RPJMD	RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,84	5,2 - 5,7
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	59,30	69,59
3	TPT (%)	5,94	5,16 - 5,69
4	IPM	74,60	77,48
5	Kemiskinan (%)	5,77	4,39 - 5,39
6	Gini Rasio	0,284	0,269 - 0,279

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam

Mempertimbangkan kondisi daerah, target RPJPD, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu strategis dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat



Tabel IV.3 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024		2026	Keterangan
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”								
	1.1.	Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat		Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14,13	21,74		
			Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68,64	70,59		
			meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	64,86		
			Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan	96,7	91,62		
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional								
	2.1	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	75,84	81 (A)		
			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,152	3,168		
				Nilai SAKIP	B(67,11)	70,11 (BB)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	79		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,67		
				Indeks Sistem Merit	Na	3,590		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,70		
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing								
	3.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		IPM	75,08	76,01		
			Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	9,88		
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	14,48		



MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024		2026	Keterangan
			Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39		74,65	
			Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na		0,30	
				Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na		44,36	
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan								
	4.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	4,12		4,70	
				IDSD	3,62		3,65	
			Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,16		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan		10,33		10,36
			Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Rasio Kewirausahaan	NA		4,09	
				Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89		1,00	
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)			0,93	
			Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,71		30,5	
	4.2	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah		Gini Rasio	0,249		0,247	
				Pendapatan per kapita (ribu)			66906,269	
				Angka Kemiskinan	6,83		6,19	
			Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,92		86,94	
			Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,73		4,69	
				Produktivitas tenaga kerja	88,52		104,0134674	
			Meningkatnya perlindungan sosial	% PPKS yang mendapatkan	90,89		90,94	

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024		2026	Keterangan
				perlindungan sosial				
Misi 5 : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana								
	5.1	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana (IRB)		205,29	195,95		
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	77		
			Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	0,60		
	5.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur		Na	43		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 1	RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	16,37		
				Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	19,25		
				Jalan dalam kondisi mantab	58	62		
			Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	69,25		
			Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	75,06		
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat								
	6.1	Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari		Indeks Desa	Na			
			Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	32,61	37%		

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel IV.4 Strategi dan Arah Kebijakan RJMD Kabupaten Agam
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”			
Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan keagamaan, dan kehidupan sosial religius masyarakat	Sosialisasi dan implementasi gerakan nagari madani
			peningkatan pemahaman agama dan Peningkatan kualitas serta akses pendidikan keagamaan
			Penguatan peran kelembagaan keagamaan
			Pemberdayaan pemuda dalam pelestarian adat dan agama
			Peningkatan nilai-nilai ABS-SBK dalam sendi kehidupan masyarakat.
	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal	Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.	Penguatan peran kelembagaan dan tokoh adat
			Integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan formal dan non-forma
			Pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda dan benda serta Penyelenggaraan event budaya daerah secara berkelanjutan
	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga
			Peningkatan kapasitas aparatur penegak perda dan layanan tramtibum
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan
	Misi II: Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional		
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
			Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal melalui manajemen resiko
			Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang berbasis kinerja
			Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
			Peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan akses informasi dan Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
			Penerapan prinsip Good Governance dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
			Memberikan dukungan fasilitasi percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.
Misi III: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing			
Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik.	Peningkatan kualitas pendidikan melalui Penguatan kurikulum berbasis nilai kearifan lokal.
			Mendorong pengembangan pendidikan berbasis karakter melalui pembentukan <i>boarding school</i> (sekolah berasrama) di setiap kecamatan yang memadukan kurikulum pendidikan umum, keagamaan, dan adat istiadat lokal sebagai wujud sekolah madani.
			Pemerataan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
			Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif.	Pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
			Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan sosial budaya.
			Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda) untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
			Penguatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat
			Percepatan pencegahan dan penuntasan stunting.)
			Peningkatan gizi masyarakat dan fasilitasi Makan Bergizi Gratis
	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender.	Akses Pendidikan dan Pelatihan yang Merata dan Berkeadilan Gender
			Pemberdayaan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam aspek ekonomi, organisasi dan olahraga
Mendorong Lingkungan yang Inklusif dan Mendukung Kesetaraan Gender			
Misi IV Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan			
Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan industri	Penguatan basis produksi dan pengembangan kawasan unggulan pertanian, perikanan, dan industri pengolahan secara berkelanjutan dan terintegrasi sektor hulu-hilir
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta inovasi dan adopsi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		pengolahan melalui penguatan kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan	teknologi
			Peningkatan dukungan infrastruktur serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, pemasaran, dan rantai pasok
			Mewujudkan Kab. Agam sebagai sentra agrobisnis dan agroindustri yang modern di Sumatera Barat
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Agam.
			Peningkatan infrastruktur, kelembagaan, dan sarana pendukung sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, digitalisasi, dan inovasi pertanian guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas unggulan daerah.
	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui penguatan daya saing, inovasi, serta sinergi antar sektor berbasis potensi lokal dan budaya	Pengembangan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal, budaya, dan keunikan alam berlandaskan wisata halal (halal tourism)
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk, penguatan kapasitas, inovasi, dan digitalisasi bagi pelaku usaha kreatif dan Usaha Mikro
			Perluasan akses pasar, promosi, dan jejaring kemitraan usaha dan penguatan ekosistem pendukung pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui kolaborasi multipihak
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
			Peningkatan konektivitas pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages).
			mempercepat pembentukan koperasi desa/kelurahan (koperasi merah putih) yang legal, mandiri, dan produktif melalui fasilitasi kelembagaan, pendampingan SDM, alokasi pendanaan
			Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kelembagaan syariah, pengembangan UMKM dan koperasi syariah, serta



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan	pemanfaatan sektor keuangan dan industri halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
			Peningkatan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, dan transparansi regulasi investasi serta penguatan kapasitas SDM pelayanan
			Peningkatan promosi potensi investasi daerah dan kolaborasi multipihak
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang investasi .
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk pangan
			Penguatan rantai pasok dan logistik pangan
			Penguatan cadangan pangan dan pengendalian kerawanan pangan
	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi
			Penguatan program kewirausahaan dan inkubasi bisnis
			Pengembangan sektor-sektor padat karya dan ekonomi lokal berbasis potensi daerah
	Meningkatnya perlindungan sosial	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
			Perluasan cakupan program perlindungan sosial
			Penguatan kelembagaan dan data terpadu perlindungan sosia
Misi V: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana			
Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan ramah lingkungan dan ketahanan ekosistem	pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
			Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan dan limbah melalui penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem mobilisasi pengangkutan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
			Rehabilitasi dan konservasi lingkungan
			Pemberdayaan hutan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga hutan dengan memanfaatkan nilai ekonomi hutan bagi masyarakat
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatnya ketahanan daerah	Penguatan kapasitas ketahanan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, serta ketahanan air, pangan, dan energi	Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
			Penguatan infrastruktur dan tata ruang berbasis ketahanan wilayah
			Peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam manajemen resiko kebencanaan
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan cakupan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur dasar	Peningkatan akses dan layanan air minum
			Penguatan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan limbah domestik
			Peningkatan infrastruktur drainase
			Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas, jangkauan dan integrasi infrastruktur jalan, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan
			Peningkatan Layanan dan penguatan keselamatan sarana transportasi
			Peningkatan akses jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blank spot
	Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Peningkatan akses dan kualitas permukiman layak huni, aman, dan terjangkau	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau
			Mendorong penataan kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan
	Misi VI: Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat		
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari	Meningkatnya kemandirian desa	Pemberdayaan nagari melalui penguatan tata kelola, ekonomi lokal, kapasitas SDM, dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan lokal.	Penguatan tata kelola pemerintahan nagari yang partisipatif dan akuntabel
			Pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat
			Penguatan kolaborasi antar nagari dan antar wilayah

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

Target Indikator Makro Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel IV.5 Indikator Sasaran Makro dan Target Pembangunan Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Target Nasional	Target Prop. Sumatera Barat	Target Kab. Agam
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,8 - 6,3	5,2 - 5,7	4,70
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHB)			3,54
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44 - 4,96	5,16 - 5,69	4,69
4.	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5	4,39 - 5,39	6,19
5.	Rasio Gini	0,377-0,380	0,269 - 0,279	0,247
6.	Indeks Pembangunan Manusia		77,48	76,01

Sumber : RKP 2025, RKPD Prop. Sumatera Barat, RKPD Kab. Agam

4.2 Prioritas dan Sasaran pembangunan

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan nasional dalam Rancangan Awal RPJMN dapat dilihat sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran pembangunan wilayah Sumatera diarahkan menjadi Mata Rantai Utama Bioindustri dan kemaritiman berdaya saing berkelanjutan



4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Propinsi

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 adalah:

Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas

4.2.3 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Agam

Pemerintah Kabupaten Agam terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagai landasan hukum, telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Dalam pelaksanaan dan pencapaiannya, pemerintah daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya, aspek teknis terkait perhitungan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan standar pelayanan minimal diatur dalam berbagai peraturan menteri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Target SPM

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Pemenuhan SPM bidang Pendidikan sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Pendidikan:

Tabel. IV.6 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025-2029

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-4: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Bidang Urusan	Strategi	Arah Kebijakan
Pendidikan	Penyediaan Perlengkapan Dasar siswa	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin PAUD usia 5-6 Tahun 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin usia SD 7-12 Tahun



VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-4: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Bidang Urusan	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin SMP usia 13-15 Tahun 4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siswa Miskin Kesetaraan usia 7-18
	Peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi Pendidik	1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik.
	Penguatan dan Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	1. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan Melaksanakan gerakan Literasi sekolah madani yang terprogram 2. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas metode pembelajaran 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Satuan Pendidikan. 5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 6. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan Melaksanakan gerakan Literasi sekolah madani yang terprogram 7. Pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas sarana prasarana 8. Peningkatan kualitas metode pembelajaran 9. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Satuan Pendidikan. 10. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Bidang Urusan Kesehatan

Pemenuhan SPM bidang kesehatan sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Kesehatan:

Tabel IV.7 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Urusan Kesehatan Tahun 2025-2029

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-4: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, peningkatan penanggulangan gawat darurat
4. Pelayanan Kesehatan balita		
5. Pelayanan Kesehatan anak sekolah		
6. Pelayanan kesehatan usia produktif 15-59 tahun	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar	Pengembangan lingkungan sehat, meningkatkan kerjasama dan koordinir dalam pengelolaan limbah B3
7. Pelayanan kesehatan lansia	Meningkatkan Faskes kesehatan terstandarisasi	Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Meningkatkan sistem pelaporan terpadu	Meningkatkan ketersediaan penggunaan aplikasi pelayanan kesehatan
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan terstandarisasi	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pengelolaan tenaga kesehatan
10. Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat	Meningkatnya mutu kefarmasian dan makanan minuman	Peningkatan pengelolaan kefarmasian, pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Meningkatkan penerapan pola hidup sehat	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan cakupan PHBS tatanan rumah tangga
12. Pelayanan kesehatan orang yang beresiko HIV/AIDS		

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pemenuhan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum sejalan dengan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana”. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum:



Tabel IV.8 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-5: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana		
Jenis Pelayanan dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Memperluas cakupan masyarakat dengan akses air minum layak konsumsi
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatkan penyediaan sanitasi permukiman	Memperluas cakupan masyarakat dengan akses sanitasi layak

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pemenuhan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat sejalan dengan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilauah dan mitigasi bencana”. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat:

Tabel IV. 9 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-5: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana		
Jenis Pelayanan dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten 2. Melakukan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi/Pembanguna n bagi Rumah yang terkena Relokasi Korban Bencana	Menyediakan Data Rumah terkena Relokasi Bencana
2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	Memperluas akses terhadap tempat Tinggal dan Permukiman yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat yang terdampak relokasi Program Pemerintah.	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat terdampak relokasi secara proporsional dan berimbang.

5. Bidang Urusan Sosial

Pemenuhan SPM bidang Urusan Sosial sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Sosial:



Tabel IV. 10 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021-2026

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-4: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawasan dan perlindungan sosial terhadap disabilitas terlantar diluar panti di luar Panti	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulant bagi penyandang disabilitas terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Penyaluran penyandang disabilitas ke panti sosial Tuna Grahita dan Tuna Netra
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar Panti	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap Anak terlantar di luar Panti 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi anak terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawasan dan perlindungan sosial terhadap anak terlantar	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan bagi anak terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi anak terlantar
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	1. Peningkatan akses pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di luar Panti 2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi lanjut usia terlantar di luar Panti dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Peningkatan dan pengawasan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar di luar Panti	1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan bagi lanjut usia terlantar 2. Memberikan pelayanan sosial untuk perlindungan jaminan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 3. Penyaluran Lansia terlantar ke panti sosial lanjut usia
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis di luar panti	

VISI: Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera		
MISI KE-4: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing		
Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Peningkatan pengawasan dan perlindungan sosial bagi gepeng	
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana	Peningkatan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 2. Memberikan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam satu tahun anggaran

6. Bidang Urusan Trantibum Linmas

Pemenuhan SPM bidang urusan Tramtibum Linmas sejalan dengan Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK”. Berikut strategi dan arah kebijakan SPM Bidang Sosial:

Tabel.IV.11 Strategi dan Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas Tahun 2021-2026

VISI: Agam Madani Yang Maju Adil dan Sejahtera		
MISI KE-5: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”		
Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Optimalisasi kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas	1. Pemenuhan biaya operasional Satpol PP Damkar 2. Penerapan SOP dalam pelaksanaan tugas 3. Penerapan sistem piket 24 jam bagi petugas operasional lapangan
	2. Peningkatan upaya pre-emptiv dan preventif dalam mencegah gangguan trantibum	1. Peningkatan kualitas patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan pengawasan penggunaan Alat Proteksi pada Badan Usaha dan Instansi 3. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
	3. Peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis Satpol PP Damkar	1. Membangun kerjasama dengan lembaga/instansi penyelenggara diklat teknis Satpol PP Damkar 2. Mengirimkan peserta pelatihan secara selektif sesuai kebutuhan
	4. Membangun sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan	1. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, TNI, Polri dan Kejaksaan dalam Penegakan Perda serta



VISI: Agama Madani Yang Maju Adil dan Sejahtera		
MISI KE-5: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”		
Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Arah Kebijakan
	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Melaksanakan pelatihan terhadap Anggota Linmas
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana	Menyediakan dan memasang rambu evakuasi dan papan informasi publik
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Peningkatan upaya Pre emtiv dan preventiv dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan pengawasan penggunaan Alat Proteksi pada Badan Usaha dan Instansi 2. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana Kantor serta peralatan operasional secara bertahap
	2. Peningkatan respon masyarakat terhadap kejadian bencana	1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2. Menyusun Perbub SOP dan Perda RPB
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan peran TRC dalam penanggulangan bencana TRC 2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, serta TNI, Polri 3. Melakukan pembinaan terhadap Forum PRB, KSB serta Pusdalops
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan standar teknis pelayanan kebakaran	Membangun kerjasama dengan Dinas Kebakaran kabupaten/Kota dalam penanggulangan kebakaran
	Optimalisasi fungsi Satlinmas dan Satlakar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	1. Membentuk dan membina Satlakar ditingkat Nagari 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Satlakar secara bertahap

4.2.4 Arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)

Sejalan dengan arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 sebagai implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah HKPD, diperlukan upaya memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan tersebut, maka strategi ekonomi dan fiskal Tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan.



Strategi kebijakan fiskal daerah Tahun 2026 wilayah Sumatera Barat antara lain diarahkan untuk :

1. Akselerasi investasi (mendukung Pertumbuhan Ekonomi);
2. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM (menurunkan Tingkat Kemiskinan);
3. Memperkuat ketahanan pangan (khususnya sektor Pertanian dan Perikanan);
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;

Selanjutnya, rincian dukungan Pemerintah Daerah untuk mendukung Strategi kebijakan fiskal daerah Tahun 2026 wilayah Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Akselerasi investasi (mendukung Pertumbuhan Ekonomi)
 - a) Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;
 - b) Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti komoditi kelapa dan kelapa sawit;
 - c) Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat;
 - d) Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UKM;
 - e) Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UKM;
 - f) Meningkatkan target belanja modal sebesar rasio 1%-4,6% dari belanja daerah, serta belanja infrastruktur untuk peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) daerah.
 - g) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.
2. Pembangunan desa, koperasi, dan UKM (menurunkan Tingkat Kemiskinan)

- a) Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Nagari serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
- b) Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular;
- c) Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;
- d) Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;
- e) Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban *earmarking* pajak rokok untuk dukungan pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) guna mengurangi beban masyarakat miskin.

3. Memperkuat Ketahanan Pangan

Sektor Pertanian :

- a) Penguatan fiskal daerah, contohnya melalui sinergi pendanaan maupun *creative financing* antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
- b) Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;
- c) Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- d) Penguatan kerja sama antar daerah; dan,
- e) Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.

Sektor Perikanan :

- a) Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;
- b) Penguatan kerja sama antar daerah;

- c) Penguatan fiskal daerah, contohnya melalui sinergi pendanaan maupun *creative financing* antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
 - d) Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;
 - e) Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar menekan biaya ekonomi tinggi.
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan
- a) Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;
 - b) Pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
 - c) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.
 - d) Penguatan DAU *earmarked* dan evaluasi *mandatory spending* sektor pendidikan;
 - e) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; dan,
 - f) Melakukan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
- a) Pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan;
 - b) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
 - c) Meningkatkan persentase *earmarking* pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;

- d) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam dokumen perencanaan daerah, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;
- e) Mengakses skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

4.2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam

Tahun 2026 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045. Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2026 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja daerah.

Dalam mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan gambaran riil capaian pembangunan di Kabupaten Agam. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan prioritas daerah tahun 2026. Selain itu dalam penyusunan tema dan prioritas juga memperhatikan kebijakan pembangunan propinsi Sumatera Barat, Kebijakan pembangunan Nasional, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal, mandatory yang harus dipenuhi dan isu-isu berkembang yang menjadi aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2026. RKPD Tahun 2026 disusun dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, Top Down dan Bottom Up dengan pengarasutamaan pendekatan substantif, Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut menjadi dasar penentuan arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2026.

Arah kebijakan pembangunan juga disusun dalam mendukung pencapaian tema RKP **Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif** dan RKPD Propinsi Sumatera Barat yaitu, ” **Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, maka Pemerintah Kabupaten Agam mengintegrasikan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

***“Pembangunan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM,
Daya Saing Daerah dan Penguatan Sektor Potensial”***

Pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan tantangan pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada integrasi kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, penggunaan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab dengan tidak mengesampingkan aspek social, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan social dan pembangunan ekonomi inklusif.

Peningkatan Kualitas SDM, Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil adalah aset penting dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan sangat penting. Hal ini dapat mencakup pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan teknis, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Walaupun IPM Kabupaten Agam masih tergolong tinggi dibandingkan Kabupaten lain di Sumatera Barat, diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan sehingga bisa mencapai 75,81 di Tahun 2025. Selain itu, penting juga untuk memastikan kesetaraan gender dalam pendidikan dan lapangan kerja, serta menggalakkan budaya inovasi dan kewirausahaan

Peningkatan daya saing merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi produksi, kualitas infrastruktur, kebijakan perdagangan, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan daya saing dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam mengembangkan sektor basis dan meningkatkan investasi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Langkah-langkah dapat diambil diantaranya, efisiensi energi, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah dan polusi. Dengan melindungi sumber daya alam dan ekosistem, kita dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tabel IV.12 Tema Pembangunan Tahun 2026

<i>Nasional</i>	<i>Sumatera Barat</i>	<i>Kabupaten Agam</i>
<i>Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusi</i>	<i>Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>	<i>Pembangunan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Daya Saing Daerah dan Penguatan Sektor Potensial</i>

Sumber: RKP 2026, RKPD Prop. Sumatera Barat, RKPD Kab. Agam

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026, secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat
4. Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis
5. Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi
6. Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau
7. Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal
8. Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelesrtarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan

Tabel. IV.13 Anggaran Prioritas Tahun 2026

No	Prioritas	Anggaran
1	Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai	41.393.746.957,30
2	Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	264.134.434.378,04
3	Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing	191.385.811.904,40
4	Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan	146.969.987.308,53



No	Prioritas	Anggaran
5	Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana	87.381.436.616,62
6	Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	13.952.633.205,50

Dalam konteks satu kesatuan dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi, maka sinkronisasi dan sinergitas harus menjadi perhatian. Penyelarasan tema RKPD Kabupaten Agam, RKPD Propinsi dan RKP Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”

Pembangunan sosial dan budaya Kabupaten Agam diarahkan untuk memperkuat tata kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berbudaya yang berlandaskan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Masyarakat yang berkarakter, beriman, dan beradat merupakan fondasi utama dalam menjawab tantangan zaman, terutama di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi digital yang memengaruhi nilai dan perilaku sosial, khususnya generasi muda. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah menurunnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama, melemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya ketahanan sosial masyarakat terhadap perubahan, terbatasnya regenerasi tokoh adat dan agama, serta belum meratanya pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual di seluruh wilayah.

Merespon tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan pendidikan karakter berbasis agama dan adat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, revitalisasi nilai-nilai ABS-SBK sebagai identitas sosial budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan



adat dan keagamaan sebagai motor pembinaan masyarakat, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan budaya. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan, adat, dan sosial yang berbasis kearifan lokal juga terus didorong sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan prioritas pembangunan sosial budaya melalui pelaksanaan *Gerakan Penguatan ABS-SBK Berbasis Nagari* dengan tagline *Bangkik dari Surau*, sebagai bagian dari strategi menjaga dan memperkuat identitas daerah. Prioritas ini bersifat strategis untuk mencegah degradasi moral dan disintegrasi sosial, serta mendukung visi pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada pembentukan manusia dan masyarakat yang memiliki karakter kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Program Unggulan *Agam Religius* dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu Gerakan Nagari Madani, pemberian insentif kepada pondok pesantren, garin masjid, penyuluh agama, guru TPA/MDTA, guru tahfiz dan imam masjid, serta penyediaan beasiswa pendidikan ke Timur Tengah. Selain itu, akan dikembangkan Nagari Creative Hub berbasis masjid sebagai pusat kegiatan spiritual, sosial, dan pengembangan kreativitas generasi muda. Melalui pendekatan holistik dan berbasis kearifan lokal, diharapkan terbangun masyarakat Agam yang tangguh secara spiritual, kokoh dalam budaya, dan siap menghadapi dinamika zaman secara bermartabat dan berkelanjutan.

Program Unggulan ***Agam Religius*** diluncurkan dengan mengusung kegiatan:

- a) Gerakan Nagari Madani
- b) Insentif bagi Pondok Pesantren, Garin, Penyuluh, Guru TPA/MDTA, guru Tahfiz dan Imam Masjid serta Beasiswa ke Timur Tengah
- c) Menciptakan Nagari Creative Hub Berbasis Masjid

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut serta pentingnya menjaga identitas sosial budaya masyarakat Agam, maka pembangunan mental, pengamalan agama, dan penguatan nilai-nilai ABS-SBK ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Prioritas ini dipilih karena bersifat strategis untuk memperkuat identitas daerah di tengah arus perubahan global, menjadi upaya preventif terhadap potensi degradasi moral dan disintegrasi sosial, serta mendukung visi Kabupaten Agam yang berlandaskan pada nilai agama, adat, dan budaya. Selain itu, prioritas ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera. Prioritas ini di laksanakan melalui **Gerakan Penguatan ABS-SBK Berbasis Nagari.**

Tabel IV.14 Tujuan dan Sasaran Priortas Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026
Terciptanya masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat		Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14,13	21,74
	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai agama	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68,64	70,59
	meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan kearifan lokal.	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	64,86
	Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Keamanan	96,7	91,62

Dengan arah Kebijakan:

1. Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan dan kehidupann sosial religius masyarakat, melalui:
 - a. Sosialisasi dan implementasi gerakan nagari madani
 - b. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan keagamaan di tingkat nagari dan sekolah formal.
 - c. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan, seperti MDA, pesantren, dan majelis taklim.



- d. Menjadikan surau sebagai titik tolak pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak Pemberdayaan pemuda dalam pelestarian adat dan agama
 - e. Peningkatan nilai-nilai ABS-SBK dalam sendi kehidupan masyarakat
2. Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui:
- a. Fasilitasi pelestarian adat dan budaya lokal melalui dokumentasi, revitalisasi tradisi, dan dukungan terhadap kegiatan budaya masyarakat.
 - b. Penguatan peran kelembagaan dan tokoh adat
 - c. Pengembangan program berbasis budaya lokal dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pariwisata daerah.
 - d. Integrasi nilai-nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan formal dan non formal
 - e. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda dan benda
3. Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melalui:
- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga
 - b. Peningkatan kapasitas aparaturnya penegak perda dan layanan tramtibum
 - c. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan kampanye ketertiban umum di lingkungan masyarakat, sekolah, dan tempat umum
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

Tabel IV.15 Program Pembangunan Mendukung Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.277.659.200,00	KesbangPol
2	Program koordinasi	Persentase koorsinasi	100%	154.516.700,00	Kecamatan



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
	ketentraman dan ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi			
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan (%)	50%	1.312.193.534,00	KesbangPol
4	Program Peningkatan Partai Politik dan Tenaga Pendidik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat (%)	100%	949.975.512,00	KesbangPol
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS yang aktif Persentase ormas yang aktif (%)	35%	14.999.900,00	KesbangPol
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	5 Kegiatan	77.222.200,00	KesbangPol
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tanggkal dini konflik (%)	80%	1.121.701.500,00	KesbangPol
8	Program Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	100%	2.353.659.905,50	DPMN
9	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan dibidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan	100%	26.423.811.727,80	Bagian Kesra



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
		masyarakat yang terlaksana			
10	Program Pengembangan Kebudayaan Daerah	Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi dan budaya	70%	1.235.700.700,00	Disdikbud
11	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar dan group seni tradisional yang aktif Jumlah sanggar seni yang akti	192 sanggar 256 Unit	1.100.000.000,00	Disdikbud
12	Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapka	51 65 buah Unit	215.454.930,00	Disdikbud
13	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum Jumlah kunjungan Museum (orang	20500 orang	1.014.772.240,00	Disdikbud
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,02 persen	586.726.000,00	Dalduk KB
15	Program Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatka layanan Komperhensif	100%	110.911.451,00	Dalduk KB
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	83,3 persen	277.000.000,00	Dalduk KB
17	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100%	32.002.000,00	Dalduk KB
18	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	80 Persen	172.442.000,00	Dalduk KB
19	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	330.192.457,00	Dalduk KB
20	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Indeks pembangunan	56.12 persen	2.632.805.000,00	Dalduk KB



No	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target	Pendanaan	Perangkat Daerah
	Keluarga Sejahtera (KS)	keluarga (iBangga) (%)			
			JUMLAH	41.393.746.957,30	

2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan yang baik (good governance) tercermin dari partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan informasi, responsivitas terhadap kebutuhan publik, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Pemerintahan yang bersih (clean government) ditunjukkan dengan komitmen terhadap integritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi etika dalam setiap proses pemerintahan. Sementara itu, profesionalisme pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pembentukan budaya kerja yang produktif, serta penerapan sistem birokrasi modern yang adaptif terhadap dinamika perubahan.

Dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian. Belum optimalnya pelayanan publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu diperkuat, begitu pula dengan efektivitas sistem pengawasan internal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, sementara pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan masih terbatas. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan dan inovasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan birokrasi yang inklusif dan responsif.

Menanggapi hal tersebut, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan daerah. Fokus



pembangunan diarahkan pada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, akselerasi digitalisasi layanan publik, serta optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tata pemerintahan Kabupaten Agam mampu menjadi pendorong utama dalam menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.

Sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan Agam Melayani, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada kepuasan publik. Program ini dilaksanakan melalui percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pembangunan fasilitas layanan terpadu di tingkat kecamatan. Inisiatif ini diperkuat melalui Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi, yang mendorong transformasi kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel IV.16 Tujuan dan Sasaran Prioritas Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	75,84	81 (A)
		IPKD MCP	3,152	3,168
		Nilai SAKIP	B(67,11)	70,11 (BB)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Na	79
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,67
		Indeks Sistem Merit	Na	3,590
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,70



Dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dan akuntabel.
 - b. Penguatan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan publik.
 - d. Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan.
 - e. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
 - f. Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2. Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
 - a. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi serta Penyederhanaan prosedur dan waktu pelayanan
 - b. Penguatan kapasitas SDM pelayanan publik untuk mendukung transformasi layanan yang cepat, adaptif, dan humanis.
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan kualitas layanan public.

Tabel IV.17 Program yang Mendukung Prioritas Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pendanaan	
1	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persentase keselaran dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	%	100	263.098.000,00	Bappeda
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	%	100	570.870.000,00	Bappeda
3	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	352.553.700,00	Bappeda
4	Semua program di perangkat daerah pelayanan publik, program di kecamatan (RSUD, Puskesmas, Capil, DPMPSTP. DPRD)	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	Indeks	84.05.00	39.641.167.469,6 4	
5	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	871.764.900,00	Inspektorat
6	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemeritah daerah	%	82	179.713.000,00	Inspektorat
7	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	Opini	WTP	208.752.363.481,00	BKAD
8	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase BMD yang terkelola dengan baik	%	85	556.691.200,00	BKAD
9	Program pengeloaan pendapatan daerah	Kemandirian keuangan daerah	%	13	4.161.398.025,00	BKAD
10	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum	%	100	236.076.900,00	Setda

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pendanaan	
11	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	%	100	450.361.362,00	Setda
12	Program kepegawaian	Indeks Personalitas ASN	%	66	2.814.132.920,00	BKPSDM
13	Program aplikasi informatika	persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintahan	%	50	2.723.232.931,00	Diskominfo
14	Program Informasi dan komunikasi public	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	45	1.528.492.189,40	Diskominfo
15	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektor lingkup daerah	%	40	123.463.000,00	Diskominfo
16	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks keamanan informasi	Indeks	300	6.931.000,00	Diskominfo
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari yang terbina	Kegiatan	18	773.684.300,00	DPMN
18	Program Penataan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Nagari	13	128.440.000,00	SPMN
TOTAL					264.134.434.378,04	

3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

Pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif, dan berdaya saing menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan Kabupaten Agam. Arah pembangunan SDM tidak hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas akademik, tetapi juga pada penguatan nilai spiritual, moral, sosial, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kualitas pendidikan



yang merata, inklusif, dan berbasis kompetensi menjadi pilar lahirnya SDM yang unggul dan adaptif. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan fondasi penting bagi produktivitas dan kesejahteraan, yang harus didukung oleh akses layanan kesehatan yang mudah terjangkau, dan berkualitas. Pembentukan karakter melalui penguatan nilai keimanan dan integritas menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyiapkan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sementara itu, kemampuan berinovasi serta daya saing yang tinggi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, transformasi digital, dan dinamika dunia kerja.

Pengembangan SDM di Kabupaten Agam dihadapkan pada berbagai tantangan diantaranya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah belum memadai, serta terdapat kekurangan tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi. Di bidang kesehatan, angka prevalensi stunting masih tergolong tinggi, yang mencerminkan perlunya intervensi lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, literasi digital yang masih rendah, terbatasnya akses terhadap pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, lemahnya budaya inovasi di kalangan generasi muda, serta minimnya ruang kreatif menjadi hambatan dalam menyiapkan SDM yang adaptif dan berdaya saing.

Menyikapi kondisi tersebut, pembangunan SDM ditetapkan sebagai salah satu prioritas strategis Kabupaten Agam. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan pendidikan berkarakter, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan dunia usaha dan industri, serta penciptaan ekosistem inovasi dan kewirausahaan muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan Kabupaten Agam mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga sehat, berintegritas, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung prioritas dimaksud pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan Program Unggulan Agam Cerdas dan Agam Sehat. Program Agam Cerdas diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter dan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Agam Sehat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk di dalamnya perluasan cakupan jaminan kesehatan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). Pelaksanaan prioritas ini diperkuat melalui Gerakan Terpadu Pengembangan SDM dan Gerakan Terpadu Hidup Bersih dan Sehat sebagai upaya bersama lintas sektor dalam membangun manusia Agam yang unggul secara menyeluruh.

Tabel IV.18 Tujuan dan Sasaran Prioritas Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter.		IPM	75,08	81 (A)
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	3,168
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	70,11 (BB)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39	79
	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na	2,67
		Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na	3,590

Dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik.
 - a. Pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai karakter, budaya local
 - b. Mendorong pengembangan pendidikan berbasis karakter melalui pembentukan *boarding school* (sekolah berasrama) di setiap kecamatan yang memadukan kurikulum pendidikan umum, keagamaan, dan adat istiadat lokal sebagai wujud sekolah madani.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
 - d. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan
 - f. Fasilitasi kegiatan Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik
2. Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif, melalui
 - a. Perluasan jangkauan layanan kesehatan dasar yang merata



- b. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan melalui penyediaan tenaga medis, sarana-prasarana, dan teknologi kesehatan yang memadai.
 - c. Penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, gizi, sanitasi lingkungan, serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui edukasi dan pemberdayaan berbasis nagari.
 - e. Penguatan sistem manajemen layanan kesehatan yang responsif dan berbasis data untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan cepat.
 - f. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda)
 - g. Peningkatan gizi masyarakat dan fasilitasi Makan Bergizi Gratis
 - h. Penataan kelembagaan posyandu dan peningkatan kapasitas kader Posyandu.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender
- a. Peningkatan kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan yang berkeadilan gender dan partisipasi sosial.
 - b. Pengembangan program pelibatan pemuda dalam inovasi, teknologi, dan kegiatan kreatif untuk meningkatkan daya saing.
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.
 - d. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kelembagaan.
 - e. Pemberdayaan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam aspek ekonomi, organisasi dan olahraga
 - f. Mendorong Lingkungan yang Inklusif dan Mendukung Kesetaraan Gender

Tabel IV.19 Program yang Mendukung Prioritas Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	%	95	95.855.503.270,90	DisdikBud
2	Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal)	Persentase tahapan silabus muatan lokal	%	100	200.000.000,00	DisdikBud
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	Unit	452	50.000.000,00	DisdikBud
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	%	65	99.920.990,00	Dinas Arpus
5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan grade akreditasi Puskesmas	Unit utama	10	73.446.021.284,00	Dinkes
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar (%)	%	100 (23 unit)	1.183.390.000,00	Dinkes
7	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan.	%	97,14	641.268.000,00	Dinkes
8	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Kebijakan	6	1.632.652.400,00	Dinkes
9	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras(kg/perkapita /tahun)	kg/kapit a/tahun	110	716.744.357,00	DKPP
10	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	83	7.404.598.000,00	DPUTR
11	Program Pengarasutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	16.02	586.726.000,00	
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	%	90	1.909.191.182,00	

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
13	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	event	15	7.459.796.420,50	
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan kepramukaan (%)	%	85	200.000.000,00	
Total					191.385.811.904,40	

4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Prioritas keempat pembangunan Kabupaten Agam diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Arah kebijakan dalam prioritas ini fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penguatan daya saing usaha mikro dan koperasi. Pembangunan ekonomi dirancang tidak hanya untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk memperluas penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah serta kelompok sosial di masyarakat.

Meskipun memiliki potensi besar, perekonomian Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai tantangan strategis. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan nilai tambah yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang secara kompetitif. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, kurangnya diversifikasi produk lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan potensi ekonomi kreatif, memperkuat urgensi transformasi ekonomi daerah. Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan dampak ketidakpastian ekonomi global juga menambah kerentanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas yang mendesak, dengan menitikberatkan pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan



akses pembiayaan dan pasar, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi secara adaptif.

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Unggulan Agam Melayani yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, mencakup dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemutakhiran dan pengembangan aplikasi E-KUMKM untuk memperluas akses pasar. Di samping itu, revitalisasi pasar rakyat juga menjadi fokus penting sebagai upaya menciptakan ruang perdagangan yang lebih layak, modern, tertata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Melalui Program Unggulan Agam Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Agam juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga utama ekonomi daerah. Berbagai upaya dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan Program Sawah Pokok Murah (SPM), penyediaan asuransi pertanian, penataan jaringan irigasi, serta penguatan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani.

Selain itu, Gerakan Pensejahteraan Kawasan Pesisir dikembangkan sebagai inisiatif strategis yang menasar perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pendekatan yang holistik. Fokus kegiatan mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, wisata bahari, dan kerajinan laut, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Pemerintah Kabupaten Agam juga mendorong penguatan wirausaha muda dan ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pengembangan sektor perdagangan, usaha mikro, dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif, ditargetkan terciptanya 1.000 entrepreneur muda yang mampu bersaing di pasar nasional dan global. Potensi wisata seperti Geopark Sianok Maninjau, Pantai Tiku, dan destinasi wisata potensial nagari terus dioptimalkan dalam rangka

memperkuat posisi Agam sebagai destinasi wisata unggulan dan mendukung percepatan nagari mandiri.

Keseluruhan strategi ini didukung melalui pelaksanaan berbagai gerakan terpadu, antara lain: Gerakan Terpadu Kemandirian Pangan Berbasis Keluarga dan Nagari, Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Gerakan Terpadu Pengembangan Pariwisata, Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir, serta Gerakan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Dengan sinergi berbagai sektor dan pendekatan berbasis wilayah, diharapkan terwujud kemandirian ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Agam secara menyeluruh dan berkeadilan.

Tabel IV.20 Tujuan dan Sasaran Prioritas Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026
Terwujudnya Ekonomi Daerah yang kuat, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	4,70	
		IDSD	4,12	3,65
	Meningkatnya produktivitas Sektor pertanian, perikanan dan industri Pengolahan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,16
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,36	
	Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Rasio Kewirausahaan	4,09	
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	NA	1,00
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,89	0,93
	Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,5	
			0,249	
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah		Gini Rasio	0,247	
		Pendapatan per kapita (ribu)	66906,269	
		Angka Kemiskinan	6,83	6,19
	Meningkatnya keterjangkauan dan ketersediaan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,92	86,94
	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,69	
		Produktivitas tenaga kerja	4,73	104,0134674
			88,52	
		% PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,94	
	Meningkatnya perlindungan sosial		90,89	



Dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui penguatan kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas produksi pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan melalui penyediaan sarana prasarana dan teknologi tepat guna.
 - b. Penguatan kelembagaan petani, nelayan, dan pelaku usaha tani/ikan dalam rangka membangun sistem agribisnis yang terintegrasi.
 - c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan skala kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
 - d. Fasilitasi kemitraan antara pelaku utama (petani/nelayan) dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan offtaker pasar.
 - e. Peningkatan akses pasar dan promosi produk pertanian, perikanan, dan olahan melalui digitalisasi dan dukungan logistik.
 - f. Pelaksanaan dan perenapan program Sawah Pokok Murah dan asuransi tani
 - g. Pengelolaan dan pengembangan komoditas kelapa sawit dan komoditi perkebunan secara berkelanjutan
2. Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui penguatan daya saing, inovasi, serta sinergi antar sektor berbasis potensi lokal dan budaya, melalui:
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal, budaya, dan keunikan alam berlandaskan wisata halal (halal tourism)
 - b. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
 - c. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
 - d. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages).

- e. inovasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berbasis teknologi digital.
 - f. Penguatan promosi dan pemasaran destinasi serta produk unggulan lokal melalui platform digital dan event kolaboratif.
 - g. Peningkatan sinergi lintas sektor (pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan kebudayaan) dalam mendukung ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.
 - h. Peningkatan konektivitas pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - i. mempercepat pembentukan koperasi desa/kelurahan (koperasi merah putih) yang legal, mandiri, dan produktif melalui fasilitasi kelembagaan, pendampingan SDM, alokasi pendanaan
 - j. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kelembagaan syariah, pengembangan UMKM dan koperasi syariah, serta pemanfaatan sektor keuangan dan industri halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan
- a. Peningkatan kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi layanan dan penyempurnaan regulasi daerah.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi strategis seperti jalan usaha tani, kawasan industri kecil, dan sentra produksi lokal.
 - c. Fasilitasi penyediaan data potensi investasi daerah berbasis sektor unggulan dan komoditas lokal.
 - d. Pelaksanaan promosi peluang investasi secara aktif melalui media digital, forum investasi, dan jejaring antar daerah.
 - e. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan investor dalam pengembangan ekonomi potensial.
4. Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, melalui:
- a. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk pangan
 - b. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dan penguatan sistem distribusi pangan antar wilayah untuk menjamin ketersediaan yang merata.

- c. Fasilitasi aksesibilitas pangan bagi rumah tangga rentan melalui program intervensi pangan berbasis data terpadu.
 - d. Peningkatan edukasi dan kampanye konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
 - e. Penguatan cadangan pangan dan pengendalian kerawanan pangan
5. Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif, melalui:
- a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan pendidikan berbasis kebutuhan pasar kerja
 - b. Pengembangan program magang, pelatihan kerja, dan inkubasi wirausaha bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan
 - c. Fasilitasi kemitraan antara dunia usaha, industri, dan lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan penempatan kerja, informasi pasar kerja, dan sistem pendataan tenaga kerja.
 - e. Pengembangan sektor padat karya, usaha mikro, dan ekonomi kreatif sebagai alternatif perluasan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
6. Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, melalui:
- a. Perluasan cakupan program perlindungan social
 - b. Penguatan kelembagaan dan data terpadu perlindungan sosial
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara layanan perlindungan sosial di tingkat daerah dan nagari.
 - d. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap bencana, krisis ekonomi, dan dinamika sosial lainnya.
 - e. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis kearifan lokal.
7. Pengembangan Infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi wilayah pesisir, melalui:
- a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah pesisir
 - b. Penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi

- c. Pengembangan sentra ekonomi kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal melalui peningkatan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil laut.
- d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Penguatan sinergi antar sektor dalam pembangunan wilayah pesisir, termasuk pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya, serta konservasi wilayah pesisir.

Tabel IV.21 Program yang Mendukung Prioritas Priortas Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Peningkatan produksi pertanian	Ton	654.076	2.762.777.595,00	Pertanian
2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	Ha	1500	16.208.391.865,00	Pertanian
3	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	%	25,53	650.020.296,00	Pertanian
4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persentase kasus serangan organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi saraana prasarana pengendalian OPT	%	100	100.552.300,00	Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM Penyuluh	%	66	1.068.058.291,00	Pertanian
6	Program Pengelolaan perikanan tangkap.	Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	8.170	2.291.968.139,00	DPKP
7	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	30.750	758.720.214,00	DPKP

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
8	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang	338	300.316.341,00	DPKP
9	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%	20	72.710.316,00	DPKP
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar	%	45	79.529.752,00	DPKP
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penurunan nagari rawan pangan	%	19,4	277.950.019,00	DPKP
12	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	kg/perka pita /tahun	110	716.744.357,00	DPKP
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah yang beririgasi	%	49.06.00	15.280.243.400,00	PUTR
14	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	%	69.40.00	5.000.000,00	Dinas Koperasi UMKM
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar	%	85	113.809.000,00	Dinas Koperasi UMKM
16	Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan usaha Mikro	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%	2,3	1.639.373.669,90	Dinas Koperasi UMKM
17	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda terasah	%	25	55.065.600,00	Disperind ag Naker
18	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persentase pelaku usaha yang memiliki SIUP, TDG	%	08.04	13.881.600,00	Disperind ag Naker
19	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	0,1270833	2.002.606.000,00	Disperind ag Naker
20	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks	87.05.00	197.105.000,00	DPMPTSP

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
		publik meningkat				
21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase pertambahan jumlah investor	%	20	130.665.000,00	DPMPTSP
22	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	Jumlah kemitraan	8	60.440.000,00	DPMPTSP
23	Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7	297.734.780,00	Disperindag Naker
24	Program pengembangan jasa kontruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio		131.395.000,00	DPUTR
25	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	142.117.200,00	Disperindag Naker
26	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%	80	361.468.100,00	Disperindag Naker
27	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terkelola	Destinasi	44	3.789.892.000,00	Disparpora
28	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)	%	10	517.857.400,00	Disparpora
29	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan.	%	50	201.645.300,00	Disparpora
30	Program Penyelenggaraa n Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	%	84	71.870.012.936,21	PUTR

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
31	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	%	76.77	1.235.700.700,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
32	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	405.005.206,00	Disperkim
33	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	710.000.000,00	Disperkim
34	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	6.300.000.000,00	Disperkim
35	Program Peningkatan PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi	%	65	3.399.882.500,00	Disperkim
36	Program Penataan bangunan Gedung	Persentase Penataan bangunan gedung	%	91	8.292.186.400,12	BPBD
37	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan pemberdayaan	%	80	885.955.640,00	Dinas Sosial

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	OPD
		Indikator	Satuan	Target		
38	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	278.171.450,00	Dinas Sosial
39	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	%	83	236.739.770,00	Dinas Sosial
40	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	308.771.672,00	Dinas Sosial
41	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	%	56,12	2.632.805.000,00	Dalduk KB
42	Program Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Unit	5 pasar	186.717.499,30	Disnaker
					146.969.987.308,53	

5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana

Prioritas kelima pembangunan Kabupaten Agam diarahkan pada penguatan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam mendorong konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan pada bidang ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana. Pembangunan infrastruktur dirancang selaras dengan keberlanjutan sumber daya alam,



daya dukung lingkungan, dan keselamatan publik dalam konteks perubahan iklim yang semakin dinamis serta meningkatnya ancaman bencana alam.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan sistem infrastruktur yang inklusif dan adaptif terhadap lingkungan diantaranya kualitas infrastruktur yang belum memadai dan belum memiliki daya tahan yang optimal, terutama dalam menghadapi risiko bencana seperti curah hujan ekstrem, longsor, dan pergerakan tanah. Selain itu, aktivitas pemanfaatan lahan, alih fungsi Kawasan mempengaruhi kondisi lingkungan dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir dan kekeringan. Tantangan perubahan iklim juga memerlukan strategi pembangunan infrastruktur yang responsif melalui pendekatan adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi.

Kondisi Danau Maninjau juga menjadi perhatian, degradasi ekosistem akibat pencemaran limbah rumah tangga dan keramba jaring apung telah menurunkan kualitas air dan daya dukung danau. Hal ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan potensi pariwisata, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar. Di sisi lain, permasalahan pengelolaan sampah juga masih menjadi tantangan serius. Terbatasnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, kurangnya fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri turut mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas permukiman.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh bencana sebagai salah satu prioritas strategis. Pembangunan difokuskan pada penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, sistem sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik yang adaptif terhadap risiko lingkungan. Melalui pembangunan ini, diharapkan tercipta sistem infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan memperkuat ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Agam mengembangkan Program Unggulan Agam Sehat melalui inisiatif pengelolaan sampah dari sumbernya dengan pendekatan partisipatif dalam bentuk gerakan “Buang Sampah Beli Sampah”. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan Perda Pengelolaan Sampah di seluruh kecamatan, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah, pembentukan kemitraan koperasi dengan bank sampah di seluruh nagari, serta peningkatan pengelolaan fasilitas TPA dan TPST Sei Jariang. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana pengangkutan serta pemeliharaan armada sampah menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Seluruh inisiatif ini diperkuat melalui Gerakan Terpadu Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, sebagai bentuk integrasi antara pembangunan infrastruktur dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

Tabel IV.22 Tujuan dan Sasaran Prioritas
Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026
5.1 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan serta adaptif terhadap risiko bencana.		Indeks Risiko Bencana (IRB)	205,29	195,95
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	77
	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	0,60
5.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Na	43
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 1	RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	16,37
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	19,25
		Jalan dalam kondisi mantab	58,91	62
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	69,25
	Meningkatnya pemukiman rumah layak huni	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	75,06

Dengan arah kebijakan:



1. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan ramah lingkungan dan ketahanan ekosistem, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola lingkungan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan program konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, termasuk hutan, sungai, dan kawasan pesisir.
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif dan kearifan lokal.
 - d. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - e. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
 - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan dan limbah
 - g. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.
2. Penguatan kapasitas ketahanan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, serta ketahanan air, pangan, dan energi melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana berbasis risiko
 - b. Penguatan sistem peringatan dini dan penyediaan infrastruktur tanggap darurat di wilayah rawan bencana.
 - c. Integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, dan pemukiman
 - d. Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan melalui konservasi, pemanfaatan efisien, dan pengendalian pencemaran.
 - e. Peningkatan ketahanan pangan dan energi lokal melalui diversifikasi sumber, inovasi teknologi, dan penguatan cadangan strategis.
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata
 - a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar

- b. Penguatan standar teknis dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim.
 - c. Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur secara berkelanjutan guna menjaga fungsi layanan publik.
- 4. Meningkatnya konektivitas wilayah, melalui:
 - a. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan penghubung antarwilayah, antar-nagari, dan kawasan produktif.
 - b. Pemeliharaan infrastruktur konektivitas untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan akses layanan publik.
 - c. Peningkatan Layanan dan penguatan keselamatan sarana transportasi
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan
 - e. Peningkatan akses jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blank spot
- 5. Meningkatnya pemukiman rumah layak huni, melalui:
 - a. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitas
 - c. Fasilitasi akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan dan pembiayaan perumahan berbasis inklusi
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui program peremajaan kawasan kumuh dan padat penduduk
 - e. Penguatan regulasi dan tata kelola pembangunan permukiman yang ramah lingkungan, aman bencana, dan berkelanjutan.

Tabel IV.23 Program yang Mendukung Prioritas Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangk at Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Rasio	10,85	15.280.243.400,00	PUTR



No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
		di WS Kewenangan Kab/Kota				
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%).	%	88%	7.404.598.000,00	PUTR
3	Program Penataan Banguna Gedung	Persentase penataan bangunan gedung	%	45%	8.292.186.400,12	PUTR
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	710.000.000,00	Perkim
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	6.300.000.000,00	
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100 persen	710.000.000,00	DLH
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau.	%	55,79 point	6.300.000.000,00	DLH
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	100 persen	1.547.983.061,00	DLH
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100 persen	130.000.000,00	DLH
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	Perusahaan	37 persen	170.109.500,00	DLH

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
	Lingkungan Hidup (PPLH)					
12	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100 persen	30.082.000,00	DLH
13	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah Kabupaten	%	60 persen	12.363.656.724,00	DLH
14	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	98	248.665.000,00	PUTR
15	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi pada Fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (%)	%	91 persen	940.291.754,00	BPBD
15	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)	%	100%	308.771.672,00	BPBD
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar (%)	%	100	3.761.803.025,00	Satpol PP Damkar
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	%		3.399.882.500,00	Perkim
21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	75 persen	19.483.163.580,50	Dishub
					87.381.436.616,62	



6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Pengembangan wilayah berbasis nagari merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan nagari sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan, dengan peran sentral dalam menyusun, mengelola, serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi potensi sumber daya lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat nagari, diharapkan pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Implementasi pembangunan berbasis nagari di Kabupaten Agam masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan belum merata dan memerlukan peningkatan baik dari segi kompetensi maupun tata kelola yang transparan dan akuntabel, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nagari. Kurangnya kolaborasi antar-nagari dalam pengembangan kawasan, terbatasnya ketersediaan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat nagari menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan pengembangan wilayah berbasis nagari sebagai arah kebijakan prioritas yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat posisi nagari sebagai basis utama pembangunan daerah. Kebijakan ini telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional, guna menjamin sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaannya. Melalui strategi pembangunan dari tingkat

akar rumput, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian wilayah, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel IV.24 Tujuan dan Sasaran Priortas Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Capaian 2024	2026	Keterangan
Terselenggaranya pengembangan wilayah berbasis nagari		Indeks Desa	Na		
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	32,61	37%	

Dengan arah kebijakan:

- Pemberdayaan nagari melalui penguatan tata kelola, ekonomi lokal, kapasitas SDM, dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan local, melalui:
 - Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
 - Penguatan ekonomi nagari melalui pengembangan BUMNag, Usaha Mikro, dan usaha produktif berbasis potensi lokal.
 - Peningkatan kualitas SDM nagari melalui pelatihan, pendidikan non-formal, dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas
 - Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam nagari secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
 - Penguatan peran nagari dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus TP PKK

Tabel IV.25 Program yang Mendukung Prioritas Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangk at Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	0,1	6.300.000.000,00	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	%		3.399.882.500,00	Perkim



No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Pendanaan	Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target		
	Utilitas Umum (PSU)	Sarana dan Utilitas Umum)(%)				
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	1,67	710.000.000,00	Perkim
4	Program Penuaan Desa	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Nagari	92	128.440.000,00	DPMN
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	Nagari	92	773.684.300,00	DPMN
6	Program Pemberdayaan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari yang terbina Jumlah Nagari yang Taat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Jumlah Kelembagaan Nagari yang Ditata sesuai Standar	Nagari	92Nagari 95 persen	2.353.659.905,50	DPMN
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase nagari dengan pengelolaan keuangan yang baik	%	100	286.966.500,00	DPMN
		TOTAL			13.952.633.205,50	



4.2. 6 Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional dan Propinsi

RKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan propinsi, oleh karena itu agenda pembangunan dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan suatu bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena itu perlu adanya sinkronisasi antara program prioritas nasional yang diturunkan menjadi program prioritas dan kegiatan prioritas dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun sinkronisasi dan dukungan RKPD Kabupaten Agam terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel IV.26 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam

Prioritas dan Sasaran pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat	Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Agam
Prioritas I : Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asis Manusia (HAM	Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 2: Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba		
Prioritas 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas IV : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
	Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataa	
Prioritas 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Prioritas V: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas IV : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan

Prioritas dan Sasaran pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat	Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Agam
Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas III: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas I: Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai
Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		



Program Strategis Nasional (ProSN) merupakan inisiatif pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden karena memiliki nilai strategis secara nasional, terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan agar mendukung pencapaian agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Implementasi ProSN diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel IV. 27 Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Agam dengan Program Strategis Nasional

No	ProSN	Prioritas Pembangunan	Priritas Pembangunan Daerah
1	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
		Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	
		Sekolah Rakyat	Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana

No	ProSN	Prioritas Pembangunan	Priritas Pembangunan Daerah
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	
3	Kesehatan untuk semua	Stunting	Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
		Jaminan Kesehatan Nasional	
		Penuntasan TBC	
4	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	
		Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	
		Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	
		Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Makan Bergizi Gratis	Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
		Pengendalian Inflasi	
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	



4.2.7. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan pasal 78 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan yang diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dalam RPJMD.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah merupakan bahan masukan untuk kajian permasalahan daerah, perumusan kebijakan pembangunan dan rencana program/ kegiatan yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran Tahun 2026. Secara umum pandangan DPRD terkait arah pembangunan 2026 disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Agam pada Musrenbang Kabupaten Agam tanggal 24 Maret 2025:

1. DPRD mendukung program unggulan pemerintah daerah,
 - a. Agam religius, dengan meningkatkan jumlah kegiatan keagamaan, pembangunan sarana ibadah, penguatan pencapaian sasaran gerakan nagari madani, penguatan pemahaman masyarakat tentang toleransi beragama.
 - b. Agam sehat, dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap masalah kesehatan masyarakat seperti penanggulangan penyakit endemik, percepatan penanggulangan stunting, dan mendorong semua pihak untuk bersama sama mengatasi masalah Kesehatan.
 - c. Agam Cerdas, dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas guru, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat baik formal maupun non formal.
 - d. Agam melayani, dengan Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. DPRD mendorong adanya kepastian bahwa semua layanan publik dapat diakses dengan

- mudah oleh masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.
- e. Agam Sejahtera, dengan penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan akses modal usaha, pelatihan keterampilan, dukungan dalam pemasaran produk lokal, pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif lokal sebagai sumber potensial pertumbuhan ekonomi daerah, program bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pembangunan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah

Berkaitan dengan masukan masukan bahan perencanaan pembangunan tahun 2025, DPRD Kabupaten Agam telah menyampaikan pokok-pokok Pikiran dari hasil penjangkaran aspirasi secara tertulis sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Agam Nomor 170/270/DPRD-Ag/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Rekapitulasi Pokok Pikiran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam, yang selanjutnya melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan terintegrasi dalam Program/ Kegiatan OPD Tahun 2025.

Tabel IV. 28 Sinkronisasi Usulan DPRD dengan Prioritas RKPD Tahun 2026

No	Prioritas RKPD 2026	Jenis Usulan	Jumlah usulan
	Prioritas 1 : Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama, dan ABS_SBK dalam kehidupan masyarakat	Rehab, hibah masjid/Mushala, TPA, Rumah Tahfiz, perlengkapan kesenian, adat dan budaya, peningkatan kapasitas lembaga adat, peningkatan parasarana olahraga	160 usulan
	Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	Penyediaan peralatan untuk pelayanan pengurusan e-KTP (Pelayanan publik)	2 usulan
	Prioritas 3: Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Perbaikan sarana prasarana sekolah, puskesmas, pustu, perlengkapan sekolah, sanitasi sekolah, pengadaan ambulan, pengadaan alat kesehatan, rehab pustaka	98 usulan
	Prioritas 4: Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	Bantuan alsintan, jalan usaha tani, jalan produksi, pembangunan dan rehab irigasi, bantuan bibit	50 usulan
	Prioritas 5 : Pengembangan pariwisata, UMKM, perdagangan, koperasi dan investasi	Bantuan Usaha Mikro dan perindustrian	35 usulan

No	Prioritas RKPD 2026	Jenis Usulan	Jumlah usulan
	Prioritas 6: Pengembangan Pesisir, kelautan dan Danau	Bantuan budidaya ikan, sarana alat tangkap nelayan, pembuatan kolam, bantuan jaring, kelompok poklashar	17 Usulan
	Prioritas 7 : Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah	RTLH, Bantuan untuk KUBE, bantuan sosial untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi	78 usulan
	Prioritas 8 : Pengembangan Energi Terbarukan dan Pembangunan Infrastruktur, pelesrtarian lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan	Rehab dan pembangunan jalan, jembatan, jalan lingkung dll	172 usulan

4.2.8 Arah Kebijakan Tematik

Kebijakan Pembangunan Tematik merupakan kebijakan yang mengarahkan beberapa program dan kegiatan untuk mewujudkan tema dan tujuan pembangunan yang sama. Pendekatan pembangunan tematik dijalankan secara koordinatif, kolaboratif dan bersinergi. Pendekatan ini melibatkan lintas sektor, baik melalui lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat, maupun lintas perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan pembangunan tematik adalah untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh kementerian/lembaga dan lintas perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

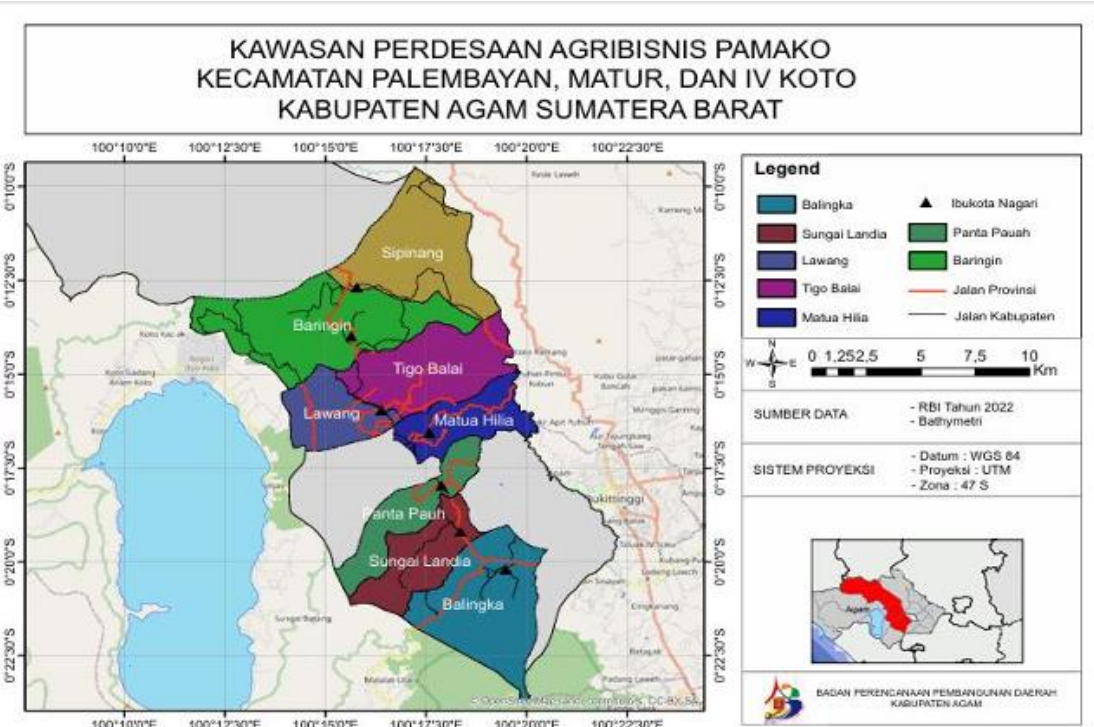
Kebijakan tematik disusun mendukung prioritas pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan tematik diaktualisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2025⁶ dalam tema-tema pembangunan, sebagai berikut :

1. Kawasan Perdesaan Agribisnis PAMA⁷KO

Sejalan dengan optimalisasi potensi nagari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Agam membentuk kawasan perdesaan agribisnis untuk budidaya perkebunan dan pengolahan komoditas pertanian melalui Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 159 Tahun 2020 tentang Kawasan Perdesaan Agribisnis untuk 3 Kecamatan dengan 10 nagari yaitu: Kecamatan Palembayan meliputi Nagari Baringin dan Sipinang; Kecamatan Matur, meliputi Nagari Panta

Pauh, Matua Hilia, Matua Mudiak, Tigo Balai, Lawang; c. Kecamatan IV Koto, meliputi Balingka dan Sungai Landia.

Gambar IV. 1 Peta Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Agam, 2024 Sumber



Dasar pemilihan 3 kecamatan ini sebagai suatu kawasan agribisnis adalah: (1) Kesamaan topografi yaitu memiliki wilayah sangat terjal dengan kemiringan $>45\%$ seluas 21.922 ha atau sekitar 9,82% ; (2) Kesamaan jenis tanah yaitu Kambisol, Andosol dan Gleysol; (3) Potensi pertanian yaitu tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi, kacang-kacangan dan hortikultura yaitu cabe, bawang merah, jeruk, alpukat, sentra ternak dan perkebunan yaitu tebu dan kopi; (4). Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Geopark Sianok Maninjau dan kawasan agrowisata minat khusus; (5). Kawasan Industri Pengolahan berbahan baku pertanian; (6). Merupakan sasaran pembangunan kewilayahan yaitu Kawasan Prioritas Pedesaan pada RPJMN 2025-2029, (7). Bagian kawasan untuk peningkatan konektivitas/aksesibilitas kabupaten dan wilayah lainnya, termasuk peningkatan ruas jalan propinsi.

KPP Agribisnis Pamako mempunyai potensi pengembangan kawasan:

1. Potensi produk pertanian seperti Padi, Tebu, Kacang Tanah dan Produk Holtikultura lainnya
2. Produk Olahan Pertanian, seperti Gula Tebu, Kacang Goreng, Gulo-gulo Saka (Permen) dan lainnya
3. Pariwisata, seperti wisata alam, agrowisata dan wisata Sejarah.
4. Produk Kerajinan Tangan dan Sulaman

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi penopang perekonomian utama bagi masyarakat di Kawasan Perdesaan Prioritas. Jumlah produksi komoditi perkebunan tebu, mencapai 59,78% dari total produksi dan perkebunan kakao sebesar 30,47%. Hal ini menggambarkan kawasan perdesaan prioritas nasional merupakan kebijakan strategis guna peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel IV.29 Produksi Tanaman Padi dan perkebunan di Kecamatan Kawasan Perdesaan Prioritas

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Kopi	Tebu	Kakao
1	Palembayan	40432	5212,8	46,93	237,06	275,65
2	Matur	18631	286,4	405,62	1515,33	6,06
3	IV Koto	16065	42	21,2	80,24	9,97
	Total	75128	119098,9	3065,63	1832,63	291,68
	Total se-Agam	341353	117098,9	1684,12	3065,63	957,4
	Persentase	22,01	4,73	28,13	59,78	30,47

Sumber: Data Sektoral BPS

Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Agam telah memiliki Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumdesma) PAMAKO, yang dibentuk melalui keputusan bersama antar nagari Palembayan, Matur, dan IV Koto. Wilayah ini merepresentasikan budaya Minangkabau yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam sistem pemerintahan tradisional Nagari yang dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kearifan lokal, seperti tradisi adat, pendidikan surau, serta semangat gotong royong, tetap terpelihara. Kawasan ini juga memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, agrowisata, dan usaha mikro, dengan produk unggulan seperti saka Lawang dan kopi. Dukungan kuat dari perantau melalui ikatan sosial dan komunal yang erat menjadi modal sosial penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kemandirian nagari.



Tabel IV. 30 Peluang dan tantangan peningkatan Kawasan Prioritas Pedesaan

Peluang	Tantangan
1. Kondisi geografis yang mendukung untuk budidaya berbagai komoditas pertanian, seperti padi, hortikultura, dan perkebunan	1. Akses jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas transportasi yang belum memadai dapat menghambat distribusi hasil agribisnis.
2. Kebutuhan akan produk agribisnis, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional, terus meningkat, terutama untuk produk organik dan berkualitas tinggi.	2. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengadopsi teknologi modern serta manajemen usaha agribisnis.
3. Kemajuan teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas	3. Keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, baik pasar regional maupun internasional, karena terbatasnya jaringan pemasaran dan promosi.
4. Kombinasi agribisnis dengan pariwisata (agrowisata) dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari.	4. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan pembiayaan, terutama bagi petani kecil, menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha agribisnis.
5. Program pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan agribisnis	5. Peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau perumahan dapat mengurangi lahan produktif untuk pertanian.

Secara ekonomi dan finansial, komoditas unggulan kawasan seperti tebu, kopi, saka anau, kacang goreng, serta hortikultura dipasarkan melalui jejaring usaha mikro yang dimiliki oleh petani dan pelaku usaha, antara lain melalui kedai, warung, toko, antar pelaku usaha mikro lintas daerah, Badan Usaha Milik Nagari, serta partisipasi dalam berbagai pameran dan platform digital seperti SIBAKO Rang Agam (Sistem Balanjo Komoditi dan Olahan Rang Agam). Inovasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing dengan produk sejenis di Kabupaten Agam.

Beberapa kebijakan dalam peningkatan Kawasan Prioritas Pedesaan:

1. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, termasuk jalan usaha tani
2. Pengembangan saluran distribusi air ke lahan pertanian dan permukiman
3. Peremajaan tanaman pertanian
4. Peningkatan program pelatihan bagi petani

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian
6. Integrasi atraksi wisata, seperti wisata alam, wisata sejarah, agro wisata dan wisata yang dikelola oleh nagari.
7. Pengembangan pasar agro dan pasar wisata untuk mendorong perekonomian masyarakat
8. Peningkatan program pelatihan bagi pelaku usaha mikro
9. Peningkatan kapasitas dan peran BUMNAG dalam pengelolaan pertanian, usaha mikro dan pariwisata (sektor basis Kabupaten Agam)
10. Peningkatan nilai tambah produk

4.2.9 Inovasi Daerah

Kabupaten Agam telah memulai kegiatan inovasi sejak Tahun 2018 dengan berbagai bentuk seperti Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi Bentuk Lainnya. Adapun tema Prioritas Pembangunan Tahun 2026 “Pembangunan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Daya Saing Daerah dan Penguatan Sektor Potensial”. Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, mendorong efisiensi, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayahnya. Beberapa tujuan utama inovasi daerah adalah meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan dengan cara pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga memperkuat tata kelola yang partisipatif. Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan cara menciptakan keunggulan kompetitif, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mengatasi Permasalahan Spesifik Daerah dengan langkah memiliki tantangan yang unik, dan inovasi memungkinkan solusi yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal. Mendorong Transformasi Digital dan Teknologi dengan mendukung pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Berikut disajikan data terkait inovasi di Kabupaten Agam yang dilaksanakan pada 2 tahun terakhir:

A. INOVASI SKALA DAERAH

1. *Lapor Inyiak Tuah*

Inovasi ini lahir dari kebutuhan akan sarana pengaduan publik yang mudah diakses, cepat dan akuntabel, terutama di era digital. Pemerintah Kabupaten Agam menyadari bahwa masyarakat membutuhkan ruang yang terbuka untuk menyampaikan aduan, pertanyaan, maupun saran terhadap pelayanan publik secara langsung dan efisien. Dengan memanfaatkan media sosial Instagram, yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat, inovasi ini hadir sebagai respon terhadap tuntutan keterbukaan informasi publik, hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, digitalisasi kanal pengaduan. Sistem pengelolaan pengaduan dapat lebih efektif, terpadu dan responsif dengan tujuan dilaksanakannya inovasi Lapor Inyiak Tuah adalah untuk menyediakan kanal aduan berbasis media sosial, mendorong partisipasi aktif masyarakat, mempercepat penyampaian, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya Lapor Inyiak Tuah dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan kapan saja, proses pengaduan yang cepat dan terstruktur serta peningkatan kualitas layanan publik.

2. *Merpati Surat*

Pada umumnya produk hortikultura masih dibudidayakan secara konvensional, seperti penggunaan pestisida sintetik, pupuk buatan secara berlebihan. Bahaya pestisida sintetik dalam produk sayuran dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, gangguan sistem saraf, kesuburan, sistem kognitif. Pemberian pupuk buatan dan pestisida sintetik yang terus menerus dapat menurunkan kualitas tanah secara fisik, kimia dan biologi serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu pasar/konsumen menuntut perbaikan mutu dari produk hortikultura untuk meningkatkan daya saing dengan produk negara lain yang sudah terlebih dahulu membekali diri dan

diharapkan nantinya petani kita tidak jadi penonton dinegeri sendiri. Untuk memenuhi tuntutan konsumen/pasar dan keamanan konsumsi perlu dikembangkan budidaya pertanian yang produknya aman bagi konsumen, teknologinya ramah lingkungan, produktivitas berkelanjutan dengan penerapan konsep *Good Agricultural Practices (GAP)*/Berbudidaya yang baik dan bekerja sama dengan OKKPD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam mengeluarkan sertifikat prima setelah dilakukan uji laboratorium. Pengembangan Agribisnis Sayuran Sehat melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal untuk Peningkatan Daya Saing dan Pendapatan Petani, diharapkan dapat menciptakan kawasan sayuran sehat bersertifikat prima dengan jaminan mutu aman konsumsi. Untuk itu Dinas Pertanian menciptakan inovasi Merpati Surat (Menjaring Pasar Petani Sayur Sehat) yang dibuat untuk meningkatkan nilai jual Sayuran Sehat yang sudah memiliki Sertifikat Prima 3. Adapun tujuan inovasi ini adalah meningkatkan nilai tambah produk sayuran yang aman dikonsumsi, meningkatkan hilirisasi produk, dan pengembangan komoditi sayuran sehat dengan melibatkan petani digital yaitu petani pengguna platform/aplikasi untuk memberikan data /informasi dan secara bersama ke pihak luar sehingga produk sayur sehat bersertifikat prima dengan jaminan mutu aman konsumsi dapat menjaring pasar yang lebih luas.

B. INOVASI SKALA OPD

Tabel IV.31 Daftar Inovasi Kabupaten Agam

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
1.	Tamu online (Rekap data tamu dan surat masuk online)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena rendahnya efisiensi dan produktivitas, adanya resiko kehilangan atau kerusakan dokumen dan keterbatasan akses dan transparansi. Disamping itu terdapat keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan seperti surat masuk sering mengalami penundaan dalam distribusi dan disposisi, sehingga menghambat respons pimpinan terhadap isu penting dan proses koordinasi antar unit terhambat karena tidak adanya sistem pelacakan real-time. Untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan inovasi Tamu Online ini dengan penerimaan surat melalui sistem elektronik dimana secara otomatis tercatat dalam aplikasi manajemen surat masuk, disposisi surat menggunakan sistem disposisi digital dengan notifikasi dan tanda tangan elektronik sehingga pelacakan surat dapat dipantau secara real-time oleh pejabat terkait dan pengarsipan Arsip digital tersimpan dalam arsip digital sistem terpusat yang bisa dicari dan diakses cepat.	Tujuan : 1. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan 3. Mendukung Implementasi SPBE dan Reformasi Birokrasi Manfaat : 1. Meningkatkan Efisiensi Proses Administrasi 2. Aksesibilitas dan Pelacakan Real-Time 3. Transparansi dan Akuntabilitas
2.	AKUSTIK (Aparatur Kelola Urusan Statistik)	Dinas KOMINFO selaku Wali Data Pemkab Agam harus mengumpulkan data OPD dan Instansi vertikal setiap tahunnya. Data statistik ini digunakan sebagai bahan membuat Buku Agam Dalam Angka, Buku Statistik Sektor, Buku Profil Daerah dan melayani permintaan data dari OPD dan pihak lainnya untuk menunjang pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dalam hal pengumpulan data ini Wali Data selalu mengalami kesulitan seperti keterlambatan pengumpulan data oleh OPD, Data yang diserahkan OPD tidak sesuai dengan standar data, Pemahaman OPD akan pentingnya data masih kurang, untuk itu dibutuhkan inovasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral Pemkab Agam yang efektif dan efisien. Metode pembaharuan dalam pengelolaan data statistik sektoral Pemkab Agam ini adalah dengan membuat Kelompok Kerja Pengelola Data Statistik Sektoral yang memahami pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar data dan menyediakan tools pengumpul data statistik sektoral Pemkab Agam berupa	Tujuan : 1. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral melalui pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Data Statistik Sektoral guna memastikan data statistik sektoral dikelola secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan akurat 2. Memperkuat Koordinasi Antar OPD dan Instansi di wilayah Kabupaten Agam dalam pengelolaan data statistik sektoral 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Data, 4. Mempercepat Proses Analisis dan Pengambilan Keputusan dalam merespons dinamika sosial-



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		menggunakan <i>google spreadsheet</i> , dimana sebelumnya masih dilakukan dengan menyurati OPD untuk mengumpulkan data yang hasilnya tidak efektif.	ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara lebih efisien. 5. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral yang akurat, up-to-date, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah Manfaat : 1. Meningkatkan Kualitas Data yang Akurat dan Terstandarisasi. 2. Mempermudah Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
3.	KIPER (Keterbukaan Informasi Elektronik Berbasis Elektronik)	Keterbukaan Informasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (KIPER PPID) pada Dinas KOMINFO. Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. PPID dituntut profesional. Namun, dalam praktiknya, pelayanan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain proses permohonan informasi yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien, kesulitan masyarakat dalam mengetahui alur dan status permohonan informasi yang diajukan serta belum optimalnya pengelolaan data dan dokumentasi informasi publik di lingkungan instansi dan dibutuhkan sebuah inovasi dalam bentuk aplikasi layanan PPID berbasis digital yang mampu menjawab tantangan di atas. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform terintegrasi yang mendukung seluruh proses pelayanan informasi publik,	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel 3. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Manfaat : 1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 4. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat 5. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
4.	Sistem Informasi Media Agama Maju (SIMAJU)	Di Kabupaten Agam, Kerjasama media masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan verifikasi pendaftaran Kerjasama serta tempat penyimpanan berkas/ dokumen pendaftaran yang terbatas. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melahirkan sebuah inovasi digital berbasis teknologi informasi, yaitu Aplikasi Sistem Media Agama Maju (SIMAJU). Aplikasi ini dirancang sebagai platform yang dapat digunakan oleh perusahaan pers melakukan pendaftaran dimana dan kapan saja sesuai persyaratan yang ditentukan tanpa mengunjungi kantor Dinas Komunikasi Dan informatika Kabupaten Agam untuk melakukan pendaftaran. SIMAJU hadir sebagai bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government), pelayanan publik yang partisipatif, serta peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dibangunnya aplikasi SIMAJU, diharapkan Kabupaten Agam dapat mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta membangun citra pemerintah daerah yang modern, responsif, dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.	Tujuan : 1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik 2. Mempercepat Respons dan Tindak Lanjut 3. Mendukung Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah Daerah Manfaat : 1. Proses Pendaftaran yang Lebih Mudah dan Efisien 2. Penyederhanaan Administrasi 3. Transparansi dan Akuntabilitas 4. Peningkatan Aksesibilitas 5. Pengelolaan Data Kerjasama yang Terintegrasi
5.	Nasip PD (Pembinaan Arsip PD)	Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam, memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kearsipan, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat terlaksana apabila tata Kelola kearsipan pada setiap Perangkat Daerah terselenggara dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Selain itu penyelenggaraan pembinaan kearsipan bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip daerah sebagai bukti autentik dan pertanggungjawaban hukum dan administrasi penyelenggaraan Pemerintah. Inovasi ini dapat meningkatkan pengelolaan pada Perangkat Daerah serta terlaksananya pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan. Dengan tercapainya pengelolaan arsip yang baik dan benar, akan dapat meningkatkan Nilai Kearsipan Daerah Kabupaten Agam. Inovasi ini dapat meningkatkan pengelolaan pada Perangkat Daerah serta terlaksananya pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan. Dengan tercapainya pengelolaan arsip yang baik dan benar, akan dapat meningkatkan Nilai Kearsipan Daerah Kabupaten Agam.	Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam penata arsip pada Perangkat Daerah. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan Pengelola Arsip dalam pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan. 3. Meningkatkan Nilai Kearsipan Daerah melalui Audit Sistem Kearsipan Internal dan Audit Sistem Kearsipan Eksternal. 4. Meningkatkan Nilai Kearsipan Daerah yang juga mendukung Nilai RB Kabupaten Agam. Manfaat : 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah. 2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengelola arsip.



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Tersedianya sumber daya pendukung yang memenuhi standar dan kualitas dalam mendukung pengelolaan arsip di setiap pencipta arsip.
6.	LAKSA (Layanan Lansia)	Di era yang serba digital saat ini, tidak semua lansia yang melek informasi dan keterbatasan fisik dari para lansia. Dalam upaya meningkatkan literasi lansia, penting untuk memperluas peran perpustakaan sebagai layanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan informasi lansia. Melalui koleksi buku yang beragam, sumber daya informasi yang relevan, perpustakaan membantu lansia untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan selaku instansi pembina perlu membuat terobosan untuk melayani lansia dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan membuat inovasi LAKSA. Inovasi ini memberikan kesempatan bagi lansia mendapatkan layanan publik perpustakaan untuk mengekspresikan lansia dengan bahan bacaan mengingat masih banyak lansia yang membutuhkan informasi lebih lengkap karena keterbatasan pemahaman. Adapun Layanan Lansia yang diberikan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan lansia dalam Forum Muslimah Peduli Ibu dan Generasi. Forum Muslimah Peduli Ibu dan Generasi ini terdapat lansia-lansia yang mempunyai kegiatan dalam mengisi kerohanian atau memperdalam ilmu agama dengan mendengarkan ceramah atau tausiah dari ustazah-ustazah	Tujuan : 1. Dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi terhadap Lansia. 2. Menyediakan bacaan dan bahan perpustakaan yang mendukung kepentingan lansia 3. Menkompensasi keterbatasan fisik dan mental 4. Melengkapi terapi atau aktivitas tertentu Manfaat : 1. Memperkuat dan menjaga Kesehatan Otak 2. Meningkatkan rasa empati 3. Memberikan umur panjang
7.	LIBAS (Literasi Baca Bersama)	Pada saat ini kita berada di era serba digital, Generasi Z dan masyarakat umum lainnya cenderung lebih tertarik pada gawai, dan media sosial dari pada buku disebabkan karena akses informasi lebih mudah didapatkan melalui internet. Namun ini dapat menurunkan minat literasi di kalangan generasi Z dan masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi dengan cara menyisihkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Hal ini juga menimbulkan tantangan bagi perpustakaan Daerah Kab. Agam untuk tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Oleh karena itu, Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam memiliki peranan penting dalam	Tujuan : 1. Dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi terhadap pemustaka. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. 3. Meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang setelah membaca buku yang telah dipelajari.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		meningkatkan minat baca pada Generasi Z dan Masyarakat Kabupaten Agam pada umumnya dengan menciptakan Inovasi yang Bernama LiBas (Literasi Baca Bersama). LIBAS memberikan pelayanan dengan melayani kunjungan dari berbagai kalangan masyarakat, memfasilitasi pemustaka dengan menyediakan koleksi yang berkaitan dengan kebutuhan pemustaka, melakukan sosialisasi minat baca untuk meningkatkan literasi baca Bersama, mempublikasi semua kegiatan literasi ke media sosial	4. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Manfaat : 1. Mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. 2. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisis 3. Menambah wawasan dan informasi baru 4. Mengembangkan kemampuan verbal 5. Meningkatkan kemampuan in terpersonal.
8.	MANCALIAK (Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Secara Online Dan Berkala)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan waktu dan kontinuitas laporan tersebut. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pengumpulan laporan (dengan cara manual), rekap hingga penggabungan laporan. Disamping itu, kerap ditemukan capaian program kegiatan yang tidak disinkronkan dengan periode evaluasi sebelumnya. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, BAPPEDA membuat inovasi Mancaliak (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan secara online dan Berkala) dengan membangun sistem pelaporan yang lebih memudahkan OPD pelapor. Pelaporan sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan cara menyampaikan fisik laporan ke Bappeda. Dengan penggunaan Mancaliak, pelaporan bisa dilakukan secara langsung dengan cara mengisi capaian program pada format yang telah disediakan melalui aplikasi <i>Google Spreadsheet</i> . Dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan Perangkat Daerah dan Bappeda dalam penggunaannya.	Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan monitoring evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam. Manfaat : Mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah seperti konsistensi antara RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW, dan kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9.	WAH KEPO (WAdaH Kelola Pengaduan dan infOrmasi WAH KEPO)	Saat ini perencanaan bottom up di Kabupaten Agam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya waktu yang terbatas menyebabkan kurang terserapnya aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya inovasi penyampaian aduan yang bisa dilaksanakan secara online. Dengan adanya inovasi platform/wadah layanan pengaduan dan informasi berupa google form masyarakat dapat menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi yang berkembang di masyarakat setiap waktu, kapan, dan dimana saja, agar pengaduan	Tujuan : 1. Mempermudah proses penyerapan aspirasi masyarakat secara efektif, efisien dan fleksibel 2. Mempermudah proses pengumpulan data, kejadian, informasi pembangunan 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		yang disampaikan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Google form yang disediakan memuat data pengusul yang berisi nama, alamat, nomor handphone, pengaduan atau aspirasi serta informasi yang dibutuhkan, disertai dengan bukti dukung berupa dokumentasi yang berisi foto kondisi dan titik lokasi. Selain itu pada pengisian platform ini juga dibutuhkan deskripsi usulan atau pertanyaan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian google form yang telah diisi oleh masyarakat akan langsung masuk ke email bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (EPWTRLH) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selanjutnya hasil koordinasi Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait akan diinformasikan kepada pengusul melalui nomor handphone yang telah dicantumkan pada google form. Melalui inovasi perencanaan bottom up ini diharapkan terciptanya perencanaan yang efisien, efektif, dan fleksibel.	1. Mempermudah penyampaian usulan dan aspirasi 2. Efisien dan menghemat waktu 3. Rencana yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat 4. Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan
10.	KLINIK INOA (Klinik Inovasi Agam)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena BAPPEDA selaku OPD penanggungjawab inovasi menyediakan wadah komunikasi dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah terhadap inovasi yang ada pada OPD tersebut. Untuk itu BAPPEDA menyediakan ruang dan waktu untuk berkonsultasi dalam penjangkaran ide dan pengembangan inovasi. Sejak berdirinya Klinik Inoa sudah banyak perangkat daerah yang memanfaatkan wadah yang telah disediakan.	Tujuan : 1. Memberikan wadah komunikasi dan konsultasi inovasi bagi Perangkat Daerah. 2. Menjaga kesinambungan inovasi Perangkat Daerah Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi 2. Meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam berinovasi.
11.	PAULA (Peminjaman Aula)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena banyaknya jadwal peminjaman aula oleh perangkat daerah maupun pihak eksternal maka agar lebih memudahkan dan efisien, Bappeda membuat inovasi Paula (Peminjaman Aula). Sebelumnya peminjaman aula oleh OPD dan pihak eksternal melalui telepon dan offline sedangkan untuk kebaruannya saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Paula.	Tujuan : Memudahkan dan mengkoordinir peminjaman aula melalui aplikasi online Manfaat : 1. Peminjam dapat mengakses dan melakukan peminjaman aula secara online

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			2. Menghemat waktu 3. Potensi kesalahan tanggal dan waktu peminjaman aula yang sama dapat dihindari
12.	PERKINDA (Perjanjian Kinerja Bappeda)	Kewajiban pengisian perjanjian kinerja oleh pejabat struktural, fungsional secara berjenjang setiap periodik masih diinput secara manual, sehingga menyulitkan karena tidak online.	Tujuan : Memudahkan pengisian e kinerja dan penilaian dan updating melalui link google drive secara online. Manfaat : 1. Tidak perlu lagi diinput ulang atau direkapitulasi oleh Fungsional Perencana 2. Dapat diketahui dan diupdating secara online oleh semua penginput 3. Waktu proses dan finalisasi lebih cepat
13.	PRIHATIN (Pelaporan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Rutin)	Pelaporan program kegiatan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan cara menyampaikan fisik laporan ke Bappeda sehingga pelaporan penanggulangan kemiskinan yang disampaikan ke Dirjen Bangda Kemendagri oleh Bappeda sering tidak tepat waktu. Dengan penggunaan PRIHATIN, pelaporan bisa dilakukan secara langsung dengan cara mengisi capaian program kegiatan pada format yang telah disediakan melalui aplikasi Google Spreadsheet.	Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan dan evaluasi dokumen pelaksanaan program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam. Manfaat : Mewujudkan pelaporan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
14.	PAK KAYO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Khusus Hari Rayo)	Sebelum adanya Pak Kayo Dinas Dukcapil Agam menghadapi beberapa kendala, seperti warga tidak dapat melakukan pengurusan yang pulang kampung (hari raya lebaran) dan Warga harus menunggu setelah cuti Bersama (hari raya lebaran). Inovasi ini memudahkan masyarakat yang merantau dalam mengurus Dokumen Kependudukannya di saat libur dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak antrian. Sistem ini diujicobakan secara bertahap untuk memastikan fungsi berjalan optimal sebelum diterapkan secara luas dan	Tujuan : Pak Kayo membantu masyarakat atau warga khusus nya bagi para perantau yang sedang pulang kampung saat lebaran idul fitri dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan yang mencakup perubahan elemen data, KTP

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		dilakukan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.	perpindahan domisili, akte kelahiran akte kematian dll. Manfaat : 1. Mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan. 2. Mendukung transparansi dalam pelayanan publik. 3. Menjadi dasar bagi perencanaan layanan yang lebih baik di masa mendatang.
15.	SIGAP NIKAH	Inovasi ini dilatarbelakangi karena terdapat data 38,97 % keluarga di Kabupaten Agam pada Kartu Keluarganya Kawin Belum Tercatat. Kawin Tidak tercatat berimplikasi terhadap status perkawinan yang tidak terlindungi secara hukum negara. Anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat tidak dapat dicantumkan nama ayahnya pada Akta Kelahiran yang diterbitkan, sehingga hanya ditulis Anak seorang Ibu. Metode kebaruan yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi bersama Instansi terkait untuk mengampanyekan Kawin tercatat di KUA secara Gratis serta mendorong masyarakat yang kawin belum tercatat untuk melakukan Isbat baik secara mandiri maupun melalui program isbat nikah terpadu. Keunggulan Sigap Nikah adalah masyarakat dapat melakukan pembaharuan Kartu Keluarga secara langsung sesaat sidang isbat nikah selesai dilaksanakan jika telah memenuhi persyaratan memiliki buku nikah dari KUA. Sidang isbat juga dapat menentukan status seorang anak yang dilahirkan	Tujuan : Meningkatkan capaian Kawin tercatat bagi pasangan menikah di Kabupaten Agam Manfaat : 1. Meningkatkan capaian Kawin Tercatat di Kabupaten Agam. 2. Terlindunginya status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat
16.	SIPASTI (Sistem Pelayanan Antrian Terintegrasi)	Sebelum adanya SIPASTI, Dinas Dukcapil Agam menghadapi beberapa kendala, seperti proses rekapitulasi data pengunjung dilakukan secara manual sehingga memakan waktu, kesulitan dalam memantau jumlah penerima layanan secara akurat serta kurangnya data yang valid untuk analisis pelayanan dan perencanaan peningkatan kualitas layanan. Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang modern, transparan, dan berbasis teknologi, SIPASTI hadir untuk menjawab tuntutan tersebut. Sistem ini juga mendukung visi	Tujuan : SIPASTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam proses pencatatan data pengunjung dan penerima layanan secara offline. Sistem ini juga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik di era transformasi digital. Sistem ini dapat beroperasi secara offline, sehingga tetap optimal ketika ada gangguan jaringan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang user-friendly, memudahkan petugas dalam penggunaannya serta akurat dan Cepat: Data yang dihasilkan lebih akurat dan rekapitulasi dapat dilakukan dalam waktu singkat.	Manfaat : 1. Mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan. 2. Menyediakan data rekapitulasi pengunjung secara akurat dan sistematis. 3. Mendukung transparansi dalam pelayanan publik. 4. Menjadi dasar bagi perencanaan layanan yang lebih baik di masa mendatang.
17.	SISKAMLING (Sistem Perekaman KTP El Keliling)	Sebelum adanya Siskamling Dinas Dukcapil Agam menghadapi beberapa kendala, seperti masyarakat atau warga masih banyak yang belum melakukan perekaman KTP el dikarenakan lokasi yang terlalu jauh Masyarakat atau warga terkendala biaya, waktu dan transportasi untuk melakukan perekaman KTP el ke kantor dinas Dukcapil di Lubuk Basung. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini turut meningkatkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan publik yang semakin cepat dan mudah, dengan demikian hadirnya inovasi ini agar memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Kebaharuan yang dilakukan dengan pemanfaatan kerja sama antar perangkat nagari, kecamatan dan pihak sekolah untuk memfasilitasi perekaman KTP el.	Tujuan : Siskamling Mempermudah masyarakat atau warga untuk perekaman KTP el dengan waktu yang efisien dan biaya ,tanpa harus datang ke kantor disdukcapil serta Manfaat : Mengurangi antrian dan beban administrasi di kantor layanan.
18.	Buku Pokok Pemakaman (BUPOPEM)	Inovasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini dilatarbelakangi karena adanya pencatatan peristiwa penting kependudukan salah satunya adalah pencatatan kematian. Selama ini peristiwa penting tersebut dianggap tidak perlu oleh sebagian keluarga untuk melaporkannya. Kematian yang tidak tercatat berpengaruh besar terhadap kebijakan pembangunan lainnya. Untuk itu upaya yang dilakukan dengan menerapkan pelaporan kematian secara berjenjang mulai dari keluarga, Jorong, Nagari, Dukcapil Kabupaten dan Provinsi hingga ke Dirjen Dukcapil, memanfaatkan media group Whatsapp untuk pelaporan kematian dan	Tujuan : Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan terhadap peristiwa Penting Manfaat : Tersedianya data pelaporan Kematian untuk kebijakan Bantuan Sosial dan Kesehatan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		Buku Pokok Pemakaman serta menghimpun data pelaporan kematian dan Buku Pokok Pemakaman di Tingkat Kabupaten	
19.	Jemput Bola Untuk Rentan Administrasi Kependudukan (JEBOL TANDUK)	Sebelum adanya Jebol Tanduk Dinas Dukcapil Agam menghadapi beberapa kendala seperti adanya sebagian masyarakat yang memiliki gangguan fisik/mental (Disabilitas) yang tidak bisa datang secara langsung ke kantor disdukcapil untuk perekaman KTP-el. Adapun kebaruan yang dilakukan dengan mengedepankan kepekaan sosial masyarakat dan pemerintah di level terendah dan melakukan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.	Tujuan : Jebol Tanduk mempermudah masyarakat yang masuk dalam kategori rentan administrasi mendapatkan Jebol Tanduk mempermudah masyarakat yang masuk dalam kategori rentan administrasi mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor disdukcapil. Manfaat : 1. Peningkatan efisiensi layanan publik. 2. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukannya. 3. Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
20.	LAKI SI ONE (Layanan Aktivasi IKD Secara Online)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena tingginya kebutuhan layanan kependudukan yang cepat dan efisien dan waktu, tenaga yang diperlukan masyarakat untuk mengurus aktivasi IKD secara manual. Inovasi ini meningkatkan inklusi digital masyarakat dalam layanan kependudukan serta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat dan pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam aktivasi data kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diganti dengan aktivasi IKD secara online melalui sistem yang terintegrasi sehingga layanan cepat, mudah, dan efisien.	Tujuan : 1. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. 2. Mendukung transformasi digital pelayanan publik di daerah. Manfaat : 1. Masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan kapan saja dan di mana saja. 2. Mengurangi antrean dan beban administrasi di kantor layanan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
21.	LAPAK NAGARI (Layanan Prima Administrasi Kependudukan di Nagari)	Sebelum adanya LAPAK NAGARI, Dinas Dukcapil Agam menghadapi beberapa kendala, seperti kantor pelayanan dipadati oleh penduduk yang mengurus Administrasi Kependudukan, masyarakat harus antrian panjang dan memakan waktu yang cukup panjang, jarak tempuh yang cukup jauh dalam mengurus Administrasi Kependudukan ke kantor pemerintahan dan kurang efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang modern, transparan, dan berbasis teknologi, LAPAK NAGARI hadir untuk menjawab tuntutan tersebut. Layanan ini juga mendukung visi pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik di era transformasi digital dan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebaharuan yang dilakukan adalah dengan mendekatkan tempat layanan Administrasi Kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Agam, memudahkan dan mempercepat proses administrasi masyarakat dalam pengurusan Administrasi Kependudukan serta dokumen Administrasi Kependudukan dapat langsung di cetak di Nagari seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP-el), kartu identitas anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian dll.	Tujuan : Mempercepat pelayanan dan memangkas jarak dalam pengurusan administrasi kependudukan serta menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Manfaat : 1. Mendekatkan tempat layanan Administrasi Kependudukan untuk masyarakat 2. Mengurangi jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mengakses layanan 3. Dapat mengurangi beban kerja dikantor pelayanan 4. Mempercepat proses pengurusan dokumen dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pemerintahan. 5. Mendukung transparansi dalam pelayanan publik dan mengurangi praktik percaloan. 6. Menjadi dasar bagi perencanaan layanan yang lebih baik di masa mendatang.
22.	SIDARUL (Sistem digitalisasi Data floRa LUBuk Basung)	Pemerintah membuat kebijakan yang mengatur akan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi kehidupan warga kota pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan RTH di kawasannya. Ruang terbuka hijau yang dimaksud terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Berbagai jenis tanaman yang ditanami pada Ruang	Tujuan : 1. Memaksimalkan inventarisasi tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung; 2. Memaksimalkan informasi kepada masyarakat terkait data tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung;

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		Terbuka Hijau (RTH) dengan pengelompokan tanaman perdu tinggi dan rendah, semak tinggi dan rendah, pohon tinggi, sedang dan rendah, tanaman merambat serta ground cover. Pada sekarang ini, masyarakat lebih cenderung mencari informasi melalui media online untuk mempermudah akses informasi yang diinginkan. Sebelumnya informasi tanaman berupa selebaran yang dibuat. Pada saat ini Dinas lingkungan hidup mengembangkan menjadi sistem digitalisasi berupa barcode yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Tujuan hal tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam informasi terkait tanaman yang ada di taman Kabupaten Agam, maka terciptalah SIDARUL (Sistem digitalisasi Data floRa LUBuk Basung). Dengan adanya SIDARUL dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap nama, jumlah populasi dan persebaran vegetasi tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung. Masyarakat cukup screening barcode yang ada maka informasi terkait tanaman tersebut akan muncul.	- Memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengetahui jenis dan populasi tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung - Memaksimalkan pengetahuan masyarakat terkait tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung. Manfaat : - Memaksimalkan inventarisasi tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung; - Memaksimalkan informasi kepada masyarakat terkait data tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung; - Memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengetahui jenis dan populasi tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung - Memaksimalkan pengetahuan masyarakat terkait tanaman yang ada di taman Kota Lubuk Basung.
23.	GRAPARI (Gerai Pangan Mandiri)	Ketersediaan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan harus diimbangi dengan Keterjangkauan harga agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pangan sesuai kebutuhan. Isu keterjangkauan ini merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan yang tinggi terutama saat gejolak harga pangan, disparitas harga antar wilayah yang signifikan, margin keuntungan yang tidak proporsional pada rantai distribusi, keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta efektivitas mekanisme stabilisasi harga oleh pemerintah. Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum adanya Gerai/Toko yang menjamin bahwa bahan pangan yang tersedia dengan harga dalam batas HET/HAP dan kualitas yang terjamin. Dengan adanya inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini akan menjadikan harga produk pangan yang tersedia dijamin lebih murah dari harga pasaran dan Produk dijamin bermutu dan aman.	Tujuan : Tersedianya bahan pangan pokok yang murah, aman dan berkualitas yang mudah diakses oleh masyarakat. Manfaat : - Membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan yang terjangkau dan berkualitas. - Memperbaiki distribusi, akses dan pasokan pangan bagi masyarakat.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
24.	SICAPANG (Variasi Cadangan Pangan)	Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pangan. Dimana akses terhadap pangan bergizi menjadi tantangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kabupaten Agam yang merupakan daerah dengan tingkat bencana alam yang tinggi. Kondisi geografis yang rentan terhadap bencana seperti longsor, banjir, gempa, dll. Bencana alam berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan. Tidak semua bahan pangan diproduksi di Kabupaten Agam sehingga apabila terjadi kendala dalam distribusi akan mengganggu pasokan. Gangguan distribusi dapat mempengaruhi pasokan dan harga pangan. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan regional/nasional. Dengan adanya cadangan pangan ini bantuan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat lebih bervariasi dan lengkap tidak saja hanya beras tapi juga gula dan minyak goreng. Selain untuk bantuan, dengan adanya cadangan minyak goreng dan gula, maka dapat dilakukan stabilisasi harga untuk kedua jenis bahan pangan ini yang cenderung berfluktuasi pada saat saat tertentu.	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan pangan terutama Beras, Gula dan Minyak goreng pada Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan fungsi Cadangan Pangan untuk mewujudkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana. Manfaat : 1. Tersedianya bahan pangan yang lebih bervariasi bagi bantuan pangan 2. Meningkatkan ketersediaan Pangan. 3. Membantu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
25.	Gampang (Gerakan Agam Mandiri Pangan)	Gerakan Agam Mandiri Pangan (Gampang) adalah upaya untuk mengembangkan nagari di Kabupaten Agam agar dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara pangan, sejahtera, dan berkelanjutan. Gerakan Agam Mandiri Pangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, pemerintah berkoordinasi dengan Nagari terhadap rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai sumber pendapatan dan mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Gerakan Agam Mandiri Pangan (Gampang) berupaya menciptakan sistim pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.	Tujuan : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan usaha dan industri lokal.. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kemampuan Manfaat : 1. Meningkatkan perekonomian daerah. 2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga. 3. Menaikkan taraf hidup warga. 4. Memudahkan masyarakat untuk hidup sehat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			5. Memudahkan masyarakat untuk hidup sehat. 6. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
26.	MERASA (Memberdayakan Masyarakat Desa)	Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Merasa) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini dilakukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa memegang peranan krusial dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan serta gizi. Dengan memberdayakan mereka dan mendukung upaya pertanian berkelanjutan, kita dapat membangun System pangan yang tangguh dan mandiri. Memberdayakan petani lokal dengan akses terhadap pelatihan, teknologi dan pembiayaan sehingga meningkatkan produktivitas pangan. Dengan peran aktif masyarakat desa ketahanan pangan dan gizi ikut meningkat.	Tujuan : 1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. 2. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas pangan. 3. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas pangan. Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses ke pangan yang seimbang dan bergizi. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses produksi dan konsumsi pangan. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang seimbang dan bergizi.
27.	GEDOR PINTU (Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan Pendampingan Petugas)	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi registrasi produk PSAT juga mencerminkan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya registrasi. Banyak pelaku usaha yang belum memahami manfaat registrasi, seperti jaminan keamanan dan mutu produk, akses pasar yang lebih luas, dan perlindungan hukum. Selain itu, mereka juga belum memahami risiko yang ditimbulkan oleh produk PSAT yang tidak terdaftar, baik bagi konsumen maupun bagi keberlangsungan usaha mereka sendiri. Menjawab tantangan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menciptakan inovasi "GEDOR	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha PSAT skala kecil mengenai pentingnya registrasi produk PSAT berkemasan. 2. Mempermudah dan mempercepat proses registrasi produk PSAT PDUK bagi pelaku usaha kecil melalui pendampingan intensif.



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		PINTU" (Gaspol Izin Edar dengan Optimalisasi Registrasi dan Pendampingan Petugas). Inovasi ini mengubah pendekatan lama yang pasif menjadi strategi yang lebih proaktif. Jika sebelumnya sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas melalui spanduk, brosur, atau pertemuan tatap muka yang jarang, kini petugas turun langsung ke lapangan, "menggedor pintu" pelaku usaha dan pedagang PSAT untuk memberikan edukasi serta pendampingan registrasi secara intensif.	3. Meningkatkan jumlah registrasi produk PSAT PDUK secara signifikan, mencapai target minimal 16 registrasi per tahun. 4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kecil terhadap regulasi keamanan pangan. Manfaat : 1. Meningkatkan legalitas dan daya saing produk PSAT. 2. Memperluas akses pasar dan peluang usaha. 3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk PSAT 4. Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk PSAT yang beredar di pasaran.
28.	PEDULI NELAYAN (Peningkatan Edukasi Pelayanan dan Intensifikasi Nelayan)	Kehidupan sosial masyarakat nelayan di Kabupaten Agam sebagaimana masyarakat nelayan lainnya di Indonesia menghadapi permasalahan yang relatif sama, yaitu rendahnya pendidikan, terbatasnya kemampuan teknis, manajemen dan kelembagaan nelayan, terbatasnya kemampuan nelayan untuk memiliki/menggunakan sarana/prasarana yang modern dan layak operasi, produktivitas yang sangat tergantung pada alam hingga perubahan cuaca dan kondisi laut dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Banyaknya nelayan yang tidak memiliki akses ke modal yang cukup untuk membeli peralatan dan teknologi yang lebih baik, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar dan lamanya transfer teknologi mengakibatkan pendapatan masyarakat nelayan menjadi tidak menentu karena fluktuatifnya hasil tangkapan, yang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sebelumnya telah melakukan upaya sosialisasi dengan kegiatan tatap muka yang terbatas, pendampingan secara individual yang kurang intensif serta penyediaan sarana prasarana melalui APBD / APBN. Untuk memaksimalkan upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam membuat inovasi PEDULI NELAYAN yaitu Peningkatan Edukasi Pelayanan dan Intensifikasi	Tujuan : PEDULI NELAYAN atau Peningkatan Edukasi, Pelayanan dan Intensifikasi Nelayan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dalam mengupayakan peningkatan produksi perikanan tangkap. Manfaat : 1. Meningkatnya produksi ikan 2. Meningkatnya pendapatan nelayan 3. Mengurangi biaya operasional 4. Meningkatnya kualitas ikan 5. Mengurangi dampak lingkungan 6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan 7. Meningkatnya kontribusi pada perekonomian nasional



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		Nelayan. Inovasi ini berupaya untuk mewujudkan nelayan yang peduli dan mandiri yang diwujudkan melalui kegiatan meningkatkan kemampuan teknis, manajemen dan kelembagaan nelayan, meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar nelayan serta fasilitasi penguatan kelembagaan dan akses permodalan dengan pembentukan korporasi nelayan.	
29.	GURAMI (Gerakan Urang Agam Makan Ikan)	Kabupaten Agam menghadapi tantangan dalam meningkatkan konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan target nasional. Padahal, ikan merupakan sumber protein yang kaya akan gizi dan berperan penting dalam pemenuhan nutrisi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya konsumsi ikan di daerah ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat gizi ikan bagi kesehatan, masih tingginya ketergantungan pada sumber protein lain seperti daging ayam dan sapi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan lokal. Selain itu, pemasaran dan distribusi produk ikan masih terbatas, sehingga masyarakat tidak selalu memiliki akses yang mudah terhadap ikan segar maupun olahan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan isu strategis yang mencakup beberapa aspek penting. Dari sisi ketahanan pangan, peningkatan konsumsi ikan menjadi bagian dari upaya menciptakan pola makan yang lebih seimbang dan bergizi bagi masyarakat.	Tujuan : 1. Meningkatkan Konsumsi Ikan 2. Mendukung Ketahanan Pangan 3. Mengurangi Angka Stunting dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 4. Meningkatkan Perekonomian Lokal 5. Meningkatkan Inovasi Produk Berbasis Ikan 6. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. 2. Membantu masyarakat mendapatkan sumber protein yang terjangkau dan berkualitas. 3. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan permintaan ikan. 4. Menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
30.	RUMPPUN (Rumah Pelayanan Pelaku Usaha Perikanan)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ini menciptakan inovasi dengan membantu industri perikanan lokal menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada daya saing produknya di pasar nasional. Rendahnya daya saing produk perikanan lokal disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemasan yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar industri. Produk perikanan dari luar negeri maupun produk lokal dari industri besar cenderung memiliki desain kemasan yang lebih profesional, menarik, dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Selain itu,	Tujuan : 1. Meningkatkan daya saing produk perikanan lokal melalui kemasan yang lebih menarik, fungsional, dan sesuai standar. 2. Mendukung UMKM perikanan dengan memberikan akses mudah terhadap teknologi pengemasan yang berkualitas dan terjangkau.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		banyak pelaku usaha perikanan mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi pengemasan yang berkualitas, baik dari segi bahan kemasan maupun metode pengemasan. Hal ini berimbas pada ketahanan produk yang lebih rendah karena kemasan yang digunakan sering kali tidak sesuai standar, mudah rusak, dan tidak dapat mempertahankan kualitas produk dalam jangka waktu lama. Permasalahan distribusi pun menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesegaran produk perikanan yang mudah mengalami penurunan mutu jika tidak dikemas dengan baik.	3. Meningkatkan ketahanan dan masa simpan produk melalui teknologi vakum packaging sehingga produk lebih tahan lama. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. 5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait kemasan pangan, seperti standar BPOM, dan SNI 6. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya branding, pemasaran, dan desain kemasan yang menarik. Manfaat : 1. Meningkatkan nilai jual produk dengan kemasan yang lebih menarik dan higienis. 2. Memudahkan pemasaran produk ke pasar modern dan ekspor. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM perikanan. 4. Mengurangi limbah plastik dengan penerapan kemasan yang lebih ramah lingkungan.
31.	SIDAK UMKM (Sistem Informasi Pendataan Lengkap UMKM)	Inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM ini dilatarbelakangi belum ada data lengkap UMKM sebagai gambaran dalam membuat kebijakan bagi pelaku usaha di Kabupaten Agam. Untuk itu diharapkan ada wadah/platform/aplikasi yang bisa diakses secara luas bagi stakeholder, UMKM dan masyarakat yang terintegrasi untuk penyediaan data dan informasi Pendataan Lengkap UMKM di Kab Agam. Selain itu belum adanya data potensi dari UMKM yang bergerak dalam usaha bidang perdagangan, Jasa serta industri yang melaksanakan usaha dibidang masing-masing.	Tujuan : Menghimpun data Lengkap UMKM potensi UMKM sektor perdagangan, Jasa dan industri dan pengembangan usaha UMKM pada jenis usaha Perdagangan, Jasa dan Industri dengan melibatkan UMKM di Kabupaten Agam dengan pengguna platform/aplikasi untuk memberikan data /informasi lengkap secara bersama ke pihak yang membutuhkan seperti pihak perbankan, BUMN dan Perusahaan untuk mendapatkan modal usaha. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			- Memperkenalkan potensi pengembangan produk UMKM secara lebih luas. - Memberi gambaran yang lebih luas kepada stakeholder sebagai bahan untuk mengambil kebijakan terkait UMKM di Kabupaten Agam.
32.	MERPATI SURAT (Menjaring Pasar Petani Sayur Sehat)	Pada Dinas Pertanian, umumnya produk hortikultura masih dibudidayakan secara konvensional, seperti penggunaan pestisida sintetik, pupuk buatan secara berlebihan. Bahaya pestisida sintetik dalam produk sayuran dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, gangguan sistem saraf, kesuburan, sistem kognitif dll. Pemberian pupuk buatan dan pestisida sintetik yang terus menerus dapat menurunkan kualitas tanah secara fisik, kimia dan biologi serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Pasar/konsumen yang menuntut perbaikan mutu dari produk hortikultura untuk meningkatkan daya saing dengan produk negara lain yang sudah terlebih dahulu membekali diri dan diharapkan nantinya petani kita tidak jadi penonton dinegeri sendiri. Inovasi Menjaring Pasar Petani Sayur Sehat (Merpati Surat) dibuat untuk meningkatkan nilai jual Sayuran Sehat yang sudah memiliki Sertifikat Prima 3.	Tujuan : Meningkatkan nilai tambah produk sayuran yang aman dikonsumsi, meningkatkan hilirisasi produk, dan pengembangan komoditi sayuran sehat dengan melibatkan Petani Digital yaitu petani pengguna platform/aplikasi untuk memberikan data /informasi dan secara bersama ke pihak luar sehingga produk sayur sehat bersertifikat prima dengan jaminan mutu aman konsumsi dapat menjaring pasar yang lebih luas. Manfaat : - Mutu produk pertanian khususnya komoditi sayur sehat bersertifikat prima terjamin sehingga aman konsumsi. - Memberi wadah pada Gapoktan untuk dapat mempromosikan sayur sehat bersertifikat prima dan meningkatkan hilirisasi produk pertanian.
33.	SIBBUSAR (Sistem Informasi Bibit Buah dan Sayuran)	Belum terintegrasinya data potensi komoditas pertanian untuk setiap fase pertanian mulai dari ketersediaan dan kemampuan penyediaan benih/bibit, serta peluang pasar serta belum ada wadah/platform/aplikasi yang bisa diakses secara bersama oleh petani, pelaku usaha muda pertanian, penyuluh pertanian, dan stakeholder pertanian lainnya yang terintegrasi untuk penyediaan data dan informasi pengembangan pertanian (komoditi buah dan sayuran) di Kab Agam. Melalui Inovasi	Tujuan : Menghimpun data potensi dan pengembangan sektor komoditi buah dan sayuran dengan melibatkan Petani Digital yaitu petani pengguna platform/aplikasi untuk memberikan data /informasi dan secara bersama ke pihak luar

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		SIBBUSAR (Sistem Informasi Bibit Buah dan Sayuran diharapkan Dinas Pertanian dapat meningkatkan jangkauan informasi lebih cepat dan lebih luas untuk pemasaran benih/bibit buah dan sayuran serta memperpendek rantai penjualan pihak luar Kab. Agam.	sehingga ketersediaan bibit unggul komoditi buah dan sayuran di Kabupaten Agam, dapat tersalur dengan baik dan mempunyai sertifikasi. Manfaat : 1. Memperkenalkan potensi pengembangan komoditi buah dan sayuran unggulan lokal secara lebih luas. 2. Memberi wadah pada kelompok tani penangkar untuk dapat mempromosikan komoditi unggulan yang telah dikembangkan.
34.	SIPEKWAN (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan)	Inovasi SIPEKWAN pada Dinas Pertanian ini merupakan ide yang muncul untuk memudahkan dalam pengorganisasian kegiatan dan memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat peternak dan masyarakat lainnya yang membutuhkan akses kepada pelayanan kesehatan hewan. Inovasi “SIPEKWAN” dilakukan dengan meningkatkan peran aktif dari Dokter Hewan dan Paramedis Kesehatan Hewan yang ada di UPT Puskesmas untuk melakukan pelayanan terpadu di suatu lokasi dimana terdapat dinamika penyakit hewan yang bersifat sporadik, endemik maupun lintas batas serta jauh jauhnya jangkauan dari Puskesmas ke lokasi peternak yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Medik Veteriner maupun Paramedik Veteriner Selain itu perlunya peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat, maka perlu adanya media yang dapat mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesehatan hewan ternak dan hewan kesayangan 2. Mencegah penyebaran penyakit zoonosis (penularan kepada manusia) 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak 4. Meningkatkan status kesehatan hewan dan penjaminan produk hewan yang Aman Sehat Untuk dan Halal (ASUH) 5. Menurunkan angka kejadian penyakit menular ternak Manfaat : Meningkatkan kesehatan hewan ternak dan hewan kesayangan, Mencegah penyebaran penyakit zoonosis (penularan kepada manusia), Meningkatkan pengetahuan masyarakat kesehatan hewan, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak, Menurunkan angka kejadian penyakit menular ternak.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
35.	SIKEBUD AGAM (Sistem Informasi Kebudayaan Agam)	Banyaknya permasalahan kebudayaan di Kabupaten Agam seperti kurangnya pembelajaran budaya, kurangnya rasa memiliki budaya, regenerasi budaya serta masuknya budaya luar sehingga hilangnya tradisi maka terjadi kurangnya informasi kebudayaan di Kabupaten Agam ditengah-tengah masyarakat baik dalam maupun diluar negeri. Dari permasalahan tersebut maka diciptakanlah inovasi SIKEBUD dengan membangun sistem informasi tentang kebudayaan yang ada. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, seluruh kebudayaan yang ada di Kabupaten Agam dapat diketahui oleh masyarakat dalam maupun luar negeri melalui sistem informasi tersebut.	Tujuan : 1. Agar diketahuinya kebudayaan yang ada di Kabupaten Agam oleh Masyarakat dalam dan luar negeri. 2. Terakomodirnya seluruh kebudayaan yang ada di Kabupaten Agam dalam satu sistem informasi Manfaat : 1. Tersosialisasi ragam budaya yang ada di Kabupaten Agam 2. Diketahuinya oleh masyarakat luas jenis-jenis kebudayaan yang ada di Kabupaten Agam 3. Diketahuinya oleh sejarah dari masing-masing jenis-jenis kebudayaan yang ada di Kabupaten Agam 4. Diharapkan masyarakat dalam dan luar negeri mengetahui ragam budaya yang ada di Kabupaten Agam.
36.	SIPOLAN (SISTEM INFORMASI LAYANAN DIKBUD)	Banyaknya permasalahan administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti rentang kendali daerah yang sangat jauh, banyaknya ASN dan sekolah yang membutuhkan pelayanan administrasi, terbatasnya anggaran sekolah untuk mendanai perjalanan dinas ke dinas pendidikan, banyaknya jenis administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN serta terbatasnya ASN di pelayanan administrasi. Dari permasalahan tersebut muncul sebuah inovasi dengan membangun sistem informasi tentang kemudahan beradministrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam yang diberi nama SIPOLAN, dengan adanya inovasi ini diharapkan seluruh ASN mendapatkan layanan administrasi dengan efektif dan efisien.	Tujuan: 1. Pelayanan yang efektif dan efisien untuk seluruh ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manfaat: 1. Diharapkan ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan administrasi

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
37.	TARANCAM BARANTI (Program Deteksi Dini Terhadap Anak Putus Sekolah)	Permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Agam seperti persoalan murid yang sering melanggar tata tertib sekolah, anak sering menghadapi permasalahan pribadi, permasalahan keluarga dan permasalahan dengan teman sebaya, terdapat perbedaan keinginan dari peserta didik dengan apa yang diatur di satuan pendidikan, tidak terjalannya kerjasama yang harmonis antara orang tua siswa dengan satuan pendidikan, adanya sikap orang tua yang tidak mau anaknya disalahkan, adanya kejenuhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang mengakibatkan malas dalam belajar dan adanya peserta didik yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Dari permasalahan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menciptakan inovasi TARANCAM BARANTI untuk mendeteksi sejak dini gejala-gejala peserta didik yang terancam dan berkemungkinan akan putus sekolah dan membantu persoalan yang dihadapi oleh peserta didik.	Tujuan: 1. Mencegah agar peserta didik jangan sampai berhenti mengikuti kegiatan pembelajaran 2. Terlaksananya pembinaan peserta didik oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Manfaat: Mengurangi angka putus sekolah.
38.	LAPEK (Layanan Pengaduan Masyarakat)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat di dinas perhubungan Kabupaten Agam, layanan pengaduan masyarakat masih dilakukan secara konvensional dimana masyarakat diharuskan untuk datang secara langsung ke kantor serta belum adanya tim khusus untuk menangani pengaduan masyarakat sehingga pengaduan belum terkoordinasi dengan baik. Untuk itu Dinas Perhubungan menciptakan inovasi Lapek yang merupakan inovasi digitalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat Menggunakan Google Form dan diharapkan dapat meningkatkan layanan pengaduan masyarakat, mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke Dinas Perhubungan. Adapun keunggulan menggunakan inovasi ini karena dengan adanya inovasi digital maka pengaduan masyarakat akan lebih cepat, pelaksanaan pelayanan masyarakat lebih efisien baik dari segi waktu dan biaya.	Tujuan : Untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, dan Meningkatkan efisiensi dalam proses menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke Dinas Perhubungan. Manfaat : 1. Untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, untuk mempermudah masyarakat 2. untuk melakukan pengaduan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, dan Meningkatkan efisiensi dalam proses menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke Dinas Perhubungan.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
39.	Setan Lintasan (Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum adanya kesadaran masyarakat untuk keselamatan berkendara, asih kurangnya sosialisasi terkait keselamatan berkendara dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berkendara dan dampak yang ditimbulkan. Selama ini banyak pengendara kendaraan bermotor yang belum mengetahui prosedur keselamatan berkendara. Melalui Inovasi Setan Lintasan diharapkan masyarakat bisa mengetahui prosedur keselamatan berkendara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membuat prosedur keselamatan berkendara sehingga masyarakat bisa mengetahui prosedur keselamatan berkendara	Tujuan : Untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dalam berkendara dan mengurangi jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Agam. Manfaat : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan berkurangnya angka kecelakaan di jalan raya.
40.	Si ODOL (Sosialisasi Over Dimensi Over Load)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena kurangnya Edukasi mengenai dampak negatif over dimensi bagi pemilik kendaraan bermotor, kurangnya fasilitas timbangan di jalan raya untuk angkutan barang serta belum optimalnya petugas yang menindak kendaraan over dimensi. Para pemilik kendaraan mungkin tidak memahami risiko keselamatan dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh praktik over dimensi, yang dapat berakibat fatal, termasuk kecelakaan lalu lintas yang serius. Dengan adanya, inovasi Si Odol (sosialisasi over dimensi over load) dapat memberikan peningkatan edukasi mengenai dampak negatif over dimensi menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.	Tujuan dan Manfaat : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Agam akan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam. 2. Memajukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya dalam berkendara di Kabupaten Agam. 3. Memudahkan pemilik kendaraan lebih memahami dampak dari kendaraan yang melebihi dimensi yang ditetapkan.
41.	SIKERJA (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemda)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum ada sistem yang terintegrasi pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Pemerintah Kab. Agam. Adapun upaya yang dilakukan sebelum inovasi ini pada perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi SAKIP dilakukan dengan desk atau diskusi sedangkan setelah inovasi ini diterapkan dapat dilakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi SAKIP dapat dilakukan melalui aplikasi. Keunggulannya dimana sistem ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja sehingga memudahkan dalam melakukan monev capaian kinerja oleh Bagian Organisasi	Tujuan : Untuk memudahkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Agam Manfaat : Proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga efisien dan efektif.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
42.	LAKTASI BOS (Pelayanan, Konsultasi dan Informasi Bagian Organisasi)	Adanya keterbatasan sumber daya pada Bagian Organisasi (SDM, sarana dan prasarana dan anggaran) dan kompleksitas tugas dan fungsi Bagian Organisasi maka Bagian Organisasi dalam memberikan Pelayanan Informasi dan Konsultasi belum maksimal. Maka dengan adanya inovasi LAKTASI BOS dapat memberikan pelayanan informasi dan konsultasi secara daring bagi perangkat Daerah dalam urusan Kelembagaan, Pelayanan Publik dan tatalaksana serta Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi. Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada saat ini pada Bagian Organisasi. Inovasi Laktasi Bos menjadi salah satu jalan dalam pemanfaatan teknologi/sarana/fasilitas yang memudahkan bagi Perangkat Daerah dalam berkonsultasi, berbagi ide dan penyebaran informasi/data sehingga Perangkat daerah tidak perlu datang ke Bagian Organisasi.	Tujuan : Meningkatkan kepuasan layanan terhadap Perangkat Daerah Manfaat : Mempermudah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kebijakan bidang Tatalaksana, Kelembagaan dan Kinerja Reformasi Birokrasi.
43.	AMAK ROSA (Ampek Angkek Bagoro Sarantak)	Melihat kondisi area jalan Bukittinggi –Payakumbuh KM 5 yang sangat memprihatinkan dan keadaan di wilayah Kecamatan Ampek Angkek serta jalan-jalan yang menghubungkan masing-masing nagari, kecamatan yang dipenuhi dengan sampah dan pada tanggal 11 Mei 2019 Kecamatan Ampek Angkek terdampak bencana banjir bandang/galodo, peristiwa tersebut memunculkan ide untuk melaksanakan kegiatan Ampek Angkek Bagoro Sarantak. Dimana salah satu upaya untuk melestarikan gotong royong merupakan salah satu harapan semua anggota masyarakat agar semangat gotong royong selalu ada dan tetap lestari di Nagari Ampek Angkek. Jangan sampai hal tersebut, nantinya memudar seiring dengan majunya zaman era digital.	Tujuan : Upaya untuk melestarikan gotong royong, agar semangat gotong royong selalu ada dan tetap lestari. Jangan sampai hal tersebut, nantinya memudar seiring dengan majunya zaman era digital. Mempererat tali Silaturahmi atau persaudaraan. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat disekitar. Upaya untuk melestarikan gotong royong merupakan salah satu harapan semua anggota masyarakat agar semangat gotong royong selalu ada dan tetap lestari. Jangan sampai hal tersebut, nantinya memudar seiring dengan majunya zaman era digital. Gotong royong adalah salah satu sifat dasar yang menjadi unggulan orang-orang Indonesia dan tidak dimiliki oleh warga negara lain Manfaat : Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat disekitar.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			Dengan adanya gotong royong, banyak orang mempunyai rasa peduli yang tinggi dan juga terciptanya kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
44.	GERAAB (Gerakan Ampek Angkek Berbagi)	Mengacu kepada Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos. Adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan bantuan sosial yang tidak merata dan adanya beberapa kriteria yang tidak memenuhi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam banyak kondisi dan situasi dihadapkan dengan penghimpunan atau penyaluran donasi yang terbang pilih karena belum terbangunnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Nagari di Kecamatan Ampek Angkek terhadap lembaga.	Tujuan : Dengan saling membantu dan memberdayakan satu sama lain, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Manfaat : Program bantuan kepada masyarakat dengan membangun SDM yang informatif, membantu dan peduli kepada masyarakat yang dapat menciptakan sikap pengurus dan pengelola lembaga yang baik dan berintegritas.
45.	MemBeRi (Membahagiakan masyarakat miskin dengan berbagi Berkah Ramadhan dan Idul Fitri)	Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial di antara umat muslim, dengan memberikan sedekah, infak maupun zakat kepada yang membutuhkan maka kita sudah dapat membantu mengurangi beban hidup mereka dan merasakan kebahagiaan bersama. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian untuk menyambut lebaran. Dengan memberikan sedikit menyisihkan harta kita maka kita telah dapat membantu mengurangi penderitaan mereka dan memberikan harapan yang lebih baik.	Tujuan : Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial di antara umat muslim, dengan memberikan sedekah, infak maupun zakat kepada yang membutuhkan maka kita sudah dapat membantu mengurangi beban hidup mereka dan merasakan kebahagiaan bersama. Manfaat : Mengurangi beban hidup mereka dan merasakan kebahagiaan bersama. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			untuk menyambut lebaran. Dengan memberikan sedikit menyisihkan harta kita maka kita telah dapat membantu mengurangi penderitaan mereka dan memberikan harapan yang lebih baik.
46..	Jumat Berkreta (Jum'at Berseni Kreativitas Tanpa Batas)	Mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Beban kerja pegawai yang banyak, mengakibatkan pegawai tersebut merasa jenuh dan tidak jarang pegawai lebih memilih meliburkan diri dengan mengambil cuti pegawainya. Dari beberapa keluhan pegawai yang dihimpun maka perlu kiranya dilakukan penyegaran berupa menggali kreativitas dari pegawai baik itu berupa penampilan bakat diantaranya nyanyi, menari maupun bakat seni lainnya. Kreativitas merupakan kemampuan individu untuk mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan orang lain dan lingkungan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan, Kecamatan Ampek Angkek membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna, karena berpikir dan bersikap secara kreatif menjadikan seseorang mampu melihat berbagai kemungkinan dalam pemecahan masalah, serta menjadi kunci dalam peningkatan kualitas dan taraf hidup individu	Tujuan : Memberi dukungan dan dorongan positif pada pegawai dan membantu meningkatkan kreativitas pegawai, dan memberi pegawai inspirasi dan motivasi untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan kreativitas pegawai. Manfaat : Dengan memberikan motivasi dan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kreativitas pegawai dapat mengalami manfaat kesehatan mental pegawai yang signifikan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
47.	PUTUMEWA (Purna Tugas adalah Hak Istimewa)	Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Data pegawai yang akan memasuki masa purna tugas/pensiun di wilayah kecamatan Ampek Angkek. Bekerja merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga dengan berbagai pekerjaan. Purna bakti adalah istilah Bahasa Indonesia yang mengacu pada masa pensiun atau masa setelah seseorang mengakhiri karier atau pekerjaan yang aktif, umumnya dalam konteks pekerjaan atau profesi.	Tujuan : Untuk menjalin tali silaturahmi keluarga besar purna bakti dengan keluarga. Untuk mengatasi atau menghibur pensiun dalam Masa transisi mendekati masa pra purnakarya atau pensiun disikapi beragam oleh setiap orang. Ada yang merasa cemas karena merasa belum siap dalam banyak aspek, baik aspek psikologi, aspek ekonomi dan materi maupun aspek sosial. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			Dengan kegiatan ini silaturahmi keluarga besar purna bakti dengan keluarga pegawai yang akan memasuki pensiun harapannya tetap terbina
48.	HIJABER PARSUKU (Himpunan Jalin Kerjasama Pariwisata Mengenalkan Sulaman Dan Kuliner)	Berawal dari kurang kenalnya wisata lokal dan luar dengan kuliner dan sulaman yang terdapat dari Kecamatan IV Koto dan masyarakat tidak tahu mengenalkan produknya maka dari Pemerintahan kita bantu untuk membesarkan UMKM dari Kecamatan IV Koto	Tujuan : Mengenalkan objek wisata dan UMKM sebagai pengembangan UMKM di Kecamatan IV Koto Manfaat : Untuk membantu perekonomian masyarakat dibidang UMKM dan desa wisata yang ada di Kecamatan IV Koto
49.	JOSMAS (Jalin Orientasi Bersama Masyarakat)	Inovasi ini dilatarbelakangi dari ketidaktahuan masyarakat tentang informasi dan melalui JOSMAS diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi peningkatan kinerja kecamatan IV Koto selain itu memberikan ruang yang lebih fleksibel dan informasi yang jelas kepada warga masyarakat agar warga bisa memberikan saran, kritik maupun masukan yang membangun, dalam rangka membangun dan mewujudkan Kecamatan IV Koto yang maju, mandiri dan sejahtera.	Tujuan : Dapat memberikan saran, kritik maupun masukan yang membangun, dalam rangka membangun dan mewujudkan Kecamatan IV Koto yang maju, mandiri dan sejahtera. Manfaat : 1. Memudahkan warga masyarakat dalam berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya. 2. Kecamatan mempunyai data Base informasi kegiatan yang bersumber dari aspirasi warga masyarakat yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun 3. Meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan tugas di era digitalisasi. 4. Terciptanya manajemen data sebagai bahan referensi peningkatan kinerja di Kecamatan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
50.	KOALACAMPO (Koordinasi Ala Wali nagari bersama Camat IV Koto)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih kurangnya keterampilan aparaturnya Kecamatan dan perangkat Nagari dalam memfasilitasi rapat koordinasi secara partisipatif dan fokus untuk menghasilkan rencana tindak lanjut serta masih terdapat keluhan atau ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan Nagari. Dalam menjalin koordinasi dan memperkuat koordinasi antara sesama Wali nagari dan antara Wali nagari dengan Camat IV Koto, maka dilakukan koordinasi khusus yang dinamakan dengan KOALACAMPO (Koordinasi Ala Wali nagari bersama Camat IV Koto, yang dilaksanakan secara bergiliran pada masing-masing Nagari di Kecamatan IV Koto. Membantu Nagari untuk dapat menyelesaikan masalah dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang ada di Nagari, serta <i>Sukses Story</i> di suatu Nagari dapat pula diterapkan di Nagari lain.	Tujuan : 1. Menjalin koordinasi dan memperkuat koordinasi antara sesama Wali nagari dan antara Wali nagari dengan Camat IV Koto 2. Membantu Nagari untuk dapat menyelesaikan masalah dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang ada di Nagari, serta <i>Sukses Story</i> di suatu Nagari dapat pula diterapkan di Nagari lain Manfaat : Nagari menjadi lebih mudah mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada
51.	Tilkam Peduli “GercepMas”	Inovasi ini dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat dengan ekonomi lemah yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan dengan adanya kejadian yang tidak dapat diduga yang melanda masyarakat seperti musibah kebakaran, warga yang terkena penyakit dan warga yang kurang mampu membutuhkan bantuan dari warga sekitar. Oleh karena itu kecamatan Tilatang Kamang membuat sebuah gerakan yang bergerak secara cepat atas kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak masalah, musibah maupun terkena bencana seperti kebakaran dan banjir, longsor dan bencana lainnya. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim dari Pemerintah khususnya Kecamatan Tilatang Kamang yang bertujuan untuk turun kelapangan untuk membantu melaksanakan penggalangan dana yang dibantu oleh semua pihak dan dilakukan berupa kegiatan sesudah wirid KORPRI melalui sumbangan katidiang/kotak kemudian dikumpulkan dan apabila mendapatkan informasi terkait bencana akan dilakukan pengecekan dan kemudian dilakukan kunjungan kelapangan kerumah masyarakat yang terdampak bencana/musibah disalurkan bantuan berupa barang dan uang senilai Rp 250.000 per orang kelompok yang terkena bencana.	Tujuan : Membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, kebakaran, meninggal dunia, dll. Manfaat : Masyarakat yang terdampak bisa terbantu dalam mengatasi masalah

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
52.	SIMPATI (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Terpadu dan Integratif)	Beberapa instansi/dinas terkadang sulit untuk mencari berkas surat yang sudah beberapa tahun ke belakang disaat dibutuhkan, terkadang harus membongkar gudang dan mencari dalam tumpukan surat di dalam karung. Maka dari itu kami membuat inovasi baru dalam sistem pengarsipan surat pada Kecamatan Tanjung Raya yang mana pada aplikasi ini sudah kami rancang se simpel mungkin agar surat yang kita butuhkan dapat ditemukan dalam hitungan menit, bahkan detik.	Tujuan : Mempermudah dalam menemukan arsip surat Manfaat : 1. Mempermudah pegawai dalam penginputan dan mencari surat, serta dapat diakses oleh siapa saja yang diberikan izin akses oleh admin 2. Surat terjamin aman, tanpa takut lagi jika surat fisik nya rusak, karena hasil Scan suratnya sudah disimpan di dalam Google Drive
53.	Oyak Katidiang	Beranjak dari kepedulian Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Raya terhadap kondisi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar khususnya tentang permasalahan pangan dan kesehatan, lahirilah empati kita dan berpikir untuk berbuat sesuatu yang berarti. Secara Nasional dapat kita ketahui bahwa berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Maka dari itu dicoba menghimpun/ menggalang dana melalui warga beserta TP-PKK Kecamatan Tanjung Raya, selanjutnya dana yang terkumpul digunakan untuk membeli sembako dan diserahkan langsung kepada sasaran. Untuk dana pelunasan tunggakan iuran BPJS, diserahkan melalui kasi kesra Nagari untuk diselesaikan secara tuntas oleh kasi kesra ke BPJS Kesehatan	Tujuan : Membantu masyarakat mengatasi permasalahan pangan dan kesehatan keluarga Manfaat : Mengurangi beban masyarakat duaafa yang dalam keadaan sakit
54.	CAKAR EMAS (Cegah Kenakalan Remaja dengan Edukasi, Mediasi dan Sosialisasi)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena seringnya terjadi kenakalan remaja seperti berkelahi, merokok, mencuri, penggunaan narkoba. Kenakalan remaja ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal, masalah seperti ini harus segera diatasi. Untuk itu Kecamatan Sei Pua menciptakan inovasi Cakar Emas yaitu dengan memberikan edukasi baik dari pemerintah, orang tua maupun lingkungan sekolah untuk	Tujuan : Menghindari generasi muda dari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Manfaat :



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		mengurangi masalah kenakalan remaja dengan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak masih usia dini, memberikan ajaran spiritual pada anak, mengajak anak melakukan hal yang positif sejak dini, memberikan motivasi serta penjelasan kepada anak tentang akibat dari kenakalan remaja.	1. Terhindarnya generasi muda dari perilaku yang menimpang 2. Terciptanya sumber daya manusia yang tangguh
55.	SELURUS SI ASMA (Selesai Urusan Silahkan Ambil Sayur Mayur)	Inovasi ini dilatarbelakangi oleh adanya diskusi dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kecamatan Baso diketahui bahwa persentase masyarakat yang mengonsumsi buah dan sayur setiap hari sangat kurang. Maka muncul ide sebuah inovasi dari Kecamatan Baso untuk menggerakkan masyarakat dalam mengonsumsi sayur dengan memberikan oleh-oleh dari kantor camat setelah melakukan urusan ke Kantor Camat yang diberi nama inovasinya Selurus Si Asma (Selesai Urusan Silahkan Ambil Sayur Mayur).	Tujuan : Memberikan stimulan kepada masyarakat untuk mengonsumsi sayur mayur setiap hari. Manfaat : 1. Meningkatkan budaya makan sayur dimasyarakat Kecamatan Baso 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur.
56.	MODAMKAR (Motor Pemadam Kebakaran)	Inovasi ini dilatarbelakangi oleh permintaan masyarakat untuk mengatasi pengairan persawahan, memadamkan kebakaran dan membersihkan pasca bencana banjir dan tanah longsor. Maka dari itu Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya berinisiatif untuk melakukan modifikasi motor menjadi motor pintar/ motor pemadam kebakaran, motor Damkar ini memiliki keunggulan bisa melewati jalan sempit yang tidak bisa diakses oleh mobil Damkar.	Tujuan: 1. Meminimalisir titik kebakaran 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam segi pengairan sawah 3. Membersihkan lokasi pasca bencana Manfaat: 1. Dapat menjangkau area padat penduduk 2. Memudahkan pengairan di bidang pertanian 3. Mempercepat membersihkan lokasi pasca bencana.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
57.	SARPIN (Sarok Pintar)	Inovasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sampah plastik rumah tangga, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan. Maka dari itu diciptakan inovasi SARPIN untuk membina masyarakat (ibu rumah tangga) untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi sampah yang bernilai.	Tujuan: 1. Mengurangi volume sampah di TPA 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang ekonomi kreatif. Manfaat: 1. Menciptakan lingkungan menjadi bersih dari sampah 2. Ibu rumah tangga dapat menghasilkan keuntungan dari produk yang dihasilkan dari sampah plastik.
58.	Lansani Pintar	Inovasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan pupuk kimia dan harga pupuk yang mahal. Maka dari itu Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya berinisiatif menciptakan Lansani pintar yang menciptakan produk pupuk organik.	Tujuan: 3. Mengurangi pupuk kimia 4. Meningkatkan kualitas kesuburan tanah 5. Meningkatkan perekonomian masyarakat Manfaat: 1. Hasil panen yang berkualitas 2. Tanah yang diberikan pupuk menjadi subur 3. Perekonomian masyarakat menjadi stabil
59.	MMC (Manggopoh Media Center)	Nagari Manggopoh yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak sehingga sulit mengakses informasi dengan mudah, cepat. Dimana masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan pasti. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi kegiatan nagari secara mudah, cepat dan efisien. Nagari Manggopoh melakukan inovasi dengan membuat Media Center Manggopoh yang merupakan sarana pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis teknologi dan internet yang berfungsi untuk menyampaikan informasi pada masyarakat/publik sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan terlibat dengan acara atau kegiatan yang sedang berlangsung.	Tujuan : 1. Tujuan inovasi media center meningkatkan kualitas layanan informasi publik 2. Mendukung tugas Lembaga dan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi 3. Mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan terjangkau 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			5. Menjadi sumber utama pertumbuhan produktivitas 6. Mengemat biaya Manfaat : 1. Mempermudah informasi dari pusat sampai ke daerah/nagari 2. Memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara publik 3. Mendukung tugas lembaga dan pemerintah nagari dalam penyebarluasan informasi publik 4. Membantu mengurangi hoaks 5. Membuat Masyarakat merasa lebih dekat dan terlibat dengan acara 6. Memenuhi hak publik terhadap informasi 7. Meningkatkan partisipasi publik dalam pertukaran informasi
60.	MGJB (Manggopoh Gerakan Jumat Berkah)	Kegiatan Jumat berkah identik dengan keagamaan, dalam implementasi membutuhkan data yang jelas, sumber dana yang jelas, serta penggalian potensi dalam merangkul donatur atau perusahaan yang ada dinagari Manggopoh serta mengajak dan berkolaborasi dengan lembaga nagari dalam membantu masyarakat duafa.	Tujuan : 1. Menebarkan kebaikan 2. Menumbuhkan semangat berbagi pada sesama 3. Menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat setempat 4. Membangun jiwa sosial dan kepedulian antar sesama Manfaat : 1. Manfaat spiritual, sedakah yang dilakukan pada hari jumat pahala akan dilipatgandakan 2. Manfaat sosial sedakah pada hari jumat dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan yang merupakan wujud nyata dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Manfaat pribadi, menambah rasa syukur bersedekah dapat menambah rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT
61.	Manggopoh Horti	Nagari Manggopoh merupakan salah satu nagari yang berpotensi menghasilkan tanaman hortikultura berupa cabai, terong, sawi, mentimun, dan banyak sayuran hortikultura lainnya. Namun walaupun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi oleh para petani dalam menerapkan hortikultura yaitu pengetahuan petani yang masih awam dan masih kurang pengetahuannya mengenai teknik menghasilkan tanaman yang berkualitas, selain itu akses terhadap bibit dan benih berkualitas tinggi yang masih terbatas dan mahal	Tujuan : Membantu perekonomian para petani di Nagari Manggopoh, dengan berbagai tanaman Horti yang dihasilkan serta dipasarkan di pasar lokal. Manfaat : Tersedia pangan yang bergizi untuk nagari manggopoh, karena tanaman Horti yang dihasilkan berasal dari bibit yang berkualitas dan para petani juga dapat mengembangkan keterampilan bukan hanya pada satu tanaman tapi tanaman lainnya juga dapat diolah dan di produksi sehingga para petani di nagari manggopoh memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tanaman lainnya.
62.	PONBA (Pondok Bahasa Inggris)	Masih banyaknya anak-anak di Nagari Manggopoh yang tidak bisa berbahasa Inggris dikarenakan kurangnya literasi serta tidak semua pendidikan sekolah dasar (SD) memiliki guru bahasa inggris. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung untuk memberikan pendidikan bahasa inggris kepada anak seperti ikut bimbingan belajar atau les bahasa inggris. Metode pembelajaran yang tidak efektif atau monoton juga dapat membuat anak-anak kurang tertarik dalam mempelajari bahasa Inggris. Ketidakseimbangan anak-anak dalam mengakses pendidikan di bidang bahasa inggris juga menjadi permasalahan.	Tujuan : Memberikan kesempatan bagi anak-anak Nagari Manggopoh untuk memiliki pendidikan bahasa inggris untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta memberikan pengalaman belajar yang terbaru bagi anak-anak Nagari Manggopoh. Manfaat : Anak-anak di Nagari Manggopoh menjadi pintar dan cerdas dalam bahasa inggris serta menjadi ilmu

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			juga bagi mereka dalam meningkatkan komunikasi lintas budaya yang mana budaya.
63.	SIGAGAH NARICI (Inovasi Gandeng Ayah Nagari Cingkariang)	Rendahnya cakupan Imunisasi dan kurangnya kunjungan ke Posyandu di Nagari Cingkariang, sehingga memicu adanya dampak peningkatan stunting di sebabkan penyakit penyerta. Selain itu rendahnya partisipasi dan pengetahuan ayah sebagai pengambil kebijakan di rumah tangga tentang imunisasi dan posyandu.	Tujuan : 1. Peningkatan Cakupan Imunisasi Lengkap 2. Penurunan serta pencegahan Stunting Manfaat : 1. Peningkatan Pengetahuan Keluarga terutama ayah tentang Imunisasi dan kesehatan pada umumnya. 2. Adanya kelompok masyarakat yang peduli dengan kesehatan.
64.	Nagari Organik	Demografi Nagari Kamang Tengah Anam Suku mayoritas persawahan, dengan sistem irigasi yang masih kurang memadai umumnya tadah hujan. Ketergantungan pertanian dengan pupuk kimia yang mahal dan sulit mengakibatkan belum maksimalnya hasil pertanian dan belum terkelolanya semua lahan.	Tujuan : 1. Mengatasi permasalahan di bidang pertanian 2. Menghidupkan lahan tidur di nagari Kamang Tengah anam suku 3. Menjadikan nagari Kamang Tengah jadi destinasi wisata nagari organik Manfaat : 1. Memperbaiki struktur tanah 2. Meningkatkan taraf hidup dan penghasilan petani

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
65.	KTC (Kamang Tengah Coin)	Inovasi Nagari Kamang Tengah dilatarbelakangi karena banyaknya produk UMKM di Nagari yang belum diketahui atau belum terpasarkan secara maksimal dan perlu memaksimalkan potensi masyarakat nagari,	Tujuan : 1. Memaksimalkan promosi dan penjualan produk UMKM 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Manfaat : 1. Taraf hidup pelaku UMKM meningkat 2. Menambah pendapatan Asli Nagari
66.	BABASO (BASamo BAngun SalO)	Nagari Salo memiliki luas wilayah ± 403,7 Ha dimana daerahnya di kelilingi lahan pertanian dan sebagian bukit barisan dengan tiga jorong sementara penduduk nagari salo mayoritas berprofesi petani baik di sawah maupun ladang namun dominannya masyarakat nagari salo adalah Perantau. Saat ini masyarakat salo yang di perantauan sudah mencapai ± 60 %. Namun dari keseluruhan perantau sudah pindah kependudukannya. Adapun jumlah penduduk Nagari Salo berdasarkan data Agregat dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1369 jiwa 476 KK Dari kondisi diatas maka Kucuran dana sangat mempengaruhi besar atau kecilnya yang masuk ke nagari salo maka berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di nagari secara fisik, saat ini gedung aula/gedung serba guna Nagari Salo sedang terbelengkalai karena dana tidak mencukupi sehingga pengerjaan untuk penyelesaiannya tidak bisa dilakukan.	Tujuan : Dengan adanya gedung aula/gedung serbaguna ini nagari, diharapkan nantinya segala kegiatan di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat di tingkatkan. Manfaat : Dengan selesainya gedung aula/gedung serba guna ini segala kegiatan di nagari bisa di pusatkan di gedung ini.
67.	BASILAU (BAju baSIba Lestarikan Adat bUdaya)	Dengan program pemerintah berusaha mengenalkan kembali kepada generasi muda bagaimana kondisi adat dan budaya yang lampau dan di harapkan tidak di tinggalkan secara total oleh generasi muda karena peradaban saat ini yang serba canggih dan digital. Sehingga sangat mempengaruhi pola pikir dari generasi muda tersebut yang gampang menerima peradaban dari luar tampak mempertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian mencoba-coba menerapkan di kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan peradaban budaya adat ranah Minangkabau khususnya adat di Nagari Salo.	Tujuan : Pengenalan dan penerapan serta pelestarian budaya Minangkabau dalam cara berpakaian khususnya bagi kaum wanita. Manfaat : Menjaga tradisi budaya alam minang kabau dalam cara berbusana.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
68.	EFEK PUBLIK (Efisien Dan Efektif Dalam Pelayanan Publik)	Nagari Ampek Koto Palembayan mengalami keterlambatan dalam pelayanan pengelolaan administrasi kependudukan dikarenakan kondisi listrik yang sering mati dan jaringan (internet) di wilayah Ampek Koto Palembayan sering terjadi permasalahan. Selain dari itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya surat kependudukan (KTP, KK dll) yang harus terus diperbaharui sehingga tidak updatenya data kependudukan di aplikasi Dukcapil yang menimbulkan opini kurangnya pelayanan di kenagarian	Tujuan dan Manfaat : Melakukan Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte dll) sehingga dengan begitu data administrasi pada aplikasi Duk Capil Kabupaten Agam kasusnya Nagari Ampek Koto Palembayan memiliki data Valid yang selalu diperbaharui. Dengan adanya data yang valid tersebut penyerahan bantuan baik bantuan sembako, bantuan anak yatim maupun bantuan keluarga miskin akan diberikan tepat sasaran pada orang yang benar membutuhkan atau yang berhak menerimanya.
69.	BUMNAG MARKET (Peningkatan kualitas BUMNag yang sudah memiliki 2 model usaha (Bangunan dan ATK) dengan menambah 1 Model Usaha yaitu Digital Printing)	Nagari Ampek Koto Palembayan belum ada jenis usaha digital printing (percetakan) atau daerah sekitarnya yang mana sudah menjadi kebutuhan pada instansi-instansi maupun pedagang lokal untuk mencetak baliho, spanduk, dll yang menyebabkan dalam memenuhi kebutuhan percetakan masih pergi keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pastinya memakan banyak waktu maupun biaya. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan percetakan ke luar daerah cukup besar baik dari biaya percetakan maupun biaya transportasi.	Tujuan : Membantu masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pendapatan desa. Manfaat : Dengan adanya model usaha digital printing ini dapat menunjang pendapatan dan memajukan BUMNag Ampek Koto Palembayan
70.	AKP MADANI (Pemantapan nilai keagamaan dari usia dini sampai usia tua melalui didikan subuh bagi anak-anak, wirid remaja, dan majelis taklim untuk orang	Dengan sudah mulai berkurangnya nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan munculnya ketimpangan sosial hingga terjadinya pelanggaran maupun tindakan kriminal dan hilangnya norma santun anak-anak kepada orang tua atau orang yang lebih tua di Nagari Ampek Koto Palembayan. Didikan subuh, wirid remaja dan majelis taklim merupakan kegiatan yang potensial dalam mendidik anak-anak, remaja hingga orang tua tentang ajaran Islam. Didikan	Tujuan : Membangun nilai-nilai keagamaan sejak usia dini, remaja hingga tua, untuk mendukung program pemerintah yang ingin membangun nagari yang madani



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
	tua yang pelaksanaannya rutin tiap bulan (1 kali dalam sebulan)	subuh juga merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat urgen dalam media membentuk karakter siswa pra dan dasar dalam membangun karakter dari usia dini menjadi karakter muslim yang diharapkan bersama. Karena membangun karakter muslim pada siswa sebaiknya disiapkan dari dini dengan karakter yang sudah disiapkan dari awal tersebut akan sangat mudah membentuk kepribadian mereka untuk masa selanjutnya. Dengan adanya program ini kita dapat membangun nilai-nilai keagamaan untuk masyarakat tidak hanya usia dini saja karena ini mencakup semua golongan baik usia anak-anak, remaja hingga tua. Karena kita sebagai orang Islam sangat setuju bahwasanya belajar atau menuntun ilmu tidak terhenti walau kita sudah tua melainkan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita sampai kita meninggal. Sehingga dengan program ini sangat mendukung program pemerintah yang ingin membangun nagari yang madani.	Manfaat : Membangun karakter muslim pada siswa dari dini dengan karakter yang sudah disiapkan dari awal sehingga terbentuk kepribadian masa selanjutnya.
71.	GULO ANAU (Peningkatan produksi gula aren menjadi gula semut))	Banyaknya pengrajin gula aren di Nagari Ampek Koto Palembayan dengan otomatis akan menghasilkan banyak produksi gula aren sehingga dapat menunjang penjualan gula aren yang biasanya dijual dalam bentuk besar sekarang di inovasikan dalam bentuk gula semut. Selain itu kurangnya pengenalan produk gula semut ke konsumen sehingga daya beli terhadap produk masih kurang.	Tujuan : Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat baik dari segi peningkatan pendapatan maupun dari segi peningkatan produk. Manfaat : Adanya gula semut ini dapat menggantikan gula pasir sehingga konsumsi gula menjadi lebih alami dan baik untuk kesehatan masyarakat.
72.	PEKAKA AKP (Pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat nagari)	Kurangnya profesionalitas pelayanan perangkat nagari sehingga mengakibatkan dalam prosedur maupun proses pengurusan administrasi di kenagarian tidak berjalan maksimal serta masih kurang efektif dan efisiennya pelayanan di Nagari Ampek Koto Palembayan.	Tujuan : Membentuk perangkat nagari yang profesional. Manfaat : Menciptakan proses pelayan yang ada dapat berjalan dengan baik dengan efisien dan efektif.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
73.	BARO DAMA (Pemanfaatan limbah cangkang kemiri menjadi briket (Arang))	Karena banyaknya produksi dan pengusaha kemiri di nagari ampek koto palembayan cukup menjadi perhatian masyarakat akan cangkang kemiri yang merupakan limbah dari usaha tersebut yang terkadang ditumpuk sehingga akan menjadi masalah dikemudian hari baik dari segi kesehatan masyarakat maupun dari segi keindahan nagari maka dari masalah tersebut muncul inovasi untuk mengolah limbah cangkang kemiri tersebut menjadi briket(arang) yang berguna sebagai pengganti minyak tanah atau gas dalam memasak dan kurangnya sarana prasarana dalam pengolahan limbah cangkang kemiri menjadi briket (arang)	Tujuan : 1. Meningkatkan Pelayanan KIA yang berkualitas dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. 2. Terjalannya komunikasi yang lancar Bumil dan Nakes. 3. Wadah untuk semua ibu menyampaikan keluhan atau masalah Manfaat : Tidak ada lagi limbah cangkang kemiri dan dengan produk ini akan meningkat kualitas hidup masyarakat terutama pengusaha briket ini serta dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang pada saat ini sangat banyak penggunaannya sedangkan cadangan bahan bakar fosil ini sudah menipis dan membantu masyarakat miskin untuk mengurangi pengeluaran pembelian minyak tanah atau gas LPG diganti dengan Briket cangkang kemiri untuk memasak makanan.
74..	CENTING DANI (Cegah Stunting Dari Dini)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting, menjadikan stunting prioritas utama Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto sehingga dalam hal ini Bupati Agam menerbitkan Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2022 tentang Peran Nagari Dalam Percepatan Penurunan Stunting Sekaitan dengan masalah stunting ini, kami pemerintah nagari di tahun 2021 kami termasuk nagari lokus stunting yang tertinggi di Kecamatan IV Koto yaitu dengan Cakupan Balita Stunting 0-59 Bulan mencapai 20,8 % , untuk itu menanggapi hal tersebut kami mengadakan koordinasi dengan Bidan Pustu, kepala puskesmas IV koto. Sehingga kami merancang Inovasi Cegah Stunting Dari Dini (Centing Dani).	Tujuan : Untuk mengatasi dan mencegah adanya balita stunting di Nagari Guguak Tabek Sarajo. Manfaat : Menurunkan angka stunting di Nagari Guguak Tabek Sarajo Menurun.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
75.	Gerakan Edukasi Bapak Bapak Pentingnya Imunisasi (GEPAK PENSI)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena terkendalanya pemberian vaksin imunisasi sehingga tidak mencapai target. Untuk itu, dilakukan inovasi yang mengedukasi orang tua terkait pentingnya imunisasi kepada anak yang tidak hanya diberikan kepada ibu-ibu tetapi juga diberikan kepada bapak-bapak.	Tujuan: Menedukasi bapak-bapak yang mempunyai balita terkait pentingnya imunisasi Manfaat: Meningkatnya jumlah anak-anak yang diimunisasi
76.	LISA (Liat Sampah Angkat)	Kegiatan ini kita laksanakan dengan mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah, Jorong dan gotong royong bersama masyarakat, siswa/siswi, guru, perangkat Nagari, karang taruna, PKK, Lansia, Polindes di Nagari Sungai Puar, Babinya, Babi kamtibmas serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam hal pengangkutan sampah. Kita juga mengadakan perlombaan kebersihan antar Dasawisma dan sekolah Di Nagari Sungai Puar. Dengan adanya kegiatan LISA (Lihat Sampah Angkat) ini dapat memberi edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Kedepannya kegiatan LISA (Lihat Sampah Angkat) tetap kita lanjutkan dengan mengadakan gotong royong kebersihan lingkungan tempat tinggal, jalan, parit, sekolah, perkantoran dan perlombaan kebersihan. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan pengunjung yang datang ke Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan.	Tujuan : 1. Mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah 2. Menjaga Kebersihan lingkungan 3. menanamkan kesadaran akan kebersihan yang juga selaras dengan peningkatan kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata Manfaat : 1. Masyarakat semakin paham dalam membuang sampah rumah tangga 2. Lingkungan menjadi bersih dan indah. 3. Sampah semakin terkondisikan dengan adanya gotong royong kebersihan. 4. Kesadaran masyarakat meningkat terhadap kebersihan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan.
77..	KAMEDO	Sungai Puar adalah salah satu Nagari di kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang mempunyai 3 Jorong. Luas Nagari Sungai Puar 12.117 Ha. Dengan keluarnya legalitas LPHN Sungai Puar Tahun 2023, dipengajukan Pengelolaan Kawasan Hutan ke Menteri LHK dari usulan 651 ha yang dikabulkan 580 ha. Sehubungan di kawasan tersebut banyak ditemukan Batang Pohon Kemenyan maka terinspirasi	Tujuan : 1. Merubah paradigma bahwa kumanyan bukan sekedar sarana mediasi supranatural. 2. Mensosialisasikan Getah Kumanyan bernilai tinggi dipasaran Dunia Parfum.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		untuk menjadi kemenyan sebagai INOVASI berbasis perhutanan Sosial. Langkah awal maka dibentuklah KUPS Agroforestri Kemenyan Lestari yang beranggotakan 30 orang. Kelompok ini memberdayakan millenial dan Kesetaraan Gender kaum perempuan. Kelompok ini telah di legalitas oleh KPHL Agam raya dan saat ini di dampingi Pihak ketiga (WRI) Regional Riau – Sumbar. Untuk menambah dan mendalami manfaat kemenyan hulu–hilir maka didatangkan Nara Sumber Ahli Kemenyan dari BRIN yang difasilitasi pihak WRI. Kelompok degan bekal ini optimis menjadikan Kemenyan sebagai Inovasi Nagari Singapura yang mana Daya Manfaat kemenyan cukup menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Singapura.	3. Kumanyan Tanaman liar bahan baku Penguat Parfum yang dibutuhkan Pegiat Aroma Terapi. 4. Kumayan sarana pencegah Illegal Logging. 5. Hutan Lestari Rakyat Sejahtera. 6. Menotifikasi Millenial Cinta Hutan. 7. LPHN Sungaipuar merupakan Pilot Proyek tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu khusus Kemenyan untuk Sumatera Barat. Manfaat : 1. Getah kumanyan yang telah disuling berpeluang meningkatkan pendapatan Ekonomi masyarakat karena harganya yang tinggi. 2. Minyak Kemenyan merupakan bahan baku penguat Parfum. Maka berpeluang memproduksi Parfum berkualitas tinggi. 2. Produksi Parfum berpeluang mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja. 3. Kondisi alam yang rawan longsor dan Banjir Bandang dengan memelihara kemenyan dapat mengurangi bencana. 4. Sehubungan Indonesia paru-paru dunia, dengan merawat dan tidak menebang Pohon berarti kita ikut menjaga panas bumi dan emisi karbon. 5. Program adopsi Pohon dunia, maka melestarikan kumanyan berpeluang meraup Dolar.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
78.	PEBUMNARI (Pengembangan BUMNag yang Mandiri dan Terintegrasi)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan minimnya pendapatan Asli Nagari Salareh Aia Barat dengan terdapatnya keterbacaan pemahaman masyarakat tentang pemasaran hasil industri rumah tangga serta kurangnya kompetensi SDM pengelola BUMnag. Untuk itu perlu Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat dan mengoptimalkan peran SDM yang berkualitas serta dapat menata keuangan dan menyusun laporan keuangan	Tujuan : 1. Meningkatkan potensi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat 2. Membuka peluang kerja 3. Meningkatkan pendapatan asli Nagari 4. Meningkatkan peluang bisnis lokal 5. Meningkatkan fungsi dan manfaat BUMNag Manfaat : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagari 2. Meningkatkan perekonomian Nagari 3. Menambah lapangan kerja 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari 5. Meningkatkan kualitas hidup anggota BUMNag.
79.	Pengembangan UMKM melalui marketing dan penggunaan Teknologi Tepat Guna	Inovasi ini dilatarbelakangi karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pemasaran digital, keterbatasan Modal untuk Promosi, kurangnya pemahaman tentang Branding serta manajemen data dan keamanan siber yang lemah di Nagari Salareh Aia Barat. Dengan terdapatnya keterbatasan masalah tersebut maka dilakukan upaya pembaharuan dengan menggunakan digital Marketing melalui Media sosial, pemasaran berbasis konten, kemitraan dan Kolaborasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi biaya dan waktu.	Tujuan : 1. Meningkatkan daya saing 2. Efisiensi operasional dan pengurangan biaya\ 3. Meningkatkan akses pasar dan jangkauan konsumen 4. Peningkatan Brand Meningkatkan Manfaat : 1. MKM dapat menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang konsisten, sekaligus memperkenalkan merek mereka secara lebih luas. 2. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya produksi dan pengelolaan.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			- Memperoleh pelanggan baru baik di dalam negeri maupun internasional, tanpa terbatas oleh lokasi geografis. - UMKM dapat terus berkembang dengan mengikuti tren dan kebutuhan konsumen yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk dengan diferensiasi yang lebih baik.
80.	Kerjasama dengan Perusahaan tentang Pemanfaatan Limbah hasil Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Pakan Ternak dan Pupuk Organik	Inovasi ini dilatarbelakangi karena tidak semua pihak memahami regulasi terbaru terkait pemanfaatan limbah industri. teknologi konversi limbah menjadi produk bernilai tambah bisa mahal, sehingga pihak perusahaan enggan berinvestasi tanpa jaminan keuntungan. Banyak perusahaan belum memiliki fasilitas atau teknologi tepat guna untuk mengolah limbah secara efisien. Adapun upaya yang dilakukan adalah revitalisasi Perjanjian Kerjasama (PKS/MoU), model kemitraan inklusif dan partisipatif, adopsi teknologi tepat guna, diversifikasi produk turunan dan digitalisasi dan transparansi proses. Dengan adanya inovasi ini limbah yang sebelumnya tidak bernilai atau menjadi beban biaya kini bisa dikonversi menjadi produk bernilai jual seperti pakan ternak dan pupuk organik, pakan ternak dari limbah sawit seperti bungkil inti sawit (Palm Kernel Meal) terbukti kaya protein dan bisa menggantikan bahan pakan konvensional yang mahal serta Pupuk organik dari limbah sawit meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia	Tujuan : - Meningkatkan nilai tambah limbah sawit - Mendukung pertanian dan peternakan berkelanjutan - Mengurangi dampak lingkungan - Mendorong kolaborasi multi-pihak - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal - Meningkatkan daya saing produk pertanian Manfaat : - Peningkatan Pendapatan dimana limbah sawit yang sebelumnya dibuang kini menjadi produk bernilai jual. - Penghematan Biaya dimana Petani dan peternak memperoleh pakan dan pupuk dengan harga lebih murah dibandingkan produk komersial. - Pengurangan Limbah dan Polusi: Limbah padat dan cair kelapa sawit tidak lagi mencemari tanah dan air. - Pengurangan Ketergantungan pada Pupuk Kimia

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
81.	Pengembangan Pariwisata Agam Diawan Patar (Pengembangan Rafting Arum Jeram Batang Agam Dan Negeri Diatas Awan)	Inovasi ini dilatarbelakangi agar terdapat peningkatan perekonomian masyarakat setempat dengan melakukan pengembangan wisata arung jeram. Untuk itu dilakukan terobosan baru dalam mengembangkan wisata air dan wisata alam diNagari Padang Tarok.	Tujuan dan Manfaat : Melakukan terobosan baru dalam mengembangkan wisata air dan wisata alam dinagari Padang Tarok.
82.	Nagari Bersih Narkoba (NAGARI BERSINAR)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pengguna narkoba sehingga dilakukan penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai agen pemulihan dengan membentuk kelompok peduli bahaya narkoba dari unsur masyarakat sebagai agen pemulihan yang akan bertindak sebagai pembicara dalam pertemuan khusus dengan melibatkan remaja, pelajar dan perwakilan masyarakat Menginventaris kelemahan-kelemahan masyarakat, remaja dan pelajar terhadap peluang masuknya ancaman narkoba dinagari. Keunggulan Gerakan Nagari Bersih Narkoba adalah masyarakat ikut berperan aktif secara langsung dalam memerangi ancaman narkoba dimana setiap agen pemulihan bisa dan berhak berbicara dalam forum-forum non formal masyarakat.	Tujuan : Melakukan terobosan baru dalam mengantisipasi sesuatu permasalahan yang berembang dimasyarakat melalui sebuah paket kegiatan seperti Nagari Bersinar dengan sasaran mencegah ancaman bahaya narkoba dinagari. Manfaat : Mengurangi dan memberantas akar peredaran narkoba diNagari
83.	Cancang Lauak 16 (CCL 16) Medan Nan Bapaneh	Inovasi ini dilatarbelakangi untuk menjaga kelestarian sejarah budaya adat Minangkabau dinagari Sariak. Inovasi ini dilakukan dengan mengumpulkan para pemerhati Budaya di Nagari terutama para Pelaku Seni Tradisional, agar menjadikan lokasi ini sebagai tempat pentas seni budaya tradisional dan tempat latihan (Silek Tuo, Tari Tradisional, Talempong). Dengan adanya CCL 16 ini dapat ekonomi masyarakat di bidang UMKM di Nagari Sariak	Tujuan : 1. Tujuannya adalah pada awalnya lokasi ini hanya di pakai Musiman oleh Niniak Mamak Pangulu Nan IV Nagari , 2. Akan di Jadikan tempat Pentas Seni Budaya 3. Terpeliharanya Nilai Budaya Khususnya Budaya Tradisional Nagari Manfaat : 1. Sekarang sudah bisa menambah peningkatan Pendapatan Asli Nagari dengan pengelolaan lokasi tersebut 2. Akan di Jadika sebagai Destinasi wisata Budaya Nagari Sariak



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Meningkatkan ekonomi masyarakat
84.	WISKUNTA (Wisata Tugu Parang Panta)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena lokasi ini awalnya tempat pembuangan sampah karena keberadaannya jauh dari pemukiman, sehingga menjadi lokasi yang indah dan tempat nongkrong yang asyik. Kemudian timbul ide dari masyarakat untuk membuat daya tarik generasi maupun masyarakat untuk bisa melihat sejarah tugu parang panta dan lebih terjaganya kelestarian sejarah bangsa pada umumnya dan nagari khususnya serta menambah peningkatan ekonomi masyarakat dibidang UMKM dinagari Sariak.	Tujuan : 1. Tujuannya adalah pada awalnya lokasi ini tempat pembuangan sampah karena keberadaannya jauh dari pemukiman, sehingga menjadi lokasi yang indah dan tempat nongkrong yang asyik 2. Sebagai motor peningkatan ekonomi masyarakat 3. Terpeliharanya Nilai sejarah Bangsa maupun Nagari Manfaat : 1. Sekarang sudah bisa menambah peningkatan Pendapatan Asli Nagari dengan pengelolaan lokasi tersebut 2. Menjadi ikon wisata Nagari Sariak 3. Meningkatkan ekonomi masyarakat
85.	Budidaya Ikan di Irigasi	Sehubungan dengan telah banyaknya jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Nagari Balai Gurah sampai saat ini, maka kami Pemerintah Nagari Balai Gurah berkeinginan untuk membantu meningkatkan hasil pertanian khususnya bagi petani dan masyarakat nagari Balai Gurah pada umumnya maka perlu dilakukan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebut. Pemeliharaan jaringan irigasi tersebut tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebut. Pemeliharaan jaringan irigasi tersebut lebih sulit dari pada membangun jaringan irigasi sehingga untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut alangkah baiknya dilakukan budidaya ikan di Irigasi. Oleh karena itu Pemerintah Nagari Balai Gurah berinovasi untuk membudidayakan ikan di Irigasi. Budidaya ikan di saluran irigasi dapat dilakukan	Tujuan : 1. Agar Saluran Irigasi menjadi bersih dari sampah 2. Untuk Meningkatkan kesadaran warga untuk stop buang air besar sembarangan Manfaat : 1. Dapat membantu dalam memurnikan air dan mengurangi polusi karena ikan memakan plankton dan zat organik yang ada dalam air 2. Dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem air, dengan mengendalikan populasi organisme air yang dapat memakan hama

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		untuk memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Manfaat ekonomi meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat, memenuhi kebutuhan. Jika terlaksananya program tersebut dalam RPJM dan RKP Nagari sehingga dapat dianggarkan dan direalisasikan dalam APB Nagari. Setelah itu anggaran yang ada dalam APB Nagari hanya untuk pengadaan bibit ikan. Perkiraan waktu panen Ikan yang ada di Irigasi tersebut adalah 6 s/d 8 bulan sehingga ikan tersebut telah layak untuk dipanen. Ikan yang dibudidayakan di aliran air mengalir lebih cepat tumbuh besar dan petani bisa panen ikan lebih cepat. Dalam budidaya ikan kualitas air sangat penting karena air merupakan tempat ikan melakukan aktivitas kehidupan. Kondisi perairan dapat dikatakan baik apabila jumlah patogen terkendali. Apabila telah sampai umur ikan itu lebih kurang 8 bulan maka kami Pemerintah Nagari Balai Gurah akan mengadakan pesta rakyat dalam rangka panen raya terhadap ikan tersebut yang akan dilaksanakan pada bulan Syawal setiap tahunnya dan Nagari Balai Gurah	
86..	NAGARI CINTA STATISTIK NAN TUJUAH (DESA CANTIK)	Pada inovasi ini dilatarbelakangi karena tidak semua desa memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah terpencil dan fasilitas teknologi (komputer, perangkat lunak, server) untuk pengelolaan data sering kali minim. Selain itu karena kurangnya Tenaga Ahli dan Pendampingan yang kompeten di bidang statistik dan teknologi informasi. Selain itu terdapat kesenjangan literasi statistik antara desa-desa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Desa-desa di daerah tertinggal cenderung kurang memahami pentingnya data statistik yang ada pada Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh.	Tujuan : 1. Peningkatan Literasi Statistik 2. Penguatan Pengelolaan Data Desa 3. Mendukung Program Pembangunan Desa 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 5. Mendorong Kolaborasi Antar Lembaga 6. Pengukuran Capaian SDGs Desa Manfaat : 1. Mendorong desa menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan datanya. 2. Membantu desa mengidentifikasi potensi lokal yang belum tergali. 3. Memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
87.	SPIN (Sarjana Pendamping Inovasi Nagari)	Inovasi nagari Pasia laweh ini dilatarbelakangi dengan adanya keterbatasan sumber daya, seperti dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia, dapat mempengaruhi keberhasilan program SPIN dan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inovasi dan pengembangan desa masih rendah, sehingga memerlukan upaya penyadaran dan pendidikan. Selain itu keterbatasan akses ke teknologi, informasi, dan sumber daya lainnya dapat mempengaruhi keberhasilan program SPIN. Untuk itu perlu dilakukan analisis kebutuhan nagari untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari program SPIN dan perlu perencanaan strategis dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi implementasi program SPIN pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan inovasi dan kewirausahaan. 2. Mengembangkan Nagari menjadi lebih maju dan mandiri melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat nagari dalam pengembangan nagari melalui pengembangan kapasitas dan kewirausahaan. Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan kewirausahaan. 2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan usaha dan kewirausahaan. 3. Meningkatkan jaringan dan kolaborasi dengan pihak lain dalam mengembangkan nagari. 4. Meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan karier dan menjadi agen perubahan di nagari Pasia Laweh.
88.	KAMMARI (Kamis Aparatur Manunggal Membangun Nagari)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi, dapat menghambat pelaksanaan KAMMARI. Selain itu kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain dapat menyebabkan duplikasi program dan kegiatan dan keterbatasan kapasitas, seperti kemampuan teknis dan manajerial, dapat menghambat pelaksanaan KAMMARI. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan gotong royong serta melakukan pengembangan Sistem Komunikasi: Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua anggota tim dan masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan nagari. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan nagari. Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan nagari 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan nagari.
89.	KUBINA (Kursus Bahasa Inggris Nagari)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena kurangnya kemampuan guru dalam mengajar bahasa Inggris dapat mempengaruhi kualitas kursus, keterbatasan sumber belajar dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar bahasa Inggris dan kurangnya motivasi siswa dapat mempengaruhi keberhasilan kursus bahasa Inggris serta keterbatasan waktu belajar dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar bahasa Inggris secara efektif. Dengan inovasi ini dilakukan pengembangan kemampuan guru: untuk mengajar bahasa Inggris secara efektif serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kursus.	Tujuan : 1. Mengajarkan aparatur nagari agar pandai berbahasa inggris guna meningkatkan keahlian di bidang pendidikan. 2. Jikalau ada tamu luar negeri yang datang ke nagari aparatur tidak canggung untuk berbahasa inggris. 3. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat nagari. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di nagari. 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris dalam era globalisasi. Manfaat : 1. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat nagari. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris dalam era globalisasi. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendidikan bagi masyarakat nagari. 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat nagari dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
90.	PSN (Petugas Statistik Nagari)	Inovasi ini muncul karena adanya keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi, dapat menghambat pendataan statistik nagari dan terkadang masyarakat yang di data tidak ada dirumah bahkan ada juga warga yang tidak mau di data. Selain itu terdapatnya koordinasi: antara pemerintah, lembaga statistik, dan masyarakat dapat menyebabkan duplikasi data dan kesalahan dalam pendataan. Disamping itu karena adanya keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet dan peralatan komputer, dapat menghambat pendataan statistik nagari.	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Data: Meningkatkan kualitas data statistik nagari untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. 2. Meningkatkan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik nagari. 3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyediakan data statistik nagari yang akurat dan relevan. Manfaat: 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan: Pendataan statistik nagari dapat membantu meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyediakan data yang akurat dan relevan. 2. Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan: Pendataan statistik nagari dapat membantu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan relevan. 3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Pendataan statistik nagari dapat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyediakan data yang akurat dan relevan.
91.	SEDAN (Sekolah Dasawisma)	Inovasi ini berawal dengan adanya keterbatasan sumber daya, seperti dana, infrastruktur, dan tenaga pengajar, dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah Dasawisma nagari serta terdapat perubahan sosial dan ekonomi: seperti perubahan struktur keluarga dan perubahan pola hidup, dapat mempengaruhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sekolah Dasawisma nagari Pasia Laweh. Dengan adanya keterbatasan ini maka dilakukan upaya terhadap ibu – ibu	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Dasawisma nagari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		hanya dirumah saja tidak ada kegiatan yang lain dan setelah adanya Inovasi SEDAN ini ibu – ibu sudah pandai membagi waktu. Disamping itu terdapat pemanfaatan pekarangan rumah secara tidak langsung terbenahi ketika rumah warga dipakai sebagai rumah belajar sekaligus adanya kebun praktik kelompok yang juga menghasilkan. Dengan adanya inovasi ini mampu mendorong terhadap kemajuan usaha ekonomi produktif anggota kelompok Dasawisma karena adanya program permodalan kredit mikro BUMNag dengan biaya jasa yang sangat Relative terjangkau sehingga mampu menggerakkan UMKM.	2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sekolah Dasawisma nagari. 3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Manfaat : 1. Setiap warga belajar mendapatkan informasi pembangunan di segala bidang oleh instruktur sesuai mata pelajaran. 2. Silaturahmi tetap terjaga 3. Pemanfaatan informasi teknologi, setidaknya kaum ibu mampu mempergunakan komputer dan/atau laptop. 4. Dari kegiatan ini tidak akan mengganggu rutinitas ekonomi keluarga selama ini.
92.	AYAT (Aparatur Yakin Amalan Takziah)	Dengan adanya permasalahan yang muncul dengan keterbatasan sumber daya, seperti dana, infrastruktur, dan tenaga kerja, dapat mempengaruhi kemampuan aparaturnya untuk melaksanakan amalan takziah serta adanya perubahan sosial dan ekonomi, seperti perubahan struktur keluarga dan perubahan pola hidup, dapat mempengaruhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap amalan takziah maka muncul metode perubahan dimana sebelum adanya Inovasi AYAT ini aparaturnya tidak pernah melakukan takziah bersama – sama dan setelah adanya inovasi aparaturnya amalan takziah ini setiap ada warga yang meninggal dunia seluruh aparaturnya bertakziah ke rumah duka sebagai bentuk dukungan dan doa kepada almarhum/almarhumah dan ini merupakan tindakan yang di anjurkan dalam Islam.	Tujuan : 1. Sebagai bentuk kepedulian aparaturnya nagari terhadap masyarakat yang terkena musibah 2. Memberikan dukungan moral dan spiritual kepada keluarga yang berduka 3. Menguatkan hati dan jiwa orang yang terkena musibah 4. Menjaga ukhuwah islamiyyah dan mempererat tali persaudaraan 5. Meningkatkan kesadaran diri tentang kematian Manfaat : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Aparatur takziah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Aparatur takziah dapat meningkatkan kepuasan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan efektif. 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Aparatur takziah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya takziah dan cara-cara untuk melaksanakannya.
93.	Aparatur Mengajar	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan sumber daya nagari Pasia Laweh untuk membiayai kegiatan pendidikan dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di desa seperti gedung sekolah dan peralatan belajar. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga pengajar. Untuk itu dilakukan upaya pembaharuan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perangkat nagari tentang metode pengajaran, kurikulum dan teknologi pendidikan serta pengembangan rencana pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan pengadaan bahan ajar yang relevan dan efektif untuk mendukung proses belajar mengajar.	Tujuan : Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dinagari tentang adat salingka nagari, pentingnya partisipasi masyarakat. Manfaat : 1. Meningkatkan akses pendidikan 2. Memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata terhadap masyarakat nagari 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. 4. Meningkatkan kesadaran sosial
94.	Aparatur Sarjana	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan sumber daya nagari Pasia Laweh sehingga perangkat nagari sarjana mungkin tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk untuk menjalankan tugas tugas pemerintah nagari. Selain itu kesenjangan pendidikan di nagari dengan dikota sehingga perangkat nagari sarjana di nagari mungkin tidak memiliki akses Pendidikan yang sama dengan perangkat nagari di kota. Untuk itu dilakukan upaya mencari tempat kuliah yang pas bagi perangkat nagari yang akan kuliah, melakukan MoU dengan kampus kampus yang ada serta mencari metode kuliah yang efektif dan tidak mengurangi pelayanan terhadap masyarakat nagari. Dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, perangkat nagari yang terampil dapat meningkatkan kepuasan Masyarakat serta meningkatkan daya saing pemerintah nagari dan perangkat nagari yang terampil dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan baik ditingkat lokal maupun nasional.	Tujuan : 1. Meningkatkan kapasitas perangkat nagari dalam mengelola pemerintahan, ekonomi dan sosial 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan kemandirian nagari dalam mengelola pemerintahan Manfaat : 1. Meningkatkan kapasitas perangkat nagari 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
95.	Bintang Emas Jorong Berprestasi	Inovasi ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan sumber daya, seperti dana dan tenaga, dapat membatasi kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan program Bintang Emas Jorong Berprestasi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Bintang Emas Jorong Berprestasi dapat mempengaruhi partisipasi dan keberhasilan program serta adanya keterbatasan Infrastruktur seperti jaringan internet dan transportasi, dapat membatasi kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan program Bintang Emas Jorong Berprestasi. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan program Bintang Emas Jorong Berprestasi, merencanakan strategi untuk meningkatkan kualitas program, termasuk pengembangan konten, promosi, dan penggunaan teknologi serta mengembangkan tim yang efektif untuk melaksanakan program, termasuk pengembangan kemampuan dan kompetensi aparatur desa serta mengembangkan anggaran yang efektif untuk mendukung program.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 4. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola desa dan menyediakan pelayanan publik. Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengembangan desa. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
96.	SAWINA (SAFARI WISATA NAGARI)	Inovasi ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat menghambat akses wisatawan ke lokasi wisata, dan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, erosi, dan polusi dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan keindahan alam di lokasi wisata serta konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha dapat menghambat pengembangan wisata dan adanya perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi keindahan alam dan keberlangsungan ekosistem di lokasi wisata.	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. 2. Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan: Meningkatkan daya tarik wisatawan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan. 3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal: Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Manfaat : 1. Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata di Nagari Pasia Laweh Palupuh. 2. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata. 3. Meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.
97.	GES (Gerakan Ekonomi Subuh)	Inovasi ini dilatarbelakangi upaya untuk pengembangan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program gerakan ekonomi subuh dan menggunakan sumber daya lokal untuk mendukung program gerakan ekonomi subuh. Program ekonomi subuh dapat meningkatkan	Tujuan : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke barang dan jasa yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi subuh. Program gerakan ekonomi subuh ini memiliki spesifik, karena kami pemerintah nagari menyaring masyarakat yang untuk mendapatkan kegiatan berusaha melalui gerakan ekonomi subuh, kami turun serentak ke setiap mesjid dan musala saat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Disana kami melihat siapa masyarakat yang turut serta menjalankan subuh berjamaah maka kami sepakat untuk memberikan bantuan/ program yang dapat membantu ekonomi mereka.	2. Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan akses ke barang dan jasa yang lebih baik 3. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah Manfaat : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan usaha. 2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat 3. Mempererat tali persaudaraan dan menjadikan nagari harmonis dan solid. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat 6. Meningkatkan kualitas ibadah 7. Meningkatkan kesadaran spiritual
98.	GOKAP (Gabungan Ojek Kenagarian Pasia Laweh)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya teknologi yang mukhtakir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, Selain itu pengembangan layanan baru gokap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim. Inovasi GOKAP dapat membantu mengurangi pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja bagi pengemudi dan mitra usaha.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas layanan gokap berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas gokap operasional dan layanan. 3. Meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun loyalitas Manfaat : 1. Kemudahan: gokap memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan menggunakan layanan.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			2. Meningkatkan efisiensi: gopak membantu waktu dan biaya dengan menyediakan layanan yang cepat dan mudah. 3. Meningkatkan kualitas hidup membantu meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan akses ke berbagai layanan.
99.	Jambore Jurnalistik	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan permasalahan dinagari dalam menghadapi permasalahan dalam hal keterbatasan sumber daya, kualitas jurnalistik, teknologi, dan keterlibatan sponsor di nagari. Dengan adanya pertukaran ilmu pengetahuan memungkinkan jurnalis dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, peningkatan kualitas jurnalistik dengan memperkenalkan teknik dan metode jurnalistik terbaru. Sehingga pembangunan jaringan memungkinkan jurnalistik untuk membangun jaringan dengan rekan-rekan sejawat dari berbagai daerah. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat jurnalistik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jurnalistik dan peran jurnalis dalam masyarakat. Disamping itu pengembangan keterampilan jambore jurnalistik dapat membantu jurnalis mengembangkan keterampilan mereka dalam bidang jurnalistik.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas jurnalistik yang ada di nagari dengan memperkenalkan teknik dan metode jurnalistik terbaru. 2. Membangun komunitas jurnalis yang kuat dan solid di nagari untuk meningkatkan kualitas berita dan informasi. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jurnalistik dan peran jurnalis dalam masyarakat. Manfaat : 1. Pertukaran ilmu pengetahuan dari jambore jurnalistik dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. 2. Peningkatan kualitas jurnalistik dapat meningkatkan kualitas jurnalistik dengan memperkenalkan teknik dan metode jurnalistik terbaru. 3. Pembangunan jaringan memungkinkan jurnalis untuk membangun jaringan dengan rekan-rekan sejawat dari berbagai daerah. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jurnalistik dan peran jurnalis dalam masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas berita dan informasi yang disajikan kepada masyarakat.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
100.	SAJOSOWI (Satu Jorong Satu Objek Wisata)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan adanya keterbatasan fasilitas dan sarana: seperti toilet, tempat parkir, dan fasilitas umum, dapat menghambat pengembangan objek wisata. Selain itu keterbatasan jaringan dan akses: seperti jaringan internet dan akses ke objek wisata, dapat menghambat pengembangan objek wisata dan adanya keterbatasan kemampuan masyarakat: seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dapat menghambat pengembangan objek wisata. Serta keterbatasan promosi dan pemasaran: dapat menghambat pengembangan objek wisata, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan dan adanya keterbatasan pengelolaan limbah: dapat menghambat pengembangan objek wisata, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.	Tujuan : 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui pengembangan objek wisata. 2. Meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di daerah tersebut. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Manfaat : 1. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat melalui pengembangan objek wisata. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan bagi masyarakat setempat.
101.	Saka Desa Nusantara	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun biaya, dapat membatasi kemampuan saka desa nusantara dalam melakukan kegiatan. Selain itu kurangnya infrastruktur seperti jaringan internet, dan fasilitas komunikasi dapat membatasi kemampuan saka desa nusantara dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Upaya yang dilakukan dalam inovasi ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota saka desa nusantara untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, meningkatkan kemampuan jurnalistik sehingga saka desa nusantara dapat meningkatkan kemampuan jurnalistik masyarakat desa serta melakukan pengembangan sistem saka desa nusantara dengan pengembangan aplikasi, penggunaan teknologi, dan pengembangan jaringan.	Tujuan : 1. Meningkatkan kemampuan jurnalistik: meningkatkan kemampuan jurnalistik masyarakat desa untuk memproduksi informasi yang akurat dan terkini. 2. Mempromosikan informasi yang akurat: mempromosikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui informasi yang akurat dan terkini 2. Meningkatkan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat yang meningkat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi yang akurat. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui informasi yang terkini.
102.	TDS (TABUNGAN DIDIKAN SUBUH)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan akses pendidikan seperti banyak siswa siswi yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai dan kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga dengan adanya program tabungan didikan subuh dapat membantu meningkatkan akses pendidikan banyak keluarga yang mengalami kemiskinan dan keterbatasan sumber daya dan membantu mereka dalam mengumpulkan biaya pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Disamping itu upaya yang dilakukan adalah pelatihan tim untuk memastikan bahwa tim yang terlibat dalam program ini memiliki kemampuan yang memadai. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah mengembangkan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan program serta mengembangkan teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan dan komunikasi dengan siswa-siswi.	Tujuan : 1. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak mampu membiayai pendidikan mereka. 2. Mengembangkan kemampuan keuangan siswa-siswi dan orang tua dalam mengelola uang dan membuat keputusan yang bijak. 3. Meningkatkan kualitas hidup siswa-siswi dan keluarga mereka dengan memberikan mereka akses ke pendidikan dan keuangan yang lebih baik. 4. Mengembangkan sistem tabungan yang efektif dan efisien untuk siswa-siswi dan orang tua. Manfaat : 1. Meningkatkan Akses Pendidikan 2. Mengembangkan Kemampuan Keuangan 3. Meningkatkan Kualitas Hidup 4. Mengembangkan Karakter 5. Meningkatkan Kesadaran Keuangan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
103.	Membangun Nagari Berbasis Kaum	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, keterbatasan akses teknologi dapat mempengaruhi kemampuan nagari untuk mengembangkan program berbasis kaum yang efektif dan efisien. dapat mempengaruhi kemampuan nagari untuk membangun dan mengembangkan program berbasis kaum. Upaya yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbasis kaum serta menggunakan teknologi untuk mendukung pembangunan nagari berbasis kaum, termasuk pengembangan sumber belajar digital dan penggunaan aplikasi pembelajaran.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kaum dan pentingnya mempertahankan identitas kaum. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan di nagari dengan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik tentang nilai-nilai kaum. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nagari berbasis kaum. 4. Meningkatkan kualitas pemerintahan di nagari dengan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Manfaat : 1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kaum dan pentingnya mempertahankan identitas kaum. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nagari berbasis kaum. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. 4. Meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas masyarakat terhadap nagari dan kaumnya.
104.	Nagari Konstitusi Podcast	Adanya keterbatasan akses ke teknologi dan internet di beberapa daerah dapat membatasi jangkauan podcast Nagari Konstitusi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Nagari Konstitusi dan peranannya dalam membangun masyarakat yang lebih baik merupakan faktor yang melatarbelakangi adanya inovasi Nagari Konstitusi Podcast. Adapun upaya yang dilakukan dengan mengembangkan konten yang berkualitas, relevan, dan menarik untuk pendengar dan menggunakan teknologi yang mutakhir untuk memproduksi, mengedit, dan mempublikasikan podcast.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia. 2. Membangun komunitas yang aktif dan terlibat dalam diskusi tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nagari dan penegakan konstitusi. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di nagari dengan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Manfaat : 1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia. 2. Membangun komunitas yang aktif dan terlibat dalam diskusi tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nagari dan penegakan konstitusi. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di nagari dengan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik tentang konstitusi dan hak-hak asasi manusia.
105.	PORNA (Pekan Olahraga Nagari)	Kegiatan PORNA di nagari Pasia laweh dilatarbelakangi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dapat mempengaruhi keberhasilan pekan olahraga nagari yang dilaksanakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dapat mempengaruhi keterbatasan akses ke nagari terpencil akan berdampak terhadap pelaksanaan pekan olahraga nagari. Untuk mendukung kegiatan ini dilakukan kebaruan dengan melibatkan masyarakat nagari dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pekan olahraga nagari dengan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pekan olahraga nagari.	Tujuan : 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan minat masyarakat nagari dalam hal olahraga 2. Menganalisis situasi dan kondisi nagari termasuk fasilitas olahraga yang ada 3. Mengembangkan konsep pekan olahraga nagari yang menarik dan kreatif 4. Merencanakan anggaran untuk kegiatan pekan olahraga nagari Manfaat : 1. Meningkatkan kegiatan fisik 2. Meningkatkan kebugaran



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			3. Meningkatkan keseimbangan 4. Meningkatkan percaya diri 5. Mempererat tali persaudaraan dan menjadikan nagari harmonis dan solid. 6. Membangun jiwa yang kompetitif
106.	ABN (Anugrah Bakti Nagari)	Program ABN di Nagari Pasia Laweh kemungkinan besar bergantung pada alokasi dana dari pemerintah daerah atau sumber daya lokal. Keterbatasan dana ini bisa menghambat kelancaran program, terutama jika ada banyak calon penerima yang layak. Dana yang terbatas juga mempengaruhi penghargaan yang diberikan, sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal. Disamping itu untuk menilai kontribusi seorang wali nagari atau wali jorong yang telah lama menjabat, sering kali data historis atau rekam jejaknya tidak terdokumentasi dengan baik. Ketika informasi tersebut tidak lengkap atau sulit diakses, proses penilaian menjadi lebih subjektif dan rentan terhadap interpretasi yang bias. Hal ini mempengaruhi objektivitas dalam menentukan siapa yang pantas menerima penghargaan. Untuk itu dilakukan kebaruan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan dan dampak program dengan melihat sejauh mana program ini telah memberikan dampak positif terhadap Nagari dan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, kriteria penghargaan bisa disesuaikan untuk lebih mencerminkan kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Kemudian orang-orang penerima Anugrah Bakti Sosial akan dituangkan di dalam Surat Keputusan Wali nagari.	Tujuan : 1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa besar bagi kemajuan Nagari, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. 2. Memperkuat rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap nagari, serta membangun semangat gotong royong di kalangan warga. Manfaat : 1. Meningkatkan rasa apresiasi 2. Motivasi untuk masyarakat lain 3. Meningkatkan partisipasi sosial
107.	BIK (Buku Induk Kaum)	Kurangnya partisipasi masyarakat dapat membuat inovasi buku induk kaum tidak efektif, karena masyarakat tidak terlibat dalam proses pengembangan serta Kurangnya motivasi masyarakat dapat membuat inovasi buku induk kaum tidak efektif. Untuk itu perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk membuat buku induk kaum seperti ranji kaum, batas wilayah kaum, jumlah anak kemenakan , batas-batas wilayah harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Dengan adanya program ini analisis kebutuhan untuk membuat buku induk kaum. Seperti ranji kaum, batas wilayah kaum, jumlah anak kemenakan , memudahkan pendataan	Tujuan : 1. Menjaga kelestarian kaum tersebut 2. Menjaga ranji agar tidak hilang 3. Menjadi buku acuan untuk kaum tersebut 4. Memberikan hak yang sama dari kepala kaum untuk anak kemenakan Manfaat : 1. Menjaga kelestarian kaum tersebut 2. Menjaga ranji agar tidak hilang

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		jumlah anak kemenakan kaum, batas-batas tanah pusaka tinggi dan harta pusaka rendah kaum dan ranji kaum diwilayah nagari Pasia laweh.	3. Menjadi buku acuan untuk kaum tersebut 4. Memberikan hak yang sama dari kepala kaum untuk anak kemenakan
108.	BRG (Bantuan Rumah Garin)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan anggaran dan pembiayaan dalam implementasi program bantuan rumah adalah keterbatasan anggaran dan dana yang disediakan oleh pemerintah, ketergantungan penerima bantuan rumah menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah dan tidak memiliki cukup insentif untuk berusaha meningkatkan kondisi ekonominya sendiri. Ketergantungan ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk mandiri secara finansial di masa depan. Setelah program dilaksanakan, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai keberhasilan dan dampak program terhadap Gharini yang menerima bantuan rumah. Program ini memberikan rumah yang layak huni bagi Gharini kurang mampu, yang sebelumnya tinggal dalam kondisi rumah yang tidak memadai atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Bantuan rumah memberikan rasa aman dan stabilitas sosial bagi penerima manfaat.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup gharin 2. Mengurangi Ketergantungan pada Bantuan Sosial 3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Secara Efisien 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Manfaat : 1. Peningkatan Kualitas Hidup Gharin 2. Pengurangan Kemiskinan 3. Pengurangan Ketimpangan Sosial
109.	Khatam Al-Qur'an Gratis	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga pengajar yang berkualitas yang mampu mengajar anak-anak dalam mempersiapkan murid-murid yang akan khatam al-qur'an dan keterbatasan anggaran dari wali murid karena untuk melaksanakan Khatam Al-Qur'an membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu dilakukan strategi dengan program khatam Al-qur'an secara gratis sehingga dapat menciptakan generasi penerus Nagari Pasia laweh yang hafal Qur'an serta menciptakan anak-anak nagari Pasia laweh yang lancar baca al-qur'an dengan irama serta tajwid yang benar.	Tujuan : Mengurangi beban orang tua mengingat biaya khatam al-qur'an yang sangat mahal. Manfaat : 1. Meningkatkan kemampuan siswa membaca al-qur'an. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran . 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antar masyarakat nagari, dengan semangat gotong royong.
110.	KTH BK (Kelompok Tani Hutan Berbasis Kaum)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pasar, perbedaan kepentingan	Tujuan : 1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		antar anggota dan ketergantungan pada pihak eksternal sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan. Untuk itu dilakukan metode kebaruan dengan mendeteksi potensi masalah yang muncul dalam hal pengelolaan hutan, pembagian hasil, atau hubungan antar anggota kelompok, melibatkan masyarakat dalam program reboisasi untuk meningkatkan kualitas lahan dan mencegah kerusakan hutan akibat deforestasi, membentuk kelompok tani hutan berbasis kaum yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan hasil dari program-program yang diterapkan serta membuka peluang untuk pendidikan tentang pentingnya hutan melalui sekolah lapangan yang melibatkan masyarakat serta mengembangkan wisata berbasis pendidikan alam.	2. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kultural 7. Diversifikasi Produk Hutan 8. Pengembangan Ekowisata Manfaat : 1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 2. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan 3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal 4. Peningkatan Akses ke Sumber Daya Alam 5. Diversifikasi Produk dan Inovasi 6. Meningkatkan Ketahanan Pangan
111.	MAKNA (Museum Adat dan Kebudayaan Nagari)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum adanya legalitas museum adat yang membutuhkan izin usaha atau izin operasional dari pemerintah daerah atau kementerian terkait, kurangnya tenaga ahli dalam bidang kebudayaan dan hilangnya sejarah akibat pengaruh modernisasi serta hilangnya pembelajaran budaya adat Minangkabau di Sekolah-sekolah. Untuk itu dilakukan pembaharuan dengan melakukan pengembangan program-program yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memberikan informasi yang lebih menarik tentang kebudayaan nagari, menjalin kerjasama dengan komunitas adat, tokoh budaya, dan lembaga pendidikan, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam program Museum Adat dan Kebudayaan Nagari Pasia Laweh (MAKNA).	Tujuan : 1. Media pembelajaran pendidikan. 2. Pedoman bagi generasi yang akan datang. 3. Menambah potensi wisata budaya dan sejarah nagari. 4. Terkumpulnya kekayaan budaya adat MINANGKABAU di Nagari Pasia Laweh Manfaat : 1. Pelestarian kebudayaan dan adat istiadat. 2. Pendidikan dan peningkatan pemahaman budaya. 3. Peningkatan pariwisata dan sejarah nagari. 4. Penguatan identitas budaya lokal.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
112.	SDN (SAFARI DAKWAH NAGARI)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan karena adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sosial dan budaya dapat membuat safari dakwah nagari kurang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, kurangnya kemampuan dakwah dari para Dai dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan serta keterbatasan sumber daya seperti dana, sarana, dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan safari dakwah nagari. Adapun upaya kebaruan yang dilakukan mengembangkan kapasitas Dai dan pendamping untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan inovasi. Selain itu inovasi ini dapat meningkatkan jangkauan dakwah dengan dengan membuatnya lebih mudah di akses oleh masyarakat yang lebih luas. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai agama dan sosial.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran dan kepeahaman masyarakat tentang agama islam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dakwah dan pembangunan masyarakat nagari. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang lebih baik. Manfaat : 1. Meningkatkan kesadaran dan kepeahaman masyarakat tentang agama islam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 2. Meningkatkan dan menambah ilmu masyarakat tentang ajaran islam. 3. Meningkatkan jangkauan dakwah serta menjalin silaturahmi dengan Masyarakat Nagari Pasia Laweh sampai ke pelosok-pelosok kampung. 4. Meningkatkan efektivitas dakwah. 5. Meningkatkan kualitas dakwah karena jika semakin sering pendakwah itu tampil menyampaikan dakwah maka semakin terasah mentalnya karena sudah terbiasa berbicara di depan masyarakat ramai. 6.
113.	PESONA NARIYAH (Pekan Ekonomi Seni Budaya Olahraga Nasionalisme dan Agama Nagari Mandiri Berhidayah)	Inovasi ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mendukung program Pesona Nariyah sering menjadi masalah besar dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang melibatkan berbagai bidang, seperti ekonomi, seni, budaya, dan olahraga, memerlukan dana yang cukup besar dan berkelanjutan. Selain itu, dana yang ada mungkin tidak dapat mencakup seluruh kegiatan yang	Tujuan : 1. Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Pelestarian Seni dan Budaya Lokal 3. Peningkatan Nasionalisme dan Persatuan 4. Pembinaan Olahraga



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		direncanakan, adanya ketidaksesuaian antara kegiatan dan minat masyarakat serta ketidaksesuaian antara kegiatan dan minat masyarakat. Adapun kebaruan yang dilakukan dengan memahami potensi, kekuatan, serta kebutuhan masyarakat setempat yang akan dilibatkan dalam program Pesona Nariyah dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	5. Mendorong Kemandirian Nagari (Desa Mandiri) Manfaat : 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 2. Pelestarian Seni dan Budaya Lokal 3. Peningkatan Nasionalisme dan Persatuan 4. Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan
114.	Pohon Asuh Nagari	Inovasi ini muncul karena adanya keterbatasan anggaran dana desa sering dialokasikan untuk kebutuhan lain, sehingga alokasi kegiatan Pohon asuh Nagari menjadi kurang prioritas, adanya keterbatasan ketersediaan lahan. Selain itu adanya keterbatasan sumber daya seperti air dan pupuk, dapat menjadi permasalahan mikro dalam penanaman. Adapun perubahan yang dilakukan merencanakan program pohon asuh nagari kepada masyarakat nagari dan Stakeholders lainnya, seperti pemerintah, swasta dan organisasi serta memberdayakan masyarakat nagari untuk mengelola dan mempertahankan hasil program pohon asuh nagari.	Tujuan : 1. Melestarikan Pepohonan yang telah berusia ratusan tahun yang lalu yang ada di Nagari Pasia Laweh. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. Mengurangi kemiskinan di nagari karena melalui inovasi pohon asuh ini mereka akan di berikan dana insentif dari pihak-pihak terkait. 5. Mengembangkan kualitas lingkungan nagari melalui pengelolaan limbah dan polusi. 6. Mengembangkan infrastruktur nagari yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Manfaat : 1. Pengurangan Emisi Karbon 2. Pengelolaan Air 3. Peningkatan Kualitas Hidup 4. Pengembangan Industri Hijau

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
115.	PJM (Program Jorong Melayani)	Inovasi dilatarbelakangi karena rentang wilayah yang sangat luas pada Nagari Pasia Laweh yang mana di sebelah utara Kota Bukittinggi menuju Pasaman. Nagari Pasia Laweh di belah jalan negara yang menghubungkan Bukittinggi dengan Sumatera Utara. Sepanjang jalan itu, dikirim kanan jalan itu menjulang Bukit Barisan yang ditumbuhi tanaman-tanaman dan beberapa lokasi di sepanjang jalan itu mengalir deras air sungai yang jernih. Dengan topografi berbukit-bukit itulah, penduduk Pasia Laweh membangun pemukiman sehingga terbentuk kluster pemukiman yang dipisahkan oleh bukit-bukit, hutan dan lembah serta aliran sungai. Sulitnya Pemerintah Nagari dalam menjangkau seluruh lapisan Masyarakat yang berada di jorong-jorong, jarak tempuh ke kantor Wali nagari yang sangat jauh dan akses informasi yang masih terbatas serta tidak ada sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik di daerah jorong-jorong.	Tujuan : 1. Peningkatan program pelayanan sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat 2. Membimbing jorong membangun sistem pelayanan yang baik 3. Memberikan hak yang sama untuk masyarakat jorong dalam pelayanan administrasi dan pelayanan aspirasi. Manfaat : 1. mendorong jorong lebih mandiri dalam urusan melayani masyarakat 2. Membantu desa agar terjamin hak setiap warganya dalam pelayanan administrasi dan pelayanan aspirasi. 3. Memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan
116.	PROTAP (Program Atap Putih)	Adanya permasalahan yang muncul secara makro karena adanya keterbatasan pembiayaan dan pendanaan. Selain itu Nagari Pasia Laweh memiliki kondisi geografis tertentu (seperti daerah rawan angin kencang atau hujan lebat) bisa menjadi tantangan. Atap putih yang mungkin cocok untuk kondisi tertentu, bisa jadi tidak optimal atau tidak tahan lama jika cuaca di daerah tersebut ekstrem. Beberapa daerah di Nagari Pasia Laweh mungkin sulit dijangkau, baik karena akses jalan yang buruk atau lokasi yang terpencil. Ini dapat menghambat distribusi bahan atap dan membuat masyarakat di daerah tersebut kesulitan untuk beberapa daerah di Nagari Pasia Laweh mungkin sulit dijangkau, baik karena akses jalan yang buruk atau lokasi yang terpencil. Ini dapat menghambat distribusi bahan atap dan membuat masyarakat di daerah tersebut kesulitan untuk mendapatkan bantuan tepat waktu atau dalam kondisi baik	Tujuan: 1. Meningkatkan Kualitas Hunian Masyarakat 2. Peningkatan Akses terhadap Rumah Layak Huni 3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Manfaat : 1. Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal 2. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga 3. Peningkatan Ketahanan Sosial 4. Peningkatan Kualitas Hidup Secara Keseluruhan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
117.	SAHAM (Sekolah Hukum Adat Minangkabau)	Adanya perubahan sosial dan perubahan nilai pada generasi muda saat ini lebih terpapar oleh budaya global dan teknologi modern, yang membuat mereka lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat modern dibandingkan dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau. Kurangnya minat dari generasi muda terhadap pendidikan adat bisa menjadi tantangan besar dalam keberlangsungan Sekolah Hukum Adat Minangkabau (SAHAM). Inovasi SAHAM memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengembangkan kurikulum, infrastruktur, serta program pelestarian kebudayaan. Namun, seringkali anggaran untuk pendidikan adat atau budaya lokal lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendidikan umum,	Tujuan : 1. Pendidikan Hukum Adat untuk Generasi Muda 2. Pemberdayaan Masyarakat Adat 3. Penyelesaian Konflik Secara Harmonis dan Berkeadilan 4. Meningkatkan Kepedulian terhadap Nilai-Nilai Tradisional 5. Menumbuhkan Minat dan Kesadaran Terhadap Pendidikan Hukum Manfaat : 1. Pendidikan dan peningkatan pemahaman tentang hukum adat Minangkabau. 2. Pelestarian budaya 3. Pengembangan masyarakat adat 4. Penguatan sistem hukum
118.	Senawasbang	Inovasi ini dilatarbelakangi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. kurangnya kemampuan guru dalam mengajar wawasan kebangsaan dan bela negara serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, peralatan, dan teknologi. Upaya kebaruan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kapasitas guru untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pembaharuan metode pembelajaran.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. 2. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam bidang wawasan kebangsaan dan bela negara. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah nagari wawasan kebangsaan (SENAWASBANG). 4. Meningkatkan Kecintaan masyarakat terhadap NKRI. 5. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang wawasan Kebangsaan dan bela negara. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. 2. Mengembangkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. 3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan di Indonesia. 4. Mengembangkan generasi muda yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme.
119.	Penomoran Rumah Terintegrasi	Adanya keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga, dan infrastruktur, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan inovasi penomoran rumah terintegrasi. Karna dana adalah hal terpenting dalam sebuah inovasi untuk membuat nama-nama jalan dan gang yang ada di Nagari Pasia Laweh. Kurangnya dukungan pemerintah dapat membuat inovasi penomoran rumah terintegrasi sulit untuk diimplementasikan dan berkelanjutan. Selain itu keterbatasan kemampuan petugas dapat membuat inovasi penomoran rumah terintegrasi tidak efektif, karena petugas tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan penomoran.	Tujuan : 1. Meningkatkan daya kelola Nagari Pasia Laweh dalam penomoran rumah terintegrasi. 2. Mempermudah pihak luar dalam mencari informasi tentang data yang di butuhkan. 3. Memberikan hak yang sama untuk masyarakat Nagari Pasia Laweh. Manfaat : 1. Tercipta penomoran rumah, penamaan jalan dan penamaan gang perumahan. 2. Kemudahan dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat.. 3. Mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data dan informasi 4. Memudahkan masyarakat dalam mencari alamat.
120.	Ramadhan Award	Ramadhan Award dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama bulan Ramadhan. Ramadhan Award juga dapat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Tujuan : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghargaan dan insentif.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		mengembangkan UMKM. Dengan adanya program Ramadhan Award dapat mengembangkan program yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dapat mengembangkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan program yang inovatif. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Manfaat : 1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghargaan dan insentif. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. 4. Meningkatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
121.	Tebar Seribu Sajadah	Inovasi ini dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya seperti dana, material dan tenaga kerja dapat mempengaruhi pelaksanaan tebar seribu sajadah, adanya kesenjangan sosial antara Masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sajadah, keterbatasan akses ke jorong yang jauh dapat mempengaruhi distribusi sajadah serta kebijakan pemerintah yang tidak mendukung mempengaruhi kegiatan program tebar seribu sajadah. Distribusi sajadah yang kurang efektif dapat mempengaruhi penerimaan sajadah oleh masyarakat. Dengan adanya program tebar seribu sajadah dapat meningkatkan kualitas ibadah masyarakat nagari dengan menyediakan sajadah yang berkualitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah serta meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas ibadah masyarakat nagari dengan menyediakan sajadah yang berkualitas 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah 3. Membantu Masyarakat nagari yang membutuhkan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sarana ibadah yang memadai Manfaat : 1. Meningkatkan kualitas ibadah 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			5. Meningkatkan kerukunan masyarakat 6. Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah nagari 7. Meningkatkan kredibilitas Pemerintah nagari 8. Mempererat tali persaudaraan dan menjadikan nagari harmonis dan solid.
122.	Uji Kompetensi	Inovasi ini dilatarbelakangi Keterbatasan waktu untuk mengikuti uji kompetensi dapat mempengaruhi hasil uji kompetensi, kurangnya motivasi individu untuk mengikuti uji kompetensi dapat mempengaruhi hasil uji kompetensi serta kurangnya dukungan dari orang lain seperti keluarga atau teman dapat mempengaruhi motivasi individu untuk mengikuti uji kompetensi. Dengan adanya Uji kompetensi dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan serta meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan individu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai untuk memberikan pelayanan dengan baik.	Tujuan : 1. Untuk mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. 2. Mengukur kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 3. Meningkatkan kualitas pekerjaan dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Meningkatkan kepuasan kerja dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Meningkatkan pengembangan karier dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manfaat : 1. Uji kompetensi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 2. Uji kompetensi dapat meningkatkan kemampuan kerja dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. 3. Uji kompetensi dapat meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
123.	Gerakan Peduli Usaha Yatim Piatu dan Duafa	Inovasi ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membantu yatim piatu dan duafa, keterbatasan kemampuan penggalangan dana. Dengan kegiatan inovasi ini dilakukan dengan menggalang dana dari donatur dan sponsor untuk mendukung program yang akan dilakukan serta mengembangkan strategi untuk membantu yatim piatu dan duafa. Yayasan ini memiliki fokus yang jelas pada kesejahteraan yatim piatu dan duafa sehingga dapat memberikan bantuan yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap yatim piatu dan duafa.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup yatim piatu dan duafa melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi yatim piatu dan duafa melalui pembangunan usaha yang berkelanjutan 3. Meningkatkan kesadaran sosial masyarakat untuk mendukung usaha yang berkelanjutan bagi yatim piatu dan duafa 4. Meningkatkan penghasilan yatim piatu dan duafa 5. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi yatim piatu dan duafa Manfaat : 1. Meningkatnya kemandirian ekonomi yatim piatu dan duafa 2. Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat 3. Meningkatnya penghasilan ekonomi yatim piatu dan duafa 4. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja 5. Meningkatnya kontribusi terhadap perekonomian

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
124.	LDN (LUMBUNG DARAH NAGARI)	Permasalahan yang sering muncul adalah banyaknya kejadian Ibu hamil yang mengalami kekurangan darah dalam masa persalinan, sakit yang tidak bisa ditaksir sebelumnya atau sakit mendadak, stok darah yang terbatas di Palang Merah Indonesia (PMI), keterbatasan sumber daya, regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat pengembangan dan implementasi inovasi lumbung darah serta sistem informasi yang tidak memadai dapat menghambat pengelolaan dan penggunaan darah Dengan adanya permasalahan ini maka muncul inovasi Lumbung Darah Nagari dengan Mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mengelola data darah, penggunaan darah, dan pelacakan kualitas darah serta mengembangkan teknologi yang mendukung inovasi lumbung darah nagari, seperti sistem penyimpanan darah yang canggih dan menggunakan Teknologi Biologi Sintetik untuk Pembuatan Darah Buatan: Mengembangkan teknologi biologi sintetik untuk pembuatan darah buatan yang dapat digunakan sebagai alternatif darah alami.	Tujuan : 1. Agar masyarakat tidak kesusahan mencari darah apabila diperlukan serta Meningkatkan kualitas pengelolaan darah melalui pengembangan sistem pengelolaan darah yang terintegrasi dan efektif. 2. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Darah 3. Meningkatkan Keselamatan Pasien Manfaat : 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Darah 2. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Darah 3. Meningkatkan Keselamatan Pasien
125.	GILA (Gali Ide Langsung Aksi) Aren	Permasalahan ini muncul diawali kurangnya alat penunjang untuk pengolahan nira menjadi berbagai macam produk olahan seperti gula aren dan gula semut, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan potensi yang baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti akses jalan, alat angkut dan lain-lain. Dengan masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dapat menimbulkan peluang untuk peningkatan ekonomi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya inovasi ini mencoba memanfaatkan dan/atau memanen aren liar yang ada di kebun masyarakat dan dari hasil pemanfaatan aren liar tersebut ternyata bisa dijadikan ekonomi alternatif atau ekonomi utama;	Tujuan : 1. Termanfaakannya lahan yang masih belum terkelola dengan maksimal oleh masyarakat sehingga menjadi nilai ekonomi; 2. Peningkatan ekonomi masyarakat; 3. Terpeliharanya konservasi hutan dengan dilakukannya penanaman pohon aren Manfaat : 1. Mendapatkan penambahan ekonomi bagi masyarakat 2. Hasil yang diperoleh dalam pengolahan aren dapat menjadi perekonomian alternatif 3. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
126.	SADAMA (Satuan Aksi Peduli Danau Maninjau)	Inovasi Nagari Koto Malintang ini muncul karena banyaknya enceng gondok di danau maninjau sehingga terganggunya aktivitas masyarakat di sekitar pinggir danau dan masih kurangnya referensi produk olahan dari enceng gondok. Adapun upaya yang dilakukan dengan banyaknya enceng gondok di danau maninjau dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang olahan unik seperti tempat tisu, tas serta adanya peluang untuk peningkatan ekonomi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih memaksimalkan pemanfaatan dan pengolahan enceng gondok secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih terjaganya kelestarian kawasan danau maninjau. Olahan suvenir enceng gondok sudah di pasarkan di beberapa hotel yang ada di Sumatera barat dan juga telah diberikan sebagai suvenir khas nagari koto Malintang kepada para tamu-tamu penting.	Tujuan : 1. Dimanfaatkannya tumbuhan eceng gondok sebagai bahan baku olahan suvenir; 2. Peningkatan ekonomi masyarakat; 3. Membantu memelihara kelestarian danau maninjau. Manfaat : 1. Mendapatkan penambahan ekonomi bagi masyarakat; 2. Hasil yang diperoleh dalam pengolahan eceng gondok dapat menjadi perekonomian alternatif; 3. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat.
127.	Peradilan Adat Buek Arek Nagari	Keberlangsungan kehidupan manusia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa andil dan ketertiban manusia lain yang ikut membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Semakin berkembang dan maju kehidupan yang mesti ia penuhi dan semakin banyak pula orang-orang yang diperlukan untuk mewujudkan kemajuan tersebut. Agar tidak terjadi benturan kepentingan antara masing-masing individu dalam mengekspresikan kebebasan yang berimplikasi terjadinya ketidakharmonisan kehidupan bersama maka dibutuhkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang mengikat dan disepakati bersama. Beranjak dari kesepakatan tersebut maka masyarakat Pakan Sinayan mencoba untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat dari kerusakan moral dan budaya, sebab zaman teknologi dan informasi, disamping menawarkan kemudahan, juga menghadirkan bahaya dapat menghancurkan budaya dan tatanan yang telah dibangun oleh nenek moyang dahulu.	Tujuan : Untuk mengantisipasi dampak negatif dari modernisasi serta pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sekaligus memberi efek jera terhadap para pelaku. Manfaat : 1. Pencegahan Efektif 2. Pelestarian Nilai-nilai Lokal
128.	SATELIT (Sama-sama Enyahkan Stunting dengan Salapiak Talua)	Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penurunan Stunting menjadikan penanggulangan stunting menjadi prioritas utama nagari sehingga dalam hal ini Bupati Agam menerbitkan Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2022 tentang Peran Nagari dalam pencegahan penurunan stunting. Berkenaan dengan hal tersebut Nagari Pakan Sinayan menjadi lokus angka stunting	Tujuan : Mengatasi dan mencegah adanya balita stunting di Nagari Pakan Sinayan Manfaat :



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		tertinggi di Kecamatan Banuhampu. Untuk itu Nagari Pakan Sinayan merancang inovasi Satelit guna memberikan komunikasi edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat untuk menekan tingginya angka stunting. Bentuk kegiatan Satelit ini yaitu memberikan sumbangan telur bagi anak balita berisiko stunting dan juga ibu hamil.	Untuk mengurangi angka stunting dan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat nagari Pakan Sinayan yang ingin kontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting.
129.	Nila Crispy	Inovasi ini muncul karena permasalahan mahalanya bahan pokok pembuatan Nila Crispy sementara pemasaran belum maksimal, keterbatasan sumber daya manusia dalam Packing dan pemasaran produk yang telah di buat, belum tersedianya Tempat Khusus atau rumah produksi yang layak dalam pengolahan Nila Crispy. Bahan pokok bibit ikan nila yang tersedia di Sekitar Nagari Peninjauan cukup memadai untuk jumlah produksi banyak dan memberikan inovasi baru perekonomian masyarakat di bidang Kuliner. Adapun upaya yang dilakukan dengan lebih memaksimalkan pemanfaatan dan pengolahan Nila Crispy secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang usaha Kuliner dan membantu para petani pembibitan Ikan Nila dalam pemasaran dan pengolahan. Dari hasil Pengolahan Bibit Ikan Nila tersebut ternyata bisa dijadikan ekonomi alternatif atau selain pertanian dan perkebunan dan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti Lembaga Pendidikan (Universitas Andalas), PLN dan Dinas UMKM.	Tujuan : 1. Membantu Para petani Ikan khususnya di Nagari Paninjauan dalam pemasaran dan pengolahan ikan menjadi peningkatan ekonomi alternatif 2. Peningkatan ekonomi Masyarakat di Bidang kuliner 3. Membudayakan konsumsi ikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih enak dan menarik di semua kalangan . Manfaat : 1. Mendapatkan penambahan ekonomi bagi Masyarakat dan kelompok – kelompok UMKM Nagari. 2. Hasil yang diperoleh dalam pengolahan Nila Crispy dapat menjadi perekonomian alternatif. 3. Adanya Inovasi baru untuk membiasakan makan ikan.
130.	BK 40 BT	Inovasi dilatarbelakangi dengan memberikan motivasi masyarakat melakukan gerakan program baliak kasurau yang diadakan oleh pemerintah Nagari Nan Limo kepada masyarakat dengan mensosialisasikan pelaksanaan sholat berjamaah di mesjid secara berturut-turut selama 40 hari dan akan memberikan reward kepada masyarakat yang melaksanakannya dimana ini bertujuan untuk menciptakan kader mesjid secara permanen disetip jorong.	Tujuan : Untuk menciptakan kader mesjid secara permanen disetip jorong di Nagari Nan Limo Manfaat : Terciptanya kader untuk memakmurkan mesjid yang mencintai Mesjid secara permanen.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
131.	5 Sehat 2025 Sempurna	Berdasarkan pendataan yang dilakukan diakhiri tahun 2023, ditemukan 92 rumah masih belum mempunyai WC sehat dan keluarga ini berpotensi stunting. Nagari memutuskan untuk memberikan bahan untuk WC sehat kepada keluarga tersebut dan upah kerja ditanggung penerima. Dengan adanya inovasi ini pada tahun 2024 telah dikerjakan 31 buah WC sehat dan 61 buah pada tahun 2025.	Tujuan : Seluruh masyarakat di Nagari Nan Limo sudah memiliki fasilitas WC sehat tahun 2025 dan mengurangi resiko stunting. Manfaat : 1. Lingkungan menjadi bersih, sehat dan tidak berbau 2. Jamban sehat dapat mengurangi resiko stunting pada anak-anak
132.	Gaduik Smart	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum maksimalnya pelayanan prima karena beberapa fasilitas belum memadai dan terbatas. Adapun upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian dan mengupayakan pemenuhan lingkungan hunian/pemukiman yang bersih dan sehat serta mengupayakan pelayanan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan kearsipan agar lebih baik lagi sehingga sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Tujuan : 1. Meningkatkan waktu respon dan pelayanan 2. Melaksanakan pekerjaan lebih efektif dan efisien 3. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelayanan kepada masyarakat Manfaat : 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan efisien 2. Membantu menyelesaikan permasalahan baik dibidang administrasi maupun pelayanan publik lainnya.
133.	Kopi Data Premium	Inovasi Nagari Baringin Kecamatan Palembayan ini muncul karena masih kurangnya alat penunjang untuk pengolahan Kopi menjadi Bubuk Kopi Premium, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan potensi yang baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti akses jalan, alat angkut dan lain-lain. Disamping itu masih banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan adanya peluang untuk peningkatan ekonomi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dilakukan upaya kebaruan dengan lebih memaksimalkan pemanfaatan dan pengolahan Kopi secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Tujuan : 1. Termanfaatkannya lahan yang masih belum terkelola dengan maksimal oleh masyarakat sehingga menjadi nilai ekonomi; 2. Peningkatan ekonomi masyarakat; 3. Terpeliharanya konservasi hutan dengan dilakukannya penanaman pohon Kopi Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		lebih terjaganya kelestarian kawasan hutan. Selain itu bibit bantuan yang telah diberikan oleh beberapa pihak, sudah dilakukan penanaman di lahan kelompok tani hutan KUPS agroforestri Kopi Data.	1. Mendapatkan penambahan ekonomi bagi masyarakat; 2. Hasil yang diperoleh dalam pengolahan Kopi dapat menjadi perekonomian alternatif; 3. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat
134.	Bertani Ramah Lingkungan	Inovasi Nagari Pauh Kamang Mudiak berawal dari permasalahan disektor pertanian dimana terdapat kelangkaan pupuk dan mahal serta irigasi untuk pertanian yang masih kurang. Dengan adanya metode peertanian ramah lingkungan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi Nagari Pauh Kamang Mudiak. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok usaha tani ramah lingkungan yang telah mampu memproduksi pupuk organik padat, cair dan produk ramah lingkungan lainnya. Dengan metode pertanian ramah lingkungan permasalahan pupuk dapat teratasi, masalah lingkungan dan masalah pengairan juga dapat teratasi karena dengan pertanian ramah lingkungan dapat dilakukan dengan atau tanpa air yang cukup. Nilai hasil pertanian ramah lingkungan mempunyai nilai jual lebih tinggi dan tidak memili efek samping untuk dikonsumsi.	Tujuan : 1. Mengatasi permasalahan dibidang pertanian untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat bahan kimia. 2. Menghidupkan lahan tidur dinagari Pauh Kamang Mudiak 3. Menjadikan Nagari Pauh Kamang Mudiak jadi destinasi wisata pertanian ramah lingkungan. Manfaat : 1. Memperbaiki struktur tanah 2. Meningkatkan taraf hidup dan penghasilan petani 3. Mengurangi biaya produksi
135.	PENA DIGITAL (Pelayanan Nagari Digital)	Pelayanan Nagari Digital (PENA Digital) merupakan salah satu inovasi terbaru Nagari Koto Gadang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. PENA Digital akan membantu perangkat desa dalam pembuatan surat secara cepat & mudah sesuai dengan Permendagri 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Masyarakat yang berada di Nagari Koto Gadang bisa mengakses link untuk mengurus surat menyurat dengan melihat pedoman sesuai surat yang akan diurus dengan dipandu oleh Wali jorong yang ada di Nagari Koto Gadang.	Tujuan : Upaya Pemerintah Nagari Koto Gadang dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Manfaat : 1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan 2. Meningkatkan Transparansi Pelayanan 3. Meningkatkan Akses Pelayanan 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
136.	BESTI DINI (Bebas Stunting Dari Dini)	Masalah gizi merupakan tanggung jawab bersama, terkait percepatan penurunan stunting maka nagari ikut berperan dalam percepatan penurunan stunting. Nagari Koto Gadang bertekad menurunkan angka stunting dengan melakukan inovasi Besti Dini yang bekerja sama dengan Puskesmas IV Koto, bidan desa, kader nagari agar pencegahan dan penanganan stunting berjalan dengan optimal. Untuk mencapai target bebas dari stunting maka nagari Koto Gadang dengan segala daya dan upaya kita lakukan secara terus menerus serta berkelanjutan melalui wadah Posyandu. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kapasitas kader posyandu, peningkatan sarana dan prasarana posyandu serta pengelolaan advokasi pencegahan stunting.	Tujuan : Upaya Pemerintah Nagari Koto Gadang dalam mencegah dan mengatasi stunting. Manfaat : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak diNagari sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik.
137.	Wisata Air	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya alih fungsi sungai untuk pembangunan wisata air diNagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung. Adapun kebaharuan yang dilakukan adalah dengan menjadikan wisata air disungai dengan pengembangan tempat pemandian yang aman untuk pengunjung dan dapat melakukan aktivitas berenang dan arum jeram.	Tujuan : 1. Meningkatkan pendapatan desa 2. Menciptakan lapangan kerja 3. Melestarikan budaya 4. Mendorong perkembangan kewirausahaan Manfaat : 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat
138.	E-Simpan (Elektronik Sistem Informasi Penduduk Nagari)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang semula berorientasi pada antrian sekarang sudah berubah menjadi layanan online yang dapat diakses melalui pelayanan digital. Penerapan inovasi dalam pelayanan publik merupakan strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga optimalisasi pelayanan publik dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan prima.	Tujuan : 1. Penghematan biaya dan tenaga 2. Efektif dan efisien 3. Meningkatkan waktu respon dan pelayanan Manfaat : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
139.	HAMZAH (Himpunan Amil Zakat dan Shadaqah)	Semakin banyak permintaan bantuan oleh masyarakat kurang mampu terhadap permasalahan persoalan ekonomi. Untuk itu Pemerintah Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu beserta masyarakat berupaya mengurangi kemiskinan dengan membentuk Hamzah dalam rangka mengurangi kemiskinan bagi	Tujuan : Menekan angka kemiskinan dan banyaknya permintaan bantuan oleh masyarakat miskin/kurang mampu terhadap persoalan ekonomi.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan biaya kesehatan, modal usaha dan pendidikan. Penerapan inovasi Nagari Kubang Putih ini dilakukan dengan menyalurkan dana dari amil zakat ke Mustahik zakat sesuai syariah agama Islam.	Manfaat : 1. Membantu mengurangi beban masyarakat miskin 2. Pengumpul dan penyaluran zakat, infak berlangsung tertib dan tepat sasaran.
140.	BENDI SIAGA (Bencana Datang Kami Siap Siaga)	Nagari Kubang Putih yang berada dikaki gunung merapi dan gempa bumi yang sering terjadi akibat adanya patahan. Menyikapi hal ini maka Pemerintah Nagari lewat Lembaga Nagari Kelompok Siaga Bencana (KSB). Menyikapi hal tersebut KSB Kubang Putih ikut berpartisipasi dalam pencarian korban dan membantu dapur umum sehingga korban akibat paparan/dampak erupsi merapi dapat lebih di minimalisir.	Tujuan : Meminimalisir korban akibat bencana alam yang terjadi dan membantu para korban yang terdampak. Manfaat : 1. Menambah pengetahuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. 2. Meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan terhadap masyarakat. 3. Meningkatkan Kerjasama antar Pemerintah Dan Masyarakat.
141.	Smart Village	Inovasi ini dilatarbelakangi karena kurang memadainya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik yang mudah untuk diakses, kurang efisiennya pelayanan yang diberikan serta masyarakat mengalami kendala dalam menjangkau informasi seputar pemerintahan nagari Tigo Balai Kecamatan Matur. Melalui inovasi Smart Village ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan jangkauan informasi lebih cepat dan luas.	Tujuan : 1. Terwujudnya transportasi nagari dalam pemanfaatan teknologi melalui ruang digital nagari. 2. Percepatan transformasi pembangunan nagari yang mandiri dan sejahtera. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Manfaat : 1. Data dan informasi tersimpan secara digital sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. 2. Pelayanan publik terhadap masyarakat mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor Wali nagari.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
142.	ASIH MEMPAN (Air Bersih Memberikan Kehidupan)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena kurangnya ketersediaan dan kualitas air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan akses terbatas serta kualitas air yang buruk. Selama ini masyarakat mengonsumsi dan menggunakan air bersih yang berasal dari air hujan dan sumber mata air yang tidak sesuai standar kesehatan. Melalui inovasi Asih MEMPAN diharapkan air bersih yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sehari-hari sesuai standar kesehatan dimana dengan sistem Hidrat air bisa dinaikkan ke wilayah yang lebih tinggi dari sumber air.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air sehingga masyarakat dapat terjamin kesehatannya. 2. Menjamin ketersediaan air ditengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan Manfaat : 1. Mendukung program peningkatan ketersediaan air bersih 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat serta pemerintahan setempat terkait pentingnya ketersediaan air bersih.
143.	PAK IPUL (Pelayanan Administrasi dan keterbukaan Informasi Publik Umum Secara Luas)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan anggaran dan belum pahamiya masyarakat tentang penggunaan pelayanan secara digital di Nagari Salareh Aia Utara. Dengan adanya permasalahan ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan sistem yang lebih efisien, terintegrasi, dan transparansi kepada masyarakat guna mempercepat proses administrasi.	Tujuan : Adanya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat secara efisien dan transparan. Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam pelayanan dan masyarakat ke kantor Nagari. Manfaat : Mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan serta memudahkan informasi yang lebih baik dan pelayanan secara profesional.
144.	SIMDES (Sistem Informasi Administrasi Desa dan Kependudukan)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masyarakat yang tidak membawa dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Untuk itu, nagari sungai landia kecamatan IV Koto membuat aplikasi SIMDES yang dapat memudahkan dalam pencarian data masyarakat.	Tujuan: Mempermudah melayani surat-surat dan administrasi kependudukan Manfaat: Pelayanan surat-surat dan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
145.	SABANA MAGEK (Satu Hati Bangun Nagari)	Inovasi ini dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan website juga keterbatasan jaringan internet. Untuk itu, Nagari Magek membuat inovasi melalui website nagari SABANA MAGEK sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan mudah dan cepat	Tujuan dan manfaat: Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang nagari
146.	NAGARI BAJUMANA TUMA (Nagari Berantas Judi Maksiat Narkoba Tua dan Muda)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya judi online dan penyalahgunaan narkoba diNagari Pasia Kecamatan IV Angkek. Dimana negara kita saat ini sudah tanggap darurat judi online dan penyalahgunaan narkoba. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba	Tujuan : Untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Manfaat : Nagari bebas dari efek negatif penyalahgunaan narkoba dan perjudian.
147.	KOLAK SAMARA (Sekolah Keluarga, Pembinaan dan Pendidikan Keluarga untuk <menjadi Keluarga Samara)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena terdapatnya peningkatan perceraian dari tahun ke tahun diNagari Pasia Kecamatan IV Angkek. Adapun upaya yang dilakukan dengan melakukan sekolah keluarga.	Tujuan : Untuk mengurangi tingkat perceraian ditengah-tengah masyarakat. Manfaat : Mengurangi resiko KDRT dan eksploitasi anak.
148.	NAGITA (Nagari Digital)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena sering terjadinya permasalahan dalam pengurusan pelayanan administrasi masyarakat diNagari Pasia Kecamatan IV Angkek. Adapun upaya yang dilakukan dengan melakukan digitalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat.	Tujuan : Mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi. Manfaat : Mengurangi human error dalam melakukan pelayanan masyarakat.
149.	KARTAL JORSI (Karak Kalias Talua) Jorong Sianok	Inovasi ini dilatarbelakangi karena terdapatnya 50 Kepala Keluarga pembuat/pengrajin karak kalias talua di Jorong Sianok Nagari sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto. Dimana belum ada wadah atau persatuan antar pengrajin, bagaimana produksi, hasil produksi, bahan baku yang berkualitas tinggi. Para pengrajin biasanya membuat sendiri kue hasil buatannya, dengan dibantu warga	Tujuan : Terciptanya persatuan dan kesatuan antara pembuat atau pengrajin karak kalias talua. Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		sekitar dalam pengolahan, setelah itu baru mereka menjual sendiri kue-kue tersebut dan membawa ke pasar terdekat.	Pengrajin atau pembuat karak kaliang mengetahui informasi pasar.
150.	BERNAMA UMKM (Bersama Nagari Majukan UMKM)	Terdapatnya bermacam UMKM di nagari Sianok Anam Suku seperti penjual makanan dan minuman serta kedai harian, sulaman, bengkel, kerupuk kentang, kerupuk talas dan pangkas rambut dimana belum ada persatuan UMKM. Untuk itu nagari Sianok Anam Suku membuat inovasi Bernama UMKM. Setelah dibentuknya persatuan UMKM ini diharapkan dapat terkumpulnya data UMKM di nagari.	Tujuan : Agar seluruh UMKM yang ada dapat terdata. Manfaat : Terkumpul dan tercatat seluruh UMKM yang lengkap.
151.	SUBERSAS BARU (Subuh, Tahajud Berjamaah Sianok Anam Suku)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih kurangnya minat dan keinginan jamaah mesjid untuk sholat subuh berjamaah, sehingga tercetuslah rencana sholat tahajud dan subuh berjamaah di mesjid. Setelah dilakukan kegiatan ini ditingkat Nagari, masing-masing mesjid hendaknya juga melaksanakan kegiatan Tahajud, Subuh berjamaah diNagari sianok Anam Suku Kecamatan IV Koto.	Tujuan : Merupakan salah satu perwujudan Agam madani, nagari madani Manfaat : 1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT 2. Meningkatkan kesalehan individu dan kesalehan sosial bersama. 3. Menjalin hubungan silaturahmi antar warga.
152.	PASTI KAMEK (Pelayanan Arsip Terintegrasi Kamang Magek)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum tersedianya bentuk sarana penyatuan arsip untuk kelancaran administrasi surat menyurat di Kecamatan Kamang Magek. Untuk itu Kecamatan Kamang Magek menciptakan inovasi Pasti Kakek agar dapat menyimpan surat menyurat sehingga mudah kembali menemukan apabila sewaktu-waktu bila diperlukan. Diharapkan dengan sistem pelayanan semua permasalahan kearsipan dapat terselesaikan dengan baik dan manajemen kearsipan yang dilakukan juga dapat semakin efektif dan efisien.	Tujuan : Menjaga berkas-berkas yang harus dipertanggungjawabkan yang harus dilestarikan. Manfaat : 1. Menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan 2. Mempermudah pencarian dan ditemukan dengan cepat dan tepat.
153.	KASIH LANSIA (Kamis Penuh Kasih Bersama Lansia)	Penerapan layanan kesehatan lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batu Kambing belum optimal seperti tidak adanya pelayanan asuhan kemandirian lansia	Tujuan :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		yang mencakup pemeriksaan tingkat kemandirian secara terjadwal, perencanaan bantuan untuk mencapai tingkat kemandirian yang maksimal dan perencanaan dukungan aktivitas dasar kehidupan sehari-hari. Para lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batu Kambing seharusnya mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala berupa kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut lansia serta kesehatan Indera yang mana pelayanan tersebut belum dilakukan secara optimal. Sedangkan masalah jiwa/mental, masalah kesehatan gigi dan mulut serta masalah Indera merupakan masalah yang dimiliki oleh hampir semua lansia.	1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan khususnya kepada sasaran semua lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batu Kambing 2. Meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan Indera di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batu Kambing 3. Meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan Indera di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batu Kambing Manfaat : 1. Tercapainya visi Kabupaten Agam dalam mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani melalui salah satu Misi Kabupaten Agam yaitu, membangun masyarakat mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. 2. UPTD Puskesmas Batu Kambing 3. Tercapainya target pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan Indera UPTD Puskesmas Batu Kambing 4. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang lebih efisien karena berbasis sasaran bukan program 5. Tercapainya peningkatan akses pelayanan kesehatan pada lansia 6. Lansia

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			7. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan komprehensif
154.	ALADDIN (Ayo lakukan Deteksi Dini Penyakit)	Inovasi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan meningkatnya faktor risiko dan penyakit tidak menular berdampak pada terjadinya peningkatan angka morbiditas, mortalitas dan Disabilitas, namun juga berdampak kehilangan produktivitas yang berdampak pada beban ekonomi baik tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan faktor risiko yang lain, merupakan faktor risiko penyakit tidak menular yang harus dikendalikan. Selain itu rendahnya Kunjungan Masyarakat Usia Produktif ke Posbindu di wilayah Kerja Puskesmas Pasar ahad dimana sasaran yang datang Ke Posbindu tiap bulan hanya itu ke itu saja, Capaian SPM Pelayanan kesehatan usia produktif (usia 15 s.d 59 tahun) Rendah serta kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pentingnya Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Tujuan : Untuk Mendeteksi Penyakit tidak menular pada usia produktif (15 Th s.d 59 Th) yang merupakan salah satu dari 12 indikator PTM Manfaat : Terdeteksinya penyakit tidak menular pada usia 15 s.d 59 tahun
155.	SI PELAKKOR HOAX (Sistem Informasi dan Pelayanan Kesehatan dan Koordinasi Berita HOAX)	Banyak orang tua bayi dan balita yang berpersepsi bahwa vaksin imunisasi dapat menyebabkan penyakit atau merugikan anak mereka. Setelah dilakukan edukasi dan wawancara, ditemukan fakta bahwa mereka mendapatkan informasi-informasi terkait imunisasi tersebut dari sumber yang tidak jelas kebenarannya (Hoax). Informasi-informasi ini mereka akses melalui laman media sosial, dan banyak tersebar dari orang ke orang (person to person) . Informasi-informasi Hoax inilah yang mengakibatkan salah persepsi masyarakat terhadap Imunisasi dan beberapa layanan Kesehatan lainnya (Misleading Information), hal ini berdampak kepada rendahnya capaian program Puskesmas, seperti capaian Imunisasi, serta rendahnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas Pasar Ahad. Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya fasilitas atau sarana pengaduan, klarifikasi dan verifikasi berita-berita Hoax tersebut, akibatnya masyarakat langsung memercayai berita-berita tersebut.	Tujuan : Untuk Mempermudah Akses Masyarakat terhadap informasi terkait Pelayanan Kesehatan dan Memberantas Peredaran Informasi Hoax di Masyarakat. Manfaat : Masyarakat dapat dengan mudah mengakses Informasi terkini dan terpercaya mengenai pelayanan Kesehatan serta terhentinya penyebaran berita Hoax di Masyarakat, sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pelayanan Kesehatan seperti imunisasi
156.	KUE CINTA USSI (Konsultasi Edukasi Calon Pengantin Puskesmas Lasi)	Tahun sebelumnya belum ada dilaksanakan inovasi untuk konsultasi edukasi bagi catin secara spesifik. Dari permasalahan yang ada, upaya yang dilakukan untuk calon pengantin yaitu konsultasi dan edukasi dengan petugas kesehatan. Dimana	Tujuan : 1. Mengetahui dan memahami persiapan pernikahan bagi Catin

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		catin diwilayah kerja puskesmas diberikan skrining kesehatan dan pendidikan kesehatan di KUA. Tahapan inovasi yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor terutama Kantor Urusan Agama yang akan melakukan skrining bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan akan memberikan konsultasi dan edukasi pada saat catin skrining di KUA tersebut. Inovasi Konsultasi dan Edukasi Calon Pengantin Puskesmas Lasi (KUE CINTA USSI) ini dibuat guna mempersiapkan calon pengantin untuk menikah agar tercipta pernikahan yang sehat, cerdas dan bebas stunting.	2. Meningkatkan pengetahuan Catin mengenai kesehatan reproduksi dan seksual 3. Meningkatkan pengetahuan tentang Gizi bagi calon pengantin Manfaat : Calon pengantin mendapat pembekalan dan pembinaan untuk siap menikah baik itu pemahaman terkait Kesehatan reproduksi dan seksual serta pengetahuan tentang gizi.
157.	KEMAS BERLIN (Kepuasan Masyarakat Berbasis Online)	Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat maka penggunaan layanan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, akuntabel, berkesinambungan. Dimana survei yang diberikan penyelenggara pelayanan publik kepada pengguna layanan secara langsung akan berdampak pada kinerja organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pengguna layanan yang merasa tidak puas bisa menjadi salah satu sumber masalah bagi organisasi pelayanan publik. Untuk itu Puskesmas Lasi melakukan inovasi dengan melaksanakan survei yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui kuesioner dilakukan kebaruan dengan sistem digitalisasi. Keunggulan memakai sistem digitalisasi adalah dapat mempermudah rekapitulasi kepuasan masyarakat dan lebih efektif dan efisien serta dapat langsung melihat hasil rekapan dan grafik kepuasan masyarakat.	Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan dengan sistem yang lebih efektif dan efisien. Manfaat : 1. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan pengguna layanan; 3. Diketahui indeks kepuasan penerima pelayanan publik secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan. 4. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
158.	PELITA MAMA (Pengendalian Tuberkulosis Melalui Masjid dan Mushalla)	Terbatasnya informasi mengenai TB pada Puskesmas Palupuh, masih adanya stigma buruk tentang TB di masyarakat, adanya efek samping obat, sehingga memungkinkan pasien tidak mau memeriksakan kesehatannya tentang TB ke fasilitas kesehatan, sehingga angka penemuan kasus TB di masyarakat menjadi rendah. Penemuan pasien merupakan merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Penemuan Kasus TB atau <i>Casey Detection Rate</i> (CDR) dilakukan secara aktif dan pasif. Penemuan kasus secara pasif dilakukan pencegahan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB. Penemuan kasus TB secara aktif yaitu meliputi, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak serumah, skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko, yang terakhir adalah skrining pada kondisi suatu khusus. UPTD Puskesmas Palupuh bekerja sama dengan Masjid, Mushalla, Perangkat Daerah (Nagari), dan kader kesehatan dalam upaya peningkatan penemuan kasus TB. Upaya kerjasama ini dilakukan dalam suatu bentuk inovasi yang dinamakan PELITA MAMA (Pengendalian Tuberkulosis Melalui Masjid dan Mushalla).	Tujuan : 1. Untuk melaksanakan pengendalian tuberkulosis (TB) di wilayah kerja UPTD Puskesmas Palupuh. 2. Untuk meningkatkan angka penemuan terduga TB untuk meningkatkan angka penemuan terduga TB 3. Untuk menemukan kasus TB 4. Untuk pengendalian dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) di wilayah kerja UPTD Puskesmas Palupuh. Manfaat : 1. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) di wilayah kerja UPTD Puskesmas Palupuh. 2. Ditemukannya terduga TB 3. Ditemukan kasus positif TB
159.	JAM SENADA (Jamban Sehat Nagari Damai)	Jamban merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Penggunaan jamban tidak hanya nyaman melainkan juga turut melindungi dan meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Jamban sehat merupakan fasilitas sanitasi keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga. Setiap hari manusia membuang kotorannya sehingga jika tidak di tampung dengan baik akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, masalah mengenai pembuangan kotoran manusia juga menjadi meningkat, dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan yang digunakan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Prinsip dari pelaksanaan STBM adalah kegiatan menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dan mengembangkan solidaritas sosial.	Tujuan : 1. Untuk memicu masyarakat guna merubah perilaku higiene dan sanitasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat\ 2. Untuk percepatan peningkatan capaian kepemilikan jamban sehat 3. Untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat 4. Untuk menurunkan angka kejadian diare 5. Untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak BAB sembarangan Manfaat : 1. Meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat 2. Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		Di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuh, untuk mengatasi masalah sanitasi, terutama kepemilikan jamban sehat, maka dilakukanlah suatu upaya dalam bentuk inovasi Puskesmas Palupuh yang diberi nama JAM SENADA (Jamban Sehat Nagari Damai). Diharapkan dengan adanya inovasi ini, keluarga yang berada di nagari Nan Limo Kecamatan Palupuh memiliki jamban sehat.	3. Menurunkan angka kejadian diare 4. Mengubah perilaku masyarakat agar tidak BAB Sembarangan
160.	BARASIAH (BERSAMA AKSI BERGIZI CEGAH SERTA ANEMIA ATAU KURANG DARAH PADA REMAJA)	Di Indonesia terdapat empat masalah gizi remaja yang utama yaitu Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI), dan Kurang Vitamin A (KVA). Anemia gizi merupakan masalah gizi yang paling utama di Indonesia, yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Anemia gizi dapat disebabkan karena kekurangan zat gizi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin yaitu besi, protein, Vitamin C, Piridoksin, Vitamin E. Kurangnya asupan gizi pada remaja putri umumnya kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Kurangnya zat gizi makro dan mikro dapat menyebabkan tubuh menjadi kurus dan berat badan turun drastis, pendek, sakit terus menerus dan anemia. Selain itu Remaja yang melewatkan sarapan tidak dapat mengganti kehilangan energi dan zat gizi pada waktu makan lainnya, sehingga sarapan merupakan waktu makan yang penting bagi remaja untuk memenuhi kebutuhan gizi sehat. Prinsip dasar sarapan adalah memutuskan puasa panjang yang dilakukan saat kita selesai makan malam dalam waktu tidur itu penting sekali bagi remaja untuk membiasakan sarapan makanan yang bergizi. Untuk itu Puskesmas IV Koto melakukan inovasi Barasih agar terjadinya kekurangan masalah gizi.	Tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya sarapan dengan gizi seimbang serta jajanan sehat 2. Meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya sarapan dan membawa bekal ke sekolah. 3. Mengetahui kadar Hb remaja dan membedakan anemia atau tidak 4. Mengetahui akibat anemia atau kurang darah. 5. Mengetahui manfaat minum tablet tambah 6. Mengetahui kadar gula darah dan tekanan darah serta berat badan dan tinggi badan 7. Deteksi dini dan penjangkaran kesehatan 8. Edukasi kesehatan Manfaat : 1. Meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan anemia. 2. Deteksi dini Penyakit Tidak Menular 3. Meningkatkan cakupan pemberian tablet FE di Wilayah Kerja Puskesmas IV Koto 4. Meningkatkan prestasi siswa dalam pendidikan dan memudahkan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Kemandirian mendapatkan informasi kesehatan dari media sosial dan berperan aktif di sosial media dalam upaya upaya kesehatan pada remaja.



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			6. Meningkatkan minat siswa terhadap kesehatan dan kepedulian terhadap teman sebaya.
161	SAGITA GERIGI BERSERI (STATUS GIZI BALITA DENGAN GERAKAN GIGI BERSIH FREE KARIES)	Semakin meningkatnya angka gizi kurang pada keadaan status gizi balita memberikan dampak semakin meningkatnya angka gizi buruk dan stunting pada balita. Sudah berbagai cara dilaksanakan untuk meningkatkan status gizi pada balita, yang diantaranya pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) secara berkelanjutan pada balita, namun belum memberikan peningkatan yang begitu signifikan pada angka status gizi balita. Ini merupakan menjadi permasalahan makro pada keadaan status gizi balita. Setelah dilakukan beberapa pendekatan pada beberapa balita, dengan melakukan pemeriksaan ke rumah balita ditemukan pada tingkat mikro mengangkat permasalahannya berkaitan dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut pada balita mengakibatkan malasnya balita untuk makan. Selain itu, kondisi kesehatan gigi dan mulut berkaitan dengan bagaimana penyerapan makan dan nutrisi pada balita. Dengan adanya masalah pada gigi balita yakni gigi berlubang, gusi bengkak, gigi lepas sebelum usia pergantiannya berdampak terganggunya penyerapan asupan nutrisi balita pada Puskesmas IV Koto.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi, khususnya balita 2. Meningkatkan status gizi pada balita 3. Mengetahui indikator keberhasilan kegiatan inovasi sehingga dapat dilanjutkan dan dikembangkan pada sasaran Manfaat : Tercapainya balita bebas karies, balita, sehat sehingga meningkatnya status gizi pada balita.
162.	SI DINI BERDANSA (Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bersama Bidan Desa)	Keterbatasan pengetahuan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terkadang tidak menyadari pentingnya Deteksi Dini Penyakit Tidak menular atau tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Ini menyebabkan banyak masyarakat di wilayah Puskesmas Koto Alam yang tidak menjalani pemeriksaan Penyakit Tidak Menular secara rutin.	Tujuan : 1. Meningkatkan Akses dan Efektivitas Pelayanan Memberikan layanan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular yang 4 lebih mudah diakses, lengkap, dan efisien, termasuk pemeriksaan rutin menggunakan Alat Tekanan Darah, Alat Periksa Gula Darah, EKG, Asam Urat dan Kolesterol untuk memantau Kesehatan Masyarakat 2. Deteksi Dini Risiko Komplikasi Penyakit Tidak Menular Mengidentifikasi masalah atau komplikasi Penyakit Tidak Menular, seperti

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			Hipertensi, Diabetes Melitus, Jantung, Stroke lebih awal sehingga dapat segera ditangani. 3. Pendekatan Holistik Terpadu Mengintegrasikan berbagai aspek pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (fisik, laboratorium, dan EKG) sekali dalam setahun. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Kesehatan Memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin Penyakit Tidak Menular sekali dalam setahun dan pola hidup sehat. 5. Pemantauan Berkala yang Akurat Membantu tenaga kesehatan dalam mencatat dan memantau perkembangan Kesehatan Masyarakat serta kesehatan Manfaat : 1. Deteksi Dini Risiko individu, kelompok dan Masyarakat 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Pelayanan Lebih Terintegrasi 4. Pemantauan Penyakit Tidak menular yang Lebih Akurat 5. Edukasi dan Pemberdayaan Individu, kelompok dan masyarakat 6. Efisiensi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan 7. Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan individu, kelompok dan masyarakat 8. Mendukung Pengambilan Keputusan Klinis
163.	MARIBAYA CENTING (Mari Bersama Upaya Pencegahan Stunting))	Angka stunting pada Agustus 2023 adalah 10,5%, yang mana angka ini menunjukkan tingginya angka stunting di wilayah kerja puskesmas koto alam. Untuk menekan angka stunting kami membuat suatu program inovasi Maribaya Centing (Mari Bersama Upaya Pencegahan Stunting) telah berupaya meningkatkan	Tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang Stunting 2. Menurunkan angka kejadian stunting.



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		pencegahan terhadap balita agar tidak mengalami stunting. Dalam pelaksanaannya Puskesmas melakukan kerja sama lintas sektor dengan pihak Kecamatan, Nagari, Jorong, dan kader posyandu. Dimana kegiatan yang dilakukan diantaranya pengumpulan data di Posyandu, melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita untuk mendapatkan masalah kesehatan yang dihadapi (status gizi), melakukan penginputan data pengukuran di aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), melakukan Validasi Data Pengukuran, melakukan intervensi dengan pemberian Biskuit PMT dan membentuk bapak asuh di setiap Jorong.	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat membawa bayi dan balita ke Posyandu Manfaat : 1. Manfaat bagi Balita Diharapkan balita stunting meningkat status gizinya dari sangat pendek menjadi pendek atau menjadi normal dan adanya peningkatan berat badan serta perubahan pola makan yang diberikan oleh ibu balita sesuai dengan isi piringku. 2. Manfaat bagi Nagari Dengan meningkatnya status gizi balita stunting menjadikan nagari yang bebas stunting dan akan meningkatkan taraf kehidupan nagari di masa yang akan datang serta meningkatkan indeks kesehatan nagari 3. Manfaat bagi Puskesmas Bagi Puskesmas Koto Alam dengan berjalannya program ini menjadikan wilayah kerja puskesmas Koto Alam bebas dari stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas Koto Alam
164.	SAHISADITUS (SAKU HIPERTENSI DAN SAKU DIBETES MELLITUS)	Hipertensi dan diabetes melitus merupakan penyakit yang saling berkaitan yang mempengaruhi seorang individu menjadi penyakit arteriosklerosis. Prevalensi hipertensi dan diabetes meningkat pada negara-negara industri karena peningkatan populasi. Hipertensi juga berkontribusi untuk diabetes retinopati yang merupakan penyebab utama kebutaan dan juga hipertensi berhubungan dengan 30% kematian pada pasien diabetes melitus. Oleh karena itu hipertensi dan diabetes harus diobati sedini mungkin dan secara agresif Puskesmas Matur di tahun 2022 dimana jumlah Hipertensi sebesar 3.188 penderita dan sedangkan jumlah Diabetes Melilitus 365 penderita.	Tujuan : 1. Terdeteksinya faktor resiko penderita hipertensi dan diabetes 2. Terlaksananya monitoring faktor resiko penderita hipertensi dan diabetes melitus 3. Terlaksananya tindak lanjut dari faktor resiko penderita hipertensi dan diabetes melitus 4. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penderita hipertensi dan diabetes melitus Manfaat :



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
			1. Termonitoringnya penderita hipertensi dan diabetes mellitus 2. Terlaksananya tindak lanjut dari faktor resiko hipertensi dan diabetes mellitus
165.	LABU BESTI (KELAS IBU BEBAS STUNTING)	Pelayanan kesehatan merupakan ranah yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang sedang trend pada saat ini. Globalisasi telah mengubah cara hidup orang banyak, menentukan suka, duka, selera, dan pilihan-pilihan orang dimanapun, akan terjadi persaingan yang bebas, tidak mengenal belas kasihan, dan persaingan yang kejam yang akan melibas dan meninggalkan yang lemah apabila tidak siap menghadapinya. Hal ini membuat banyak organisasi termasuk pelayanan kesehatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanannya. Pelayanan inovatif yang menguntungkan masyarakat sebagai pengguna jasa akan lebih diminati masyarakat. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi under nutrisi pada balita. Masalah stunting merupakan permasalahan gizi yang dihadapi dunia khususnya negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi tidak cukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Masyarakat belum menyadari stunting sebagai suatu masalah dibandingkan dengan permasalahan kurang gizi lainnya yang ada pada Puskesmas Matur.	Tujuan : Untuk menurunkan prevalensi Stunting. Manfaat : 1. Meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan balita 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi yang baik. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik pemberian makanan. 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
166.	PATAR BETE (Padang Tarok Berantas TBC	Berdasarkan data capaian program TB masih rendahnya penemuan kasus TB di Puskesmas Padang Tarok.	Tujuan : Untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengobatan TB sesuai standar yang mana program ini merupakan indikator mutu nasional Manfaat : Semua pasien TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
167.	Jaring Bunting (Penjaringan Calon Pengantin dan ibu hamil untuk Pencegahan Stunting)	Melihat banyaknya permasalahan Makro yang bisa menyebabkan stunting pada Balita seperti Faktor gizi buruk, Lingkungan dan Sanitasi yang buruk, Kesehatan ibu yang kurang, Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, Faktor sosial ekonomi, Belum efektifnya program-program pencegahan stunting, Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi. Oleh karena itu Puskesmas Padang Tarok perlu metode Pembaharuan atau upaya yang akan dilakukan untuk penurunan dan pencegahan stunting yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penjaringan pada calon pengantin yang bekerja sama dengan kader dan bidan desa kemudian memberikan konseling dan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin, mengoptimalkan asupan gizi ibu selama kehamilan seperti pemberian PMT ibu hamil, pengaktifan kelas ibu hamil seperti mengadakan kegiatan demo masak bergizi dan berimbang, pendampingan ASI eksklusif dan PMBA, Membuat Grup WA Jaring Bunting.	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas hidup anak Balita. 2. Menurunkan prevalensi stunting 3. Memprioritaskan kualitas penyiapan kehidupan keluarga. 4. Memantau kesehatan dan kecukupan gizi bagi anak balita 5. Memberikan edukasi pencegahan stunting di mulai dari catin. Manfaat : Terjaringnya catin dengan BB kurang dan Anemia Tercapainya target K1 pada ibu hamil. Terjaringnya ibu hamil KEK dan Anemia. Menekan angka kematian ibu hamil. Penurunan angka BBLR . Menurunnya angka Stunting. Menurunnya angka kesakitan balita Meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga kualitas hidup bangsa menjadi meningkat.
168.	KOMIK ZIGIWA (Konseling Ibu Hamil Kolaborasi Gizi, Gigi dan Jiwa)	Konseling kesehatan bagi ibu hamil merupakan upaya menjaga kesejahteraan ibu dan janin. Namun dalam pelaksanaannya ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, terutama dalam kolaborasi antara aspek gizi, kesehatan gigi,	Tujuan : Memberikan pelayanan kesehatan terpadu sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengan sehat

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		dan kesehatan jiwa ibu hamil diwilayah Puskesmas Manggopoh. Beberapa masalah utama yang sering muncul dalam konseling ibu hamil yang melibatkan kolaborasi gizi, gigi, dan jiwa antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari ibu hamil, kurangnya tenaga kesehatan terlatih yang dapat memberikan konseling holistik, keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang terintegrasi, kurangnya kolaborasi antar tenaga kesehatan. Melalui inovasi ini, ibu hamil diberikan panduan yang lebih personal dan berbasis data medis terkini mengenai asupan gizi yang optimal untuk mendukung perkembangan janin dan menjaga kesehatan ibu. Salah satu kebaruaran dalam konseling gizi, gigi dan kesehatan jiwa. Pada konseling gizi dilakukan dengan penggunaan aplikasi atau alat berbasis teknologi untuk memantau status gizi ibu hamil. Aplikasi ini dapat mengingatkan ibu tentang konsumsi makanan bergizi, pengukuran berat badan, dan pemantauan kadar gula darah, serta memberikan rekomendasi diet yang tepat.	dan optimal, baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga berdampak positif pada kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Manfaat : 1. Meningkatkan Status Gizi Ibu dan Janin 2. Mengurangi Risiko Komplikasi Kehamilan 3. Meningkatkan Kualitas Hidup Ibu Hamil 4. Mencegah Masalah Gigi dan Gusi 5. Mencegah Komplikasi Kesehatan
169.	GAPURA TB (Gerakan Jemput orang terduga TB)	Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya cakupan penemuan jumlah terduga TBC adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TBC, serta kurangnya peran masyarakat dalam penemuan kasus aktif TBC, masyarakat banyak yang merasa takut untuk melakukan pemeriksaan TBC ke puskesmas manggopoh, serta adanya stigma negatif dimasyarakat tentang penyakit TBC. Pada tahun 2023 penemuan kasus terduga TBC hanya dilakukan oleh petugas program dan lebih banyak dilakukan di Puskesmas. Terduga yang ditemukan di puskesmas saat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan sputum dan diberikan pot untuk menampung sputum untuk diantarkan keesokan harinya, kebanyakan terduga tidak kembali untuk mengantarkan sputum nya ke puskesmas, sehingga cakupan penemuan kasus terduga masih jauh dari target. Karena banyaknya terduga yang tidak mengantarkan sputum kembali ke puskesmas, melalui inovasi GAPURA TB (Gerakan jemput orang terduga TB). Hal ini dilakukan dengan petugas langsung turun ke lapangan melakukan penjangkaran suspek melalui kegiatan PTM, Posyandu lansia. Terduga TBC yang ditemukan langsung dianjurkan untuk melakukan pengambilan sputum di hari yang sama dan akan dibawa langsung oleh petugas kembali ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan.	Tujuan : Meningkatnya capaian terduga TBC, mencegah penularan penyakit TBC, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera periksa ke puskesmas bila terdapat gejala TBC, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mempercepat penemuan dan mengurangi keterlambatan pengobatan Manfaat : Tercapainya cakupan penemuan terduga dan kasus TBC Paru, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan jika memenuhi syarat sebagai terduga TBC.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
170.	KAPSUL PENAMBAT (Kelas Plus Calon Ibu dan Bayi Sehat)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena Masih ada beberapa ibu hamil yang terlambat melakukan pemeriksaan Triple Eliminasi sehingga diharapkan dengan adanya WA Kapsul Penambat bisa menjaring ibu hamil untuk segera melakukan pemeriksaan Triple Eliminasi di Puskesmas Malalak dan masih perlunya Masih perlunya peningkatan Layanan ANC terintegrasi dengan layanan lain, seperti layanan gizi, imunisasi, atau pelayanan kesehatan anak, yang juga berperan penting dalam kesehatan ibu hamil dan bayi untuk meningkatkan kesehatan anak secara efektif. Dengan adanya inovasi ini maka dapat menjaring semua ibu hamil terkhusus yang memiliki media sosial WA untuk tergabung di WA Kapsul Penambat dan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan ibu hamil dalam menjalankan kehamilannya, sehingga menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan calon bayi	Tujuan : 1. Meningkatkan Akses dan Efektivitas Pelayanan 2. Deteksi Dini Risiko Kehamilan 3. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Kesehatan 4. Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) 5. Pemantauan Berkala yang Akurat Manfaat : 1. Deteksi Dini Risiko Kehamilan 2. Pelayanan Lebih Terintegrasi 3. Pemantauan Kehamilan yang Lebih Akurat 4. Edukasi dan Pemberdayaan Ibu Hamil 5. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) 6. Efisiensi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan 7. Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Pasien 8. Mendukung Pengambilan Keputusan Klinis
171.	KERUPUK JANGEK (Kenali Resiko dan Upaya Kesehatan Jangan Enggan Cek Kesehatan)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Untuk itu Puskesmas Magek melakukan upaya untuk melakukan skrining dan mendeteksi dini, monitoring dan tindak lanjut faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan dengan melakukan inovasi Kerupuk Jangek. Kegiatan inovasi ini dilakukan dengan melakukan skrining PTM ke jorong dengan sistem door to door. Dalam pelaksanaannya sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan akan diberikan edukasi tentang penyakit tidak menular.	Tujuan : 1. Sebagai upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular. 2. Meningkatkan angka skrining usia produktif 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya skrining Manfaat : Meningkatkan angka skrining usia produktif melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
172.	CATIN MESRA (Cegah Anak Stunting Masa Depan Sejahtera)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena meningkatnya angka kejadian stunting di Puskesmas Magek. Adapun upaya yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pembekalan kepada calon pengantin tentang pencegahan dan penurunan angka kejadian stunting. Untuk itu Puskesmas Magek melakukan inovasi Catin Mesra. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan dan pembekalan materi dengan calon pengantin.	Tujuan : Meningkatkan pengetahuan Catin tentang stunting, pencegahan dan penanggulangan stunting terhadap anak balita. Manfaat : Menurunkan angka kejadian stunting melalui peningkatan pengetahuan ibu tentang program pencegahan dan penurunan stunting.
173.	RAPORTIM (Rapor Penyakit Tidak Menular)	Inovasi ini dilatarbelakangi meningkatnya perubahan pola hidup, pola makan yang tidak sehat sehingga meningkatnya angka penyakit tidak menular. Sementara data yang akurat dan lengkap tidak tersedia dimana pelaporan kasus PTM sering terlambat sehingga kurangnya monitoring secara berkelanjutan dalam identifikasi peningkatan kasus atau tren baru PTM di suatu wilayah. Untuk itu Puskesmas Lubuk Basung melakukan inovasi Raportim. Dengan adanya Raportim, data mengenai PTM dapat diintegrasikan dalam satu platform yang dapat diakses dengan pihak berwenang. Dengan sistem digital ini pengumpulan data dan analisis data secara lebih cepat dan akurat.	Tujuan : 1. Mengoptimalkan sistem pemantauan PTM 2. Meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan 3. Mendukung upaya pencegahan dan pengendalian PTM Manfaat : 1. Sebagai panduan dalam memberikan layanan berbasis data. 2. Membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
174.	MERINDU SIDIA (Melaksanakan pemeriksaan terpadu hipertensi dan Diabetes Melitus)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya capaian penderita hipertensi dan diabetes yang terkontrol di wilayah kerja Puskesmas Baso. Selain itu rendahnya kesadaran penderita hipertensi dan diabetes untuk kontrol rutin. Adapun upaya yang dilakukan adalah pelayanan deteksi dini penyakit tidak menular yang dilaksanakan melalui pemeriksaan terpadu melalui inovasi Merindu Sidia. Dengan inovasi ini dilakukan deteksi dini penyakit tidak menular dan dilakukan pencatatan dikartu kontrol	Tujuan : Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor agar penderita hipertensi dan diabetes dapat terkontrol Manfaat : 1. Penderita hipertensi dan diabetes terkontrol setiap bulannya 2. Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
175.	LAMBANG BAHAGIA (Layanan Stimulasi Tumbuh Kembang, Bersama bersinergi Hebat dengan Ibu Ayah)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena adanya tingginya resiko gangguan tumbuh kembang anak. Dimana dengan program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dapat meningkatkan perkembangan anak usia 4-24 bulan. Puskesmas Biaro melakukan inovasi Lambang Bahagia dengan mendampingi upaya SDIDTK melalui penguatan stimulasi dengan pelayanan edukasi pijat bayi, dimana SDIDTK merupakan salah satu intervensi spesifik untuk mempercepat penurunan stunting sehingga sebahagian data SDIDTK dapat diakses melalui aplikasi E PPGBM.	Tujuan : 1. Meningkatkan cakupan layanan stimulasi tumbuh kembang pada balita. 2. Meningkatkan pemahaman pentingnya pendampingan proses tumbuh kembang anak 3. Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor. Manfaat : 1. Meningkatkan cakupan SDIDTK balita dan Anak prasekolah 2. Meningkatkan kepedulian orang tua dalam mendampingi dan memantau tumbuh kembang anak
176.	MENTARI SENJA (Menjalani Masa Tua Sehat dan Juga Bahagia)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena meningkatnya angka penyakit tidak menular dan penyakit menular pada lansia, ketergantungan konsumsi obat-obatan pada pasien lansia dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif yang diberikan pada lansia. Puskesmas Biaro membuat inovasi Mentari Senja untuk memberikan pelayanan kesehatan terpadu yang menyediakan layanan dalam satu tempat dan pemberian layanan prioritas pada lansia yang berisiko tinggi serta pemanfaatan WAG untuk pemantauan dan mempermudah layanan lansia yang berisiko tinggi.	Tujuan : 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan edukasi pola hidup sehat. 2. Memudahkan pasien lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan 3. Mengurangi angka penyakit tidak menular dimasyarakat Manfaat : 1. Membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatannya 2. Pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi lebih berkualitas
177.	PESAN SIMANIS (Puskesmas Bawan Siap Antar Jemput Peserta Polaris)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya partisipasi kunjungan peserta polaris. Untuk itu Puskesmas Bawan melakukan inovasi Pesan Semanis dengan kegiatan setiap peserta polaris akan dijemput antar ke lokasi yang telah ditentukan. Inovasi ini mempermudah akses peserta ke puskesmas. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan peserta prolanis yang sudah terdiagnosa penyakit	Tujuan : 1. Mendorong peserta prolanis penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Manfaat :

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
		kronis. Peserta yang mengikuti prolanis mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang terfokus pada pencegahan komplikasi dan pengobatan penyakit yang lebih baik.	1. Peningkatan kualitas hidup 2. Penurunan resiko komplikasi dan kecacatan
178.	KETIK DBD (Keluarga Bebas Jentik, Cegah penyakit DBD)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya ditemukan kasus DBD diwilayah Puskesmas Sei Pua. Hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan jentik nyamuk disekitaran rumah dan sanitasi yang kurang baik. Upaya yang dilakukan sebelumnya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit DBD. Setelah itu muncul ide inovasi KETIK DBD dengan melakukan pembaharuan dengan membuat google form dalam bentuk barkot yang ditempel dirumah warga agar masyarakat mau secara sadar melaporkan kegiatan pemeriksaan jentik setiap minggunya.	Tujuan : Untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian penyakit DBD Manfaat : Mencegah penyebab penularan penyakit DBD.
179.	GIRING HATIMU (Gerai Skrining Kesehatan Penyakit Tidak Menular)	Masih banyaknya masyarakat yang ditemukan menderita penyakit tidak menular secara tiba-tiba karena tidak pernah memeriksakan kesehatan secara rutin maka Puskesmas Sei Pua menciptakan inovasi Giring Hatimu dengan melakukan skrining dengan membuka gerai kesehatan dilingkungan masyarakat sehingga masyarakat mau datang untuk memeriksakan kesehatannya.	Tujuan : Untuk mencegah dan mengetahui angka kejadian penyakit tidak menular dimasyarakat. Manfaat : Melakukan tindakan pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular
180.	PUSPA CANDU NGEMIL (Puskesmas Palembayan dengan ANC terpadu dan USG ibu hamil)	Inovasi ini dilatarbelakangi karena terdapatnya jarak tempuh yang jauh bagi ibu hamil untuk mengakses Puskesmas Palembayan dalam pemeriksaan ANC secara teratur serta kurangnya pengetahuan masyarakat. Untuk itu muncul inovasi Puspa Candu Ngemil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan ibu hamil dengan memanfaatkan telemedicine dan konsultasi daring. Dengan adanya inovasi ini dapat memantau kesehatan ibu hamil dan bayi secara komprehensif dengan melakukan pemberdayaan dan dukungan komunitas sehingga diharapkan kualitas pelayanan dapat meningkat, mempercepat deteksi dini komplikasi.	Tujuan : 1. Meningkatkan akses dan efektivitas pelayanan 2. Deteksi dini resiko kehamilan 3. Meningkatkan kesadaran dan edukasi kesehatan Manfaat : 1. Edukasi dan pemberdayaan ibu hamil 2. Efisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan 3. Pelayanan lebih terintegrasi
181.	PENSI URAI TEK AMEH (Pemeriksaan Deteksi Dini	Inovasi ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya capaian skrining usia produktif di setiap jorong karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan	Tujuan :



No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Tujuan Manfaat
	Usia Produktif dan Lansia (Metode Rumah ke rumah)	skrining kesehatan masih rendah. Untuk itu muncul ide inovasi Puskesmas Maninjau Pensi Urai Tek Ameh dimana kegiatan ini dengan melakukan skrining usia produktif dari rumah ke rumah.	1. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan skrining kesehatan Manfaat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam dokumen RPJMD Agam Tahun 2021-2026 termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Target indikator kinerja daerah ditetapkan secara terukur untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026. Selengkapnya target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Agam Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel VI.1 :

Tabel. VI.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target	Keterangan
			2026	
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”				
I	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	14,13	21,74	
1	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	68,64	70,59	
2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	62,55	64,86	
3	Indeks Keamanan	96,7	91,62	
Misi II Pemerintahan : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
	Indeks Reformasi Biriokrasi	75,84	81 (A)	
1	Maturitas SPIP	3,152	3,168	
2	Nilai SAKIP	B(67,11)	70,11 (BB)	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		79	

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target	Keterangan
			2026	
		Na		
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,67	
5	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,590	
Misi III SDM: Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing				
	IPM	75,08	76,10	
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,23	9,88	
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	14,48	
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,39	74,65	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Na	0,30	
5	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	Na	44,36	
Misi IV Ekonomi : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan				
	Laju pertumbuhan ekonomi	4,12	4,70	
	IDSD	3,62	3,65	
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	26,26	28,16	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,33	10,36	
3	Rasio Kewirausahaan	NA	4,09	
4	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,89	1,00	
5	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)		0,93	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,71	30,5	
Misi V : Infrastruktur dan Lingkungan : Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana				
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	205,29	195,95	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	77	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)	0,60	
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Na	43	
	RT dengan Akses Sanitasi Aman	na	16,37	
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	na	19,25	
	Jalan dalam kondisi mantab	58	62	

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target	Keterangan
			2026	
	Indeks Konvektivitas Wilayah	Na	69,25	
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Na	75,06	
Misi VI. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat				
	Indeks Desa	Na	8.916	
1	Persentase Desa Mandiri	32,61	8.92%	

6.2. Indikator Kinerja Kunci

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci.

kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Agam tersebut secara rinci disajikan pada tabel VI.2.

Tabel VI.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2024	Target		Keterangan
			2025	2026	
A	Indikator Kinerja Makro				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,12	4,89	5,68	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,74	3,98	3,54	Proyeksi Provinsi
3.	Indeks Gini Rasio	0,249	0,253	0,247	Proyeksi Provinsi
4.	Persentase Penduduk Miskin	6,83	6,15	6,43	Proyeksi Provinsi
5.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,73	4,88	4,47	Proyeksi Provinsi

6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,08	75,75	76,10	Proyeksi Provinsi
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	14,48	Proyeksi Provinsi
8.	Rata-Rata lama sekolah	9,23	9,75	9,88	Proyeksi Provinsi
9.	Angka Harapan Hidup	74,39	74,51	74,652	Proyeksi Provinsi
B	Indikator per Aspek				
	Aspek Geografi dan Demografi				
1	Konsumsi listrik per kapita	Na	452	500	
2	Indeks Ketahanan Pangan	86,92	86,93	86,95	
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Na	9,4	9,00	
4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Na	0,04	0,06	
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Na	18,00	19,25	
6	Indeks tutupan lahan	Na	69,65	69,65	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,74	76,87	77	
8	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	na	15,23	16,37	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Na	19	25	
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	205,29	196	195,95	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Tingkat Kemiskinan	6,83	6,15	6,43	
2	PDRB Per kapita	Na	49,11 juta	55 Juta	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka,	4,73	4,88	4,47	
4	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Na	88,52 juta	90 Juta	
5	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun	74,39	74,51	74,652	
6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%),	Na	92,57	97,00	
7	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	NA	Literasi : 84,09;	Literasi : 84,095;	
8	persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Na	Numerasi : 70,45	Numerasi : 70,5	
9	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Na	76,8	77	
10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Na	92,6	93	
11	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Na	9,3	10,5	
12	Indeks Pembangunan Keluarga	Na	69,53 69,54	70	

13	Indeks Ketimpangan Gender	Na	0,23-0,22	0,30	
14	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Na	66,15	66,25	
	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%),	10,33		10,36	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%),	0,89		1,00	
3	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang),	17.287	14.471	17.553	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif,	Na		0,93	
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	Na	11,6	12	
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah(%),	Na	3,17	14	
7	Rasio kewirausahaan (%),	Na	3,89	4,09	
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Na	1,34	1,36	
9	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Na	1,11	1,12	
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Na	36,66	40	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%),.	Na	59,1	62	
12	Indeks Inovasi Daerah	45,2	46,3	46,7	
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian kehutanan dan perikanan	26,26	28	28,16	
14	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang,	Na	88,52 juta	90 Juta	
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Na	50,5	53,6	
16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang,kebutuhan pokok,	27,41	37,68	13,20	
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,71	30,1	30,5	
18	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian,layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	Na	73,75	75,06	
19	Indeks Desa	Na	8,7	8.92%	
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%),	Na	0,17	0,20	
21	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	Na	9,04	14	
22	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)	Na	1.189.437	1.200.00	
23	Total Kredit/PDRB (%)	Na	3,78	3,9	
24	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	Na	1,25	1,3	
C.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah				
I.	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.	Urusan Pendidikan				
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,16	14,39	14,48	Proyeksi Provinsi
1.2	Rata-rata lama sekolah	9,23	9,75	9,88	Proyeksi Provinsi
1.3	APK PAUD	60,05	83,75	84,25	RPJMD

1.4	APK SD	97,19	100	100	RPJMD
1.5	APK SMP	101,56	102,69	102,00	Target menyesuaikan dengan capaian
1.6	APM SD	88,38	92	92,50	RPJMD
1.7	APM SMP	78,52	84,17	82,60	RPJMD
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,02	0,01	0,01	RPJMD
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,05	0,01	0,01	RPJMD
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77,23	78,08	78,70	Target menyesuaikan dengan capaian
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	80,00	100	100	RPJMD
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,30	94,7	95,90	RPJMD
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	85,29	89,81	90,21	RPJMD
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	99,60	100	100	RPJMD
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100,00	100	100	RPJMD
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	99,53	100	100	RPJMD
1.17	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	NA	Literasi : 84,09; Numerasi : 70,45	Literasi : 84,095; Numerasi : 70,5	
1.18	Literasi Membaca	Na	84,1	84,12	
1.19	Numerasi	Na	70,5	70,7	
1.20	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	15,93	92	95	
1.21	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,22	50	55	RPJMD
1.22	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,20	60	65	RPJMD
1.23	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	45	50	RPJMD
1.24	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	3,08	60	65	

1.25	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa Inggris	10,00	30	35	RPJMD
1.26	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa Inggris	18,00	35	40	RPJMD
1.27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Na	13,91	13,98	
2.	Urusan Kesehatan				
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	172,08	97,08	83,2	RPJMD
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	10,00	12,5	14,3%	RPJMD
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	93,56	100	95	RPJMD
2.4	Menurunnya ratio kematian bayi	12,60	8,9	8,7	RPJMD
2.5	Persentase balita stunting	(20,1% Survei SKI), (7,01% ePPGBM)	10,7	10,1	RPJMD
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,13	3,48	4,00	Target menyesuaikan dengan capaian
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	25,20	53	55	RPJMD
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,026	0,102	0,02	Target menyesuaikan dengan capaian
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	155,00	216	231	RPJMD
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	92,00	91,26	93,00	Target menyesuaikan dengan capaian
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	83,50	75	90%	RPJMD
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	36,00	75	90%	RPJMD
2.13	Cakupan Posbindu aktif	100 %	72	100 %	Target menyesuaikan dengan capaian
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelan	23,00	23	23	RPJMD
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23,00	23	23	RPJMD
2.16	Persentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	72,25	72	75	RPJMD
2.17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100,00	100	100	RPJMD
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100,00	100	100	RPJMD

2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	42,25	80,46	56,5	RPJMD
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	70,00	92	80%	RPJMD
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,10	8,1	8%	RPJMD
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100,00	100	100%	Target menyesuaikan dengan capaian
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	50,00	100	60%	Target menyesuaikan dengan capaian
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	82 %	87	89%	RPJMD
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	93,56	100	100	RPJMD
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,59	100	100	RPJMD
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	93,67	100	100	RPJMD
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	73,79	100	100	RPJMD
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	97,83	100	100	RPJMD
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	89,43	100	100	RPJMD
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	73,71	100	100	RPJMD
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,90	100	100	RPJMD
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	90,86	100	100	RPJMD
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100,00	100	100	RPJMD
2.34	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Na	91,00	91,00	RPJMD
2.35	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	Na	92,57	97,00	
2.36	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	93,00	100	100	RPJMD
2.37	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100	100	RPJMD
2.38	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	185,00	205 tempat tidur	197tempat tidur	RPJMD
2.39	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	85,00	92 (100%)	92(100%)	RPJMD
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	51,74	91,2	92,9	RPJMD
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	68,98	86	88	RPJMD

3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	88,51	100	100	RPJMD
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,50	85	87	RPJMD
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,60	41,6	40,80	Target menyesuaikan dengan capaian
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	54,25	64,05	68,19	RPJMD
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	96,48	98,65	98,7	RPJMD
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00	0,27	0,2	RPJMD
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	33,33	95	100	RPJMD
3.11.	Persentase Bangunan yang tertata	82,75	98	100	RPJMD
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	26,18	100	100	RPJMD
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	1,34	1,67	1,01	RPJMD
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	3,63	0,11	0,08	RPJMD
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55,01	65	70	RPJMD
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100%	RPJMD
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100	100%	RPJMD
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	96	100%	Target menyesuaikan dengan capaian
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	85%	49	87%	Target menyesuaikan dengan capaian
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31%	50	56%	RPJMD
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	38%	89,08	98,70	RPJMD
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100	100%	RPJMD
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100	100%	Target menyesuaikan dengan capaian
6.	Urusan Sosial				

6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10	10	10	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1	3	3	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.779	21.371	20.912	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar				
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan				
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69	76,58	76,63	RPJMD
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,27	95,71	95,84	RPJMD
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1565	1.571	1,623	RPJMD
7.4	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Na	92,6	93	
7.5.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Na	36,66	38	
7.6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Na	59,1	62	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
8.1.	IDG	63,63	70,06	71,46	RPJMD
8.2.	Kecamatan Layak Anak	n.a	6	8	RPJMD
8.3.	Nagari Layak Anak	n.a	27	35	RPJMD
9	Urusan Pangan				
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	85	86	RPJMD
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	18,58	15	18,78	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
9.3	Ketersediaan pangan utama	79694	100	100	RPJMD
10	Urusan Pertanahan				
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	37,45	1	6	RPJMD
10.2	Jumlah bidang tanah yang diretribusi	87	1000	1000	RPJMD
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	RPJMD
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	50	100	100	RPJMD
11.	Urusan Lingkungan Hidup				
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100,00	100	100	RPJMD
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0,00	3	3	RPJMD

11.3.	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	100,00	100	100	RPJMD
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100,00	100	100	RPJMD
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100,00	100	100	RPJMD
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41	78	84	RPJMD
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100,00	100	100	RPJMD
11.9.	Persentase pengelolaan persampahan.	46,29	65	100	RPJMD
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	62,50	58	63	Target menyesuaikan dengan capaian
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,37	97,16	97,59	Target menyesuaikan dengan capaian
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,63	76,27	79,23	RPJMD
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	RPJMD
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	65,53	100	100	RPJMD
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	62,93	100	100	RPJMD
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	62.878.107 .651	28,46 milyar	65.000	Target menyesuaikan dengan capaian
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	195 Sistem	217	246	RPJMD
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	28 Unit	25	30	RPJMD
14,4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	100	100	RPJMD
15.	Urusan Perhubungan				
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	348.765	610.556	610,956	RPJMD
15.2	Rasio ijin trayek	0,09	0,155	0,155	RPJMD

15.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	4570	4.870	4,955	RPJMD
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	1,87	0,15	1,29	RPJMD
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika				
	Indeks masyarakat digital indonesia	Na	50,5	53,6	
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100,00	32,5 100	35%,100%	RPJMD
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10,00	10	10	RPJMD
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	131,00	10	10	RPJMD
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100,00	100	100	Target menyesuaikan dengan capaian
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100,00	100	100	Target menyesuaikan dengan capaian
17	Urusan Koperasi dan UMKM				
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	69,13	69,4	71,00	RPJMD
17.2	Persentase BPR/LKM aktif	n.a	67,52	69,22	RPJMD
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n.a	10,4	14,4	RPJMD
17.4	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Na	11,6	12	
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Na	1,34	1,70	
18	Urusan Penanaman Modal				
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	13	18	RPJMD
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	0	414	750	RPJMD
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Na	9,04	14	
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Na	1.189.43 7	1.200.00	
	Total Kredit/PDRB	Na	3,78	3,9	
	Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)	Na	1,25	1,3	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	49,75	85	90	RPJMD
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	7,85	70	75	RPJMD

19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	88,00	180	90	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
9.4.	Persentase wirausahawan muda	52,17 (9.104)	0,75	0,80	
20	Urusan Statistik				
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	evaluasi= 83% perencanaan = 86%	100	100	RPJMD
21.	Urusan Persandian				
21.1	Indeks keamanan informasi	33.8	30	35	RPJMD
22.	Urusan Kebudayaan				
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100,00	100	100	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52,00	65	70	
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	26381	20.500	26500	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	10,00	13	15	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	90,00	85	90	Target menyesuaikan dengan capaian RPJMD
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	1,00	1,5	1,70	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	80,00	72	85	Target menyesuaikan dengan capaian
23.	Urusan Perpustakaan				
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	81,72	63	82,12	Target menyesuaikan dengan capaian
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,92	70,66	73,51	Target menyesuaikan dengan capaian
24	Urusan Kearsipan				
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	57	57,25	57,5	Target menyesuaikan dengan capaian
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	13,63	7,04	14,00	Target menyesuaikan dengan capaian

24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	68,33	65,33	70	Target menyesuaikan dengan capaian
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	51,01 (CC)	Baik (61)	baik (63)	
III	Layanan Urusan Pilihan				
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,61	4,93	4,90	RPJMD
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.140	8.170	8180	RPJMD
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	33409	30.750	33510	Target menyesuaikan dengan capaian
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	133,66	200	210	RPJMD
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	*tunggu rilis BPS dan KKP namun AKI Sementara masih menggunakan rilis BPS Tahun 2023 yaitu 43.43	46	47	RPJMD
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	37	100	43	RPJMD
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8140	8.170	8180	RPJMD
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	715	755	765	RPJMD
2.	Urusan Pariwisata				
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 hari	2 hari	2 Hari	RPJMD
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 242147500	1	1,2	RPJMD
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	913.330	1.135.159	15 %(1.305.432)	RPJMD
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	17.287	14.471	17.553	Target menyesuaikan dengan capaian
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536.000	550.000	550.000	Target menyesuaikan dengan capaian
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88	90	90	Target menyesuaikan dengan capaian
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	9,5 M	12,34	10	RPJMD

2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	44 orang	56	45	Target menyesuaikan dengan capaian
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	82 produk	90	100	RPJMD
	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	Na	1369	1450	
3.	Urusan Pertanian				
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	1,55	7,51	7,53	RPJMD
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	1,55	4,6	4,61	RPJMD
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	1,55	2,70	2,47	RPJMD
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	1,55	9,77	9,81	RPJMD
3.5	Produksi sektor pertanian				
	- Padi	347.739	438.226	440,339	RPJMD
	- Jagung	100.163	131.673	134,995	RPJMD
	- Cabe merah	35.941	36.575	37,215	RPJMD
	- Bawang merah	5.065	7.620	7,773	RPJMD
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)				
	- Sapi	1.946	2000	1,980	Target menyesuaikan dengan capaian
	- Kerbau	33.08	44	34	Target menyesuaikan dengan capaian
	- Kambing	66,12	55	67	Target menyesuaikan dengan capaian
	- Unggas	19.436	18.776	19,800	Target menyesuaikan dengan capaian
3.7	Produksi sektor perkebunan				
	- Kopi	1668	1.743	1,831	RPJMD
	- tebu	2978	3.100	3,069	RPJMD
	- kulit manis	31227	31.472	31,723	RPJMD
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar				
	- Padi	5,02	5,85	5,86	RPJMD
	- Jagung	7,23	7,88	7,89	RPJMD
3.9	Nilai Tukar Petani	-	104,3	103,4	RPJMD
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	78	80	85	RPJMD

3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)				
	- Padi (%)	0,20	0,22	0,23	RPJMD
	- Jagung (%)	0,00	0,18	0,19	RPJMD
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)				
	- cabe	17,43	12,06	17,58	Target menyesuaikan dengan capaian
	- bawang merah	8,75	9,58	9,60	RPJMD
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan				
	- Kopi	1,01	21	22	RPJMD
	- tebu	1,03	14	16	RPJMD
	- kulit manis	1,01	2,9	3	RPJMD
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	8,72	11,15	11,65	RPJMD
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90,00	94	95	RPJMD
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	4,53	20,68	21,51	RPJMD
4.	Urusan Perdagangan				
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,76	22	22%	RPJMD
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100	RPJMD
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	80	100	100	RPJMD
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	27,41	37,68	13,20	RPJMD
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Na	9,33	10	
5.	Urusan Perindustrian				
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	1,75	2,25	2,15	RPJMD
	Proporsi jumlah IKM	Na	3,17	3,19	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,33	11,53	10,50	RPJMD
5.3	Pertumbuhan industri	1,75	2,21	2,10	Target menyesuaikan dengan capaian
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11	12	12	Target menyesuaikan dengan capaian
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	31076	31.280	31105	Target menyesuaikan dengan capaian
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	9,45	2,0	9,50	Target menyesuaikan dengan capaian

IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
4.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	RPJMD
4.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupaten	n.a	100	100	RPJMD
4.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100	83	100	Target menyesuaikan dengan capaian
4.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik		90	80	RPJMD
4.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n.a	85	90	RPJMD
4.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	RPJMD
	Indeks Reformasi Hukum	Na	80	82	
V	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan				
5.1.	Perencanaan				
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	87,59	100	100	RPJMD
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	72,58	100	100	RPJMD
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	88,89	100	90	RPJMD
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00	100	100	RPJMD
5.2.	Kuangan				
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	0,19	5,2	5,00	RPJMD
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,54	0	0	RPJMD
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90,00	98	98	RPJMD
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,78	13,1	14,10	RPJMD
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	RPJMD
5.2.6	Manajemen Aset	baik	Baik	baik	RPJMD
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	19,20	0,38	0,40	RPJMD
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Na	0,17	0,20	
	ROA BUMD				
5.3.	Kepegawaian				
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	255	0,35	289	RPJMD
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27	0,75	0,65	RPJMD
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40	3,7	0,1	RPJMD

5.4.	Penelitian dan Pengembangan				
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	95	80	100	RPJMD
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100	RPJMD
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	89	61	terinovatif	RPJMD
	Indek Inovasi Daerah	45,2	46,3	46,7	
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,152)	Level 3 (3,9) (terdefinisi)	Level 4(4,0)(terdefinisi)	RPJMD
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (terdefinisi)	Level 3 (3,01) (infrastruktur)	Level 3(3,2)(infrastruktur)	RPJMD
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	20pd	4	5	RPJMD
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	n.a	85	3,90	RPJMD
	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	Na	79	80	
VII	Unsur Kewilayahan				
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan		87,00	87,50	RPJMD
VIII	Unsur Pemerintahan Umum				
8.1.	Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.	100	100	100	Target menyesuaikan dengan capaian
	Persentase potensi ATHG/Konflik sosial yang dapat diatasi	Na	100	100	
	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	Na	70	72	
IX.	Transparansi dan Partisipasi Publik				
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	100	100	100	RPJMD
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	20	100	100	RPJMD

Keterangan

n/a = data atau nilai tidak tersedia

INDIKATOR PER ASPEK

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memegang peranan strategis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021–2026. RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah ini menjadi dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan membentuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

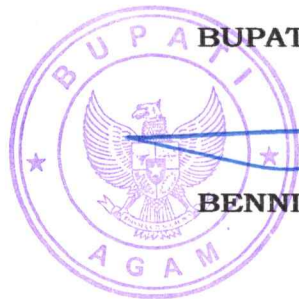
Keberhasilan implementasi RKPD Tahun 2026 sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, integritas, ketaatan, dan disiplin seluruh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, serta dukungan aktif dari masyarakat, pelaku dunia usaha, dan institusi pendidikan. Dalam kerangka kolaboratif tersebut, seluruh elemen pembangunan termasuk lembaga pemerintahan, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta dunia akademik perlu mengembangkan semangat sinergi untuk menyukseskan pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan terkini, serta dalam memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk penjaminan terhadap kualitas pelaksanaan RKPD, Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan kaidah pelaksanaan pembangunan daerah yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Kaidah-kaidah ini diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi capaian.

Selain itu, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara sistematis dan terukur. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tetap berada dalam koridor perencanaan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sementara evaluasi difokuskan untuk menilai efektivitas capaian pembangunan dan sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan capaian kinerja, forum konsultasi publik, dan penilaian indikator pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan masukan yang komprehensif dan relevan untuk perbaikan kebijakan dan program selanjutnya.

Dalam hal terjadi dinamika pembangunan atau perubahan kondisi strategis, hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi penyesuaian atau perubahan RKPD Tahun 2026 secara formal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Agam memastikan bahwa pelaksanaan RKPD tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan pembangunan yang dihadapi.

Akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan RKPD Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh pelaku pembangunan – dari tingkat nagari hingga kabupaten, dari sektor publik hingga privat – untuk bergotong royong dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Agam secara menyeluruh.

 **BUPATI AGAM**
BENNI WARLIS